



RKPD

Rencana Kerja
Pemerintah Daerah

2018

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2017



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD ini menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat berdasarkan acuan pada arah kebijakan pembangunan nasional yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.

Bab IV : Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Bab VI : Penutup.

- (4) Rincian uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melaksanakan RKPD ini.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 31

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	8
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	9
1.5 Maksud dan Tujuan	10
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI	11
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	11
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	11
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	11
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	14
2.1.1.3 Topografi	15
2.1.1.4 Geologi	17
2.1.1.5 Hidrologi	23
2.1.1.6 Klimatologi	26
2.1.1.7 Penggunaan Lahan	28
2.1.1.8 Peruntukan Lahan	33
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	35
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	36
2.1.4 Demografi	38
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	40
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	40
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	51
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	64
2.3 Aspek Pelayanan Umum	84
2.3.1 Fokus Urusan Konkuren Wajib	84
2.3.1.1 Urusan Pendidikan	84
2.3.1.2 Urusan Kesehatan	93
2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104

2.3.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	113
2.3.1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	116
2.3.1.6	Urusan Sosial	119
2.3.1.7	Urusan Tenaga Kerja.....	123
2.3.1.8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	133
2.3.1.9	Urusan Ketahanan Pangan	148
2.3.1.10	Urusan Pertanahan	156
2.3.1.11	Urusan Lingkungan Hidup.....	159
2.3.1.12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	174
2.3.1.13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..	177
2.3.1.14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	186
2.3.1.15	Urusan Perhubungan.....	193
2.3.1.16	Urusan Komunikasi dan Informatika	197
2.3.1.17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .	200
2.3.1.18	Urusan Penanaman Modal	201
2.3.1.19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	203
2.3.1.20	Urusan Statistik.....	206
2.3.1.21	Urusan Persandian	208
2.3.1.22	Urusan Kebudayaan	211
2.3.1.23	Urusan Perpustakaan	220
2.3.1.24	Urusan Kearsipan	226
2.3.2	Fokus Urusan Konkuren Pilihan	230
2.3.2.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	230
2.3.2.2	Urusan Pariwisata	234
2.3.2.3	Urusan Pertanian.....	237
2.3.2.4	Urusan Kehutanan	240
2.3.2.5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	243
2.3.2.6	Urusan Perdagangan.....	248
2.3.2.7	Urusan Perindustrian.....	250
2.3.2.8	Urusan Transmigrasi.....	252
2.3.3	Fokus Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan	255
2.3.3.1	Urusan Sekretariat Daerah.....	255
2.3.3.2	Urusan Sekretariat DPRD	257
2.3.3.3	Urusan Inspektorat.....	260
2.3.3.4	Urusan Perencanaan	263
2.3.3.5	Urusan Keuangan.....	265
2.3.3.6	Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan.....	268

	2.3.3.7	Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	269
2.4		Aspek Daya Saing Daerah	271
	2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	271
	2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	275
	2.4.2.1	Layanan Trans Jogja	276
	2.4.2.2	Penyediaan Fiber Optik.....	278
	2.4.2.3	Layanan Air Limbah Terpusat	279
	2.4.2.4	Layanan Air Minum	282
	2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	283
	2.4.3.1	Angka Kriminalitas.....	283
	2.4.3.2	Jumlah Demonstrasi.....	285
	2.4.3.3	Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha.....	285
	2.4.4	Fokus Sumberdaya Manusia.....	286
2.5		Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	288
2.6		Permasalahan Pembangunan.....	361
	2.6.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	361
	2.6.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	371
BAB 3		RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH	397
3.1		Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	397
	3.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi	397
	3.1.2	Struktur Sektor Ekonomi	399
	3.1.2.1	Struktur Perekonomian DIY berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.....	399
	3.1.2.2	Struktur Perekonomian DIY berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	399
	3.1.3	Struktur Pengeluaran dalam PDRB.....	403
	3.1.4	Inflasi.....	404
	3.1.5	ICOR	405
	3.1.6	Ketenagakerjaan	407
	3.1.6.1	Angka Beban Tanggungan (<i>dependency ratio</i>)	408
	3.1.6.2	Proyeksi Ketenagakerjaan	410
	3.1.7	Kemiskinan	412
	3.1.8	Ketimpangan Antar Wilayah	415
	3.1.9	Ketimpangan Pendapatan.....	417
3.2		Arah Kebijakan Keuangan Daerah	419
	3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	420
	3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	422
	3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	428

3.2.4	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	432
3.2.5	Strategi Keuangan Daerah	432
BAB 4	TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	437
4.1	Tema Pembangunan Daerah.....	437
4.1.1	Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018.....	437
4.1.2	RKPD Tahun 2018 Sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019	448
4.1.3	Penyelarasan Tema Pembangunan RKPD DIY Tahun 2018 dengan RKP Tahun 2018	450
4.1.4	Penyelarasan Tema Pembangunan RKPD Kab/Kota Tahun 2018 dengan RKPD DIY Tahun 2018.....	452
4.1.4.1	Sinkronisasi Tema Provinsi dan Sub Tema Kota Yogyakarta Tahun 2018.....	452
4.1.4.2	Sinkronisasi Tema Provinsi dan Sub Tema Kabupaten Sleman Tahun 2018	453
4.1.4.3	Sinkronisasi Tema Provinsi dan Sub Tema Kabupaten Bantul Tahun 2018.....	454
4.1.4.4	Sinkronisasi Tema Provinsi dan Sub Tema Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.....	455
4.1.4.5	Sinkronisasi Tema Provinsi dan Sub Tema Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.....	456
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	457
4.2.1	Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan DIY ..	457
4.2.2	Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional dan DIY ...	464
4.3	Prioritas Pembangunan Kewilayahan	467
4.3.1	Konektivitas Pembangunan Antar Wilayah.....	470
4.3.2	Pembangunan Koridor Ekonomi Strategis	473
4.3.3	Penanggulangan Kemiskinan.....	474
4.3.4	Penurunan Ketimpangan Wilayah	475
4.3.5	Kestabilan Daya Dukung Lingkungan	477
4.3.6	Tindak Lanjut Pembangunan <i>New Yogyakarta International Airport</i> , Kulon Progo	503
4.4	Pokok-pokok Pikiran DPRD.....	506
4.4.1	Tujuan Pokok-pokok Pikiran DPRD	508
4.4.2	Permasalahan Pembangunan DIY dari Sudut Pandang DPRD	508
4.4.3	Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD	515
BAB 5	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018	517
5.1	Arah Kebijakan Pembangunan	517

5.1.1	Kebijakan Mengatasi Ketimpangan Wilayah	517
5.1.2	Kebijakan Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.....	519
5.1.3	Kebijakan Mengantisipasi Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)	520
5.1.4	Kebijakan Pembiayaan Pembangunan	522
5.1.5	Kebijakan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial.....	523
5.2	Rencana Program dan Kegiatan.....	528
5.2.1	Rencana Program/Kegiatan Non Keistimewaan	528
5.2.2	Rencana Program/Kegiatan Keistimewaan	895
BAB 6	PENUTUP	943

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016	13
Tabel 2.2	Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis	14
Tabel 2.3	Pulau-pulau di wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY	14
Tabel 2.4	Potensi Ketersediaan Air Sampai Tahun 2011 (dalam juta m ³)	25
Tabel 2.5	Debit Rerata Sungai di DIY	25
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di DIY Tahun 2015	31
Tabel 2.7	Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk di DIY 1961-2010	39
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk di DIY 1961-2010	39
Tabel 2.9	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 2015-2018	40
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2010-2016	41
Tabel 2.11	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2012-2016.....	42
Tabel 2.12	Lima Kontribusi Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah September 2016.....	43
Tabel 2.13	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan DIY 2013-2016	44
Tabel 2.14	Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	44
Tabel 2.15	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (%)	46
Tabel 2.16	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (%)	46

Tabel 2.17	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2012 -2016, Menurut Harga Berlaku	49
Tabel 2.18	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016	49
Tabel 2.19	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2016.....	51
Tabel 2.20	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2010-2015.....	51
Tabel 2.21	Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2016	66
Tabel 2.22	Capaian Pemajuan Kebudayaan di DIY Tahun 2012-2016	66
Tabel 2.23	Nilai Adat dan Tradisi di DIY	69
Tabel 2.24	Klasifikasi Kelompok Seni, Tahun 2016	72
Tabel 2.25	Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY, Tahun 2016	72
Tabel 2.26	Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten Kota di DIY, Tahun 2016	73
Tabel 2.27	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, Tahun 2012-2016	74
Tabel 2.28	Kawasan Cagar Budaya	75
Tabel 2.29	Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tahun 2012-2016	76
Tabel 2.30	Klasifikasi Benda Cagar Budaya Hingga Tahun 2014.....	77
Tabel 2.31	Perbandingan Data Benda Cagar Budaya DIY dan Nasional, Tahun 2014	78
Tabel 2.32	Daftar Museum Anggota Bahramus di DIY.....	80
Tabel 2.33	Daftar Museum-Museum Baru di DIY	81
Tabel 2.34	Pemuda dan Olahraga di DIY, Tahun 2009-2016.....	83
Tabel 2.35	Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, Tahun 2012-2016	84
Tabel 2.36	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, POLINDES/ POSKESDES di DIY, Tahun 2015.....	94
Tabel 2.37	Perkembangan Jumlah Posyandu di DIY, Tahun 2013-2016	94
Tabel 2.38	Jumlah Rumah Sakit di DIY, Tahun 2015	95

Tabel 2.39	Capaian Kinerja Pelayanan di Beberapa Rumah Sakit di DIY, Tahun 2015	95
Tabel 2.40	Jumlah Tenaga Kesehatan di DIY, Tahun 2015	96
Tabel 2.41	Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penduduk di DIY, Tahun 2016	104
Tabel 2.42	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2016	106
Tabel 2.43	Daftar Ruas Jalan Provinsi Tahun 2016.....	106
Tabel 2.44	Daerah Irigasi di DIY	107
Tabel 2.45	Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Kota di DIY, Tahun 2016	109
Tabel 2.46	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik di DIY Tahun 2016	109
Tabel 2.47	Kondisi Pelayanan Persampahan di DIY, Tahun 2016	110
Tabel 2.48	Capaian Target RPJMD Bidang Urusan Penataan Ruang, Tahun 2016	113
Tabel 2.49	Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Kewenangan .	114
Tabel 2.50	Data Rumah Tidak Layak Huni di DIY, Tahun 2016.....	114
Tabel 2.51	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2012-2016	120
Tabel 2.52	Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2012-2016	121
Tabel 2.53	Nama Balai/ Panti Sosial dan Dayaampungnya, Tahun 2012-2016	122
Tabel 2.54	Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) di DIY, Tahun 2012-2016	124
Tabel 2.55	Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2014	126
Tabel 2.56	Tingkat Penangguran Terbuka di DIY Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014-2015	132
Tabel 2.57	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013-2015	133
Tabel 2.58	Data Klien Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2011-2016	134
Tabel 2.59	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian dan Lokasi Lembaga Layanan di DIY, Tahun 2014-2015	135

Tabel 2.60	Data Kasus Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan dan Frekuensi Kekerasan Tahun 2015	137
Tabel 2.61	Kebijakan-Kebijakan yang Dikeluarkan Pemerintah Dalam Isu Perlindungan	139
Tabel 2.62	Ketersediaan Sumberdaya Manusia Dalam Rangka Implementasi PPRG di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014	141
Tabel 2.63	Jumlah Pejabat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan SKPD Kabupaten/Kota dan Pemerintah DIY, Tahun 2014-2015	143
Tabel 2.64	Desa Prima di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.	145
Tabel 2.65	Anggota DPRD DIY dan Kabupaten Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin, Hasil Pemilu Tahun 2014	146
Tabel 2.66	Pembinaan Organisasi Perempuan di DIY Tahun 2016	147
Tabel 2.67	Status Mutu Air Sungai DIY dengan Metode Storet.....	160
Tabel 2.68	Hasil Perhitungan Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (SPU) Gabungan Parameter DIY, Tahun 2015	168
Tabel 2.69	Angka Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik	175
Tabel 2.70	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY	176
Tabel 2.71	Presentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di DIY, Tahun 2014-2015	177
Tabel 2.72	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan LPMD/LPMK di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2015.....	179
Tabel 2.73	Tim Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (TP PKK) DIY Tahun 2014-2016	181
Tabel 2.74	Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2014-2016.....	181
Tabel 2.75	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2014-2016...	183
Tabel 2.76	Desa Yang Telah Mempunyai Profil Tahun 2012-2016 ...	184
Tabel 2.77	Jumlah Posyandu Aktif di DIY Tahun 2014-2016	184
Tabel 2.78	Jumlah Partisipasi Keswadayaan Masyarakat Tahun 2016	185
Tabel 2.79	Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2010-2035	188
Tabel 2.80	Rasio Akseptor KB Tahun 2010-2025	190

Tabel 2.81	Pernikahan Dini Tahun 2015-2016	191
Tabel 2.82	Kondisi Terminal di DIY Tahun 2016.....	195
Tabel 2.83	Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2008- 2016	196
Tabel 2.84	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2012-2016.....	200
Tabel 2.85	Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2012-2016	201
Tabel 2.86	Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2012-2016	201
Tabel 2.87	Perkembangan Investasi di DIY	202
Tabel 2.88	Desa dan Kelurahan Budaya di DIY	216
Tabel 2.89	Perkembangan Organisasi dan Pelaku Seni di DIY Tahun 2012-2016	219
Tabel 2.90	Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2012-2016....	220
Tabel 2.91	Jumlah Perpustakaan Menurut Jenisnya.....	221
Tabel 2.92	Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota Hingga Tahun 2016.....	222
Tabel 2.93	Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2011-2016 .	222
Tabel 2.94	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah DIY	223
Tabel 2.95	Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2016.....	227
Tabel 2.96	Data Pengelolaan Arsip Statis Hingga Tahun 2016	228
Tabel 2.97	Data Alih Media Hingga Tahun 2016.....	228
Tabel 2.98	Data Arsip Inaktif Hingga Tahun 2016	229
Tabel 2.99	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2012-2016	235
Tabel 2.100	Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY	238
Tabel 2.101	Produksi Tanaman Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 (Ton).....	238
Tabel 2.102	Target dan Capaian Urusan Pertanian di DIY Tahun 2016	240
Tabel 2.103	Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2016	241
Tabel 2.104	Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY , Tahun 2012-2016	241

Tabel 2.105	Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY, tahun 2012-2016	242
Tabel 2.106	Data Jenis Energi Baru Terbarukan.....	245
Tabel 2.107	Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2012-2016	248
Tabel 2.108	Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2012-2016	249
Tabel 2.109	Perkembangan Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Per Kabupaten Kota, Tahun 2012-2016.....	249
Tabel 2.110	Perkembangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Berdasarkan Bentuk Perusahaan, Tahun 2012-2016	249
Tabel 2.111	Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2012-2016	250
Tabel 2.112	Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2012-2016	251
Tabel 2.113	Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2012-2016	253
Tabel 2.114	Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2011-2016	253
Tabel 2.115	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2013-2016.....	254
Tabel 2.116	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat DPRD di DIY, Tahun 2013-3016	259
Tabel 2.117	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, Tahun 2011-2015	271
Tabel 2.118	Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di DIY, Tahun 2011-2015	272
Tabel 2.119	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2010-2015.....	273
Tabel 2.120	Jumlah <i>Load Factor</i> dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja 2009-2014	277
Tabel 2.121	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan	283
Tabel 2.122	Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan	284
Tabel 2.123	Persentase Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan....	284
Tabel 2.124	Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk di DIY	284
Tabel 2.125	Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2011-2015	285

Tabel 2.126	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 dan PK Tahun 2017.....	290
Tabel 2.127	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016	292
Tabel 3.1	Perkembangan Nilai PDRB DIY ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013-2016 (juta rupiah)	397
Tabel 3.2	Distribusi Persentase PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2011-2015 (Persen)	399
Tabel 3.3	Perkembangan Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2011-2015.....	400
Tabel 3.4	Distribusi Persentase PDRB DIY Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2011-2015 (Persen)	403
Tabel 3.5	Tingkat Inflasi di DIY, Tahun 2011-2016 (Persen)	404
Tabel 3.6	Proyeksi Jumlah Penduduk Bekerja di DIY DIY, Tahun 2017-2022	410
Tabel 3.7	Proyeksi Ketenagaan DIY Tahun 2017-2022	411
Tabel 3.8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2015 – September 2016	414
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Indeks Gini DIY Tahun 2014-2016..	417
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2016-2018	420
Tabel 4.1	Prioritas Nasional dan Prioritas RKP Tahun 2018	458
Tabel 4.2	Interkoneksi Nawa Cita dengan Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2018	462
Tabel 4.3	Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2018.....	463
Tabel 4.4	Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW DIY Tahun 2009-2029	488
Tabel 5.1	Prioritas, Sasaran, Program, dan Jumlah Anggaran Non Keistimewaan.....	528
Tabel 5.2	Prioritas, Sasaran, Program, dan Jumlah Anggaran Keistimewaan.....	895

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY ...6
Gambar 1.2	Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD.....9
Gambar 2.1	Peta Daerah Istimewa Yogyakarta..... 12
Gambar 2.2	Komposisi Luas Wilayah DIY 13
Gambar 2.3	Peta Satuan Fisiografis DIY..... 17
Gambar 2.4	Peta Geologi DIY 20
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah DIY 22
Gambar 2.6	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di DIY 23
Gambar 2.7	Peta Daerah Aliran Sungai DIY..... 24
Gambar 2.8	Peta Iklim di DIY 28
Gambar 2.9	Peta Pola Ruang DIY 29
Gambar 2.10	Grafik Penggunaan Lahan di DIY, Tahun 2014-2015 30
Gambar 2.11	Peta Penggunaan Lahan di DIY..... 32
Gambar 2.12	Peta Tutupan Lahan DIY Berdasarkan RTRW 2009-2029 .. 33
Gambar 2.13	Peta Peruntukan Lahan DIY 34
Gambar 2.14	Peta Kawasan Rawan Bencana di DIY 38
Gambar 2.15	Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2010-2016 42
Gambar 2.16	Pertumbuhan PDRB DIY, Tahun 2011-2016..... 45
Gambar 2.17	Rasio Gini di DIY, Tahun 2011-2015..... 47
Gambar 2.18	Indeks Williamson DIY Tahun 2011-2015 48
Gambar 2.19	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional 50
Gambar 2.20	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten Kota se DIY Tahun 2014-2015 52

Gambar 2.21	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DIY, Tahun 2010-2015	53
Gambar 2.22	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2014-2015	54
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015	55
Gambar 2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2010-2015	56
Gambar 2.25	Capaian IPM Per Jenjang Pendidikan Per Kabupaten Kota di DIY Tahun 2015	57
Gambar 2.26	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) DIY, Tahun 2008-2015	58
Gambar 2.27	Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di DIY Tahun 2011-2015	59
Gambar 2.28	Penyebab Kematian Ibu di DIY, Tahun 2015	60
Gambar 2.29	Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di DIY Tahun 2011-2015	61
Gambar 2.30	Perbandingan Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Antar Provinsi 2012	62
Gambar 2.31	Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di DIY, Tahun 2011-2015	63
Gambar 2.32	Prevelansi Balita Kekurangan Gizi di DIY, tahun 2011-2015	64
Gambar 2.33	Capaian IKU Gubernur Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	67
Gambar 2.34	APK DIY 2010-2015	87
Gambar 2.35	APM DIY 2010-2015	88
Gambar 2.36	Capaian Nilai APM Per Kabupaten Kota Tahun 2015	89
Gambar 2.37	RLS 2010-2015 DIY dan Nasional	91
Gambar 2.38	RLS Per Kabupaten Kota Tahun 2015	91
Gambar 2.39	AMH 2005-2015 Berdasarkan Kelompok Usia	93
Gambar 2.40	Perkembangan Capaian K1 dan K4 DIY, Tahun 2013-2015	97
Gambar 2.41	Perkembangan Pertolongan Persalinan di DIY, Tahun 2013-2015	98

Gambar 2.42	Perkembangan Persentase Capaian KN-1 dan KN-L, Tahun 2011-2015	99
Gambar 2.43	Jumlah Kasus Persalinan Usia Remaja di DIY, Tahun 2015	100
Gambar 2.44	Grafik Kecenderungan Prevalensi Beberapa Penyakit Tidak Menular Berdasarkan Riskeda Tahun 2013.....	102
Gambar 2.45	Kasus HIV AIDS berdasarkan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2015.....	103
Gambar 2.46	Perkembangan IDI DIY, Tahun 2009-2015	117
Gambar 2.47	Perkembangan Indeks Aspek IDI DIY, Tahun 2009-2015	118
Gambar 2.48	Grafik Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan, Bulan Februari 2016	125
Gambar 2.49	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2016	127
Gambar 2.50	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa, Tahun 2016.....	127
Gambar 2.51	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2015.....	128
Gambar 2.52	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kelompok Umur, Tahun 2011-2015.....	129
Gambar 2.53	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2011-2014.....	130
Gambar 2.54	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional, Tahun 2011-2016 (%)	131
Gambar 2.55	Data Penanganan Kasus Kekerasan Anak.....	138
Gambar 2.56	Jumlah Pekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2015.....	144
Gambar 2.57	Pangan Lokal di DIY	148
Gambar 2.58	Grafik Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (dalam ton), Tahun 2012-2016	149
Gambar 2.59	Ketersediaan Pangan Per Kapita	150
Gambar 2.60	Grafik Produksi Telur Unggas Tahun 2011-2015 (dalam ribuan)	151
Gambar 2.61	Grafik Produksi Daging Ayam Tahun 2011-2015 (dalam ribuan)	151

Gambar 2.62	Grafik Jumlah Ketersediaan Energi di DIY Tahun 2012-2016	152
Gambar 2.63	Grafik Ketersediaan Protein di DIY Tahun 2012-2016	152
Gambar 2.64	Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2012-2016 ...	153
Gambar 2.65	Grafik Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2012-2016.....	154
Gambar 2.66	Grafik Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2012-2016.....	155
Gambar 2.67	Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2012-2016	155
Gambar 2.68	Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI.....	188
Gambar 2.69	Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2035.....	189
Gambar 2.70	Perkembangan <i>Unmet Need</i> KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2014-2015	193
Gambar 2.71	Presentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2016 per Kabupaten Kota	203
Gambar 2.72	Pembentukan Sentra Pemuda DIY 2012-2017.....	205
Gambar 2.73	Persebaran Museum di DIY.....	214
Gambar 2.74	Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2012-2016	230
Gambar 2.75	Tingkat Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2012-2016	231
Gambar 2.76	Pemanfaatan Embung untuk Budidaya Perikanan.....	231
Gambar 2.77	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya DIY (Ton), Tahun 2012-2016	233
Gambar 2.78	Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2012-2016	234
Gambar 2.79	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan DTW di DIY, Tahun 2012-2016	235
Gambar 2.80	Sebaran Pengunjung ODTW di Kabupaten Kota Tahun 2015	236
Gambar 2.81	Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY	237
Gambar 2.82	Proporsi Produksi Holtikultura di DIY Tahun 2016.....	239
Gambar 2.83	Grafik Proporsi Produksi Perkebunan DIY Tahun 2016....	243

Gambar 2.84	Perkembangan IKM Industri Kreatif di DIY, Tahun 2012-2016	251
Gambar 2.85	Pertumbuhan Belanja Pemda DIY, Tahun 2014-2016	266
Gambar 2.86	Nilai Tukar Petani DIY, Tahun 2012-2016.....	274
Gambar 2.87	Nilai Tukar Petani DIY Per Sub Sektor , Tahun 2015-2016	275
Gambar 2.88	Konsep Buy The Service	276
Gambar 2.89	Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY	279
Gambar 2.90	Jumlah Layanan Pengolahan Air Limbah Terpusat Per Kecamatan	280
Gambar 2.91	Peta Layanan Limbah Lateral Per Kecamatan di KPY.....	281
Gambar 2.92	Presentase Angkatan Kerja DIY Berdasarkan Pendidikan, Februari 2016.....	287
Gambar 2.93	Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Non Produktif Terhadap Penduduk Usia Produktif, Tahun 2010-2015 ...	288
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2011-2020 (%)..	398
Gambar 3.2	Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2017-2022 (%)	405
Gambar 3.3	Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, Tahun 2012-2016	406
Gambar 3.4	Proyeksi ICOR DIY, Tahun 2017-2022 (juta rupiah)	407
Gambar 3.5	Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2010-2015	409
Gambar 3.6	Proyeksi Jumlah Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2017-2022 (orang)	411
Gambar 3.7	Jumlah Penduduk Miskin di DIY Maret 2011 – September 2016 (dalam ribuan orang)	412
Gambar 3.8	Persentase Penduduk Miskin di DIY Maret 2011 – September 2016	413
Gambar 3.9	Proyeksi Kemiskinan DIY Tahun 2017-2022 (%)	415
Gambar 3.10	Indeks Williamson DIY, Tahun 2008-2016	416
Gambar 3.11	Proyeksi Indeks Williamson DIY, Tahun 2017-2022	417
Gambar 3.12	Grafik Perkembangan Indeks Gini di DIY Tahun 2011-2016	418
Gambar 3.13	Proyeksi Indeks Gini di DIY Tahun 2017-2022	419
Gambar 3.14	Peta Sebaran Pembangunan Infrastruktur DIY	433

Gambar 4.1	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2018 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2017-2022	438
Gambar 4.2	Tema RKP 2018 – Tema RKPD DIY 2018, dan Tema RKPD Kabupaten Kota Sebagai Upaya Penyelarasan.....	451
Gambar 4.3	Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKP Tahun 2018	452
Gambar 4.4	Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018	453
Gambar 4.5	Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018.....	454
Gambar 4.6	Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2018.....	455
Gambar 4.7	Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.....	456
Gambar 4.8	Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018	457
Gambar 4.9	Konektivitas Pusat dan Sub Pusat Pertumbuhan.	472
Gambar 4.10	Peta Pengembangan Koridor Ekonomi Strategis.....	473
Gambar 4.11	Nilai Skor dan Indeks MPI Tahun 2014.....	474
Gambar 4.12	Dasar Pemikiran Penurunan Ketimpangan Wilayah.....	477
Gambar 4.13	Dukungan Lingkungan dalam Pembangunan	479
Gambar 4.14	Hubungan Kemampuan Sumber Daya Lahan, Daya Dukung, Kesesuaian, Kemanfaatan dan Kelayakan Pembangunan.....	481
Gambar 4.15	Peta Ekoregion DIY	484
Gambar 4.16	Peta Penutup Lahan DIY Tahun 2016.....	486
Gambar 4.17	Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur DIY, dan Menteri terkait melaksanakan “Babat Alas Nawung Krida” yang mengawali Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (2017)	503
Gambar 4.18	Program/ Kegiatan Lintas Sektor Merespon Pembangunan Bandara Baru <i>New Yogyakarta International Airport</i>	506
Gambar 4.19	Skema Perencanaan Pembangunan Menurut Permendagri 54 Tahun 2010	507

Gambar 5.1	Skema Pencapaian Tema Pembangunan melalui Tematik Pembangunan Tahun 2018	517
Gambar 5.2	Skema Kebijakan Penurunan Ketimpangan Wilayah Tahun 2018	518
Gambar 5.3	Skema Penanggulangan Kemiskinan Lintas Sektor	520
Gambar 5.4	Skema Prioritas Persiapan Bandara Baru NYIA Tahun 2018	522
Gambar 5.5	Skema Pendekatan Pembangunan DIY “Among Tani Dagang Layar”	523
Gambar 5.6	Skema Pendekatan “Segoro Amarto”	524
Gambar 5.7	Alokasi Pembangunan Guna Mendukung NYIA.....	525
Gambar 5.8	Pembagian Pembiayaan APBN-APBD Tematik Kemiskinan	526
Gambar 5.9	Pembagian Pembiayaan APBN-APBD Tematik Ketimpangan Wilayah	527
Gambar 5.10	Pembagian Pembiayaan APBN-APBD Tematik Dukungan NYIA	527

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis.

Khusus untuk DIY, pembangunan juga mengacu pada semangat *renaissance* dan mengakomodir pelaksanaan urusan keistimewaan dengan membawa filosofi yang mendasari pembangunan DIY yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*. Filosofi itu adalah cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Lebih lanjut lagi, pembangunan DIY juga membawa mandat pelaksanaan

keistimewaan DIY yang tertuang dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengacu visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. RKPD 2018 merupakan tahun awal dari RPJMD 2018 – 2022, dikaitkan dengan tahapan pembangunan jangka panjang berada pada tahapan lima tahun ketiga dari RPJP dengan penekanan pada pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.

Seperti halnya dengan daerah lain, DIY juga menghadapi kompleksitas permasalahan di berbagai sektor dan kepentingan, di samping itu DIY juga harus mewujudkan cita-cita akhir pembangunan yang harus dicapai yaitu berkarakter, berbudaya, maju, dan makmur. Oleh karenanya proses pembangunan membutuhkan suatu landasan pemikiran yang komprehensif untuk meraih peluang dan tantangan yang ada dimana landasan ini mampu memetakan kerangka permasalahan secara jelas dan terukur dan juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di tengah kompleksitas.

Terkait dengan input pembangunan, proses pembangunan juga mempertimbangkan optimalisasi sumber daya-sumber daya yang dimiliki daerah dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat dan daerah setempat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Hal-hal tersebut telah menjadi tantangan yang harus diantisipasi di setiap proses pembangunan. Tantangan tersebut menuntut proses pembangunan di DI Yogyakarta untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebuah agenda pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat dan sektor di dalam DI Yogyakarta. Lebih lanjut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (2012) dalam rangka menyongsong peradaban baru perlu kebijakan konkret untuk melaksanakan pembangunan yang fokus, terarah, dan efektif melalui prioritas sektor yang dijelaskan di 9 bidang strategis dalam Arah Kebijakan Renaisans Yogyakarta. Prioritas Renaisans Yogyakarta terdiri dari: (1) Pendidikan, (2) Pariwisata, (3) Teknologi, (4) Ekonomi, (5) Energi, (6) Pangan, (7) Kesehatan, (8) Keterlindungan Warga, dan (9) Tata Ruang dan Lingkungan. Kesembilan sektor ini akan menjadi prioritas pembangunan dengan berpegang kepada Budaya Sebagai Payung dan Arus Utama dalam Pembangunan.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat kedudukan strategis RKPD, perhatian yang besar dan komprehensif seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD mengingat pentingnya RKPD secara strategis dalam keseluruhan tahap pembangunan daerah. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen RKPD disusun melalui proses bertahap selama kurang lebih empat bulan dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil

verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum SKPD. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara SKPD, Bappeda DIY dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKP.

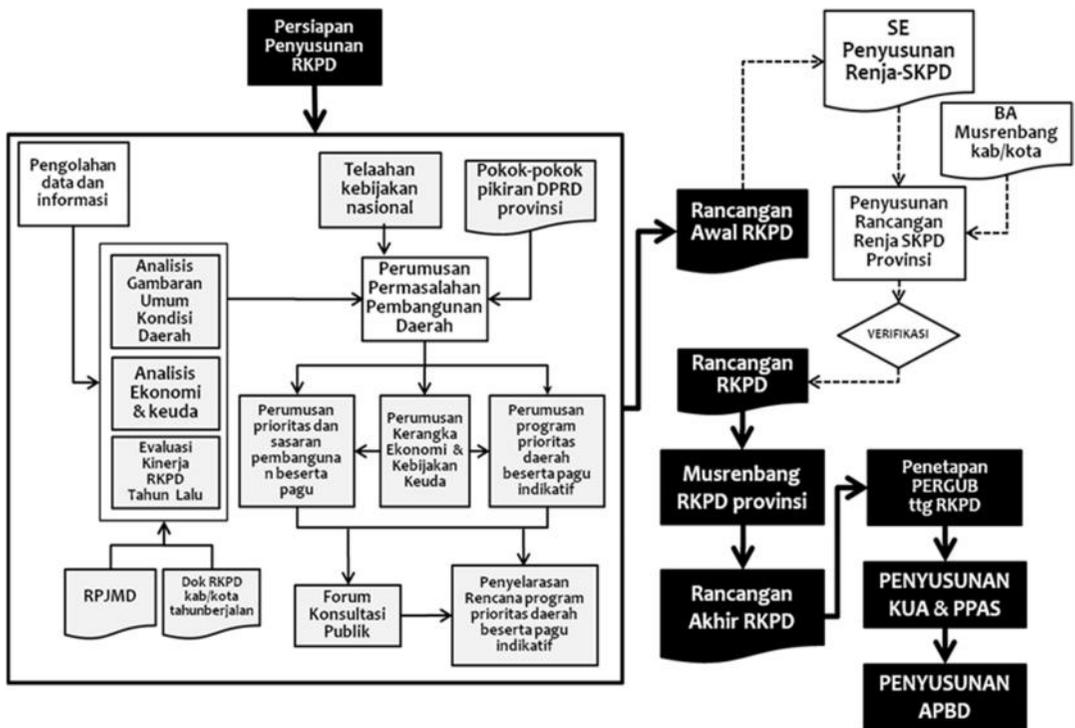
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

Rancangan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Penyusunan RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke-1 atau tahun pertama dari RPJMD DIY 2018 - 2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.



Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2018 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

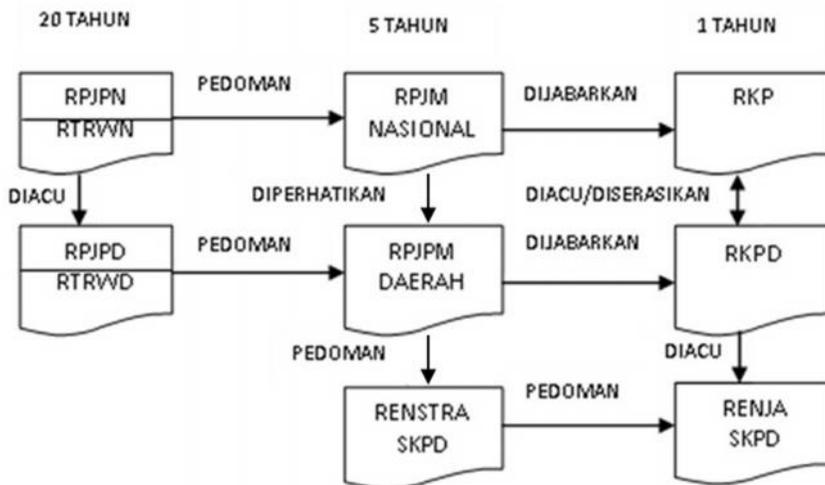
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang no 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY;

21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Gambar 1.2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan peralihan antara periode RPJMD 2012 – 2017 dan RPJMD 2017 – 2022. Sebagai tahapan tahun kedua RPJMD 2017 – 2022, penyusunan RKPD tahun 2018 dilaksanakan dengan mengakomodir upaya penyelarasan materi awal RPJMD 2017 – 2022 dengan menyesuaikan konten RKPD tahun 2018 dengan dokumen *background study* RPJMD terkait. Penyelarasan ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga keselarasan RKPD tahun 2018 dengan calon dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dijabarkan.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
4. Bab IV Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

1.5 Maksud dan Tujuan

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/ Kantor Wilayah/ Lembaga Teknis Daerah/ Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2018.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

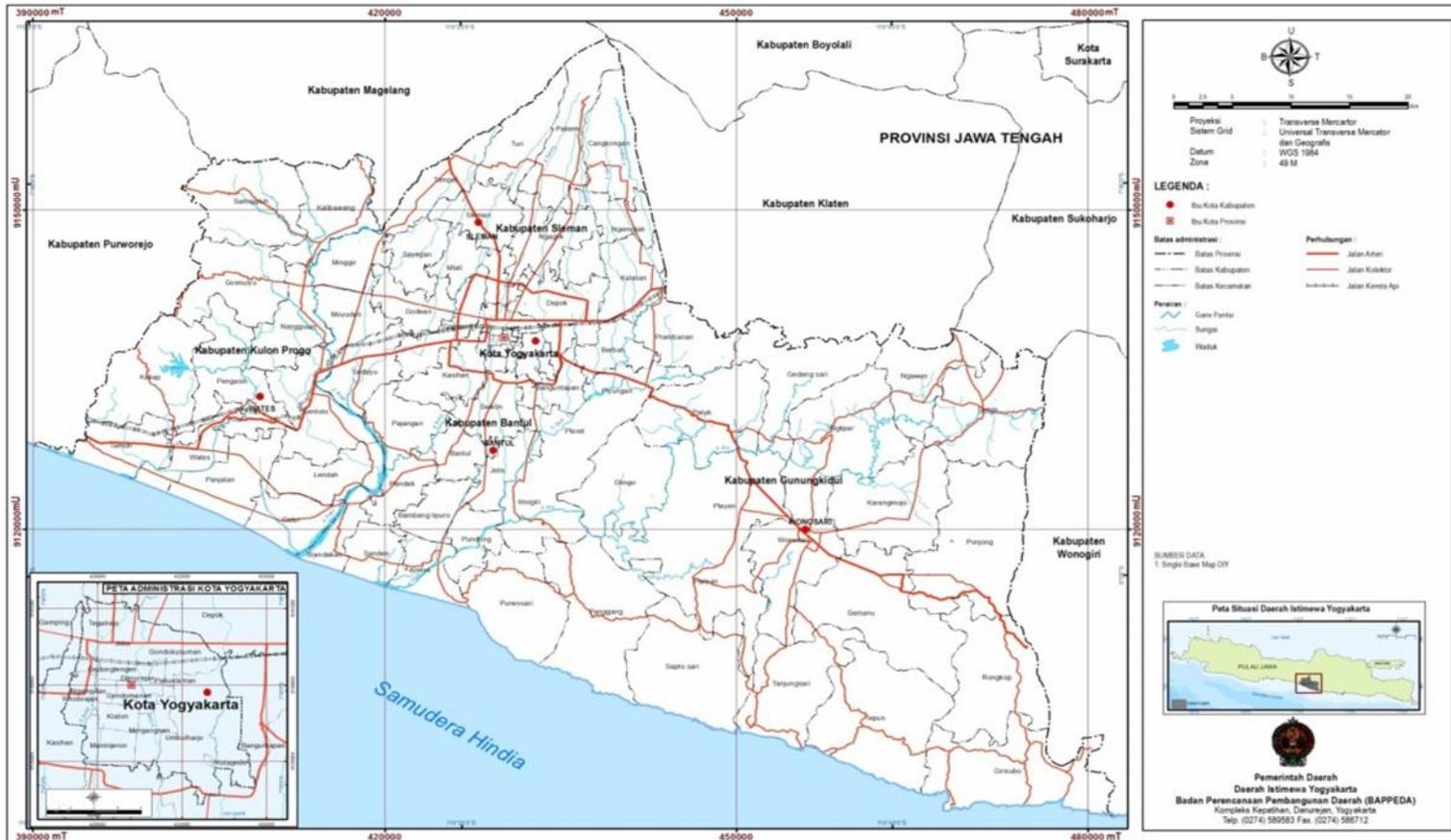
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di bagian tengah selatan Pulau Jawa.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi DIY memiliki batas-batas:

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Bappeda DIY

Gambar 2.1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara administratif, DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

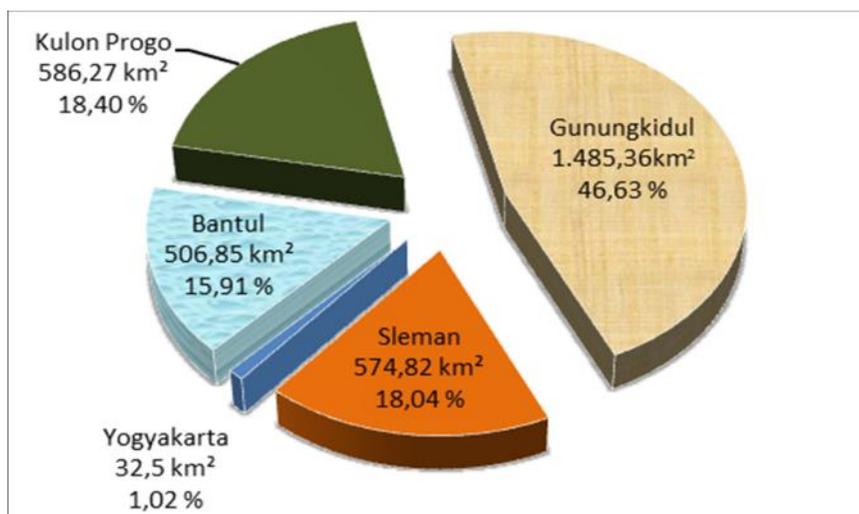
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
Kulonprogo	Wates	12	88
Bantul	Bantul	17	75
Gunungkidul	Wonosari	18	144
Sleman	Sleman	17	86
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
DIY	Yogyakarta	78	438

Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

- Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km² (18,40 persen)
- Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 persen)
- Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen)
- Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 persen)
- Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02 persen)

Wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02% dengan rincian pembagian proporsi luas wilayah seperti ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2016

Gambar 2.2 Komposisi Luas Wilayah DIY

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

DIY secara astronomis terletak antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Sementara itu dilihat dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa Bagian Selatan.

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis

Kabupaten/Kota	Pesisir	Bukan Pesisir			Jumlah
		Lembah/ Daerah Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran	
Kulon Progo	10	-	22	56	88
Bantul	5	-	11	59	75
Gunungkidul	18	-	56	70	144
Sleman	-	-	11	75	86
Yogyakarta	-	-	-	45	45
DIY	33	0	100	305	438

Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2016

Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan, hal ini menjadikan DIY berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIY memiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah DIY tersebut disajikan seperti dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Pulau-pulau di wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpina Lawang
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayungsiratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang
		Tepus	Timang

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
		Purwodadi	Ngondo Watupayungsiyung Watupanjang Watunglambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek
5	Girisubo	Jepitu	Watutogog Jungwok Watutopi Ngusalan
		Tileng	Kalong Amben
		Pucung	Watugrek
		Songbanyu	Gungunggandul Godeg Baron Layar Krokoh

2.1.1.3 Topografi

Topografi umumnya menampilkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identitas jenis lahan. Relief adalah bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan atau ditentukan berdasarkan perbedaan ketinggian (*amplitude*) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (*landform*). Sedang topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (*landform*) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng.

Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan. Penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Kemiringan lahan

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

b. Ketinggian lahan

Luas wilayah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terbagi kedalam beberapa karakter topografis. Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang

dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.

DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

- Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
- Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80–2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;
- Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Sumber :Bappeda DIY, Tahun 2014

Gambar 2.3 Peta Satuan Fisiografis DIY

2.1.1.4 Geologi

Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000 tahun 1977. Formasi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (TmPk), Formasi Wonosari - Punung (Tmwl), Formasi Sentolo (TmPs), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tmss), Formasi Semilir (Tms), Formasi Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm) (lihat Gambar 2.4).

Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (TmPk). Patahan berupa sesar turun dengan pola *antithetic fault block*, terdapat antara lain pada terban Bantul.

a. Aluvium (Qa)

Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari

bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal.

Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.

- b. Formasi Gunungapi Merapi (Qvm)
Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.
- c. Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo)
Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.
- d. Formasi Kepek (TmPk)
Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.
- e. Formasi Wonosari-Punung (TmWl)
Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan. Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batugamping terumbu karal dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Karakteristik yang tersusun dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memiliki karakteristik mudah meloloskan air.
- f. Formasi Sentolo (TmPs)
Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari dari batugamping dan batupasir napalan.
- g. Formasi Oyo (TmO)
Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun

Formasi ni terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.

h. Formasi Sambipitu (Tmss)

Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batulempung.

i. Formasi Semilir (Tms)

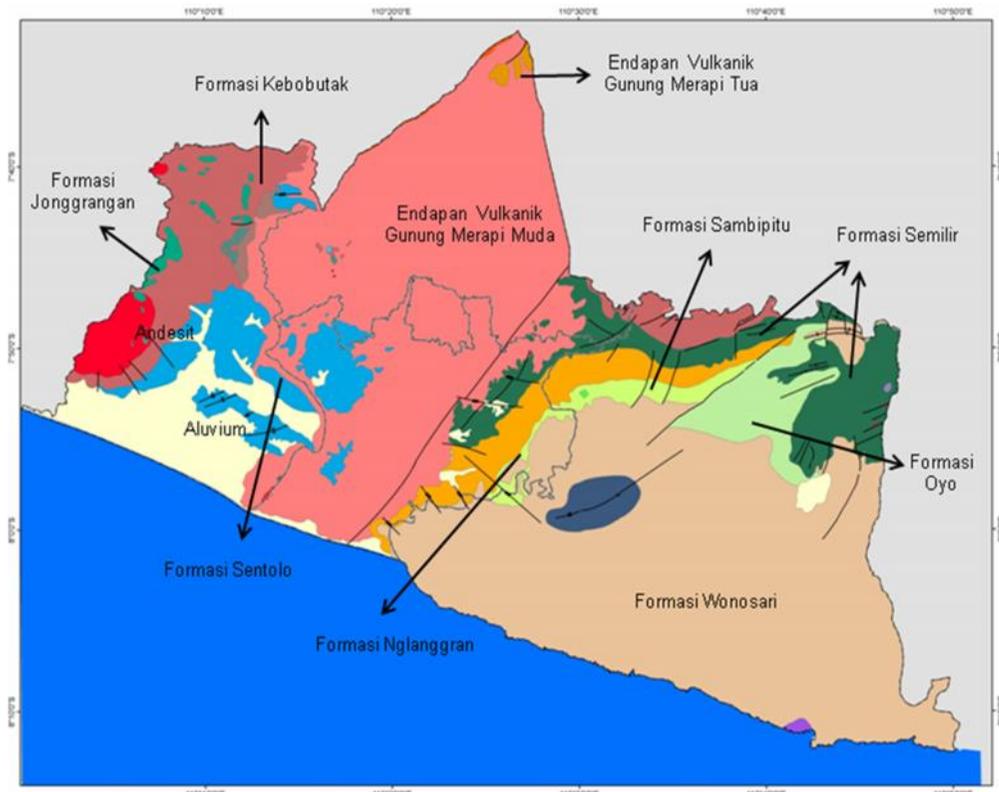
Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batulempung tufaan.

j. Formasi Kebo-Butak (Tomk)

Formasi Kebo-Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini tersusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batupasir dan batu lempung andesit di bagian atasnya.

Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batu lanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.



Sumber :Bappeda DIY, Tahun 2014

Gambar 2.4 Peta Geologi DIY

Tanah merupakan lapisan teratas dari bumi yang terbentuk dari bebatuan yang mengalami pelapukan. Proses pelapukan terjadi dalam kurun waktu yang lama dengan dibantu beberapa mikroorganisme, perubahan suhu dan air. Jenis tanah di setiap daerah bisa saja berbeda, tergantung dari jenis batuan dan proses pelapukan yang dialami batuan tersebut. Jenis tanah akan mempengaruhi jenis pemanfaatannya oleh manusia. Secara umum tanah di DIY didominasi 2 jenis tanah yaitu tanah mediteran dan tanah lathosol, dimana kedua jenis tanah tersebut merupakan tanah yang kurang subur. Berikut jenis tanah yang ada di wilayah DIY beserta komposisi luasnya:

- Tanah Mediteran, seluas 114.509,45 atau 36,04% dari luas seluruh wilayah DIY dan mendominasi di Kabupaten Gunungkidul, merupakan tanah hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen, dengan cirri-ciri warna putih kecoklatan, keras dan tidak subur. Pemanfaatan jenis tanah ini cocok untuk tegalan dan ditanami vegetasi kuat seperti pohon jati.

- Tanah Lathosol, adalah tanah yang terbentuk dari batuan beku, sedimen, dan metafomorf. Tanah latosol merupakan jenis tanah yang telah berkembang atau terjadi deferensiasi horison, solum dalam, tekstur lempung, warna coklat, merah hingga kuning, tersebar di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 3000 mm/tahun, ketinggian tempat berkisar antara 300-1000 meter di atas permukaan laut, mudah menyerap air, memiliki pH 6 – 7 (netral) hingga asam, memiliki zat fosfat yang mudah bersenyawa dengan unsur besi dan aluminium, kadar humusnya mudah menurun. Dengan demikian, tanah lathosol secara umum sudah tidak subur sehingga tidak cocok untuk ditanami tanaman. Jenis tanah lathosol di DIY tersebar di bagian barat Kabupaten Kulon Progo, bagian utara Kabupaten Gunungkidul, dan bagian timur – utara Kabupaten Bantul seluas 67.569,93 Ha atau 21,26 % dari luas seluruh wilayah DIY.
- Tanah Regosol, adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Di wilayah DIY, tanah regosol berada di dataran lereng Gunung Api Merapi seluas 52.427,79 Ha atau sekitar 16,50 % dari luas seluruh wilayah DIY.
- Tanah Grumusol, seluas 40.754,39 Ha atau 12,83% dari luas seluruh wilayah DIY dan terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik. Tekstur tanahnya kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau dan memiliki warna hitam. Ph yang dimiliki netral hingga alkalis. Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih dari 300 meter dari permukaan laut dan memiliki bentuk topografi datar hingga bergelombang. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur sehingga tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman pertanian. Jenis tanah cocok untuk ditanami vegetasi kuat seperti pohon jati.
- Tanah Kambisol, seluas 30.438,15 Ha atau 9,58 % dari luas seluruh DIY dan sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Bantul, merupakan tanah lain yang mempunyai horison B kambik tanpa atau dengan horison A okrik, umbrik atau molik, tanpa memperlihatkan gejala hidromorfik di dalam penampang 50 cm dari permukaan. Nama kambisol berasal dari “kambik” yang berarti berubah atau horison bawah permukaan kambik dan “solum” yang berarti tanah. Ciri-ciri utama horison kambik adalah memiliki tekstur berupa pasir bergeluh halus atau pasir bergeluh sangat halus atau pasir sangat halus, mempunyai kandungan Bahan

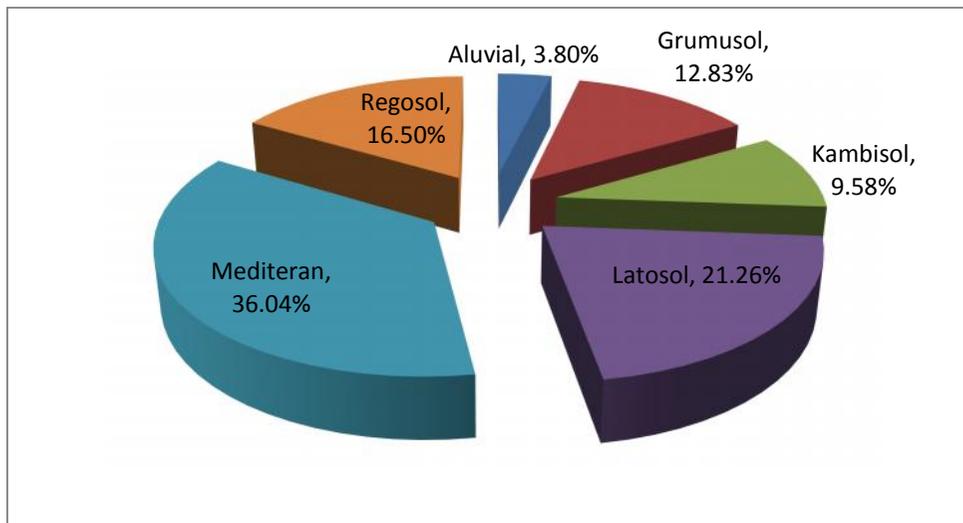
Organik rendah, dan tidak mempunyai struktur histik, mollik, dan umbrik.

- Tanah alluvial, merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur biasanya yang terbawa karena aliran sungai, berwarna coklat hingga kelabu, dan sangat subur serta cocok untuk pertanian. Jenis tanah aluvial di DIY berada di Kabupaten Kulon Progo bagian selatan seluas 12.071,75 Ha atau 3.80% dari luas seluruh wilayah DIY.



Sumber : RTRW DIY

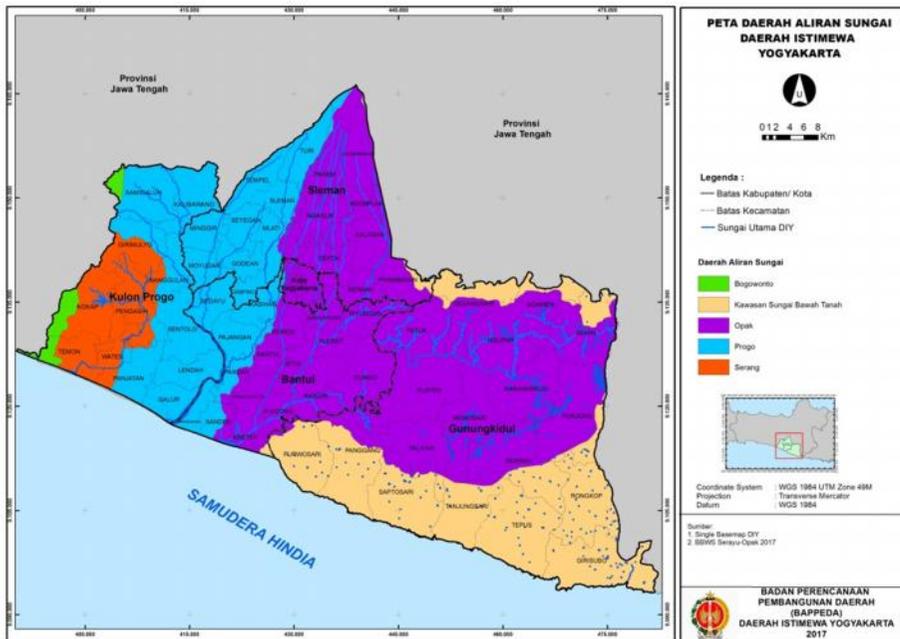
Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah DIY



Gambar 2.6 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di DIY

2.1.1.5 Hidrologi

Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 4 DAS, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan sedikit DAS Bogowonto. Hanya DAS Serang saja yang seluruh wilayahnya berada di DIY sedangkan DAS lainnya sebagian wilayahnya terutama bagian hulunya berada di Provinsi Jawa Tengah. Terminologi DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Peta pembagian DAS ini dapat dilihat pada Gambar Peta Aliran Sungai dibawah ini



Sumber : Analisis; BAPPEDA 2017

Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai DIY

DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia melalui wilayah Kab. Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah :

- a) DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.
- b) DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- c) DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekikjamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat dari kondisi aquifer yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, aquifer di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) aquifer, yaitu :

- *Mayor Aquifer*, dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah mayor aquifer adalah: Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.
- *Minor aquifer*, dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah *minor aquifer* : Formasi Wates, Gumuk pasir
- *Poor aquifer*, dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesite tua.
- *Non aquifer*, dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah : Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggran, serta Formasi Nanggulan.

Tabel 2.4 Potensi Ketersediaan Air Sampai Tahun 2011 (dalam juta m³)

DAS	DAS Serang	DAS Progo	DAS Opak	DAS Oyo	DTA Karst
Volume Air Permukaan	311,59	3.964,59	610,48	1.455,37	1.478,18
Volume Air Tanah	51,12	458,12	432,01	2.224,41	1.013,73
Potensi Sumberdaya Air	362,70	4.422,71	1.042,49	3.679,78	2.491,91

Sumber: NSAD, Bappeda DIY, 2012

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2.5 Debit Rerata Sungai di DIY

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m ³ /det)					
	2012		2013		2014	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Sungai Progo (Duwet)	0,37	292,49	1,26	148,45	0,03	120,83
Sungai Bedog (Guwosari)	1,82	33,75	2,66	12,71	1,75	10,36
Sungai Code (Kaloran)	0,79	13,32	1,09	3,71	0,99	2,76
Sungai Winongo (Padokan)	0,07	11,96	0,21	5,01	0,26	4,59
Sungai Gadjahwong	0,17	11,71	0,43	2,67	0,26	2,48

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m ³ /det)					
	2012		2013		2014	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
(Papringan)						
Sungai Opak (Pulo)	0,002	3,93	0,02	0,89	0,05	0,74

Sumber: Bidang SDA, Dinas PUP ESDM 2014

Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk SBT Bribin sebesar 0,95 m³/det, SBT Ngobaran 0,70 m³/det, SBT Seropan 0,80 m³/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m³/det.

Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan CAT yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1200 km², yang meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Perhitungan volume resapan air tanah yang dilakukan melalui rumusan kesetimbangan air dan pengukuran fluktuasi muka airtanah mendapatkan bahwa volume imbuhan air di cekungan ini mencapai 443 juta m³ /tahun. Perhitungan volume air dalam akuifer mendapatkan bahwa 3,5 milyar m³ air terkandung dalam akuifer. Hal ini menunjukkan bahwa, pada musim kemarau yang panjang eksploitasi terhadap airtanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air.

Total ketersediaan air di DIY adalah 11.999.000,58m³/tahundan pemanfaatannya untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian sebanyak 1.672.000,98 m³/tahun. (*Neraca Sumber Daya Alam Daerah DIY; 2012*)

Dalam rangka keperluan aktivitas pertanian, pemenuhan kebutuhan air irigasi juga dilaksanakan dengan memanfaatkan air tanah dalam atau sumur bor atau dikenal dengan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat pada 95 jaringan irigasi air tanah, Kabupaten Gunungkidul 51 buah dan Kabupaten Sleman 44 buah. (*Dinas PUP PSDM, 2012*)

2.1.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim merupakan suatu potensi sangat berpengaruh pada daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu Angin musim barat daya (Muson Barat) dan Angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga

April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia, terjadi banyak penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Deskripsi klimatologi DIY yang diuraikan berupa curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin. Parameter iklim ini sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Menurut Catatan Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika, stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, dalam buku DDA 2016 yang diterbitkan oleh BPS, pada Tahun 2015 suhu udara rata-rata di DIY menunjukkan angka 26,65°C, dengan suhu minimum 20°C dan suhu maksimum 33,3°C.

Curah hujan sebagai input air ke permukaan bumi membawa akibat pada variasi potensi hidrologi daerah bersangkutan, sehingga uraian hidrologi daerah tidak boleh dipisahkan dengan kondisi klimatologisnya, terutama dengan curah hujan. Rata-rata minimum curah hujan per bulan 0 mm dan rata-rata maksimum curah hujan per bulan 628 mm, dengan rata-rata minimum hari hujan per bulan 1 kali dan rata-rata maksimum hari hujan per bulan 24 kali.

Untuk kelembaban udara tercatat rata-rata minimum 48% dan rata-rata maksimum 97%. Tekanan udara minimum 996,3 mb tercatat di bulan April dan maksimum 1000,6 mb tercatat di bulan Januari, arah angin terbanyak adalah Angin Barat Daya dengan kecepatan angin rata-rata 0,1 – 5,4 knot.

Berikut Peta iklim yang menunjukkan kondisi iklim di wilayah DIY yang terbagi menjadi agak basah, sedang dan agak kering

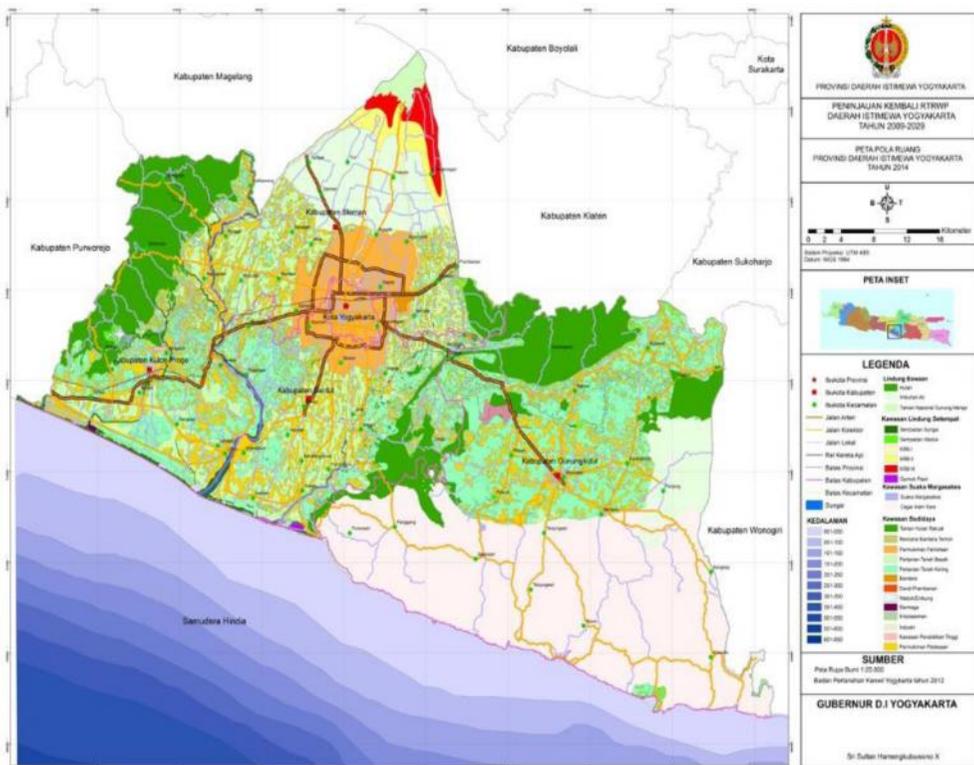


Sumber : Bappeda DIY, Tahun 2013

Gambar 2.8 Peta Iklim di DIY

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Berdasarkan hasil analisis GIS dapat ditunjukkan bahwa kawasan lindung di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sekitar 39,64% dari keseluruhan luas wilayah, sedangkan sisanya adalah kawasan budidaya. Persentase luasan kawasan budidaya tersebut sebesar 60,36%, lebih besar dari luasan kawasan lindung karena kawasan budidaya terdiri dari berbagai macam kawasan. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian. Penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan di dalam peta Pola Ruang di bawah ini.



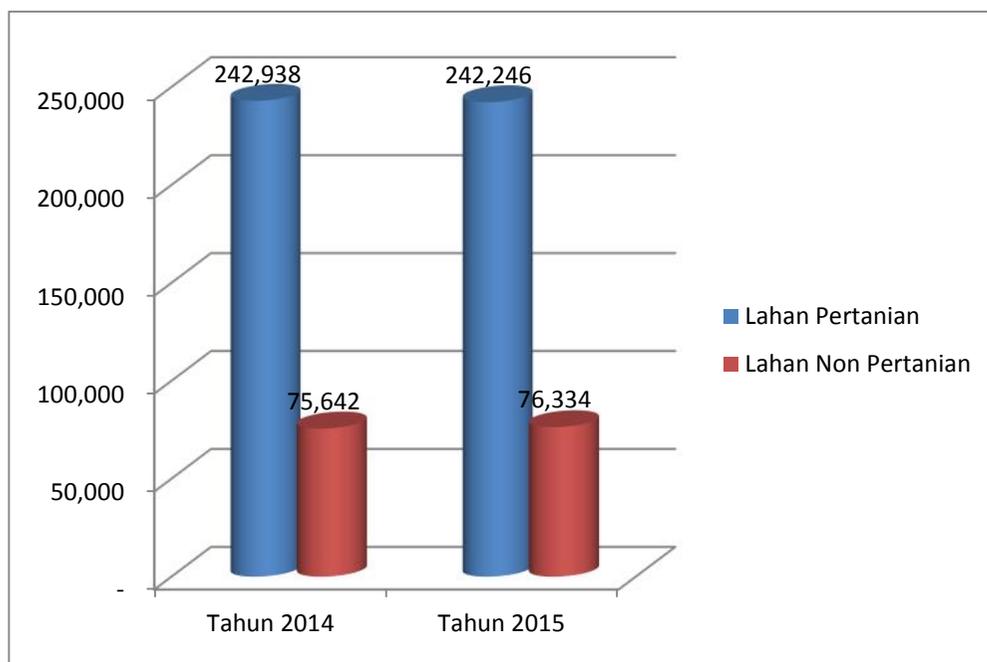
Sumber : DPUP-ESDM DIY, Tahun 2014

Gambar 2.9 Peta Pola Ruang DIY

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY disampaikan bahwa Kawasan Lindung direncanakan seluas lebih kurang 155.810,75 hektar atau sekitar 48,98% dari total luas wilayah DIY, dan kawasan budidaya direncanakan seluas lebih kurang 162.275 hektar atau sekitar 51,02% dari total luas wilayah DIY. Rencana luasan kawasan lindung dan kawasan budidaya tersebut mengalami perubahan setelah dilakukannya kegiatan peninjauan kembali Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY yang dimulai pada tahun 2014. Rencana luasan kawasan lindung berubah menjadi 122.296,73 hektar dan kawasan budidaya berubah menjadi 196.283,27 hektar. Melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian penataan ruang, realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2015 berdasarkan hasil peninjauan kembali Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY yaitu pada kawasan lindung telah mencapai 62,74% sedangkan kawasan budidaya sebesar 66,51% dari target yang telah ditetapkan.

Penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam DIY Dalam Angka 2016, dapat dibedakan menjadi lahan pertanian dan lahan

bukan pertanian (jalan, permukiman, perkantoran, dll). Lahan pertanian menurun dari angka 242.938 Ha (76,26 %) pada tahun 2014 menjadi 242.246 Ha (76,04 %) pada tahun 2015 atau menurun 692 Ha dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan lahan bukan pertanian (jalan, permukiman, perkantoran, dll) meningkat dari 75.642 Ha (23,74 %) pada tahun 2014 menjadi 76.334 Ha (23,96 %) pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 0.22%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke lahan bukan pertanian seluas 692 Ha atau 0,22 % selama 1 tahun.



Sumber: DDA 2016, Provinsi DIY

Gambar 2.10 Grafik Penggunaan Lahan di DIY, Tahun 2014-2015

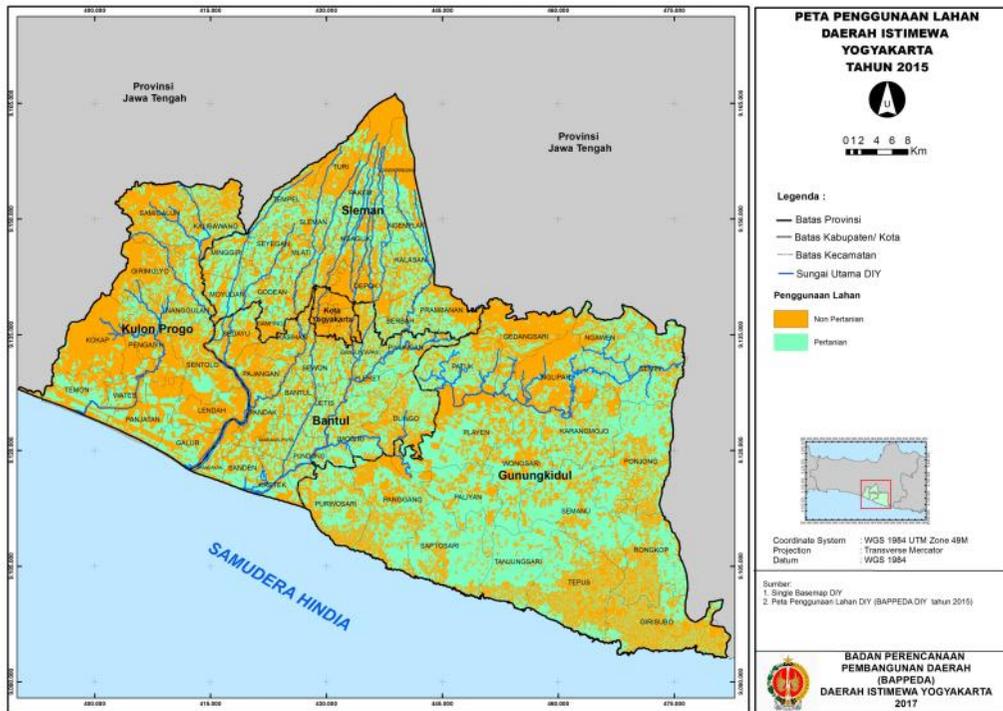
Berdasarkan data penutup lahan tahun 2015 yang terdapat pada kajian peninjauan Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY didominasi permukiman seluas 86,634.80 Ha atau sebesar 27.321%, diikuti semak/belukar seluas 63,227.04 Ha atau sebesar 19.939%. Pertanian yang didominasi sawah irigasi dan tegalan/lading yaitu 17.547% atau sekitar 55,640.93 Ha untuk sawah irigasi dan 13.497% atau seluas 42,797.81 Ha untuk tegalan/lading, sedangkan sawah tadah hujan hanya sekitar 0.940% atau 2,980.58 Ha. Perkebunan di wilayah DIY masih cukup luas yaitu sebesar 14.535% atau 46,089.80 Ha. Hutan yang terdiri dari Hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi hanya sekitar 4.668%

atau seluas 14,803.56 Ha. Penggunaan lahan lainnya selebihnya terdiri dari bandara, candi, danau/waduk, dermaga, emplasemen, industri, kolam, lapangan, makam, pelabuhan, tanah kosong, sungai dan tambak, seperti tabel berikut:

Tabel 2.6 Penggunaan Lahan di DIY Tahun 2015

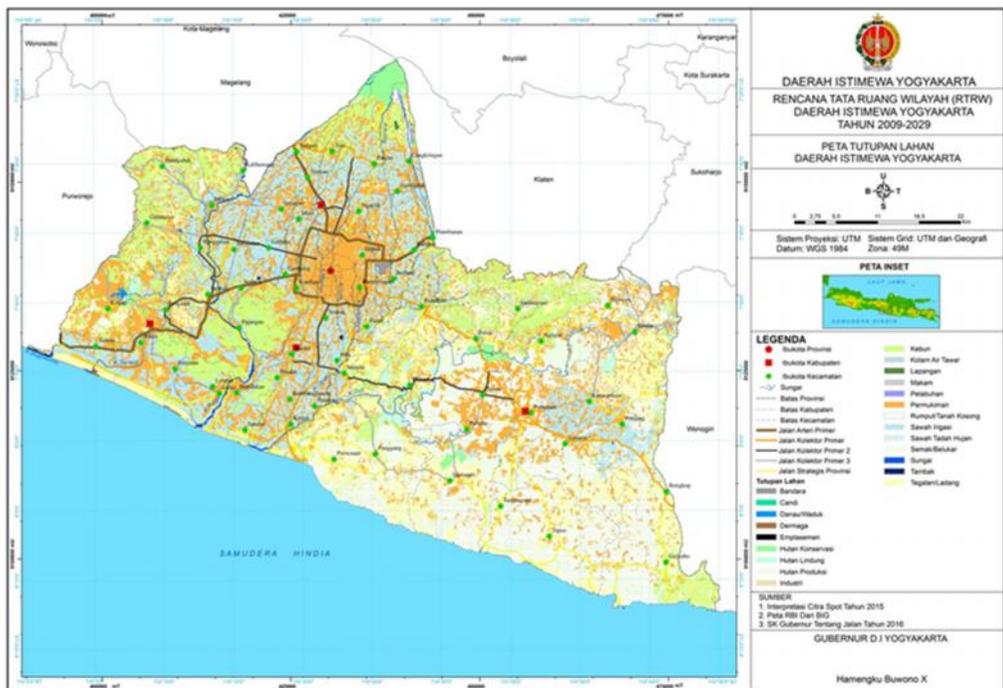
PENGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	Persentase
Bandara	295.08	0.093%
Candi	32.61	0.010%
Danau/Waduk	253.91	0.080%
Dermaga	57.22	0.018%
Emplasemen	138.76	0.044%
Hutan Konservasi	3,295.11	1.039%
Hutan Lindung	2,201.22	0.694%
Hutan Produksi	9,307.23	2.935%
Industri	35.82	0.011%
Kebun	46,089.80	14.535%
Kolam Air Tawar	39.61	0.012%
Lapangan	1.63	0.001%
Lapangan Olah Raga	111.49	0.035%
Makam	41.74	0.013%
Pelabuhan	2.81	0.001%
Permukiman	86,634.80	27.321%
Rumput/Tanah Kosong	1,193.52	0.376%
Sawah Irigasi	55,640.93	17.547%
Sawah Tadah Hujan	2,980.58	0.940%
Semak/Belukar	63,227.04	19.939%
Sungai	2,609.94	0.823%
Tambak	107.23	0.034%
Tegalan/Ladang	42,797.81	13.497%

Sumber: Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY



Sumber : BAPPEDA DIY 2017

Gambar 2.11 Peta Penggunaan Lahan di DIY

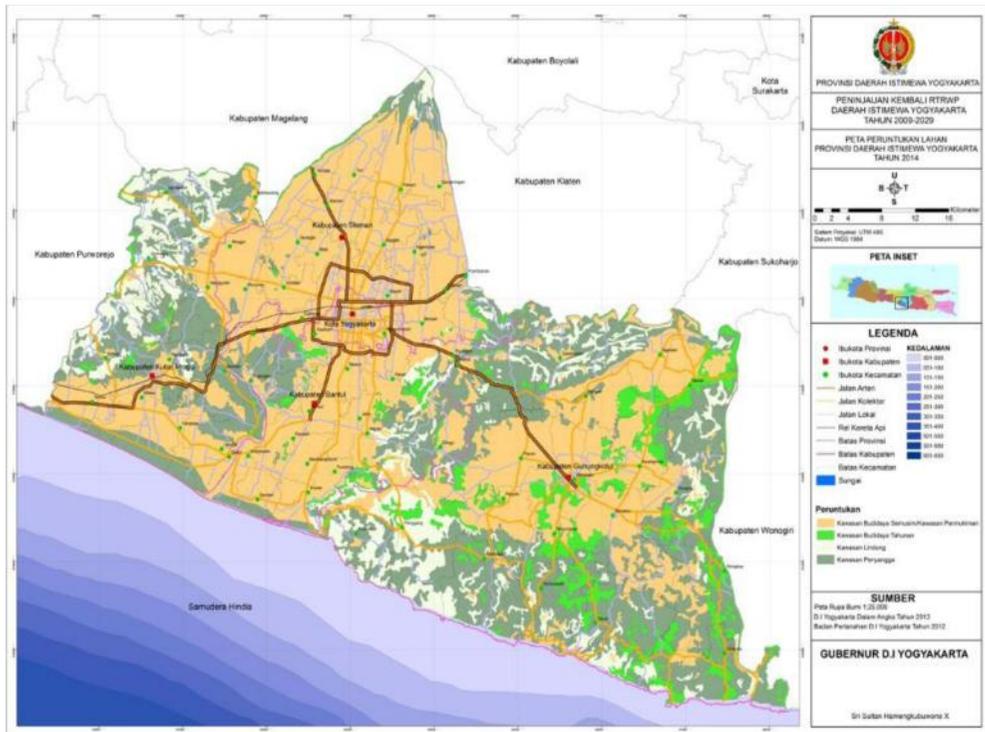


Sumber: Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY

Gambar 2.12 Peta Tutupan Lahan DIY Berdasarkan RTRW 2009-2029

2.1.1.8 Peruntukan Lahan

Peruntukan lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu kegiatan atau penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan. Peruntukan lahan Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 4 kategori yang ada yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budi daya tanaman semusim/permukiman dan kawasan budi daya tanaman tahunan. Peruntukan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan di dalam peta di bawah ini.



Sumber : DPUP-ESDM DIY, Tahun 2014

Gambar 2.13 Peta Peruntukan Lahan DIY

Dilihat dari peta peruntukan lahan di DIY dapat diketahui bahwa hampir setengah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan budidaya semusim/kawasan permukiman yaitu sebesar 49,97%. Kawasan budidaya tanaman semusim/permukiman tersebut meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta (Kartamantul), yaitu di sebagian besar Kabupaten Sleman kecuali di sekitar puncak Gunung Merapi, sebagian kecil Kabupaten Gunungkidul (sekitar Wonosari, Karangmojo, Playen), dan sebagian kecil Kabupaten Kulon Progo (sekitar daerah Temon, Wates).

Peruntukan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan penyangga sebesar 30,17% yang tersebar di semua daerah kecuali Kartamantul. Kawasan penyangga yang dominan terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Peruntukan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan lindung sebesar 11,6% dan memiliki sebaran yang hampir sama dengan kawasan penyangga. Kawasan lindung terutama terdapat di kawasan bentang alam karst.

Selanjutnya peruntukan kawasan budidaya tahunan memiliki porsi paling kecil yaitu sekitar 8,27%. Kawasan budi daya tanaman tahunan terdapat terdapat di semua daerah dengan jumlah relatif sedikit.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah.

Prinsip-prinsip yang harus diacu dalam strategi pengembangan potensi wilayah merujuk pada strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Yogyakarta menyongsong peradaban baru adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembangunan harus selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan tata ruang, dan pengelolaan aspek pertanahannya;
- 2) Tata ruang dan infrastruktur (dalam bingkai wilayah maritim, agraris, dan niaga) mencakup hubungan sinergis antara fungsi ruang darat, laut, udara, dan sungai dengan bertumpu pada kerjasama niaga antar wilayah yang mengandalkan potensi darat, laut, udara, dan sungai;
- 3) Implementasi ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan ekologis dan desentralisasi tata kelola lingkungan;
- 4) Efektifitas kontrol lingkungan dalam skala komunitas lokal yang langsung memiliki interdependensi terhadap alam sekitar kehidupan mereka.

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, Rencana pola ruang wilayah DIY terdiri atas pengelolaan kawasan lindung dan pengelolaan kawasan budidaya. Kawasan budidaya memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Secara umum, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri dari : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Berdasarkan hasil perumusan peninjauan kembali maka perlu dilakukan review terhadap Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010. Sesuai dengan materi *review* RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang

mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terdapat materi *review* RTRW DIY yaitu :

- 1) Rencana Struktur Ruang
Perubahan pada Rencana Struktur Ruang yaitu Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari, menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon – Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara (*Airport City*) serta *Aerotropolis* di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru Temon, Kabupaten Kulonprogo, pelabuhan laut di Pantai Selatan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
- 2) Rencana Kawasan Strategis Provinsi.
Sejalan dengan diterbitkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY maka Kawasan Keistimewaan DIY menjadi salah satu Kawasan Strategis Provinsi.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

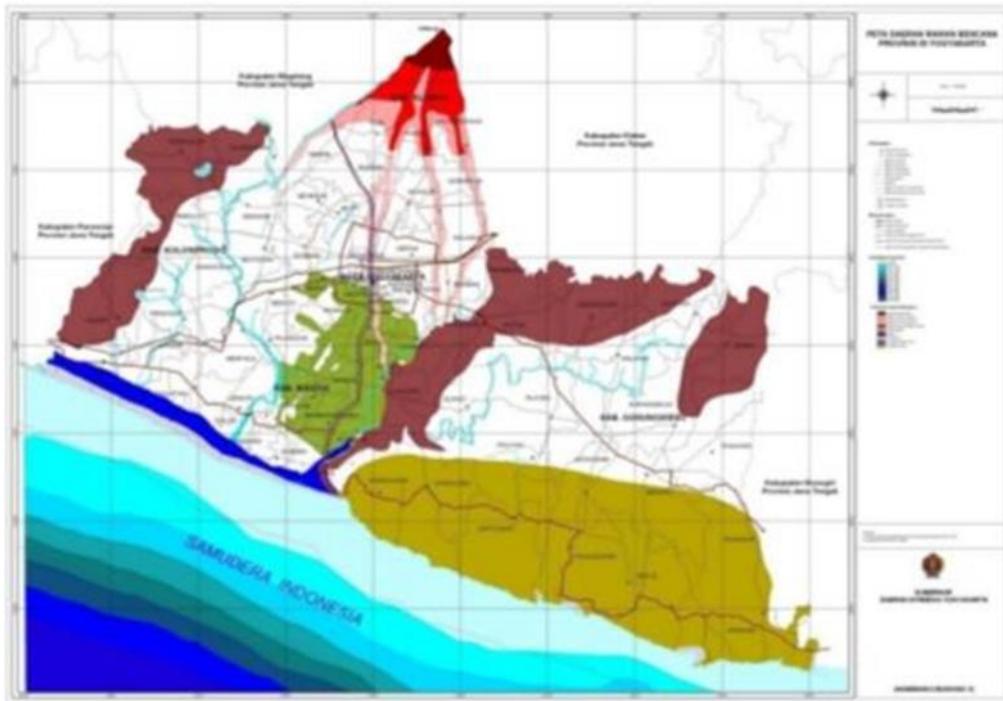
Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 menyebutkan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya pada pasal 14 disebutkan bahwa Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Wilayah rawan bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, meliputi:

1. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi.
2. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah

Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.

3. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
4. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst.
5. Kawasan rawan bencana angin topan. Bencana alam akibat angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.
6. Kawasan rawan gempa bumi. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempa bumi.
7. Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut).



Sumber : RTRW DIY, Tahun 2009-2029

Gambar 2.14 Peta Kawasan Rawan Bencana di DIY

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sedangkan potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yang mungkin terjadi di wilayah DIY antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan non-alam, selama ini masih relatif kecil.

2.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Susenas BPS Provinsi DIY pada tahun 2015 sebanyak 3.691.196 jiwa, dari data BPS tiap tahun jumlah penduduk DIY mengalami peningkatan. Untuk itu diperlukan kebijakan demi menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi. Dengan jumlah penduduk yang besar perlu usaha-usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, tenaga medis dan obat-obatan yang terjangkau.

Berdasarkan data sensus penduduk (SP) 1961 jumlah penduduk DIY tercatat 2.231.062 jiwa, (SP) 1971 tercatat 2.487.177 jiwa, (SP) 1980 tercatat 2.750.128 jiwa, (SP) 1990 tercatat 2.912.611 jiwa, (SP) 2000 tercatat 3.120.478 jiwa, (SP) 2010 tercatat 3.457.491 jiwa. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah persebaran penduduk berdasarkan sensus 1961 – 2010 DIY menurut kabupaten/kota.

Tabel 2.7 Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk di DIY 1961-2010

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk					
	1961	1971	1980	1990	2000	2010
1	3	4	5	6	7	8
Kulonprogo	337.127	370.629	380.685	372.309	370.944	388.869
Bantul	499.163	568.627	634.442	696.905	781.013	911.503
Gunungkidul	571.823	619.117	659.486	651.004	670.433	675.382
Sleman	516.653	588.313	677.323	780.334	901.377	1.093.110
Yogyakarta	306.296	340.491	398.089	412.059	396.711	388.627
DIY	2.231.062	2.487.177	2.750.128	2.912.611	3.120.478	3.457.491

Sumber : BPS, hasil sensus penduduk 1961, 1971,1980,1990, 2000, 2010

Dari data sensus diatas Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Kota Yogyakarta jumlah penduduknya paling sedikit. Namun jika diukur berdasarkan kepadatan jumlah penduduk Kota Yogyakarta merupakan daerah paling padat penduduknya yaitu 12.699 per km² dan Kabupaten Gunung Kidul paling jarang penduduknya yaitu 482 per km²

Dari tabel diatas menunjukkan laju pertumbuhan penduduk DIY terhitung mulai sensus 1961 – 2010 yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk di DIY 1961-2010

1930	1961	1971	1980	1990	2000	2010
1,97 %	1,17 %	1,07 %	1,10 %	0,58 %	0,72 %	1,04 %

Sumber : BPS, hasil sensus penduduk 1961, 1971,1980,1990, 2000, 2010

Pertumbuhan jumlah penduduk DIY dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi, menurut hasil proyeksi BPS Provinsi DIY 2010 – 2035 pada buku Daerah Dalam Angka DIY Tahun 2016 komposisi penduduk DIY menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok umur dewasa yaitu umur 20 – 24 tahun sebesar 8,41 persen, kelompok umur 0 – 24 tahun tercatat 37,45 persen, kelompok umur 25 – 59 tahun 49,17 persen, dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 13,38 persen. Besarnya proporsi yang sudah lanjut usia menunjukkan tingginya usia harapan hidup di DIY.

Tabel 2.9 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 2015-2018

Kelompok Umur	2015	2016	2017*	2018*	2019*
0 – 14	21,84	21,77	21,70	21,63	21,55
15 – 64	68,94	68,96	68,96	68,92	68,85
65 +	9,22	9,27	9,34	9,45	9,60
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber DDA Tahun 2016, *= Angka Proyeksi

Menurut hasil proyeksi BPS DIY berdasarkan tempat tinggal penduduk kota mencapai 66,74 persen dan penduduk desa mencapai 33,26 persen sedangkan proyeksi berdasarkan jumlah penduduk 2017 – 2018 adalah tahun 2017 sebanyak 3.762,3 ribu jiwa (penduduk perempuan 1.901,3 ribu jiwa dan penduduk laki-laki 1.86,09 ribu jiwa) dan pada tahun 2018 sebanyak 3.802,4 ribu jiwa (penduduk perempuan 1.921,4 ribu jiwa dan penduduk laki-laki 1.881,5 ribu jiwa).

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu Pendekatan Perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendekatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

a. Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut, terdapat peningkatan garis kemiskinan DIY dalam kurun waktu tahun 2010-2016. Kenaikan garis kemiskinan didorong oleh peningkatan harga-harga. Pada periode Maret 2010, garis kemiskinan di

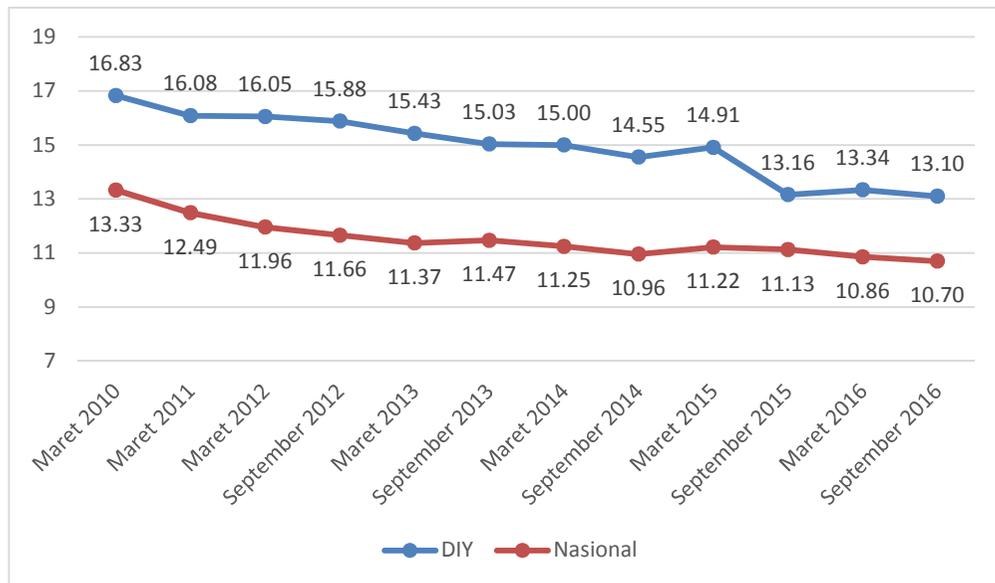
DIY sebesar Rp 234.282 per kapita perbulan. Pada periode survei terakhir yaitu September 2016 mencapai Rp 360.169 per kapita per bulan.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2010-2016

Periode Survey	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2010	234.282	577,30	16,83
Maret 2011	257.909	564,23	16,08
Maret 2012	260.173	565,32	16,05
Sept 2012	270.110	562,11	15,88
Maret 2013	283.454	550,19	15,43
Sept 2013	303.843	535,18	15,03
Maret 2014	313.452	544,87	15,00
Sept 2014	321.056	532,59	14,55
Maret 2015	335.886	550,23	14,91
Sept 2015	347.721	485,56	13,16
Maret 2016	354.084	494,94	13,34
Sept 2016	360.169	488,83	13,10

Sumber: Susenas Maret 2010 – September 2016

Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Pada periode survei September 2016 tercatat jumlah penduduk miskin di DIY mencapai sebesar 488,83 ribu orang. Angka tersebut meningkat sejumlah 3,27 ribu dari tahun sebelumnya yang mencapai 485,56. Meskipun Persentase penduduk miskin mengalami kecenderungan penurunan sejak tahun 2010, namun demikian dari sisi jumlah masih terdapat peningkatan penduduk miskin. Sementara itu jika dibandingkan dengan tingkat nasional, persentase penduduk miskin di DIY masih di atas tingkat nasional yang mencapai 10,7%.



Sumber: Susenas Maret 2010 – September 2016

Gambar 2.15 Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2010-2016

Dilihat dari sebarannya, jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dari pada di pedesaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan pola tempat tinggal penduduk yang mulai lebih banyak di kawasan perkotaan. Pada September 2016 jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan sebesar 301,25 ribu orang, sementara itu jumlah penduduk miskin di kawasan pedesaan hanya mencapai sejumlah 187,58 orang. Namun demikian jika dilihat persentasenya, kawasan pedesaan memiliki persentase penduduk miskin sebesar 16,27% sementara untuk kawasan perkotaan hanya mencapai 11,68%.

Tabel 2.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2012-2016

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)
Maret 2010	308,36	13,98	268,94	21,95
Maret 2011	304,34	13,16	256,55	21,82
Maret 2012	305,89	13,13	259,44	21,76
September 2012	306,50	13,10	255,60	21,29
Maret 2013	315,47	13,43	234,73	19,29
September 2013	325,53	13,73	209,66	17,62
Maret 2014	333,03	13,81	211,84	17,36
September 2014	324,43	13,36	208,15	16,88

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin(%)
Maret 2015	329,65	13,43	220,57	17,85
September 2015	292,64	11,93	192,91	15,62
Maret 2016	297,71	11,71	197,23	16,63
September 2016	301,25	11,68	187,58	16,27

Sumber: Susenas, Maret 2010 – September 2016

Dilihat dari kontribusinya, lima komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di pedesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Dengan beras masih menjadi kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan, program-program terkait operasi pasar beras maupun beras untuk masyarakat miskin masih perlu dilanjutkan dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerima. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengeluaran untuk rokok kretek filter yang masih menempati urutan atas. Upaya-upaya promosi kesehatan untuk masyarakat perihal bahaya rokok harus terus diupayakan.

Tabel 2.12 Lima Kontribusi Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah September 2016

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Makanan		Makanan	
Beras	21,87	Beras	28,35
Rokok kretek filter	17,22	Rokok kretek filter	8,97
Daging ayam ras	11,51	Daging ayam ras	7,86
Telur ayam ras	3,84	Gula pasir	5,51
Tempe	3,75	Mie instan	4,14
Non Makanan		Non Makanan	
Perumahan	27,58	Perumahan	31,68
Bensin	13,24	Bensin	13,85
Pendidikan	11,61	Kesehatan	6,22
Listrik	7,56	Pakaian jadi anak-anak	5,4
Pakaian jadi anak-anak	6,69	Listrik	5,19

Sumber: Susenas September 2016

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan DIY pada periode September 2016 lebih tinggi

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Terdapat perbaikan atas kesenjangan pengeluaran tersebut antara periode survey September 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.13 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan DIY 2013-2016

Bulan	Indeks Kedalaman	Indeks Keparahan
Maret 2013	3,02	0,55
Sept 2013	2,03	0,46
Maret 2014	2,11	0,48
Sept 2014	2,98	0,61
Maret 2015	3,70	0,83
Sept 2015	2,57	0,63
Maret 2016	3,41	0,59
Sept 2016	2,83	0,36

Sumber: Susenas, Maret 2013 – September 2016

b. Pendapatan Perkapita

Kinerja perekonomian DIY selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh selalu meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 71,369 triliun dan pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 101,396 triliun. Ini berarti pula bahwa secara nominal PDRB meningkat sebesar 42,07% selama lima tahun.

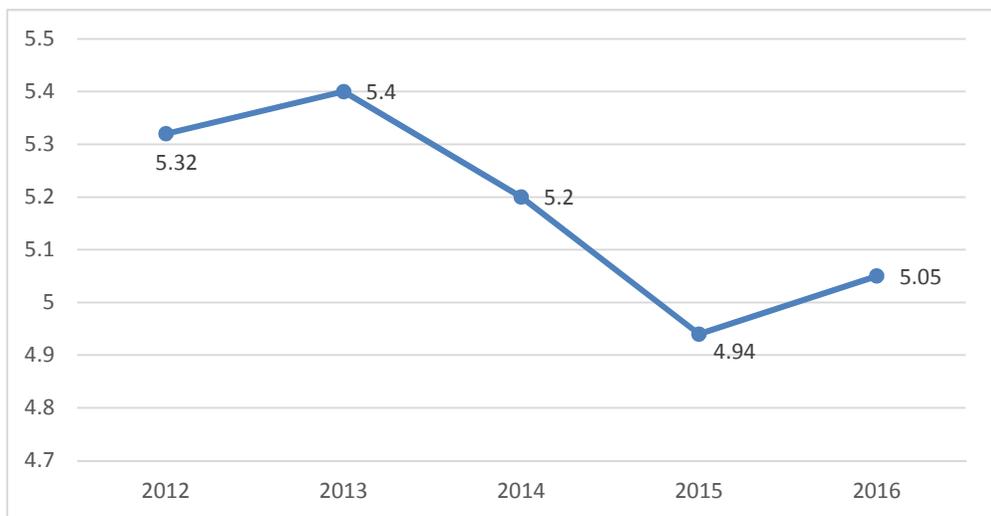
Tabel 2.14 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.640.411,7	9.449.019,7	9.769.112	10.848.369	11.456.173
Pertambangan dan Penggalian	467.147,5	495.039,5	537.599	573.133	593.156
Industri Pengolahan	10.242.467,7	11.563.733,8	12.614.921	13.236.292	14.547.753
Pengadaan Listrik dan Gas	90.992,0	86.515,1	89.669	92.610	141.794
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83.130,3	89.645,3	102.670	109.697	114.765
Konstruksi	7.350.632,3	8.060.750,5	8.722.682	9.499.917	10.286.734
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.413.318,6	6.938.421,0	7.681.035	8.342.646	9.332.038

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Transportasi dan Pergudangan	4.256.792,3	4.783.126,5	5.313.233	5.755.748	6.253.137
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.203.277,9	8.284.060,7	9.323.242	10.383.391	11.255.100
Informasi dan Komunikasi	7.331.839,4	7.572.218,9	7.897.507	8.244.242	8.957.494
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.696.113,0	3.170.932,7	3.602.561	4.028.358	4.342.146
Real Estate	5.429.459,0	5.815.245,1	6.497.271	7.143.655	7.808.289
Jasa Perusahaan	836.060,2	855.439,4	956.391	1.048.359	1.115.194
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.931.303,6	6.702.818,7	7.492.246	8.348.234	9.217.108
Jasa Pendidikan	6.364.491,8	6.816.002,1	7.600.855	8.598.744	9.088.421
Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	1.928.468,3	2.094.674,4	2.276.361	2.553.551	2.764.049
Jasa Lainnya	1.981.955,1	2.147.020,2	2.351.975	2.589.171	2.824.990
PDRB	77.247.860,7	84.924.663,6	92.829.330	101.396.117	110.098.341

Sumber: BPS DIY 2017

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2012-2016 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -1,24% selama 5 tahun. Pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 5,4% kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,2 poin menjadi sebesar 5,2%. Bahkan menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 4,94%, sebelum kembali meningkat pada tahun 2016. Namun masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%.



Sumber: BPS DIY, 2017

Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB DIY, Tahun 2011-2016

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2016. Selama periode tahun 2012-2016 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tumbuh rata-rata sebesar 8,01%. Nilai PDRB per kapita tahun 2012 tercatat sebesar Rp. 21,74 juta, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp. 29,59 juta di tahun 2016.

Tabel 2.15 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (%)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	77.247.861	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.552.462	3.594.854	3.637.173	3.679.239	3.720.921
PDRB per kapita adh. Berlaku: (juta rupiah)	21,744	23,623	25,526	27,573	29,589
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	6,94	8,64	8,06	8,02	7,31

Sumber: BPS DIY, Tahun 2017

Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2010. Nilai riil PDRB per kapita dalam periode 2012 hingga 2016 tumbuh rata-rata sebesar 3,95%. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

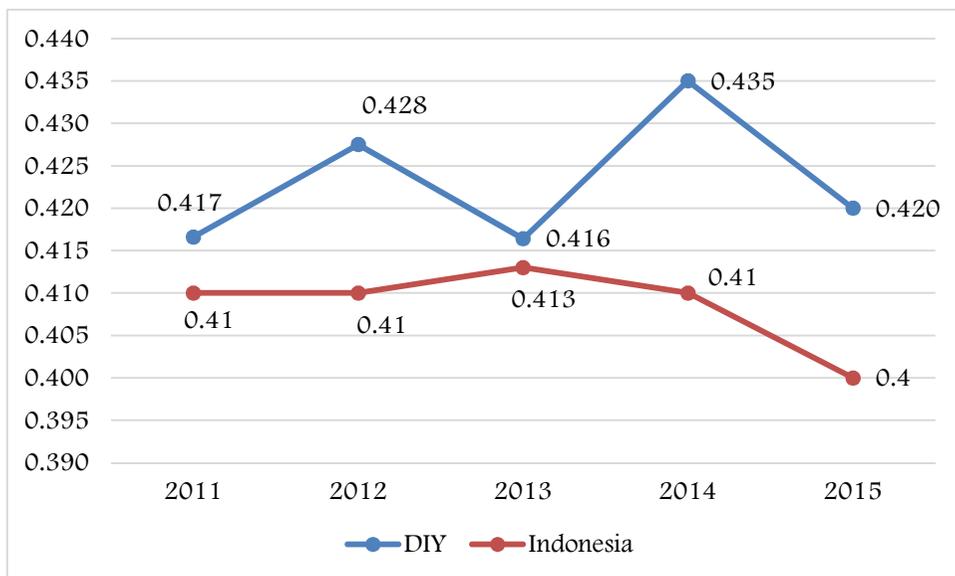
Tabel 2.16 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (%)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB adh. konstan 2010 (juta rupiah)	71.702.449	75.627.450	79.536.082	83.461.574	87.687.927
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.552.462	3.594.854	3.637.173	3.679.239	3.720.921
PDRB per kapita adh. konstan 2010 (juta rupiah)	20,184	21,038	21,868	22,684	23,566

Sumber: BPS DIY, Tahun 2017

c. Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Regional

Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan di antaranya digunakan Rasio Gini dan Kriteria Bank Dunia yang paling lazim digunakan. Perkembangan rasio gini DIY tahun 2016 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,42. Kinerja tersebut berbeda dengan kondisi tingkat nasional yang mengalami perbaikan. Selain itu, indeks ketimpangan pendapatan DIY masih tergolong yang tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain. Oleh karenanya masih perlu terobosan kebijakan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat golongan bawah untuk mengurangi kesenjangan dengan pendapatan masyarakat golongan atas.

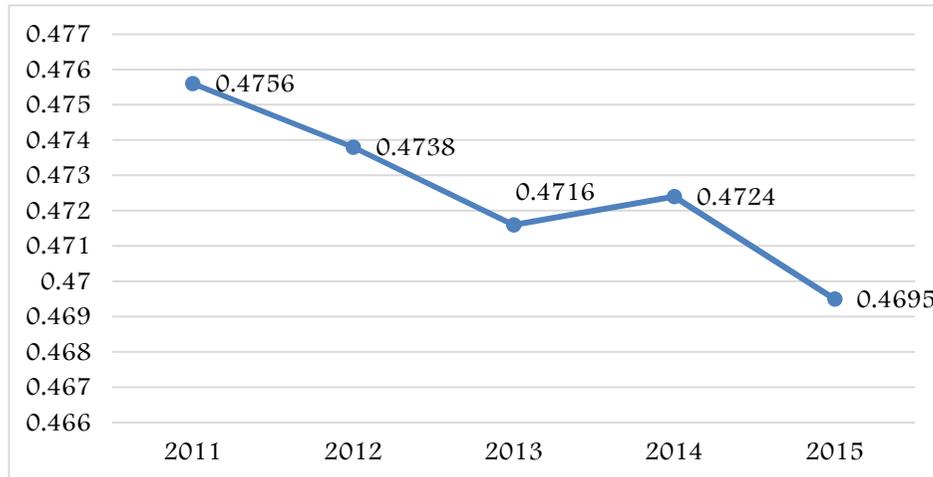


Sumber: BPS DIY, 2016

Gambar 2.17 Rasio Gini di DIY, Tahun 2011-2015

Ketimpangan antar region yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2011-2015 menunjukkan kecenderungan peningkatan, yaitu dari 0,4756 pada tahun 2011 menjadi 0,4695 pada tahun 2015. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin memprihatinkan. Dengan demikian pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang ke depan lebih diarahkan untuk pemerataan ekonomi antar kabupaten/kota. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk

mendorong program pembangunan di arahkan ke daerah-daerah yang tertinggal.



Sumber: BPS DIY, 2016

Gambar 2.18 Indeks Williamson DIY Tahun 2011-2015

Tabel nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota memperlihatkan perbandingan nilai nominal PDRB antar waktu dan antar daerah. Sebagai penyangga utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar secara relatif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sementara nilai PDRB di bawah rata-rata DIY ada di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. Perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2015 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kondisi sebagian besar lahan pertanian pegunungan berbatu sehingga cara penanaman dan produktivitas komoditas pertaniannya juga tidak seperti di lahan pertanian subur. Sementara itu, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah terkecil tetapi mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar.

Tabel 2.17 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016, Menurut Harga Berlaku

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kulonprogo	5.916.574	6.489.593	7.056.572	7.671.548	8.312.455
Bantul	14.510.832	16.138.755	17.682.925	19.325.203	20.924.970
Gunungkidul	10.545.355	11.530.341	12.557.371	13.798.657	14.982.055
Sleman	25.732.249	28.295.363	30.912.239	33.863.669	37.040.185
Kota Yogyakarta	20.536.856	22.537.792	24.664.286	26.792.641	28.915.782
DIY	77.247.861	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341

Sumber: Laporan Analisis PDRB, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2017

d. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

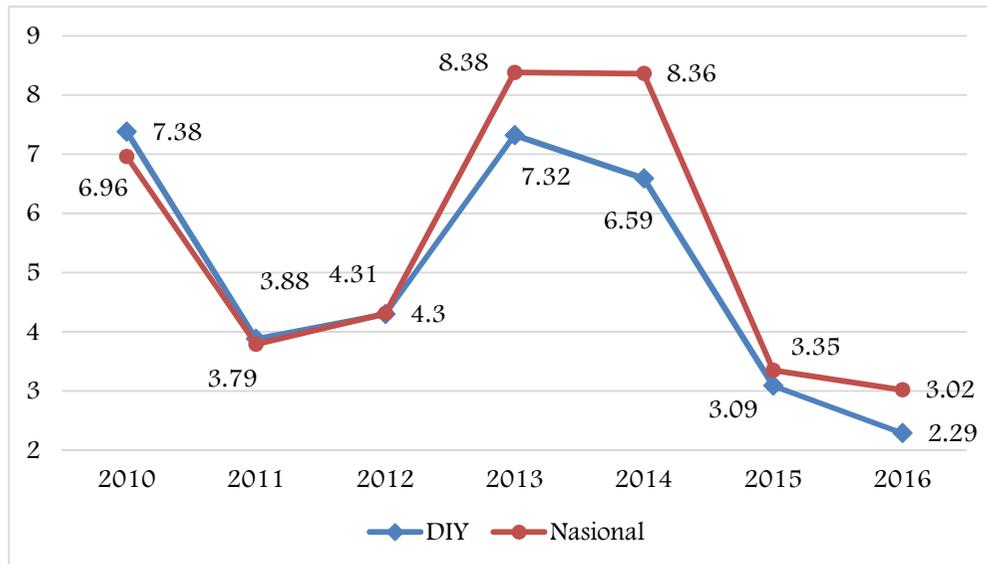
Tabel 2.18 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Bulan	Inflasi Bulanan				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jan	0,25	0,96	1,05	0,13	0,53
Feb	0,1	0,93	0,07	-0,40	-0,09
Mar	0,36	0,79	0,14	0,15	0,02
Apr	0,11	-0,3	0,07	0,38	-0,16
Mei	0,05	-0,29	0,05	0,36	0,08
Jun	0,75	0,84	0,43	0,35	0,43
Jul	0,76	2,58	0,85	0,63	0,94
Agt	0,42	0,87	0,09	0,33	-0,04
Sep	0,19	-0,24	0,49	0,04	-0,16
Okt	0,38	0,61	0,28	0,01	0,05
Nov	0,2	0,2	1,13	0,13	0,32
Des	0,66	0,17	1,76	0,96	0,35
Inflasi Tahunan	4,31	7,32	6,59	3,09	2,29

Sumber: BPS DIY, 2017

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pola inflasi bulanan di Kota Yogyakarta seperti yang ditunjukkan oleh Tabel diatas selama tahun 2012-2016 biasanya mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, liburan tengah

tahun dan liburan akhir tahun. Selain itu, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor seperti cuaca ekstrem, yang akan menyebabkan gangguan pasokan pada beberapa komoditas sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang kemudian akan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.



Sumber: BPS DIY, 2017

Gambar 2.19 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional

Jika melihat pola inflasi tahunan selama tahun 2010-2016, inflasi Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pola inflasi kota Yogyakarta dapat dipertahankan lebih rendah dari inflasi nasional sejak tahun 2012 dengan kesenjangan (*gap*) terbesar antara angka inflasi nasional dan DIY terjadi pada tahun 2014. Selain itu, baik inflasi nasional maupun DIY merupakan angka yang terendah selama 7 tahun terakhir.

Sementara itu jika dilihat dari kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok yang mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar, kelompok Sandang, serta kelompok Kesehatan. Inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar bahkan mempunyai angka inflasi terendah dalam 7 tahun terakhir.

Tabel 2.19 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2016

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bahan Makanan	18,86	1,82	8,10	12,31	7,70	4,64	4,77
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	5,47	7,07	6,90	8,15	2,95	5,04	3,84
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	5,49	3,01	2,99	5,18	8,92	4,41	1,64
4	Sandang	5,41	9,40	3,56	0	3,61	5,87	3,04
5	Kesehatan	1,97	5,64	1,93	3,08	5,49	4,21	4,17
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	4,25	1,73	1,43	3,17	2,37	1,36	2,40
7	Transportasi & komunikasi	5,57	2,40	1,30	10,45	9,36	-2,51	-2,06
	Inflasi Kota Yogyakarta	7,38	3,88	4,31	7,32	6,59	3,09	2,29

Sumber: BPS DIY, 2017

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial DIY terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pembangunan manusia DI.Yogyakarta terus mengalami kemajuan selama periode 2010 sampai dengan 2015. IPM DIY meningkat dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 77,59 pada tahun 2015.

Tabel 2.20 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2010-2015

Komponen IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (AHH)	74,17	74,26	74,36	74,45	74,5	74,68
Harapan Lama Sekolah	14,15	14,61	14,64	14,67	14,85	15,03
Rata-Rata Lama Sekolah	8,51	8,53	8,63	8,72	8,84	9
Pengeluaran per Kapita disesuaikan	12.080	12.115	12.137	12.261	12.294	12.684
IPM	75,37	75,93	76,15	76,44	76,81	77,59

Sumber : BRS, BPS DIY, 2016

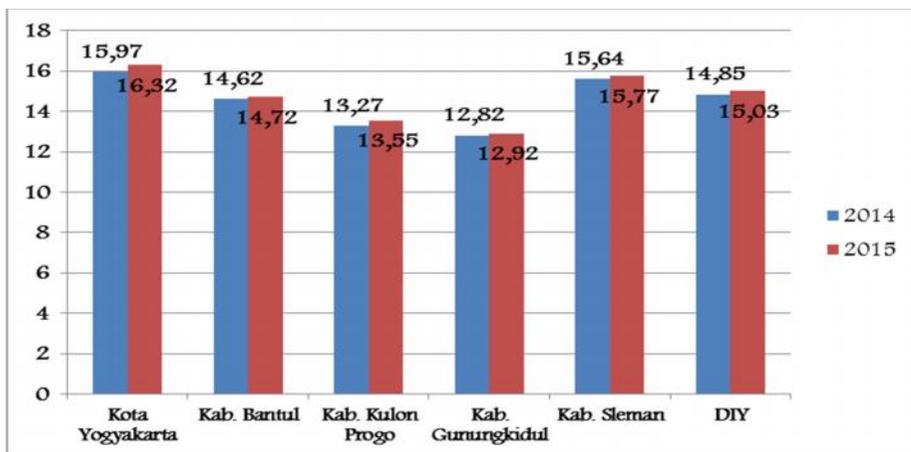
1. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Mulai tahun 2014, BPS melakukan penyempurnaan beberapa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk metodologi penghitungannya.

Sebagai salah satu komponen penyusunan IPM, Angka Melek Huruf dianggap sudah tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Indikator baru yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Capaian AHLS DIY tahun 2015 adalah sebesar 15,03 tahun, meningkat 0,18 poin dari 14,85 tahun. Untuk kabupaten/kota, capaian tertinggi oleh Kota Yogyakarta sebesar 15,97 tahun dan capaian terendah oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,82 tahun.



Sumber : BPS DIY, 2015

Gambar 2.20 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten Kota se DIY Tahun 2014-2015

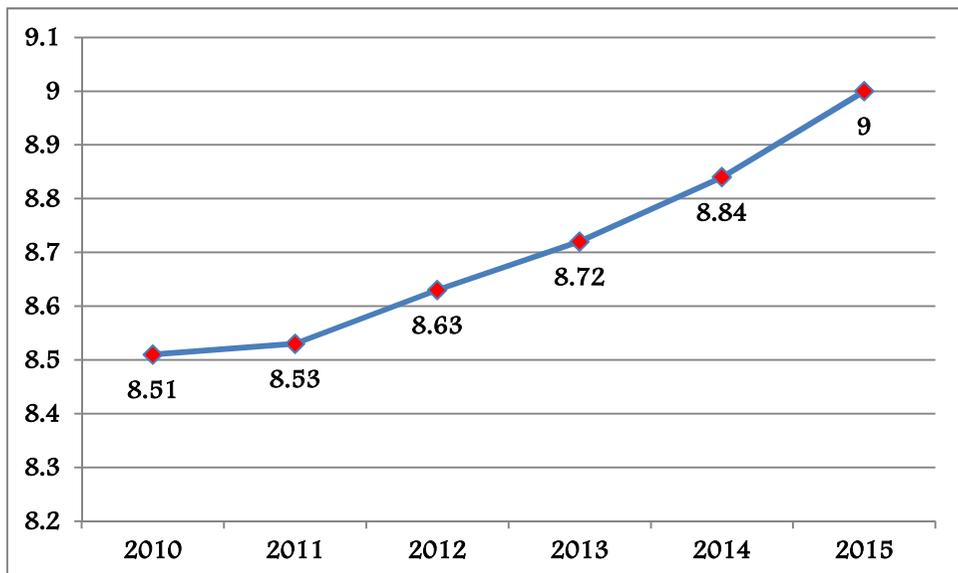
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian angka rata-rata lama sekolah mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat lintas sektor seperti : tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri.

Pemda DIY telah menargetkan capaian wajib belajar 12 tahun di tahun 2017 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam RPJMD 2012 - 2017, untuk itu diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan.

Selama 2010-2015 terjadi tren peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah DIY yaitu dari 8,51 di tahun 2010 berturut-turut meningkat menjadi 9 di tahun 2015. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY tahun 2010-2015.

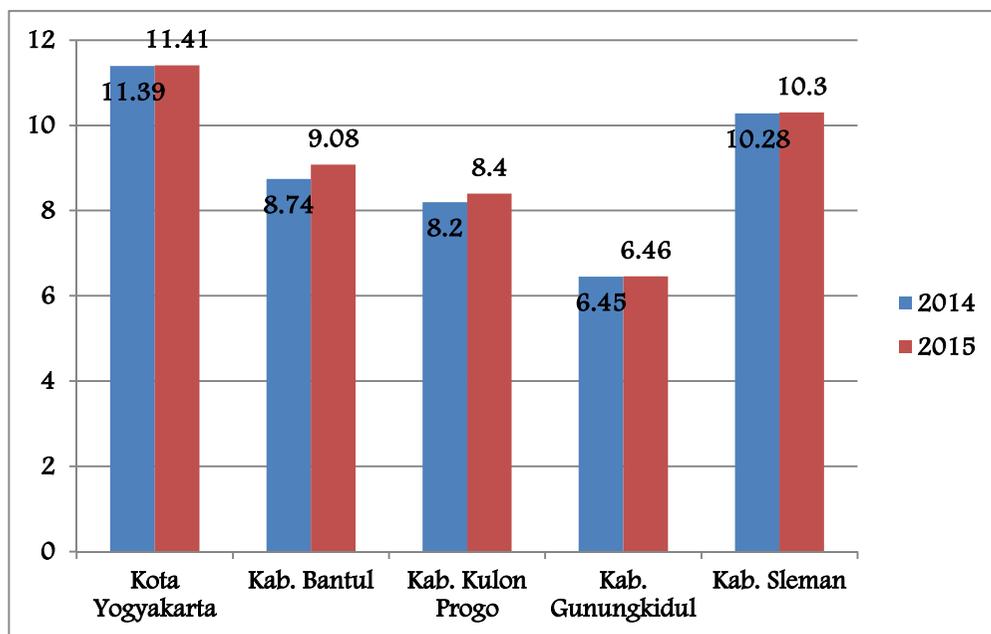


Sumber : BRS, BPS DIY, 2016

Gambar 2.21 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DIY, Tahun 2010-2015

Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2015 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,41 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 6,46 tahun, dengan kata lain terdapat ketimpangan yang mencolok antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar.

Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2014-2015 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam gambar berikut :



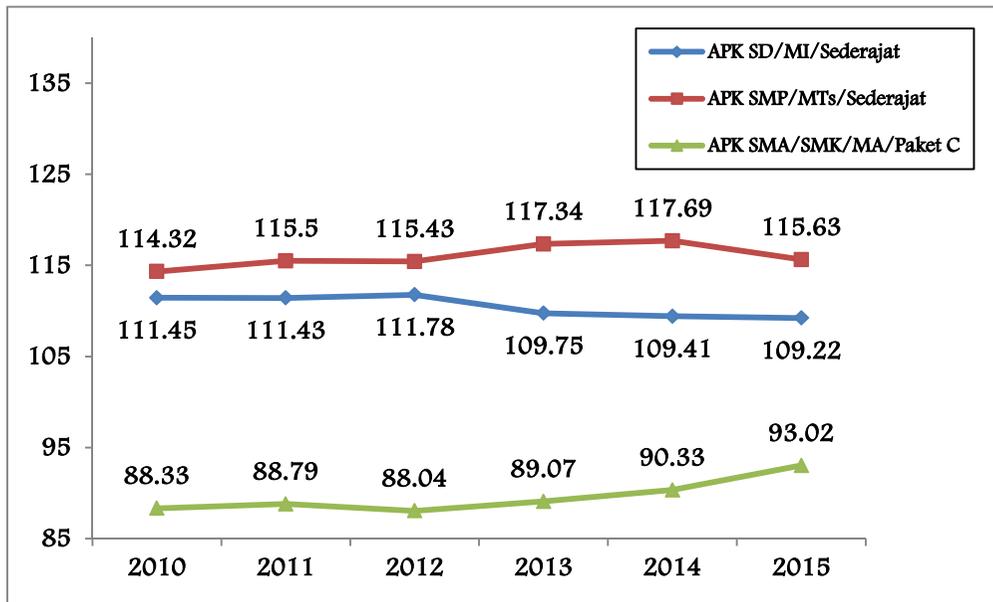
Sumber : BPS DIY, 2016

Gambar 2.22 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2014-2015

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2010 hingga 2015 dapat dilihat dari gambar berikut :



Sumber : Dataku, BAPPEDA DIY, 2016

Gambar 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015

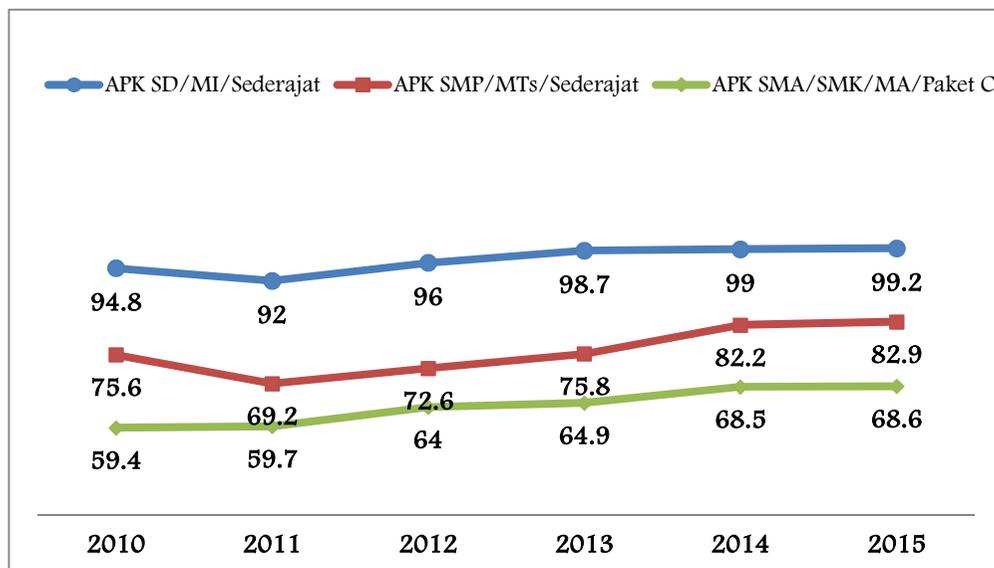
Dari periode 2010 sampai dengan periode 2015, capaian APK SD DIY/ sederajat menunjukkan capaian diatas 100%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terdapat anak yang sekolah di SD umurnya diluar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Hal yang sama terjadi pada capaian APK SLTP DIY/ sederajat juga diatas 100%, karena banyak kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100 persen. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia

yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2010 sampai dengan periode 2015 dapat dilihat dalam gambar berikut :



Sumber : Analisis Statistitik DIY 2016, BPS DIY

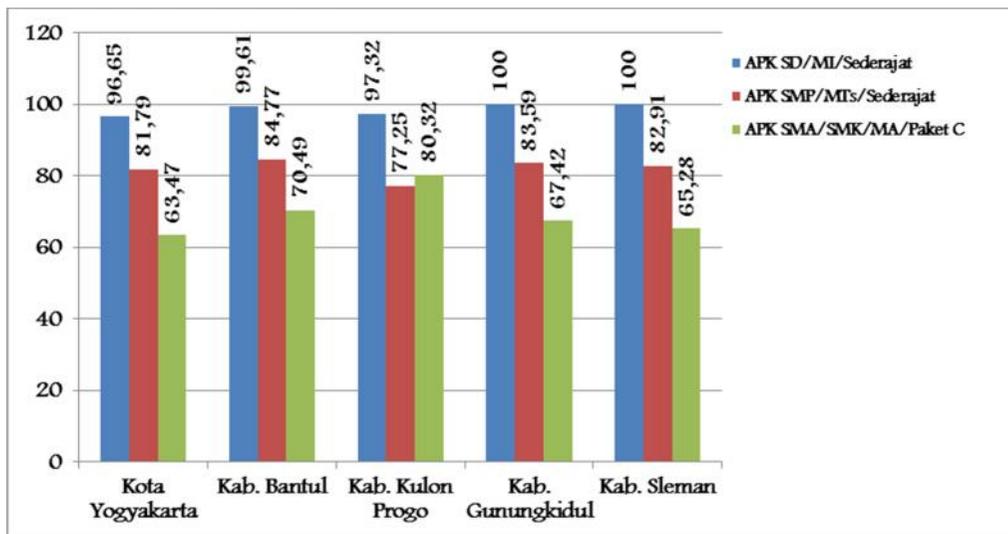
Gambar 2.24 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2010-2015

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat meningkat. Secara umum, level APM terlihat semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya kasus terlambat sekolah untuk jenjang SD dan tinggal kelas untuk jenjang SMP dan SMA.

Secara umum capaian APM DIY Tahun 2015 untuk semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2014. Capaian APM tingkat SD Tahun 2015 sebesar 99,2% naik dari periode sebelumnya 2014 yang sebesar 99%. Sedangkan untuk tingkat SMP, capaian APM tahun 2015 sebesar 82,9%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2014 yang mencapai 82,2%. Capaian APM tingkat SMA juga mengalami

peningkatan dari tahun 2015 yaitu 64,89% meningkat menjadi 68,6% di tahun 2015.

Dilihat capaian APM per kabupaten/kota, capaian APM jenjang SD tertinggi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 100% sedangkan yang terendah Kota Yogyakarta sebesar 96,65%. Capaian APM SD Kota Yogyakarta yang lebih rendah dikarenakan peserta didik baru di Kota Yogyakarta yang masuk SD dengan usia belum mencapai 7 tahun. Hal ini juga berpengaruh pada capaian APM jenjang SMP dan SMA yang relatif lebih rendah daripada kabupaten lainnya.



Sumber : Analisa Statistik DIY 2016, BPS DIY

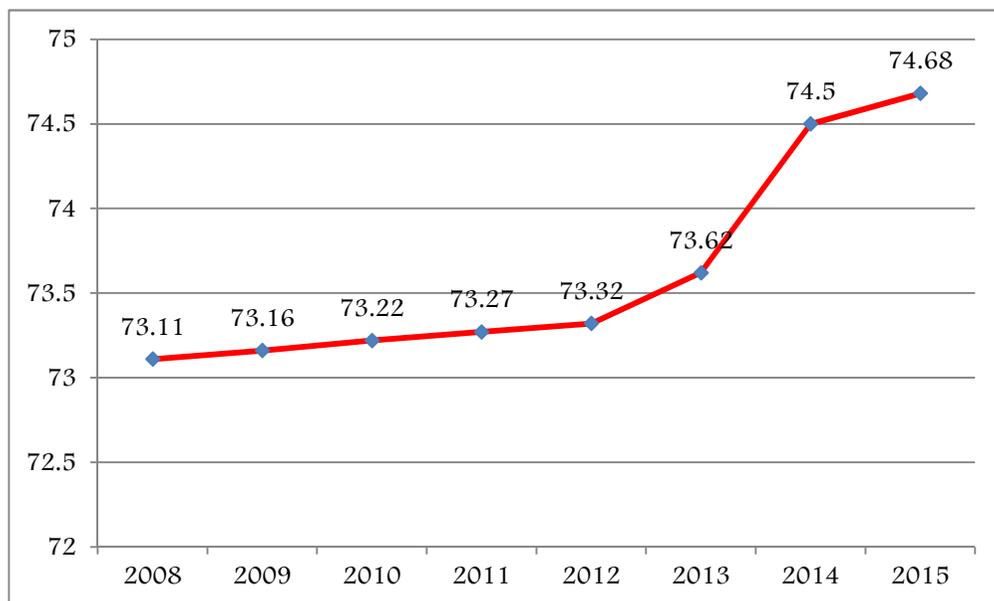
Gambar 2.25 Capaian IPM Per Jenjang Pendidikan Per Kabupaten Kota di DIY Tahun 2015

5. Angka Harapan Hidup (AHH)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa angka harapan hidup saat lahir mencerminkan tingkat kematian keseluruhan populasi. Angka harapan hidup saat lahir merangkum pola mortalitas yang berlaku di semua kelompok umur pada tahun tertentu (anak dan remaja, dewasa, dan orang tua).

Peningkatan AHH merupakan tujuan pembangunan manusia DIY yang tercantum sebagai Indikator Kinerja Gubernur dalam RPJMD 2012 –

2017 dengan target di tahun 2017 74,18 atau dengan kata lain target akhir RPJMD sudah tercapai. Perkembangan AHH di DIY dalam kurun waktu 2008-2015 menunjukkan tren peningkatan. Dari 73,11 di tahun 2008 meningkat menjadi 74,68 di tahun 2015.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2016

Gambar 2.26 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) DIY, Tahun 2008-2015

AHH dipengaruhi dari beberapa faktor seperti faktor kesehatan, faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor pendidikan masyarakat. Peran sektor kesehatan dalam pencapaian indikator UHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan.

Peningkatan AHH yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh banyak faktor. Kesehatan menjadi salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam peningkatan tersebut. Peran pengaruh kesehatan dalam meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat.

Dari capaian peningkatan UHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada semakin banyaknya penduduk lanjut usia. Sehingga diperlukan intervensi pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.

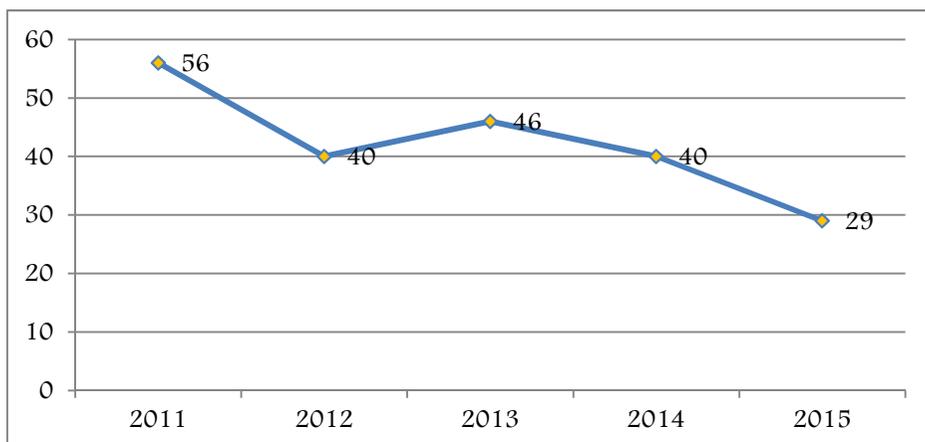
6. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu atau *maternal* adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Millennium *Development Goals* (MDGs) dalam *Goal 5* Meningkatkan Kesehatan Ibu. MDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati MDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kependudukan (SDKI) Tahun 2012, AKI di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Mengacu pada capaian tersebut, potensi untuk pencapaian MDGs *Goal 5* untuk menurunkan AKI adalah *off track* yang artinya diperlukan perhatian khusus dalam pencapaiannya.

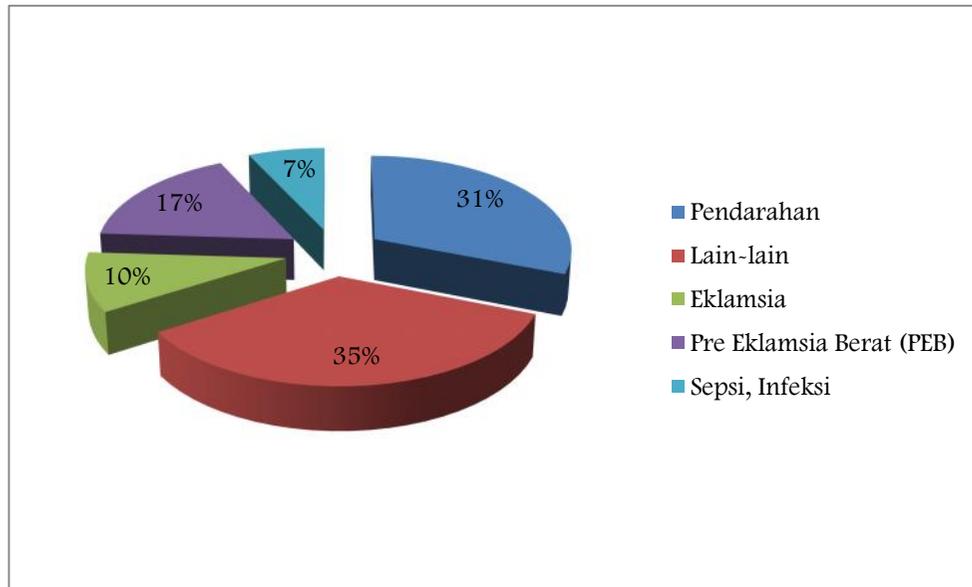
Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 meskipun fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan dengan kisaran 29 – 56 kasus kematian ibu. Tahun 2013 kasus kematian ibu sebanyak 46 kasus, menurun di tahun 2014 menjadi sebanyak 40 kasus dan kembali menurun di tahun 2015 menjadi 29 kasus.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Gambar 2.27 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di DIY Tahun 2011-2015

Penyebab kematian ibu di DIY didominasi oleh kasus pendarahan dan lain – lain (emboli, jantung, hipertiroid, TB, Stroke), disusul Pre Eklamsia Berat dan Eklamsia.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

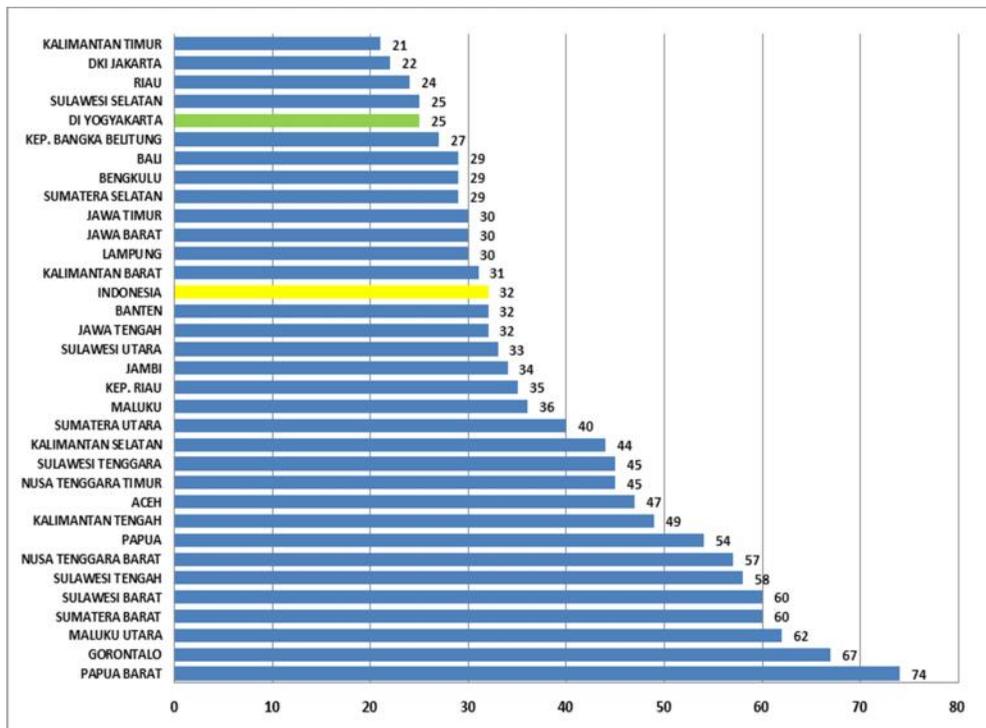
Gambar 2.28 Penyebab Kematian Ibu di DIY, Tahun 2015

Menjadi tanggungjawab bersama untuk menjamin semua ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas mulai dari saat hamil, persalinan sampai dengan perawatan pasca perkawinan serta akses dan informasi terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Intervensi mulai dilakukan pada saat remaja melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi dalam penurunan AKI.

7. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Target *Millennium Development Goals* (MDGs) Nasional untuk AKB di tahun 2015 adalah kurang lebih atau sama dengan 23 per 1.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan SDKI 2012, AKB DIY adalah 25 per 1000 kelahiran hidup. Secara nasional, capaian tersebut berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur (21 per 1000 kelahiran hidup), Provinsi DKI Jakarta (22 per 1000 kelahiran hidup), dan Riau (24 per 1000 kelahiran hidup).



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Gambar 2.29 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di DIY Tahun 2011-2015

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, penyebab umum kematian bayi di DIY adalah berat bayi lahir rendah (BBLR) dan sepsis. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain asfiksi pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit.

Kebijakan kesehatan bayi difokuskan pada intervensi layanan kesehatan meliputi : peningkatan pelayanan neonatal dan ibu, peningkatan cakupan imunisasi, peningkatan upaya perubahan perilaku, dan penanganan permasalahan gizi bayi.

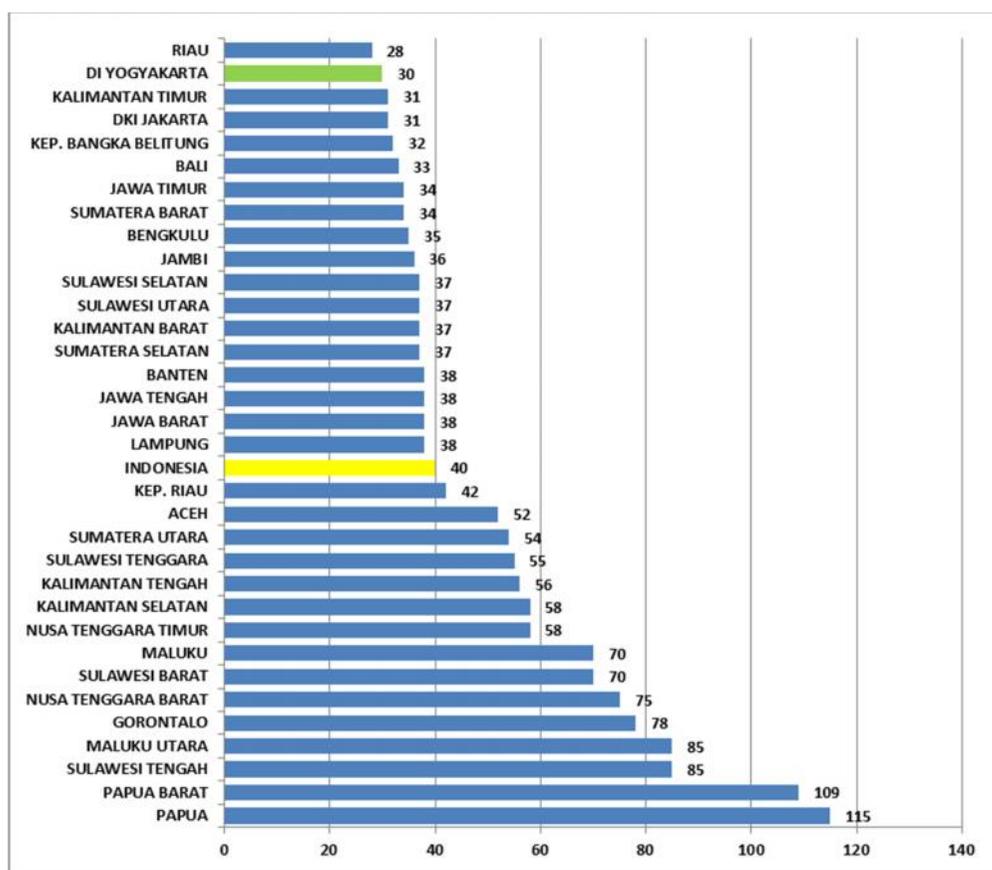
8. Angka Kematian Balita (AKB)

Perkembangan usia anak balita merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan, perkembangan, dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan secara umum.

Salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan kesehatan balita adalah Angka Kematian Balita (AKBA).

AKBA adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari) selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Target MDGs nasional untuk indikator Angka Kematian Balita (AKBA) tahun 2015 adalah mengurangi dari kondisi tahun 1999. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menargetkan agar AKBA Indonesia berada pada angka 32 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2015. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa AKBA DIY sebesar 30 per 100 kelahiran hidup yang berarti telah memenuhi target pemerintah.

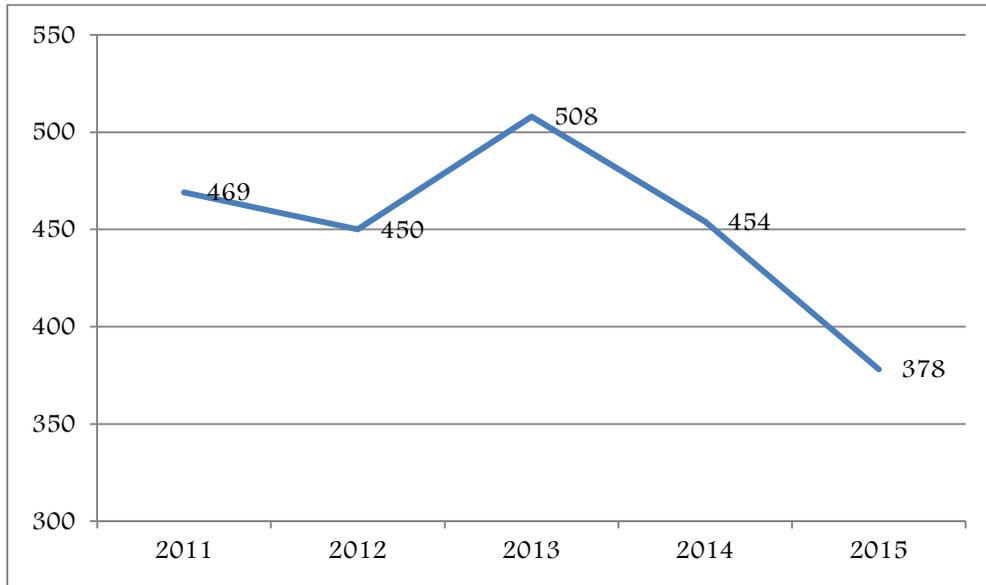


Sumber : SDKI 2012

Gambar 2.30 Perbandingan Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Antar Provinsi 2012

Dilihat dari jumlah kasus kematian balita di DIY, dalam kurun tiga tahun terakhir terjadi penurunan jumlah kasus. Tahun 2015, jumlah kasus

kematian balita di DIY sejumlah 378 kasus yang menurun dari tahun 2014 sejumlah 454 kasus dan 2013 sejumlah 508 kasus.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

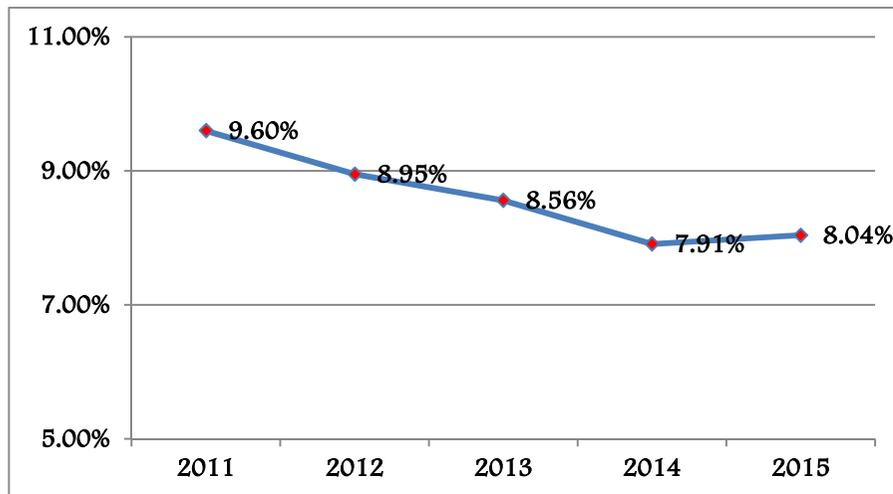
Gambar 2.31 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di DIY, Tahun 2011-2015

Kesehatan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan pada anak balita yang dilakukan oleh tenaga kesehatan meliputi : Pelayanan pemantauan pertumbuhan, Pemberian vitamin A, Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang, dan Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

9. Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP)

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prevalensi balita kekurangan energi protein (KEP) yang biasa disebut balita kurang gizi sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2015 prevalensi KEP mengalami sedikit peningkatan dari 7,91% tahun 2014 menjadi 8,04%.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Gambar 2.32 Prevelansi Balita Kekurangan Gizi di DIY, tahun 2011-2015

Intervensi permasalahan gizi pada balita difokuskan untuk peningkatan pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang anak, dan intervensi gizi mikro.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

A. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Budaya

Berseminya kembali nilai-nilai budaya luhur masyarakat Yogyakarta yang pernah diterapkan dari kehidupan di masa lalu ke dalam peradaban terkini atau yang dinamakan *Rennaisans Yogyakarta* telah menjadi semangat dalam pembangunan segala bidang yang diperkuat oleh kebudayaan. Budaya diharapkan dapat mewarnai dunia pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga serta tata ruang dan lingkungan. Strategi pencapaian rennaisans Yogyakarta diwujudkan dengan lima hal, diantaranya adalah mengembalikan nilai keluhuran berbangsa yang kian menipis, membebaskan masyarakat dari posisi marjinal, konsolidasi integrasi melalui pengakuan kemajemukan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, mengidupkan kembali visi kemaritiman dan menguatkan nilai sejarah lokal.

“*Rennaisans Yogyakarta* yang dipayungi filosofi *hamêmayu-hayuning bawânâ*, dihidupi semangat gotong-royong yang mengacu pada konsep *aworing kawulâ-gusti* dan *golong-gilig*, serta diekspresikan oleh sikap

satriyâ: sawiji, grêgêt, sêngguh, ora-mingkuh, memberikan vitalitas dan ruh baru, arah baru, nilai baru, serta kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke Timur, seraya meluruskan kembali ‘rasa keTuhanan’ kita” (dikutip dari Sri Sultan Hamengku Buwana X, Gubernur DIY, 2012).

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2012, kebudayaan semakin mendapatkan kekuatannya untuk eksis dan berkembang dengan ditetapkannya kebudayaan sebagai salah satu kewenangan keistimewaan sehingga peluang untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY semakin terbuka lebar

Perdais No 1 Tahun 2013 Pasal 3 menggariskan arah pembangunan keistimewaan yang menjadi panduan pembangunan kebudayaan:

Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;*
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;*
- c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan*
- e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.*

Pembangunan kebudayaan diharapkan menyentuh hal-hal penting yang harus dituju dalam keistimewaan yaitu mencakup pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketentraman, kebhinnekatunggalikaan, pemerintahan yang baik, penguatan peran Kraton dan Puro Pakualaman.

Pasal 35

Kebijakan penyelenggaraan Kewenangan Kebudayaan diselenggarakan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya berupa:

- a. nilai-nilai;*
- b. pengetahuan;*
- c. norma;*
- d. adat istiadat;*
- e. benda;*
- f. seni; dan*
- g. tradisi luhur*

yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Tabel 2.21 Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2016 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Peningkatan organisasi budaya dan desa budaya kategori maju	unit	3	2	3	150	3	100
2.	Persentase Nilai budaya, Adat, dan Tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	17,68	20	20.30	101.5	30	67.6
3.	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	%	41,12	55	55.14	100.25	70	78.77
4.	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan.	%	52,80	52	52.83	101.5	54	97.83
5.	Persentase Implementasi Hasil Kesepakatan	%	15	20	20.30	101.5	35	58

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY 2016

Berdasarkan Tabel di atas realisasi kinerja urusan kebudayaan di Provinsi DIY pada tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan dan lebih besar jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Sementara itu, perkembangan pemajuan budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam Tabel berikut.

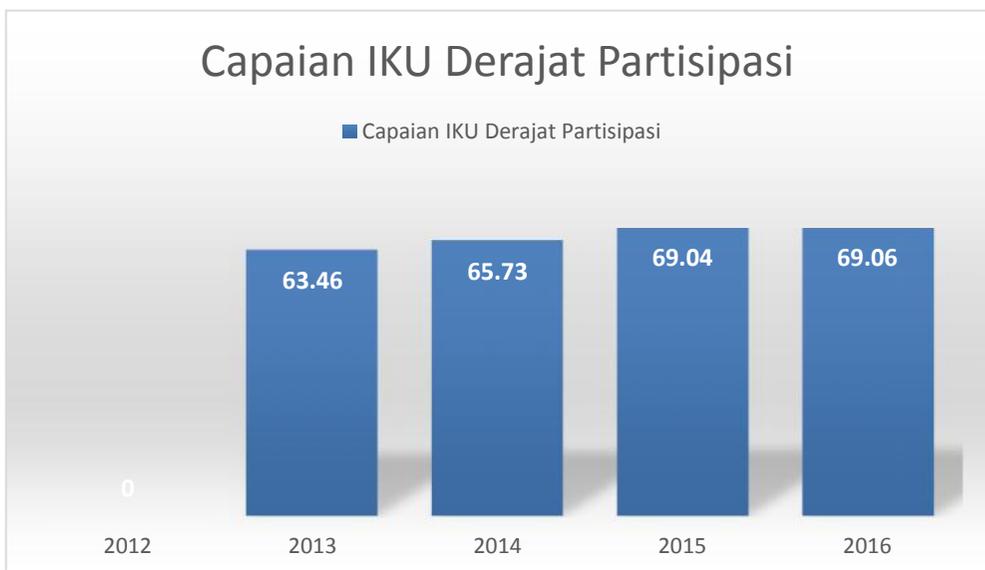
Tabel 2.22 Capaian Pemajuan Kebudayaan di DIY Tahun 2012-2016

Aspek	Satuan	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kunjungan museum	Orang	1.375.000	1.636.000	1.636.000	1.8400.000	2.000.000
Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju	Organisasi	40	54	54	87	90
Jumlah cagar	Buah	536	1015	1011	1014	1165

Aspek	Satuan	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
budaya yang dilestarikan						
Jumlah Gelar Seni Budaya	Kali	980	1.025	1.200	1.275	1.350
Jumlah Desa Budaya berkategori Maju	Desa	12	12	14	17	17
Jumlah Dokumen seni Budaya dan karya seni yang dilestarikan	Dokumen	120	120	120	120	120
Jumlah sumber sejarah yang terkelola	Sumber sejarah	700	700	700	700	700
Jumlah Gedung Seni Budaya	Gedung	96	107	107	107	107

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Data Pembangunan Daerah DIY, Bappeda DIY

Capaian Kinerja IKU Gubernur untuk Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya



Gambar 2.33 Capaian IKU Gubernur Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Secara rinci kemajuan data dan informasi kemajuan kebudayaan dapat dilihat di uraian berikutnya.

A. Adat Istiadat, Tradisi, dan Seni Budaya

Nilai-nilai adat istiadat, tradisi dan seni budaya merupakan perwujudan religius spiritual masyarakat DIY. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di DIY dapat diformulasikan sebagaimana termuat dalam Perdas 1 Tahun 2013 dan Perda No 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Nilai-nilai tersebut telah diwujudkan dalam adat istiadat, tradisi, dan sistem nilai budaya lainnya. Masyarakat DIY masih mempertahankan 475 upacara adat, 35 tradisi, 58 permainan tradisional, 180 makanan tradisional, walaupun dilaksanakan tidak secara merata. Daerah-daerah tertentu mengupayakan dapat mengaplikasikan beberapa jenis adat dan tradisi. Upacara adat yang sangat menarik masyarakat antara lain tradisi nguras enech atau mengganti air gentong di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, saparan bekakak, upacara Grebeg, tradisi cupu panjala, jamanan kereta pusaka.

Pasal 36

(1) Nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a adalah Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

(2) Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tata nilai religio-spiritual;*
- b. tata nilai moral;*
- c. tata nilai kemasyarakatan;*
- d. tata nilai adat dan tradisi;*
- e. tata nilai pendidikan dan pengetahuan;*
- f. tata nilai teknologi;*
- g. tata nilai penataan ruang dan arsitektur;*
- h. tata nilai mata pencaharian;*
- i. tata nilai kesenian;*
- j. tata nilai bahasa;*
- k. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;*
- l. tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan;*
- m. tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan*
- n. tata nilai semangat keyogyakartaan.*

Dalam kebudayaan Jawa Yogyakarta, upacara adat yang telah menjadi tradisi amat luas cakupannya, di antaranya berkenaan dengan daur hidup manusia, peribadatan keagamaan, dan persahabatan manusia dengan alam. Upacara adat yang berkenaan dengan daur hidup manusia

dimulai dari ketika manusia masih berbentuk janin berusia tujuh bulan (*mitoni; tingkeban*), lahir (*brokohon*), putus tali pusarnya (*pupak puser; puputan*) pemberian nama (*njenengi*), aqiqah (*kékahan*), turun ke tanah (*tedhun lemah; tedhak sitèn*), khitanan anak laki-laki (*sunatar; supitan*) dan perempuan (*tetesan*), menikah (*omah-omah*), dan meninggal dunia (*tilar donya*) dengan segala rangkaian upacara setelahnya. Di samping upacara daur hidup, terdapat pula upacara ruwatan, yakni suatu upacara yang dimaksudkan untuk “membersihkan” pengaruh buruk (*sukerta*) yang mungkin timbul pada diri seseorang.

Penghargaan atas upaya pelestarian adat istiadat dilakukan salah satunya dengan Festival baik terhadap komunitas atau kelompok pemerhati upacara adat, karena banyak nilai keluhuran dalam upacara adat tersebut yang ditinggalkan. Setiap perwakilan dari lima kabupaten/kota di DIY menampilkan upacara adat yang menjadi tradisi di masing-masing wilayah. Kontingen Gunungkidul, misalnya, menampilkan upacara adat Nyadran ‘Mbah Jodeh’. Tradisi tersebut digelar di Desa Petir Kecamatan Rongkop. Mereka menampilkan kisah petani yang sedih karena tanaman Bongko mereka tiba-tiba mati. Upacara tersebut biasa digelar saat panen rata tanaman Bongko yang menghasilkan gudhe jero, dan ketela pohon atau gaplek yang menjadi salah satu makanan khas Gunungkidul. Gelar upacara ini sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan atas kesuburan tanah. Kontingen Bantul menampilkan Merti Dusun Sendang Suro Setiko dari Desa Terong, Dlingo. Adapun kontingen Kulonprogo menampilkan Merti Bumi Tinalah dari Kecamatan Samigaluh. Diikuti Kontingen Kota Jogja dengan upacara adat Merti Code. Terakhir, kontingen Sleman menampilkan Upacara Adat Umbul Kamulyan dari Dusun Dayakan, Purwomartani Kalasan.

Tabel 2.23 Nilai Adat dan Tradisi di DIY

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Upacara Adat	447	447	459	473	475
Upacara Tradisi	35	35	35	35	35
Organisasi Penghayat Kepercayaan	90	90	94	115	119
Makanan Tradisional	137	137	137	181	180
Jenis Permainan Tradisional	34	34	34	34	58
Jenis Pakaian	15	15	35	35	35
Sanggar Rias	405	405	405	405	405
Cerita Rakyat	33	33	33	33	33

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2016

Di DIY sampai saat ini masih memiliki 475 jenis upacara adat yang tersebar di kabupaten kota. Upacara tradisi yang menandai daur hidup manusia di tiap kabupaten dan kota ada 35 jenisnya, kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamat. Terdapat keanekaragaman maksud atau keperluan sebuah upacara adat, misalnya untuk pemujaan, permohonan, pencucian, inisiasi, tasyakur, pengukuhan atau sekedar ekspresi kegembiraan. Dalam upacara adat akan ditampakkan symbol-simbol kesakralan, kekhidmatan, keagungan, keindahan, dan bahkan keceriaan. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya incidental dan tidak teragendakan secara tetap, antara lain berupa *mitoni*, *tetakan*, *pitung dinanan*, *slametan*, *nyatus*, *nyewu* dan lain-lain. Beberapa desa, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di desa lain, antara lain *merti dusun*, *ruwatan*, *labuhan*, *bersih desa*, *sedekah bumi* dan sebagainya. Makanan tradisional yang masih dapat dijumpai masih ada 180 jenis, seperti *nagasari*, *gudheg*, *mendhut*, *lemper*, *pecel*, *wedang uwuh*, *bakpia*, *yangko*, *geplak*, dan lain-lain. Permainan tradisional yang masih dikenal ada 58 jenis, antara lain *dakon*, *benthik*, *dhelik-dhelikan*, *gobag sodhor*, *jamuran* yang memiliki nilai-nilai kebersamaan, kreativitas dan inovasi.

Organisasi kepercayaan yang hidup ada 120 organisasi yang tersebar di Kab. Bantul sebanyak 27, Kab. Kulonprogo sebanyak 25, Kab. Gunungkidul sebanyak 14, Kab. Sleman sebanyak 33, dan Kota Yogyakarta sebanyak 21. Setiap kabupaten dan kota memiliki 35 jenis pakaian adat. Adat rias dan busana pengantin yang diwujudkan dalam bentuk sanggar rias ada 405 sanggar yang melestarikan upacara pengantin gaya Yogyakarta lengkap dengan busana dan aksesorisnya.

Untuk melestarikan upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Permainan tradisional yang dapat ditemukan ada sekitar 58 macam yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. DIY sebenarnya masih memiliki 56 desa budaya. Desa budaya berkategori maju adalah desa budaya yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan tujuh unsur kebudayaan yang universal, mengaktualisasikan kekayaan potensi secara maksimal serta mengkonservasi kekayaan budaya yang dimiliki. Capaian realisasi indikator persentase desa budaya berkategori maju tahun 2016 sebesar 39,3% dari 56 desa budaya. Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan desa-desa budaya dan kampung budaya

di DIY. Balai-balai budaya di desa budaya dikembangkan untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di pedesaan yang berperan penting dalam pertahanan ketahanan budaya di DIY.

B. Kesenian

Kehidupan kesenian di DIY berkembang pesat karena bermunculannya SDM yang sangat inovatif dan kreatif menciptakan karya seni baik yang diadaptasi dari seni tradisi maupun kontemporer sehingga membangkitkan kembali kelompok seni yang sudah lama tidak aktif dan bermunculan kelompok seni yang baru, walaupun secara kuantitatif menunjukkan penurunan. Kesenian bagi masyarakat Yogyakarta memiliki fungsi mediasi, symbol, pendidikan, dan hiburan. Masing-masing fungsi seni seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi beberapa fungsi seni bisa saling melekat dalam suatu karya atau pertunjukan seni. Potensi kesenian Yogyakarta sangat beragam, meliputi seni pertunjukan, seni kriya, seni rupa, seni audio visual, dari yang klasik sampai kontemporer.

Sampai saat ini ada 17 kelompok seni yang mengembangkan seni rupa, 5543 aktif di seni pertunjukan, dan 42 kelompok bergerak di sinematografi. Galeri seni yang didirikan ada 29 buah. Organisasi budaya berkategori maju adalah organisasi budaya yang memiliki kelengkapan administrasi, peralatan dalam kondisi baik, kegiatan latihan yang dilakukan secara terjadwal, pementasan pada tingkat nasional dan internasional serta mendapatkan penghargaan tingkat provinsi, nasional dan internasional. Indikator persentase organisasi budaya berkategori maju, 1,41 % atau 90 organisasi budaya dibandingkan organisasi budaya yang terdata sejumlah 6.392.

Seni yang juga berkembang pesat saat ini di DIY adalah dunia film. Banyak film yang telah diproduksi di DIY baik nasional maupun internasional, seperti film Sang Pencerah, film Turis Romantis, Surga yang Tak dirindukan, Java Heat, The Philosophers yang mengambil lokasi di kawasan-kawasan cagar budaya. Pada tahun 2015 DIY telah memproduksi karya budaya film unggul yaitu antara lain : Amarta (Gadis dan Air), Bawang Kembar, Ilalang ingin Hilang Waktu Siang, Jaranan, Kirana, Kitorang Basudara, Natalan, Neng Kene Aku Ngenteni Kowe, Pulang Tanpa Alamat, Sasi Takon. Pada tahun 2016 Film yang diproduksi Dinas Kebudayaan terdiri dari Film Dokumenter (Jamu (*Saking Wingking Mengajeng*), Jogja kembali, *Sosrokusuman*), dan Film Fiksi (*Happy Family*, *Kleang Kabur Kanginan*, *Ruah*).

Grup-grup kesenian diklasifikasikan dalam tiga tahapan perkembangan, yaitu: tumbuh, berkembang, dan maju. SDM industri kreatif nasional diwarnai oleh tokoh seniman dan budayawan kreatif dari DIY, yaitu antara lain : Soimah, Kelik Pelipur Lara, Hanung Bramantyo, Seventeen, Jogja Hip Hop Foundation, Petakumpet, Dagadu, Shaggydog,

Sheila On 7, Butet Kertarajasa, Jaduk Feriyanto, Anggito Abimanyu, Cak Nun, Letto dan lain-lain.

Perkembangan kesenian Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi *profane* atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Di sisi lain, terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perubahan akan selalu terjadi, sebagai akibat adanya kreativitas seniman, tuntutan perubahan fungsi dan selera masyarakat yang terus berubah. Perkembangan kesenian di Yogyakarta juga tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, *artshop* dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, akademi komunitas dan lain-lain.

Berikut pengklasifikasian kelompok seni sebagai berikut :

Tabel 2.24 Klasifikasi Kelompok Seni, Tahun 2016

No	Kab/Kota	Jumlah	Jenis Kesenian	Kriteria		
				Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Kota Yogyakarta	631	45	422	200	9
2	Kabupaten Sleman	1859	52	1166	667	26
3	Kabupaten Bantul	1210	52	928	265	17
4	Kabupaten Gunungkidul	1272	51	1001	253	18
5	Kabupaten Kulon Progo	1420	46	1283	117	20
	DIY	6392		4800	1502	90

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2016

Tabel 2.25 Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY, Tahun 2016

No	Organisasi Budaya	Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	DIY
1	Organisasi Seni Rupa	5	5	1	2	4	17
2	Organisasi Sinematografi	19	6	-	-	17	42

No	Organisasi Budaya	Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	DIY
3	Organisasi Seni Pertunjukkan	445	990	1154	1360	1594	5543
4	Lembaga Budaya	39	25	1	-	115	180
5	Lembaga Pendidikan Budaya	12	14	4	11	8	49
6	Prasarana Budaya	18	48	11	6	24	107
7	Organisasi Kepercayaan	21	27	14	25	33	120
8	Organisasi Persewaan dan Penjualan Film	21	-	-	-	17	38
9	Organisasi Perusahaan/Produksi Film	17	1	-	-	2	20
10	Galeri Seni Rupa	11	6	-	1	11	29
11	Kerajinan Property Budaya	21	88	87	15	33	244
12	Perusahaan Bioskop	2				1	3
	DIY	631	1210	1272	1420	1859	6392

Sumber : *Jogja Budaya, 2016*

Tabel 2.26 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten Kota di DIY, Tahun 2016

Kab/Kota	Rasio Grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio Gedung kesenian per 10.000 penduduk
Kabupaten Bantul	12,45	0,89
Kabupaten Sleman	15,92	1,26
Kabupaten Gunungkidul	17,78	0,22
Kabupaten Kulon Progo	34,39	0,41
Kota Yogyakarta	15,28	1,67
DIY	17,37	0,91

Sumber: *Dinas Kebudayaan DIY, 2016*

Organisasi seni budaya bertumbuhkembang meramaikan *event-event* seni budaya. Festival, Karnaval, Gelar Budaya, Pasar Rakyat, Lomba

Seni Budaya, Pameran dan event-event budaya lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional semakin banyak diselenggarakan baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah, antara lain yaitu : Gelar Budaya Jogja, Bienalle, FKY, Gelar Ketoprak, Karnaval Jogja, Jogja Fashion Week, Sekaten, Kirab Budaya, Festival Adat Istiadat, Festival Dalang Anak, Festival Film Indie, Festival Adiluhung, Pagelaran Musik, Festival Budaya Kotagede, Ngayogjazz, Keroncong Kotagede, Ketoprak Contong. Festival kebudayaan Yogyakarta diproyeksikan akan menjadi *event icon* Yogyakarta yang spektakuler. IKPMD se DIY juga dilibatkan dalam Festival Selendang Sutera (Semarak legenda Suku Nusantara). Data penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukkan peningkatan kuantitas pada tahun 2012 sebanyak 980 menjadi 1.350 pada tahun 2016. Hal ini mengisyaratkan adanya pemberlanjutan dari pelestarian seni dan budaya.

Tabel 2.27 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, Tahun 2012-2016

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	980	1.025	1.200	1.275	1.350
Prasarana Budaya	107	107	107	107	107
Lembaga Budaya	105	82	82	98	180
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	43	49	49

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2016

C. Sejarah dan Purbakala

Mozaik sejarah peradaban DIY dari era prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, dan Kontemporer dapat disaksikan dalam peninggalan warisan budaya dan cagar budaya baik yang posisinya terpisah satu sama lain maupun mengelompok dalam suatu area. Suatu kawasan yang mempunyai dominasi potensi benda cagar budaya dalam wilayah yang cukup luas dan tidak mengenal batas administratif disebut Kawasan cagar Budaya. Sejumlah kawasan memiliki tinggalan fisik yang sangat dominan terutama yang berupa monumen dan tidak banyak terkait dengan kehidupan masa kini sehingga sering dipahami sebagai *dead monument*.

DIY sangat kaya akan cagar budaya baik *tangible* maupun *intangible* yang bernilai besar bagi peradaban manusia yang harus terjamin kelestariannya dan merupakan Daerah Istimewa. Setiap Bangunan Cagar

Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya. Kekayaan BCB di DIY menduduki peringkat ketiga nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kawasan Cagar Budaya di DIY ada 17 Kawasan, dan yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, yang lain menjadi kewenangan pusat (Prambanan dan Ratu Boko) dan kabupaten (Ambarketawang, Ambarbinangun, Parangtritis, Sokoliman).

Persebaran kawasan cagar budaya di wilayah DIY mencakup di Kab.Bantul sebanyak 3 kawasan cagar budaya, di Kab.Gunungkidul sebanyak 1 kawasan cagar budaya, di Kab. Sleman sebanyak 3 kawasan cagar budaya, di Kota Yogyakarta sebanyak 10 kawasan cagar budaya. Juru Pelihara BCB dan situs di DIY ada 4 orang. BCB dan situs ada yang menyebar di Kawasan-Kawasan Cagar Budaya, ada yang parsial di berbagai tempat, dan ada pula yang tersimpan di museum.

Sampai tahun 2016 tercatat ada 47 museum dan 3 semi museum yang tersebar sebagian besar di wilayah Sleman, Kota dan Bantul. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih jarang ditemukan museum. Asosiasi yang beranggotakan museum-museum di DIY disebut BARAHMUS, sebagai paguyuban museum tertua di Indonesia. Saat ini sejumlah 33 museum telah menjadi anggota BARAHMUS.

Dari 47 museum tersebut, museum Ullen Sentalu dan Museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum bertaraf internasional. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat. Melalui museum masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur sejarah bangsa di masa lalu yang dapat diterapkan di masa sekarang.

Kelestarian cagar budaya di DIY dilindungi oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pemerintah Daerah memperkuat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang telah diturunkan dalam beberapa Peraturan Gubernur, antara lain adalah Pergub No. 40 tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru bernuansa Budaya Daerah, Pergub No 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Pergub No. 56 Tahun 2014 Tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya, BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.28 Kawasan Cagar Budaya

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
1	Kawasan Kraton	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
2	Kawasan Malioboro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
3	Kawasan Pakualaman	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
4	Kawasan Kotagede	Yogyakarta dan Bantul	SK Kadis. No. 188/38.A
5	Kawasan Kotabaru	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
6	Kawasan Imogiri	Bantul	SK Kadis. No. 188/38.A
7	Kawasan Parangtritis	Bantul	SK Kadis. No. 188/38.A
8	Kawasan Pleret	Bantul	SK Kadis. No. 188/38.A
9	Kawasan Jetis	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
10	Kawasan Pengok	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
11	Kawasan Baciro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
12	Kawasan Prambanan	Sleman	SK Kadis. No. 188/38.A
13	Kawasan Ratu Boko	Sleman	SK Kadis. No. 188/38.A
14	Kawasan Sokoliman	Gunungkidul	SK Kadis. No. 188/38.A
15	Kawasan Ambarbinangun	Yogyakarta	
16	Kawasan Bintaran	Yogyakarta	
17	Kawasan Ambarketawang	Sleman	

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Tabel 2.29 Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tahun 2012-2016

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Cagar Budaya yang ditetapkan	517	517	588	588	588
Bangunan Cagar Budaya	520	947	877	881	1042
Benda Cagar Budaya	747	762	763	764	807
Kawasan Cagar Budaya	16	16	16	16	17
Situs	95	176	184	184	339
Monumen Sejarah Perjuangan	44	52	65	70	70
Museum	42	42	43	47	47
Pelaku sejarah	16	22	22	21	21
Peristiwa Sejarah	94	95	95	130	130
Naskah Kuno	n/a	509	509	509	509

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan), Barahmus

Tabel 2.30 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya, Tahun 2016

NO	Kabupaten/Kota	Bangunan Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya	Situs	Kawasan Cagar Budaya	Total
1	Kota Yogyakarta	674	50	9	10	743
2	Kabupaten Bantul	108	275	65	3	451
3	Kabupaten Gunungkidul	99	93	127	1	320
4	Kabupaten Kulon Progo	53	84	49	0	186
5	Kabupaten Sleman	108	290	89	3	490
	Belum diidentifikasi		15			
	DIY	1042	807	339	17	2205

Sumber : www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan), 2017

Tabel 2.31 Penanganan Cagar Budaya, Tahun 2012-2016

Aspek	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	536	1015	1011	1014	1165
Total benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	1.410	1.446	1.824	1845	2205

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan)

Capaian kinerja rehabilitasi cagar budaya tahun 2016 sebesar 19,59 terhadap total cagar budaya yang dimiliki, sedangkan terhadap cagar budaya yang berbentuk bangunan sebesar 41,46 %.

Tabel 2.30 Klasifikasi Benda Cagar Budaya Hingga Tahun 2014

No	Klasifikasi	Yk	Btl	KP	GK	Slm	DIY	SK
1	A/Internasional	1	-	-	-	3	4	SK Mendikbud
2	B/Nasional	14	1	-	-	4	19	SK Mendikbud, Gubernur, Walikota
3	C/Provinsi	82	3	5	2	10	102	SK Gubernur, SK Kepala Dinas
4	D/Kab/Kota	23	6	3	9	5	46	SK Gubernur/SK Walikota

No	Klasifikasi	Yk	Btl	KP	GK	Slm	DIY	SK
5	E/Lokal	3	3	-	2	-	8	SK Walikota
	Total yang sudah diklasifikasikan	123	13	8	13	22	179	
	Total yang belum diklasifikasikan	354	2	-	-	2	358	
	Total	477	15	8	13	24	517	

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY

Kemunculan bangunan baru di dalam Kawasan Cagar Budaya mempunyai segi-segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata, tetapi akan bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali. Penegakan regulasi seringkali mengalami berbagai hambatan sehingga menimbulkan konflik di lapangan.

Ancaman kelestarian Bangunan/ Benda Cagar Budaya dapat timbul karena faktor kimia, biologis, fisika, lingkungan, kasus-kasus kriminalitas.Keunikan, keindahan, kelangkaan BCB acapkali menjadi daya tarik bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pengrusakan dan pencurian, bahkan BCB yang tersimpan dalam museum pun terancam keselamatannya.BCB di DIY pun tidak luput dari ancaman itu.Perusakan BCB baik sengaja maupun tidak sengaja banyak terjadi.

BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional, tetapi persentasenya masih kecil yaitu 3 %. Sampai pada tahun 2014 BCB dan situs yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan mencapai 7 % dari semua BCB dan situs nasional. BCB dan situs yang terpelihara dibandingkan dengan Provinsi lain di seluruh Indonesia ada 4 %. Juru Pemelihara BCB dan situs di DIY ada 10 % dari juru pemelihara BCB dan situs di seluruh Indonesia.

Tabel 2.31 Perbandingan Data Benda Cagar Budaya DIY dan Nasional, Tahun 2014

No	Aspek	DIY	%	Nasional
1	BCB/Situs	1540	3 %	65.165
2	BCB/Situs yang ditetapkan	521	7 %	961
3	BCB/Situs yang dipugar	35	5 %	643
4	BCB/Situs yang dipelihara	71	4 %	1895
5	Juru Pemelihara BCB/Situs	294	10 %	2988
6	Konservasi	64	44 %	146
7	Kasus	1	4 %	24

Sumber : Bappenas RI, Tahun 2014

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, disebutkan urusan Pemerintah Provinsi dibidang Kebudayaan Sub Bidang Purbakala antara lain ;

- a. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional “*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*” skala provinsi.
- b. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/ situs skala provinsi.
- c. Penetapan BCB/situs skala provinsi.
- d. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi.
- e. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi.
- f. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.
- g. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs skala provinsi.
- h. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.
- i. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.
- j. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.

Indonesia telah memiliki UU terbaru untuk Pengelolaan Cagar Budaya, yaitu UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menggantikan UU No 5 Tahun 1992. Isi-isi pasal dalam Perda harus disesuaikan dengan UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena banyak konsep dan objek yang berbeda. Akhir Juni 2012 Raperda berhasil dituntaskan oleh legislatif dan eksekutif setelah melalui proses yang panjang dan menjadi Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Inti isi Perda adalah pengembangan budaya Yogyakarta yang terintegrasi dalam konsep keistimewaan; pengelolaan meliputi kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan; dan pengawasan cagar budaya, pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029 Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sebagaimana bunyi ketentuan berikut:

Pasal 43 :

Kebijakan penetapan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c memantapkan fungsi lindung kawasan cagar

alam, kawasan taman hutan raya, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 44 :

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 43 sebagai berikut :

Pada Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dengan :

- a. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya;
- b. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan zona-zona pengembangan ilmu pengetahuan, dan pariwisata rekreasi dan pendidikan; dan
- c. melarang kegiatan budi daya apa pun yang tidak berkaitan dengan fungsinya dan tidak berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya.

DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional, 14% museum di Indonesia berada di Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan terbanyak koleksinya kedua setelah museum nasional. Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional. Revitalisasi museum negeri Sonobudoyo dilakukan secara multiyears. Museum di DIY cenderung bertambah walaupun banyak menemui permasalahan dalam aspek kelembagaan pengelola dan SDM. Sampai tahun 2016 tercatat ada 47 museum dan 3 semi museum yang tersebar sebagian besar di wilayah Sleman, Kota dan Bantul. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih jarang ditemukan museum. Asosiasi yang beranggotakan museum-museum di DIY disebut BARAHMUS, sebagai paguyuban museum tertua di Indonesia. Saat ini sejumlah 33 museum telah menjadi anggota BARAHMUS.

Tabel 2.32 Daftar Museum Anggota Bahramus di DIY

No	Nama Museum	Lokasi	Jenis	Status	Kategori
1	Bebadan Museum Karaton Ngayogyakarta	Kota	Khusus	Bebadan	Budaya
2	Museum Negeri Pemda DIY Sonobudoyo	Kota	Umum	Negeri	Budaya
3	Bebadan Museum Pura Pakualaman	Kota	Khusus	Bebadan	Budaya
4	Museum Batik Yogyakarta	Kota	Khusus	Swasta	Budaya
5	Museum Affandi	Sleman	Khusus	Swasta	Budaya
6	Museum Ullen Sentalu	Sleman	Khusus	Swasta	Budaya
7	Museum Wayang Kekayon Yogyakarta	Bantul	Khusus	Swasta	Budaya
8	Museum Tani Jawa Indonesia	Bantul	Khusus	Swasta	Pendidikan

No	Nama Museum	Lokasi	Jenis	Status	Kategori
9	Tembi Rumah Budaya	Bantul	Khusus	Swasta	Budaya
10	Museum Pendidikan & Mainan Kolong Tangga	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
11	Museum Bahari	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
12	Museum Biologi	Kota	Khusus	Negeri	Pendidikan
13	Museum Dewantara Kirti Griya	Kota	Khusus	Swasta	Perjuangan
14	Museum KRKB Gembira Loka	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
15	Museum Dr Yap	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
16	Museum Peta	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
17	Museum Pendidikan Indonesia UNY	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
18	Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
19	Museum Gunung Merapi	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
20	Museum Gumuk Pasir / Lab Geospasial	Bantul	Khusus	Negeri	Pendidikan
21	Museum Wanagama	Gunung kidul	Khusus	Negeri	Pendidikan
22	Museum Benteng Vredeburg	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
23	Museum Sasmitaloka Pangsar Sudirman	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
24	Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
25	Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia	Sleman	Khusus	Swasta	Perjuangan
26	Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala	Sleman	Khusus	Negeri	Perjuangan
27	Museum Perjuangan	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
28	Museum Sandi	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
29	Museum Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan	Sleman	Khusus	Negeri	Perjuangan
30	Museum Monumen Yogya Kembali	Sleman	Khusus	Swasta	Perjuangan
31	Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
33	Museum Sejarah Purbakala Pleret	Bantul	Khusus	Negeri	Budaya

Sumber : Barahmus, 2015

Tabel 2.33 Daftar Museum-Museum Baru di DIY

No	Nama Museum	Lokasi
1	Museum Rumah Garuda	Bantul
2	Museum Memorial HM Soeharto	Bantul
3	Museum Taman Wisata Candi Prambanan	Sleman
4	Museum Gempa Prof DR Sarwidi	Sleman
5	Museum UII Candi Kimpulan	Sleman
6	Museum Paleoantropologi UGM	Sleman
7	Museum Sumber Karahayon	Bantul
8	Museum Batik Ciptowening Imogiri	Bantul
9	Museum Kulonprogo	Kulonprogo
10	Museum Istana Negara Gedung Agung	Kota

No	Nama Museum	Lokasi
11	Museum Tino Sidin	Bantul
12	Museum MMTC	Sleman
13	Museum Taman Pintar Yogyakarta	Kota
14	Museum Gedung BI	Kota

Sumber: *Barahmus, 2015*

Tiga lokasi sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai museum, karena museum harus memiliki koleksi, pengelola, pameran secara rutin, sedangkan lokasi tersebut lebih pada hiburan dan galeri tanpa koleksi tetap, namun diidentikkan sebagai museum, yaitu *Jogja National Museum*, *Museum De Mata Trick Eye*, *Museum De Arca*.

Hal-hal yang dilakukan untuk menggiatkan kunjungan ke museum antara lain : Festival Museum: Karnaval & Pameran (2007), Karnaval Museum (2009), Festival Museum: Opera Karnaval (2010), Museum Goes To Mall (2011), Museum Goes To Istana (2012), Museum Goes To Campus (2013), Museum Goes To School (2014). Promosi museum juga dilakukan dengan pemilihan duta museum. Setiap sekolah juga diwajibkan untuk kunjung museum dengan fasilitas bus museum. Partisipasi Museum DIY dalam event nasional juga secara gencar dilakukan, salah satunya dalam Pameran Kain Tradisional Nusantara di Museum Nasional. Museum Negeri Yogyakarta telah melakukan penataan diri baik di Museum Unit I maupun Unit II. Bimbingan bagi Edukator museum dilakukan secara intensif bagi SDM-SDM museum yang disebarkan ke seluruh museum di DIY.

Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap kedua di tingkat nasional setelah Museum Nasional, terdiri dari koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, historika, numismatika, filologika, keramologika, senirupa, teknologi. Saat ini benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo sebanyak 43.235 buah, sudah diinventarisir sejumlah 11.031 buah (25,51 %), belum diinventarisir sejumlah 32.204 buah (74,48 %). Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo unit I sebanyak 1.184 buah. Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo Unit II sebanyak 810 buah.

Kerjasama kebudayaan yang telah diwujudkan sebagai media diplomasi budaya antara lain adalah: pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama “Jali Roso” untuk National Concert Hall Dublin, misi kebudayaan ke Denizli International Festival di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canberra, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo.

b. Pemuda dan Olahraga

Masa depan suatu bangsa dapat diramalkan dengan melihat kondisi pemuda saat ini. Pemuda Indonesia ke depan harus memiliki kepribadian

dan karakter yang kuat. Pemikiran dan semangat untuk terus membangun diri dengan berkompetisi secara sehat harus terus digemakan dalam pembangunan pemuda Indonesia, dimana pemuda Indonesia harus dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang kuat untuk mampu berdiri sebagai pemuda yang visioner kedepan (mampu melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas) untuk mengangkat harga diri, kehormatan dan kedaulatan bangsa di tingkatan internasional. Salah satu upaya menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda adalah dengan meningkatkan prestasi olahraga.

Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera (amanat penderitaan rakyat). Olahraga akan menjadi lokomotif ekonomi baru.

Banyak atlet nasional maupun internasional yang lahir dari DIY, yaitu antara lain Yayuk Basuki (atlet legendaris bidang tenis), Rita Subowo (atlet legendaris basket), Winarsih, Ivana Ardella Irmanto (Wushu), Felicia Alverina Monindra (Wushu) dan lain-lain.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Jumlah club olahraga pada tahun 2016 terdapat 178 buah.

PON Remaja mempertandingkan 15 cabang olahraga yang meliputi atletik, bola basket, bola voli pantai, bulutangkis, judo, panahan, pencak silat, renang, senam (artistik dan ritmik), sepakbola, tenis lapangan, tenis meja, loncat indah, anggar, dan menembak. Sebagai hasil dari PON Remaja I, DIY meraih peringkat 9 dengan total perolehan medali sebanyak 14 medali yang terdiri dari 3 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu.

Tabel 2.34 Pemuda dan Olahraga di DIY, Tahun 2009-2016

Uraian	Satuan					
	2012	2013	2014	2015	2016	
Organisasi Kepemudaan	35	37	39	40	40	Buah
Jumlah Karang Taruna	440	440	440	440	440	Buah
Jumlah Organisasi Olah Raga	50	50	50	50	50	Buah
Sarana Olah Raga						
1) Standar Internasional	0	0	0	0	0	Unit

Uraian	Satuan					Unit
	2012	2013	2014	2015	2016	
2)Standar Nasional	3	3	3	3	3	Unit

Sumber : *Disdikpora DIY, 2016*

Dari tabel di atas tampak bahwa perubahan dari tahun ke tahun tidak terlalu besar. Perubahan yang nampak yaitu pada jumlah Organisasi Kepemudaan yang mengalami kenaikan pada tahun 2012 hingga tahun 2014.

Tabel 2.35 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, Tahun 2012-2016

Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	15,42	15,42	15,42	15,42	17,37
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,27	0,30	0,33	0,41	0,91
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	0,019	0,019	0,019	0,48	0,48
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0,0008	0,0008	0,0008	0,91	0,91

Sumber: *Disbud DIY & Disdikpora DIY*

Remaja DIY telah memenangkan Juara I, II, dan III dalam *Special Olympic World Summer Game* Tahun 2015 Di Los Angeles Amerika Serikat Cabang Olahraga Bulutangkis Ganda Campuran sebagai *event* lomba olahraga internasional. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Tahun 2015 di Surabaya Bidang Sains Fisika mengantarkan remaja DIY pada Juara I. Prestasi lain pemuda DIY adalah Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) ke-47 Tahun 2015 di Jakarta, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Tahun 2015 di Surabaya Bidang Kesehatan, dan lainnya.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Urusan Konkuren Wajib

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Filosofi yang mendasari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia terangkum dalam "Hamemayu Hayuning Bawana". Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasiskan nilai budaya. Salah satu hal utama yg perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan '*manusia yang utama*' (*jalmâ kang utâmâ*), yang berasaskan '*rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan*'. Basis pembangunan pembanguna tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat renaissance di DI. Yogyakarta.

Konsep *renaissance* pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan belajar mengajar dengan hasil angka-angka akademik saja dan berhenti pada pendidikan ilmu pengetahuan saja. namun lebih dari itu, pendidikan harus dimaknai sebagai proses '*anggulawentah*', yang terdiri dari pendidikan budi pekerti, proses enkulturasi dan akulturasi budaya sebagai bagian dari *character building*.

Sektor pendidikan menerjemahkan visi tersebut melalui tiga pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan sisi hulu yaitu semua input atau masukan pada proses pendidikan yang terwujud dalam indikator angka partisipasi kasar dan Angka Partisipasi Murni. Pendekatan Kedua adalah tahapan yang masuk pada kegiatan proses transformasi input. Indikator yang masuk pada tahap ini antara lain angka mengulang kelas, jumlah anak putus sekolah, rasio guru dan murid dan prosentase perpustakaan sekolah. Pendekatan ketiga merupakan tahapan hilir atau output dari sistem pendidikan. Indikator yang sering dipergunakan antara lain, capaian nilai UN, jumlah medali pada kompetisi terkait pendidikan, Jumlah anak SMK yang diterima di dunia kerja/bisnis, angka RLS dan angka melek huruf. Berikut ini merupakan capaian DIY pada beberapa indikator tersebut.

2.1. Angka Partisipasi Kasar

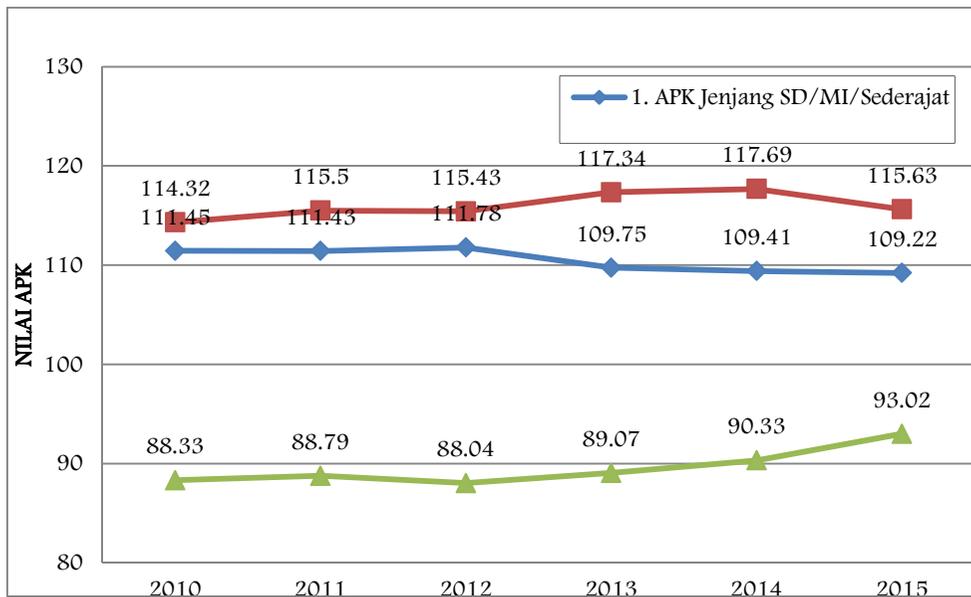
Penjaminan terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan kepastian mendapatkan layanan pendidikan untuk seluruh warga masyarakat merupakan salah satu tujuan program pembangunan pendidikan nasional. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SLTP, dan SLTA/SMK di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan baru menjelaskan derajat aksesibilitas pendidikan, namun indikator ini belum dapat menjelaskan lebih dalam mengenai kualitas modal manusia sebagai hasil dari pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007, perhitungan APK memperhitungkan pula penduduk yang mengikuti pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Dengan menghitung nilai APK, kita dapat melihat tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu daerah dan tingkat pendidikan tertentu.

Perkembangan APK DIY dari tahun 2012 -2015 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. Nilai APK SD dan SLTP hampir stagnan pada angka >100% namun memiliki kecenderungan turun tiap tahunnya. Pada tahun 2015 capaian APK SD sebesar 109,22 atau turun 0,19% dari capaian tahun sebelumnya. Capaian APK SLTP pada tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar 2,06 % dari tahun sebelumnya sebesar 115,63 %.

Capaian APK menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, namun tanpa memperhatikan ketepatan usia pada jenjang pendidikannya. Mengacu pada , layanan pendidikan pada jenjang pendidikan SD dan SLTP telah diakses oleh seluruh masyarakat DIY. Nilai APK pada jenjang pendidikan SD dan SLTP yang melebihi 100 persen disebabkan karena penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya, masuk pada perhitungan ini. Selain itu nilai ini juga dapat menunjukkan bahwa DIY mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Pada tahun 2015, Capaian Nilai APK Pendidikan SLTA/SMK terlihat meningkat 2,68 % pada tahun sebelumnya atau sebesar 93,02 %. Nilai ini mengindikasikan bahwa belum seluruhnya warga DIY mengakses atau memperoleh pendidikan Menengah (SLTA/SMK/Sederajadnya). Sebanyak 6,98 % penduduk DIY pada usia 16-18 tahun yang belum mengenyam pendidikan menengah. Fakta ini seringkali dikaitkan dengan angka putus sekolah pada jenjang ini dan masyarakat yang tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan menengah.

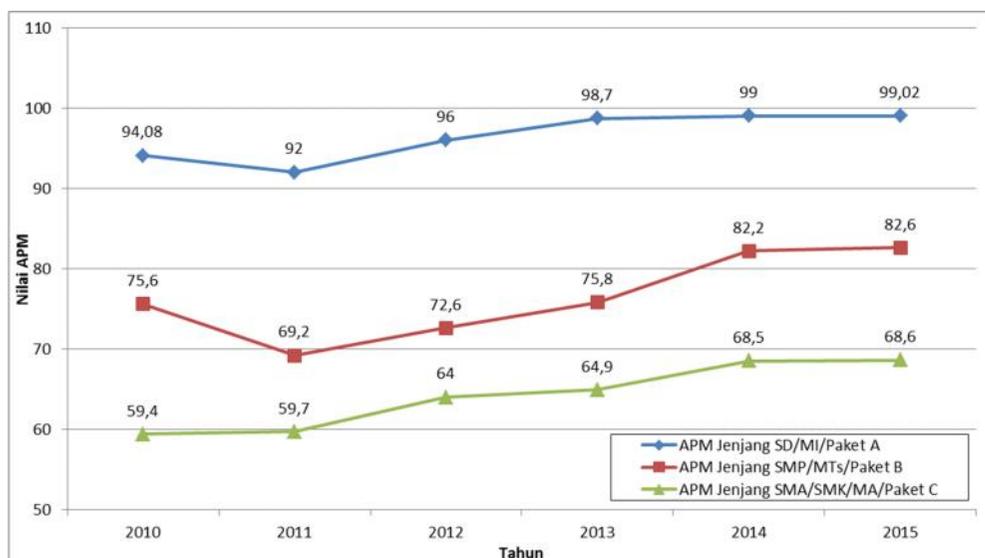


Sumber : Dataku 2016 (Balai Pusat Statistik Daerah) diakses tanggal 30 Januari 2017

Gambar 2.34 APK DIY 2010-2015

2.2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa dengan usia tertentu dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut. APM dipergunakan untuk menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu dan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Capaian APM DIY tahun 2010-2015 ditunjukkan pada grafik berikut.



Sumber : Analisis Informasi Statistik Pembangunan DIY 2016

Gambar 2.35 APM DIY 2010-2015

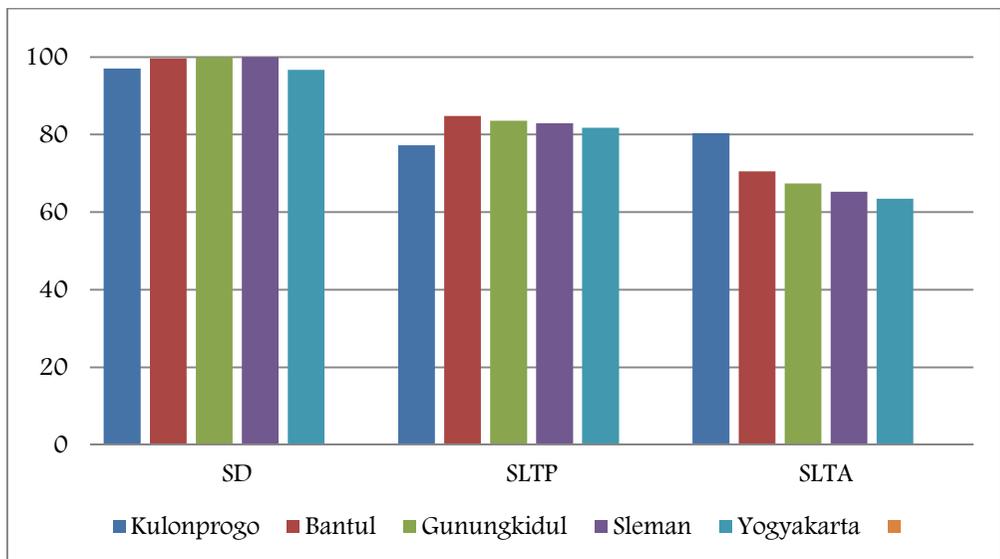
Pada grafik tersebut memperlihatkan capaian nilai APM DIY dari tahun 2010 – 2015. Pada grafik tersebut memperlihatkan kecenderungan penurunan nilai APM per jenjang seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Pada tahun 2015 capaian APM sederajat dengan SD sebesar 99,2 %, kemudian berkurang menjadi 82,6% pada jenjang pendidikan sederajat SLTP dan makin berkurang lagi pada jenjang pendidikan sederajat SLTA/SMK yaitu sebesar 68,6 %. Hal ini memperlihatkan proporsi partisipasi penduduk di usia tertentu (sesuai dengan jenjang pendidikan) makin menurun seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan.

Partisipasi penduduk di usia 7-12 tahun yang sedang mengenyam pendidikan Sekolah dasar di DIY sebesar 99,2 %, hampir mendekati angka 100%. Artinya pada tahun 2015, hampir keseluruhan penduduk DIY pada usia 7-12 tahun sedang menempuh pendidikan setara dengan SD. Pada Jenjang pendidikan SLTP dan sederajadnya terlihat partisipasi murni penduduk usia 13-15 tahun yang sedang menjalani pendidikan sebesar 82,9 %. Menurunnya tingkat partisipasi ini disebabkan karena keterlambatan masuk sekolah, tinggal kelas, telah masuk pada jenjang SLTA karena program akselerasi, dan putus sekolah. Sedangkan Partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang sedang menjalani pendidikan SLTA pada tahun 2015 tercatat sebesar 68,6%. Dapat dijelaskan bahwa sebesar 31,4 % penduduk di usia 16-18 tahun tidak berada di jenjang pendidikan SLTA dikarenakan keterlambatan masuk pada jenjang yang lebih tinggi karena

tinggal kelas, telah masuk pada jenjang Perguruan Tinggi (program akselerasi), tidak melanjutkan pada pendidikan SLTA, dan putus sekolah.

Gambar tersebut memperlihatkan capaian nilai APM tiap kabupaten/kota di DI. Yogyakarta. Capaian APM pada tiap kabupaten kota tidak banyak mengalami perbedaan yang signifikan. APM pada jenjang SD dan SLTP memperlihatkan pola yang hampir sama. Pada kedua jenjang tersebut terlihat kabupaten Kulonprogo dan kota Yogyakarta memiliki nilai APM SD dan SLTP terendah. Berdasarkan data BPS (susenas 2015) rendahnya APM SD dan SLTP disebabkan karena penduduk yang masuk ke sekolah dibawah usia 7 tahun dan keterlambatan masuk sekolah atau tinggal kelas.

Sementara, APM pada tingkat SLTA di Kota Yogyakarta dan Sleman terlihat pada posisi yang paling rendah. Hal ini terjadi karena mayoritas peserta didik Kota Yogyakarta dan Sleman yang mulai bersekolah dengan usia kurang dari tujuh tahun. Berdasarkan pada data BPS (susenas 2015) disampaikan bahwa proporsi penduduk usia SLTA (16-18 tahun) di Kota Yogyakarta dan Sleman yang sudah bersekolah di tingkat perguruan tinggi masing-masing mencapai 22,6 persen dan 16,7 persen. Sehingga hal ini mempengaruhi rendahnya APM di Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman



Sumber : Analisis Informasi Statistik Pembangunan DIY 2016

Gambar 2.36 Capaian Nilai APM Per Kabupaten Kota Tahun 2015

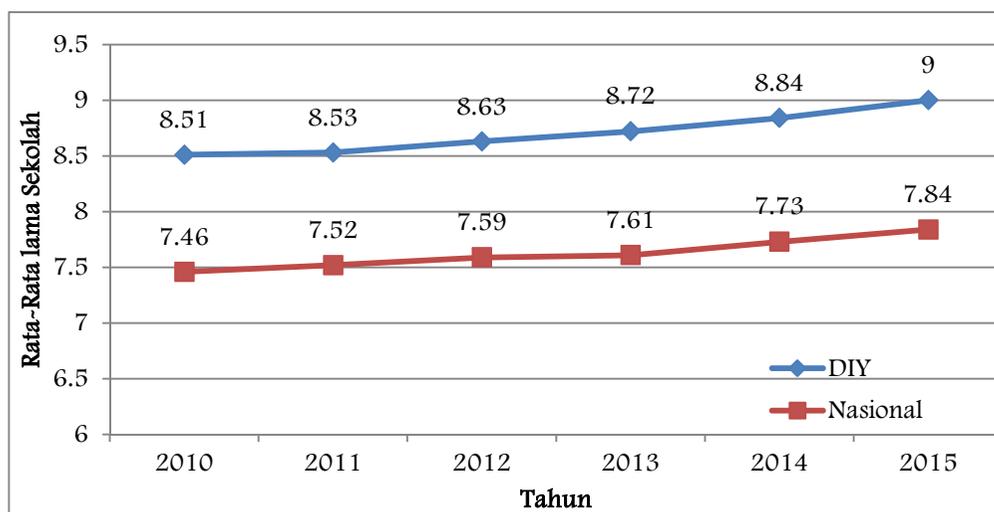
2.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh

semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Kualitas modal manusia juga dapat dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah (RLS) yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif. RLS sampai tahun 2009 dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 15 tahun ke atas dan mulai tahun 2010 dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Pendekatan yang baru menghasilkan level RLS yang lebih rendah lebih rendah, tetapi lebih representatif karena pada umumnya penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan masa studinya. Alasan perubahan cara perhitungan ini, selain untuk keterbandingan secara Nasional dan Internasional, pada perhitungan RLS baru diasumsikan pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok SDM terdidik yang dimiliki oleh suatu wilayah. Semakin tinggi RLS di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

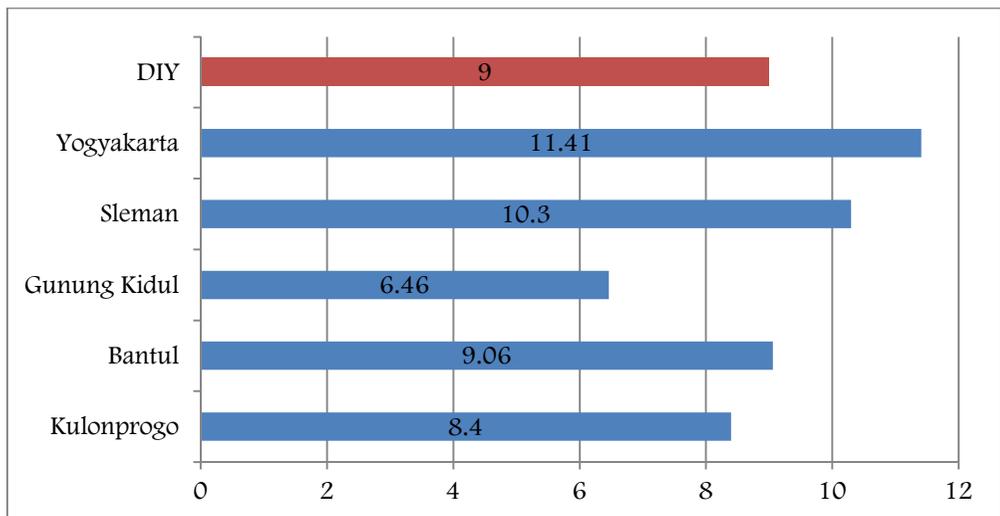
Gambar di bawah ini memperlihatkan capaian nilai RLS tahun 2010-2015 DIY. Perhitungan RLS ini menggunakan cara perhitungan dengan cakupan penduduk diatas 25 tahun (metode baru). Gambar 2.37 memperlihatkan hasil nilai RLS yang makin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat nilai RLS di DIY sebesar 9. Nilai ini menjelaskan bahwa rata-rata penduduk diatas 25 tahun di DIY menyelesaikan sekolah sampai tingkat kelas 9 (SLTP). Walaupun masih rendah, capaian RLS DIY masih berada diatas RLS nasional yaitu sebesar 7,84 atau setara dengan kelas 7.



Sumber : Analisis Informasi Statistik Pembangunan DIY 2016

Gambar 2.37 RLS 2010-2015 DIY dan Nasional

Gambaran mengenai capaian RLS pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada di bawah. Kota Yogyakarta meraih nilai RLS tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 11,41. Hal ini memberikan arti bahwa rata-rata penduduk diatas 25 tahun di Kota Yogyakarta telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan kelas 11 (kelas 2 SMU/SMK. Sementara itu di Kabupaten Gunung Kidul tercatat sebagai daerah yang memiliki RLS terendah di antara kabupaten/kota lainnya. Dilaporkan bahwa RLS pada tahun 2015 di Gunung Kidul adalah sebesar 6,46 atau setara dengan kelas 6 SD. Perbedaan RLS yang mencolok antara Kota Yogyakarta dan Gunung Kidul memperlihatkan adanya ketimpangan pembangunan sumber daya manusia antar dua daerah tersebut. Tantangan pembangunan manusia di DIY yang masih memerlukan perhatian serius adalah kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah. Kesenjangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di DIY masih relatif tinggi, terutama kesenjangan di Kab. Gunung Kidul. Hal ini tentunya akan menjadi masukan dalam mendesain perencanaan pembangunan pendidikan kedepan. Selain berupaya untuk pengembangan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, pembanguan pendidikan juga perlu menekankan pada aspek pemerataan (mengurangi kesenjangan antar wilayah).



Sumber : Analisis Informasi Statistik Pembangunan DIY 2016

Gambar 2.38 RLS Per Kabupaten Kota Tahun 2015

2.4 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan penilaian mendasar kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah dan merupakan

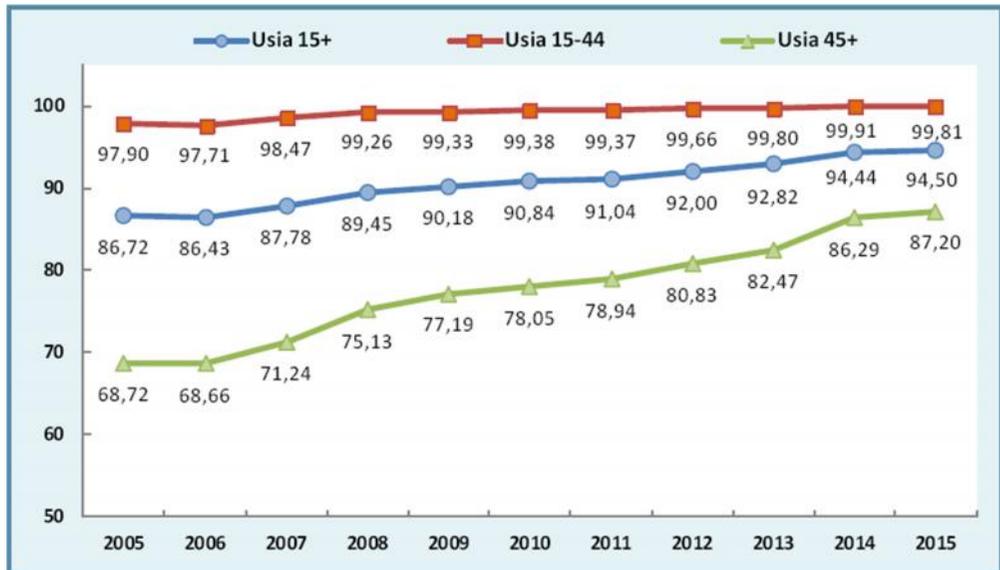
modal dasar individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. UNESCO mengartikan melek huruf sebagai Kemampuan individu untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi yang lebih lanjut.

Peningkatan jumlah penduduk melek huruf merupakan program prioritas yang menjadi indikator kinerja Gubernur pada RPJMD DIY 2012-2017. Upaya peningkatan kualitas SDM melalui pemberantasan buta huruf menjadi sasaran pada semua lini baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga masyarakat. sebagai contoh, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi adanya Kesepakatan Bersama pemberantasan buta aksara antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman. Kesepakatan Bersama tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengku Buwono X dan Walikota, Bupati di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2014, bersamaan dengan kegiatan Puncak Acara Hari Aksara Internasional ke 49 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah menargetkan angka melek huruf tahun 2016 sebesar 94,65%. Nilai ini telah hampir tercapai pada tahun 2014, yaitu sebesar 94,40 %. Sehingga diperkirakan pada akhir tahun 2017 angka melek huruf DIY akan melebihi dari target pemerintah sebesar 95%. Berdasarkan pada data BPS, Tahun 2015 nilai angka melek huruf di DIY pada kelompok umur diatas 15 tahun sebesar 94,50%. Angka tersebut menjelaskan bahwa sebanyak 94,50 % penduduk dengan usia diatas 15 tahun telah melek aksara. adapun sisanya, sebesar 5,5 % penduduk diatas usia 15 tahun masih dalam kategori penduduk buta aksara. Sumbangan terbesar pada tingginya angka buta aksara tersebut berasal dari kelompok penduduk usia lebih dari 45 tahun. Hal ini terlihat pada gambar xxx yang memperlihatkan gap/ketimpangan capaian nilai melek aksara pada kelompok usia 15-44 tahun dan usia diatas 45 tahun. Pada tahun 2015, angka melek huruf penduduk diatas 45 tahun sebesar 87,20 sedangkan angka melek huruf pada usia 15-44 tahun hampir mendekati 100 % yaitu sebesar 99,81 %.

Pendekatan penuntasan buta aksara pada usia diatas 45 tahun telah dilakukan dengan pengembangan Pendidikan Keaksaraan yang melibatkan partisipasi aktif lembaga masyarakat khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), PKK dan masyarakat. Keberhasilan program ini terlihat pada Grafik xxx yang memperlihatkan peningkatan angka melek huruf pada kelompok usia diatas 45 tahun secara gradual. Pada tahun 2011 angka melek huruf penduduk >45 tahun sebesar 78,94 % sedangkan pada tahun 2015 angka melek huruf pada kelompok ini telah meningkat

menjadi 87,20 %. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015 peningkatan angka melek huruf pada usia ini disebabkan karena penduduk yang buta huruf pada kelompok ini telah meninggal, pindah kependudukan, telah mengikuti Program Keaksaraan Dasar, dan telah melek aksara.



Sumber : Analisis Informasi Statistik Pembangunan DIY 2016

Gambar 2.39 AMH 2005-2015 Berdasarkan Kelompok Usia

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

1. Sarana Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat di DIY meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan di tingkat dasar dilaksanakan oleh Puskesmas dan jajarannya. Puskesmas merupakan unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya

penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Dari sisi jumlah Puskesmas di DIY tidak mengalami peningkatan, tetapi dari sisi kualitas sudah meningkat. Salah satu indikator kualitas pelayanan Puskesmas adalah akreditasi Puskesmas. Dari 121 Puskesmas di DIY, tahun 2015 sebanyak 30 Puskesmas telah dilakukan akreditasi. Pada tahun 2019 diharapkan seluruh Puskesmas di DIY telah terakreditasi.

Tabel 2.36 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, POLINDES/ POSKESDES di DIY, Tahun 2015

No	Kab/Kota	Puskesmas								Puskesmas Pembantu	Polindes/ Poskesdes
		Jumlah	Jenis		Akreditasi						
			TT	Non TT	Belum Akreditasi	Akreditasi Dasar	Akreditasi Madya	Akreditasi Utama	Akreditasi Paripurna		
1	Kota Yogyakarta	18	2	16	14	3	0	0	1	8	0
2	Kab Bantul	27	16	11	25	1	1	0	0	71	61
3	Kab. Kulon Progo	21	6	15	17	3	1	0	0	63	40
4	Kab. Gunungkidul	30	14	16	28	0	2	0	0	112	130
5	Kab. Sleman	25	5	20	7	8	8	2	0	70	93
Jumlah		121	43	78	91	15	12	2	1	324	324

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Upaya kesehatan yang dilakukan di level masyarakat adalah Posyandu. Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi, dan balita. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.

Tabel 2.37 Perkembangan Jumlah Posyandu di DIY, Tahun 2013-2016

Kab/Kota	2013			2014			2015			2016		
	Total	Aktif	Proporsi									
Kota Yogyakarta	624	450	72,12	625	450	72,00	625	450	72,00	625	615	98,40
Kab Bantul	1.132	747	65,99	1.132	747	65,99	1.132	747	65,99	1.137	747	65,70
Kab Kulon Progo	961	862	89,70	961	866	90,11	960	863	89,90	960	830	86,46
Kab Gunungkidul	1.465	1.302	88,87	1.465	1.306	89,15	1.465	1.261	86,08	1.467	1.258	85,75
Kab Sleman	1.519	1.232	81,11	1.519	1.284	84,53	1.520	1.293	85,07	1.528	1.292	84,55
DIY	5.701	4.593	80,56	5.702	4.653	81,60	5.702	4.614	80,92	5.717	4.742	82,95

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Upaya kesehatan rujukan dilakukan oleh rumah sakit. Rumah sakit di DIY sejumlah 75 RS yang terdiri dari 54 RS Umum dan 21 RS Khusus.

Tabel 2.38 Jumlah Rumah Sakit di DIY, Tahun 2015

Kab/Kota	Jumlah	Jenis		Klasifikasi			
		Umum	Khusus	A	B	C	D
Kota Yogyakarta	19	9	10	0	4	0	5
Kab. Bantul	14	10	4	0	2	1	7
Kab. Kulon Progo	9	9	0	0	1	0	8
Kab. Gunungkidul	5	5	0	0	0	1	4
Kab. Sleman	28	21	7	2	3	3	14
Jumlah	75	54	21	2	10	5	38

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi diantaranya tingkat pemanfaatan, mutu pelayanan, dan tingkat efisiensi pelayanan. Salah satu indikator yang mewakili kinerja pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Rate* (BOR), *Length of Stay* (LOS), dan *Turn Over Internal* (TOI). Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja beberapa rumah sakit di DIY.

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Pelayanan di Beberapa Rumah Sakit di DIY, Tahun 2015

No	Rumah Sakit	BOR (%)	LOS (Hari)	TOI (Hari)
1	RSU Jogja	63	4,2	2,4
2	RSU Bantul	73,68	4,57	58,85
3	RSU Wates	94,5	3,27	0,2
4	RSU Wonosari	82,86	4	0,81
5	RSU Sleman	67,94	5,31	2,009
6	RS Muhammadiyah Yk	68,15	4,05	2,01
7	RS Panti Rapih	79,31	4,73	1,25
8	RS Bethesda	64,75	4,67	2,79
9	RS dr. Hardjolukito	53,7	3,15	3,3

10	RS Grhasia	69,71	27,43	11,25
11	RSUP dr. Sardjito	74,52	7,57	2,43

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Dalam memberikan pelayanan yang baik, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang baik pula. Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%.

Penduduk di DIY memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengakses sarana pelayanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan prevalensi jarak jangkauan penduduk dengan sarana pelayanan kesehatan. Data Dinas Kesehatan DIY tahun 2012 menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk DIY hanya berjarak 1-5 km dari Puskesmas. Selain itu, lebih dari 70% penduduk DIY hanya berjarak 1-5 km dari rumah sakit dan dokter swasta. Sementara itu, tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km dari sarana pelayanan kesehatan, dokter praktek swasta, dan bidan.

2. Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga di sarana kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit pada umumnya sudah baik. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di DIY sudah mencukupi apabila dilihat dari ketersediaan tenaga kesehatan, akan tetapi bila dilihat dari distribusi tenaga kesehatan di 5 Kabupaten/Kota di DIY masih belum merata, terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Tabel 2.40 Jumlah Tenaga Kesehatan di DIY, Tahun 2015

No.	JENIS TENAGA	JUMLAH (ORANG)
1	Dokter Spesialis	1.267
2	Dokter Umum	1.379
3	Dokter Gigi	454
4	Dokter Gigi Spesialis	144
5	Perawat	6.560
6	Perawat Gigi	606
7	Bidan	1.927
8	Teknis Kefarmasian	1.117
9	Apoteker	1.075
10	Kesehatan Masyarakat	684
11	Sanitarian	296
12	Gizi	399

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

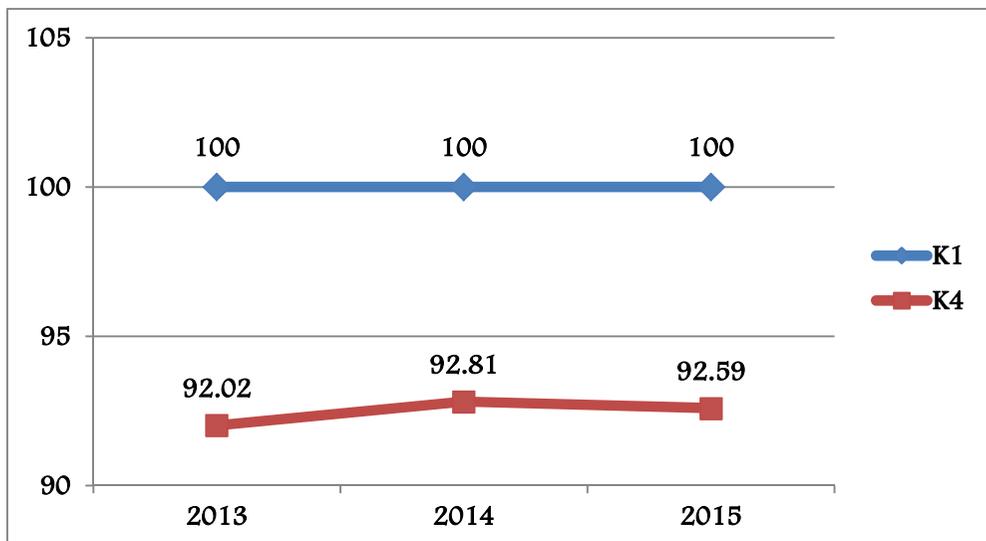
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

a. Pelayanan Kesehatan Ibu

Keberhasilan pelayanan kesehatan ibu ditunjukkan melalui indikator kunjungan pelayanan antenatal ibu hamil (K1 dan K4). K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapatkan pelayanan antenatal yang menunjukkan indikator akses. Sementara itu, K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sebanyak minimal empat kali sesuai distribusi waktu dan sesuai standard yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah.

Upaya kesehatan juga menysasar pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat terlihat dari proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan serta pemeriksaan pada saat hamil.

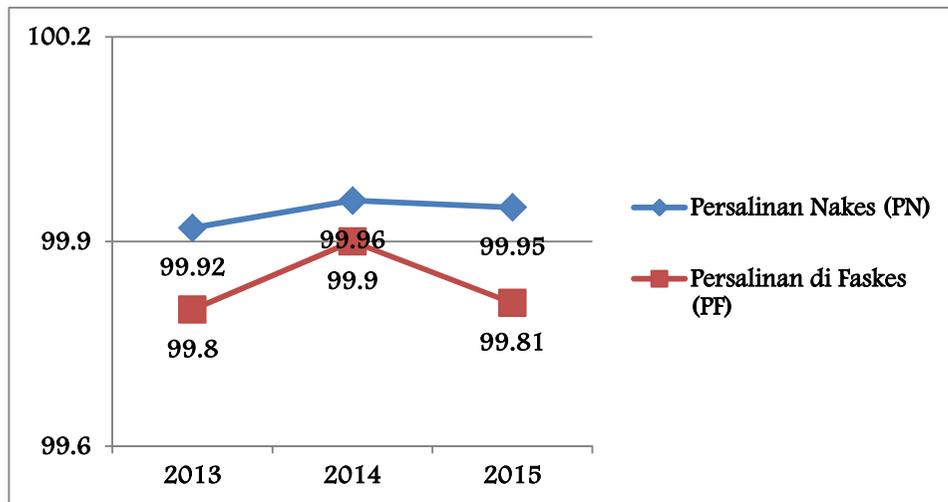
Pemeriksaan ibu hamil bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melalui deteksi dini permasalahan kehamilan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan kelahiran.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Gambar 2.40 Perkembangan Capaian K1 dan K4 DIY, Tahun 2013-2015

Selain cakupan K1 dan K4, keberhasilan pelayanan kesehatan ibu juga dapat dilihat dari proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.



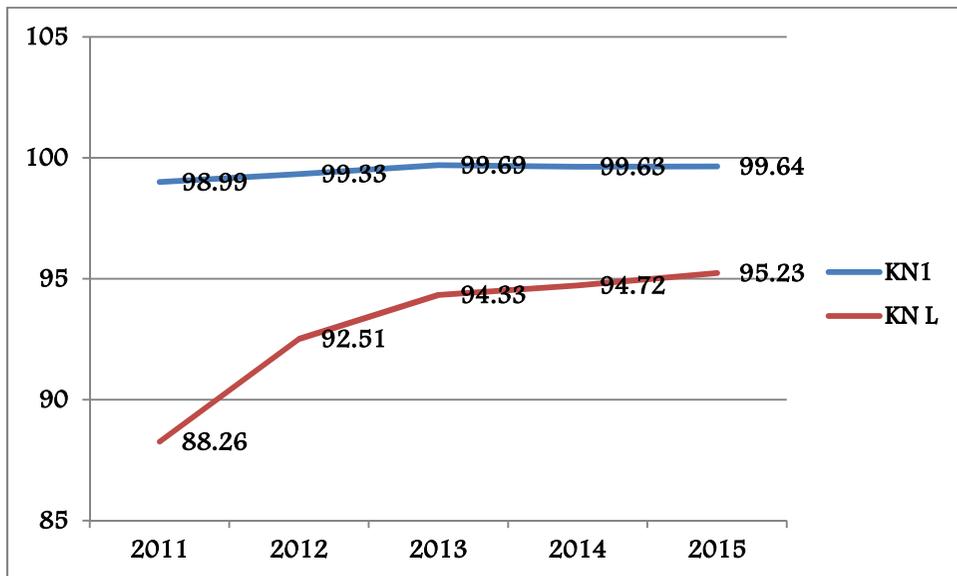
Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Gambar 2.41 Perkembangan Pertolongan Persalinan di DIY, Tahun 2013-2015

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

b. Pelayanan Kesehatan Bayi

Indikator yang menggambarkan keberhasilan pelayanan kesehatan bayi adalah cakupan kunjungan neonatal. Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi atau bayi mengalami masalah kesehatan sehingga menekan angka kematian bayi. Indikator yang digunakan adalah Kunjungan Neonatus 1 (KN-1) dan Kunjungan Neonatus Lanjutan (KN-L). KN-1 adalah cakupan pelayanan neonatal minimal sesuai dengan standard pada usia 6-48 jam setelah lahir. Sementara itu, KN-L adalah cakupan pelayanan neonatal minimal tiga kali sesuai distribusi waktu dan standar.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Gambar 2.42 Perkembangan Persentase Capaian KN-1 dan KN-L, Tahun 2011-2015

Grafik di atas menunjukkan bahwa cakupan KN-1 pada tahun 2012 (99,33%) mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 (98,99%). Pada Tahun 2014 cakupan KN1 sudah mencapai 99,63% (sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya). Sementara itu, KN-L tahun 2012 masih sebesar 88,28%, angka ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 (88,26%), dan pada tahun 2014 mencapai 94,72%. Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2014 mencapai 92% sedangkan untuk cakupan pelayanan kesehatan Balita sebesar 87,27%. Tahun 2015 cakupan KN1 dan KN L mengalami peningkatan (99,64% dan 95,23%).

Peningkatan cakupan tersebut menunjukkan semakin tingginya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama ibu dalam pentingnya perawatan neonatus yang baik.

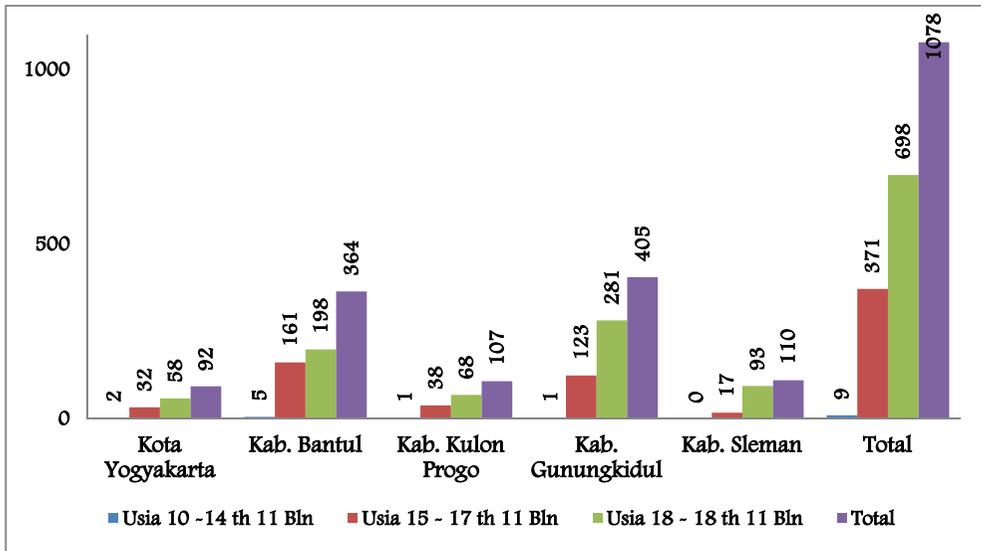
c. Pembinaan Kesehatan Remaja

Jumlah kasus persalinan usia remaja yang makin memprihatinkan sangat memerlukan dukungan preventif dan promotif agar dapat ditekan. Kehamilan di usia remaja merupakan fenomena dengan penyebab yang multisektor. Faktor utama kehamilan remaja adalah kurangnya informasi

atau informasi yang salah akibat informasi dari sumber yang tidak tepat atau fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik.

Dari sisi kesehatan, kehamilan pada remaja dapat menimbulkan masalah karena pertumbuhan alat reproduksi yang belum sempurna. Pembinaan kesehatan remajadi DIY lebih diutamakan pada pencegahan terhadap kesehatan reproduksi remaja serta edukasi dan informasi bekerjasama dengan lintas sektor terkait.

Berikut gambaran kasus persalinan usia remaja yang dilaporkan di DIY selama tahun 2015 :



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

Gambar 2.43 Jumlah Kasus Persalinan Usia Remaja di DIY, Tahun 2015

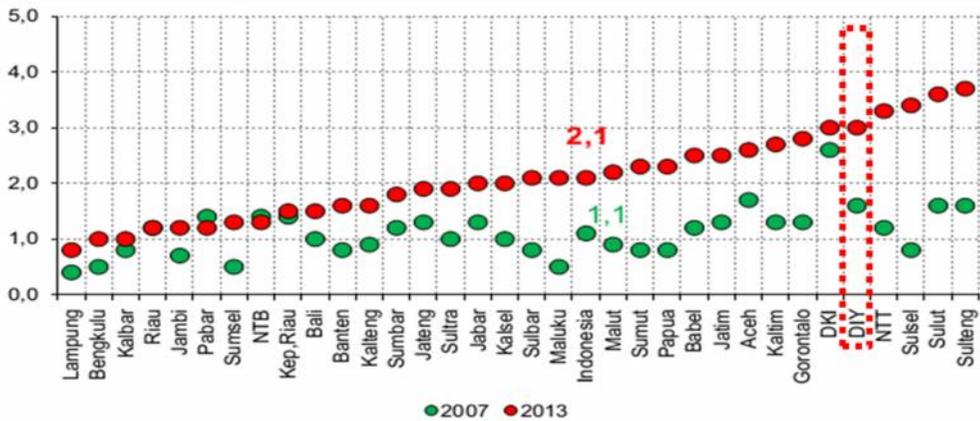
Berbagai upaya telah dilakukan dan akan lebih dioptimalkan dalam pembinaan kesehatan reproduksi remaja, diantaranya Puskesmas PKPR yang terintegrasi dengan program UKS, kampanye kesehatan remaja di sekolah, jambore kesehatan remaja serta edukasi dan konsultasi serta sosialisasi program kesehatan reproduksi remaja melalui media sosial.

4. Pola Penyakit

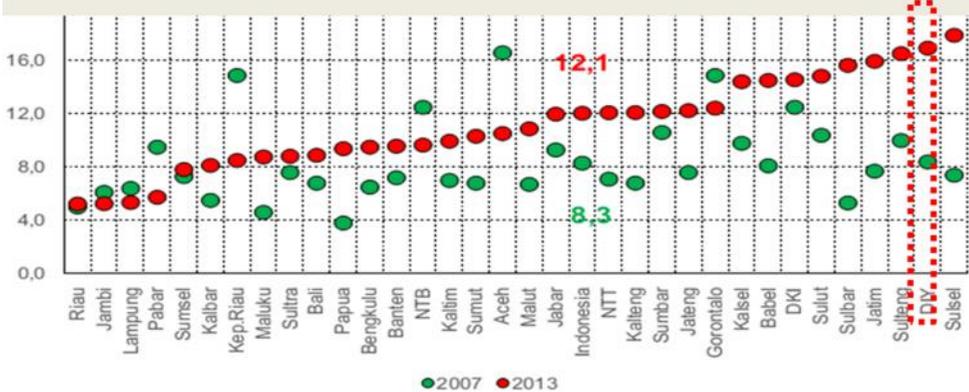
Hasil Riskesdas tahun 2013 telah menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti : hipertensi, stroke, diabetes dan kanker melebihi angka nasional. Selain itu angka gangguan jiwa berat di DIY cukup tinggi yaitu 0,27‰ dibanding angka nasional yang hanya 0,17‰. Selain itu, Penyakit menular masih menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, beberapa penyakit menular yang

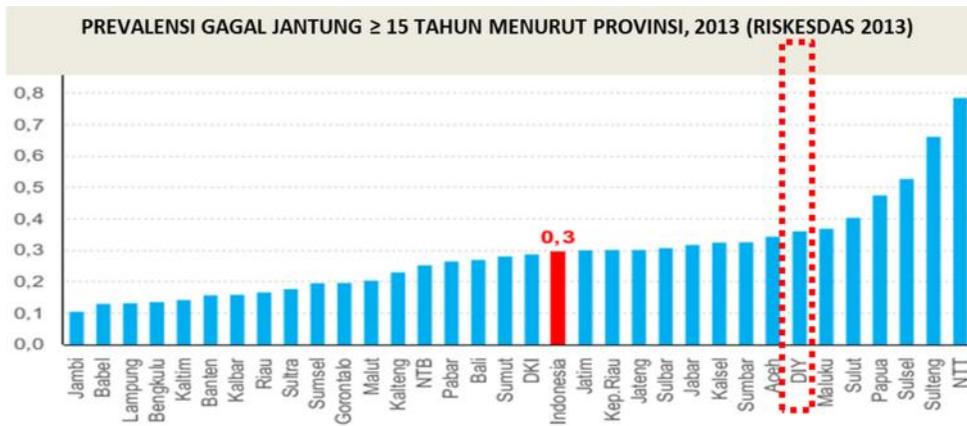
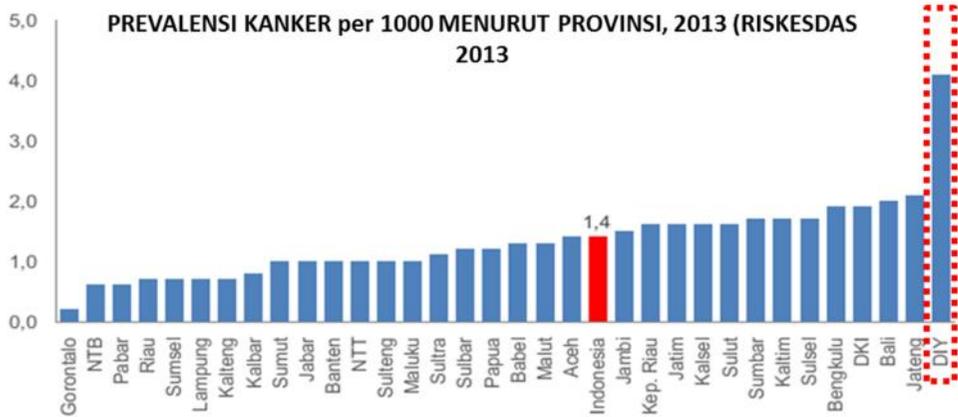
masih perlu mendapat perhatian adalah diare, pneumonia balita, DBD, TB paru. Kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, sedangkan tingginya angka gangguan jiwa dipengaruhi oleh kerapuhan kesehatan mental sehingga kurang siap menghadapi perubahan yang sangat cepat di masyarakat.

KECENDERUNGAN PREVALENSI DM MENURUT PROVINSI, 2007-2013 (RISKESDAS 2013)



KECENDERUNGAN PREVALENSI STROKE per 1000 menurut Provinsi 2007-2013 (riskesda 2013)



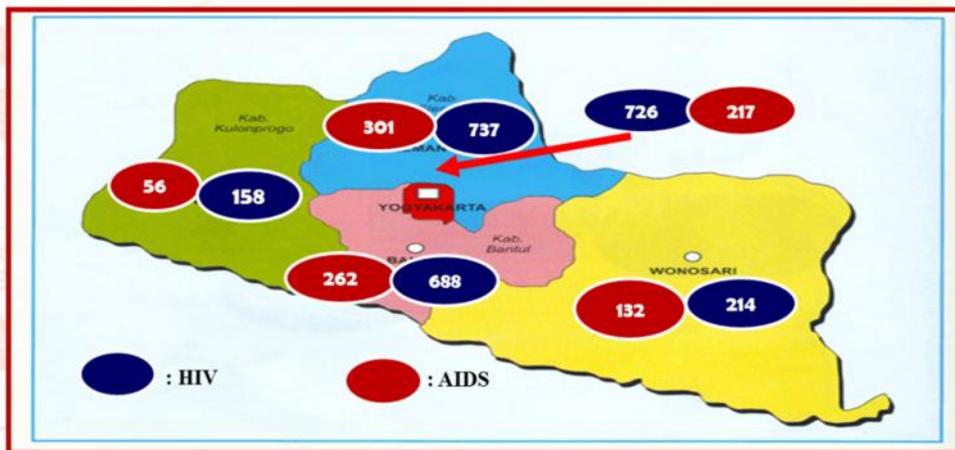


Sumber : Riskesdas 2013

Gambar 2.44 Grafik Kecenderungan Prevalensi Beberapa Penyakit Tidak Menular Berdasarkan Riskeda Tahun 2013

Beberapa penyakit menular juga membutuhkan perhatian di DIY diantaranya : HIV AIDS, Tuberkolosis (TB), DBD, malaria, dan penyakit yang bersumber dari binatang lainnya (anthrax, flu burung, pes, leptospirosis).

Kasus HIV DIY sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3.078 kasus dengan 1.239 kasus telah memasuki fase AIDS.



Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Gambar 2.45 Kasus HIV AIDS berdasarkan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2015

Sedangkan untuk DBD, tahun 2015 terjadi peningkatan kasus dari tahun 2014 sebesar 1.995 kasus meningkat di tahun 2015 menjadi 3.420 kasus. Penyakit menular lainnya yang menjadi perhatian di DIY adalah TB dan Malaria. Masih terdapat kabupaten di DIY yang belum mendapatkan status eliminasi malaria yaitu Kabupaten Kulon Progo. Angka penemuan TB di DIY juga masih belum memenuhi target.

5. Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah hal yang penting sebagai perlindungan atas resiko yang mengancam kesehatan. Hal ini telah ditegaskan melalui UU Nomor 40 tahun 2004 dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Tujuan dari penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan (Jamkesta) yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 63 Tahun 2016. Pemda DIY berupaya menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) sebagai upaya Jaminan Kesehatan Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah sistem jaminan kesehatan yang pengelolaannya secara bersama dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi.

Pelaksanaan jamkesta ditujukan untuk mengintegrasikan kepesertaan jaminan kesehatan yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kepesertaan jamkesta dibagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesos, Mandiri Jamkesta, Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda kabupaten/kota. Sasaran PBI Jamkesmas, PBI Jamkesos, dan PBI Jamkesda ditujukan untuk masyarakat miskin.

Khusus untuk Jamkesus, program ini merupakan bentuk keberpihakan Pemda DIY bagi penyandang disabilitas dari sisi pelayanan jaminan kesehatan. Program ini merupakan tindaklanjut dari amanah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di DIY. Sasaran penerima Jamkesus adalah para penyandang disabilitas yang. Melalui jamkesus tersebut selain diberikan jaminan kesehatan umum, peserta juga diberikan paket manfaat berupa bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Berikut adalah data jumlah kepesertaan jaminan kesehatan penduduk DIY :

Tabel 2.41 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penduduk di DIY, Tahun 2016

Kab/Kota	PBI JKN	PBI Jamkesos		PBI Jamkesda
		PBI Maskin	PBI Jamkesus	
Kota Yogyakarta	114.647	9.993	1.864	67.660
Kab. Bantul	500.101	78.604	5.726	121.666
Kab. Kulon Progo	244.965	35.016	1.112	53.908
Kab. Gunungkidul	472.970	80.016	8.157	10.742
Kab. Sleman	338.875	12.410	4.482	64.243
Jumlah	1.671.558	216.039	21.341	318.219

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2016

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciaptakaryaan, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah DIY berkewajiban dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan konkuren yang tercantum dalam UU tersebut, meliputi:

- a. Sub Urusan Jalan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan jalan berstatus Jalan Provinsi, meliputi penanganan pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan/pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- b. Sub Urusan Sumber Daya Air untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air terbatas yang dikerjasamakan dengan Daerah)serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha - 3000 Ha, dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Sub Urusan Keciaptakaryaan melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten/Kota, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah, penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah, penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah, Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Sub Urusan Jasa Konstruksi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.

a. Sub Urusan Jalan

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi Daerah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional bahwa jalan Nasional yang berada di DIY adalah sepanjang 247,91 Km. Program peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Nasional didukung melalui pembiayaan APBN dengan pelaksana Kementerian PUPR di wilayah DIY.

Di DIY telah terbangun jaringan Jalan Provinsi sepanjang 619,34 Km dan jembatan sejumlah 225 buah sepanjang 4.557 m. Sampai dengan tahun 2016 persentase jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) telah mencapai 74,20% atau sepanjang 459,57 km. Persentase jalan dalam kondisi mantap tersebut sesuai dengan target RPJMD tahun 2016 yaitu 74,20%. Pencapaian target jalan dalam kondisi mantap 74,20% dilakukan melalui kegiatan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan program peningkatan

jalan dan jembatan serta kegiatan peningkatan jalan yang didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan.

Berikut disajikan data Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2016 berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan.

Tabel 2.42 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2016

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	459,57	74,20	Baik	243,92	39,38
				Sedang	215,65	34,82
2	Tidak Mantap	159,78	25,80	Rusak Ringan	151,48	24,46
				Rusak Berat	8,30	1,34
JUMLAH		619,34	100,00	Jumlah	619,34	100,00

Sumber: Dinas PUP & ESDM 2016

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi terjadi perubahan panjang total ruas jalan provinsi menjadi sepanjang 760,45 Km. Ruas jalan tersebut bertambah dari kondisi sebelumnya karena ada ruas-ruas jalan yang beralih status dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi dan adapula ruas jalan provinsi yang menjadi jalan nasional.

Berikut disajikan daftar ruas jalan Provinsi tahun 2016.

Tabel 2.43 Daftar Ruas Jalan Provinsi Tahun 2016

No.	Lokasi Ruas Jalan Provinsi	Panjang Ruas (Km)
1.	Kota Yogyakarta	~
2.	Kabupaten Bantul	162,150
3.	Kabupaten Kulon Progo	175,140
4.	Kabupaten Gunungkidul	306,840
5.	Kabupaten Sleman	116,320
	Total Panjang Ruas Jalan	760,450

Sumber : Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016

b. Sub Urusan Sumber Daya Air

Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur dalam mencapai ketahanan pangan yaitu untuk melayani ketersediaan air di lahan basah/sawah. Layanan penyediaan air irigasi di DIY tidak hanya dilakukan oleh pemerintah DIY, namun dilakukan juga oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi berdasarkan luasan daerah irigasi.

Berikut disampaikan tabel daerah irigasi di DIY Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Tabel 2.44 Daerah Irigasi di DIY

No	Kewenangan	DI Permukaan	DI Air Tanah	DI Pompa	Jumlah DI	Luas (Ha)
1.	BBWSO	3	-	-	3	12.460
2.	DIY	41	-	-	41	13.987
3.	Bantul	100	18	-	118	9.368
4.	Gunung Kidul	182	55	-	237	7.722
5	Sleman	853	-	75	928	25.814
6	Kulon Progo	90	-	3	93	1.583
6	Kota	10	-	-	10	49
		1.279	73	78	1.430	70.983

Sumber : Permen PU dan PR Nomor 14/PRT/M/2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY sebesar 13.987 Ha yang terbagi menjadi satuan Daerah Irigasi (DI) sejumlah 41 DI yang merupakan DI permukaan. DI kewenangan Pemerintah Daerah DIY terdiri dari daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota sejumlah 35 DI dengan luas 4.909 Ha dan daerah irigasi utuh di Kabupaten sejumlah 6 DI dengan luas 9.078 Ha.

Terkait dengan penyediaan air baku, pemerintah daerah DIY telah membangun embung-embung sebagai penampung air dan mempertahankan stabilitas muka air tanah. Pembangunan embung telah

dimulai pada tahun 2005 yaitu pembangunan embung di Banaran Gunungkidul. Pada tahun 2016 pembangunan embung dilakukan melalui belanja hibah, yaitu pada pembangunan embung Embung Batur di Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Sampai dengan tahun 2016 sudah ada 21 embung yang dibangun yang mendukung capaian target RPJMD dalam penyediaan air baku sebesar 1600 Liter/detik.

c. Sub Urusan Keciptakaryaan

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman juga telah menjadi amanat NAWACITA Pemerintah 2015-2019 yaitu Nawacita Ke-3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan; Nawacita ke-5 Meningkatkan kualitas hidup manusia. Sedangkan target yang ingin dicapai terkait pembangunan infrastruktur permukiman 2015-2019 yang juga disebut sebagai “Gerakan Nasional 100-0-100” adalah sebagai berikut: (1) Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%; (2) Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; (3) Tercapainya akses air minum yang aman menjadi 100%; (4) Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100%.

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Ketidakeimbangan antara jumlah air yang diproduksi dengan permintaan kebutuhan air masyarakat kini dan mendatang memerlukan upaya-upaya komprehensif dalam pengembangan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, capaian pelayanan air minum DIY yang sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 77,65%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 81,25% jumlah penduduk DIY. Penyediaan air minum di DIY yang terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan.

Sistem perpipaan terdiri dari perpipaan PDAM dan Non PDAM (SPAM Perdesaan), perpipaan Non PDAM dikelola oleh kelompok masyarakat pengelola air minum yang bernama PAMASKARTA DIY. Data

cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY disajikan dalam tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.45 Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Kota di DIY, Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (2016) (jiwa)	Terlayani Perpipaan		Non Perpipaan		Terlayani Air Minum	
			(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)
1	Yogyakarta	417.945	178.347	42,67%	176.309	42,18%	354.656	84,86%
2	Sleman	1.180.674	341.426	28,92%	820.356	69,48%	1.161.783	98,40%
3	Bantul	984.335	280.345	28,48%	561.754	57,07%	842.099	85,55%
4	Kulon Progo	416.815	181.658	43,58%	219.109	52,57%	400.767	96,15%
5	Gunungkidul	723.079	350.449	48,47%	292.802	40,49%	643.251	88,96%
		3.722.847	1.332.226	35,79%	2.070.330	55,61%	3.402.556	91,40%

Sumber: BPS dan Bappeda Kab/Kota, 2016

Penyediaan sanitasi DIY disediakan oleh sistem terpusat melalui IPAL Sewon, sistem komunal dan sistem setempat. Sistem terpusat IPAL Sewon berlokasi di Sewon, Bantul melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang terdiri wilayah Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Bantul dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman.

Sistem pelayanan air limbah domestik DIY terdiri dari tiga sistem, meliputi sistem terpusat, sistem komunal dan sistem setempat. Data cakupan pelayanan air limbah domestik DIY disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.46 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik di DIY Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2016 (jiwa)	Sistem Terpusat		Sistem Komunal		Sistem Setempat		Terlayani Sanitasi Layak	
			(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)
1	Yogyakarta	417.945	66.349	15,88%	14.785	3,54%	331.608	79,34%	412.743	98,76%
2	Sleman	1.180.674	8.484	0,72%	52.883	4,48%	1.052.513	89,15%	1.113.880	94,34%
3	Bantul	984.335	10.817	1,10%	44.693	4,54%	764.131	77,63%	819.641	83,27%
4	Kulon Progo	416.815	-	0,00%	12.831	3,08%	331.398	79,51%	344.229	82,59%
5	Gunungkidul	723.079	-	0,00%	18.434	2,55%	553.889	76,60%	572.324	79,15%
	DIY	3.722.847	85.651	2,30%	143.626	3,86%	3.033.540	81,48%	3.262.817	87,64%

Sumber: Bappeda, 2016

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui TPST 3R dan pelayanan pengumpulan, pengangkutan dan penolakan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul : Yogyakarta, Sleman dan Bantul), TPA *Sanitary Landfill* Kulon Progo dan TPA *Sanitary Landfill* Gunungkidul.

Cakupan pelayanan persampahan perkotaan DIY dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.47 Kondisi Pelayanan Persampahan di DIY, Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Tereduksi 3R		Terlayani TPA		Total Terlayani Sistem	
			(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)
1	Yogyakarta	406.293	43.992	10,83%	333.257	82,02%	377.249	92,85%
2	Sleman	1.154.128	75.051	6,50%	299.405	25,94%	374.456	32,44%
3	Bantul	956.158	99.514	10,41%	72.630	7,60%	172.144	18,00%
4	Kulon Progo	406.872	11.104	2,73%	68.919	16,94%	80.023	19,67%
5	Gunungkidul	706.564	12.775	1,81%	49.763	7,04%	62.538	8,85%
		3.630.015	242.435	6,68%	823.974	22,70%	1.066.410	29,38%

Sumber: Dokumen RAD 100 – 0 – 100 DIY, 2016

Sub sektor Sanitasi meliputi Persampahan, Air limbah dan Drainase. Pencapaian target-target di dalam RPJMD pada periode keempat ini melalui dukungan program-program pengembangan pengelolaan air limbah, program pengelolaan persampahan dan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Fokus penanganan drainase adalah permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Penyelesaian permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pada tahun 2016 kegiatan perencanaan penanganan genangan dilakukan untuk menghasilkan perencanaan penanganan genangan di KPY secara keseluruhan termasuk identifikasi aset dan kelembagaan.

d. Sub Urusan Jasa Konstruksi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung bahwa dalam setiap pemeriksaan keandalan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya yang selalu dalam kondisi laik fungsi. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan difokuskan pada tingkat kehandalan Gedung-gedung Pemerintah. Dari 50 gedung pemerintah DIY, hingga tahun 2015 teridentifikasi kehandalan

Bangunan Gedung Negara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku mencapai 43 unit atau sebesar 86%.

Pencapaian kinerja jasa konstruksi diukur dari terlaksananya pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi. Sampai dengan tahun 2015 pencapaian target RPJMD pada periode keempat adalah mencapai 95,93%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Dari unsur pengaturan jasa konstruksi (memiliki bobot 40%), telah disosialisasikan 6 peraturan dari target 7 peraturan yang telah tersosialisasikan, sehingga dari unsur pengaturan telah tercapai 34,29%.
- 2) Dari unsur pemberdayaan jasa konstruksi (memiliki bobot 50%), telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi kumulatif sebanyak 3.515 org tenaga kerja konstruksi dari target sebanyak 4000 orang, sehingga dari unsur pemberdayaan jasa konstruksi telah tercapai 43,94%.
- 3) Dari unsur pengawasan jasa konstruksi (memiliki bobot 10%), telah dicapai target layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Jasa Konstruksi sebanyak 4 layanan dari target 7 layanan yang harus dipenuhi.

Pada tahun 2015 Dinas PUP Dan ESDM DIY melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029. Fokus Program Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 yaitu pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama.

Program Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya).

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendorong/koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota untuk melegalkan perangkat pengendalian seperti Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Peninjauan Kembali (PK) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 dilanjutkan pada tahun 2016 oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, yang merupakan SKPD baru dari re-organisasi di pemerintah daerah DIY berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di mana urusan Tata Ruang menjadi tugas dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

Dinamika Dasar peninjauan kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 yaitu:

- 1) Terjadi Perubahan/penyempurnaan peraturan atau rujukan sistem penataan ruang yang berlaku mengikat bagi Pemerintah Daerah DIY dan belum pernah digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sebelumnya. Salah satunya yaitu amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana salah satu keistimewaan DIY yang ditetapkan adalah urusan Tata Ruang sebagai dasar dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang pada kawasan Kasultanan dan Kadipaten.
- 2) Terjadi perubahan kebijakan pemerintah/sector untuk pembangunan skala besar atau kegiatan penting sehingga tidak dapat ditampung oleh pola dan struktur ruang RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 - 2029 yang ada. Perubahan tersebut akan mengganggu rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga mungkin dapat menurunkan efisiensi pembangunan dan atau kerusakan lingkungan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain penentuan kawasan cagar alam geologi oleh Kementerian ESDM, pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), dan rencana pembangunan bandara baru.
- 3) Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan seringkali radikal dalam hal memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan meminimalkan kerusakan lingkungan, sehingga kapasitas daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan oleh karena hal ini harus selalu diantisipasi untuk keperluan optimasi pola dan struktur tata ruang yang ada.
- 4) Terjadi bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada, dan memerlukan relokasi kegiatan budaya maupun lindung yang ada untuk kepentingan pembangunan pasca bencana tersebut. Salah satu bencana alam yang berpengaruh terhadap struktur dan pola ruang yaitu erupsi gunung merapi pada tahun 2010 yang berakibat pada penetapan kawasan rawan bencana.

Target kinerja Progam yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2012 – 2017 untuk urusan Penataan Ruang sampai dengan akhir RPJMD adalah :

- 1) tercapainya ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis sebanyak 19 kawasan strategis;
- 2) tercapainya 90% pengaturan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi; serta
- 3) tercapainya 86% ketersediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di DIY.

Sampai dengan tahun 2016 capaian target RPJMD bidang urusan penataan ruang seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48 Capaian Target RPJMD Bidang Urusan Penataan Ruang, Tahun 2016

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Rencana Tata Ruang pada kawasan strategis provinsi	Jumlah Rencana Tata Ruang pada kawasan strategis provinsi	Kawasan Strategis	19	19
2	Terwujudnya pengaturan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Propinsi	Persentase pengaturan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi	Persen	90	71
3	Terwujudnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di DIY	Persentase ketersediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di DIY	Persen	86	71,78

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Bahkan dalam UU No.1 tahun 2011 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Namun seiring dengan haknya tersebut, UU juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Perumahan sebagai hak bagi setiap warga negara juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 04/KPTS/M/1999 yang menjelaskan bahwa visi pembangunan perumahan yaitu semua orang menghuni rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 - 15 hektar merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Pada tahun 2016 pemerintah daerah DIY melalui Bidang Perumahan Dinas PUP ESDM DIY telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan dengan keluaran: evaluasi kriteria kelompok sasaran program subsidi, pembuatan prototif rumah sehat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, study sosial ekonomi dampak pembangunan pada simpul-simpul transportasi terhadap pembangunan permukiman, detail enggenering desain (DED) penanganan psu di kecamatan miskin, kajian kenyamanan penghuni rumah susun sewa di DIY.

- 2) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dengan keluaran: Koordinasi penyelenggaraan PSU permukiman, Koordinasi penanganan kawasan kumuh, Koordinasi penanganan RTLH, Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Rusun, Koordinasi FLPP dan perumahan MBR.
- 3) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dengan keluaran: verifikasi dan perencanaan RTLH.
- 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman dengan keluaran: penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman 64 desa di DIY.
- 5) Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh di 15 kawasan.

Penanganan kawasan kumuh sesuai dengan gerakan nasional 0 % kawasan kumuh di Indonesia dilakukan melalui identifikasi sampai dengan penanganan kawasan kumuh yang telah ditetapkan melalui SK bupati/walikota di DIY. Telah dipilah penanganan kawasan kumuh tersebut berdasar regulasi yang ada sebagai berikut

Tabel 2.49 Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Luasan (ha)	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	730,67	Luasan >15 ha
2	Kewenangan Provinsi	96,89	Luasan 10-15 ha
3	Kewenangan Kab/Kota	165,9	Luasan <10 ha
	Total	993,46	

Terkait dengan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2016 sudah dilakukan verifikasi oleh Bidang Perumahan Dinas PUP ESDM DIY melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.50 Data Rumah Tidak Layak Huni di DIY, Tahun 2016

No	Kabupaten	Total	Kecamatan	Total	Desa	Total
1	Gunung Kidul	451	Semin	117	Bulurejo	26
					Candirejo	17
					Kemejing	6
					Rejosari	7
					Sumberejo	7

No	Kabupaten	Total	Kecamatan	Total	Desa	Total
					Bendung	28
					Kalitekuk	26
			Karangmojo	156	Karangmojo	62
					Kelor	9
					Gedangrejo	17
					Wiladeg	68
			Ponjong	32	Genjahan	16
					Ponjong	8
					Umbulrejo	8
			Playen	61	Bandung	30
					Banyusoco	7
					Logandeng	10
					Ngleri	6
					Ngunut	8
			Gedangsari	17	Watugajah	6
					Sampang	11
			Nglipar	27	Pengkol	19
					Natah	8
			Saptosari	19	Jetis	4
					Krambil Sawit	3
					Planjan	5
					Watu Sigar	7
			Patuk	4	Bunder	4
			Wonosari	18	Gari	7
					Pulutan	11
No	Kabupaten	Total	Kecamatan	Total	Desa	Total
2	Bantul	582	Imogiri	191	Wukirsari	81
					Imogiri	33
					Karangtengah	17
					Selopamiro	60
			Jetis	151	Trimulyo	11
					Patalan	70
					Canden	70
			Dlingo	194	Muntuk	91
					Dlingo	103
			Sewon	46	Panggunharjo	46

No	Kabupaten	Total	Kecamatan	Total	Desa	Total
3	Kulon Progo	107	Kokap	34	Hargomulyo	17
					Hargotirto	17
			Sentolo	12	Sentolo	12
			Lendah	61	Bumirejo	40
Jatirejo	21					
4	Sleman	4	Moyudan	4	Sumbersari	4
5	Kota Yogyakarta	10	Mantrijeron	10	Mantrijeron	10
Total						1154

Sumber: Dinas PU P ESDM DIY 2016

Secara sepsifik, salah satu rencana pengembangan kawasan yang akan mempengaruhi perkembangan perumahan secara masif dan dinamis adalah adanya rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kulonprogo yang direncanakan untuk beroperasi paling lambat pada tahun 2021. Pembangunan bandara tersebut direncanakan pada koridor temon-prambanan yang menjadi salah satu kawasan strategis provinsi sector ekonomi. Meskipun pembangunan bandara belum secara ekspilist masuk dalam RTRW DIY 2009-2029, namun secara politis rencana tersebut sudah menjadi keputusan dan akan dilakukan penyesuaian dalam *review* RTRW berikutnya. Dengan adanya rencana tersebut, jelas bahwa akan terjadi perkembangan perumahan yang cukup signifikan baik di kawasan sekitar bandara, maupun koridor bandara menuju kota Yogyakarta. Selain itu, rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kulonprogo juga membuka wacana untuk melakukan pengembangan kawasan yang berorientasi pada *Transit Oriented Development* (TOD), dimana perumahan menjadi bagian penting dalam pengembangan tersebut.

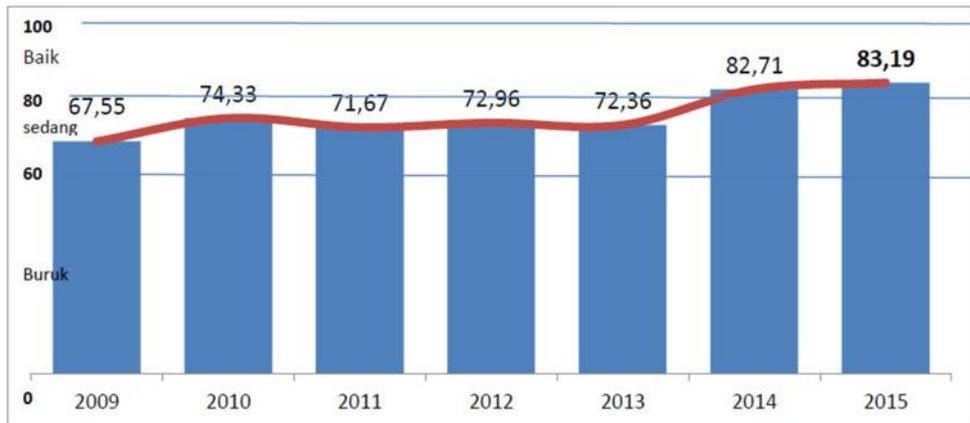
2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

DIY selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut DIY perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa.

Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 yang dirilis di 2016 kemarin menunjukkan capaian demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menggembirakan. IDI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2015 sebesar 83,19 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 0,48 poin dibandingkan dengan IDI DIY tahun 2014 yang sebesar 82,71. Hasil IDI 2014 dan 2015 menunjukkan nilai perubahan yang cukup besar

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan tersebut membawa DIY masuk kategori “baik”. Sementara itu tingkat demokrasi di DIY berdasarkan penghitungan indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 masih berada pada kategori “sedang”.

Sebagaimana digambarkan dalam Grafik 1., Perkembangan IDI DIY dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (tahun 2009 sebesar 67,55; 2010 sebesar 74,33; 2011 sebesar 71,67; 2012 sebesar 72,96; 2013 sebesar 72,36; 2014 sebesar 82,71 dan 2015 sebesar 83,19). Hal ini menggambarkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, menunjukkan sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.



Sumber: BPS DIY

Gambar 2.46 Perkembangan IDI DIY, Tahun 2009-2015

Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2015 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 90,41; aspek Hak-hak Politik sebesar 77,98; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 82,38.



Sumber: BPS DIY

Gambar 2.47 Perkembangan Indeks Aspek IDI DIY, Tahun 2009-2015

Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, atau “buruk”, pada 2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Kebebasan Sipil merupakan aspek yang secara kategori stabil. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2015 aspek kebebasan sipil tetap pada kategori “baik”. Sementara indeks aspek Hak-hak Politik merupakan aspek yang paling rendah dibandingkan aspek Kebebasan Sipil dan aspek Lembaga Demokrasi. Sejak pengukuran dari 2009 hingga 2013 aspek Hak-Hak Politik berada pada kategori “buruk”, selanjutnya pada tahun 2014 terjadi perubahan dan menembus kategori “sedang” dan bertahan hingga 2015.

Aspek Lembaga Demokrasi pada pengukuran 2009 berada sedikit di atas ambang batas kategori “sedang”. Sejak 2010 terjadi perubahan dan menembus kategori “baik”. Setelah itu terus bergerak dengan kecenderungan meningkat hingga 2015.

Selama kurun waktu 6 tahun IDI dihitung, nilai aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada posisi di atas aspek lainnya. Pada tahun 2014 merupakan waktu di mana rentang nilai ketiga aspek paling rapat, yakni antara 76,07-88,82. Pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2015 rentang nilainya lebih lebar. Ini terjadi karena adanya peningkatan indeks aspek Hak-hak Politik yang cukup bermakna. Pada tahun 2015 indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik mengalami peningkatan masing-masing 5,82 dan 1,64 poin. Sementara indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 6,44 poin.

Untuk Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkembang dan telah terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mengalami perubahan jumlah yang fluktuatif.

Pada Tahun 2012 terdapat 18 organisasi, tahun 2013 terdapat 34 organisasi, tahun 2014 terdapat 154 organisasi, tahun 2015 terdapat 197 ormas, dan tahun 2016 sebanyak 159 ormas. Sementara itu sampai dengan akhir tahun 2016, total jumlah Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan terdapat 515 organisasi kemasyarakatan. Dari data yang dicatat oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY ini bisa diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan yang sudah resmi terdaftar memiliki keragaman sifat baik dalam kekhususan organisasi ataupun kesamaan latar belakang baik dari kesamaan profesi, agama, lingkup budaya, sosial dan kemasyarakatan lainnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat DIY.

Unjuk rasa yang terjadi di DIY ditangani dengan cara-cara yang persuasif dan sinergis antar petugas yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan cara penanganan yang persuasif dan sinergis, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diminimalisir.

Proses penegakan Perda ini tentunya juga berkaitan dengan kapasitas sumber daya aparatur dari penegak Perda itu sendiri dimana dalam tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memegang peranan penting. Sementara ini jumlah personil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja masih belum maksimal. Pada tahun 2016 tercatat terdapat 128 orang, Ke depan perlu dimaksimalkan lagi kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja baik melalui penguatan kapasitas anggota dan bila memungkinkan adanya penambahan personil yang menggantikan personil yang memasuki masa purna tugas.

2.3.1.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana mandat Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Dinas Sosial menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial juga akan menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peran sebagai penggerak juga akan dijalankan dengan cara melakukan melakukan advokasi dan sinergi sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial mendapat dukungan dari satuan perangkat

kerja daerah lain baik dari pemerintah DIY maupun Pemerintah kabupaten/kota.

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 2.51 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2012-2016

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Anak Balita Terlantar	2.569	2.443	2.273	1.978	1.826
2	Anak Terlantar	26.165	26.149	23.396	20.089	14.450
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	302	119	321	98	184
4	Anak Jalanan	497	212	220	219	327
5	Anak dengan Kedisabilitas	3.910	3.858	4.116	3.708	3.095
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	919	796	653	411	18
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	275	73	68	41	18
8	Lanjut Usia Terlantar	37.199	36.698	38.448	33.752	46.242
9	Penyandang Disabilitas	29.543	28.158	26.947	25.050	26.177
10	Tuna Susila	166	158	144	47	385
11	Gelandangan	161	121	112	82	171
12	Pengemis	199	216	199	170	150
13	Pemulung	116	126	171	256	450
14	Kelompok Minoritas	733	216	1.541	1.541	1.541
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	3.658	4.168	4.495	4.744	209
16	Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	1.408	1.797	2.045	3.491	2.834
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1.627	1.470	1.323	1.451	468
18	Korban <i>Trafficking</i>	9	5	2	2	1
19	Korban Tindak Kekerasan	4.325	4.070	3.514	3.153	7.335
20	Pekerja Migran Bermasalah	760	292	598	939	329

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
21	Korban Bencana Alam	3.749	1.655	1.658	71 Keluarga	1.050 keluarga
22	Korban Bencana Sosial	16	158	157	376 Keluarga	115 Keluarga
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.337	12.057	13.166	12.689	12.840
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3.356	3.395	3.318	3.212	4.932
25	Keluarga Fakir Miskin	288.391 (PPLS 2011)	288.391 (PPLS 2011)	288.391 (PPLS 2011)	367.540 (PBDT 2015)	367.540 (PBDT 2015)

Sumber: Dinas Sosial DIY, Tahun 2013 dan PBDT 2015

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel 2.52 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2012-2016

No	Jenis PSKS	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pekerja Sosial Profesional/ Pekerja sosial fungsional	41	37	37	35	35
2	Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM	121	4.572	4.534	4.534	4.767
3	Taruna Siaga Bencana	873	505	505	837	1.034
4	LKS / Orsos	83	354	395	403	370
5	Karang Taruna Desa/Kel	85	438	438	438	438
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	12	15	15	14	12
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	25	87	124	138	163
8	Penyuluh Sosial	7	7	5	5	5
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),	78	78	78	78	78
10	Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	100	45	26	42	42

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2016

c. Panti Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial apabila dilihat dari aspek lokus nya, lazim dikelompokkan dalam dua kategori yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam panti dan di luar panti. Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui panti, Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari :

- a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRPTD). Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari balai ini adalah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas/cacat;
- b. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW). Tupoksi balai ini yaitu perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*).
- c. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL). Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik.
- d. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Balai ini sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA). Balai ini sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak.
- f. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW). Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia.

Tabel 2.53 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2012-2016

No	Nama Balai / Panti	Daya Tampung				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	BRPTD	185	185	185	185	185
2	BRSBKL					
	a. Gepeng	50	50	50	50	50
	b. Eks psikotik	50	50	50	100	100
4	BPRSW	50	50	50	50	60
5	BPSTW	214	214	214	214	214
6	BRSPA	140	140	140	140	120
7	BPRSR	75	75	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial DIY 2016, diolah.

2.3.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh *stakeholders*, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya, hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh), dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini akan diuraikan kondisi umum terkini pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di DIY. Pemahaman mengenai kondisi umum ini diharapkan dapat menjadi basis dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan pengembangan sektor ketenagakerjaan di DIY yang relevan dengan kondisi sektor ketenagakerjaan di DIY.

a. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2012–2016, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sakernas, PUK DIY

pada tahun 2012 adalah sebesar 2,780 juta orang dan pada akhir tahun pengamatan (Februari 2016) diperkirakan mencapai 2,904 juta orang.

Data Sakernas pada tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja mempunyai proporsi mencapai lebih dari 65 persen setiap tahunnya dimana dari jumlah angkatan kerja ini lebih dari 90 persennya merupakan angkatan kerja yang bekerja sehingga menghasilkan penganggur terbuka yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja memberikan proporsi berkisar 30 persen dari penduduk usia kerja. Hal ini mengindikasikan cukup banyak penduduk usia kerja yang memilih untuk tidak bekerja. Kelompok ini didominasi oleh kelompok yang memilih untuk mengalokasikan sebagian besar waktunya demi mengurus rumah tangganya (umumnya ibu rumah tangga) dan bersekolah. Sebagian besar anggota kelompok bukan angkatan kerja ini memang cenderung tidak menghasilkan pendapatan nominal dan mungkin dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif. Meskipun demikian, mereka melakukan aktivitas investasi pendidikan bagi keluarganya (dengan menjadi ibu rumah tangga) dan bagi dirinya sendiri (dengan menjadi siswa sekolah formal pada jenjang SD hingga Universitas).

Tabel 2.54 Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) di DIY, Tahun 2012-2016

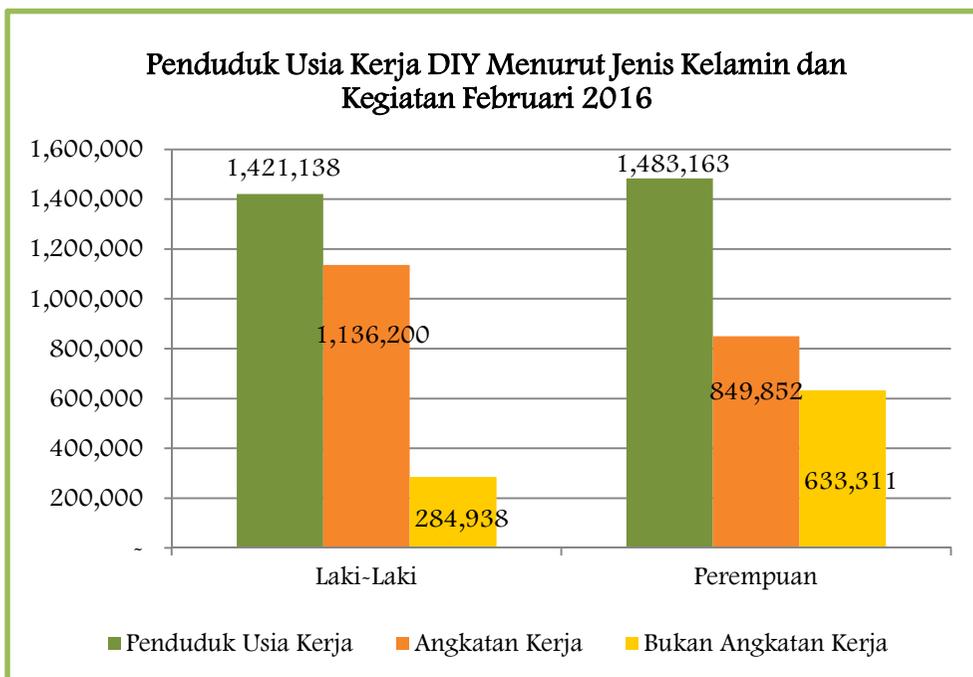
JENIS KEGIATAN	2012 Agustus	2013 Agustus	2014 Agustus	2015 Agustus	2016*) Februari
Angkatan Kerja	1.988.539	1.949.243	2.023.461	1.971.463	2.096.865
- Bekerja	1.911.720	1.886.071	1.956.043	1.891.218	2.037.864
- Penganggur	76.819	63.172	67.418	80.245	59.001
Bukan Angkatan Kerja	791.920	863.845	824.293	911.517	807.436
- Sekolah	280.427	201.760	270.545	297.972	264.858
- Rumah Tangga	404.800	479.109	439.522	475.397	400.382
- Lainnya	106.693	182.976	114.226	138.148	142.196
PENDUDUK USIA KERJA	2.780.459	2.813.088	2.847.754	2.882.980	2.904.301
TPAK (Persen)	71,52	69,29	71,05	68,38	72,20
TPT (Persen)	3,86	3,24	3,33	4,07	2,81

Sumber: BPS, Statistik DIY 2016

Pengamatan terhadap sejumlah data Penduduk Usia Kerja di DIY menurut jenis kelamin untuk 5 tahun terakhir pengamatan dapat dilihat

berdasarkan pada data hasil Survey Angkatan Kerja (Sakernas) Februari 2016.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk 15 tahun keatas di DIY pada Februari 2016 diperkirakan mencapai 2,904 juta orang. Ditinjau dari aspek gender, jumlah penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 1,421 juta (48,93 persen) lebih rendah dari PUK perempuan yaitu 1,483 juta atau 51,07 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja. Berdasarkan wilayah domisilinya, sebagian besar PUK tinggal di daerah perkotaan. PUK di daerah perkotaan berjumlah sekitar 2,059 juta orang atau sekitar 70,93 persen, sedangkan sisanya sebesar 844,370 ribu orang atau 29,07 persen tinggal di daerah pedesaan.



Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan DIY 2015-2016, Februari 2016 diolah

Gambar 2.48 Grafik Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan, Bulan Februari 2016

Kondisi ketenagakerjaan DIY masih menunjukkan daya saing yang relatif rendah. Rendahnya daya saing tenaga kerja DIY ini terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia kerja.

Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan pada tahun 2011-2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan maksimum sekolah dasar. Pada tahun 2011 PUK berpendidikan maksimum sekolah dasar jumlahnya mencapai

973.041 orang dengan proporsi sebesar 35,42 persen. Pada tahun 2012 jumlah ini berhasil ditekan menjadi 955.525 orang, proporsinya menjadi sebesar 34,37 persen. Tahun 2013 dan 2014 menunjukkan penurunan yang cukup berarti menjadi 925.972 orang (32,92 persen) dan 908.976 orang (31,92 persen). Penurunan proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini mendorong peningkatan proporsi PUK yang berpendidikan di atasnya (SMTP s/d Universitas). Dengan masih besarnya proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini menunjukkan tingkat kualitas penduduk usia kerja di DIY masih relatif rendah.

Tabel 2.55 Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2014

Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1. Maksimum SD	973.041	955.525	925.972	908.976
2. SMTP	563.558	589.905	608.439	598.082
3. SMTA Umum	486.108	491.780	492.343	509.957
4. SMTA Kejuruan	424.001	429.446	453.681	455.525
5. Diploma	98.470	102.986	102.057	110.780
6. Universitas	202.288	210.817	230.596	264.434
Jumlah	2.747.466	2.780.459	2.813.088	2.847.754

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2011-2014 (Agustus)

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

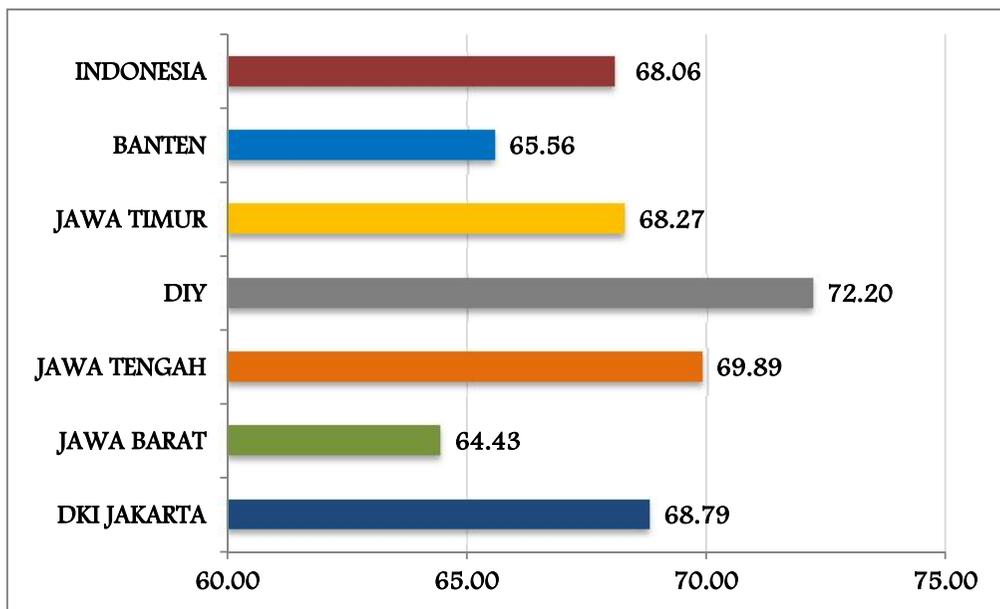
TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

TPAK DIY pada periode 2011 hingga 2016 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada awal tahun pengamatan TPAK DIY adalah sebesar 69,76 persen, kemudian terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai angka 71,52 persen dan kemudian mengalami fluktuasi hingga pada akhir pengamatan (Agustus 2016) mencapai angka sebesar 71,96 persen. Angka TPAK sebesar 71,96 persen mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja(15 tahun ke atas) 72 orang adalah angkatan kerja. Angka ini merupakan angka tertinggi yang pernah terjadi selama periode 2011-2016.



Sumber: BPS, Sakernas Tahun Februari 2012 – Agustus 2016

Gambar 2.49 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2016

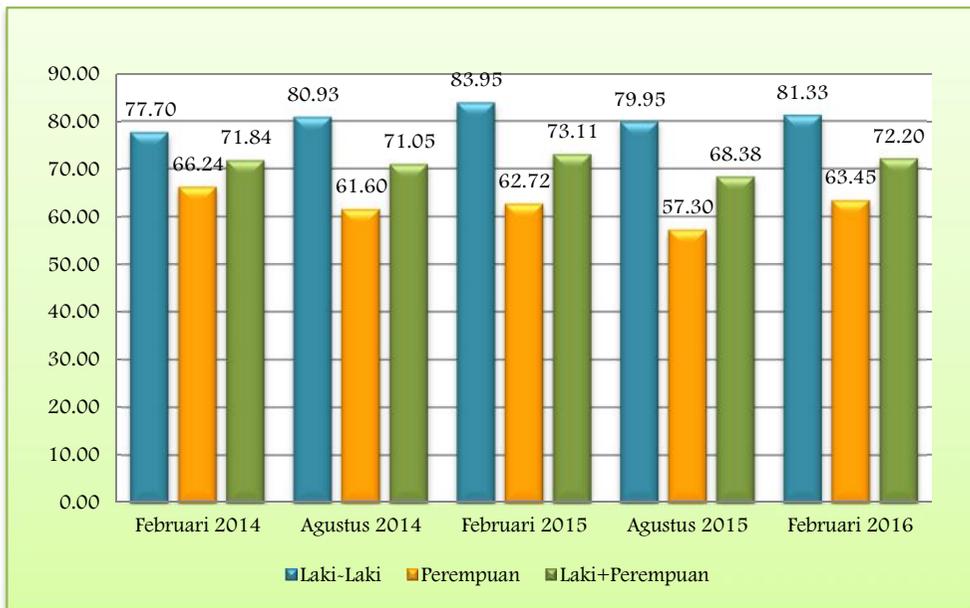


Sumber: Sakernas, BPS.go.id, diolah

Gambar 2.50 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa, Tahun 2016

Jika dibandingkan dengan 5 provinsi lain di pulau Jawa dan perbandingan dengan TPAK Nasional, TPAK DIY pada Februari 2017 berada pada posisi tertinggi dengan nilai sebesar 72,20.

Sementara bila TPAK dibedakan menurut jenis kelamin terdapat kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Sedangkan pola perkembangan TPAK menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih dominan (berfluktuasi pada kisaran 77-82 persen) dibandingkan TPAK perempuan (berada pada kisaran 57-67 persen). Fenomena menunjukkan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar aktivitas mengurus rumah tangga di DIY dilakukan oleh perempuan dan adanya pandangan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah tanggungjawab laki-laki. TPAK laki-laki pada Agustus 2015 mencapai sekitar 79,95 persen, sementara TPAK perempuan sebesar 57,30persen. Pola ini menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga



Sumber: BRS November 2015, BPS Provinsi DIY

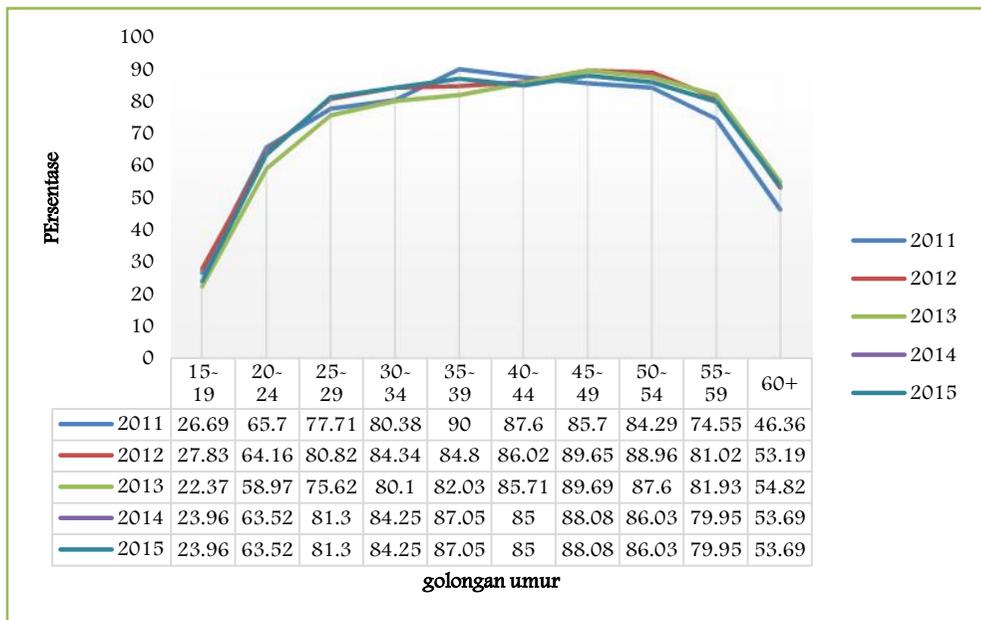
Gambar 2.51 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2015

TPAK menurut wilayah menunjukkan kecenderungan TPAK di perdesaan selalu lebih tinggi dari daerah perkotaan. TPAK perdesaan berfluktuasi antara 73-82 persen, sementara TPAK perkotaan berada pada kisaran 62-72 persen. Hal ini berkaitan dengan adanya kecenderungan

penduduk perkotaan yang lebih memilih menyelesaikan pendidikan sampai jenjang yang setinggi-tingginya sebelum memasuki pasar tenaga kerja serta lebih selektif memilih pekerjaan yang sesuai. Hal ini berbeda dengan penduduk perdesaan yang memiliki lama sekolah yang lebih singkat (jenjang pendidikan dasar atau menengah) dan kemudian masuk pasar kerja untuk membantu ekonomi keluarga meski hanya sebagai pekerja keluarga atau bekerja di sektor informal dengan jumlah jam kerja yang relatif pendek.

Pola TPAK DIY menurut kelompok umur menyerupai kurva “U terbalik”, yaitu rendah pada usia 15-19 dan 60 tahun ke atas serta tinggi pada kelompok 25-54 tahun.

TPAK yang rendah pada kelompok usia 15-19 tahun mencerminkan tingginya penduduk pada kelompok ini yang melakukan kegiatan utama bersekolah, sehingga mereka tidak tergolong dalam kelompok angkatan kerja. Sedangkan pada usia produktif 30-49 tahun TPKA berada pada posisi tinggi karena kegiatan utama pada usia ini adalah bekerja. TPKA kelompok umur 50-59 tahun masih relatif tinggi karena pada umumnya masih produktif untuk bekerja.

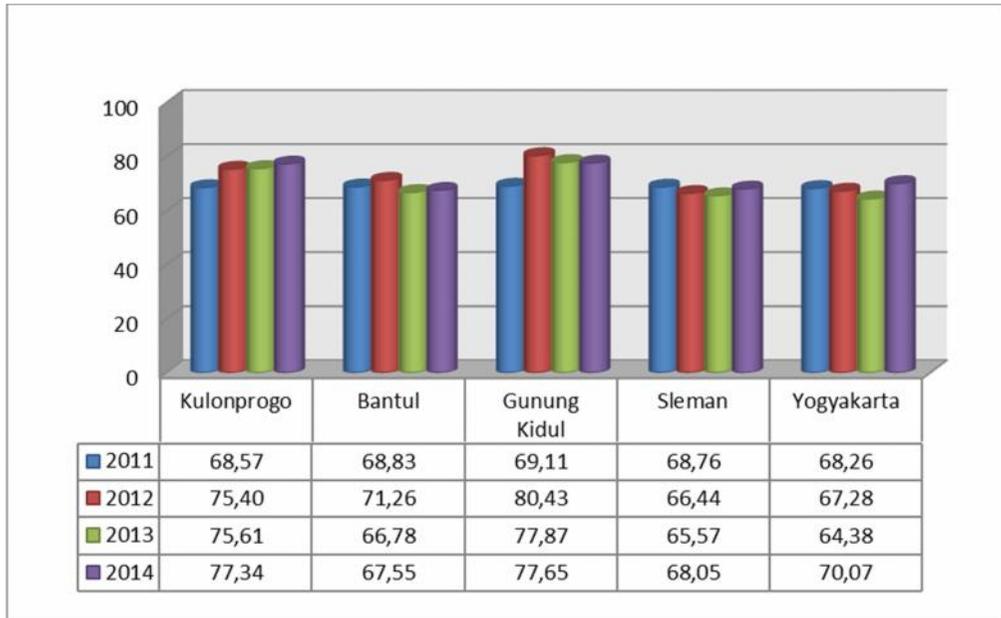


Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2011- 2016

Gambar 2.52 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kelompok Umur, Tahun 2011-2015

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, hampir semua kabupaten cenderung mengalami kenaikan TPAK pada Agustus 2014, hanya

Kabupaten Gunungkidul yang mengalami penurunan sebesar 0,22 poin. Meskipun mengalami penurunan angka TPAK Gunungkidul merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 77,65 persen, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo 77,34 persen, Kota Yogyakarta 70,07 persen, Kabupaten Sleman 68,05, dan terendah Kabupaten Bantul 67,55 persen.



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik, November 2014

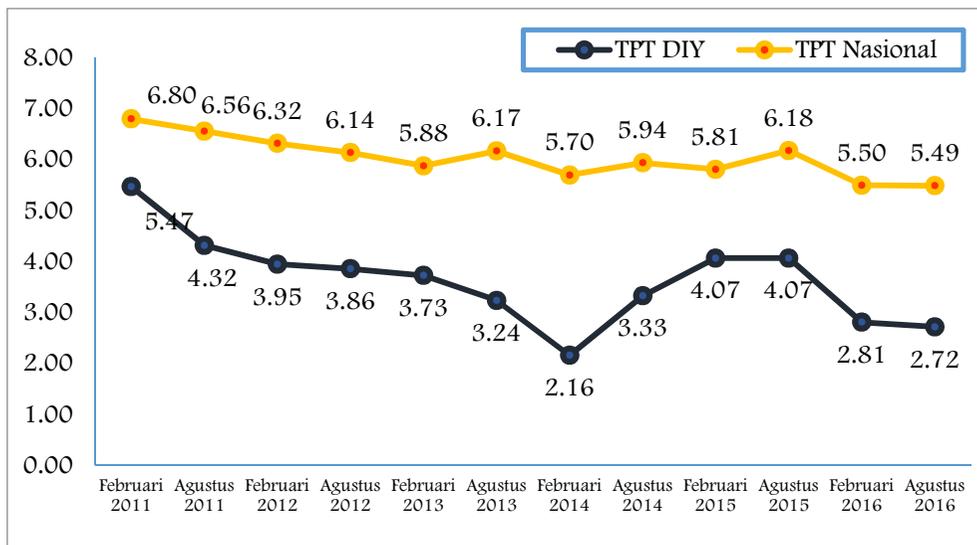
Gambar 2.53 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2011-2014

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta telah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja.

TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena TPT merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan angka pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari tahun 2010 hingga Februari 2014 menunjukkan trend penurunan dengan angka TPT berada pada kisaran 2,2–6,02 persen, namun kemudian mengalami peningkatan pada Agustus 2014 menjadi 3,33 persen dan

mencapai 4,07 persen pada Agustus 2015. Pada periode Agustus 2016 TPT DIY mengalami penurunan menjadi 2,72 persen. Angka TPT DIY ini masih lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang berada pada kisaran 5,2 sampai 7,41 persen. TPT Nasional pada Agustus 2016 mencapai 5,49 persen turun 0,69 point dibandingkan Agustus 2015 pada 6,18 persen.



Sumber :BRS November 2016, BFS Provinsi DIY

Gambar 2.54 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional, Tahun 2011-2016 (%)

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dari TPT perempuan. Pada Februari 2015, TPT masing-masing sebesar 3,72 persen untuk laki-laki dan 2,65 persen untuk perempuan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan mencapai 4,54 persen.

Selama periode 2011 – 2015, perkembangan TPT menurut wilayah perkotaan dan perdesaan di DIY menunjukkan pola yang hampir sama, namun terdapat kecenderungan TPT di perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Hasil Sakernas DIY menunjukkan bahwa pada tahun 2010 TPT perkotaan menunjukkan angka 6,97 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 4,00 persen pada bulan Agustus 2014 dan meningkat 0,55 poin pada Agustus 2015 menjadi sebesar 4,55. Namun demikian, walaupun tingkat pengangguran di perkotaan cenderung

menurun tetapi angkanya masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran di perdesaan. TPT di daerah perdesaan pada tahun 2010 adalah sebesar 4,01%, tahun 2014 turun menjadi 2,17 persen dan kembali meningkat menjadi 3,02 persen pada Agustus 2015. Pada tahun 2016 TPT daerah perkotaan tercatat lebih besar daripada perdesaan. Pada Februari 2016 TPT perkotaan dan perdesaan tercatat masing-masing sebesar 3,54 dan 1,32 persen. Supply tenaga kerja yang lebih tinggi di perkotaan, baik dari daerah perkotaan sendiri maupun kaum urban, turut berperan menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran di perkotaan cenderung lebih kentara dibandingkan di perdesaan.

Tingginya TPT Perkotaan dibandingkan di perdesaan disebabkan antara lain karena beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan dengan pindah atau mondok di perkotaan. Dengan demikian pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan. Sementara itu, penduduk daerah perdesaan biasanya tidak terlalu selektif dalam memilih lapangan pekerjaan, sehingga mereka akan melakukan kegiatan apa saja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga dan pekerja bebas pertanian. Penganggur yang tersisa di daerah perdesaan sebagian di antaranya memang mencari pekerjaan di perdesaan juga, dan sebagian lagi tetap tinggal di desanya sambil mencari pekerjaan dengan cara melaju (*commute*/pulang-pergi) ke perkotaan.

Berdasarkan kelompok umur, Tingkat Pengangguran Terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, antara 15-24 tahun. TPT usia muda pada Februari 2015 sekitar 10-22 persen, atau lebih dari 4 kali lipat TPT semua umur (DIY). Pada kelompok umur 15-19 tahun, TPT perempuan lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka laki-laki, sedangkan pada kelompok umur 25-29 tahun dan 40-49 tahun TPT perempuan lebih tinggi dari TPT laki-laki (Sakernas DIY 2014-2015)

Tabel 2.56 Tingkat Penangguran Terbuka di DIY Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014-2015

Gol. Umur	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-19	18,65	10,04	14,07	27,14	13,27	21,59	19,41	15,08	21,59
20-24	10,96	13,00	11,94	9,34	11,22	10,19	20,98	11,86	10,19
25-29	6,24	0,00	3,30	8,30	5,07	6,91	7,82	7,95	6,91
30-34	2,55	0,00	1,45	1,80	2,56	2,11	3,53	1,16	2,11
35-39	0,00	1,63	0,77	1,43	1,17	1,33	4,35	0,00	1,33
40-44	0,00	0,00	0,00	1,06	0,73	0,90	0,00	0,79	0,90

Gol. Umur	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
45-49	2,91	0,00	1,49	2,74	0,50	1,75	0,00	0,68	1,75
50+	0,00	0,00	0,00	1,28	0,47	0,90	1,06	0,00	0,55
DIY	2,67	1,60	2,16	3,88	2,65	3,33	5,23	2,59	4,07

Keterangan:

L = Laki-Laki ; P = Perempuan

Sumber: Sakernas DIY 2014-2015

Jika dilihat dari status pendidikan terakhir yang ditempuh, sebagian besar pengangguran terbuka di DIY merupakan pengangguran terdidik karena didominasi oleh lulusan D1-3/S1-3. Pada Februari 2015 angka TPT lulusan D1-3/S1-3 adalah sebesar 7,02 persen, diikuti TPT SLTA sebesar 6,21 persen, dan TPT SLTP sebesar 5,47 persen.

Tabel 2.57 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013-2015

Tingkat Pendidikan	Februari 2013			Agustus 2013			Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
≤ SD	0,00	0,00	0,00	1,13	0,25	0,62	1,64	0,00	0,63	0,95	0,00	0,39	1,60	0,00	0,74
SD	4,80	1,44	3,21	1,09	0,16	0,64	2,09	0,00	1,05	2,16	0,55	1,38	0,00	0,00	0,00
SLTP	0,00	1,35	0,53	3,00	2,23	2,68	1,37	0,00	0,85	2,73	1,50	2,26	7,13	2,63	5,47
SLTA	2,40	5,20	3,41	5,81	5,86	5,83	4,16	2,15	3,29	6,10	4,89	5,65	7,93	3,55	6,21
D1-3/S1-3	19,57	22,87	21,31	4,52	7,87	6,21	2,27	9,35	6,21	3,73	5,29	4,48	6,62	7,41	7,02
DIY	3,22	4,37	3,73	3,59	2,81	3,24	2,67	1,60	2,16	3,88	2,65	3,33	5,23	2,59	4,07

Sumber: Sakernas DIY 2014-2015

2.3.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mewujudkan kelompok perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian, pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan program unggulan *3 ends*. Program ini didasarkan pada masih tingginya kekerasan pada perempuan, masih adanya praktek perdagangan manusia juga kesenjangan ekonomi antara laki laki dan perempuan. Program *3 ends* ini adalah (1) Akhiri kekerasan perempuan dan anak, (2) Akhiri perdagangan manusia dan (3) Akhiri kesenjangan ekonomi antara laki laki dan perempuan. Program unggulan Kementerian PPPA ini tentu juga menjadi rujukan bagi daerah untuk melakukan upaya yang sejalan dengan kebijakan pusat dengan tetap mengacu pada data dan kebijakan daerah.

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

Meskipun tidak termasuk dalam 5 besar kasus kekerasan secara nasional, kekerasan pada perempuan dan anak di DIY juga menampilkan wajah yang tidak jauh berbeda dengan nasional. Sebagaimana telah disebut di atas, kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Data BPPM, tahun 2015 terdapat 1.497 kasus kekerasan dimana 88,7% korbannya adalah perempuan, 89,7% terjadi di rumah tangga. Sementara menurut status perkawinan, 45% kekerasan dialami oleh korban yang belum kawin, 53 % sudah kawin dan 2% dialami oleh korban yang sudah bercerai. Sementara kekerasan yang terjadi pada anak pada tahun 2015 sebanyak 2.173. kasus dimana 87,1% korbannya adalah perempuan. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun 2014 yang berjumlah 587, dimana 73% korban berjenis kelamin perempuan. Sementara data pelaku kekerasan pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa 90% pelaku kekerasan berjenis kelamin laki laki, dan 75% diantaranya adalah laki laki yang bekerja.

Tabel 2.58 Data Klien Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2011-2016

Kategori Kasus (Case ategoty)	Tahun (Years)					
	2011	2012	2013	2014	2015	per Okt 2016
KTI (<i>Wife Abuse</i>)	219	228	254	180	231	183
KDP (<i>Dating Violence</i>)	40	27	14	21	33	27
PERKOSAAN (<i>Rape</i>)	43	29	44	31	37	28
PEL-SEKS (<i>Sexual Harassment</i>)	35	8	11	15	16	11
KDK (<i>Family Violence</i>)	9	11	2	5	5	9
<i>Trafficking</i>	1	0	1	~	~	6
Lain-lain	~	~	~	~	~	5
TOTAL KASUS	347	303	326	252	322	269

Sumber data : Rifka Annisa tahun 2011-2016

Tren yang fluktuatif ini memerlukan analisa lebih dalam untuk mengetahui apakah tingginya angka kekerasan memperlihatkan bahwa kasus yang terjadi memang tinggi? Apakah kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus juga tinggi? Apakah penurunan kasus benar-benar terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan?

Di DIY, Kekerasan pada perempuan dan anak banyak terjadi di wilayah perkotaan, urban dan sub urban. Jumlah korban kekerasan terbanyak di setiap kabupaten kota adalah Bantul Kota di Kabupaten Bantul,

Kecamatan Temon dan Wates di Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Paliyan dan Wonosari di Gunungkidul, Kecamatan Depok di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo dan Mantrijeron di Kota Yogyakarta. Kekerasan ini berkorelasi juga dengan kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Kasus kekerasan di salah satu kawasan relokasi merapi juga memperlihatkan profil yang sama. Kawasan relokasi yang dirancang seperti kawasan sub urban dengan model perumahan yang berimpit memperlihatkan kecenderungan peningkatan kasus kekerasan, mulai dari “diintip” sampai perselingkuhan. Di samping kawasan urban sub urban, lokasi wisata juga menjadi lokus tingginya kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Secara umum, korban baru kasus kekerasan berbasis gender yang ditangani di DIY pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, terdapat 1497 korban kekerasan baru yang ditangani. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 126 korban dibandingkan jumlah korban kekerasan pada tahun 2014 yang mencapai angka 1371 korban. Dari seluruh korban kekerasan pada tahun 2015, 88,7% diantaranya adalah perempuan. Selain itu, ditemukan juga data bahwa 70,2% kasus kekerasan tersebut terjadi di lingkungan rumah tangga. Fakta ini memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan cenderung berasal dari lingkungan terdekat korban. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2017 Pemerintah Daerah DIY mulai menyusun *grand design* Ketahanan Keluarga sebagai upaya untuk kembali menegakkan peran keluarga sebagai lingkungan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap warga masyarakat.

Tabel 2.59 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian dan Lokasi Lembaga Layanan di DIY, Tahun 2014-2015

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	TEMPAT KEJADIAN					
			2014			2015		
			Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1.	Kulonprogo	Laki-laki	4	0	5	2	0	7
		Perempuan	24	3	47	30	2	12
2.	Bantul	Laki-laki	7	1	11	3	0	5
		Perempuan	59	0	31	52	1	37
3.	Gunungkidul	Laki-laki	4	0	4	3	0	5
		Perempuan	42	6	14	23	0	6
4.	Sleman	Laki-laki	27	0	14	43	1	15
		Perempuan	133	5	45	268	4	115
5.	Yogyakarta	Laki-laki	17	0	48	20	0	13
		Perempuan	382	2	204	406	8	138
6.	Provinsi	Laki-laki	25	0	14	37	0	15
		Perempuan	126	1	66	164	4	58
	Jumlah	Laki-laki	84	1	96	108	1	60
		Perempuan	766	17	407	943	19	366

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	TEMPAT KEJADIAN					
			2014			2015		
			Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
		Total	850	18	503	1051	20	426

Sumber: BPPM dari data laporan lembaga layanan Korban Kekerasan prov maupun kab/Kota

Idealnya, setiap keluarga harus mampu melaksanakan 8 fungsi keluarga, yang meliputi : (1) Fungsi Keagamaan, (2) Fungsi Sosial Budaya, (3) Fungsi Cinta Kasih, (4) Fungsi Melindungi, (5) Fungsi Reproduksi, (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, (7) Fungsi ekonomi, (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan. Namun, keluarga sebagai satu entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan/ kerentanan yang dapat mengganggu terselenggaranya kedelapan fungsi tersebut. Penyusunan *Grand Design* Ketahanan Keluarga adalah upaya Pemerintah Daerah DIY mendukung masyarakat agar dapat menjalankan seluruh fungsi keluarga dengan baik sehingga Ketahanan Keluarga dapat tercapai. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, ketahanan keluarga adalah “Kondisi dinamik sebuah keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”. Dalam kondisi ini, seluruh komponen keluarga bersinergi menjalankan perannya masing-masing demi tujuan bersama mewujudkan fungsi keluarga. Dengan demikian diharapkan setiap keluarga di DIY dapat kembali menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya, termasuk kaum perempuan dan anak.

Selain upaya tersebut, Pemerintah Daerah DIY pun terus melakukan berbagai upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif demi melindungi kaum perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. Beberapa di antaranya adalah penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “*Rekso Dyah Utami*” dan pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang melibatkan berbagai SKPD dan institusi terkait di seluruh DIY agar upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban kekerasan dapat berjalan secara komprehensif dan sistematis.

B. Kekerasan pada Anak di DIY

Bulan Oktober 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Perpu ini diberlakukan pemerintah setelah mencuatnya kasus

kekerasan seksual pada pelajar SMP di Bengkulu yang menyebabkan kematian korban. Sepanjang tahun 2015-2016 kasus kekerasan seksual memang banyak diberitakan media yang sebagiannya merupakan kasus paedofil. Selain paedofil, kasus kekerasan yang muncul di media adalah kasus penelantaran anak yang dilakukan sepasang suami isteri di Bekasi. Pada 2016, kasus kekerasan yang banyak diliput media adalah kasus kekerasan yang diterima anak di sekolah oleh tenaga pengajar. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat tiga jenis kasus perlindungan anak tertinggi selama 2015. Ketiganya adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), keluarga dan pengasuhan alternatif, dan Pendidikan.

Meskipun angka kasus perlindungan anak di DIY tidak sebesar di daerah lain, DIY tetap termasuk salah satu daerah dengan angka kasus perlindungan yang terhitung tinggi yaitu mencapai 558 kasus. Secara rinci berikut angka jenis kasus perlindungan anak yang terjadi di DIY.

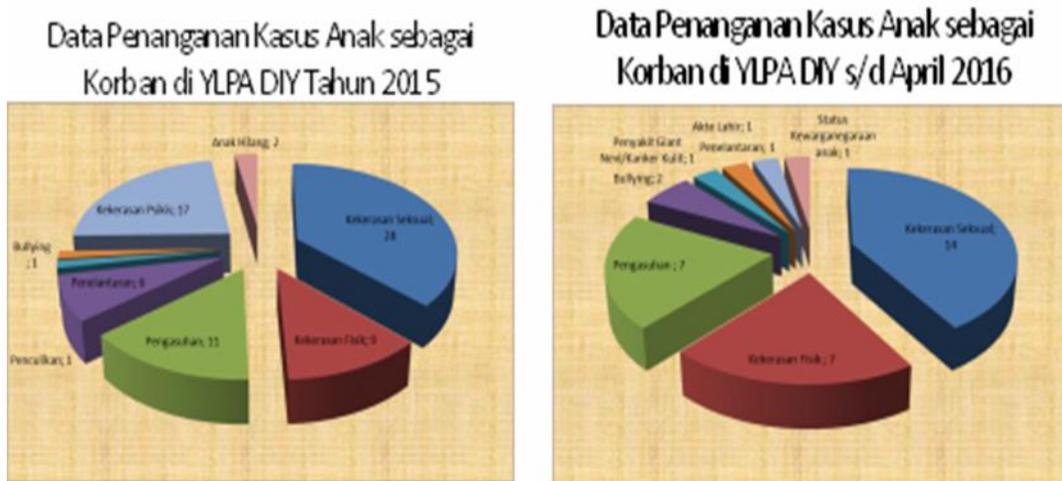
Tabel 2.60 Data Kasus Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan dan Frekuensi Kekerasan Tahun 2015

Jenis Kasus Kakerasan	Baru		Berulang	
	L	P	L	P
Anak Korban Kekerasan Fisik	40	43	26	6
Anak Korban kekerasan Psikis	35	47	2	13
Anak Korban Kekerasan Seksual	17	185	3	108
Anak Korban Eksploitasi/ <i>Trafficking</i>	0	5	4	1
Anak Korban Penelantaran	13	19	5	15
Anak Korban Lainnya	0	0	0	0

Sumber : Data Filah BPPM DIY 2015

Data yang dihimpun BPPM DIY tersebut berasal Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Dari data tersebut bisa dilihat bahwa kasus tertinggi di Yogyakarta adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan baik kasus baru maupun berulang. Disusul kasus kekerasan psikis rata-rata didominasi anak laki-laki.

Sementara itu, Data YLPA DIY tahun 2014-2015, menunjukkan bahwa 3 besar kekerasan anak di DIY berturut-turut adalah kriminalitas seperti penggelapan, pencurian sebanyak 116 kasus. Diurutan kedua adalah kekerasan seksual dengan 95 kasus dan kekerasan fisik dengan 79 kasus. Grafik berikut menunjukkan kasus kekerasan anak di DIY yang ditangani oleh YLPA DIY.



Gambar 2.55 Data Penanganan Kasus Kekerasan Anak

Di DIY, berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah dan beragam organisasi masyarakat untuk menangani kasus kekerasan juga mencegah kasus-kasus tersebut terulang kembali. Kendati demikian, kasus kekerasan pada anak dan perempuan tetap saja terjadi dan cenderung meningkat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara usaha yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan target yang ingin dicapai. Jangkauan penyebab dan akibat dari permasalahan ini yang sangat luas juga menjadi salah satu kendala bagi penghapusan masalah. Perlu langkah percepatan untuk menjawab masih adanya *gap* tersebut. Serangkaian *workshop* pemetaan isu strategis perlindungan perempuan dan anak menjadi langkah awal upaya percepatan yang dilakukan oleh BPPM DIY, Isu strategis perlindungan perempuan dan anak di DIY adalah lemahnya fungsi keluarga yang berdampak pada meningkatnya kekerasan perempuan dan anak. Upaya percepatan untuk peta jalan perlindungan perempuan dan anak melalui ketahanan keluarga menjadi langkah percepatan dan strategi yang efektif untuk menjawab isu tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga sosial ataupun LSM bekerja di ranah promosi, prevensi, kurasi maupun rehabilitasi. Pemerintah DIY maupun kabupaten-kota telah mengeluarkan regulasi yang menjadi payung hukum setiap upaya perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah DIY juga telah menyusun kebijakan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2013-2017 yang dituangkan dalam Pergub DIY no 34/2013.

Tabel 2.61 Kebijakan-Kebijakan yang Dikeluarkan Pemerintah Dalam Isu Perlindungan

No	Regulasi
1.	Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 13 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga
2.	Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan
3.	Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas
4.	Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 53 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender & Anak
5.	Peraturan Gubernur (Pergub) No 14 Tahun 2013 perubahan atas Pergub no 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”
6.	Peraturan Daerah (Perda) DIY No 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
7.	Peraturan Daerah (Perda) DIY No 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

C. Pengarusutamaan Gender di DIY

Di tingkat nasional, untuk mempercepat pengimplementasian PUG dalam kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik berupa peraturan maupun program, antara lain dengan menerbitkan Inpres Nomor: 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang merupakan piranti hukum khusus yang dilahirkan untuk mempercepat upaya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan melalui strategi Pengarusutamaan Gender. Inpres Nomor : 9/2000 menginstruksikan seluruh lembaga pemerintahan di nasional maupun daerah menerapkan strategi pengarusutamaan gender dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam semua kebijakan, program dan kegiatannya.

Kemajuan yang diperoleh pemerintah D.I. Yogyakarta untuk mengimplementasikan Strategi Pengarusutamaan Gender :

1. Dalam hal pemenuhan prasyarat implementasi PUG (dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, sistem data dan informasi, alat analisis dan dukungan masyarakat sipil), ditunjukkan dengan

- lahirannya beberapa aturan yang secara signifikan berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, antara lain :
- a. SE Gubernur DIY tentang Percepatan Pelaksanaan PUG tahun 2002;
 - b. SE Gubernur DIY tentang Pengarusutamaan Gender (Nomor 411.4/0195 tanggal 23 Januari 2002);
 - c. Keputusan Gubernur DIY Nomor : 106/KEP/2009 tentang Forum PUG Ormas Agama di Provinsi DIY;
 - d. Keputusan Gubernur DIY Nomor : 107/KEP/2009 Forum Koordinasi dan Evaluasi PUG di Provinsi DIY;
 - e. SE Gubernur DIY Nomor 463/0494 tanggal 17 Feb 2010 tentang Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)
 - f. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
 - g. Keputusan Gubernur DIY Nomor : 138/KEP/2010 tentang Pengukuhan Tenaga Pelatih (Trainer) PUG;
 - h. Keputusan Gubernur DIY Nomor : 340/KEP/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG
 - i. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran responsive Gender.
2. Implementasi PUG dalam siklus pembangunan :
- a. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender;
 - b. Meningkatnya alokasi dana dalam rangka percepatan PUG;
 - c. Munculnya contoh dan model praktek-praktek baik dalam pelaksanaan PUG antara lain dalam hal kepemimpinan, dan pengembangan kerangka kebijakan.
3. Monitoring dan evaluasi :
- a. Telah tersusun Panduan Monev Inpres Nomor 9 tahun 2000,
 - b. Telah terselenggaranya mekanisme program Anugerah Parahita Ekapraya sebagai salah satu sarana untuk melihat kemajuan pelaksanaan PUG,
 - c. Tersusunnya profil gender di tingkat DIY (sektor) sampai ke provinsi, kabupaten dan kota,
 - d. Telah terbentuknya mekanisme koordinasi tingkat nasional dan tingkat daerah,
 - e. Partisipasi masyarakat madani dalam rangka mendorong PUG semakin meningkat,
 - f. Terlaksananya PUG di sembilan sektor pembangunan (Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Kesejahteraan Sosial, Koperasi dan UKM, Hukum dan HAM, Ketenagakerjaan, Keluarga Berencana dan Lingkungan Hidup)

4. Tahapan – Tahapan Pelaksanaan PPRG di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - a. Tahun 2009 terdiri dari : Pelatihan PUG/Analisis Gender : diikuti oleh 33 instansi, PP 5 Kab/Kota, Bappeda 5 Kab/Kota, DPRD Provinsi DIY;
 - b. Tahun 2010 terdiri dari : Surat Edaran Gubernur DIY No. 463/0494 (17 Feb 2010) tentang Penyusunan Anggaran Responsif Gender 2011, Pendampingan & Sosialisasi SE ke semua SKPD (26 SKPD), Pedoman ARG (Dari RPJMD-RKA), Pedoman Evaluasi PUG, dan Pelatihan Teknis & Pendampingan;
 - c. Tahun 2011 terdiri dari :
 - 1) Disinergikan pada Musrenbangprov → Oleh Bappeda,
 - 2) PUG menjadi prioritas dalam RKPD,
 - 3) Pelatihan Teknis & Pendampingan,
 - 4) Penyiapan fasilitator PPRG Prov/Kab/Kota,
 - 5) Surat Ketua Pokja PUG → percepatan pelaksanaan,
 - 6) PUG (Data pilah, GAP, GBS, RKA responsif gender tahun 2012),
 - 7) Dibentuk SKPD Percontohan ARG.
 - d. Tahun 2012 s.d. 2013 Implementasi PPRG di semua SKPD.
 - e. Tahun 2014 s.d. 2016 Pendampingan PPRG di semua SKPD.
 - f. Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 2.62 Ketersediaan Sumberdaya Manusia Dalam Rangka Implementasi PPRG di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

No	Instansi	Pelat PUG	Pr	Lk	Ket
1	Dinas Pertanian	11	4	7	
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	7	4	
3	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12	3	9	
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR	11	8	3	
5	Dinas Kebudayaan	8	3	5	
6	Dinas Pariwisata	11	7	4	
7	Dinas Sosial	6	5	-	
8	Dinas Kesehatan	33	21	12	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	4	8	
10	Dinas PU, Perumahan dan ESDM	9	2	7	
11	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Inf	9	6	3	
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM	9	8	1	

No	Instansi	Pelat PUG	Pr	Lk	Ket
13	Dinas PPK dan Aset	8	6	2	
14	Biro Tata Pemerintahan	2	2	-	
15	Biro Hukum	4	4	-	
16	Biro Administrasi Kesra dan Masyarakat	8	3	5	
17	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	5	4	1	
18	Biro Administrasi Pembangunan	2	2		
19	Biro Organisasi	9	4	5	
20	Biro Umum, Humas dan Protokol				
21	Inspektorat	10	4	6	
22	Bappeda	16	9	7	
24	Badan Kepegawaian Daerah	7	4	3	
25	Badan Perpustakaan dan Arsip	8	4	4	
26	Badan Lingkungan Hidup	10	7	3	
27	Bakeslimas	4	4	-	
28	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	6	2	4	
29	BPPM	20	8	12	
30	RS Ghrasia	5	3	2	
31	Satpol PP	5	1	4	
32	Setwan	3	1	2	
33	Diklat	6	4	2	
34	BKPM	6	3	3	
	Jumlah	286	157	129	

Sumber : BPPM, 2016

Namun demikian masih terdapat beberapa persoalan dalam implementasi strategi PUG yang perlu mendapat perhatian berbagai pihak, Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut : (1) Lemahnya komitmen pimpinan, (2) Kurang optimalnya kemampuan SDM, (3) Belum berfungsinya *focalpoint* di SKPD, (4) PUG masih dianggap kerja sampingan,(5) PUG hanya tanggungjawab SKPD tertentu.

Melihat kondisi tersebut, maka perlunya upaya khusus yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PUG. Dalam upaya untuk mengefektifkan implementasi PUG dipersiapkan Penguatan Kelembagaan PUG antara lain : 1. Komitmen dari birokrasi dengan harapan diperolehnya dukungan dari para pengambil kebijakan (Kepala Daerah, Kepala SKPD), 2. Kelembagaan PUG untuk mendorong berfungsinya Pokja PUG dan focal point , dan 3. Instrumen tool untuk menciptakan adanya alat analisa gender yang digunakan untuk perencanaan sehingga proses perencanaan dan penganggaran di SKPD yang terkait dengan PUG secara langsung menggunakan GAP, GBS dan KAK.

Tabel 2.63 Jumlah Pejabat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan SKPD Kabupaten/Kota dan Pemerintah DIY, Tahun 2014-2015

No	Kab/Kota	Tahun	Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Eselon V		JFT	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon progo	2014	0	0	20	6	103	31	295	165	15	3	2002	3253
		2015	0	0	22	6	102	33	291	171	21	8	1923	3198
2	Bantul	2014	0	0	27	3	131	37	305	233	8	4	2774	4837
		2015	0	0	28	3	130	37	305	233	8	4	1910	832
3	Gunung Kidul	2014	0	0	24	2	117	30	367	152	45	16	3443	3838
		2015	0	0	22	2	117	31	373	151	48	17	3273	3705
4	Sleman	2014	0	0	21	10	99	48	342	236	34	30	2842	5655
		2015	0	0	20	10	100	51	340	240	32	30	2697	5539
5	Yogyakarta	2014	0	0	21	5	90	46	354	342	9	18	2816	1339
		2015	0	0	21	5	91	44	355	341	9	19	1244	2726
6	Pemda DIY	2014	1	0	30	8	139	67	325	239	6	0	985	1040
		2015	1	0	31	8	138	68	329	234	6	0	994	1033
7	Jumlah	2014	1	0	143	34	679	259	1988	1367	117	71	14862	19962
		2015	1	0	144	34	678	264	1993	1370	124	78	12041	17033

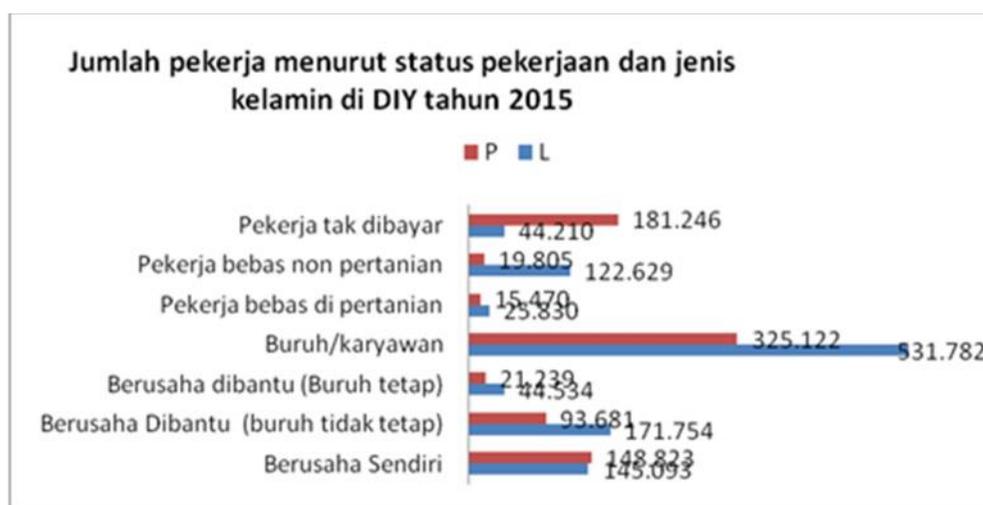
Sumber : BPPM, 2016

Jika dikaji dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan dalam jajaran jabatan struktural birokrat di lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2015 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014. Namun, masih terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat jabatan struktural, maka semakin kecil rasio partisipasi perempuan pada level tersebut. Selain itu ditemukan pula fakta bahwa partisipasi perempuan pada jabatan fungsional di seluruh tingkat pemerintahan di Provinsi DIY sudah cukup besar. Bahkan, meskipun terjadi penurunan jumlah pada

tahun 2015, posisi jabatan fungsional masih didominasi oleh perempuan.

Partisipasi Perempuan dalam Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja di DIY semakin memperlihatkan perkembangan positif dari waktu ke waktu. Beberapa sektor ekonomi yang strategis pun kini banyak bertumpu pada sumbangsih perempuan. Namun sayangnya, persoalan gender masih acap kali dijumpai. *Gender stereotype* bahwa laki-laki adalah pencari nafkah yang utama dan bahwa beberapa pekerjaan hanya patut dilakukan oleh laki-laki menyebabkan banyak perempuan bekerja tanpa mendapatkan bayaran dan lebih terbatasnya akses perempuan terhadap kesempatan kerja.



Sumber: BPS sakernas

Gambar 2.56 Jumlah Pekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2015

Grafik tersebut menunjukkan bagaimana partisipasi perempuan sebagai karyawan dan wirausaha telah menunjukkan kondisi yang positif. Bahkan, jumlah perempuan pelaku wirausaha sudah melebihi jumlah wirausaha laki-laki. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa mayoritas pekerja tidak dibayar di DIY adalah perempuan. Kondisi ini berarti Pemerintah Daerah DIY perlu berupaya lebih serius dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan, disamping terus berikhtiar mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

D. Peranan Ekonomi Perempuan Melalui Model Desa Prima Di DIY

Pemda DIY telah menyelenggarakan banyak program yang mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, Pemda DIY menginisiasi 60 kelompok

pemberdayaan ekonomi perempuan dengan nama Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang dilakukan pada tahun 2008-2016.

Tabel 2.64 Desa Prima di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Desa Prima	Jumlah Anggota
1	Kota Yogyakarta	3	72
2	Kab. Bantul	11	316
3	Kab. Kulonprogo	15	511
4	Kab Gunung Kidul	20	532
5	Kab. Sleman	11	285
	Jumlah	60	1.716

Sumber : BPPM DIY 2016

Pengembangan Desa PRIMA merupakan alternatif upaya peningkatan taraf hidup perempuan dengan mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari berbagai instansi terkait, LSM, Organisasi Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan. Melalui cara ini diharapkan perempuan dari keluarga miskin di DIY dapat menjadi sosok yang lebih mandiri sehingga dapat mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikannya dalam keluarga.

E. Peranan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di DIY

Upaya membangun keefektifan pemimpin terletak semata pada pembekalan dimensi keterampilan teknis dan keterampilan konseptual. Adapun keterampilan personal menjadi terpinggirkan. Padahal sejatinya efektifitas kegiatan manajerial dan pengaruhnya pada kinerja organisasi, sangat bergantung pada kepekaan pimpinan untuk menggunakan keterampilan personalnya. Keterampilan personal tersebut meliputi kemampuan untuk memahami perilaku individu dan perilaku kelompok dalam kontribusinya membentuk dinamika organisasi, kemampuan melakukan modifikasi perilaku, kemampuan memahami dan memberi motivasi, kemampuan memahami proses persepsi dan pembentukan komunikasi yang efektif, kemampuan memahami relasi antar konsep kepemimpinan-kekuasaan-politik dalam organisasi, kemampuan memahami genealogi konflik dan negosiasinya, serta kemampuan mengkonstruksikan budaya organisasi yang ideal.

Kreativitas penting bagi pengambil keputusan, hal ini memungkinkan pengambil keputusan untuk lebih sepenuhnya menghargai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah-masalah yang tidak dapat dilihat orang lain, namun kenyataannya banyak pemimpin dalam

pengambilan keputusan tidak memperhatikan perilaku pemimpin yang baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik, antara lain: (1) Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan, (2) Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang, (3) Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk “membaca” situasi, (4) Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan, (5) Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berfikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.

Pemda DIY telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan di seluruh kecamatan demi mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Namun, jika ditinjau dari hasil Pemilihan Umum tahun 2014, upaya tersebut belum begitu membuahkan hasil. DIY belum berhasil mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) yang mewajibkan terselenggaranya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dengan kuota sebesar 30%. Pada Pemilu 2014, rasio tertinggi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif terdapat di DPRD Kabupaten Sleman, yakni sebesar 26% disusul DPRD Kabupaten Bantul dengan rasio keterwakilan perempuan sebesar 25%. Sementara, rata-rata rasio keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di DIY hanya berada pada angka 17%.

Tabel 2.65 Anggota DPRD DIY dan Kabupaten Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin, Hasil Pemilu Tahun 2014

No	DPRD	2014			
		L	P	L+P	%P
1	Kota Yogyakarta	30	10	40	25
2	Kabupaten Bantul	42	3	45	6,67
3	Kabupaten Kulon Progo	33	7	40	17,5
4	Kabupaten Sleman	37	13	50	26
5	Kabupaten Gunungkidul	38	7	45	15,5
6	DPRD DIY	48	7	55	12,7
	Jumlah	228	47	275	17

Sumber: BPPM, 2015.

Selain tingkat elektabilitas yang rendah, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah masih adanya keengganan perempuan untuk tampil dalam bidang politik dan kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi

lebih dalam ranah politik. Hal ini dikarenakan masih adanya stigma bahwa ranah politik adalah ranah laki-laki. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa strategi untuk menumbuhkan kesadaran dan strategi pembelajaran politik bagi warga perempuan di DIY masih diperlukan sehingga selanjutnya mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan di DIY dalam politik baik secara kuantitas maupun kualitas.

F. Organisasi Perempuan di DIY

Para perempuan, pada masa pergerakan nasional juga turut serta dalam berorganisasi. Terinspirasi dari kumpulan surat-surat dari R.A Kartini yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, kemudian terjadilah emansipasi perempuan di Indonesia. Perempuan tidak hanya tinggal di rumah, melainkan para perempuan juga turut aktif dalam pergerakan nasional. Salah satunya adalah dengan cara mendirikan organisasi perempuan.

Peranan organisasi wanita pada masa pergerakan nasional memang tidak langsung berkecimpung untuk terjun langsung dalam peperangan, namun peranan organisasi wanita ini lebih mengarah pada masalah bidang kesejahteraan masyarakat. Pada masa krisis ini, perempuan memiliki inisiatif untuk bangkit dan juga menggerakkan masyarakat yang ada di sekitarnya untuk melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang ada. Perbaikan perekonomian ini dimulai dari keluarga hingga perekonomian masyarakat.

Pemda DIY telah menyelenggarakan banyak program yang mendorong partisipasi perempuan dalam berorganisasi. Pemda DIY melakukan pembinaan untuk 387 organisasi perempuan sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2.66 Pembinaan Organisasi Perempuan di DIY Tahun 2016

NO	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Organisasi					Jumlah Organisasi Yang Dibina 2016				
		GOW	BKOW	DWP	AGAMA	ORSOSPOL	GOW	BKOW	DWP	AGAMA	ORSOSPOL
1	Kota Yogyakarta	27		32	8	2	27		32	8	2
2	Kab. Bantul	27		32	8	2	27		32	8	2
3	Kab. Kulonprogo	17		30	8	2			30	4	2
4	Kab Gunung Kidul	25		31	8	2			31		2
5	Kab. Sleman	28		33	8	2	28		33	8	2
6	DIY		42	52	11	4		42	52	11	4

NO	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Organisasi					Jumlah Organisasi Yang Dibina 2016				
		GOW	BKOW	DWP	AGAMA	ORSOSPOL	GOW	BKOW	DWP	AGAMA	ORSOSPOL
	Jumlah	124	42	210	51	14	82	42	210	39	14
	Total	441					387				
	%						87,76				

Sumber : BPFM DIY 2016

2.3.1.9 Urusan Ketahanan Pangan

A. Kondisi Umum

Kedaulatan Pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pembangunan ketahanan pangan adalah mewujudkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.



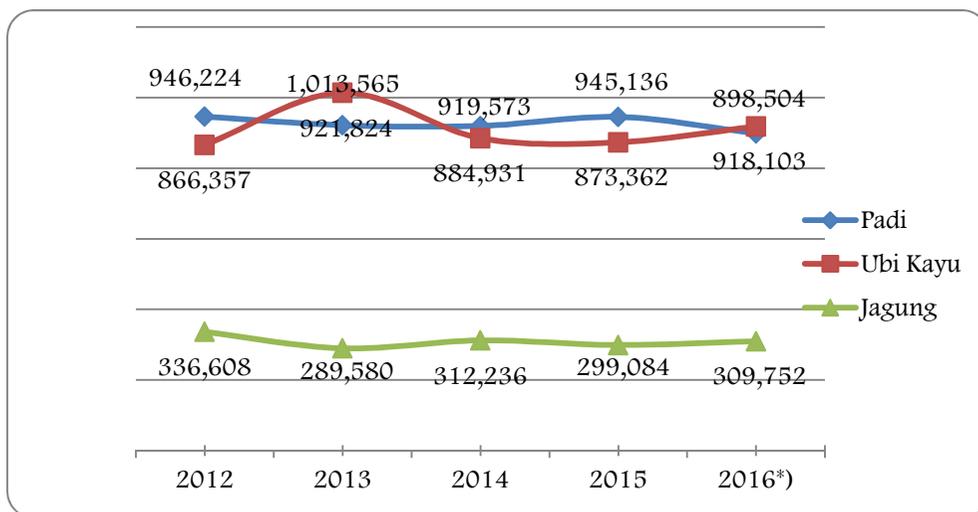
Gambar 2.57 Pangan Lokal di DIY

Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu

ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

1) Ketersediaan Pangan

Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, DIY mengalami trend peningkatan produksi pangan nabati pada komoditas utama yaitu padi dan ubi kayu. Peningkatan produksi padi pada kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh adanya fenomena perubahan iklim secara global, sehingga mempengaruhi pola penanaman padi. Pada tahun 2016 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 46.632 ton, bila dilihat dari produksi pertanian sawah dan ladang, pertanian sawah mengalami penurunan sebesar 18.631 ton dan ladang mengalami penurunan sebesar 28.001 ton bila dibandingkan dengan tahun 2015, hal ini disebabkan karena adanya curah hujan yang tinggi dan banjir di beberapa daerah pada tahun 2016. Sementara produksi ubi kayu mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 dikarenakan peningkatan produktivitasnya. Di sisi lain, produksi jagung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Bahkan produksi pada tahun 2015 dan 2016 lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Hal ini juga diakibatkan oleh musim kemarau basah yang mengganggu produksi dan penyusutan lahan pertanian.

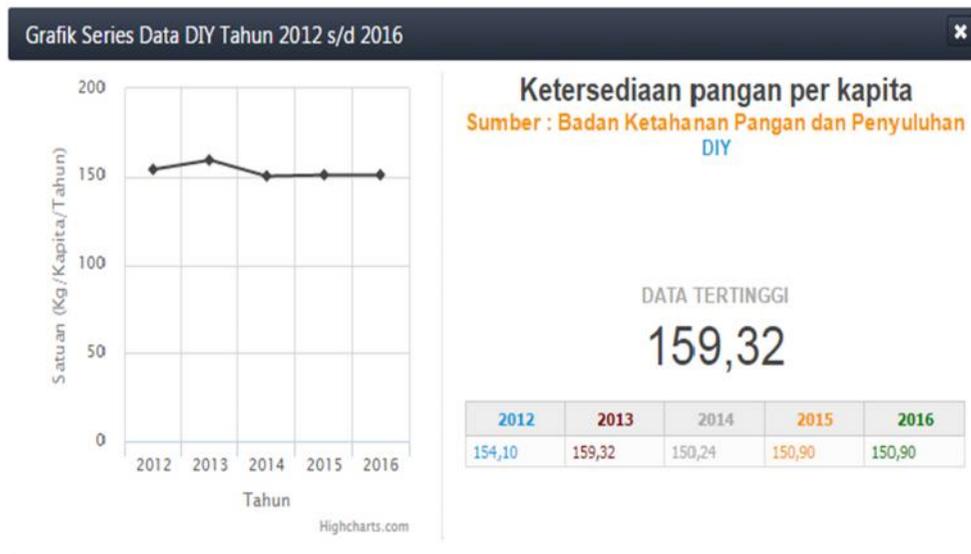


Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016

Gambar 2.58 Grafik Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (dalam ton), Tahun 2012-2016

Berdasarkan pada Neraca Bahan Makanan yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Ketersediaan kelompok padi – padian tahun 2015 sebesar 1.814 kal/kap/hari lebih tinggi dibanding tahun 2014 (1.944 kal/kap/hari), hal ini dikarenakan penurunan produksi GKG dari tahun 2014 (945.136 ton) menjadi 898.504 ton (tahun 2015). Penurunan produksi padi ini disebabkan turunnya produktivitas akibat tingginya curah hujan utamanya di SR3 yang berakibat pada gangguan penyerbukan padi, gangguan OPT dan keterlambatan pemupukan khususnya di Kabupaten Sleman yang terjadi pada padi sawah.

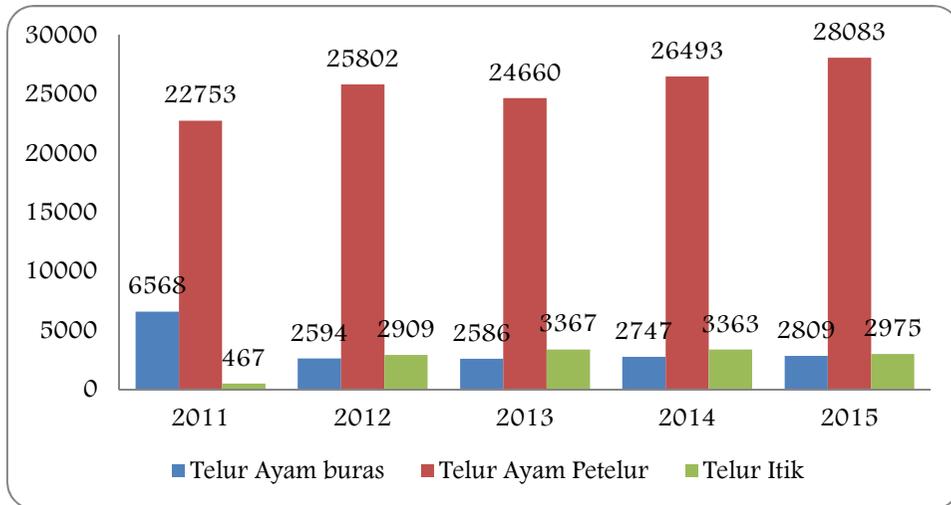
Dari ketersediaan energi kelompok daging tahun 2015 sebesar 325 kkal/kap/hari lebih rendah dibanding tahun 2014 (326 kkal/kap/hari). Hal ini dikarenakan peningkatan produksi daging unggas yaitu daging ayam ras, buras, serta itik. Produksi daging ayam buras tahun 2014 (6.160 ton) menurun pada tahun 2015 (6.035 ton); ayam ras tahun 2014 (40.395 ton) menurun pada tahun 2015 (39.169 ton); itik tahun 2014 (492 ton) meningkat pada tahun 2015 (548 ton). Peningkatan produksi dikarenakan adanya peningkatan dalam hal sanitasi kandang serta kesehatan dari ternak itu sendiri. Sedangkan untuk komoditi daging sapi pada tahun 2015 (7.442 ton) lebih rendah dibanding tahun 2014 (8.612 ton), hal ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah pemotongan yang dilaksanakan dan dipasarkan di DIY.



Gambar 2.59 Ketersediaan Pangan Per Kapita

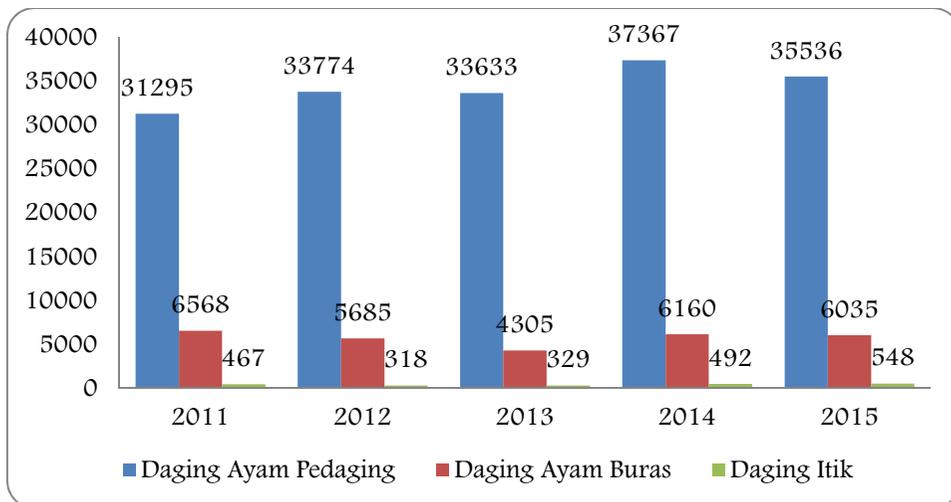
Ketersediaan energi kelompok telur pada tahun 2015 sebesar 52 kkal/kap/hari, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penyediaan dalam negeri pada komoditi ayam ras petelur pada tahun 2015 (28.083 ton) sedangkan tahun 2014 (26.493 ton).

Seiring dengan peningkatan populasi unggas, produksi dari unggas, baik berupa daging maupun telur juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun produksi telur itik pada tahun 2014 dan 2015 lebih rendah dibanding tahun 2013.



Sumber : Dataku Bappeda DIY 2016

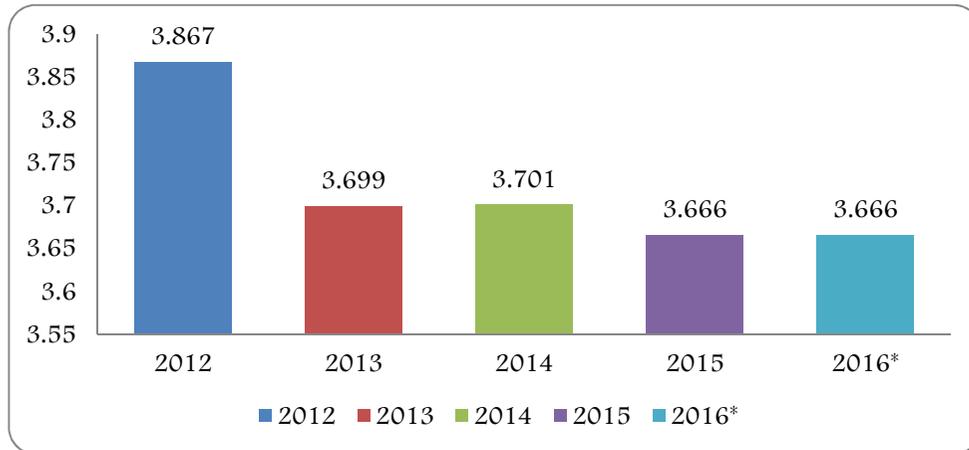
Gambar 2.60 Grafik Produksi Telur Unggas Tahun 2011-2015 (dalam ribuan)



Sumber : Dataku Bappeda DIY 2016

Gambar 2.61 Grafik Produksi Daging Ayam Tahun 2011-2015 (dalam ribuan)

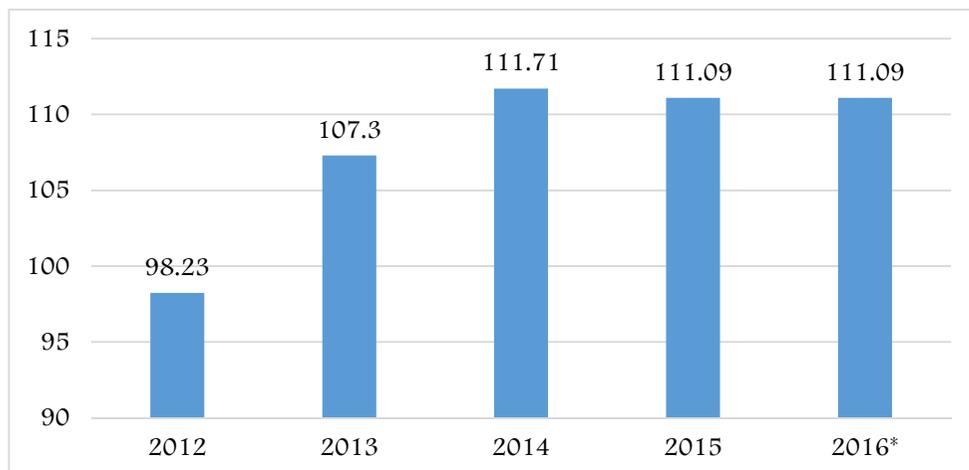
Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2400 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari, maka posisi DIY jauh melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2016 sebesar 3.666 Kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein ketersediannya sebesar 111,09 gram/kapita/hari.



Sumber : Dataku Bappeda DIY 2016

*) data sementara

Gambar 2.62 Grafik Jumlah Ketersediaan Energi di DIY Tahun 2012-2016

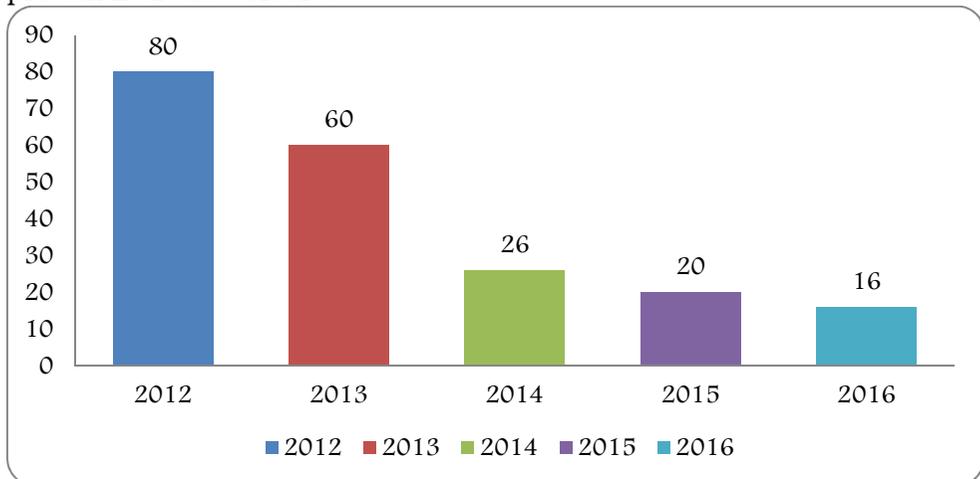


Sumber : Dataku Bappeda DIY 2016

*) data sementara

Gambar 2.63 Grafik Ketersediaan Protein di DIY Tahun 2012-2016

Jumlah desa rawan pangan di DIY terus menurun dari 103 desa pada tahun 2010 menjadi 26 desa pada tahun 2014 dan menurun menjadi 20 desa pada tahun 2015, pada tahun 2016 DIY masih memiliki 16 desa rawan pangan. Desa rawan pangan tersebut tersebar di Kabupaten Bantul 3 desa, Kabupaten Kulon Progo 6 desa, dan Kabupaten Gunungkidul 7 desa. Hal tersebut dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa rawan pangan diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut.



Sumber : Dataku Bappeda DIY

Gambar 2.64 Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2012-2016

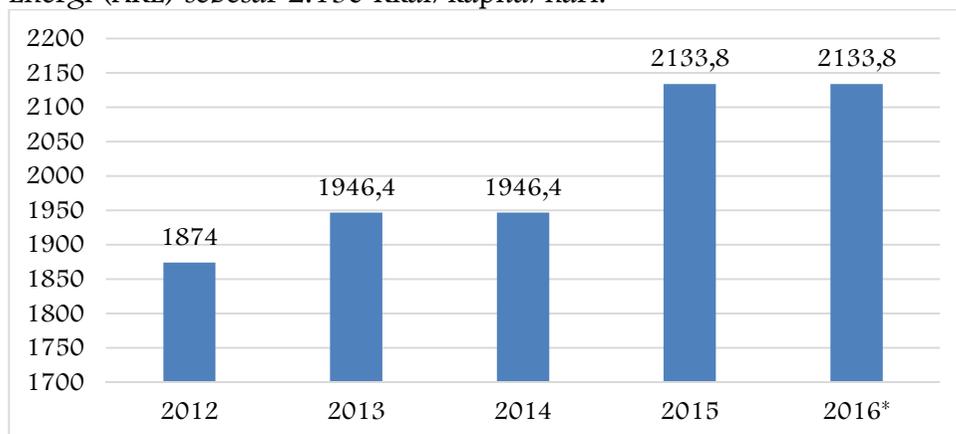
2) Distribusi Pangan

Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum penyelenggaraan distribusi pangan di DIY telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sekaligus pemberian/hibah kepada keluarga pra sejahtera yang dapat disalurkan memadai sesuai sasaran yang ditetapkan. Dalam upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, telah dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Sampai dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mengendalikan stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

3) Konsumsi dan Pengawasan Pangan

Jumlah konsumsi energi penduduk DIY cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2133,8 Kkal/kapita/hari, masih sedikit berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari.

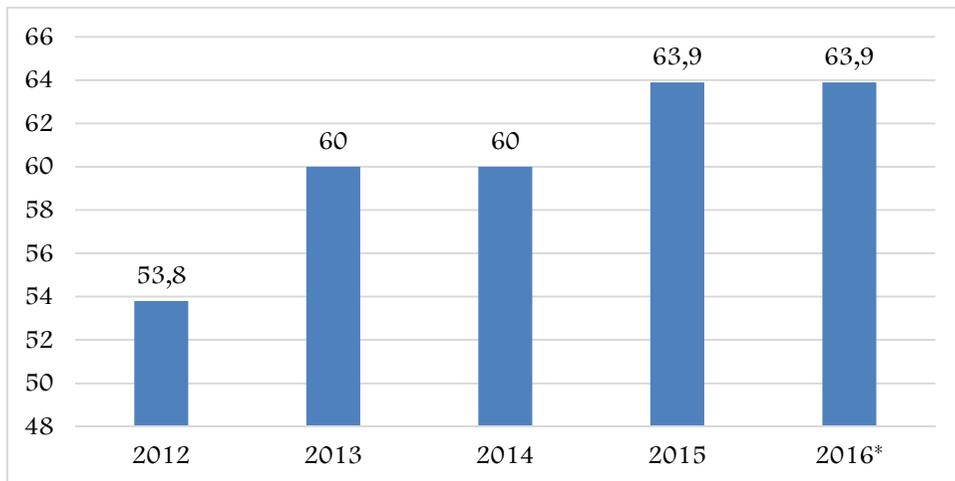


Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2017 (diolah)

*) data sementara

Gambar 2.65 Grafik Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2012-2016

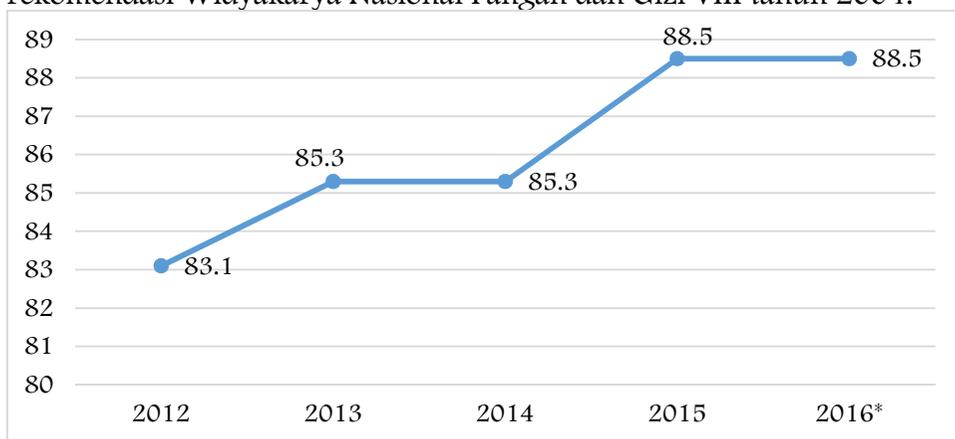
Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2015 mencapai sebesar 63,9 gram/kapita/hari. Konsumsi protein tersebut sudah berada diatas angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2016 (diolah), *) data sementara

Gambar 2.66 Grafik Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2012-2016

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2016 adalah 88,5, lebih baik dari skor nasional sebesar 85,2. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2015 (diolah)

*) data sementara

Gambar 2.67 Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2012-2016

Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya kurang dari yang dianjurkan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganeekaragaman pangan di DIY.

2.3.1.10 Urusan Pertanahan

Pemda DIY, sebagai daerah otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Secara umum permasalahan sektor pertanahan di DIY, tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah lain dan adanya keistimewaan urusan pertanahan. Berkenaan dengan hal tersebut permasalahan sektor pertanahan di DIY berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, objeknya dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yakni: (1) permasalahan pertanahan berhubungan dengan masyarakat umum; dan (2) permasalahan pertanahan terkait penyelenggaraan keistimewaan pada tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Permasalahan yang bersifat umum dan terkait dengan masyarakat luas adalah: (a) tingginya alih fungsi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian; (b) tingginya fragmentasi tanah-tanah pertanian; (c) tidak terkendalinya harga tanah; (d) belum semua bidang-bidang tanah terdaftar; (e) belum adanya sistem informasi pertanahan berbasis bidang-bidang tanah; dan (f) masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Permasalahan terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) permasalahan, meliputi permasalahan fisik, sosial, budaya dan permasalahan yuridis.

1. Permasalahan Fisik

Secara fisik permasalahan yang ada antara lain: (a) batas fisik tanah keistimewaan belum sepenuhnya dapat diidentifikasi secara jelas; (b) belum adanya peta objek dan subjek serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan tanah keistimewaan; dan (c) sebagian tanah keistimewaan adalah tanah-tanah marjinal.

2. Permasalahan Sosial

Permasalahan sosial yang dihadapi meliputi: (a) sebagian besar SG/PAG sudah dimanfaatkan oleh subjek hak, baik pemerintah, TNI, POLRI, badan hukum, desa dan masyarakat; (b) belum adanya

persepsi yang sama terhadap keberadaan tanah keistimewaan oleh stakeholder yang berkepentingan; serta (c) upaya inventarisasi dan identifikasi tanah keistimewaan, diinterpretasikan sebagai upaya menarik kembali tanah-tanah SG/PAG ke Kasultanan dan Kadipaten.

3. Permasalahan Budaya

Permasalahan budaya berkenaan dengan nilai-nilai dasar keistimewaan tampaknya belum terinternalisasi secara baik, ketika masih beragamnya persepsi masyarakat terhadap tanah keistimewaan, bahkan hal ini terjadi pula pada aparat birokrasi. Pengakuan eksistensi budaya kraton dan kadipaten berproses secara dinamis, sehingga pemaknaannya menjadi berkembang dan memungkinkan munculnya berbagai perbedaan persepsional antar pemangku kepentingan. Perbedaan persepsi ini perlu mendapatkan perhatian agar tetap berkontribusi dalam meneguhkan keistimewaan DIY.

4. Permasalahan Yuridis

Permasalahan yuridis yang perlu segera ditangani adalah: (a) belum adanya definisi yang jelas dan operasional tentang tanah keistimewaan, terutama tanah bukan keprabon; (b) terdapatnya tanah keistimewaan yang sudah diberikan hak kepada subjek hak berdasarkan UUPA, yang secara legal formal terpenuhi segala persyaratannya; (c) terbitnya UU Keistimewaan tidak serta merta membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap SG/PAG yang pada saat perbuatan hukum itu dilakukan dianggap sebagai tanah negara; (d) belum sinkronnya tafsir terhadap Tanah Desa, antara UU Keistimewaan dengan UU Desa;

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundang Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, meliputi:

- a. izin lokasi;
- b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

- e. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- f. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- g. izin membuka tanah; dan
- h. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan :

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kelurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti *magersari*, *ngindhung*, *hanganggo turun-temurun*, dan *hanggaduh* (atau *anggaduh*) melalui serat kekancingan.

Pencapaian target Urusan Pertanahan pada tahun 2016 yakni Bidang SG, PAG, dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penataan pemanfaatan tanah, pengawasan dan izin pengelolaan tanah kas desa, penyelesaian konflik-konflik pertanahan sampai dengan fasilitasi penetapan izin lokasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selama tahun 2016 telah terproses izin penetapan lokasi sebanyak 3 izin. Dalam hal fasilitasi izin pengelolaan tanah kas desa, pada tahun 2016 sudah dilakukan fasilitasi terkait terbit/keluarnya izin pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebanyak 65 izin. Sampai tahun 2016 telah dilakukan pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak ± 13.877 bidang dengan keluasan $\pm 79.331.371$ m² dan untuk Tanah Desa sebanyak ± 31.804 bidang dengan keluasan $\pm 209.664.472$ m², juga telah dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten sifatnya berkelanjutan mulai dilaksanakan pada tahun 2014 selanjutnya dilakukan pengembangan dan *updating* data. Jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 12.479 bidang.

Isu strategis yang dipetakan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan pada 2018 meliputi :

1. Kurangnya pemahaman tata cara pengurusan izin pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, sehingga diperlukan sosialisasi tata cara pengurusan izin.
2. Lemahnya validitas data tanah baik terhadap obyek tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa, sehingga perlu penyempurnaan dan update berkala database pertanahan.
3. Secara fisik, kondisi tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa belum tergambar secara menyeluruh dan detail, baik keluasan maupun penggunaan lahannya, sehingga batas fisik tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa belum dapat teridentifikasi secara jelas di lapangan. Secara spasial, utamanya tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten bersinggungan secara ketat dengan tanah-tanah yang bersifat privat, sehingga memerlukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara komprehensif.
4. Masih banyaknya permasalahan dan konflik di bidang pertanahan, termasuk permasalahan Tanah Desa, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah Daerah DIY untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan dan senantiasa memberikan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan dan konflik pertanahan.
5. Masih banyaknya desa yang belum mempunyai perdes pemanfaatan Tanah Desa, sehingga perlu dilakukan fasilitasi penyelenggaraan penyusunan perdes tentang pemanfaatan Tanah Desa guna percepatan munculnya perdes sebagai dasar dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah desa.
6. Banyaknya dokumen pertanahan yang rusak karena cara perawatan yang belum memenuhi standar perawatan.

2.3.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

A. Kondisi Kualitas Air

1. Kondisi Kualitas Air Sungai

Kondisi kualitas air sungai di DIY dalam penyusunan RKPD 2018 mendasarkan pada data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) DIY tahun 2013, 2014 dan 2015. Pemantauan kualitas air sungai meliputi parameter fisik (suhu, TDS, TSS, dan DHL), Parameter kimia (pH, Oksigen terlarut (DO), BOD, COD, Klorin bebas, Sulfida (H₂S), Fluorida, Fosfat (PO₄), Nitrat (NO₃-N), Nitrit, Kadmium (Cd), Krom (Cr+6), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Boron, Sianida (CN), Minyak dan Lemak, Seng (Zn), Fenol, Amoniak, Permanganat dan Deterjen), serta parameter biologi (Bakteri Koli Tinja dan Total Coli) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 10 Sungai yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Bedog, Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik dan Sungai Bulus dalam tiga periode, yaitu bulan Februari, Juni, dan September. Dari hasil pemantauan tersebut, diperoleh data kualitas air sungai yang kemudian dianalisa dengan Metode Indeks Pencemaran dan Metode Storet. Hasil analisis Storet secara umum sungai-sungai di DIY sudah masuk kategori cemar berat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67 Status Mutu Air Sungai DIY dengan Metode Storet

No.	Nama Sungai	Nilai Baku Storet	Status Kualitas Air Sungai (2013)	Status Kualitas Air Sungai (2014)	Status Kualitas Air Sungai (2015)	Keterangan
1	Winongo	≤ -31	-96 hingga -120	-75 hingga -106	-73 hingga -110	Cemar Berat (naik)
2	Code	≤ -31	-86 hingga -112	-89 hingga -120	-94 hingga -118	Cemar Berat (turun)
3	Gajahwong	≤ -31	-74 hingga -120	-78 hingga -108	-88 hingga -102	Cemar Berat (turun)
4	Bedog	≤ -31	-84 hingga -108	-94 hingga -111	-90 hingga -143	Cemar Berat (naik)
5	Belik	≤ -31	-100 hingga -126	-104 hingga -120	-120 hingga -149	Cemar Berat (naik)
6	Konteng	≤ -31	-86 hingga -106	-94 hingga -116	-90 hingga -114	Cemar Berat (turun)
7	Kuning	≤ -31	-83 hingga -90	-85 hingga -102	-95 hingga -101	Cemar Berat (turun)
8	Oyo	≤ -31	-92 hingga -98	-92 hingga -111	-118 hingga -132	Cemar Berat (naik)
9	Tambak bayan	≤ -31	-98 hingga -106	-84 hingga -107	-84 hingga -105	Cemar Berat (turun)
10	Bulus	≤ -31	-70 hingga -76	-93 hingga -98	-100 hingga -116	Cemar Berat (naik)

Sumber : SLHD DIY Tahun 2013, 2014 & 2015

Dari hasil pemantauan 10 sungai di DIY tahun 2015, terdapat 5 sungai yang mengalami peningkatan kualitas dan 5 sungai yang mengalami penurunan kualitas. Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air sungai antara lain:

- a. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM.
- b. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.
- c. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak.
- d. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.

Parameter yang dominan terdeteksi melebihi baku mutu antara lain timbal, tembaga, zink, sulfida, fenol, klorin bebas, bakteri total koli dan bakteri koli tinja. Adapun nilai parameter bakteri koli tinja dan bakteri total koli masih melebihi baku mutu disinyalir berasal dari limbah domestik dan kotoran ternak.

Secara umum pada pemantauan kualitas air tahun 2015 terjadi penurunan tingkat pencemaran dari pemantauan periode bulan Februari sampai dengan September. Kondisi terburuk pada bulan Februari dengan dominasi cemar berat, sedangkan pada periode pemantauan bulan Juni dan September mengalami perbaikan menjadi cemar hingga cemar ringan.

2. Kondisi Kualitas Air Tanah

Pada tahun 2015 dilakukan pemeriksaan kualitas air tanah sebanyak 68 sampel air sumur di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan baku mutu dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990. Pengujian dilakukan dalam dua tahap yaitu bulan April dan bulan Juni dengan masing-masing periode sebanyak 34 sampel.

Dari 68 sampel air sumur yang diuji dapat diketahui beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu, yaitu kekeruhan, Mangan, timbal, nitrat, TDS, DHL dan *total coliform*. Untuk parameter kekeruhan, hanya ada 1 sampel yang tidak memenuhi baku mutu (1,47%) yaitu sumur di SMAN 1 Temon, Kulon Progo. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan penyebab tingginya angka kekeruhan pada air sumur. Tingginya angka kekeruhan antara lain disebabkan oleh adanya zat koloid, partikel zat padat, zat organik, dan mikro organisme dalam air.

Untuk unsur mangan, dari 68 sampel yang diuji terdapat 5 sampel (7.35 %) dengan kandungan mangan yang melebihi baku mutu. Berdasarkan keterangan PDAM Tirta Marta kandungan mangan di DIY cukup tinggi karena secara alami cukup tinggi, dapat juga disebabkan adanya limbah domestik dan pelarutan mineral.

Diantara parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi dari hasil pengujian 68 sampel air sumur dapat diamati hampir sebagian besar sampel air sumur tidak memenuhi baku mutu untuk parameter mikrobiologi, yaitu *total coliform*, sebanyak 22 sampel (38.24 %) tidak memenuhi baku mutu. Keberadaan bakteri koli menunjukkan adanya kontaminasi mikroorganisme yang bersifat patogenik bagi kesehatan. Bakteri koli dapat digolongkan menjadi bakteri koli tinja dan non tinja. Contoh bakteri koli tinja adalah *Escherichia coli* yang berasal dari kotoran hewan dan manusia.

Tingginya jumlah bakteri koli termasuk koli tinja dalam air sumur yang diperiksa dikawatirkan membawa dampak buruk terhadap

kesehatan masyarakat pengguna sumber air tersebut. Salah satu penyakit yang disebabkan *Escherichia coli* adalah diare. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tingginya bakteri koli dalam air sumur, antara lain dengan menaburkan chlor diffuser (Laporan Analisa Data Air Tanah di DIY, BLH 2015).

3. Kualitas Air Laut dan Pesisir

Laut dan pesisir DIY merupakan bagian dari pantai selatan Pulau Jawa yang memanjang dari ujung barat Kabupaten Kulon Progo hingga ujung timur Kabupaten Gunungkidul. DIY mempunyai panjang garis pantai 113 km dengan pantai yang datar hingga landai (kemiringan lereng 0-2 %) sepanjang kurang lebih 42 km yang berada di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dengan ketinggian berkisar 0 hingga 50 m dari permukaan laut (dpl). Pantai yang berada di Kabupaten Gunung Kidul memiliki kemiringan lereng yang bervariasi 2% hingga lebih dari 40% dengan ketinggian berkisar 0 hingga 250 m sepanjang lebih kurang 71 km.

Kedalaman maksimum laut di selatan pantai D.I. Yogyakarta hingga sejauh 12 mil mencapai 500 m. Semakin ke arah selatan, kedalaman perairan Samudra Hindia secara gradual bertambah lebih curam hingga mencapai kedalaman 4000 m. Daerah ini merupakan palung laut yang memanjang dari arah barat ke timur. Ini merupakan zona tumbukan antara lempeng tektonik samudra dengan lempeng tektonik benua Asia.

Data pemantauan kualitas air laut dan pesisir pada SLHD DIY 2015, didasarkan pada analisis sampel kualitas air laut di 11 Pantai di DIY yaitu Pantai Glagah, Pantai Baru, Pantai Pandansimo, Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Ngrenahan, Pantai Sundak, Pantai Drini, Pantai parangtritis, Pantai baron dan Pantai Indrayanti, hasil pemantauan untuk parameter fisika, kimia dan biologi adalah sebagai berikut :

a. Parameter Fisika

Parameter fisika yang diukur dalam pemantauan kualitas air laut adalah kekeruhan, temperatur, warna, bau dan TSS air laut. Berikut ini akan dibahas satu persatu parameter fisika, kecuali bau. Hal ini dikarenakan dalam pemantauan ditemukan bahwa semua sampel yang diambil tidak berbau dan telah sesuai dengan baku mutu.

1) Kekeruhan (*turbiditas*)

Kekeruhan merupakan kandungan bahan organik maupun anorganik yang terdapat di perairan dan berpengaruh terhadap proses kehidupan organisme yang ada di perairan tersebut. Kekeruhan yang tinggi menyebabkan turunnya kandungan oksigen. Hal ini disebabkan intensitas cahaya matahari yang

masuk dalam perairan menjadi terbatas karena kekeruhan yang tinggi oksigen. Terdapat 8 titik pemantauan yang kekeruhannya melebihi baku mutu, yaitu di pantai Pandansimo, Depok, Drini, Parangtritis dan Baron pada periode April serta di pantai Baru, Samas, Ngrenahan, Parangtritis dan Baron pada periode Agustus. Keruhnya air laut pada sebagian besar pantai menunjukkan bahwa kondisi di Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah hulu kurang baik. Hal ini sebagai akibat terjadinya erosi yang kemungkinan disebabkan tutupan vegetasi yang kurang memadai, pengambilan pasir yang intensif atau adanya sampah di aliran sungai.

2) Temperatur

Temperatur air laut terpantau pada 11 pantai menunjukkan hasil antara 22,9 – 27,1°C. Pada pemantauan bulan Agustus rata-rata suhu lebih daripada pemantauan bulan April. Perbedaan rata-rata suhu bisa disebabkan oleh kelembaban udara. Fluktuasi suhu juga disebabkan oleh angin, semakin kencang angin bertiup maka suhu semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Hasil pengukuran temperatur tersebut masih berada dalam batas normal, tidak ada kenaikan temperatur maupun penurunan temperatur yang signifikan.

3) Warna

Warna air laut terjadi karena air laut menyerap warna. Warna yang diserap berasal dari cahaya, kandungan sedimen, dan kandungan zat organik atau anorganik. Kandungan zat organik dalam air laut misalnya adanya alga merah, hijau, dan biru. Sedangkan pada air yang jernih, sinar matahari dapat menembus hingga kedalaman 200 meter. Warna air laut yang jernih ini merupakan lingkungan yang baik bagi terumbu karang dan coral untuk berkembangbiak.

Warna dinyatakan dalam Pt-Co dengan nilai ambang batas sebesar 30 Pt-Co. Secara kasat mata, warna air laut terlihat hampir sama, namun ternyata melalui pengukuran terdapat perbedaan konsentrasi. Dari pemantauan diketahui bahwa kadar warna air laut masih berada di bawah ambang batas yang ditentukan, kecuali di Pantai Glagah pada bulan Maret 2015 kadar warna air laut jauh melampaui bakumutu, yaitu 66,5 Pt-Co. Tingginya kadar warna air laut di pantai Glagah kemungkinan disebabkan air laut membawa sedimen dari aliran sungai Serang.

4) *Total Suspended Solid* (TSS)

TSS air laut adalah kandungan zat padat yang tersuspensi dalam air laut, dapat berupa pasir, lumpur, tanah maupun logam berat atau partikel tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup seperti *fitoplankton*, *zooplankton*, bakteri, fungi maupun komponen mati seperti detritus dan partikel anorganik. Nilai TSS dapat dianggap sebagai indikator awal dalam mengevaluasi kondisi lingkungan pesisir. Diketahui bahwa konsentrasi TSS air laut terdapat lebih dari 50% lokasi pantai di DIY telah melebihi baku mutu (20 mg/L) yaitu berkisar antara 15,1 – 33,4 mg/L. Kandungan TSS yang tinggi terukur pada pantai-pantai yang relatif lebih padat pengunjungnya seperti pantai Glagah, Depok, Samas, Parangtritis dan Baron.

b. Parameter Kimia

Pengukuran parameter kimia pada air laut yang diperuntukkan wisata bahari terdiri dari pH, salinitas, Minyak dan Lemak, Nitrat (NO₃), Fosfat (PO₄), BOD, DO, Fenol, Detergen, dan Amoniak. Uraian hasil pengukuran dan analisis parameter kimia sebagai berikut:

1) Derajat Keasaman (pH)

Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion *hydrogen* dalam air. Baku Mutu pH air laut berkisar antara 7 – 8,5, di luar nilai itu berarti air laut mengalami pencemaran. Hasil pemantauan nilai pH di Pantai Baron, Depok dan Glagah berada dalam kisaran baku mutu normal.

2) Salinitas

Berdasarkan pemantauan, kadar salinitas air laut berkisar antara 27,5-46 ppm. Tidak ada batas maksimal salinitas yang ditentukan, sehingga semua masih dalam batas alami perairan. Musim penghujan dan kemarau pada tahun 2015 tidak menyebabkan perbedaan salinitas. Kadar salinitas paling tinggi ditemukan di Pantai Sundak sebesar 46 ppm sedangkan paling rendah di Pantai Baron sebesar 27,5 ppm.

3) Nitrat (NO₃)

Hasil pengukuran kadar Nitrat air laut menunjukkan bahwa kadar Nitrat di 11 Pantai di DIY telah melampaui baku mutu

(0,008 mg/L), yaitu sebesar $\leq 0,066$ mg/L. Tingginya kadar nitrat kemungkinan berasal dari kegiatan restoran yang banyak terdapat di tepian pantai yang mengalirkan limbahnya ke laut, atau berasal dari kegiatan pertanian sayuran dan buah di daerah pantai yang menggunakan pupuk dan pestisida yang intensif sehingga menyumbang nitrat yang tinggi.

4) BOD

Nilai BOD penting untuk menentukan tingkat pencemaran dari tingkat hulu sampai muara. Konsentrasi BOD air laut di DIY berkisar antara 0,01 – 2,62 mg/L, yang menunjukkan bahwa BOD air laut masih berada di bawah ambang batas (10 mg/L). Rendahnya kadar BOD menunjukkan bahwa bahan pencemar organik yang mudah membusuk yang terkandung dalam air laut masih dapat ditoleransi, sehingga tidak menimbulkan pencemaran.

5) DO (*Dissolved Oxygen*)

Dissolved Oxygen adalah kadar oksigen yang terlarut dalam air. Hasil pemantauan di 11 titik pantai di DIY menunjukkan kisaran kadar DO antara 5,01 – 9,76 mg/L dengan baku mutu minimal 5 mg/L. Hal ini menunjukkan bahwa kadar oksigen terlarut masih memenuhi ambang baku mutu.

6) Fosfat (PO₄)

Fosfat merupakan bahan pengisi detergen, karena fosfat mempunyai sifat yang menguntungkan karena aman digunakan dan tidak beracun bagi hewan air, tidak korosif, tidak mudah terbakar sehingga aman digunakan dalam mesin cuci, aman dalam berbagai pewarna dan kain. Adanya fosfat di air laut dan pesisir berasal dari sungai. Kadar fosfat air laut selama dua periode pemantauan berkisar $\leq 0,02 - 0,236$ mg/L. Kadar tersebut telah melampaui baku mutu yang diperkenankan, (0,015 mg/L).

7) Fenol

Senyawa ini sering ditemukan di perairan laut yang merupakan polutan dari tumpahan minyak mentah, tumpahan bahan bakar kapal, dan pembuangan limbah industri minyak bumi. Fenol menimbulkan bau tidak sedap, bersifat racun dan iritasi kulit. Disamping itu fenol menyebabkan gangguan pada manusia dan

kematian organisme yang terdapat pada air dengan nilai konsentrasi tertentu. Senyawa Fenol tidak diperbolehkan dalam perairan wisata laut bahari atau ambang batas 0 mg/L. Terdapat empat lokasi yang kadar fenolnya melebihi baku mutu yaitu Pantai Glagah, Pantai Pandansimo, Pantai Depok dan Pantai Baron.

8) Minyak dan Lemak

Merupakan padatan yang mengapung di atas permukaan air. Minyak dilaut berasal dari pembersihan dan pencucian kapal motor, pengeboran minyak di dekat laut, buangan pabrik, biasanya terbawa gelombang atau pembuangan limbah yang mengandung minyak di daerah pantai atau di daratan yang dialirkan ke pantai. Minyak dan lemak air laut di 12 pantai di DIY berkisar antara 0 – 57 mg/L, dengan ambang baku mutu sebesar 1 mg/L. Kadar tertinggi di pantai Drini pada periode pemantauan bulan Maret sebesar 57 mg/L. Kadar minyak pada bulan Agustus tidak terdeteksi di seluruh lokasi (nihil), sedangkan pada bulan Maret tidak terdeteksi (nihil) di 6 lokasi yaitu Pantai Glagah, Baru, Pandansimo, Samas, Ngrenahan dan Indrayanti.

9) Hidrogen Sulfida (H₂S)

Hidrogen sulfida atau disebut sulfida adalah gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk. Gas ini timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan anaerob. Gas ini juga muncul pada aktivitas gunung merapi yang sedang aktif dan gas alam. Di dalam samudra, sulfida berasal dari aktifitas bakteri dalam pembusukan tanaman di dasar lautan yang terbawa arus laut yang kuat ke permukaan. Bakteri mengeluarkan sulfida sebagai hasil samping metabolismenya. Selain dari aktivitas bakteri di dasar laut, sulfida berasal dari dekomposisi protein limbah industri metalurgi atau kimia, pabrik bubur kertas, dan penyamakan. Sifat senyawa sulfida sangat berbahaya karena akan menyebabkan kematian ikan pada konsentrasi 0,4 mg/L terhadap ikan salmon, dan 4 mg/L terhadap jenis ikan lainnya. Toksisitas sulfida dapat mengalami penurunan jika pH air laut meningkat dan suhu rendah, demikian pula sebaliknya, jika pH turun dan suhu meningkat maka toksisitas sulfida akan bertambah.

Konsentrasi sulfida air laut di DIY yang dipantau dalam dua periode berkisar antara <0,001 – 0,025 mg/L, dimana ambang

batas yang diperkenankan di dalam air laut ini adalah 0 mg/l. Konsentrasi sulfida di perairan melebihi ambang batas terdeteksi di 9 pantai. Hanya dua pantai saja yang konsentrasinya sangat kecil yaitu di pantai Sundak dan Drini. Aktivitas ikan tangkap, budidaya ikan di sekitar pantai serta restoran kemungkinan menjadi penyebab adanya sulfida yang berasal dari pembusukan organik limbah. Di samping itu, juga dapat berasal dari daratan yang dibawa aliran sungai.

10) Detergen

Pemakaian detergen ditengarai meningkat setiap tahunnya karena mempunyai efektifitas pembersihan yang lebih baik daripada sabun. Detergen digolongkan sebagai bahan pencemar karena limbah buangnya bersifat stabil, tidak berubah dalam berbagai media dan tidak mudah terurai dan meracuni ikan. Selain itu detergen juga menyebabkan terjadinya eutrofikasi karena kandungan fosfatnya, sehingga merangsang tumbuhnya biota perairan yang tidak diinginkan. Data pengukuran detergen air laut di DIY pada 11 pantai berkisar antara $\leq 0,1373 - 0,3160$ mg/L, sebagian besar melampaui baku mutu (0,001 mg/L). Lokasi pantai yang melebihi baku mutu mempunyai aktivitas restoran dan MCK yang tinggi sehingga limbah domestiknya juga cukup tinggi.

11) Amoniak (NH₃-N)

Amoniak (NH₃-N), merupakan senyawa nitrogen yang menjadi NH₄ pada pH rendah dan disebut ammonium. Amoniak berasal dari air seni dan tinja, dari oksidasi zat organis secara mikrobiologi yang berasal dari air alam atau air limbah industri dan penduduk. Kadar amoniak yang tinggi dalam perairan mengindikasikan adanya pencemaran, selain menimbulkan rasa tidak enak juga bau yang tidak sedap, amoniak tinggi akan menyebabkan kematian ikan. Sifat toksik dari Amoniak ini juga bergantung dengan pH air laut. Apabila pH rendah dan kadar Amoniak cukup tinggi maka akan menyebabkan racun, tetapi jika pH tinggi, hanya dengan kadar amoniak yang rendahpun sudah bersifat racun.

Hasil analisis laboratorium menunjukkan kadar amoniak air laut di DIY sebesar $\leq 0,0094$ mg/L, dimana baku mutu untuk laut wisata bahari tidak diperkenankan mengandung amoniak. Kemungkinan amoniak berasal limbah domestik di sekitar pantai, yaitu restoran dan kamar mandi/WC atau kegiatan pertanian di

daerah pesisir. Saat ini lahan pantai banyak yang digunakan untuk pertanian lahan pantai yang membutuhkan banyak pupuk karena unsur hara di daerah pasir pantai sangat minim. Akibat pemupukan yang intensif dan cukup banyak tersebut menyebabkan tingginya amoniak yang meresap ke dalam tanah.

B. Kondisi Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara ambien menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dilaksanakan di 25 lokasi yang tersebar di wilayah DIY pada tahun 2015, khususnya di tempat-tempat yang padat lalu lintas dan juga di wilayah permukiman serta wilayah sekitar industri. Pemantauan kualitas udara dilaksanakan 2 periode di tiap-tiap lokasi, dengan parameter-parameter yang dipantau adalah parameter kimia berupa CO, O₃, PM.10, SO₂ dan NO₂. Hasil pemantauan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.68 Hasil Perhitungan Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (SPU) Gabungan Parameter DIY, Tahun 2015

No	Lokasi	NILAI ISPU Parameter (µg/m ³)			
		CO	O ₃	PM.10	SO ₂
1	Depan Kantor Kec. Jetis, Jl. P. Diponegoro Yk	7	8	39	43
2	Depan Ruko Janti, Jl. Laksda Adisutjipto Yk.	11	7	53	41
3	Jl. Magelang KM 4,6, TVRI, Sinduadi, Mlati, Sleman.	8	8	48	43
4	Depan Pizza Hut, Jl. Jend. Sudirman Yk.	7	6	46	46
5	Depan Mirota, Jl. Godean Yk.	8	5	45	44
6	Depan Hotel Shapir, Jl. Solo Yk.	11	8	156	42
7	Depan Kampus STTL, Jl. Gedongkuning Yk.	9	6	63	42
8	Depan Mirota Kampus, Jl. C Simanjuntrak Yk.	7	8	48	44
9	Depan Pasar Sepeda, Jl. Menteri Supeno Yk.	13	6	49	43
10	Depan Kantor Merapi Golf, Jl. Kaliurang Km 6,4 Yk.	7	6	46	41
11	Depan GKBI Medari, Jl. Magelang Yk	9	8	44	42
12	Simpang empat Deggung, Beran, Jl. Magelang	12	7	50	42
13	Simpang empat Ngeplang, Sentolo, Kulon Progo	9	6	48	43
14	Simpang tiga Toyan Wates, kulon Progo	8	8	44	41
15	Simpang Tiga Teteg KA, Kulonprogo	9	5	43	42
16	Simpang tiga Terminal Wates, Kulon Progo	13	10	61	42
17	Simpang empat Wojo, Jl. Imogiri Barat, Bantul	19	7	61	43
18	Simpang empat Druwo, Jl. Parangtritis, Yk	15	7	48	44
19	Perempatan Gose, Jl. Bantul, Yogyakarta.	14	7	44	43
20	Depan Kampus UPN Veteran Ring Road Utara	10	8	54	41
21	Depan Kecamatan Pathuk, Wonosari, GK	12	5	52	44
22	Perempatan Gading, Wonosari, Gunungkidul	5	243	30	42

No	Lokasi	NILAI ISPU Parameter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
		CO	O ₃	PM.10	SO ₂
23	Simpang Empat, Siyono, Wonosari, GK	11	5	48	42
24	Terminal Wonosari, Gunungkidul	10	5	55	42
25	Perempatan RSUD Wonosari, Gunungkidul	12	4	43	45
	Jumlah ISPU	258	402	1319	1069
	Hasil Akhir ISPU	10	16	53	43
	Total Akhir ISPU	122			
	Kualitas udara	30.5 = BAIK			
	Parameter dominan	PM.10			

Berdasarkan tabel tersebut ISPU di atas, maka dapat disimpulkan informasi bahwa pada 25 lokasi pemantauan, nilai ISPU DIY sebesar 30.5 (Sehat/Baik) dengan Parameter Dominan PM₁₀. Dominasi parameter PM₁₀ ini kemungkinan besar disebabkan karena efek dari sisa-sisa debu material vulkanik, kemacetan lalu lintas dan pembangunan hotel-hotel di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

1. PM.10

Nilai ISPU Parameter Partikulat (PM10) di Tahun 2015 masuk dalam kategori ISPU sedang (53). Dari 25 titik pemantauan terdapat 6 lokasi yang ISPU-nya sedang dan 1 lokasi yang ISPU-nya Tidak Sehat. Lokasi yang ISPU-nya masuk kategori sedang berada di Titik C. Depan Ruko Janti, Jl. Laksda Adisutjipto Yogya, Titik U. Simpang tiga Terminal Wates, Kulon Progo, Titik V. Simpang empat Wojo, Jl.Imogiri Barat, Bantul, Titik Y. Depan Kampus UPN Veteran Ring Road Utara Yogya, Titik Z. Depan Kecamatan Pathuk, Wonosari, Gunung kidul dan Titik AC. Terminal Wonosari, Gunung kidul, sedangkan kondisi ISPU tidak sehat berada di lokasi Titik H. Depan Hotel Shapir, Jl. Solo Yogya.

Untuk Kawasan yang masuk Perkotaan Yogyakarta, debu atau partikel PM 10 banyak disumbang dari kendaraan bermotor maupun banyaknya kegiatan pembangunan hotel di kawasan ini yang dalam aktivitas pembangunannya mengeluarkan debu dan diterbangkan angin ke arah jalan raya. Sedangkan untuk kawasan di Gunung kidul, partikel PM10 juga disumbang oleh aktivitas tambang gamping di sekitar lokasi dan terbawa angin ke jalan raya. Khusus untuk lokasi Depan Hotel Shapir, Jl. Solo Yogyakarta, sumbangan PM10 didapatkan dari lalu lintas. Karena sejak dibukanya kembali Lippo Mall di dekat kawasan ini maka kemacetan lalu lintas selalu terjadi pada siang hari. Selain itu juga karena di dekat kawasan ini sedang ada proyek pembangunan hotel yang dalam aktivitasnya juga ikut menyumbang partikel debu sehingga memperbesar konsentrasi PM10 di kawasan ini.

2. Karbon Monoksida (CO)

Berdasarkan perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), maka untuk parameter Karbon Monoksida Tahun 2015 menunjukkan bahwa semua lokasi yang diambil sampel memiliki kualitas udara C yang baik. Rata-rata ISPU dalam parameter CO Tahun 2015 sebesar 10, sehingga dapat dikategorikan Baik.

3. Ozon (O3)

Berdasarkan perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), maka untuk parameter Ozon Tahun 2015 menunjukkan bahwa di seluruh 25 lokasi pemantauan tergolong baik. Namun ada 1 lokasi yaitu di AA Perempatan Gading, Wonosari, Gunungkidul kondisi ISPU-nya sedang (243). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsentrasi Ozon di DIY masih berada dalam kondisi baik karena ISPU total sebesar 16.

4. Sulfur Dioksida (SO2)

Berdasarkan perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) maka untuk parameter Sulfur Dioksida Tahun 2015 menunjukkan bahwa di seluruh 25 lokasi pemantauan sebagian besar tergolong baik. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa konsentrasi SO₂ di DIY masih berada dalam kondisi baik dengan nilai rata-rata 43

C. Kondisi Hutan dan Lahan

Berdasarkan data dari Dishutbun DIY, luas hutan di DIY pada tahun 2015 mencapai 95.397,31 hektar atau sekitar 29.94 persen dari luas wilayah DIY. Sebagian besar kawasan hutan di DIY merupakan hutan rakyat yaitu seluas 76.680,48 hektar atau mencakup sekitar 80 persen dari total kawasan hutan di DIY, dan sisanya 18.715,06 hektar (20 persen) merupakan hutan negara. Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat. Hutan rakyat ditanami dengan berbagai jenis tanaman hutan, ada yang dikombinasikan dengan tanaman semusim. Sedangkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004). Oleh karena ditetapkan dengan PP maka luas hutan negara tidak berubah.

Luas hutan rakyat selama periode 2013-2015 cenderung mengalami kenaikan dari 75.120,3 hektar (2013) menjadi 76.012 hektar (2014) dan 76.680,48 hektar (2015). Kenaikan ini terjadi di semua kabupaten dan yang paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul yaitu seluas 616,03 hektar. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo dan Sleman

masing-masing seluas 581,72 hektar dan 337,42 hektar. Sementara di Kabupaten Bantul hanya bertambah 25 hektar.

Apabila dilihat berdasarkan wilayah, sebagian besar kawasan hutan rakyat pada tahun 2015 berada di Kabupaten Gunungkidul. Sekitar 56 persen dari total luas hutan rakyat di DIY berada di wilayah ini atau seluas 42.570 hektar. Gunungkidul dikenal sebagai wilayah berbasis hutan, baik hutan rakyat maupun hutan negara. Sementara kawasan hutan rakyat di Kulonprogo mencapai 20.759,4 hektar (27 persen). Dengan topografi yang berbukit, keberadaan hutan di kedua wilayah tersebut akan membantu menjaga ekosistem dan kelestarian

Hutan tersebut tersebar di 4 (empat) wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung kidul, Sleman, Bantul dan Kulon progo. Pengelolaan hutan di DIY dibagi menjadi 5 (lima) Bagian Daerah Hutan (BDH) untuk mempermudah pengelolannya, yaitu: BDH Karangmojo, BDH Playen, BDH Panggang, BDH Paliyan, dan BDH Kulonprogo-Bantul.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY (2015), luas lahan kritis DIY pada tahun 2015 sebesar 16.975,33 Ha atau turun sebesar 8.814,42 Ha dari angka tahun 2014 sebesar 25.789,75 ha (mencapai 8,56% dari luas DIY). Penurunan lahan kritis di tahun 2015 ini mengalami peningkatan dibandingkan penurunan lahan kritis tahun 2014 yang turun sebesar 1.502,06 Ha dari angka tahun 2013 sebesar 27.291,81 Ha (yang mengalami penurunan sebesar 5,50%). Penurunan luas lahan kritis merupakan implikasi dari bertambahnya luas hutan di DIY terutama bertambahnya luas hutan rakyat. Dengan demikian upaya-upaya rehabilitasi lahan mampu memberikan hasil positif dalam menurunkan luasan lahan kritis di DIY. Rehabilitasi lahan kritis tidak serta merta dapat dilihat hasilnya pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya, namun baru dapat dilihat hasilnya setelah tahun ke 2 (n+2) dari pelaksanaan penanaman karena keberhasilan tumbuh tanaman yang ditanam diperoleh setelah dilakukan pemeliharaan sampai dengan tahun ke dua.

Upaya yang dilakukan di dalam kawasan hutan adalah dengan penanaman pada kawasan hutan yang bertumbuhan kurang, kawasan hutan dengan kriteria kritis dan pada tanah kosong atau kawasan hutan yang tidak terdapat tanaman. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan adalah meningkatkan usaha penanaman hutan rakyat serta peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui sosialisasi, gerakan tanam dan pembinaan petani sekitar hutan. Terjadinya kemarau basah merupakan sebuah keuntungan dalam upaya rehabilitasi lahan, dimana keberhasilan tumbuh tanaman terbantu dengan tingginya intensitas hujan pada tahun 2015.

Tantangan terbesar dalam upaya rehabilitasi lahan kritis di DIY adalah kondisi banyaknya lahan marginal atau lahan dengan tingkat kesuburan yang rendah berupa *karst* dengan lapisan tanah (*solum*) yang

dangkal. Kondisi tersebut menjadikan lahan sulit ditanami dengan tanaman rehabilitasi lahan karena terbatasnya jenis tanaman yang mampu bertahan dengan kondisi tersebut. Selain itu kondisi lapisan tanah yang dangkal dan berada pada kelerengan rawan terhadap kerusakan berupa longsor lahan dan tergerus erosi. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu diusahakan penggunaan tanaman pilihan yang cocok dengan kondisi lahan marginal, atau dengan menggunakan introduksi tanaman pioner untuk membantu pembentukan tanah baru kemudian ditanam tanaman rehabilitasi lahan yang sesuai. Sedangkan untuk mencegah kerusakan lahan akibat bencana atau erosi dapat diupayakan tindakan teknis pengelolaan lahan berupa pembuatan teras atau penanaman sejajar kontur untuk menghindari hilangnya tanah karena aliran air terutama air hujan.

Tolok ukur pencapaian sasaran Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terjaga adalah Persentase Kerusakan Hutan yang memberikan indikasi utuhnya kawasan hutan termasuk kelestarian sumberdaya di dalamnya Persentase kerusakan hutan pada tahun 2015 tercatat sebesar 0,10% (70,46 Ha) dari total luas kawasan hutan. Pada tahun 2014 kerusakan hutan sebesar 0,08 % (84,86 Ha). Kerusakan hutan ini disebabkan karena kebakaran hutan dan pembalakan liar. Upaya perlindungan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi hutan baik dari sisi ekonomi, ekologi maupun sosial. Upaya yang dilaksanakan meliputi kegiatan perlindungan hutan dari gangguan kemanan hutan maupun upaya minimalisasi kerusakan hutan dari bencana terutama kebakaran, kegiatan rehabilitasi dan peningkatan peran masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya melalui penyuluhan dan kampanye konservasi melalui lomba konservasi alam wana lestari.

Besarnya kerusakan hutan yang diakibatkan karena adanya lahan kritis mengharuskan adanya tindakan rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan yang dapat dilakukan dengan pengkayaan tanaman pada daerah hutan bertumbuhan kurang, penanaman tanaman pada tanah kosong. Tanah kosong merupakan hal harus yang harus diperhatikan karena adanya kawasan hutan tanpa tanaman dapat memicu penyerobotan lahan atau penggunaan lahan oleh masyarakat terutama masyarakat sekitar kawasan hutan.

Tantangan utama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati terutama sumberdaya hutan adalah tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat sekitar hutan yang memunculkan penyerobotan lahan hutan atau penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang relatif rendah sehingga memunculkan gangguan hutan terutama pencurian kayu. Tindakan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan arti penting kelestarian hutan berkaitan dengan kelestarian

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta meningkatkan upaya perlindungan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. (Sumber: *Dishutbun DIY, 2015 dan SLHD DIY 2015*).

D. Kondisi Penaatan / Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan meningkat frekuensinya seiring dengan semakin beragamnya aktivitas masyarakat termasuk di dalamnya kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal, karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Di sisi lain masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan berkecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengerahkan masa mendatangi kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Pemerintah mempunyai peranan penting sebagai fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan LH. Untuk itu Pemerintah DIY dalam hal ini Gubernur DIY bersama Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan Kepolisian Daerah Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY melakukan koordinasi penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui suatu wadah yaitu Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

Pada tahun 2015, masalah yang diadukan oleh masyarakat ada 4 aduan, dan kesemuanya telah ditindaklanjuti oleh BLH DIY. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Dugaan pencemaran akibat peternakan ayam di desa Cepor, Berbah, Sleman dan Desa Madugondo, Piyungan.
2. Pencemaran Udara /gas dari Pernis dalam proses produksi PT. KOOC Kreasi, Bantul.
3. Penambangan Pasir Di Dusun Pulo, Brosot, Kulon Progo.
4. Penambangan Pasir/galian C desa Klangkap, Margoluwih, Seyegan, Sleman.

E. Kondisi Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan di DIY, pada tahun 2015 masyarakat telah menunjukkan peran sertanya dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) dan Lubang Resapan Biopori Sumur peresapan air hujan merupakan sarana untuk

menampung dan meresapkan air hujan kembali ke tanah. Sesuai dengan fungsinya untuk memperluas ruang peresapan air, maka pembangunan SPAH ini diarahkan pada lahan-lahan sempit di perkotaan. Untuk pembangunan SPAH ini dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat, karena dalam pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan gotong-royong warga. Di samping itu, masyarakat dapat memperbanyak sendiri bangunan SPAHnya, karena bantuan dari Pemerintah hanya bersifat stimulan saja. Selain SPAH, ada pembuatan lubang resapan biopori yang lebih sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak dan ibu-ibu dengan menggunakan alat serupa bor biopori. Teknologi sederhana ini mudah diterapkan, namun manfaatnya sangat besar dalam upaya pelestarian sumberdaya air. Selama ini BLH DIY telah menyalurkan banyak sekali alat pembuat lubang biopori kepada masyarakat.

2. Penghijauan Sasaran penghijauan ini adalah untuk menambah ruang terbuka hijau. Penanaman dilakukan oleh kelompok masyarakat berupa tanaman perindang ataupun tanaman yang berkarakter Yogyakarta untuk mendukung program Keistimewaan Yogyakarta yang nantinya pemeliharaan dan pengelolaan tanaman ini nantinya akan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.

2.3.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 berimplikasi pada kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama dalam hal pendanaan. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang yang baru tersebut, pendanaan untuk administrasi kependudukan baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBN dimulai dari APBN-P 2014. Namun demikian sebelum APBN-P tersedia, pendanaannya tetap menggunakan APBD.

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut dalam proses selanjutnya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan yang dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Di tahun 2016, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.717.385 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.587.758 orang. Sementara itu jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.640.612 orang atau dengan kata lain prosentase angka perekaman KTP el- sebesar 97,17 %.

Tabel 2.69 Angka Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH WAJIB KTP TELAH PEREKAMAN	ANGKA PEREKAMAN
2013	3.561.448	2.543.894	2.426.195	95,37%
2014	3.551.679	2.598.163	2.464.342	94,85%
2015	3.595.256	2.785.718	2.569.245	92,23 %
2016	3.587.758	2.717.385	2.640.612	97,17 %

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY

Sementara itu untuk dokumen administrasi kependudukan yang lain, kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah. Berdasarkan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) tahun 2016, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di DIY sebesar 80,97%. Bisa juga diartikan bahwa dari jumlah anak total di DIY (penduduk berusia di bawah 18 tahun) sebesar 929.150 orang, ada sekitar 752.356 anak yang sudah memiliki akta kelahiran. Penyebab dari masalah ini antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

Tabel 2.70 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY

TAHUN	JUMLAH ANAK	JUMLAH ANAK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK
2013	n/a	n/a	n/a
2014	882512	373828	42,36 %
2015	915948	634769	69,30 %
2016	929150	752356	80,97 %

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY

Pasal 7 C Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak-Hak Anak secara spesifik mengatur bahwa seluruh anak didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan. Konvensi ini secara keseluruhan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Khusus mengenai pemenuhan hak anak atas akta kelahiran, pada tahun 2010 Kemendagri, Kemenlu, Kemenhukham, Kemenkes, Kemendikdas, Kemensos, Kemenag, dan KPP&PA menandatangani nota kesepahaman tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak. Meskipun UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melalui sistem stelsel aktif, persoalan dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan akta kelahiran dipandang penting untuk segera ditangani mengingat ketiadaan kepemilikan akta kelahiran menyebabkan ketidakjelasan identitas anak yang pada gilirannya akan membawa sejumlah implikasi negatif terhadap pemenuhan hak anak, seperti kesulitan akses anak terhadap pelayanan dasar.

Pemerintah Daerah DIY hingga kini memegang teguh komitmen untuk memenuhi hak sipil anak melalui pemberian akta kelahiran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong Kabupaten/Kota di DIY untuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak yang salah satu indikatornya adalah bahwa 100% anak telah memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, 95,98% anak di DIY telah memiliki akta kelahiran. Meskipun angka ini cukup tinggi dan jauh di atas rata-rata nasional, upaya penegakan hak identitas anak melalui pemberian akta kelahiran di DIY perlu ditingkatkan mengingat bahwa jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan pencapaian pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa 97,06% anak di DIY memiliki akta kelahiran.

Tabel 2.71 Presentase Penduduk Umur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten Kota dan Kepemilikan Akta Kelahiran di DIY, Tahun 2014-2015

No	Kab/Kota	Tahun	Kepemilikan Akta		
			Mempunyai Akta	Tidak Mempunyai Akta	Tidak Tahu
1	Kulonprogo	2014	97,34	2,66	0
		2015	99,06	0,94	0
2	Bantul	2014	98,05	1,95	0
		2015	97,73	2,10	0,16
3	Gunung Kidul	2014	94,45	5,55	0
		2015	95,84	4,16	0
4	Sleman	2014	98,18	1,82	0
		2015	93,26	6,28	0,46
5	Yogyakarta	2014	95,56	4,44	0
		2015	96,59	3,41	0
	Jumlah	2014	97,06	2,94	0
		2015	95,98	3,82	0,19

2.3.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini dipandang strategis untuk mendukung pembangunan karena karakteristiknya yang demokratis, dimana pembangunan berlangsung dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kewajiban pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilakukan oleh semua Pemerintah Daerah di Indonesia. Bahkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamatkan bahwa pemberdayaan masyarakat juga menjadi kewajiban pemerintah desa.

Masalah yang harus dihadapi adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat. Padahal, pemberdayaan masyarakat bergerak dengan prinsip demokrasi. Konsep pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program karena pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan pemberdayaan lebih berfokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa.

Perubahan nama dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terjadi pada tahun 2001. Pembentukan anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih langsung oleh masyarakat desa dalam musyawarah desa yang dilakukan pada periode tertentu. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berjalan cukup baik dibantu dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa berasal dari dana desa dan dana sukarela dari masyarakat Desa. Selain bergerak dalam kegiatan pembangunan desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa juga menjalankan beberapa kegiatan di bidang seni dan budaya, keagamaan dan keamanan desa.

Tujuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (2) Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan. (3) Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata. (4) Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan

Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan baik fisik material maupun mental spiritual. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan.

Permasalahan mengenai bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu lembaga sosial yang terdapat di Desa dalam proses pembangunan desa.

Seluruh desa/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK. Tabel berikut menunjukkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah DIY menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2015

Tabel 2.72 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan LPMD/LPMK di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2015

No.	Kab/Kota	Jumlah LPMD/LPMK		Asosiasi LPMD/LPMK	Jumlah
		LPMD	LPMK		
1	Kota Yogyakarta	-	45	1	46
2	Kab. Bantul	75	-	1	76
3	Kab. Kulon Progo	88	-	1	89
4	Kab. Gunungkidul	144	-	1	145
5	Kab. Sleman	86	-	1	87
6	DIY	-	-	1	1
7	Total	393	45	6	444

Sumber: BPPM DIY, 2015.

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 bahwa di ayat- ayat dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Ayat (1) Lembaga Kemasyarakatan atau yang

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Ayat (11) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. Ayat (12) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga. BAB I Pasal 1 ayat 5 bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya diri, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hokum dan lingkungan.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK yaitu : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga, pendidikan dan ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Gubernur mempunyai kewenangan melalui SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provindi dan Kabupaten/Kota diwilayahnya.

Permasalahan yang muncul adalah mengenai bagaimana peran Tim Penggerak PKK sebagai salah satu lembaga sosial dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di proses pembangunan.

Tabel 2.73 Tim Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (TP PKK) DIY Tahun 2014-2016

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Yogyakarta	101	101	101
2	Bantul	93	93	93
3	Kulonprogo	163	163	163
4	Gunung Kidul	104	104	104
5	Sleman	60	60	60
6	DIY	1	1	1
	Jumlah	522	522	522

Sumber : BPPM DIY, 2016

3. Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan persentase posyandu aktif di DIY.

Tabel 2.74 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2014-2016

Kab/Kota	2014			2015			2016		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kota Yogyakarta	625	450	72,00	625	450	72,00	625	615	98,4
Bantul	1132	747	65,99	1132	747	65,99	1137	747	65,70
Kulon Progo	961	866	90,11	960	863	89,90	960	830	86,46
Gunungkidul	1465	1306	89,15	1465	1261	86,08	1467	1258	85,75
Sleman	1519	1284	84,53	1520	1293	85,07	1528	1292	84,55
DIY	5702	4653	81,60	5702	4614	80,92	5717	4742	82,94

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Posyandu yang aktif semakin meningkat dari 4.593 Posyandu pada tahun 2013, menjadi 4.653 Posyandu pada tahun 2014, selanjutnya menjadi 4.614 Posyandu pada tahun 2015, terakhir menjadi 4.742 Posyandu pada tahun 2016. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa secara keseluruhan per 2016, 82,94% Posyandu di DIY telah berfungsi secara aktif. Dari 5 kabupaten dan 1 kota yang ada di DIY, Kota Yogyakarta adalah wilayah yang paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa 98,4% Posyandu di wilayah Kota Yogyakarta secara aktif memberikan pelayanan kesehatan. Sementara, Kabupaten Bantul dinilai perlu lebih meningkatkan komitmennya dalam mendorong peran aktif Posyandu, karena sejak tahun 2013 kabupaten ini adalah yang paling rendah presentase Posyandu aktifnya dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2016.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa. BUMDesa dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUM Desa, maka konsidi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pengembangan Bum Desa.

Lembaga perekonomian desa seperti UED-SP, Pasar Desa, Badan Kredit Desa yang sudah terbentuk didorong untuk menjadi unit usaha dari BUMDesa. Bum Desa pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi.

Pada Tahun 2016, BPPM DIY menargetkan 38,26 % desa di DIY telah membentuk BUM Desa. Pada akhirnya, target ini berhasil dilampaui. Pada Tahun 2016 telah dibentuk 152 BUM Desa di seluruh DIY atau dengan kata lain 38,78 % dari jumlah total desa di DIY telah memiliki BUM Desa.

Agenda pengembangan BUM Desa tidak berhenti pada pembentukan tetapi juga peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa agar benar-benar bisa berfungsi optimal melalui pembinaan SDM pengelola dan penataan kelembagaan.

Tabel 2.75 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2014-2016

NO	Kabupaten	Jumlah Desa	Tahun		
			2014	2015	2016
1	Bantul	75	13	17	20
2	Kulonprogo	87	87	87	87
3	Gunung Kidul	144	28	30	38
4	Sleman	86	2	5	7
	Jumlah	392	130	139	152

Sumber : BPPM DIY, 2016

5. Profil Desa Dan Kelurahan

Profil Desa Dan Kelurahan (Aplikasi Berbasis *Web Online*). Seiring dengan perkembangan jaman yang serba cepat seperti sekarang ini, maka segala informasi maupun laporan data juga harus menyesuaikan dengan era perkembangan ilmu teknologi. Dengan perkembangan tersebut sekarang desa pun dituntut harus menyesuaikan diri dalam menyajikan pelaporan data dengan berbasis *online*. Baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan agar semua desa yang ada di Indonesia diharuskan untuk mengembangkan sistem teknologi komunikasi dan informasi nasional di bidang Profil Desa dan Kelurahan.

Sistem Informasi Profil Desa dan kelurahan (Prodeskel) merupakan sistem informasi (aplikasi) berbasis *Web (Online)* dimana pedoman penyusunan dan pendayagunaan datanya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 (Permendagri 12/2007). Permendagri 12/2007 tersebut merupakan amanat UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan UU 26/2007 tentang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) yang diharuskan untuk mengembangkan sistem teknologi komunikasi dan informasi nasional di bidang Profil Desa dan Kelurahan.

Profil desa dan kelurahan bertujuan untuk menjadi penyelenggara pusat data desa dan kelurahan di seluruh Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengguna Profil desa dan kelurahan yang diregistrasi mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional, sehingga dimasa kini dan yang akan datang sistem ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk menggali data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai desa dan kelurahan.

Pembangunan Desa sangat membutuhkan profil desa atau data desa dan sistem informasi Informasi dalam profil desa dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan desa yang dapat diakses dan dikembangkan secara mandiri oleh desa.

DIY pun berusaha meningkatkan kapasitas desa dengan mendorong setiap desa agar dapat menyusun profil desa yang sesuai standar. Upaya yang dilakukan melalui pelatihan *entry* profil desa, pembentukan Tim Pokja

Profil Desa/ Kelurahan, serta dijadikannya Profil Desa sebagai syarat utama dalam penilaian Lomba Desa sehingga semua desa termotivasi untuk menyusun profil yang memenuhi standar. Dari serangkaian upaya tersebut seluruh desa di DIY telah mempunyai profil desa.

Tabel 2.76 Desa Yang Telah Mempunyai Profil Tahun 2012-2016

No	Kab/Kota	Desa/Kel	Desa Yang Telah Mempunyai Profil Tahun					%
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kabupaten Kulonprogo	88	7	17	41	84	88	100,00
2	Kabupaten Bantul	75	9	61	74	75	75	100,00
3	Kabupaten Gunung Kidul	144	18	49	73	133	144	100,00
4	Kabupaten Sleman	86	35	49	66	86	86	100,00
5	Kota Yogyakarta	45	16	40	45	45	45	100,00
Jumlah		438	85	216	299	423	438	100,00

6. Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan persentase posyandu aktif di DIY.

Tabel 2.77 Jumlah Posyandu Aktif di DIY Tahun 2014-2016

Kab/Kota	2014			2015			2016		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kota Yogyakarta	625	450	72,00	625	450	72,00	625	615	98,4
Bantul	1132	747	65,99	1132	747	65,99	1137	747	65,70
Kulon Progo	961	866	90,11	960	863	89,90	960	830	86,46
Gunungkidul	1465	1306	89,15	1465	1261	86,08	1467	1258	85,75

Kab/Kota	2014			2015			2016		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Sleman	1519	1284	84,53	1520	1293	85,07	1528	1292	84,55
DIY	5702	4653	81,60	5702	4614	80,92	5717	4742	82,94

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Posyandu yang aktif semakin meningkat dari 4.593 Posyandu pada tahun 2013, menjadi 4.653 Posyandu pada tahun 2014, selanjutnya menjadi 4.614 Posyandu pada tahun 2015, terakhir menjadi 4.742 Posyandu pada tahun 2016. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa secara keseluruhan per 2016, 82,94% Posyandu di DIY telah berfungsi secara aktif. Dari 5 kabupaten dan 1 kota yang ada di DIY, Kota Yogyakarta adalah wilayah yang paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa 98,4% Posyandu di wilayah Kota Yogyakarta secara aktif memberikan pelayanan kesehatan. Sementara, Kabupaten Bantul dinilai perlu lebih meningkatkan komitmennya dalam mendorong peran aktif Posyandu, karena sejak tahun 2013 kabupaten ini adalah yang paling rendah presentase Posyandu aktifnya dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2016.

7. Partisipasi Keswadayaan Masyarakat

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Dari data BPPM DIY diperoleh data tentang keswadayaan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.78 Jumlah Partisipasi Keswadayaan Masyarakat Tahun 2016

No	Prov/Kab/Kota	Sumber Dana		
		DIY	Kab/Kota	Swadaya Masyarakat
1	Pemda DIY	875,000,000	-	-
2	Kota Yogyakarta		383,513,950	49,054,185
3	Kab. Bantul		486,975,400	2,480,454,000
4	Kab. Gunung Kidul		295,242,900	32,922,362,166
5	Kab. Kulonprogo		338,625,000	557,830,000
6	Kab. Sleman		366,548,000	68,300,000
	Jumlah	875,000,000	1,870,905,250	36,078,000,351

No	Prov/Kab/Kota	Sumber Dana		
		DIY	Kab/Kota	Swadaya Masyarakat
	Total	2,745,905,250		36,078,000,351
	Total Pem + Masy	38,823,905,601		
	% swadaya masyarakat			92.93

Sumber : BPPM DIY

Dari data tersebut diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa angat tinggi mencapai 92,93%. Perlu untuk melestarikan budaya swadaya masyarakat dengan memupuk kesadaran masyarakat dan kegotongroyongan masyarakat.

2.3.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Salah satu isu kependudukan yang sangat penting adalah isu tentang bonus demografi atau *demographic dividen*. Dalam konteks DIY isu tersebut menjadi sangat strategis mengingat DIY akan segera mengakhiri tahap pertama bonus demografi pada tahun 2018. Bonus demografi atau sering disebut dengan *demographic dividen* adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah yang dihasilkan dari perubahan struktur umur penduduk di negara/wilayah tersebut (John Gates Institute, 2011).

Perubahan struktur umur tersebut terjadi karena penurunan angka fertilitas yang menyebabkan jumlah kelahiran menurun dan menyebabkan angka ketergantungan pada usia anak mengecil. Perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan penurunan jumlah penduduk usia anak-anak (<15 tahun) dan disertai dengan peningkatan penduduk usia kerja (15-64 tahun) akan menciptakan jendela peluang (*windows of opportunity*) bagi pemerintah untuk investasi sumber daya dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi pula. Penjelasan ini membawa implikasi bahwa jendela kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk melakukan investasi modal manusia sekaligus melakukan akselerasi penciptaan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk usia kerja. Namun, jendela kesempatan ini pun dapat membawa DIY pada kondisi *demographic trap* yang akan menghasilkan persoalan serius jika tidak

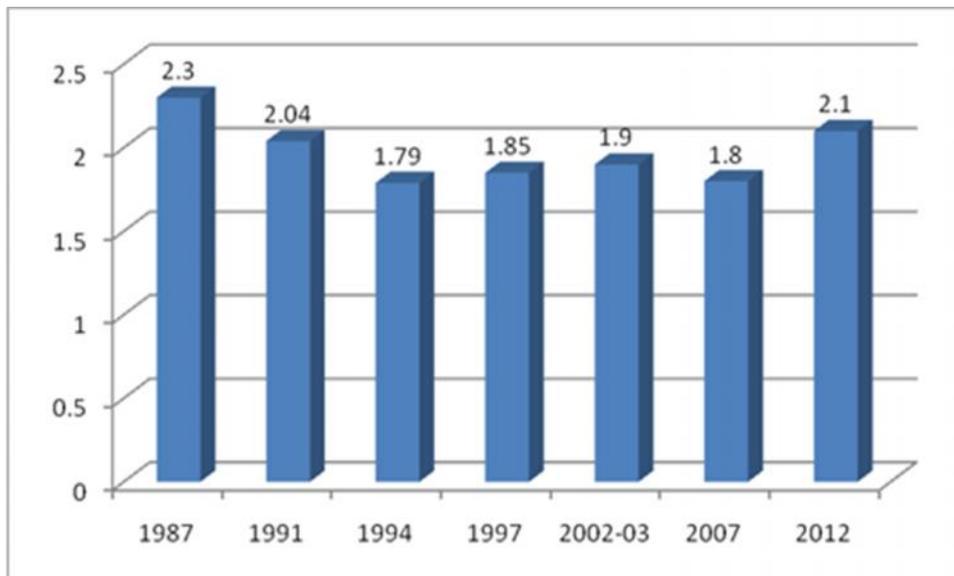
dimanfaatkan, karena tingginya jumlah penduduk produktif yang tidak mempunyai pekerjaan.

Dengan melihat dari sudut pandang tersebut, pengkajian mengenai pengendalian penduduk di DIY perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini terkait bonus demografi, yaitu angka fertilitas dan perubahan komposisi penduduk yang menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB, Pernikahan Dini, Perceraian dan *unmet need*.

1. Angka Fertilitas atau *Total Fertility Rate*

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah dengan pencapaian angka kelahiran yang sangat rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, *Total Fertility Rate* (TFR) DIY kembali mengalami kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2012. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Namun, peningkatan ini masih dalam taraf yang positif. Angka TFR 2,1 sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2012 sesuai dengan misi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 yang ditandai dengan TFR 2,1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 1.

TFR yang ada saat ini perlu dipertahankan, untuk itu berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan pengaturan migrasi penduduk. Sebagaimana kita ketahui Penduduk tumbuh seimbang bila TFR mencapai 2,0.



Sumber : SPI, 1986; SDKI 1991, 1994, 1997, 2002/2003, dan 2012

Gambar 2.68 Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI

2. Perubahan Komposisi Penduduk

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam hal komposisi umur penduduk, penduduk usia muda (<15 tahun) atau penduduk yang belum produktif akan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1 persen dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6 persen pada tahun 2035. Jumlah penduduk muda yang semakin rendah ini merupakan akibat dari angka kelahiran DIY yang relatif rendah. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6 persen akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun 2035 mendatang. Penurunan yang cukup pelan namun pasti pada kelompok umur ini akan memberikan dampak terhadap beban ketergantungan yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Selain masalah tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang juga meningkatkan beban ketergantungan.

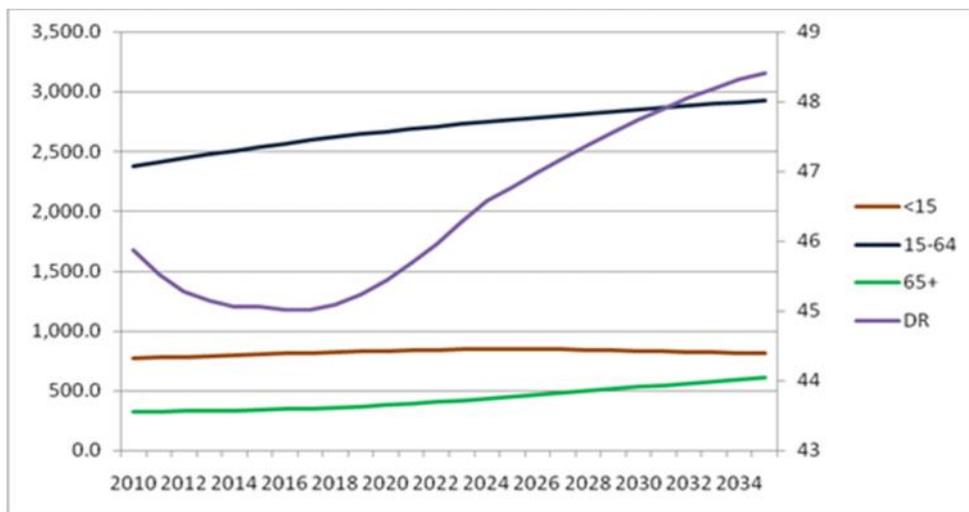
Tabel 2.79 Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2010-2035

Parameter	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Penduduk						
Laki-laki	1710,9	1818,8	1921,6	2013,2	2090,7	2153,8

Parameter	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Perempuan	1756,6	1860,4	1960,7	2051,4	2129,5	2194,7
Total	3467,5	3679,2	3882,3	4064,6	4220,2	4348,5
Komposisi Umur						
0-14	22,1	21,8	21,5	20,9	19,8	18,6
15-64	68,6	69,0	68,7	68,1	67,7	67,4
65+	9,3	9,2	9,8	11,0	12,5	14,0
Dependency Ratio	45,8	44,9	45,6	46,8	47,7	48,4

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035, BPS

Tabel ini juga memperlihatkan bahwa angka ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR) di DIY sudah menurun dan mencapai angka terendah pada tahun 2015. Gambar berikut memperlihatkan bahwa kenaikan angka ketergantungan yang tajam akan terjadi kurang lebih pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2035. Peningkatan angka ketergantungan ini disebabkan karena peningkatan penduduk lanjut usia yang sangat tajam disertai melambatnya peningkatan jumlah penduduk usia produktif.



Gambar 2.69 Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2035

Grafik di atas memperlihatkan dinamika angka ketergantungan DI DIY. Angka ini mengalami penurunan secara konsisten sampai dengan tahun 2017 dan diperkirakan akan mulai meningkat pada tahun 2018

sebagai pertanda bahwa fase pertama bonus demografi telah tercapai. Artinya adalah bahwa DIY akan menghadapi permasalahan yang saling komplementer. Di satu sisi, persoalan yang muncul pada fase pertama berkaitan dengan ketidak seimbangan pasar kerja yang mengakibatkan belum semua usia produktif bekerja secara layak. Di sisi lain, permasalahan pada tahap kedua terkait dengan semakin membesarnya jumlah lansia.

3. Akseptor KB

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,467 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga tahun 2035 diperkirakan jumlah penduduk DIY akan mencapai 4,348 juta jiwa. Jumlah ini cukup besar terlebih dengan mengingat bahwa luas wilayah DIY hanya sekitar 0,16 persen dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 1.365 jiwa per km² atau meningkat 26 persen dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2010. Melihat tingkat kepadatan penduduk tersebut, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DIY menggenarkan berbagai upaya yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satunya adalah dengan melakukan penjarangan akseptor KB.

Dalam Kamus Kependudukan & Keluarga Berencana (BKKBN, 2015), dijelaskan bahwa akseptor merupakan Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Sementara, rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama di suatu wilayah. Besarnya angka rasio akseptor memproyeksikan seberapa besar upaya pengendalian jumlah penduduk di sebuah wilayah. Di DIY, rasio akseptor KB DIY sejak tahun 2010 hingga 2015 tercatat fluktuatif namun tetap berada pada kisaran 78-80.

Tabel 2.80 Rasio Akseptor KB Tahun 2010-2025

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Peserta KB	430.231	432.989	438.788	441.981	441.858	431.418
Jumlah Pasangan Usia Subur	544.057	549.894	552.422	553.395	552.008	543.115
Rasio	79,08	78,74	79,43	79,87	80,05	79,43

Sumber : BKKBN Perwakilan DIY, 2016, diolah

4. Pernikahan Dini

Dalam UU Perkawinan 1974, batas minimal usia nikah bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DPR dan DPD mengusulkan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usulan itu kini sudah masuk Program Legislasi Nasional 2015-2019. Meskipun tak masuk prioritas tahun ini, revisi UU Perkawinan kemungkinan bakal mendapat perhatian banyak pihak, sebagaimana dulu kelahiran UU No. 1 Tahun 1974. Setidaknya terdapat lima hal krusial yaitu : (1) Usia Menikah, (2) Syarat syahnya Perkawinan, (3) Status Anak Luar Nikah, (4) Status Kepala Keluarga, (5) Poligami.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 16 tahun bagi perempuan dan atau 19 Tahun bagi pria. Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi perempuan, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologis, dan mental. Ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, terkadang tidak di sengaja atau yang sudah direncanakan, berikut adalah alasannya : (1) Faktor Ekonomi, faktor ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya pada pria/keluarga yang lebih mapan atau hanya untuk mengurangi biaya hidup sehari hari, (2) Perjudohan, mungkin faktor ini sudah sangat kecil yang menyebabkan pernikahan dini, namun beberapa kasus terutama di desa dan kampung, ini masih terjadi, (3) Cinta Sejati, faktor cinta sejati mungkin menjadi alasan terakhir, dimana pasangan ini memang benar benar mencintai dan ingin segera bersatu, (4) Diawali adanya kehamilan terlebih dahulu.

Tabel 2.81 Pernikahan Dini Tahun 2015-2016

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2015		2016	
		P	L	P	L
1.	Yogyakarta	31	15	17	19
2.	Bantul	8	37	31	81
3.	Kulonprogo	11	23	17	24
4.	Gunung Kidul	51	72	16	56
5.	Sleman	36	83	24	75
	Jumlah	137	230	105	255

Sumber: Kemenag 2016

Pemda DIY berusaha meningkatkan kapasitas bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), melakukan inisiasi dalam

pembentukan PIK R dan melakukan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di 78 kecamatan pada tahun 2017.

5. Perceraian

Berdasarkan struktur penduduk yang ada di Provinsi DIY angka pernikahan yang telah tercatat menunjukkan grafik yang naik turun. Hal ini dapat di lihat dari data pernikahan tahun 2012 : 26.543 pernikahan , Tahun 2013 : 25.920 pernikahan dan tahun 2014 : 24.161 pernikahan.

Namun bila dibandingkan dengan jumlah kasus perceraian yang terjadi menunjukkan kenaikan. Data menunjukkan sebagai berikut :

Tahun 2012 : 5.195 kasus,

Tahun 2013 : 5.342 kasus,

Tahun 2014 : 5.800 kasus

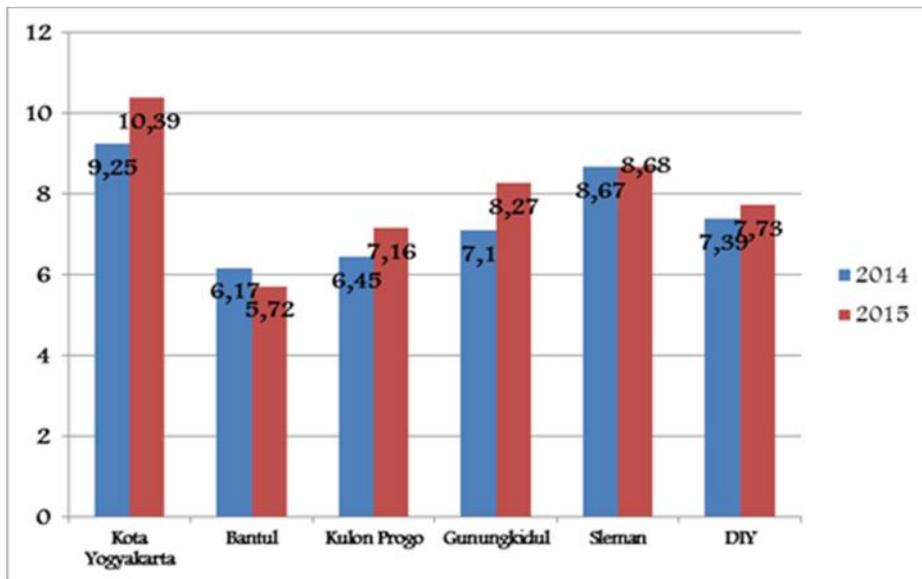
Tahun 2015 : 5.462 kasus

Solusi yang dilaksanakan secara terus menerus adalah dengan menguatkan fungsi keluarga, menyiapkan remaja yang siap menikah, penguatan lembaga konseling keluarga.

6. *Unmet Need*

Unmet need adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan KBnya tidak terpenuhi. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa 11% perempuan berstatus menikah di Indonesia mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Di antara mereka, 4% sesungguhnya ingin menunda kelahiran berikutnya untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih, dan 7% sebenarnya tidak ingin mempunyai anak lagi. Namun, mereka memiliki beberapa alasan yang menyebabkan tidak melakukan KB, yang antara lain meliputi kekhawatiran terhadap kegagalan kontrasepsi dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

Secara keseluruhan, *unmet need* DIY tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2012. Berdasarkan hasil SDKI 2012, DIY memiliki *unmet need* di atas rata-rata nasional yaitu 11,5 persen. Kemudian pada tahun 2015 *unmet need* DIY tercatat 7,73 persen. Capaian *Unmet Need* DIY yang semakin turun menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin mudahnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi. Namun penurunan ini belum mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2015 yang menargetkan capaian *Unmet Need* sebesar 5%. Dengan demikian, masih dibutuhkan upaya ekstra keras untuk mencapainya, terlebih karena *unmet need* ini berkorelasi dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman.



Sumber: BKKBN, 2016

Gambar 2.70 Perkembangan *Unmet Need* KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2014-2015

2.3.1.15 Urusan Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan visi pemerintah DIY sebagai pusat unggulan pendidikan, pariwisata, dan budaya, sektor transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pertumbuhan demand yang semakin meningkat, apabila tidak disertai dengan *suply* yang baik akan menimbulkan akibat berantai yang akan berdampak buruk dalam pengelolaan transportasi di DIY di masa yang akan datang. Layanan Transportasi di DIY meliputi transportasi darat, dan udara.

A. Transportasi Udara

DI. Yogyakarta memiliki 2 bandar udara yaitu Bandar Udara Adi Sucipto dan Bandar Udara Gading. Bandar Udara Adi Sucipto pada saat ini berfungsi sebagai Bandar udara penumpang dan barang sedangkan Bandar Udara Gading yang dimiliki TNI AU sebagai landasan pendukung (*auxilliary field*). Kenaikan jumlah penumpang transportasi udara di Bandar Udara Adi Sucipto yang cukup tinggi dengan jumlah penumpang mencapai 6,2 juta penumpang/tahun pada tahun 2015 telah melebihi kapasitas rencana penumpang sebesar 1,5 juta penumpang per tahun.

Selain itu kapasitas area parkir pesawat, kondisi lalu lintas udara yang berbaur dengan pesawat latih, dan keterbatasan lahan Bandar udara Adisucipto sudah tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal baik penumpang maupun barang, sehingga diarahkan pada pengalihan lokasi ke bandar baru di Kulonprogo.

B. Transportasi Darat

Transportasi Darat di DIY dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu transportasi yang berbasis jalan rel dan jalan bukan rel.

a. Jalan rel

Pada saat ini DI. Yogyakarta memiliki 5 stasiun dan 1 bengkel kereta api yaitu: stasiun tugu dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang, Stasiun Muguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di bandara Adisucipto, Stasiun Sedayu terminal bongkar muat dan pergudangan, Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus Bahan Bakar Minyak, dan Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Jalur eksisting layanan kereta api di DIY meliputi koridor timur-barat sebagai bagian dari jalur perkeretaapian selatan jawa.

Perencanaan dan pembangunan perkeretaapian di DIY meliputi pengembangan di jalur timur- barat dan utara selatan, meliputi penetapan trase, kebutuhan lahan dan penetapan lokasi stasiun dengan pengembangan jaringan kereta api penumpang di DIY pada jalur:

- a. Bandara Kulonprogo – Kedundang – Yogyakarta – Brambanan.
- b. Bandara Kulonprogo – Parangtritis.
- c. Borobudur – Yogyakarta – Palbapang – Samas.

Sedangkan Pengembangan jaringan kereta api barang dimaksudkan untuk menghubungkan jalur kereta api angkutan barang dengan kawasan-kawasan industri strategis di DIY. Pengembangan jaringan kereta api barang digunakan untuk mendukung pergerakan distribusi logistik angkutan barang antar kota besar di Pulau Jawa.

Keterpaduan antara jaringan prasarana kereta api dengan jaringan prasarana moda lain menjadi isu transportasi yang krusial sebagai sebuah pelayanan transportasi multi moda yang pada akhirnya menjadi salah satu pemecahan masalah kemacetan di DIY.

b. Jalan bukan rel (jalan raya)

Prasarana

Transportasi berbasis jalan bukan rel (jalan raya) Jalan raya adalah salah satu sarana transportasi yang paling banyak dipergunakan untuk menunjang perekonomian maupun kegiatan

sehari-hari di DIY. Prasarana untuk mendukung moda transportasi yang menggunakan jalan raya meliputi Terminal, Fasilitas Park and Ride, dan Parkir. Kondisi pada saat ini untuk terminal sebagai simpul transportasi di DIY tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 2.82 Kondisi Terminal di DIY Tahun 2016

No	Kabupaten / Kota	Nama Terminal	Type
1	Yogyakarta	Giwangan	A
2	Bantul	Imogiri	C
		Palbapang	C
3	Gunung Kidul	Wonosari	A
		Gading	C
		Piyungan	C
		Semanu	C
		Semin	C
		Panggung	C
4	Kulonprogo	Wates	A
		Sentolo	C
		Jangkar	C
		Nanggulan	C
5	Sleman	Jombor	B
		Condongcatur	C
		Prambanan	C

Untuk melayani integrasi transportasi multimoda telah dilakukan pembangunan park and ride di wilayah DIY sebagai prasarana perpindahan moda bagi pengguna trans jogja yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan pembangunan *park and ride* di Gamoing, Dongkelan dan Prambanan. Sedangkan untuk kebutuhan lahan parkir khususnya dalam rangka mendukung pariwisata telah dibangun 4 (empat) tempat khusus parkir yaitu:

1. Abu Bakar Ali;
2. Ngabean;
3. Senopati; dan
4. XT Square.

Pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep ATCS (*area traffic control systems*) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan saat ini telah terpasang 60 unit ATCS atau 53 % dari 114 simpang yang direncanakan. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan sinyal bus priority, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung sinyal *bus priority*. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan DIY.

Sarana

Sarana transportasi pada jalan raya di DIY dikelompokkan menjadi Angkutan umum perkotaan, AKDP dan Pedesaan. Angkutan perkotaan terdiri dari angkutan bus dengan sistem *Buy The Service* (Trans Jogja) dan angkutan perkotaan reguler.

Pada tahun 2017 angkutan Umum Perkotaan dengan sistem *Buy The Service* akan melayani 17 jalur dan 128 armada. Penambahan armada terus dilakukan untuk menuju pelayanan ideal 167 armada.

Tabel 2.83 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2008-2016

No.	TAHUN	PENUMPANG TERANGKUT		
		<i>Trans Jogja</i>		<i>Reguler</i>
		penumpang/hari	penumpang/tahun	penumpang/hari
1.	2008	5.172	3.785.964	
2.	2009	7.007	5.114.809	
3.	2010	7.993	5.834.976	
4.	2011	8.239	6.014.334	
5.	2012	8.720	6.382.802	
6.	2013	8.365	6.106.162	
7.	2014	8.913	6.506.290	
8.	2015	9.335	6.468.678	274
9.	2016	8.824	6.409.205	444

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, Tahun 2017

Untuk angkutan reguler di DIY terus mengalami penurunan jumlah penumpang dikarenakan kondisi armada yang sudah tidak ideal, baik dari segi sarana angkutan maupun mutu layanan sedangkan untuk angkutan pedesaan sampai dengan saat ini belum ada layanan yang menjangkau.

2.3.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Begitu juga dalam organisasi pemerintahan. Saat ini dalam era informasi, pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan informasi dalam pemerintahan menjadi sangat krusial. Untuk itu pemerintah perlu untuk mengetahui, mengembangkan dan menjaga saluran informasi yang dimiliki, agar kewajiban pemerintah untuk memenuhi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan, tetapi juga menjaganya agar informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), sudah memiliki saluran informasi yang resmi yaitu melalui portal <http://jogjapro.go.id>. Selain itu berbagai SOPD di lingkungan Pemda DIY juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui *website* instansi yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk memproduksi berbagai informasi tersebut, Pemda DIY menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi dan Sistem Informasi diharapkan dapat membantu Pemda DIY untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Sistem Informasi itu ada yang memang untuk pelayanan publik, maupun untuk keperluan internal Pemda DIY.

Dan pada tahun 2015 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengadakan kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY pada saat itu untuk menjadi *Pilot Project* pengembangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk Pemerintah Daerah di Indonesia. Kerjasama tersebut tetap dilanjutkan sampai saat ini (2016) yaitu antara Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Pilot Project* tersebut dimaksudkan untuk mendampingi dan mendokumentasikan penerapan SMKI berbasis ISO 27001 di Pemda DIY, yang nantinya dokumentasi tersebut akan dijadikan buku pedoman atau *best practice* untuk penerapan SMKI di Pemda – Pemda di seluruh Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Kerjasama ini menggandeng JICA (*Japan International Cooperation Agency*) yang memberikan berbagai fasilitas pendampingan untuk Dinas Kominfo DIY.

SMKI merupakan suatu sistem manajemen dalam merancang, menerapkan, dan memelihara suatu rangkaian terpadu proses dan sistem untuk secara efektif mengelola keamanan informasi. Tujuan dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi ini ada 3 macam, yaitu: (1) menjaga Kerahasiaan Informasi, (2) menjaga Integritas Informasi, dan (3) menjaga ketersediaan informasi. Menjaga kerahasiaan informasi artinya bahwa suatu informasi hanya dapat digunakan oleh pengguna yang berhak menggunakan saja. Integritas informasi berarti bahwa informasi yang diterima oleh penerima informasi sama persis dengan informasi yang

disampaikan oleh pemilik informasi. Sedangkan Ketersediaan informasi memastikan bahwa informasi tersedia saat dibutuhkan. Jadi secara tidak langsung, SMKI menjamin keberlangsungan informasi dari suatu organisasi. SMKI memiliki berbagai standar, dan salah satu standar yang populer dan digunakan secara internasional adalah ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System. Standar ini juga sudah diadopsi oleh Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi. SNI ISO 27001 inilah yang diwajibkan oleh Permenkominfo No 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi untuk dimiliki bagi penyelenggara sistem elektronik dengan kategori tinggi dan strategis. SMKI menggunakan metode *Plan-Do-Check-Act* (PDCA), yang merupakan suatu proses berkelanjutan. Semua Proses SMKI tersebut agar diakui secara Internasional dan memastikan semua prosesnya berjalan dengan baik, perlu adanya audit sertifikasi dari Badan sertifikasi yang terpercaya dan diakui secara Internasional.

Selain tentang keamanan informasi, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Pemda DIY juga didesain pengembangan ekosistem kultural DIY berbasis digital berupa pengembangan sistem informasi berbasis multimedia terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk penyebaran informasi budaya, pariwisata, dan pendidikan pada khususnya, dan berbagai informasi pemerintah daerah pada umumnya kepada masyarakat. Sasaran yang akan diraih melalui pengembangan ekosistem kultural berbasis digital tersebut adalah memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam menumbuhkan sinergi budaya, pariwisata dan pendidikan untuk mensukseskan perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat unggulan pendidikan, pariwisata, dan budaya se-Asia Tenggara.

Sistem tersebut akan menjadi infrastruktur para pemangku kepentingan budaya, pariwisata dan pendidikan daerah untuk melakukan kolaborasi, inventarisasi, pengolahan, hingga penyebaran/distribusi informasi dalam bentuk multimedia. Informasi tersebut untuk selanjutnya akan sangat berguna untuk kepentingan sosialisasi dan promosi, dapat disebarluaskan secara digital melalui berbagai *platform*, seperti videotron, kios interaktif, web, aplikasi ponsel, dan sebagainya sehingga jangkauan penyebaran informasi berpotensi menjadi lebih luas, lebih cepat dan lebih efektif.

Sampai dengan tahun 2016, Pemda DIY juga berupaya memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun interaksi pemda dan masyarakat serta merespon berbagai masukan dari masyarakat melalui lini media sosial yang dikelola oleh Dinas Kominfo DIY. Untuk memberikan layanan informasi terpadu tentang DIY, Pemda DIY melalui Dinas Kominfo juga telah membangun aplikasi 'Jogja Istimewa' yang bisa diakses melalui telepon pintar (*smart phone*). Beberapa ruang publik di Pusat Kota juga

sudah dilengkapi dengan layanan wifi untuk akses internet warga serta kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi di layanan aplikasi 'Jogja Istimewa'.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan bisa terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai tempat berjalannya lalu lintas data, tersedia dengan baik. Saat ini ada lebih dari 2.700 komputer yang terhubung dengan Jaringan Pemda DIY di 119 titik/lokasi dari 147 titik yang rencana terkoneksi. Adapun jalur koneksi di 119 titik tersebut terdiri dari:

- a. 76 titik menggunakan jalur Fiber Optik (FO)
- b. 41 titik menggunakan jalur *Wireless*, termasuk 12 BTS
- c. 1 titik dengan koneksi kabel *coaxial* (Perpustakaan Malioboro)
- d. 1 titik menggunakan VPN (Kaperda Jakarta)

Sesuai rencana awal, pemasangan jaringan Fiber Optik hanya dilaksanakan pada instansi yang berada di dalam kota. Sampai pada tahun 2016 sudah terpasang sejumlah 76 titik dari target terpasang 73 titik. Untuk tahun mendatang diharapkan masih akan dapat membangun Fiber Optik di Kantor Samsat Sleman dan Balai Respira Bantul. Adapun pertimbangannya adalah kedua instansi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai BTS jaringan wireless untuk instansi sekitar. BTS Respira bantul untuk mengampu jaringan wireless sampai sampai Samsat Kulonprogo dan BTS Samsat Sleman untuk mengampu jaringan wireless di Panti Sosial Bina Remaja dan beberapa instansi di Kulonprogo dan Cangkingan Sleman.

Jaringan Fiber Optik sampai dengan tahun 2016 sudah terbangun sepanjang 63,1 km dengan rincian tahun 2013 sepanjang 12 km, tahun 2014 sepanjang 33,8 km, tahun 2015 sepanjang 16,3 km dan terakhir pada tahun 2016 dibangun sepanjang 1 km.

Sedangkan untuk bandwidth internet, Pemda DIY pada tahun 2016 menggunakan dari 2 sumber ISP yaitu Sarana Insan Muda Selaras (JMN) dengan besaran bandwidth 190 Mbps dan dari Media Sara Data (G-Media) dengan besaran bandwidth 230 Mbps, total *bandwidth* yang tersedia sebesar 320 Mbps. *Bandwidth internet* selalu bertambah setiap tahunnya, adapun gambarannya adalah sebagai berikut:

- Tahun 2014 : 132 Mbps
- Tahun 2015 : 345 Mbps
- Tahun 2016 : 420 Mbps
- Tahun 2017 : 650 Mbps

Adapun untuk alokasi *bandwidth* ke tiap instansi disesuaikan dengan kondisi perangkat komputer yang ada.

Sementara itu untuk memberikan fasilitasi pelayanan publik tingkat desa/kelurahan berbasis teknologi informasi, maka tahun 2018 Pemda DIY mendesain pembangunan infrastruktur TI di Desa/Kelurahan dan fasilitasi

hosting untuk *wifi* dalam pelayanan internet. Desain itu juga untuk mengintegrasikan informasi pemanfaatan APBDes dan Dana Desa serta Sistem Administrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan untuk mendukung desain dan respon kebijakan di Pemerintah Daerah DIY.

2.3.1.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan sebagai penyangga perekonomian. Koperasi diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam sistem perekonomian nasional dan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Selama tahun 2012-2016, jumlah koperasi di DIY mengalami pertumbuhan yang positif. Tercatat jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 meningkat sebesar 58 unit (2,45%) dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah koperasi aktif sebesar 2.369 unit. Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 89% dari total koperasi di DIY. Jumlah koperasi pasif di DIY juga mengalami penurunan dari semula 316 unit pada tahun 2015 menjadi 311 unit pada tahun 2016, turun sebesar 1,58%. Sementara itu, perkembangan koperasi berdasarkan volume usaha dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami pertumbuhan. Tercatat pada tahun 2016 pertumbuhan volume usaha koperasi mengalami pertumbuhan sebesar 874.253 Juta (24,29%).

Tabel 2.84 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Koperasi Aktif	2.090	2.176	2.269	2.369	2.427
Koperasi Tidak aktif	427	499	341	316	311
Koperasi Beku	-	58	-	-	-
Modal Sendiri (Rp Juta)	1.015.396	1.440.948	594.124	1.318.800	1.135.942
Modal Luar (Rp Juta)	572.156	572.159	830.210	2.320.866	1.835.173
Volume Usaha (Rp Juta)	2.304.127	2.320.617	2.586.506	3.599.547	4.473.800

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2017

Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 8.572 unit usaha (3,73%) dari semula 230.047 unit usaha pada tahun 2015 menjadi 238.619 unit usaha pada tahun 2016. Dilihat dari aspek jenis usaha, mayoritas Usaha Kecil Menengah (UKM) berasal dari sektor perdagangan dengan jumlah 68.054 unit usaha atau sebesar 28,52% dari total UKM di DIY, diikuti oleh sektor Industri Pertanian (27,18%), sektor Industri non Pertanian (22,60%). Persentase Jumlah UKM terkecil dimiliki oleh sektor aneka usaha sebesar 2,17%.

Tabel 2.85 Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2012-2016

No	Jenis Usaha	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aneka Usaha	43.976	44.452	47.808	49.923	51.780
2	Perdagangan	58.363	58.601	63.026	65.610	68.054
3	Industri Pertanian	55.496	55.767	59.977	62.519	64.857
4	Industri Non Pertanian	46.160	46.390	49.892	51.995	53.928
	Jumlah	203.995	205.210	220.703	230.047	238.619

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2017

Sementara apabila ditinjau dari aspek skala usaha, kelompok usaha mikro mendominasi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan jumlah 130.525 unit usaha (54,24%) dari total jumlah UKM di DIY. Diikuti oleh kelompok usaha kecil (24,79%), dan kelompok usaha menengah (14,97%).

Tabel 2.86 Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2012-2016

No	Skala Usaha	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Usaha Mikro	111.591	111.912	120.725	125.836	130.525
2	Usaha Kecil	50.999	51.459	55.176	57.512	59.655
3	Usaha Menengah	30.801	31.121	33.326	34.737	36.031
4	Usaha Besar	10.604	10.718	11.476	11.962	12.408
	Jumlah	203.995	205.210	220.703	230.047	238.619

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2017

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) diharapkan menjadi penggerak perekonomian utama di DIY, mengingat mayoritas perekonomian di DIY didominasi oleh sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil karena dapat mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara untuk sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) diperlukan pendampingan, fasilitasi jejaring kemitraan dengan harapan dapat memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

2.3.1.18 Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah didorong oleh pertumbuhan investasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah senantiasa mengupayakan iklim yang kondusif untuk investasi baik Investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Kegiatan investasi, terutama PMDN, diharapkan

dapat mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal. Dampak ikutan dari kegiatan penanaman modal adalah tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Secara tidak langsung, kawasan di sekitar lokasi kegiatan investasi diharapkan dapat ikut menikmati dampak adanya kegiatan ekonomi tersebut. Sementara itu, kegiatan PMA juga memiliki peran strategis dalam membawa teknologi baru ke DIY. Kegiatan PMA yang sering diikuti kehadiran tenaga kerja asing, mesin atau metode kerja modern diharapkan dapat memberikan pengetahuan teknologi industri baru di DIY. Seperti yang dipahami dalam konsep pertumbuhan ekonomi, teknologi adalah faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Investasi DIY diutamakan untuk industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif. Kegiatan investasi di DIY diupayakan untuk jenis kegiatan industri yang ramah lingkungan. Dengan demikian, investasi yang tumbuh di DIY diharapkan tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan serta karakteristik masyarakatnya. Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2016 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 7,34%. Total investasi di DIY sampai dengan tahun 2016 adalah Rp. 12.047.283.914.000,- yang terdiri dari PMDN Rp.4.511.586.293.000 dan PMA sebesar Rp. 7.535.697.621.000,-. Adapun jumlah Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 294 perusahaan, yang terdiri dari 151 PMA dan 143 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 47.731 TKI dan 198 TKA.

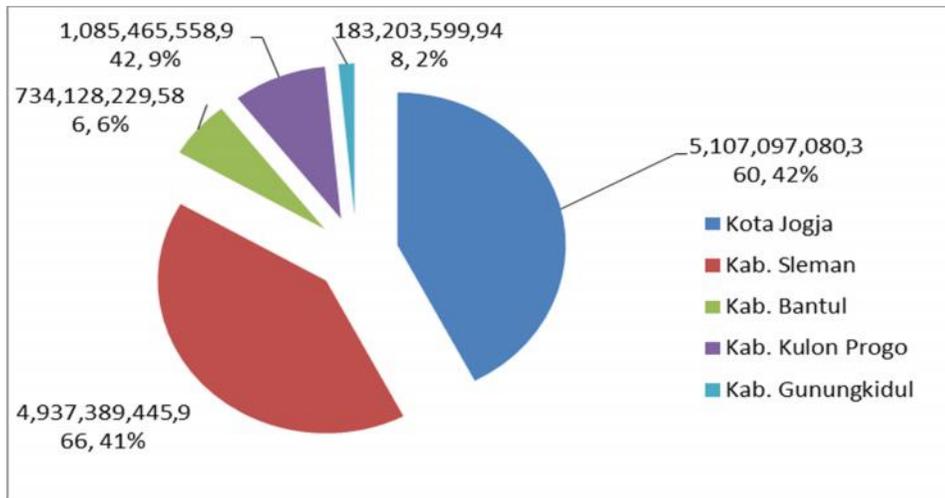
Tabel 2.87 Perkembangan Investasi di DIY

Tahun	Investasi PMDN (Rp 000)	Investasi PMA (Rp 000)	Total Investasi (Rp 000)	Growth (Rp 000)	Investation Growth (%)
s.d 2012	2.805.944.605	4.250.121.535	7.056.066.141	632.488.121	9,85
s.d 2013	2.864.654.491	5.203.115.642	8.067.770.134	1.011.703.992	14,34
s.d 2014	3.568.546.291	5.955.853.842	9.524.400.134	1.456.630.000	18,05
s.d 2015	3.951.662.458	7.271.740.783	11.223.403.242	1.699.003.107	17,83
s.d 2016*	4.511.586.293	7.535.697.621	12.047.283.914	823.880.672	7.34

Sumber: BKPM DIY, Tahun 2017* (* data sementara)

Meskipun secara keseluruhan investasi di DIY mengalami peningkatan, namun demikian masih terdapat ketimpangan penyebaran investasi tersebut. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Konsentrasi investasi di kedua wilayah ini

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi keduanya yang berada di atas rata-rata provinsi. Jika investasi yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kedua wilayah ini, maka ketimpangan antar wilayah akan semakin melebar. Dengan demikian, permasalahan penyebaran investasi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul diharapkan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal.



Sumber: BKPM DIY, Tahun 2017* (* data sementara)

Gambar 2.71 Presentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2016 per Kabupaten Kota

2.3.1.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan telah jelas mengarahkan bahwa Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kriteria pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun (UU Nomor 40 tahun 2009).

Guna mencapai tujuan pembinaan pemuda dan olahraga dapat tercapai di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terukur dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan di DIY tidak terlepas dari pedoman yang diatur dalam UU kepemudaan. Mengacu pada kebijakan tersebut, pembangunan kepemudaan DIY diarahkan pada pembangunan *softskill* dan *hardskill* pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat *character building* yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika, semangat profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan pengembangan *softskill*. Sedangkan pengembangan *hardskill* pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi pemuda.

Arah kebijakan sektor kepemudaan pada RPJMD 2013-2017 ingin mewujudkan kapasitas pemuda yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. Sasaran tersebut dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut:

1. Program peran serta kepemudaan
2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
4. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

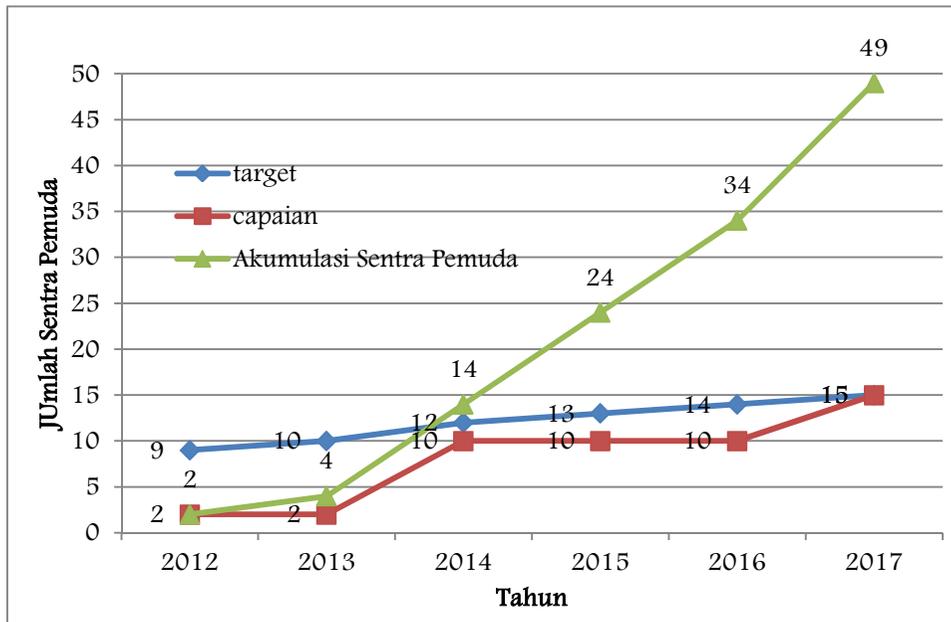
Melalui pelaksanaan 4 program kepemudaan tersebut, pada tahun 2016 telah diperoleh capaian sebagai berikut:

A. Kewirausahaan Pemuda dan Sentra Pemberdayaan Pemuda

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan. Dalam usaha untuk memberikan bekal kewirausahaan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan kelak para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap guncangan dan persaingan.

Upaya pemberdayaan pemuda melalui pelatihan kewirausahaan dan pembentukan sentra pemberdayaan pemuda dilakukan dengan membentuk embrio usaha, pembinaan, pendampingan, akses modal,

pinjaman perbankan, pembukaan jaringan bisnis, dan mewadahi *sharing knowledge* dari para pebisnis lain. Mekanisme pelaksanaan program ini dilakukan melalui penyampaian proposal (sentra pemberdayaan pemuda) dan persyaratan lain yang diajukan oleh kelompok pemuda/individu untuk kemudian dilakukan seleksi oleh tim. Sampai dengan tahun 2016 telah terbentuk sebanyak 385 wirausaha baru dan 34 sentra pemuda. Gambar berikut merupakan gambaran jumlah sentra pemuda dari tahun 2012-2016 serta rencana pelaksanaan pada tahun 2017.



Gambar 2.72 Pembentukan Sentra Pemuda DIY 2012-2017

B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan sebagai sarana penunjang kegiatan kepemudaan menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. Beberapa fasilitas penunjang kegiatan kepemudaan telah disediakan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Gelanggang Pemuda “*Youth Centre*”

Gelanggang Pemuda *Youth Center* merupakan fasilitas Kegiatan Kepemudaan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) Dinas Dikpora DIY. *Youth Center* sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Seminar, Pendidikan dan Latihan, Kemah, *Outbond*, dll. *Youth Center* juga dilengkapi dengan fasilitas sirkuit *X-track* di halaman belakang yang digunakan untuk ajang latihan dan perlombaan sepeda BMX.

b. Pondok Pemuda Ambarbinangun

Nuansa sejarah bangsa serta aksen seni dan budaya membuat Pondok Pemuda Ambarbinangun menjadi tempat pelaksanaan berbagai kegiatan seni, budaya, wisata dan nasionalisme. Tempat ini secara rutin sebagai tempat latihan teater, tempat seleksi Paskibraka, tempat Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara, tempat Diklat Kepemimpinan.

c. Bumi perkemahan Babarsari

Bumi Perkemahan Babarsari merupakan area yang diperuntukkan guna pembinaan kegiatan kepramukaan. Selain lokasi untuk kegiatan berkemah dan *outbond*, ditempat ini juga terdapat gedung Kwartir Daerah DIY.

C. Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Program pembinaan dan pengembangan *softskill* dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pemuda seperti

1. Sarjana Penggerak pembangunan (SP2). Wadah bagi intelektual muda yang akan ditempatkan di pedesaan agar generasi muda menjadi mandiri dan berkarya untuk ikut mengembangkan dan memperdayakan masyarakat pedesaan.
2. Generasi muda juga mendapatkan peluang untuk berperan aktif dalam Kapal Pemuda Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi pemuda berlayar di perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan perwakilan sebanyak 2 - 5 orang untuk mengikuti program ini. Adapun kapal yang digunakan adalah kapal milik Angkatan Laut Republik Indonesia.
3. Penguatan Kepribadian, kemandirian, patriotisme, dan semangat juang pemuda dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan kepramukaan.
4. Kegiatan Paskibraka yang secara rutin dilaksanakan, tidak hanya sebagai wadah untuk melakukan seleksi, pelatihan, dan pembinaan baris berbaris, namun kegiatan Paskibraka merupakan wadah pembinaan kedisiplinan, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5. Pengkaderan pemuda anti NAPZA. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan efek piramida terhadap pencegahan peredaran narkoba di kalangan pemuda. Para kader akan diminta memberikan pemahaman kepada 10 pemuda lainnya yang masing-masing tersebut akan menyebarkan pemahaman yang sama ke puluhan pemuda.

2.3.1.20 Urusan Statistik

Ketersediaan data dan informasi yang andal dan terpercaya adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah perencanaan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi berbagai hal yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dalam memahami

permasalahan dan tantangan. Hal itu memberikan andil penting dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran untuk memperbaiki keadaan maupun mengatasi masalah yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengumpulan sampai dengan penyediaan data dan informasi ~~itu~~ merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan Statistik.

Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Bappeda DIY merupakan instansi Pemerintah Daerah DIY yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD provinsi/kabupaten/kota di DIY. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini dituangkan dalam program Pengembangan Statistik Daerah serta Pengelolaan Data dan Statistik Daerah yang dilaksanakan secara teknis oleh Balai Statistik Daerah yang merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari Bappeda DIY.

Salah satu isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah adalah belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel. Untuk itu diperlukan program yang mendukung optimalnya ketersediaan data. Upaya peningkatan kualitas data DIY dalam rangka menasar isu strategis tersebut menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Lebih lanjut lagi, permasalahan terkait urusan statistik dalam mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data statistik yang tidak tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan baik untuk perencanaan maupun pengendalian pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam perencanaan adalah data $n-5$ hingga $n+2$ sementara itu data yang tersedia baru sampai $n-1$. Sementara itu, beberapa data capaian indikator yang menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah ketersediaannya bergantung pada pihak di luar kewenangan Pemerintah;
3. Urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sehingga dalam rangka pertanggungjawaban produk data, sering terjadi perbedaan

angka atau data. Hal tersebut disebabkan antara lain karena perbedaan definisi data.

Sebagai solusi atas permasalahan di atas, ada beberapa hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi data perencanaan dilaksanakan penyusunan analisis untuk menyediakan analisis lebih lanjut terhadap data termasuk penyediaan data proyeksi;
2. Perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, agar terjadi komunikasi yang jelas dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik;
3. Telah dibentuk UPT yang secara khusus menangani kegiatan teknis terkait statistik daerah di SKPD Bappeda DIY, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pewujudan satu data pembangunan untuk mewujudkan satu *data base* pembangunan yang dapat diacu oleh berbagai pihak yang membutuhkan data dengan menyediakan data seragam untuk menghindari duplikasi data dan sesuai dengan kebutuhan.

Secara teknis, upaya menerapkan solusi tersebut dimandatkan kepada UPT Balai Statistik Daerah melalui dua program yang dilaksanakannya. Program-program tersebut di antaranya menghasilkan produk beberapa kajian yang menganalisis lebih lanjut data berupa antara lain Analisis ICOR dan Analisis Makroekonomi DIY, serta pengelolaan sistem aplikasi Jogja Dataku dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.3.1.21 Urusan Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di pemerintah daerah di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi Sumber Daya Manusia sandi.

Tujuan kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan.

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Di pemerintah daerah (pemda), masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah mengenai persandian.

Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kewenangan pertama yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Kondisi ini tentunya perlu sejalan dengan kemampuan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja pengelolaan persandian di pemerintah daerah di antaranya melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas, melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia, melaksanakan pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia dan berklasifikasi, mengadakan dan memelihara peralatan dan sistem sandi, melakukan komunikasi koordinasi persandian, dan mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan pemerintah daerah.

Di tengah keterbatasan SDM sandi yang dimiliki Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi, komunikasi persandian memiliki potensi untuk membantu proses pengamanan informasi dan fungsi pelayanan publik yang diberikan pemda kepada masyarakat. Keutamaan dalam pengamanan informasi didasari atas beberapa potensinya berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Gangguan berupa interupsi terjadi dalam bentuk menghalangi penyampaian pesan dari sumber informasi untuk sampai kepada tujuannya. Intersepsi dilakukan dalam bentuk menyadap pesan yang sedang mengalami proses distribusi dari sumber informasi kepada tujuannya. Modifikasi dilakukan melalui

upaya untuk merubah informasi yang berasal dari sumber informasi, sehingga akan berbeda diterima ditujuannya. Sedangkan fabrikasi dilakukan melalui penciptaan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi untuk diterima ditujuannya. Bercermin dari aktivitas komunikasi persandian berikut potensi kerawanannya, maka persandian memang dimaksudkan untuk terciptanya anti penyangkalan informasi, menjaga otentikasi informasi, memenuhi ketersediaan informasi, menjaga keutuhan dan kerahasiaan informasi.

Komunikasi Persandian dalam membantu meningkatkan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berjalan sesuai dengan perkembangan kemampuan teknologi informasi komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu meningkatkan fungsi pelayanan publik, karena mampu mentransmisikan secara elektronik (komunikasi elektronik) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta *convenient* (nyaman dan gampang). Pelayanan publik yang didukung oleh kegiatan komunikasi persandian, akan mampu menghasilkan data yang otentik, utuh, dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi. Ancaman yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah alasan yang kuat sebagai dasar dilakukannya pengelolaan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis. Sebagai organisasi yang dinamis, unit teknis persandian baik yang berada di daerah maupun yang berada di pusat dituntut tanggap dan siap untuk melakukan reformasi dalam rangka menyikapi segala perubahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Praktek komunikasi persandian di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dilakukan selama ini fokus penyelenggaraannya memang belum seragam dengan daerah lainnya. Hal ini lebih disebabkan karena belum mampunya pemerintah daerah dalam menetapkan kategori informasi yang dimilikinya, apakah masuk dalam kategori informasi dikecualikan. Namun demikian, praktek komunikasi persandian di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hakekatnya justru membantu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang otentik, utuh dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi dalam rangka pengiriman atau penyimpanannya. Upaya untuk meningkatkan hasil guna dari praktek komunikasi persandian di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mendapatkan perlindungan berupa dasar hukum yang di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian, baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, dan kualifikasi SDM sandi. Selain itu, perlu juga disediakan sarana dan prasarana sandi dengan standar yang sama di semua tempat.

Pemutakhiran jaringan dan sistem pengamanan sandi perlu terus dilakukan sejalan dengan semakin canggihnya potensi kebocoran informasi. Dan terakhir keberadaan sumber daya manusia pesandi (sandiman), perlu terus ditingkatkan kompetensi, jumlah, dan kelayakan tunjangannya.

2.3.1.22 Urusan Kebudayaan

Kebudayaan sebagai *mainstream* di segala bidang telah menjadi spirit pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan sampai sekarang telah diimplementasikan selama empat tahun. Sejumlah kemajuan kebudayaan baik yang sifatnya kebendaan maupun bukan kebendaan di berbagai sektor telah dihasilkan. Kemajuan kebudayaan terus berpacu dengan dinamika perkotaan dan masyarakatnya yang terus diuji ketahanan budayanya oleh arus perubahan.

Membangun kebudayaan berarti merajut nilai-nilai luhur warisan masa lalu yang dipadukan dengan masa kini dan masa mendatang. Perpaduan yang harmonis antara representasi masa klasik, masa sekarang, dan masa lalu akan menghasilkan *Rennaisans Yogyakarta*. *Rennaisans Yogyakarta* menuju masyarakat yang berperadaban baru dengan mengandalkan kekuatan kebudayaan perlahan-lahan menemukan titik simpulnya dengan kesadaran dan kemauan bersama untuk mempertahankan tanda-tanda kejayaan Yogyakarta di masa lalu sebagai bahan pembelajaran kepada generasi penerus dan masyarakat dunia tentang mozaik peradaban Yogyakarta yang menyemesta. Semangat *golong gilig* dan *manunggaling kawula lan gusti* telah mendasari pelaksanaan amanah-amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Proses cipta, rasa, karsa dan karya yang dihasilkan oleh para leluhur yang pernah mengenyam hidup di Yogyakarta berpadu dengan kreativitas dan inovasi antar generasi memperkaya dan menambah keragaman budaya di Yogyakarta.

Keberadaan kebudayaan DIY dilindungi oleh regulasi-regulasi yang berlaku yaitu UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, Perdas No 1 Tahun 2013. Konsep pembangunan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dirangkum dalam Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan kebudayaan. DIY sebagai pelopor dalam penyusunan kebijakan kebudayaan dapat dibuktikan dengan keberhasilannya menerjemahkan Revolusi Mental dalam Nawacita ke dalam kebijakan pembangunan segala bidang di DIY yang berpayung hukum pada kebudayaan.

A. Sejarah, Purbakala dan Permuseuman

Sejarah dan Purbakala

Jejak-jejak sejarah semenjak zaman prasejarah hingga kontemporer masih dapat dilihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehidupan manusia-manusia purba pernah terjadi di pegunungan selatan Yogyakarta. Tidak semua masyarakat yang pernah berdiam di DIY meninggalkan sisa-sisa warisan hasil perjuangan hidup pada masanya yang masih dapat dilihat pada saat ini. Simbol-simbol eksistensi dan kejayaan tersebut belum tentu bertebaran pada satu kesatuan geografis tertentu, namun dapat diklasifikasikan ke dalam situs, struktur, benda, bangunan maupun kawasan yang dalam bahasa UU No 11 Tahun 2010 disebut sebagai cagar budaya. Cagar budaya sangat bernilai bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri, ilmu pengetahuan, sosial ekonomi dan bahkan politik.

Runtutan masa dari prasejarah, Hindu, Budha, Islam, Cina, masa kolonialisme Belanda dan Inggris hingga kemerdekaan meninggalkan cagar budaya yang beragam dengan karakteristik cagar budaya masing-masing. Saat ini tersedia sarana kebutuhan sehari-hari manusia yang ditinggalkan para leluhur. Contohnya : istana, masjid, gereja, candi, vihara, pabrik, perguruan tinggi, taman pendidikan.

Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari telah dijabarkannya UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Pergub DIY No. 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Pergub DIY No. 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Perdais No 1 Tahun 2013.

Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mensyaratkan adanya Tim Ahli Cagar Budaya yang melakukan pengkajian sebelum menetapkan suatu satuan geografis tertentu untuk menjadi cagar budaya. Tim Ahli Cagar Budaya sudah terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya awal perlindungan cagar budaya dilakukan dengan Kepala Dinas Kebudayaan DIY membuat surat ketetapan tentang cagar budaya, yaitu SK Kepala Dinas Kebudayaan DIY Nomor 188/38.A./2014.

Cagar budaya di DIY yang berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, kawasan cagar budaya, situs, tanpa struktur budaya dapat diindikasikan berjumlah 2.205 buah. Masih dimungkinkan penemuan-

penemuan kembali cagar budaya, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar. Kemunculan kelompok radikal, kapitalisme, laju demografi, belum lagi kekuatan alam yang sangat ekstrem tidak diragukan akan menggerus aset-aset budaya bendawi tersebut dan kekuatan ketahanan budaya masyarakat DIY.

Berbagai peristiwa sejarah pun baik yang sifatnya nasional maupun kedaerahan telah terjadi di DIY. Setiap catatan peristiwa bersejarah tertuang dalam naskah-naskah baik yang berbahasa Jawa Kuno maupun bahasa Belanda tersimpan di berbagai perpustakaan di DIY seperti Perpustakaan Keraton, Puro Pakualaman, Museum Sonobudoyo, Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip, dan lainnya. Saksi-saksi sejarah atas berbagai tema kesejarahan belum semuanya terekam cerita-ceritanya.

Satuan geografis potensial kawasan cagar budaya di DIY terdapat sekitar 21-an kawasan, namun belum semuanya diintervensi secara intensif. Pada tahun 2011 Pemda DIY melalui SK Gubernur No 186/Kep/2011 menetapkan Kawasan Cagar Budaya yang masuk kewenangan provinsi yaitu antara lain : Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Imogiri, Kotagede, Kotabaru yang mewakili masa peradaban klasik Islam, tradisional Jawa, kolonialisme, Pecinan. Pada tahun 2014 melalui SK Kepala Dinas Kebudayaan No 188/38.A telah menetapkan warisan budaya sebagai perlindungan pertama terhadap aset-aset budaya DIY. Tahapan untuk menjadi cagar budaya harus melalui kajian dan registrasi yang prosedural, sedangkan DIY sangat kaya akan aset budaya bendawi, sehingga perlu dibuat penetapan warisan budaya.

Museum sebagai kekuatan keistimewaan, sebagai nafas keistimewaan, menguatkan keistimewaan, dan jati diri bangsa. Museum menurut definisi ICOM adalah sebuah lembaga atau wadah permanen yang melaksanakan fungsi pelestarian dan menyajikan berbagai koleksi dan bukti-bukti material manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi. Dengan kata lain, museum merupakan lembaga tempat penyimpanan, perawatan, dan pengamanan dan pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Museum juga merupakan lembaga non profit yang terbuka untuk umum, tempat memamerkan dan mengkomunikasikan benda-benda bukti keberadaan manusia dan lingkungannya guna kepentingan pendidikan dan edukasi kultural, serta rekreasi.

Museum negeri yang berada di bawah Pemda DIY: Sonobudoyo, Purbakala Pleret; yang di bawah Kemendikbud: Benteng Vredeburg, Perjuangan; yang di bawah TNI adalah Museum TNI AD, Museum Sudirman. Museum Diponegoro, Museum TNI AU, Museum Sandi, Museum Istana Negara Gedung Agung, Museum MMTC, Museum Gedung Bank Indonesia. Pemerintah kabupaten Sleman memiliki Museum Gunung Merapi. Museum milik Pemerintah Kulon Progo masih dalam proses studi.

Pemerintah Kabupaten Bantul sedang mengupayakan pendirian Museum Sumber Karahayon. Pemerintah Kota telah mengembangkan Museum Taman Pintar.



Sumber : Barahmus, 2015

Gambar 2.73 Persebaran Museum di DIY

Lembaga-lembaga pendidikan juga mengembangkan museum. UGM yang memiliki museum UGM, Biologi, Peta, Geospasial, Paleoantropologi, Wanagama. UII yang diuntungkan dengan ditemukannya candi kimpulan. UPN Veteran telah mengembangkan Geoteknologi Mineral dan mereka juga mengadakan penelitian tentang *geoheritage*. UNY memiliki museum pendidikan Indonesia. Museum di lembaga pendidikan belum memiliki lembaga yang mengurus museum, belum memiliki pengelola khusus, kepala museum, tetapi yang ada hanya tenaga administratif dan hanya dititipkan di Fakultas.

Perjuangan pengembangan museum masih memerlukan strategi yang tepat karena diindikasinya berbagai persoalan yang mengurangi daya tarik dan daya saing museum sebagai tempat tujuan kunjungan yang favorit bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sebagai berikut: citra Museum yang masih rendah, museum masih dianggap sekedar memelihara barang tidak terpakai atau sekedar menjadi gudang penyimpanan, museum disejajarkan obyek wisata alam atau wisata lainnya, banyak museum kekurangan anggaran operasional, belum adanya standar pelayanan, kurangnya informasi keberadaan museum, belum terpadunya aspek

pembelajaran museum dengan kurikulum di sekolah, belum adanya kebijakan terpadu antar instansi terkait, perlu adanya Grand Disain Permuseuman DIY yang melibatkan seluruh stakeholder.

B. Adat Istiadat, Tradisi dan Sistem Nilai Budaya Lainnya

Peradaban baru yang hendak diwujudkan bagi masyarakat DIY yang memiliki keunggulan dalam nilai mental dan tata laku adalah peradaban yang dijiwai dan digerakkan oleh visi akbar yang dilandasi filosofi universal "*Hamêmayu-Hayuning Bawânâ*", yang di dalamnya terkandung kewajiban *Tri Satyâ Brâtâ*. Pertama, *rahayuning buwânâ kapurbâ waskitaning manungsâ* (kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa), harmoni hubungan manusia dengan alam, baik dalam lingkup dunia (*world*) sebagai kewajiban "*Hamangku Buwânâ*", maupun seluruh alam semesta (*universe*) sebagai kewajiban "*Hamêngku Bawânâ*".

Kedua, *darmaning manungsâ mahanani rahayuning nêgârâ* (tugas hidup manusia adalah menjaga keselamatan negara), sebagai kewajiban manusia selama hidup di dunia, dimana kehidupan merupakan dinamika manusia, yaitu "*Hamêngku Nagârâ*". Ketiga, *rahayuning manungsâ dumadi karânâ kamanungsané* (keselamatan manusia oleh kemanusiaannya sendiri).

Sehingga dapat dimengerti jika filosofi itu menyanggah misi akbar bagi manusia dalam tiga substansi tersebut, yaitu: "*Hamêngku Nagârâ, Hamangku Buwânâ, Hamêngku Bawânâ*". Bahwa kewajiban "*Hamêngku Nagârâ*" itu, karena Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda, bergolong-golong dan bersuku-suku, sehingga diperlukan eksistensi negara dan pemerintahan yang mengaturnya, agar tidak terjadi seling-surup dan saling-silang antarmanusia.

Basis keunggulan sebuah bangsa, atau komunitas, nyata-nyata dan tak bisa lain, ialah manusia yang unggul spiritualitas, intelektualitas, dan etos kerjanya. Manusia-manusia unggul demikianlah yang menghasilkan kitab Sutasoma, Nêgarakêrtagama, Sêrat Cênthini, candi Borobudur dan Prambanan. Dan manusia-manusia unggul itulah kini yang menghasilkan invensi di bidang sains dan teknologi, inovasi di bidang industri, *masterpiece* di bidang seni, serta tata kelola yang baik di bidang pemerintahan. Nilai-nilai ketradisional telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY.

aerah Istimewa Yogyakarta terus meningkatkan potensi dan eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat setempat. Desa budaya tidaklah sama dengan desa wisata karena desa wisata lebih menonjolkan pada peningkatan nilai jual sebuah desa daripada pelestarian nilai-nilai di dalamnya. Ditargetkan dari 438 desa/kelurahan di 78 kecamatan dapat mencapai 50 % yang menjadi desa budaya. Pengelolaan desa budaya yang sudah eksis dan rintisan-rintisan desa budaya dilakukan secara bersama-

sama oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tahun 2016 telah membentuk tim akreditasi untuk menilai kelayakan sebuah desa ditetapkan sebagai Desa Budaya sesuai dengan Peraturan Gubernur No 36 tahun 2014 tentang Desa/kelurahan Budaya.

Desa dan kelurahan budaya di DI Yogyakarta terdapat 56 desa yang terdiri 54 desa dan 2 kelurahan) yang telah mendapat SK Gubernur No. 262/KPTS/2016. Desa Budaya diharapkan dapat menjadi wahana bagi upaya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian segala potensi budaya yang ada di desa. Desa budaya diartikan sebagai "wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan saksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural. Desa budaya yang sudah berpredikat maju pada tahun 2016 ada 22 desa budaya yang lainnya masih dalam tahap tumbuh dan berkembang.

Tabel 2.88 Desa dan Kelurahan Budaya di DIY

NO.	DESA BUDAYA	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Sinduharjo	Ngaglik	Sleman
2.	Bangunkerto	Turi	Sleman
3.	Sendang Mulyo	Minggir	Sleman
4.	Argomulyo	Cangkringan	Sleman
5.	Wedomartani	Ngemplak	Sleman
6.	Banyurejo	Tempel	Sleman
7.	Mulyodadi	Bambanglipuro	Bantul
8.	Trimurti	Srandakan	Bantul
9.	Srigading	Sanden	Bantul
10.	Dlingo	Dlingo	Bantul
11.	Triwidadi	Pajangan	Bantul
12.	Seloharjo	Pundong	Bantul
13.	Pagerharjo	Samigaluh	Kulonprogo

NO.	DESA BUDAYA	KECAMATAN	KABUPATEN
14.	Tanjungharjo	Nanggulan	Kulonprogo
15.	Banjarharjo	Kalibawang	Kulonprogo
16.	Sidorejo	Lendah	Kulonprogo
17.	Sukoreno	Sentolo	Kulonprogo
18.	Glagah	Temon	Kulonprogo
19.	Sendang Sari	Pengasih	Kulonprogo
20.	Jatimulyo	Girimulyo	Kulonprogo
21.	Brosot	Galur	Kulonprogo
22.	Hargomulyo	Kokap	Kulonprogo
23.	Semin	Semin	Gunungkidul
24.	Semanu	Semanu	Gunungkidul
25.	Bejiharjo	Karangmojo	Gunungkidul
26.	Kemadang	Tanjungsari	Gunungkidul
27.	Putat	Patuk	Gunungkidul
28.	Girisekar	Panggang	Gunungkidul
29.	Giring	Paliyan	Gunungkidul
30.	Katongan	Nglipar	Gunungkidul
31.	Kepek	Wonosari	Gunungkidul
32.	Jerukwudel	Girisubo	Gunungkidul
33.	Wonokerto	Turi	Sleman
34.	Margodadi	Sayegan	Sleman
35.	Pandowoharjo	Sleman	Sleman
36.	Sendangagung	Minggir	Sleman
37.	Selopamioro	Imogiri	Bantul
38.	Sitimulyo	Piyungan	Bantul
39.	Sabdodadi	Bantul	Bantul

NO.	DESA BUDAYA	KECAMATAN	KABUPATEN
40.	Tambakromo	Ponjong	Gunungkidul
41.	Wiladeg	Karangmojo	Gunungkidul
42.	Bugel	Panjatan	Kulon Progo
43.	Tuksono	Sentolo	Kulon Progo

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2016

C. SENI DAN PERFILMAN

Kegiatan berkesenian di DIY telah dieksplorasi dengan berbagai cara dan media, diwujudkan dalam berbagai bentuk dan ragam, baik yang berupa seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan, maupun campuran dari berbagai macam kesenian yang ada. Semua itu berakar pada rasa, dan diwujudkan untuk melayani rasa pula, yakni rasa keindahan. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. Dalam pengkategorian cabang seni sampai saat ini belum ada pembakuan yang pasti. Untuk kepentingan penyusunan sistem informasi budaya, data yang akan dilihat adalah organisasi seni, usaha kerajinan, permainan tradisional, tokoh seniman dan budayawan, penghargaan seniman dan budayawan, dan gallery seni rupa.

Beberapa tahun terakhir semarak even seni sangat menonjol sekali di DIY. Perhelatan seni dapat disaksikan di lingkungan Kraton, Kampus, Kampung maupun Kantor. Lomba, festival, karnaval, pameran sebagai wadah kreativitas dan inovasi seni masyarakat. Bentuk-bentuk seni yang biasanya berkembang di Kraton, biasanya hanya dipertunjukkan bagi kalangan tertentu, kini sudah dapat ditonton oleh seluruh anggota masyarakat. Tempat-tempat yang tidak mungkin dimasuki seni tradisional pun sudah mulai ada penjajagan untuk ruang budaya tradisional. Festival Kebudayaan Yogyakarta diproyeksikan agar menjadi event yang lebih spektakuler.

Kerjasama-kerjasama dengan kelompok orkestra dari luar negeri sering menghasilkan konser musik kolaborasi. Musik yang selama ini dianggap hanya konsumsi orang kelas menengah atas juga sudah merambah ke pedesaan, yaitu *Ngayogjazz*. Seni rupa mengalami perkembangan pesat. Para seniman seni rupa telah menunjukkan kiprahnya dalam dunia internasional. Mereka berusaha menerobos *event-event* seni rupa di luar negeri.

Karya seni yang telah menjadi warisan budaya dunia adalah batik, keris, wayang, gamelan. Selain sebagai karya seni, warisan karya tersebut juga merupakan pusaka Indonesia yang diakui dunia internasional. Wayang kulit sebagai seni pertunjukan tradisional yang sangat populer di

kalangan masyarakat Jawa dimainkan oleh seorang dalang dengan menggerakkan karakter-karakter tertentu yang terdapat dalam Kitab Mahabarata dan Ramayana telah diakui UNESCO pada tahun 2008. Keris diakui dunia pada tahun 2005. Batik tercatat dalam daftar UNESCO pada tahun 2009. Gamelan diakui dunia internasional sebagai karya budaya Indonesia pada tahun 2014, bersamaan waktunya dengan penetapan Sekaten.

Kelompok pembuat film di Yogyakarta beragam dari segi umur, organisasi, bentuk organisasi, maupun ukuran organisasi. Dari segi umur, hampir semua kelompok pembuat film didirikan pasca reformasi. Komunitas film sangat mempengaruhi perkembangan perfilman di DIY. Beberapa contoh komunitas yang menyelenggarakan program pelatihan kine klub yang berbasis kampus seperti di UGM, ISI Yogyakarta, APMD, UAJY, UIN, dan UMY. Komunitas apresiasi dan kajian film yang tidak berbasis kampus antara lain : De Javu, Ki noki, Montase, Rumah Sinema, Forum Film Dokumenter. Komunitas film yang sudah berorientasi pada produksi misalnya Limaenam Films, Studio Kasat Mata dan Fourcolours Films.

Daerah Istimewa Yogyakarta diuntungkan dengan keberadaan 129 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 200 ribu orang. Keberadaan perguruan tinggi seperti universitas, akademi dan berbagai sekolah vokasi tersebut memungkinkan perjumpaan orang-orang yang berminat pada produksi film dan mendukung kemunculan kelompok-kelompok film yang berorientasi pada seni, selain untuk mencari pendapatan. Film bagi kelompok pembuat film di DIY bukan saja soal ekonomi, tetapi juga soal ungkapan seni budaya. Hasil produksi film di Yogyakarta tidak melayani pasar bioskop sebagaimana industri perfilman nasional yang banyak berbasis di Jakarta. ~~Fim~~ Film produksi Yogyakarta lebih banyak melayani berbagai kebutuhan dari rumah produksi luar negeri, perusahaan iklan, instansi pemerintah, festival film, hingga lembaga swadaya masyarakat internasional. Pemda DIY mestinya mengintervensi melalui aspek distribusi dan eksibisi yang masih jarang mendapat perhatian banyak pihak. Produktivitas kelompok pembuat film di DIY harus dipertemukan dengan pasar sebagai cara mempertemukan film dan penontonnya. Kelompok pembuat film di DIY membutuhkan perluasan pasar dari aspek distribusi maupun eksibisi yang perlu disediakan bersama oleh para pihak baik swasta maupun Pemda.

Tabel 2.89 Perkembangan Organisasi dan Pelaku Seni di DIY Tahun 2012-2016

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Organisasi Sinematografi	14	42	42	42	42
Organisasi Seni Pertunjukkan	4.269	5.226	5.252	5440	5543
Organisasi Seni Rupa	25	16	17	17	17

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Galeri seni rupa	29	29	29	29	29
Perusahaan Film	10	20	20	20	20
Kerajinan Property Budaya	178	246	241	244	244
Perusahaan Bioskop	4	2	3	3	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	37	38	38	38	38
Tokoh Seniman Budayawan	486	486	487	489	496
Penghargaan seniman Budayawan	260	275	290	295	351

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan)

Tabel 2.90 Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2012-2016

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	980	1.025	1.200	1.275	1.350
Prasarana Budaya	107	107	107	107	107
Lembaga Budaya	105	82	82	98	180
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	43	49	49

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan)

2.3.1.23 Urusan Perpustakaan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, pada umumnya yaitu bahwa : Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan IEA-*International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca DIY berada di

atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat *bibliofil* (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapreasikan buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan asset negara).

Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa *bibliofil* adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dapat menjadi *icon* peradaban baru dan *Rennaisans* Yogyakarta. Pembangunan perpustakaan juga dijiwai oleh amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat DIY didukung oleh perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lainnya. Pemerintah DIY memiliki sejumlah perpustakaan yang keberadaannya menyebar, seperti unit perkantoran Jalan Tentara Rakyat Mataram 29, perpustakaan unit Grhatama Pustaka Jl. Janti Banguntapan Bantul, perpustakaan unit Malioboro yang mengutamakan koleksi humaniora, dan Rumah Belajar Modern Sewon, Banguharjo, Bantul.

Perkembangan perpustakaan di DIY tergolong baik karena jumlahnya cenderung meningkat juga beragam jenisnya. Hingga tahun 2015 DIY telah memiliki 3.461 perpustakaan dari 3.245 buah pada tahun 2014. Penghitungan tersebut belum memperhitungkan perpustakaan tempat ibadah dan perpustakaan komunitas/umum.

Tabel 2.91 Jumlah Perpustakaan Menurut Jenisnya

Jenis Perpustakaan	2014	2015						Jumlah Total
		KP	Btl	GK	Slmn	Kota Yk	DIY	
1 Desa	438	88	75	144	86	45	N/A	438
2 Umum/Lembaga	6	1	1	1	1	1	1	6
3 Departemen	147	27	7	53	N/A	66	34	187
4 Sekolah								
SD	1.874	351	311	455	528	159	-	1.804
SLTP	467	78	76	138	133	66	-	491
SLTA	311	54	84	62	56	83	-	339
PT	107	3	15	2	40	32	-	92
5 Keliling	19	1	7	3	5	19	5	40
6 Internet	23	-	8	19	3	-	34	64
Jumlah	3.245	603	584	877	852	471	74	3 461

Sumber : BPS DIY, 2016, p.269

Perkembangan minat baca masyarakat terutama yang menjangkau hingga pedesaan DIY didukung oleh peningkatan perpustakaan desa. Perpustakaan desa menjadi wahana belajar masyarakat. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2015 setiap desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan desa/kelurahan atau 100% dari 438 desa/kelurahan.

Tabel 2.92 Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota Hingga Tahun 2016

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Perpustakaan Desa							
			2012	%	2013	%	2014	%	2015/ 2016	%
1	Kota Yogyakarta	45	43	95,56	45	100	45	100	45	100
2	Bantul	75	51	68,00	60	80,00	66	86,76	75	100
3	Gunungkidul	144	106	73,61	110	76,39	120	83,72	144	100
4	Kulon Progo	88	67	76,14	71	80,68	77	86,76	88	100
5	Sleman	86	55	63,95	66	76,74	72	83,72	86	100
	Jumlah	438	322	73,52	352	80,37	380	86,76	438	100

Sumber : BPAD DIY, 2016

Kunjungan masyarakat ke perpustakaan dinilai semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Koleksi perpustakaan pun semakin beragam dan memiliki keunikan.

Tabel 2.93 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Kunjungan	Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani	Rata-rata kunjungan setiap orang
2012	201.881	2 500	81
2013	662.196	3 000	243
2014	702.270	2.500	245
2015	1.190.928.	2.719	248
2016	926.174	N/A	N/A

Sumber :BPAD DIY, 2016

Pembangunan perpustakaan di DIY telah berhasil melestarikan pustaka lama sehingga mampu menerobos zaman modernisasi dan komputerisasi. Hingga 2016, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY sebagai berikut.

Tabel 2.94 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah DIY

Tahun	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah
2012	191.988	388.484
2013	169.683	381.371
2014	169.683	387.541
2015	182.900	280.119
2016	191.012	299.665

Sumber : BPAD DIY, 2016

Layanan-layanan unggulan perpustakaan DIY yang lainnya antara lain adalah Jogja Library for All yang memadukan konsep perpustakaan, kearsipan dan permuseuman untuk koleksi pustaka dan arsip, *Center of Excellence, Kyoto Corner, Yogyasiana, Pustaka Nusantara*. Pengelolaan pustaka di DIY sudah menunjukkan inovasi teknologi melalui pelayanan pustaka dari manual ke digital, *Radio Frequency Identification (RFID)*, *Jogja Library for All, Jogja Mobile Library, Webgis, Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital* serta yang terbaru adalah *iJogja* yaitu perpustakaan digital yang dapat diakses melalui *smart phone/PC*. Otomasi pelayanan perpustakaan sudah dikembangkan secara bertahap.

Jogja Library for All (JLA) sebagai salah satu bentuk layanan *digital* merupakan sebuah aplikasi dimana data katalog bukunya bersumber pada 39 Perpustakaan di Jogja sehingga muatan informasi sangat banyak. Berbagai macam informasi dari mulai pendidikan, teknologi, sosial budaya semua ada di aplikasi Jogjalib sehingga masyarakat pada umumnya bisa menjadikan acuan portal informasi jogja tentang pendidikan maupun ilmu pengetahuan yang lain.yang mulai dirintis sejak tahun 2006. Awalnya mencakup 18 perpustakaan perguruan tinggi hingga saat ini menjadi sekitar 39 perpustakaan yaitu seperti UGM, UNY, UII, ISI, USD, UAD, UKDW, UMY, UIN Sunan Kalijaga, STMIK Amikom.

Biaya pendaftaran, masuk dan baca bagi anggota silang layan Jogjalib menjangkau semua lapisan masyarakat, layanan internet lebih cepat dan mudah terakses. Bagi Mahasiswa yang institusi pendidikannya tergabung dalam anggota Jogjalib, maka persetujuan untuk menjadi member sangatlah mudah dan cepat dikarenakan setiap anggota Jogjalib mempunyai hak akses untuk melakukan persetujuan member melalui *account admin* universitas/sekolah tinggi/sekolah menengah atas di jogjalib. Pemustaka dapat memanfaatkan sumber informasi *Jogja Library for All*, memanfaatkan sarana, prasarana dan akses informasi Perpustakaan Unit. Kartu Anggota *Jogja Library for All* tidak dapat digunakan untuk meminjam buku, hanya sebagai kartu pass/kunjung perpustakaan.

Jogja Mobile Library adalah aplikasi khusus yang di buat untuk semakin memudahkan kita mendapatkan informasi buku perpustakaan di wilayah DIY. Aplikasi ini selain untuk mencari informasi buku yang sedang

di cari di perpustakaan, bisa juga untuk mencari update informasi buku baru di perpustakaan favorit yang ada DIY. Melalui aplikasi keuntungan yang bisa dinikmati antara lain : Pertama, mengetahui lokasi perpustakaan yang memiliki koleksi buku incaran kita. Setiap hasil pencarian sekaligus memuat peta menuju perpustakaan yang dicari. Kedua, *update* informasi buku baru kapan saja dan di mana saja. Sampai saat ini, aplikasi mobile ini telah terintegrasi dengan 75 perpustakaan di wilayah DIY. Setiap ada penambahan koleksi buku baru, secara otomatis akan mendapatkan notifikasi.

Layanan *Center of Excellence* Budaya Jawa menyediakan layanan perpustakaan dan informasi yang merepresentasikan khazanah pustaka budaya se-Jawa, tidak hanya dari Yogyakarta. Koleksi berupa buku dan audiovisual yang hanya dinikmati di tempat. Kegiatan-kegiatan yang mendukung layanan *Center of Excellence* ini antara lain adalah diskusi tentang kebudayaan Jawa, macapat dan bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa. Selain itu ada layanan pustaka Nusantara yang menyajikan koleksi buku, majalah, audio visual tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia.

Aplikasi iJogja diharapkan akan mempopulerkan sistem peminjaman perpustakaan *digital* di DIY. Aplikasi ini dibuat agar dapat meningkatkan kecepatan dan kepraktisan dalam layanan perpustakaan khususnya perpustakaan *digital*. Dengan adanya aplikasi ini maka untuk meminjam buku tidak memerlukan pelayanan petugas untuk mengambilkan buku dan menerima pengembaliannya karena sudah dibatasi jangka waktu peminjamannya. Kemudian juga memperluas jangkauan layanan aksesibilitas layanan perpustakaan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu karena dilakukan secara *online* internet. Dengan aplikasi ini bisa membentuk jaringan komunitas pembaca secara *on line* pada *social media* untuk saling memberikan opini atau review atas referensi yang telah dibaca. Sehingga dapat saling membicarakan dan mendiskusikan atas apa yang telah dibacanya. Sampai akhir tahun 2016 koleksi digital BPAD DIY yang dapat dipinjam yaitu 2.232 koleksi.

Jogja Library Center yang berdiri pada masa revolusi kemerdekaan merupakan cikal bakal perpustakaan negara dan menyimpan koleksi-koleksi Yogyasiana yang berupa dokumen-dokumen yang bernilai sejarah. JLC melayani audiovisual baik film, *Compact Disc*, VCD, radio dan televisi. Layanan surat kabar dan majalah yang terbit tempo dulu hingga kontemporer tersedia di JLC Malioboro ini. Selain itu, bangunan JLC merupakan juga peninggalan bersejarah (*heritage*). Lingkungan yang mendukung minat baca dengan ruang berlantai kayu yang sejuk, koneksi internet dan wifi area, mini theater atau ruang audio visual, dan ruang diskusi. Sudut-sudut layanan yang ada di JLC antara lain adalah *Center of Excellent*, *Kyoto Corner* yaitu bentuk kerjasama dalam penyediaan layanan

pustaka dilakukan antara Pemda DIY dan Prefektur Kyoto adalah *Kyoto Corner* (Kedai Buku Kyoto) yang memiliki koleksi 481 judul, 581 eksemplar, kemudian juga ada Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital.

Rumah Belajar Modern Sewon ini merupakan proyek percontohan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya akan dikembangkan pula di Kabupaten/Kota di DIY. Fasilitas yang ada di Rumah Belajar Modern Bantul antara lain, perpustakaan anak yang sangat lengkap, arena permainan anak yang lengkap pula setelah anak membaca buku mereka bisa bermain di arena permainan atau bermain games maupun berinternet, perpustakaan keluarga, ruang kreativitas bagi masyarakat umum yang mana masyarakat membaca sekaligus mengaplikasikan kandungan bacaan seperti menyulam, merajut, membatik dan memasak, membuat hantaran pengantin dan souvenir. Selain itu disediakan juga ruang aula, arena olahraga, ruang pertunjukan, ceramah.

Gedung perpustakaan Grhatama Pustaka menyediakan satu kesatuan pelayanan yang terpadu untuk layanan perpustakaan, perkantoran, depo arsip, sudah berdiri megah di pusat perkotaan *Jogja Expo Center*. Jenis Layanan yang ada di Unit Grhatama Pustaka yaitu Lantai I : Layanan koleksi kanak-kanak, Layanan Ruang bermain Anak, Layanan Ruang musik Anak, Layanan, Ruang dongeng Anak, Layanan pemutaran film Bioskop/Cinema 6D. Lantai 2 : Layanan Keanggotaan Perpustakaan, Layanan Bebas Pustaka, Layanan Informasi & *Customer Service*, Layanan Koleksi Braile, Layanan Koleksi umum, Layanan Koleksi Referensi umum. Lantai 3 : Layanan Koleksi digital, Layanan Koleksi langka, kamus & ensiklopedia, Layanan Koleksi majalah & Koran, Layanan Koleksi tandon/penyimpanan bahan pustaka, Layanan Koleksi peraturan perundangan, Layanan Koleksi deposit, Layanan Koleksi skripsi, Layanan pemutaran film di Ruang Audio visual. Disamping itu di Grhatama Pustaka juga tersedia fasilitas berupa Free Wifi, Gazebo, Auditorium, Ruang Diskusi dan Seminar, Ruang Audio Visual, serta Mushola. Pelayanan pengunjung di Grhatama Pustaka berlangsung mulai Senin sampai Minggu dengan jam layanan hari Senin - Jumat : 08.00 s.d. 22.00, hari Sabtu : 08.00 s.d. 16.00, hari Minggu : 08.00 s.d. 16.00.

Kualitas layanan perpustakaan terpadu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan (UU Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 29 ayat1). Optimalisasi fungsi kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Perpustakaan baik di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintah sangat mendukung internasionalisasi perpustakaan.

Tantangan ke depan dalam pengembangan perpustakaan di DIY adalah menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Setiap tahun UNESCO dan tiga penerbit buku raksasa *The International Publishers Association* (IPA), *the International Booksellers Federation* (IBF), *the International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) menetapkan ibukota buku dunia

untuk kurun masa 12 bulan antara dua perayaan yaitu hari buku Internasional dan hari Hak Cipta Internasional (23 April). Kota-kota yang pernah menjadi Ibu kota Buku Dunia 6 tahun terakhir adalah: Yerevan-Armenia(2012), Bangkok-Thailand (2013), Port Harcourt-Nigeria (2014), Incheon-Korea Selatan (2015), Wroclaw-Polandia (2016) dan Conakry-Guinea (2017). Sebutan Ibukota Buku Dunia ini dipilih dan ditetapkan berdasarkan program dan peran kota-kota yang dinominasikan dalam usaha mereka memandang dan menjadikan peran penting buku dan dalam rangka mengupayakan minat membaca di kota-kota tersebut. Proses menuju Ibukota Buku di dunia perlu dimulai sejak sekarang dengan menggalang dukungan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota, penerbit, penulis, perpustakaan, dunia pendidikan, dunia kebudayaan, masyarakat, dan lainnya.

2.3.1.24 Urusan Kearsipan

Arsip sebagai sebuah aset bangsa harus dilestarikan agar generasi bangsa Indonesia dari tahun ke tahun dapat memanfaatkannya sebagai sumber informasi jati diri bangsa. Arsip harus diatur, ditata atau disusun secara sistematis dan logis agar dapat dilestarikan dan mudah ditelusuri. Pengaturan/penataan/ penyusunan arsip tentu harus berpedoman pada aturan atau kaidah kearsipan agar arsip yang disimpan dapat terjaga utuh baik fisik maupun informasinya. Pengelolaan arsip yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola kearsipan dan pelestarian warisan budaya akan menghasilkan banyak manfaat bagi pemerintah, organisasi dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya, pada setiap kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum arsip dapat pula merupakan rekaman informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan/rekaman aktifitas seseorang, rekaman peristiwa masa lalu, bukti otentik, sumber informasi, memori kolektif, dan bahan pertanggungjawaban nasional. Pengelolaan kearsipan yang berhasil akan menjadi mozaik peradaban masyarakat DIY dalam kancah pergaulan di daerah, nasional maupun di hadapan bangsa lain.

Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah, lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Selain itu melakukan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota.

Potensi kearsipan di DIY dipengaruhi oleh sejarah panjang DIY baik sebagai provinsi maupun sebagai kerajaan. Penguatan keistimewaan DIY perlu dikuatkan melalui strategi pengelolaan arsip yang optimal. Bukti-bukti otentik perjalanan peradaban DIY terkandung di dalam arsip-arsip. Banyak pihak bertanggung jawab atas penyelamatan arsip. Keberadaan arsip-arsip di DIY tersebar di seluruh kabupaten/kota, di kota lain, bahkan di negara lain. Pengadaan arsip-arsip yang hilang menjadi tantangan semua pemangku kepentingan di daerah.

Tabel 2.95 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2016

No	Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pengelolaan arsip secara baku	-	19	20	21	25
2	Jumlah arsiparis	15	15	15	15	15

Sumber : BPAD DIY, 2016

Seringkali masih terdapat persepsi yang salah dan kurang proporsional terhadap masalah kearsipan. Sebagian orang memposisikan arsip sebagai residu kegiatan setelah kegiatan dianggap selesai dan tidak menempatkan pada indikator akuntabilitas kinerja. Ketidaktahuan atau sikap meremehkan terhadap pengelolaan arsip menyebabkan tidak efektifnya manajemen kearsipan di sebagian besar lembaga pemerintahan maupun swasta. Bagi aparat pemerintah, sikap meremehkan arsip berakibat fatal yaitu hilangnya dokumen Negara, karena arsip yang tercipta di lingkungan pemerintahan merupakan dokumen pemerintah atau dokumen Negara yang dilindungi oleh undang-undang. Arsip yang diciptakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan harus mengikuti tata kelola yang telah ditentukan sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan. Sedangkan ketidaktaatan terhadap ketentuan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Dewasa ini perkembangan kearsipan tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam manajemen terutama dalam bidang pengelolaan informasi. Sementara itu kegiatan pengolahan arsip dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan,

akuisi, preservasi, akses dan layanan perlu juga dikemas dengan suatu sistem tertentu agar dapat dipergunakan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu kearsipan harus mampu membangun layanan yang bermutu, yaitu layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang meliputi materi, format, waktu, aturan dan pelayanan. BPAD DIY telah memiliki aplikasi sistem informasi kearsipan statis (SIKS) dan aplikasi sistem informasi daftar katalog khasanah arsip statis (SIDKKAS). Sistem ini dapat diibaratkan pameran virtual kearsipan DIY yang merupakan mozaik peradaban DIY dari masa ke masa untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai kaedah-kaedah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Tabel 2.96 Data Pengelolaan Arsip Statis Hingga Tahun 2016

No	Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Arsip Tekstual	2.540	2.800	7.000	27.000	53.968
2	Arsip Foto	474	674	1.000	1.500	1.986
3	Arsip Rekaman	0	0	0	2	190
4	Arsip Audiovisual	0	0	0	0	28

Sumber : BPAD DIY, 2016

Pengelolaan arsip statis meliputi: 1). Pengolahan, 2). Alih media, tulisan, dan bahasa. Arsip yang diolah dikelompokkan menjadi 4(empat) kategori yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip rekaman, arsip audiovisual.

Tabel 2.97 Data Alih Media Hingga Tahun 2016

No	Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Alih Media	9.619	11.619	33.939	76.085	97.585
2	Alih Tulisan	5.799	6.549	7.299	7.826	7.826
3	Alih Bahasa	4.208	5.131	6.260	8.260	8.260

Sumber : BPAD DIY, 2016

Hingga akhir tahun 2016, Pemda DIY melalui BPAD telah mengupayakan akuisisi terhadap arsip-arsip yang sangat bernilai dalam menggambarkan mozaik peradaban masyarakat DIY sejak awal berdirinya. Kegiatan akuisisi dilakukan dengan dua cara yaitu penarikan arsip statis dan reproduksi dengan cara mengkopi/scanning arsip tersebut. Beberapa akuisisi tersebut, antara lain menyangkut arsip lembaga pengairan jaman Hindia Belanda, arsip seniman, arsip pemilu 2004 dan 2009, arsip museum di DIY, arsip-arsip gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, arsip sejarah keistimewaan DIY, arsip pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Rafles serta arsip yang berada di Belanda dan Inggris, contohnya seperti register nilai rapor GRM. Dorodjatoen di HBS Harlem, otentifikasi

arsip GRM. Dorodjatoen dari Leiden Universiteit Bliothek dan Noord Holland Archief, Serat Jaya Lengka Wulang, Serat Sela Rasa, dan Serat Damar Wulan. Pemda DIY juga telah memperoleh buku berjudul “*Indonesian Manuscript in Great Britain*” dari *British Library*.

Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun. Penanganan arsip dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) meliputi: penanganan arsip tekstual, arsip kartografi, serta arsip foto. Arsip inaktif tekstual adalah informasi yang direkam/dicatat diatas lembaran kertas, seperti surat hasil korespondensi, laporan mingguan, berkas-berkas, arsip inaktif kartografi adalah informasi yang berupa peta. Dalam hal ini tidak termasuk gambar-gambar yang berkaitan dengan kearsitekturan.

Tabel 2.98 Data Arsip Inaktif Hingga Tahun 2016

No	Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Arsip Inaktif Tekstual	45.739	50.800	57.800	77.800	77.800
2	Arsip Inaktif Kartografi	2.153	2.691	4.691	4.691	4.691
3	Arsip Inaktif Foto	15.587	39.308	40.308	40.808	40.808

Sumber : BPAD DIY, 2016

Depo arsip yang menjadi impian Pemda DIY yang akan menjadi pusat pengelolaan dan pelayanan arsip daerah secara terpadu dengan sistem yang lebih optimal akan dilanjutkan secara bertahap pembangunannya meliputi struktur dan atapnya mulai tahun 2017 ini. Depo arsip ini nantinya akan dilengkapi diorama-diorama yang menunjukkan sejarah terbentuknya DIY. Diharapkan semua ragam arsip dari zaman ke zaman dapat terlestarikan baik secara informasi maupun fisik arsipnya.

Ada beberapa faktor penyebab mengapa penyelenggaraan kearsipan tidak berjalan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu masyarakat masih memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang arti pentingnya arsip. Faktor lainnya adalah para pemimpin organisasi dan penyelenggara pemerintahan belum menempatkan bidang kearsipan seimbang dengan nilai pentingnya arsip yang sebenarnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berakibat pada alokasi sumber daya pendukung untuk penyelenggaraan kearsipan dirasakan masih sangat kurang memadai di setiap satuan organisasi pemerintah.

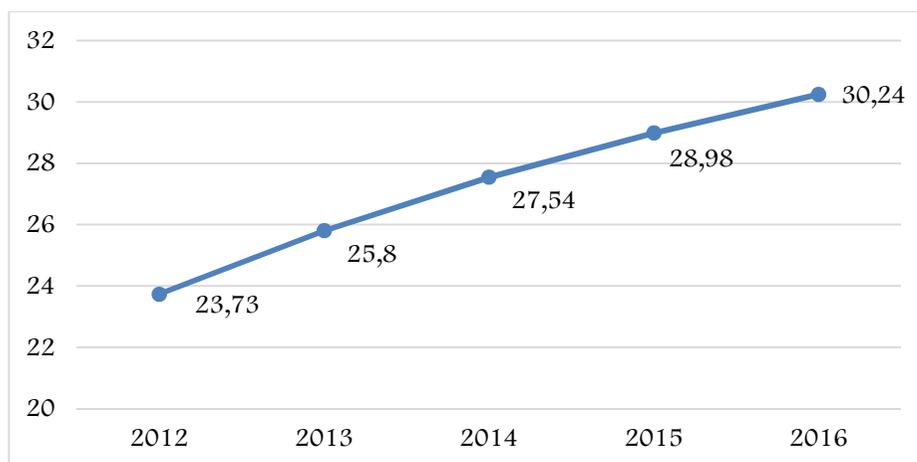
Belum jelasnya pembagian tugas antara ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Propinsi, LKD Kabupaten/Kota menyebabkan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar Lembaga Kearsipan yang belum memiliki pola yang menunjukkan harmonisasi dan produktifitas kerja yang memadai.

2.3.2 Fokus Urusan Konkuren Pilihan

2.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

A. Kondisi Umum

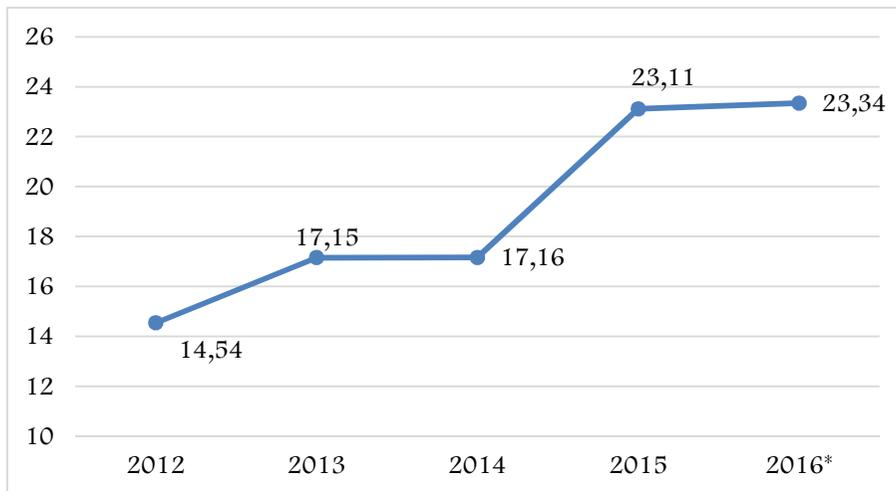
Ketersediaan ikan per kapita DIY mengalami kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di DIY yang terus tumbuh terutama pada budidaya perikanan. Walaupun demikian, ketersediaan ikan di DIY masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari luar daerah. Tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017

Gambar 2.74 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2012-2016

Tingkat konsumsi ikan perkapita juga cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Rata-rata pertumbuhan konsumsi ikan DIY dalam periode tahun 2012 hingga 2016 sebesar 11,24%. Namun demikian konsumsi ikan DIY masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Oleh karena itu, penggiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diinisiasi Pemda DIY melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Tingkat konsumsi ikan perkapita di DIY dapat dilihat dalam gambar berikut:



*) Angka Sementara
 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017

Gambar 2.75 Tingkat Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2012-2016

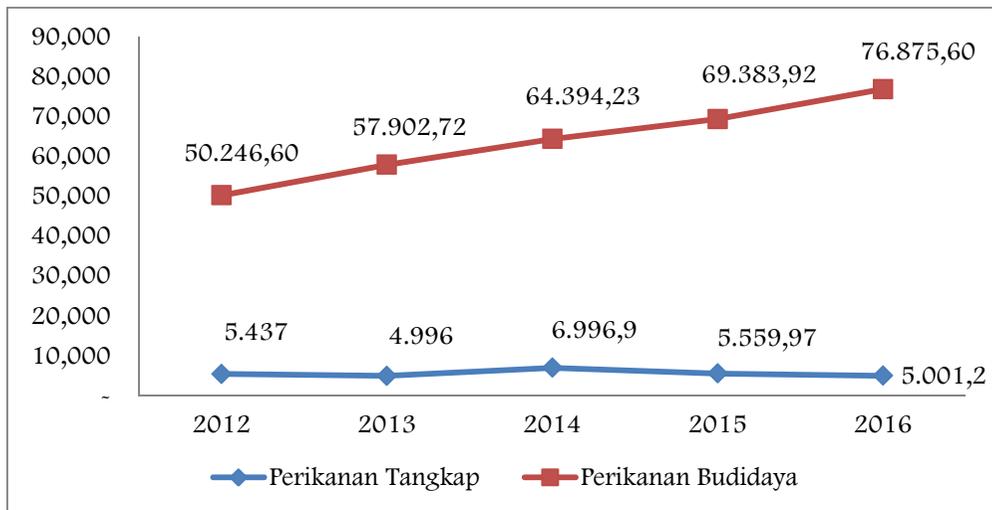
Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan DIY terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012. Jumlah produksi perikanan DIY selama periode 2012-2016 rata-rata tumbuh sebesar 18,12%. Produksi perikanan di DIY juga mendukung capaian target produksi ikan nasional sebesar 16 juta ton pada tahun 2017 dan 17,3 juta ton pada tahun 2018.



Gambar 2.76 Pemanfaatan Embung untuk Budidaya Perikanan

Produksi perikanan budidaya mendominasi jumlah produksi perikanan DIY secara keseluruhan. Kontribusi rata-rata perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan DIY selama lima tahun terakhir mencapai 91,79%, dimana pada tahun 2016 memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 93,89%. Hal ini dikarenakan keberhasilan budidaya perikanan air tawar khususnya di kabupaten Sleman yang selama ini menjadi basis pengembangan perikanan budidaya. Selain itu didukung pula dengan bertambahnya usaha budidaya lahan kering di Gunungkidul dan Kulon Progo dengan menggunakan sistem terpal, serta pemanfaatan embung untuk budidaya perikanan. Sementara kontribusi perikanan tangkap cenderung menurun dari 9,76% pada tahun 2012 menjadi 6,11% pada tahun 2016, bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,42%. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan terjadinya *over fishing* dan *illegal fishing* serta belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap seperti Kapal Inka Mina 30 GT dan penerapan teknologi penginderaan jarak jauh untuk mencari titik penangkapan ikan. Di sisi lain, budaya melaut yang masih tergolong baru ditambah dengan nelayan tangkap DIY yang sebagian besar merupakan nelayan sambilan dimana bertani menjadi mata pencaharian pokok, hal ini menyebabkan upaya peningkatan aktivitas penangkapan ikan di laut tidak mudah dilakukan dan masih memerlukan waktu lebih lama. Namun demikian, faktor cuaca yang tidak menentu adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY dikarenakan factor cuaca menyebabkan berkurangnya jumlah trip nelayan untuk melaut. Sehingga kedepannya perlu adanya optimalisasi teknologi prakiraan cuaca di laut serta mitigasi bencana laut, agar kedepannya nelayan dapat menentukan trip melaut yang dapat dilakukan.

Untuk mengetahui pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di DIY dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017

Gambar 2.77 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya DIY (Ton), Tahun 2012-2016

B. Isu Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

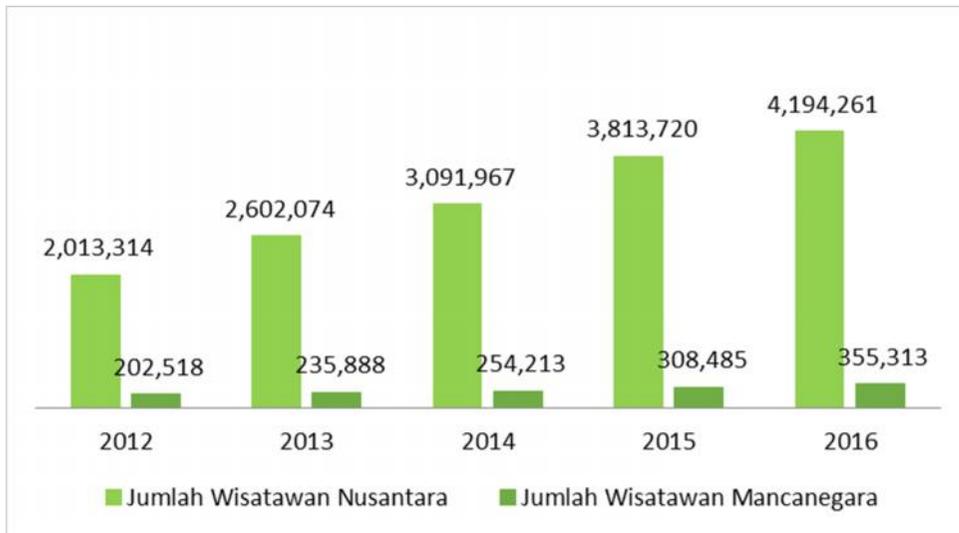
Isu strategis sektor kelautan dan perikanan DIY : masyarakat belum mempunyai budaya perikanan dan kelautan (budaya bahari) sebagai nelayan yang kuat karena sebagian petani dan perlu rekayasa sosial untuk merubah pola pikir (*mind set*), penyelesaian dan beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarta serta revitalisasi Pelabuhan Perikanan Sadeng mendesak dibutuhkan sebagai klaster pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan kapal INKAMINA (>30GT) masih jauh dari kemampuan dan kapasitasnya, biaya operasional nelayan untuk melaut tinggi (khususnya BBM dan sarana dingin (es) untuk distribusi hasil tangkapan terbatas, pembangunan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya belum menerapkan prinsip MINABISNIS dan MINAINDUSTRI, penerapan usaha perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, yang bertanggung jawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF*), ketersediaan induk ikan unggul terbatas dan harga pakan ikan terus naik, penataan kawasan tambak udang di Selatan DIY yang ramah lingkungan, produktif dan berkelanjutan perlu dipercepat, produksi perikanan belum mencukupi kebutuhan sendiri, peningkatan standarisasi, sertifikasi mutu dan keamanan produk perikanan menyambut Pasar Bebas MEA, konsumsi ikan masyarakat DIY relatif rendah dibanding tingkat nasional, penetapan wilayah konservasi pesisir dan rehabilitasi, melakukan pembudidayaan perikanan air laut sebagai alternatif menutup kekurangan komoditas perikanan tangkap, serta sesuai dengan pokok-pokok pikiran dewan yang sudah dibahas dengan TAPD

perlu adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi LAPAN untuk mengoptimalkan penangkapan ikan di laut.

2.3.2.2 Urusan Pariwisata

Sesuai dengan visi Pembangunan DIY, tujuan yang ingin dicapai dalam sektor Pariwisata DIY adalah mewujudkan DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Salah satu indikator perhitungan perkembangan pariwisata DIY yang digunakan adalah dengan peningkatan jumlah wisawatan di DIY dan jumlah destinasi wisata yang berskala Internasional.

Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan jumlah wisawatan di DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada jumlah wisawatan nusantara. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 4.549.574 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 4.194.261 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 355.313 orang. Secara keseluruhan jumlah tersebut meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lima besar wisatawan mancanegara yang mengunjungi DIY adalah wisawatan yang berasal dari Negara Belanda, Jepang, Malaysia Perancis, dan Singapura.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY Tahun 2017* (*data sementara)

Gambar 2.78 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2012-2016

Sementara indikator lama tinggal wisawatan di DIY pada tahun 2016 capaiannya tidak mengalami perbedaaan yang signifikan tiap tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola kecenderungan wisawatan memanfaatkan libur pendek akhir pekan (*weekend*). Selain itu faktor

ketergantungan yang kuat dengan destinasi lainnya, dalam hal ini DIY masih menjadi daerah wisata alternatif setelah Bali, Jakarta, dan Bandung bagi wisatawan mancanegara.

Tabel 2.99 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2012-2016

Uraian			2012	2013	2014	2015	2016
lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)			1,82	1,90	1.95	2.07	2
lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)			1,56	1,59	1.58	1.85	1,9

Sumber: Dinas Pariwisata DIY Tahun 2017* (*data sementara)

Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan di DTW Kab/Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan di DTW mengalami kenaikan dari 18.435.445 orang pada tahun 2015 menjadi 19.753.145 orang pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 7%. Peningkatan tersebut tergolong belum signifikan karena jumlah daerah tujuan wisata baru di DIY yang tidak banyak mengalami peningkatan, untuk tahun 2016 sebanyak 92 DTW atau hanya bertambah 3 DTW apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 89 DTW. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah pembatasan kegiatan penyelenggaraan *Meetings Incentives Conferencing Exhibitions* (MICE) di Hotel bagi aparatur pemerintah.

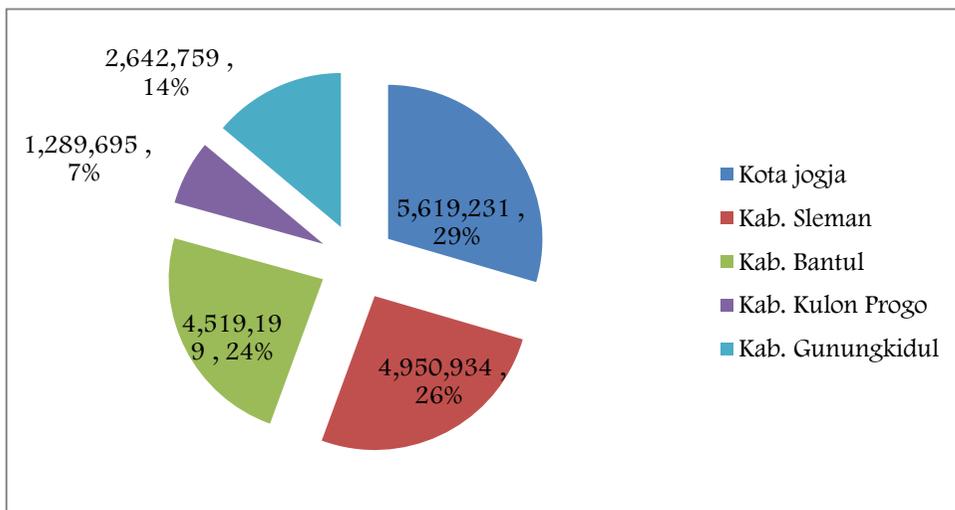


Sumber: Dinas Pariwisata DIY Tahun 2017* (*data sementara)

Gambar 2.79 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan DTW di DIY, Tahun 2012-2016

Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Kab/kota, pada tahun 2015 peningkatan sebesar 7 % jika dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung daerah tujuan wisata (DTW) sebesar 18.435.445 orang, sementara untuk tahun 2016 berhasil mencapai 19.753.145 orang pengunjung. Peningkatan tersebut tidak jauh berbeda dengan kinerja peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan wisatawan yang tertarik ke DTW wilayah DIY mulai mengalami kejenuhan terhadap daya tarik wisata yang ada. Pertumbuhan pariwisata DIY yang sebelumnya didorong dari peningkatan penyelenggaraan *Meetings Incentives Conferencing Exhibitions* (MICE) pada tahun 2014 diperkirakan mengalami penurunan jumlah kegiatan MICE terkait pembatasan kegiatan pertemuan di Hotel. Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah kurangnya destinasi wisata dan *event* berskala internasional

Meskipun secara keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan di DIY mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi persentase di kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Jumlah kunjungan wisatawan di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius untuk diupayakan pemerataan sebaran kunjungan wisatawan di DIY supaya titik kemacetan dan keramaian tidak hanya terpusat di Kota Yogyakarta dan Sleman.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY Tahun 2017* (*data sementara)

Gambar 2.80 Sebaran Pengunjung ODTW di Kabupaten Kota Tahun 2015

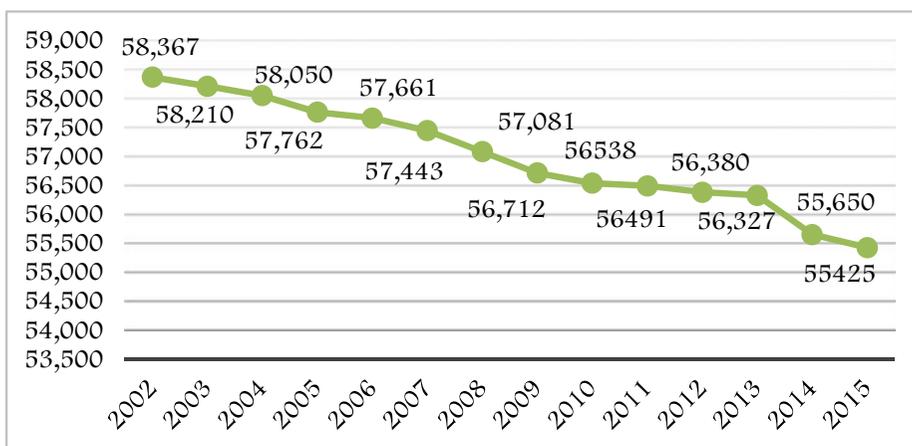
Kedepannya, pengembangan kepariwisataan di DIY harus dikembangkan dan dikelola pada pemasaran yang lebih tersegmentasi

(*mass tourist, special interest tourist*) baik pada daya tarik wisata alam, budaya, maupun minat khusus. Pengembangan kepariwisataan di DIY sudah semestinya dikembangkan secara *sustainable tourism development*, dimana dalam pengembangan destinasi baru harus menjaga kelangsungan destinasi yang ada dan membentuk reputasi destinasi untuk menciptakan keunikan dan keunggulan. Untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan manajemen SDM dan kelembagaan yang memadai melalui pelatihan-pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata. Selain itu penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi-lokasi daya tarik wisata (jaringan jalan, area parkir, penataan rute jalur/ rute wisata dan angkutan umum) perlu dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat menumpuknya wisatawan yang berkunjung di satu lokasi daya tarik wisata.

2.3.2.3 Urusan Pertanian

Kondisi Umum

Sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi tiga besar penyumbang PDRB di DIY, yaitu sebesar 10,7% pada tahun 2015. Namun kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011 - 2015. Hal ini disebabkan adanya kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian rata-rata sebesar 0,40% per tahun selama kurun waktu 2002-2015. Alih fungsi lahan itu lebih banyak terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Sehingga alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini mejadi isu strategis DIY agar laju alih fungsi lahan tidak semakin besar. Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber BPS 2016

Gambar 2.81 Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY

Secara umum kondisi sawah di DIY dibagi menjadi sawah beririgasi dan sawah non irigasi atau sawah tadah hujan, dimana luasan sawah beririgasi mengalami penurunan dari tahun ketahun, namun untuk sawah non irigasi/tadah hujan justru mengalami kenaikan. Data luas lahan sawah irigasi dan non irigasi/tadah hujan dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.100 Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Sawah Beririgasi	47.015	46.926	46.300	45.976	45.976
Sawah Non Irigasi	9.349	9.401	9.350	9.449	9.449

Sumber : *Jogja Dataku*

Sektor pertanian di DIY terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Namun yang menjadi core utama pertanian adalah tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Produksi tanaman pangan di DIY pada tahun 2016 meningkat 1.482 ton (0,73%) dibanding tahun 2015 menjadi 2.204.717 ton. Kenaikan produksi ini dikarenakan penerapan adanya upaya khusus terutama pada tanaman padi, jagung dan kedelai pada tahun 2016, meskipun terjadi kendala adanya perubahan iklim sehingga berpengaruh pada mundurnya masa tanam.

Produksi tanaman pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101 Produksi Tanaman Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 (Ton)

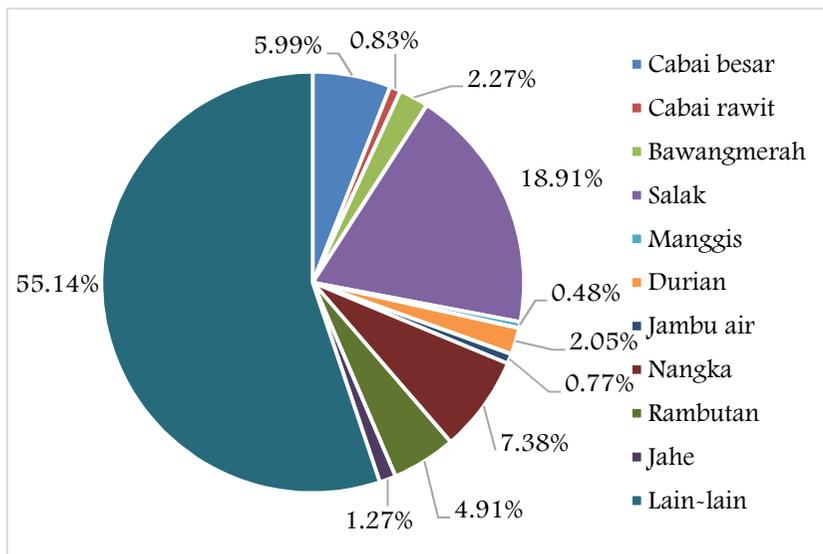
No	Jenis Tanaman	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016*)	
1	Padi Sawah	737.446	721.674	719.194	746.810	712.282	-0,82
	Padi Ladang	208.778	200.150	200.379	198.326	170.417	-4,78
	Total Padi	946.224	921.824	919.573	945.136	882.699	-1,66
2	Jagung	336.608	289.580	312.236	299.084	310.257	-1,66
3	Kedelai	36.033	31.677	19.579	18.822	16.677	-16,39
4	Kacang Tanah	62.901	70.834	71.582	83.300	75.816	5,26

No	Jenis Tanaman	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016*)	
5	Kacang Hijau	300	318	261	230	289	0,46
6	Ubi Kayu	866.357	1.013.565	884.931	873.362	915.667	1,96
7	Ubi Jalar	5.047	4.951	5.237	6.070	3.256	-6,64
8	Cantel/ Sorghum	211	135	145	51	56	-20,91

*)Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016

Produksi tanaman hortikultura di DIY juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 389.573 ton menjadi 392.421 ton pada tahun 2016, melebihi target tahun 2016 sebesar 390.900 ton. Bila diperinci lebih lanjut, dapat diketahui bahwa komoditas Salak merupakan kontributor terbesar dalam produksi hortikultura di DIY tahun 2016, yaitu sebesar 18,91%. Komoditas tersebut banyak dikembangkan di daerah Sleman bagian Utara (Turi, Cangkringan, dan Pakem). Sementara itu, komoditas Nangka merupakan kontributor terbesar kedua dengan sumbangan sebesar 7,38%. Proporsi produksi hortikultura DIY pada tahun 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini:



Gambar 2.82 Proporsi Produksi Holtikultura di DIY Tahun 2016

Sedangkan untuk sub sektor peternakan jumlah populasi ternak tahun 2016 mengalami peningkatan 2,09% bila dibandingkan dengan

tahun sebelumnya menjadi 620.516 animal unit. Peternakan di DIY masih didominasi ternak sapi potong dan ternak kecil, sedangkan ternak sapi perah tidak terlalu banyak, hal ini dikarenakan iklim dan topografi DIY tidak terlalu cocok untuk pengembangan ternak sapi perah, kecuali di kabupaten Sleman.

Populasi ternak sapi potong sebagian besar berasal dari Gunungkidul dengan kontribusi sebesar 48,45%. Sementara Sleman berkontribusi sangat besar terhadap populasi sapi perah dengan peranan sebesar 92,71%. Sleman juga menyumbang jumlah populasi kerbau terbesar DIY dengan proporsi sebesar 46,11%.

Sementara itu untuk kendala pada sub sektor peternakan adalah masalah hijauan pakan ternak untuk jenis ternak *rajakaya* sedangkan untuk unggas terkendala harga pakan yang tinggi dan kekhawatiran merebaknya virus *AI (Avian Influenza)*. Untuk target dan capaian urusan pertanian tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.102 Target dan Capaian Urusan Pertanian di DIY Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah produksi tanaman pangan	ton	2.203.235	2.203.677	2.206.118	100,11
2.	Jumlah produksi hortikultura	ton	383.913	390.900	391.020	100,03
3.	Jumlah populasi ternak	Animal unit	607.709	620.320	620.516	100,03

Sumber: Analisis Dinas Pertanian DIY 2017

2.3.2.4 Urusan Kehutanan

Kondisi umum

Wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2016 seluas 97.018,26 Ha yang didominasi hutan rakyat dengan luasan 78.303,20 Ha dan sisanya 18.715,06 Ha merupakan hutan negara. Wilayah hutan (baik hutan rakyat dan hutan negara) pada wilayah DIY sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki luasan sebesar 59.006,37 Ha, terdiri dari 44.110,87 Ha (hutan rakyat) dan 14.895,50 Ha (hutan negara, termasuk hutan AB).

Proporsi luasan hutan Gunungkidul terhadap luas hutan total DIY meningkat sebesar 0,24% dibanding tahun 2015. Kontribusi luas hutan Sleman juga meningkat 0,18% dibandingkan tahun lalu, walaupun kontribusinya merupakan yang terendah. Sementara di sisi lain, kontribusi

hutan di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo justru menurun dibanding tahun 2015 masing-masing sebesar 0,31% dan 0,11%.

Tabel 2.103 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2016

Kabupaten	Hutan Negara (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Total Hutan (ha)	% Total hutan
Gunungkidul	14.895,50	44.110,87	59.006,37	60,82
Bantul	1.052,60	8.595,5	9.648,10	9,94
Sleman	1.729,46	4.801,23	6.530,69	6,73
Kulon Progo	1.037,50	20.795,6	21.833,10	22,51
Hutan di DIY	18.715,06	78.303,20	97.018,26	100,00

Sumber : Dishutbun DIY & BPS DIY, 2017

Berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas: hutan produksi 13.411,70 Ha, Hutan lindung 2.312,80 Ha, Hutan konservasi 2.990,56 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,60 Ha). Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts-II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB juga dikelompokkan menjadi hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi di DIY dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dishutbun DIY). Potensi hutan produksi (13.411,70 ha) di DIY di dominasi oleh tanaman jati (50,79%) dan tanaman kayu putih (34,32%). Saat ini, hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Pengembangan tanaman kayu putih di DIY mengalami kendala produktivitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat sekitar hutan dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 2.104 Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY , Tahun 2012-2016

Tahun	Produksi daun (ton)	Produksi MKP (liter)	Nilai Pejualan (Rp.)
2012	4.774,48	46.321,00	7.581.060.000
2013	4.743,77	44.669,00	7.561.000.000
2014	5.003,50	47.641,00	9.973.126.000
2015	4.532,00	43.825,00	8.374.957.500
2016	3.340,00	31.247,00	5.311.990.000

Sumber : analisa data Dishutbun DIY, 2016

Luas lahan kritis di DIY pada tahun 2015 adalah 25.378,25 Ha, lebih baik dari target pada tahun 2015 seluas 26.000 Ha. Hal ini dikarenakan tingkat rehabilitasi hutan di DIY meningkat sebesar 0,01%.

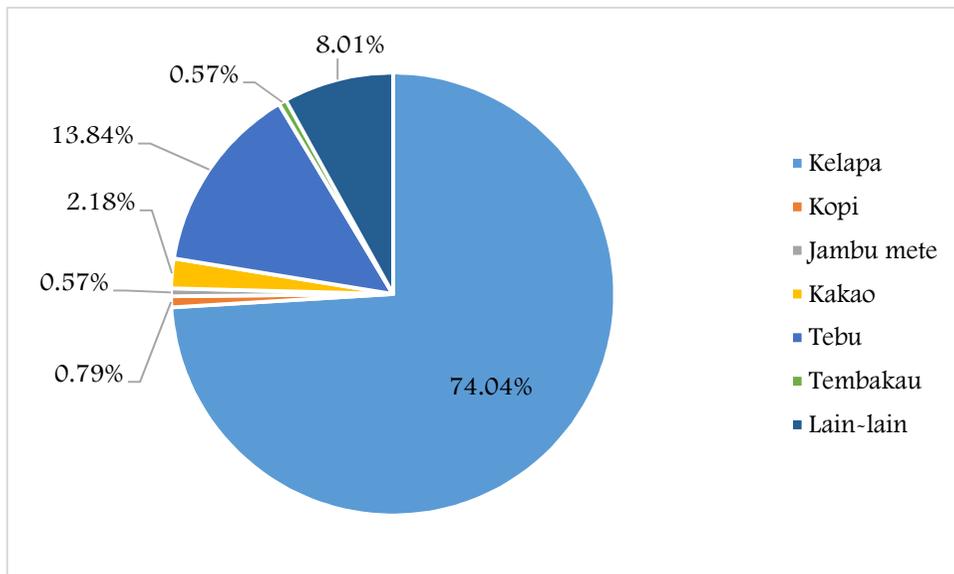
Wilayah DIY yang memiliki lahan kering dengan topografi bergelombang (berbukit/bergunung) menyebabkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, diantaranya: kelapa, kakao, kopi, tembakau, dan tebu. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut memiliki cakupan luas yang cukup besar, prospek pasar yang potensial, nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu).

Tabel 2.105 Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY, tahun 2012-2016

Komoditas Perkebunan Strategis (Ha)	2012	2013	2014	2015	2016*)
Kelapa	43.371,38	43.815,39	43.453,02	43.016,86	42.835,26
Kakao	4.811,00	5.012,15	5.117,13	5.155,75	5.065,97
Kopi	1.778,84	1.725,92	1.746,50	1.737,59	1.703,43
Tembakau	2.209,52	2.310,90	2.396,14	2.058,80	700,80
Tebu	3.613,13	3.602,66	3.400,54	3.357,00	3.228,21

Sumber: analisis data Dishutbun DIY & BPS Provinsi DIY. *) Angka Sementara

Sementara bila dilihat lebih rinci, dapat diketahui bahwa komoditas kelapa merupakan kontributor utama yang mendominasi produksi perkebunan di DIY pada tahun 2016 dengan peranan sebesar 74,04%. Sedangkan komoditas strategis tebu merupakan penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 13,84%. Selengkapnya mengenai kontribusi produksi perkebunan DIY disajikan dalam grafik berikut.



Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2017 (diolah)

Gambar 2.83 Grafik Proporsi Produksi Perkebunan DIY Tahun 2016

Agribisnis perkebunan yang berdaya saing dengan nilai tambah yang berkelanjutan akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, perbaikan produktivitas dan penanganan mutu produk yang dihasilkan. Pengolahan produk dilakukan dengan mengintegrasikan nilai tambah yang sesuai dengan selera pasar. Sementara upaya pemanfaatan peluang pasar yang memadai dilakukan melalui branding yang tepat dan berkelanjutan. Penerapan agribisnis dilakukan melalui intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna dan penguatan tingkat kemampuan petani serta kelembagaan petani dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis yang memadai.

Efisiensi usaha tani diharapkan dapat tercapai apabila produksi yang optimal dapat diimbangi dengan biaya produksi yang efisien. Terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di DIY, maka langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktivitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk mampu memenuhi permintaan dan selera pasar.

2.3.2.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Peningkatan kebutuhan energi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Rencana pembangunan simpul-simpul ekonomi baru di DIY seperti pembangunan kawasan-kawasan industri, bandara baru

internasioonal Yogyakarta, kawasan cagar budaya, serta kawasan pertumbuhan ekonominya lainnya pasti akan memerlukan energi yang cukup besar. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana energi di DIY ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya energi lokal. Pengembangan dan pemanfaatan energi berupa pembangkit listrik dan energi bahan bakar terus didorong keberlanjutannya, ditujukan untuk membangun keamanan energi, keadilan energi, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan akses energi masyarakat.

Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Berdasarkan data rata - rata rasio elektrifikasi PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta tahun 2015 wilayah D. I. Yogyakarta adalah untuk kota Yogyakarta 68,52%, Kabupaten Bantul 97,17%, Kulonprogo 88,91%, Sleman 87,78%, Gunungkidul 80,10% dan total rasio elektrifikasi D.I. Yogyakarta sebesar 86,27%, dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi terkecil pada wilayah Kota Yogyakarta.

Pemerintah daerah DIY pada tahun 2016 melakukan *updating* data dan sinkronisasi pemenuhan rasio elektrifikasi untuk mengkaji potensi peningkatan rasio elektrifikasi yang meliputi Pemetaan terhadap jumlah rumah tangga berlistrik sebagai pelanggan PLN, Pemetaan terhadap jumlah rumah tangga (KK) yang listriknnya masih menyalur, pemetaan terhadap jumlah rumah tangga (KK) yang belum berlistrik.

Hasil pemetaan tersebut diperoleh data rumah tangga belum berlistrik sekitar 333 rumah tangga. Jumlah rumah tangga belum berlistrik tersebut nilainya cukup kecil. Apabila diinputkan di dalam perhitungan rasio elektrifikasi seharusnya rasio elektrifikasi di DIY bisa mencapai 96,31% dengan rincian untuk kota Yogyakarta 99,86%, Kabupaten Bantul 99,22%, Kulonprogo 94,08%, Sleman 99,995%, Gunungkidul 84,69%.

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Kebijakan diversifikasi energi atau penganekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan biogas.

Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di tahun 2015 dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik, mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan dan pemanfaatan bio energi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 Kg bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Pada tahun 2015 pencapaian Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY sebesar 118.153,28 SBM dari target sebesar 117.950 SBM. Realisasi pencapaian target di tahun 2015 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM sebesar 13.600 *watt peak* di Kabupaten Gunungkidul atau setara 187,27 SBM;
- 2) Pemasangan 200 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari APBD DIY di 10 unit gedung Pemda DIY atau setara 206,54 SBM;
- 3) Pembangunan Digester Biogas sebanyak 50 unit dari APBD DIY di Kabupaten Sleman, 150 unit dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kabupaten Gunungkidul dan 50 unit dari Yayasan Rumah Energi (YRE) dengan lokasi tersebar di DIY atau total setara 693,03 SBM;
- 4) Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebesar 30 kW di Kabupaten Kulonprogo dan 8 kW di Kabupaten Sleman atau setara 523,24 SBM.

Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah menuju keamanan energy berdasarkan produksi energi setempat. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY yang terpasang pada tahun 2015.

Tabel 2.106 Data Jenis Energi Baru Terbarukan

JENIS EBT	POTENSI		TERPASANG 2015	
	Kapasitas	TOE	Kapasitas	TOE
PLTS	10 MWp	301	200kWp	0.32
PLTMH	2 MW	817	882 kW	358
PLT Bayu	100 MW	165.920	131 kW	24,6
PLT Bagasse	3.6 MVA / 2.5 MW	929	3.6 MVA / 2.5 MW	873
PLT Sampah	30 MW	9,040	5 kW	2
Bioethanol	36 Juta Liter	18.060	5 juta	2.508
Biogas Ternak Sapi	15,000 unit	2.768	1.500 Unit	328
Biogas Sanitasi	500 unit	92	100 Unit	11
Biogas Ampas	500 Unit	91	10 Unit	2

Tahu				
Biomassa Pellet	1,500 Ton	548	600 Ton	219
DME	20 Lokasi		1 Lokasi	
Total Energi (TOE)	98.567		4.388	

Pada tahun 2016 pencapaian target Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY sebesar 123.590 SBM ditempuh melalui kegiatan pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga sebanyak 120 unit di Kabupaten Sleman, 230 unit di Kabupaten Gunungkidul, 130 unit di Kabupaten Bantul, 120 unit di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga pembangunan PLTS tersebar di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 100 unit dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 100 unit. Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro *off grid* sebanyak 3 unit juga dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Rerata Penurunan Muka Air Tanah

Pelaksanaan sub urusan air tanah guna mempertahankan rerata penurunan muka air tanah di DIY Tahun 2015, diprioritaskan dengan upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan air tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan muka air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta-Sleman tetap dalam kondisi aman yaitu penurunan muka air tanah <20% terhadap tebal rata – rata akuifer yaitu sebesar 100 meter.

Kondisi muka air tanah pada musim hujan terbasah di CAT Yogyakarta-Sleman pada tahun 2014 adalah sebesar 7,28meter atau 7,28% terhadap rata-rata tebal akuifer dan pada musim kemarau terkering sebesar 9,35meter atau 9,35% terhadap rata-rata tebal akuifer. Sedangkan pada tahun 2015 adalah sebesar 6,81meter (6,81% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 6,46% pada musim hujan terbasah dan sebesar 9,22 meter (9,22% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 1,39% pada musim kemarau terkering. Dengan melihat kondisi muka air tanah pada musim kemarau dan musim hujan di tersebut diatas, rerata muka air tanah di CAT Yogyakarta – Sleman tahun 2015 masih <20% terhadap tebal rata – rata akuifer sesuai target tahun 2015.

Pada tahun 2016 dilakukan peningkatan upaya konservasi dan pemantauan muka air tanah untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah tetap pada kondisi <20%, melalui kegiatan :

- a) Pembangunan 100 unit sumur resapan air tanah;
- b) Konservasi air tanah paling sedikit 150,72 m³ di 100 titik;
- c) Pembangunan 5 unit sarana pemantauan air tanah dalam;

- d) Pemeliharaan/perbaikan 3 unit sumur pemantauan air tanah dalam.

Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi

Dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050. Sebagai upaya mencapai target tersebut, dilakukan pendekatan konservasi energi di berbagai sektor. Pelaksanaan konservasi energi melalui APBD DIY Tahun 2015 diprioritaskan untuk sektor publik yaitu gedung pemerintah, yang dilakukan melalui pelaksanaan audit energi gedung pemerintahan khususnya milik pemerintah daerah. Pelaksanaan audit energi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik.

Pada tahun 2014, pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan melalui kegiatan audit energi sebesar 10% (15 gedung pemerintah terhadap 150 gedung pemerintah). Adapun target pelaksanaan konservasi energi sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 9% (14 gedung pemerintah), dengan realisasi sebesar 18 % (27 gedung pemerintah).

Pencapaian Kinerja Pengelolaan Bahan Bakar

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan sub urusan bahan bakar berada di Pemerintah. Namun untuk menjagakelancaran pasokan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi di DIY, Pemda DIY berkoordinasi dengan HISWANA MIGAS DIY dan PT. Pertamina (Persero) dalam rangka pembinaan terhadap para penyalur bahan bakar bersubsidi.

Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pembinaan terhadap 360 penyalur (60 % dari 600 penyalur bahan bakar yang perlu ditingkatkan kinerja kelancaran distribusinya). Sedangkantarget peningkatan kinerja Pengelolaan Bahan Bakar tahun 2015 sebesar 60% (360 penyalur) dengan realisasi sebesar 75 % (450 penyalur). Capaian realisasi tersebut dilakukan melalui pembinaan terhadap 90 penyalur bahan bakar bersubsidi yang dilakukan oleh HISWANA MIGAS DIY dan PT. Pertamina (Persero);

Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan

Peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan APBD 2015 dilakukan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah mineral dan batuan dengan mewajibkan melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan maupun dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan. Sampai dengan tahun 2015, pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan adalah sebesar 11% (5 pemegang Izin

Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan dari total potensi izin sebanyak 45).

2.3.2.6 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dominan pendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY dapat dilihat dari kegiatan ekspor. Pada tahun 2016, nilai ekspor DIY tercatat senilai 252,18 Juta US\$ dengan jumlah komoditi yang diekspor sebanyak 88 komoditi, jumlah eksportir sebanyak 286 ekportir serta terdapat 112 negara tujuan ekspor. Jumlah nilai ekspor tersebut meningkat sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya sebesar 242,47 Juta US\$. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh 3 (tiga) komoditas utama ekspor yaitu produk Pakaian jadi bukan rajutan, Perabot dan penerangan rumah, serta Barang-barang rajutan. Tujuan ekspor komoditas DIY terutama pada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, dan Inggris.

Tabel 2.107 Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Volume (Juta kg)	33,54	34,03	57,51	56,90	57,01
Nilai (Juta US \$)	177,07	211,76	233,25	242,47	252,18
Komoditi	108	127	166	110	88
Negara	98	111	114	115	112
Eksportir	235	286	310	325	286

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017

Perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tercatat pada tahun 2012-2016 jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar di DIY mengalami peningkatan tiap tahunnya. Realisasi jumlah kumulatif penerbitan SIUP pada tahun 2016 sebanyak 48.517 SIUP, tumbuh sebesar 4,10% apabila dibandingkan dengan realisasi SIUP pada tahun sebelumnya. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh golongan pengusaha kecil sebesar 87,01%.

Tabel 2.108 Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2012-2016

No	Golongan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pengusaha Besar	1.040	1.057	1.067	1.076	1.094
2	Pengusaha Menengah	2.316	2.629	2.717	2.684	2.872
3	Pengusaha Kecil	38.589	40.132	40.710	40.861	42.217
4	Pengusaha Mikro	872	1.644	1.821	1.986	2.334
Jumlah		42.817	45.462	46.855	46.607	48.517

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017

Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sepanjang tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Realisasi jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) DIY Per Kabupaten / Kota pada tahun 2016 sebanyak 52.142 unit, tumbuh sebesar 4,33% dari tahun sebelumnya. Mayoritas TDP pada tahun 2016 dimiliki oleh pengusaha di Kota Yogyakarta sebesar 29,25%, diikuti oleh pengusaha di Kab. Sleman (28,26%), dan pengusaha di Kab. Bantul (21,41%).

Tabel 2.109 Perkembangan Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Per Kabupaten Kota, Tahun 2012-2016

No	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bantul	6.670	9.571	10.152	10.627	11.163
2	Sleman	9.440	13.308	13.815	14.294	14.737
3	Kulonprogo	2.427	3.875	3.880	4.598	5.316
4	Gunungkidul	4.799	5.144	5.430	5.578	5.676
5	Yogyakarta	12.724	13.689	14.448	14.879	15.250
Jumlah		41.479	45.587	47.725	49.976	52.142

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perkembangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berdasarkan bentuk perusahaan terus mengalami pertumbuhan tiap tahun. Mayoritas TDP dimiliki oleh perusahaan perorangan (PO). Pada tahun 2016, perusahaan perorangan (PO) masih mendominasi kepemilikan TDP sebanyak (60,63%) dari total TDP. Sementara TDP paling sedikit dimiliki oleh bentuk perusahaan Firma (Fa).

Tabel 2.110 Perkembangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Berdasarkan Bentuk Perusahaan, Tahun 2012-2016

No	Bentuk Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Perseroan Terbatas (PT)	4,857	5,234	5.726	6.176	6.638
2	Koperasi	914	951	976	1.000	1.017
3	CV	9,519	10,244	10.997	11.623	12.190
4	Fa	69	69	69	71	73

No	Bentuk Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016
5	Perorangan (PO)	27,207	28,592	29.551	30.559	31.642
6	Bentuk Usaha Lain	392	400	406	411	416
Jumlah		41.479	45.587	47.725	49.976	52.142

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017

Perkembangan sektor perdagangan DIY juga didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Perkembangan sarana perdagangan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah toko modern hingga tahun 2016 sejumlah 777 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 349 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian. Pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi penyangga perekonomian nasional, sehingga diperlukan peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha dan sarana prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional agar pasar tradisional memiliki daya saing dan tetap terjaga eksistensinya.

Tabel 2.111 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2012-2016

Jenis Toko	2012	2013	2014	2015	2016
Toko Modern	416	644	661	710	777
Pasar Tradisional	333	532	361	361	349
Jumlah	749	1.176	1.022	1.071	1.126

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017

2.3.2.7 Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan berada di urutan pertama pada struktur PDRB DIY menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2016 mencapai 12,83%. Industri di DIY didominasi oleh sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan jumlah sebesar 90.906 unit usaha. Jumlah IKM di DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah IKM di DIY mengalami pertumbuhan sebesar 2.269 unit usaha (2,6%) dibanding tahun 2015. Peningkatan jumlah IKM di DIY diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 7.311 orang (2,2%) apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Diharapkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) mampu menjadi pendorong utama perekonomian di DIY karena keberadaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dirasa mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak.

Tabel 2.112 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Unit Usaha	81.523	84.234	86.087	88.637	90.906
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	300.539	310.173	318.858	326.669	333.980
Nilai Investasi (Rp Milyar)	1.010.585	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897
Nilai Produksi (Rp Milyar)	3.199.224	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Milyar)	1.388.023	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017

Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi (*output*) dengan nilai bahan baku dan penolong lainnya (*input*). Pada tahun 2016 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp. 1.593.631 Milyar. Sementara itu, untuk Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp. 3.643.222 Milyar. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY bernilai sebesar Rp. 1.593.631 Milyar pada tahun 2016. Nilai tambah tersebut meningkat sekitar 2,76% dibandingkan dengan tahun 2015.

Sementara untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Industri Kreatif di DIY selama kurun waktu 2012 – 2016 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Jumlah IKM Industri Kreatif pada tahun 2016 sebesar 40.162 unit usaha, naik sebesar 4,35% dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah sebesar 38.489 unit usaha. Jumlah IKM Industri Kreatif tercatat mendominasi sebesar 44,18% dari jumlah total IKM di DIY.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017

Gambar 2.84 Perkembangan IKM Idustri Kreatif di DIY, Tahun 2012-2016

Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang dominan di DIY dan didukung oleh potensi sumber daya manusia yang memadai dan kekayaan warisan budaya yang istimewa diharapkan dapat membuka peluang industri pengolahan berbasis budaya seperti kerajinan, batik, serta cinderamata khas DIY. Dukungan komunitas intelektual yang cukup besar di DIY diharapkan akan membuka peluang inovasi produk dan variasi industri pengolahan yang lebih besar dengan memaksimalkan sektor industri kreatif. Keberadaan sektor industri kreatif dipandang mampu memberi solusi penciptaan sisi pembeda yang membuat DIY memiliki nilai tawar lebih dibanding daerah lain untuk menutupi permasalahan keterbatasan lahan dan modal yang dialami DIY.

2.3.2.8 Urusan Transmigrasi

Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi dengan diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah.

Dengan demikian, penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi

Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana (*rowing*), sedangkan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, yaitu pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat yang melibatkan Pemerintah Provinsi dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin.

Hingga saat ini, animo masyarakat DIY untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi melebihi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat namun dengan kecenderungan menurun.

Tabel 2.113 Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2012-2016

KAB/KOTA	2012		2013		2014		2015		2016	
	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar
	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)
Yogyakarta	95	65	74	48	59	39	71	47	55	41
Sleman	491	480	465	465	468	468	281	281	286	286
Bantul	1.206	683	260	130	334	167	210	105	172	81
Kulon Progo	531	259	312	122	338	133	343	137	270	117
Gunungkidul	162	87	104	50	155	98	40	30	70	44
JUMLAH	2.485	1.574	1.215	815	1.354	905	945	600	853	569

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Selama kurun 2011-2016, Pemerintah DIY telah memberangkatkan transmigrasi sebanyak 923 KK yang terdiri dari 2.972 jiwa, dengan perincian sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2011 hingga 2016 mayoritas transmigran berasal dari Bantul dengan jumlah 296 KK atau 973 jiwa, sedangkan jumlah terendah dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 86 KK (277 jiwa)

Tabel 2.114 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2011-2016

Kabupaten/ Kota	Tahun											
	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	25	85	19	59	15	46	5	15	12	39	10	33
Sleman	70	233	56	170	10	31	11	36	22	82	9	27
Bantul	75	265	80	264	53	168	23	73	40	128	25	75
Kulon Progo	49	154	53	162	47	138	19	65	27	85	16	48
Gunungkidul	40	129	40	126	25	75	12	41	15	56	20	64
JUMLAH	259	866	248	781	150	458	70	230	116	390	80	247

Sumber: BPS, DIY dalam Angka, beberapa tahun terbitan dan Disnakertrans DIY

Tabel 2.115 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2013-2016

Daerah Tujuan	Tahun							
	2013		2014		2015		2016	
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
Sumatera Selatan	90	(60,00)	20	(28,6)	25	(21,6)	-	-
Kalimantan Barat	10	(6,7)	15	(21,4)	-	-	10	(12,5)
Kalimantan Tengah	25	(16,7)	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	50	(43,1)	50	(62,5)
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	20	(25,0)
Sulawesi Selatan	15	(10,0)	-	-	25	(21,6)	-	-
Sulawesi Tenggara	10	(6,7)	25	(35,7)	16	(13,8)	-	-
Bangka Belitung	-	-	10	(14,3)	-	-	-	-
Jumlah	150	(100)	70	(100)	116	(100)	80	(100)

Sumber:

Berdasarkan lokasi penempatan transmigran, Provinsi Sumatera Selatan tercatat menjadi tujuan utama transmigrasi asal DIY selama tahun 2013 hingga 2015. Jumlah transmigran yang ditempatkan di Sumatera selatan mencapai 135 KK dengan proporsi 40,2 persen. Meskipun demikian, realisasi jumlah transmigran ke Sumatera Selatan dalam dua tahun terakhir cenderung menurun karena ada beberapa lokasi tujuan transmigrasi alternatif yang lain yang disediakan oleh pemerintah pusat dan pada tahun 2016 hanya ada 3 lokasi tujuan alternatif transmigran asal DIY yaitu adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dengan proporsi terbanyak di Kalimantan Utara (62,5%) dengan jumlah keluarga sebanyak 50 KK.

Dari data diatas terlihat bahwa besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi dan jumlah pendaftar calon transmigrasi belum sebanding dengan kuota/alokasi penempatan transmigrasi oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan pendaftar transmigrasi perlu dilakukan penambahan alokasi program penempatan melalui *sharing* anggaran pembiayaan APBD dengan daerah penempatan, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, penjajakan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi dan melakukan penjajakan pelaksanaan transmigrasi lokal.

2.3.3 Fokus Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan

2.3.3.1 Urusan Sekretariat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada gubernur.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan program lingkup Sekretariat Daerah;
- b. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
- d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintah daerah;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Pimpinan : Sekretaris Daerah;
- b. Pembantu Pimpinan : Asisten Sekretariat Daerah;
- c. Pelaksana : Biro-Biro yang terdiri dari Bagian-bagian dan Bagian-bagian terdiri dari Subbagian-subbagian; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terlambat atau belum keluarnya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi semangat untuk lahirnya beberapa regulasi baru. Salah satu poin penting dari undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berimplikasi pada pengalihan beberapa urusan dari dan atau antar tingkat pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur sipil negara.

Penyelenggaraan urusan tersebut tentunya berdampak pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan sesuai bidangnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan serta peningkatan skor Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung gerakan *one agency one innovation* dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 065/12017 tentang Inovasi Pelayanan Publik. Hal tersebut juga diikuti dengan penyusunan regulasi pedoman teknis penyusunan inovasi pelayanan publik yang diharapkan menjadi panduan bagi unit layanan dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan dan replikatif. Peningkatan pelayanan publik pada tahun 2015 secara nyata dibuktikan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang melebihi target serta keberhasilan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai salah satu 25 Top Inovator se-Indonesia.

Dalam hal kelembagaan daerah pada tahun 2015, indikator kinerja persentase kelembagaan yang efektif dan efisien tercapai sebesar 103,16%, dari target sebesar 85% tercapai sebesar 87,69%. Capaian ini terdapat kenaikan sebesar 7,69% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Angka capaian tahun 2015 ini berkontribusi sebesar 97,43% terhadap target akhir RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Capaian indikator ini diantaranya didukung oleh dukungan anggaran, komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan serta meningkatnya kapasitas SDM aparatur pelaksana.

Untuk indikator persentase peningkatan skor Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik, capaian indikator sebesar 102,94%. Target di tahun 2015 sebesar 85% tercapai sebesar 87,50% dan berkontribusi sebesar 97,22% terhadap target akhir RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Faktor pendukung pencapaian target indikator tersebut di tahun 2015 diantaranya adanya ekspose hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014 dari 63 unit layanan dan RS Grhasia yang mampu mendorong masing-masing unit layanan untuk berupaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.3.3.2 Urusan Sekretariat DPRD

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran

pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berbeda dengan provinsi lainnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, namun melalui proses penetapan Sultan Yogyakarta yang bertahta menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Wakil Gubernur sebagai salah satu wujud keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- d. penyelenggaraan rapat-rapat;
- e. penyiapan serta pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, pengawasan dan pengkajian informasi;
- i. fasilitasi pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan;
- j. fasilitasi pelantikan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. fasilitasi penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- l. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- m. pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan aspirasi masyarakat;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan

- o. pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Unsur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Pimpinan : Sekretaris DPRD;
- b. Pembantu Pimpinan : Bagian-Bagian;
- c. Pelaksana : Subbagian-subbagian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif yang merepresentasikan perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui mekanisme Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014-2019 hasil Pemilu Legislatif 2014 berjumlah 55 orang. Komposisinya terdiri dari 48 anggota laki laki (87,3 persen) dan 7 anggota perempuan (12,7 persen). Komposisi ini mengindikasikan proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen yang cenderung menurun dibandingkan dengan hasil pemilu periode 2009-2014.

Komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014-2019 berdasarkan parpol pengusung didominasi oleh legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menempatkan wakil sebanyak 14 orang (25 persen anggota). Berikutnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar yang menempatkan wakil masing-masing sebanyak 8 orang, diikuti oleh Partai Gerindra dan Partai keadilan Sejahtera (PKS) dengan wakil sebanyak 7 dan 6 orang.

Tabel 2.116 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat DPRD di DIY, Tahun 2013-3016

Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016
Prosentase prolegda yang terselesaikan	99%	88,9%	n.a.*	n.a.*
Persentase perda, perdais, pembahasan anggaran dan LKPJ Gubernur yang terselesaikan tepat waktu	n.a.*	n.a.*	95,66%	n.a.*
Persentase Penyelesaian agenda DPRD tepat waktu.	n.a.*	n.a.*	n.a.*	94,21%
Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan	362	143	n.a.*	n.a.*
Jumlah Rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan	167	117	n.a.*	n.a.*

DPRD				
Prosentase kajian/makalah/ <i>research Brief</i> yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD	100%	103,16%	n.a.*	n.a.*
Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan	91,65%	105,81%	n.a.*	n.a.*
Jumlah aspirasi dari masyarakat yang diterima	141	136	n.a.*	n.a.*
Frekuensi Sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat yang terlaksana	59	72	n.a.*	n.a.*
Prosentase rekomendasi/masukan Tenaga Ahli/Pakar DPRD	63,05%	87,62%	n.a.*	n.a.*
Persentase pengakses informasi aktivitas pemerintahan daerah melalui web, media elektronik dan media cetak	n.a.*	n.a.*	0%	94,84%
Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	n.a.*	n.a.*	92,994%	98,29%

Sumber: <http://monevapbd.jogiaprov.go.id/>

*Ket.: n.a. karena terjadi perubahan indikator sasaran SKPD akibat *review* RPJMD 2012-2017

2.3.3.3 Urusan Inspektorat

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi,

Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Inspektorat sampai dengan bulan Desember 2016 telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 180 obyek pemeriksaan, melakukan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2015 terhadap 34 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2016 terdapat 345 temuan dengan 799 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sejumlah 658 (82.35 %). Adapun 141 rekomendasi baru dalam proses tindak lanjut, hal ini dikarenakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI bulan Juni 2016 di Pemerintah Daerah DIY baru diterimakan bulan Desember 2016.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat DIY Tahun 2016 telah melakukan :

- a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.
- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.
- c. Kegiatan pengusutan.
- d. Melakukan Evaluasi LAKIP.

- e. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- f. Review Atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemda DIY.
- g. Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota
- h. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :

- a. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.
- b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Pencermatan RKA SKPD.
- d. *Consulting* dan *Quality Assurance*.
- e. Melakukan Kas Opname dan Stok Opname.
- f. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD.

Pada tahun 2016 Inspektorat DIY juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- b. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
- d. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- e. Menyenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala SKPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
- f. Sementara itu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.
- g. Melakukan penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) kepada PNS Daerah Istimewa Yogyakarta Golongan III/a ke atas untuk dilaporkan

kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Menteri Dalam Negeri.

- h. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
- i. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK.
- j. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 akan terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan *input* menjadi tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat DIY pada 2018 akan melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

2.3.3.4 Urusan Perencanaan

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin tersiptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peran yang strategis tidak hanya sebagai penentu arah, namun juga menentukan kecepatan dan kualitas pembangunan yang dihasilkan. Pembangunan tidak hanya untuk mengembangkan potensi daerah, tetapi dalam perencanaan

pembangun juga harus mempertimbangkan tingkat kecepatan proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempehitungkan sumber-sumber pembangunan yang dimiliki.

Pada RKP tahun 2017 pemerintah menggunakan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya dari *money follow function* menjadi *money follow program*. *Money follow program* merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pendekatan penganggaran *money follow program* ini mendukung pendekatan perencanaan yang holistik tematik yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas, terintegrasi yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional, dan spasial yaitu kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan. Pendekatan perencanaan yang holistik tematik, terintegrasi dan spasial tidak hanya diterapkan pada perencanaan pada tingkat nasional, tetapi harus diterapkan oleh daerah didalam perencanaan pembangunan.

Dengan menggunakan pendekatan *money follow program*, jumlah kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kegiatan masih 2809 kegiatan kemudian menjadi 2566 kegiatan pada tahun 2015, 1876 kegiatan pada tahun 2016 dan 872 kegiatan pada tahun 2017.

Tahun 2017 merupakan tahun terakhir berlakunya RPJMD DIY 2012-2017 untuk selanjutnya pada tahun 2018 akan diberlakukan RPJMD tahun 2018-2022. RPJMD 2018-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pada tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menyusun rancangan *background study* yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan teknokratik. Rancangan *background study* dan rancangan teknokratik RPJMD menyajikan dan menganalisis data dan fakta dan isu strategis untuk dijadikan pijakan penyusunan RPJMD lima tahun ke depan. Dengan demikian diharapkan penyusunan RPJMD dapat selesai enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

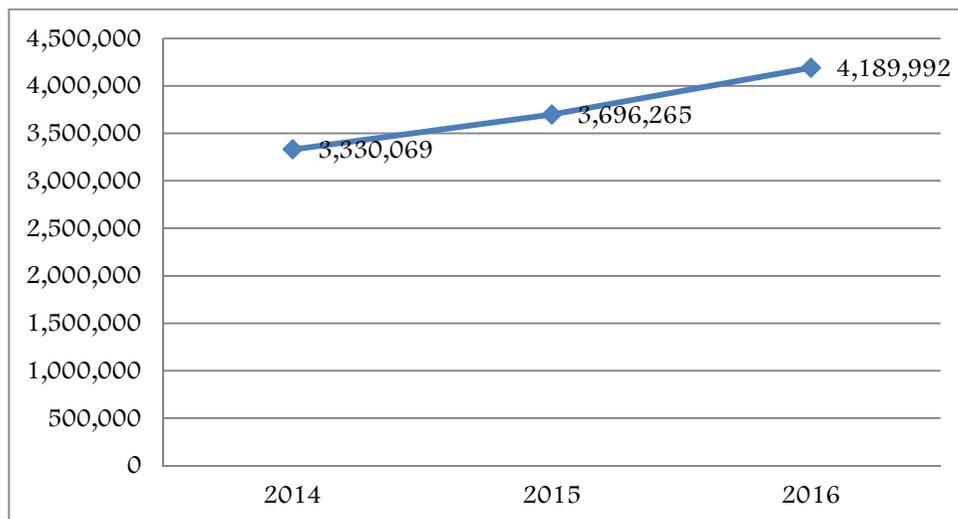
2.3.3.5 Urusan Keuangan

Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 membawa angin segar terhadap demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah, yaitu adanya kewenangan yang semakin besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan dalam menentukan anggaran. Implikasi positifnya, bahwa kewenangan penyusunan anggaran program kegiatan yang aspiratif bagi masyarakat dan disesuaikan dengan potensi yang ada. Oleh karena itu, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, maka anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat (*client centered*), yang menuntut transparansi informasi anggaran kepada publik dan termuat dalam laporan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Selainitu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah, namun perlu memperhatikan sektor belanja daerah, karena belanja daerah yang tepat dan lebih baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perbaikan kualitas dan efisiensi belanja menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Pengelolaan belanja tidak hanya memperhatikan *magnitude* keterserapan anggaran namun juga ketepatan, kecepatan keterserapan, dan juga pemerataan *disbursement* anggaran belanja. Postur anggaran baik di level pemerintah pusat maupun daerah menyebabkan penghematan belanja tidak bisa lagi dielakkan. Penghematan belanja pemerintah pusat dilakukan terhadap belanja pusat (*Kementerian/Lembaga*) dan juga belanja daerah (*transfer ke daerah dan Dana Desa*). Penghematan dilakukan secara selektif, diupayakan semaksimal mungkin tidak mengganggu belanja-belanja prioritas yang mempunyai leverage tinggi bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu saja berdampak kepada daerah dan harus direspon oleh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kebutuhan belanja di Pemda DIY selalu mengalami peningkatan total belanja daerah selama 3 tahun terakhir yang ditunjukkan melalui gambar berikut.



Sumber : DJPK (2016)

Gambar 2.85 Pertumbuhan Belanja Pemda DIY, Tahun 2014-2016

Gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan belanja daerah DIY mengalami peningkatan yang relatif signifikan dalam 3 tahun terakhir ini untuk membiayai program kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Peningkatan tersebut berkisar antara 11% sampai 13% pertahunnya. Secara umum, proporsi alokasi belanja baik langsung dan tidak langsung meningkat dari tahun ke tahun dan relative berimbang diantara keduanya. Belanja pegawai relatif baik karena tidak terlalu besar dibandingkan dengan belanja hibah bahkan besarnya lebih kecil dibandingkan dengan alokasi belanja barang dan jasa. Belanja modal naik secara signifikan dari tahun 2014 ke 2016.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di DIY, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 40% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil

pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Dari segi struktur pendapatan dalam APBD DIY tahun 2016, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sebesar 39,61%, dana perimbangan sebesar 45,11% dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 15,38%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi anggaran pendapatan yang bersumber dari pusat masih tinggi terhadap pembiayaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, kebijakan umum pendapatan daerah yang sudah dan akan dilakukan di DIY adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Adapun sumber-sumber pendapatan daerah di DIY berasal dari berbagai komponen, yaitu: (i) Pajak Daerah (ii) Retribusi Daerah, (iii) Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, (v) Penerimaan dari dana perimbangan, (vi) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari berbagai penerimaan tersebut, selama lima tahun terakhir terjadi kecenderungan kenaikan penerimaan daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah. Akan tetapi pada sisi yang lain, penerimaan pendapatan dari Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kecenderungan terus menurun terutama pada periode 2005-2007. Terkait dengan arah pengelolaan keuangan peningkatan pendapatan daerah, maka Pemda DIY perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD yaitu dengan:
 - a. Perbaikan Manajemen: melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal Pemda DIY maupun pada BUMD.
 - b. Peningkatan Investasi: Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi.
2. Optimalisasi Aset Daerah
Pemda DIY memiliki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset daerah. Disamping itu, optimalisasi aset DIY

juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain/swasta, baik dalam bentuk *Build Operating Transfer* (BOT) maupun Kontrak Konsesi.

Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas.

2.3.3.6 Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi dan memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam jenjang karir. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. *Reward* diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi.

Penilaian kinerja mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu. Formulasi penilaian kinerja PNS dikembangkan secara proporsional dari tahun ke tahun. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penegakan peraturan perundangan sesuai peraturan yang berlaku.

Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan salah satu hal utama yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri serta pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

Peran pegawai dalam hal ini sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai ASN Berfungsi Sebagai:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan

c. perekat dan pemersatu bangsa.

2.3.3.7 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Eksistensi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sesungguhnya memiliki kedudukan dan peranan yang cukup mendasar dalam kerangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Program Litbang di Lingkungan Kemendagri dan Pemda tahun 2012, Litbang merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan pendekatan sistem, Litbang merupakan salah satu sub kebijakan publik, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Untuk itu pelaksanaan litbang senantiasa diarahkan kepada upaya terus menerus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan kelitbangan dilaksanakan berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

Agar terwujud program/kegiatan Litbang yang lebih efektif menunjang pembangunan daerah, maka perlu upaya peningkatan jumlah dan kualitas program/kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih berbobot, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi upaya pemecahan masalah-masalah dalam pencapaian tujuan. Hal ini perlu disadari bersama, bahwa program/kegiatan pembangunan pada hakekatnya diselenggarakan untuk tujuan memecahkan masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi dalam lingkungan masyarakat bangsa.

Dalam kerangka mewujudkan fungsi dan tugas bidang kelitbangan, peranan Unit Litbang Pemerintah Daerah antara lain adalah sebagai dapur kebijakan (*think tank*) penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memfasilitasi berbagai langkah kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan pada umumnya maupun secara khusus dalam kerangka peningkatan kinerja kelitbangan di daerah. Dalam hal ini, upaya pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan seharusnya dilakukan dalam sistem dan prosedur pengelolaan litbang satu pintu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, disadari bahwa masih terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi berkaitan masalah bidang kelitbangan, termasuk diantaranya adalah persoalan klasik berkenaan eksistensi dan peran litbang. Dalam hal ini, eksistensi dan peran unit kelembagaan Litbang di daerah pada umumnya dirasakan masih belum berdaya memenuhi ketentuan kebijakan bidang kelitbangan dan ristek, antara lain Permendagri 20 Tahun 2011, Permendagri 36 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang Penguatan SIDA.

Dengan terbitnya Perpres No 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, maka berimplikasi bahwa Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia berkewajiban melakukan pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIDa). Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pemda, daya saing daerah, dan pelaksanaan

Masterplan MP3EI 2011-2025 diperlukan penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) secara terarah dan berkesinambungan. Dengan adanya penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa), maka daerah-daerah diharapkan dapat mewujudkan interaksi kemitraan yang strategis diantara pelaku-pelaku inovasi (pemerintah, pebisnis, akademisi, dan masyarakat) dalam membangun sistem inovasi.

Sementara itu, kebijakan-kebijakan regulatif dan perangkat instrumen pendukung kebijakan di bidang Litbang dan Ristek secara umum belum kondusif dapat dimplementasikan secara efektif di daerah-daerah. Hal tersebut kiranya tidak dapat dipisahkan pula dengan persoalan komitmen dan persepsi yang muncul di kalangan aparatur daerah yang masih belum sesuai kehendak melakukan pemberdayaan unit kelembagaan Litbang di daerah-daerah. Dalam kondisi demikian sesungguhnya pula berhubungan erat dengan persoalan masih kurangnya informasi karena terbatasnya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kelitbangan dan ristek.

Pada sisi yang lain, di wilayah DIY terdapat banyak potensi kelitbangan baik berupa kelembagaan litbang, lemlit dan sumberdaya manusia tenaga ahli/peneliti dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dengan beragam gagasan inovasi yang sangat kreatif. Kita juga telah banyak mendengar, mengetahui dan menyaksikan fenomena bermunculannya beragam hasil-hasil kajian teknologi tepat guna, produk inovasi baru dan industri kreatif yang dapat dikembangkan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat bangsa.

Dengan dasar pertimbangan pemikiran tersebut di atas, kegiatan berkaitan Sistem Informasi Daerah (SIDa) ini pada tahun anggaran 2018 menjadi perlu segera dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unit instansi/SKPD dan komponen *stakeholder* kelitbangan terkait pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIDa) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Selanjutnya, diharapkan dapat terwujud upaya peningkatan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat dalam kerangka merealisasikan kehendak penguatan sistem inovasi di DIY melalui pembentukan tim koordinasi yang mampu mengawal program/kegiatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan litbang sebagai fasilitator dan koordinator pelaksanaan program Sistem Informasi Daerah (SIDa) di wilayah DIY.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkup Pemda DIY pada tahun 2018, secara umum memiliki maksud/tujuan berikut:

1. Menyediakan forum sosialisasi/pemasyarakatan tentang ragam kebijakan peraturan perundangan yang urgen dan aktual sebagai landasan hukum dalam pembangunan bidang kelitbangan dan Ipteks;
2. Memfasilitasi upaya dan sarana penyebarluasan informasi, pengetahuan dan pemahaman aparatur terhadap eksistensi

kelitbangan dan nilai-nilai strategis iptek dalam membangun peradaban dan kesejahteraan bangsa;

Memfasilitasi langkah-langkah kebijakan pemberdayaan Litbang dan pendayagunaan hasil-hasil kelitbangan/ iptek bagi penopang kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah DIY, khususnya berkenaan dengan upaya peningkatan kesadaran dan komitmen aparatur daerah agar lebih kondusif dapat menunjang terwujudnya kinerja kelembagaan Litbang yang efektif.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita dari tahun 2011 hingga tahun 2015 cenderung meningkat. Pengeluaran Konsumsi per Kapita gabungan perkotaan dan perdesaan pada tahun 2015 meningkat sebesar 48,57% dibandingkan tahun 2011. Peningkatan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Proporsi rata-rata pengeluaran non makanan selama kurun waktu lima tahun sebesar 55,06% dan sisanya sebesar 44,94% untuk komoditas makanan. Sementara itu pengeluaran per kapita di perkotaan senantiasa lebih besar dibandingkan pengeluaran di perdesaan setiap tahunnya.

Tabel 2.117 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, Tahun 2011-2015

Tahun	Daerah	Makanan	Non Makanan	Jumlah
2011	Perkotaan (K)	302.958	399.829	702.787
	Perdesaan (D)	223.946	248.219	472.165
	K + D	276.322	348.722	625.044
2012	Perkotaan (K)	361.214	440.296	801.510
	Perdesaan (D)	260.840	241.638	502.478
	K + D	327.242	373.055	700.297
2013	Perkotaan (K)	383.303	496.532	879.835
	Perdesaan (D)	313.167	230.101	543.268
	K + D	359.522	406.192	765.714

2014	Perkotaan (K)	368.752	465.447	834.199
	Perdesaan (D)	329.872	252.242	582.114
	K + D	355.504	392.800	748.304
2015	Perkotaan (K)	385.061	697.510	1.082.571
	Perdesaan (D)	325.187	297.594	622.781
	K + D	365.011	563.590	928.601

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Berdasarkan golongan pengeluaran perkapita per bulan, jumlah rumah tangga di DIY tahun 2015 yang memiliki pengeluaran lebih dari 500 ribu rupiah per bulan sebanyak 746.400 rumah tangga atau sebesar 66,62%. Hal ini berarti terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 60,68%. Dari golongan tersebut, golongan rumah tangga dengan pengeluaran lebih dari Rp. 1.000.000 per kapita sebulan merupakan golongan terbesar, yaitu sebesar 374.864 rumah tangga atau 33,46%. Hal ini dapat diasumsikan telah terjadi sedikit peningkatan kesejahteraan. Namun di sisi lain, terjadi pergeseran pada golongan menengah dimana terjadi penurunan jumlah rumah tangga pada golongan pengeluaran Rp. 200.000 – Rp. 499.000 dan terjadi peningkatan jumlah rumah tangga pada golongan di bawah Rp. 200.000. Bahkan kembali muncul jumlah rumah tangga dengan pengeluaran di bawah Rp. 100.000 setelah pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada.

Tabel 2.118 Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di DIY, Tahun 2011-2015

Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan	Jumlah Rumah Tangga				
	2011	2012	2013	2014	2015
< 100.000	-	10	-	-	88
100.000 – 149.999	7.495	6.873	413	585	1.854
150.000 – 199.999	46.381	35.259	13.950	7.299	11.460
200.000 – 299.999	175.341	172.813	126.127	96.384	89.161
300.000 – 499.999	302.419	283.642	296.365	332.386	271.514
> 500.000	510.289	567.685	630.864	673.757	746.400

Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan	Jumlah Rumah Tangga				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah	1.041.925	1.066.282	1.067.719	1.110.411	1.120.477

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Jika dilihat dari kelompok komoditas non makanan, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan lebih didominasi oleh kelompok barang-barang dan jasa. Proporsi terbesar dalam pengeluaran konsumsi Rumah Tangga non makanan adalah Kelompok Barang dan Jasa dengan rata-rata proporsi selama 5 tahun (2011–2015) sebesar 39,56%. Kemudian disusul oleh Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan, dan Air dengan rata-rata proporsi selama 5 tahun sebesar 37%. Proporsi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non makanan sebagian besar diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Di sisi lain, Kelompok Pajak Pemakaian dan Premi Asuransi merupakan kelompok dengan proporsi terkecil sebesar 3,75%.

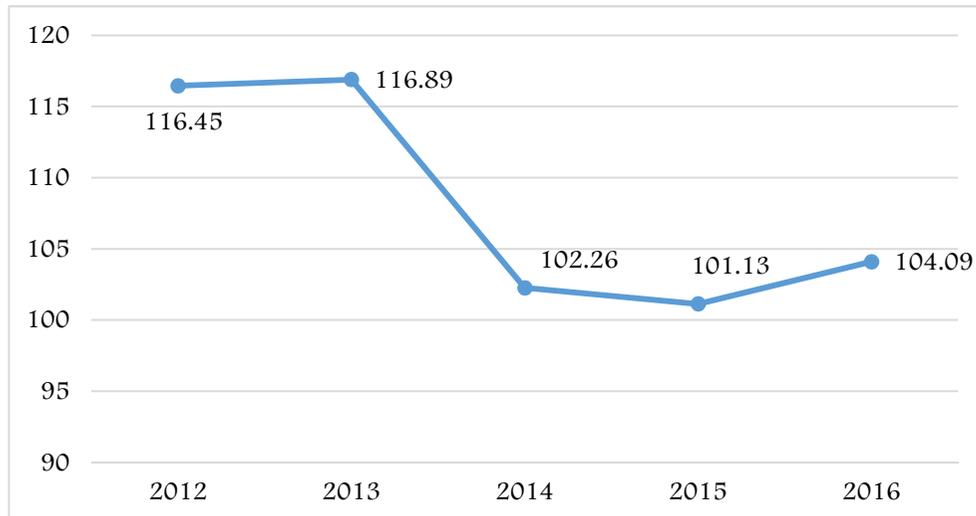
Tabel 2.119 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2010-2015

Kelompok	Nilai (Rupiah)				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	121.996	135.795	147.181	146.720	247.836
2. Barang-Barang & Jasa	151.625	170.509	170.005	166.528	165.253
3. Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	14.128	20.967	20.665	19.987	26.368
4. Barang Tahan Lama	34.823	64.473	37.403	29.126	75.981
5. Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	12.348	14.191	13.577	12.604	29.583
6. Keperluan pesta dan upacara	13.802	12.580	17.361	17.835	18.569
	348.722	418.515	406.192	392.800	563.590

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2011-2015

b. Nilai Tukar Petani (NTP)

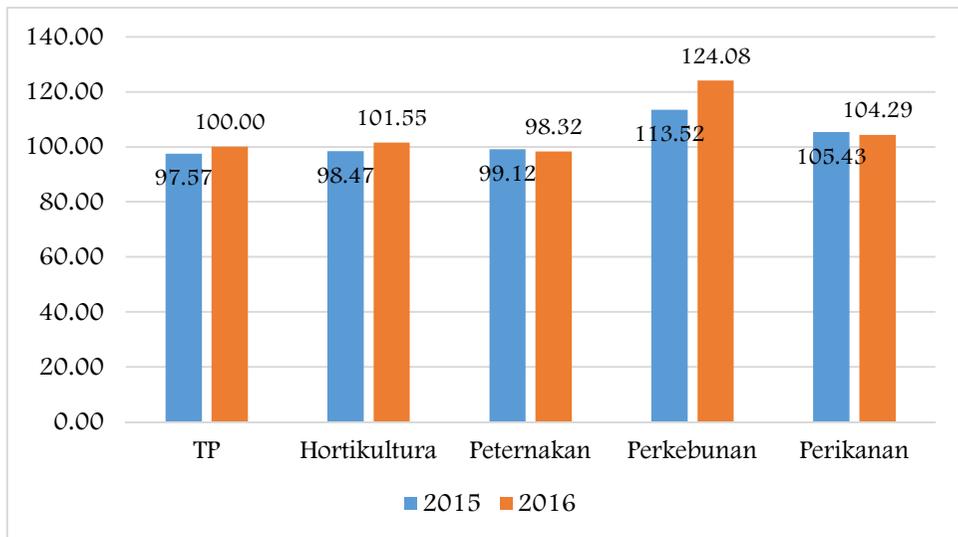
Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani. NTP DIY selama kurun waktu 2012-2016 menunjukkan kecenderungan menurun, namun tahun 2013 sempat tercatat sebesar 116,89 –yang terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun kemudian menjadi 101,13 pada tahun 2015 sebelum kembali meningkat pada tahun 2016 (104,09).



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013-2017

Gambar 2.86 Nilai Tukar Petani DIY, Tahun 2012-2016

Bila ditelaah lebih lanjut per subsektor dapat diketahui bahwa Sub Sektor Perkebunan Rakyat memiliki angka NTP terbesar pada tahun 2016. Hal ini berarti terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 113,52. Secara umum dapat diketahui bahwa petani yang bekerja di sub sektor tersebut dapat diasumsikan kesejahteraannya meningkat dan relatif lebih besar dibandingkan sub sektor lainnya. Sementara itu, sub sektor perikanan berada di peringkat kedua NTP terbesar pada tahun 2016 yaitu dengan nilai 104,29, atau menurun dibandingkan nilai tahun 2015 yang sebesar 105,43. Kedua subsektor tersebut selalu memiliki NTP terbesar dalam periode 5 tahun terakhir.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Gambar 2.87 Nilai Tukar Petani DIY Per Sub Sektor , Tahun 2015-2016

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Daya saing daerah adalah Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Salah satu indikator utama penentu daya saing daerah adalah infrastruktur.

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam mendukung daya saing daerah.

Perbaikan infrastruktur pada umumnya dapat meningkatkan mobilitas penduduk, mempercepat laju pengangkutan barang, memperbaiki kualitas dari jasa pengangkutan tersebut, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembangunan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana pembangunan. Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini serta banyaknya investasi yang masuk akan menyerap tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktifitas ekonomi yang semakin meningkat sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi

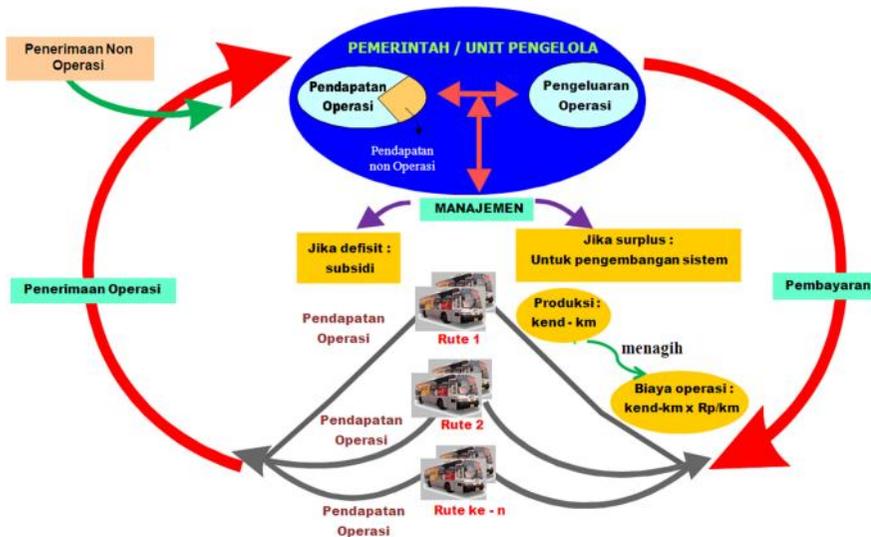
Gambaran kondisi daya saing daerah DIY dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur antara lain terdiri dari: 1).

aksesibilitas daerah; 2). penataan wilayah; 3) ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah; 4). fasilitas energi (listrik).

2.4.2.1 Layanan Trans Jogja

Di bidang infrastruktur, salah satu kebijakan yang menjadi daya saing dari kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pengoperasian layanan angkutan umum Trans Jogja sebagai bentuk penyediaan layanan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Keberadaan Trans Jogja itu sendiri, didasari karena adanya keluhan terhadap kondisi angkutan perkotaan yang ada pada saat itu, sehingga pada bulan Februari tahun 2008, Trans Jogja mulai dioperasikan dengan konsep dasar layanan “*buy the service*”. Konsep layanan “*buy the service*” ini dimaksudkan bahwa pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena adanya pengoperasian angkutan umum. Pihak operator dibayar oleh pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati dan mereka akan dikenakan denda jika melanggar kesepakatan tersebut.



Sumber:

Gambar 2.88 Konsep Buy The Service

Dengan pendekatan *gross contract*, maka pendapatan dari hasil pengoperasian Trans Jogja menjadi pendapatan dari pemerintah dan pemerintah pula yang menentukan harga tiket, sehingga Trans Jogja dapat

dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini akan berbeda jika pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *netf contract* dimana campur tangan pemerintah terkait dengan pembiayaan operasional angkutan umum, akan terjadi saat terdapat selisih antara biaya operasional dan pendapatan yang diterima oleh operator. Selisih tersebut akan ditutupi oleh pemerintah melalui mekanisme subsidi ataupun PSO (*public service obligation*).

Keberadaan Trans Jogja dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang di Perkotaan Yogyakarta, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kemudahan akses dan kemudahan perpindahan orang antar wilayah di Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja juga diharapkan dapat mengurangi problematika lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya pemakaian kendaraan bermotor dan kurangnya penggunaan angkutan umum menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan bagi pergerakan lalu lintas yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas.

Nilai unggul yang ditawarkan dalam layanan Trans Jogja adalah :

1. Sistem tiket sudah terintegrasi dengan *e-money* yang ada di beberapa bank pemerintah maupun swasta, antara lain : Mandiri, BNI, BRI dan BCA.
2. Dengan fasilitas *e-money*, tiket Trans Jogja juga sudah terintegrasi dengan Trans Batik Solo dan KA Komuter Prameks.
3. Pada beberapa bus, tersedia fasilitas *bike rack on bus* guna memudahkan pengendara sepeda yang akan menggunakan layanan Trans Jogja.
4. Jam layanan yang dimulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 9 malam.

Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, jumlah *load factor* Trans Jogja mengalami peningkatan. Demikian juga halnya dengan jumlah pendapatan yang selalu meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012, karena operasional jalur 4 pada saat itu dihentikan sementara.

Tabel 2.120 Jumlah *Load Factor* dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja 2009-2014

No.	TAHUN	LOAD FACTOR RATA-RATA	PENDAPATAN
1.	2009	21,98 %	Rp. 15.359.527.500,00
2.	2010	26,37 %	Rp. 17.504.928.000,00
3.	2011	26,96 %	Rp. 18.043.004.000,00
4.	2012	29,26 %	Rp. 17.407.646.993,80
5.	2013	32,25 %	Rp. 18.359.146.684,23
6.	2014	37,82 %	Rp. 20.177.264.827,00

No.	TAHUN	LOAD FACTOR RATA-RATA	PENDAPATAN
7.	2015	39,05%	Rp. 22.852.181.651,91
8.	2016	40,62%	Rp. 21.397.770.787,76

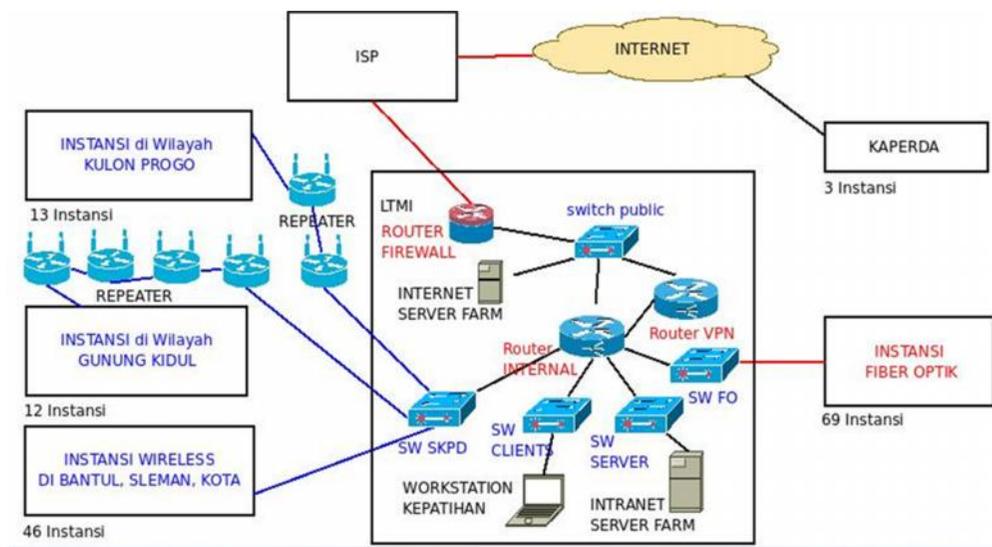
Sumber : UFT Trans Jogja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY

2.4.2.2 Penyediaan Fiber Optik

Di sektor informatika, kebijakan pembangunan yang dapat menjadi daya saing adalah pembangunan jaringan *fiber optic* pada kawasan Perkotaan Yogyakarta yang menghubungkan antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan jaringan fiber optik (FO) ini, nantinya akan bersifat multi fungsi dan dapat digunakan untuk mendukung system informatika di jajaran Pemerintah DIY. Pembangunan jaringan FO ini akan dapat menutupi kelemahan yang ada, jika Pemerintah DIY menyewa jasa layanan ISP (*internet service provider*) terutama pada control manajemen jaringan dan ketergantungan yang sangat besar pada pihak ketiga/penyedia jasa ISP.

Manfaat yang diperoleh dari adanya jaringan fiber optik yang dikelola sendiri oleh Pemerintah DIY, antara lain :

- ~ Menambah *bandwidth Internet* dan *Intranet* SKPD.
- ~ Memberikan kontrol yang lebih besar pada penggunaan *bandwidth* baik *internet* dan *Intranet* pada pengelola jaringan PEMPROV DIY
- ~ Memberikan Opsi yang lebih banyak pada penyediaan *Bandwidth* Provinsi DIY baik VPN maupun *Internet*
- ~ Penambahan *Firewall Router* untuk menambah lapisan keamanan pada *Server* PEMPROV DIY.
- ~ Mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga (*vendor*).



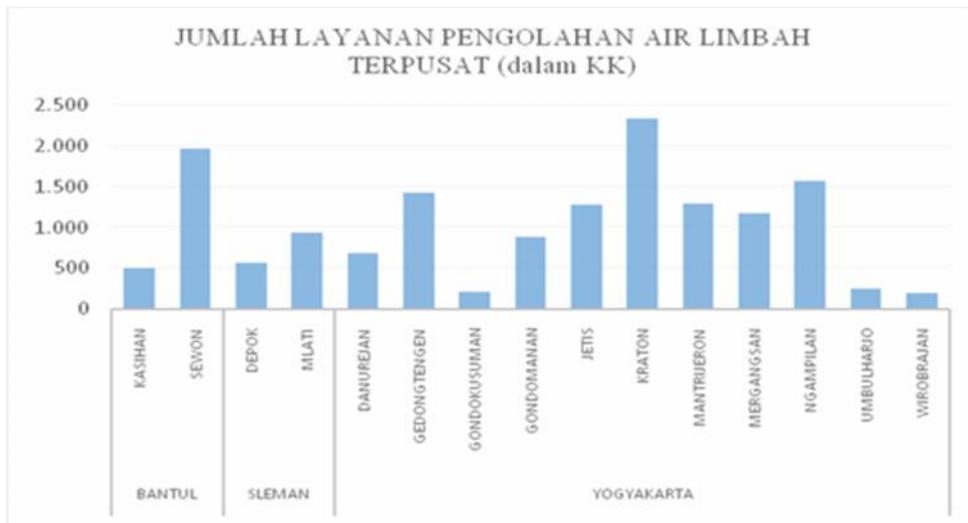
Sumber:

Gambar 2.89 Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY

2.4.2.3 Layanan Air Limbah Terpusat

Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat atau *Off-site* adalah suatu system pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah kesuatu tempat untuk selanjutnya diolah. Diterapkan untuk penduduk yang berada pada wilayah padat dan secara teknis bisa dilayani oleh system terpusat kota. Pengolahan limbah terpusat merupakan sistem pengolahan yang menggunakan jaringan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari masing-masing rumah penduduk dan kemudian dialirkan ke IPAL. Pengolahan air limbah dengan system terpusat terdiri dari sambungan rumah tangga dan non rumah tangga, jaringan pengumpul, system penggelontor, dan jaringan perpipaan yang mengalirkan limbah menuju IPAL Sewon Bantul.

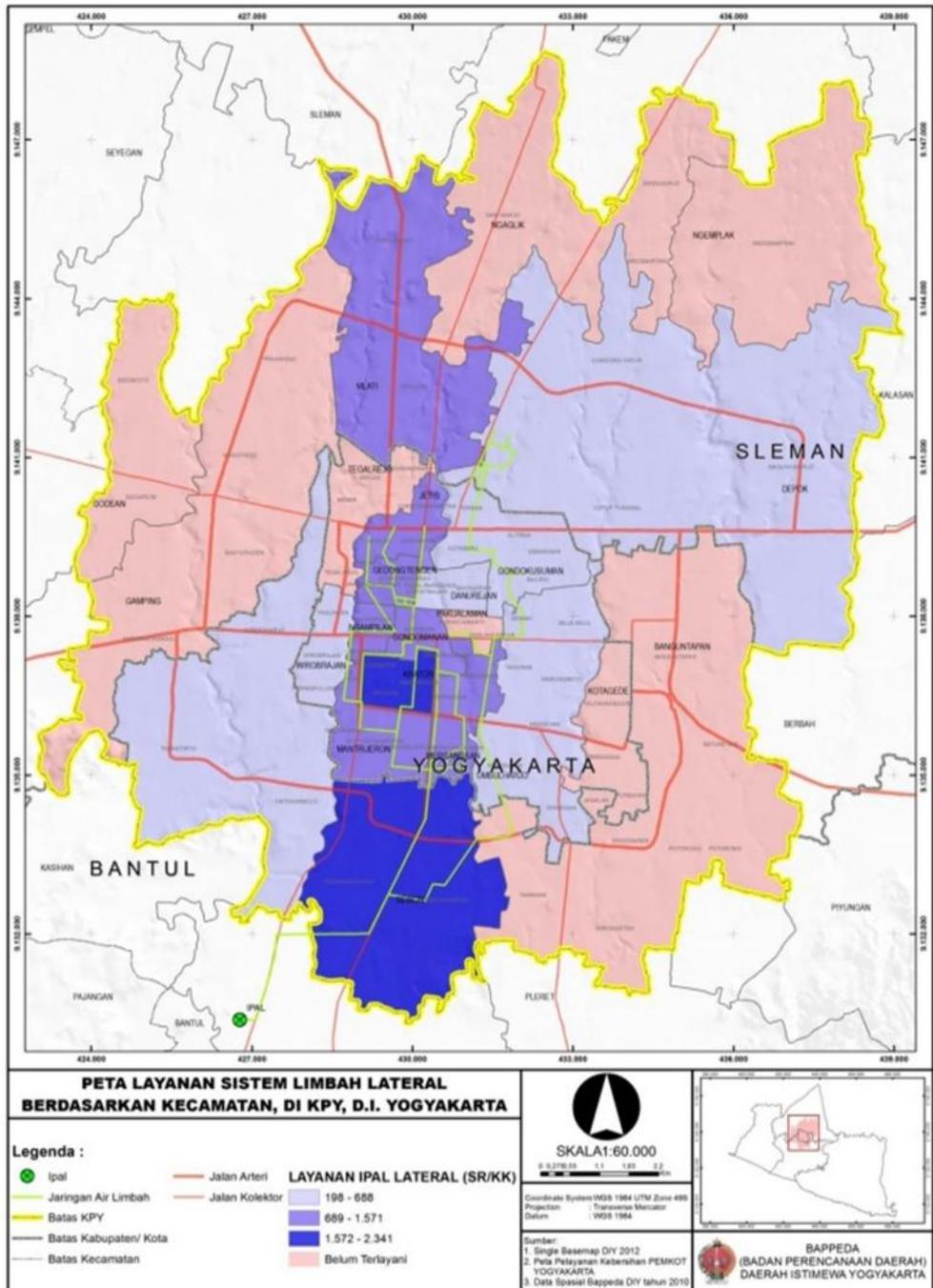
Pelayanan pengelolaan limbah system terpusat di KPY sampai tahun 2014 sudah melayani 15.309 KK, dengan distribusi di Kabupaten Bantul sebesar 2.485 KK, Kabupaten Sleman sebesar 1.520 KK, dan Kota Yogyakarta sebesar 11.304 KK. Cakupan layanan infrastruktur limbah system terpusat per kabupaten/kota, kecamatan dan desa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber:

Gambar 2.90 Jumlah Layanan Pengolahan Air Limbah Terpusat Per Kecamatan

Secara lebih jelasnya peta layanan limbah lateral per kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber:

Gambar 2.91 Peta Layanan Limbah Lateral Per Kecamatan di KPY

Dalam RPJMD tahun 2012-2017 telah ditetapkan target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat yaitu setiap tahunnya adanya penambahan Sambungan Rumah (SR) sebesar 1.500 SR. Pada periode 2012 -2017 diketahui kondisi kinerja awal periode RPJMD adalah sebesar 13.329 SR dan pada tahun ke 2 atau 2014 target capaian mencapai 15.800 SR. Hasil dari analisis dari data yang bersumber pada penghitungan Tahun 2014 ini maka diketahui bahwa jumlah pelayanan pengelolaan limbah system terpusat di KPY sampai tahun 2014 sudah melayani 15.309 KK, dengan distribusi di Kabupaten Bantul sebesar 2.485 KK, Kabupaten Sleman sebesar 1.520 KK, dan Kota Yogyakarta sebesar 11.304 KK. Artinya capaian saat ini sudah 96,9 % atau hampir melampaui dari target awal capaian yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2012-2017.

2.4.2.4 Layanan Air Minum

Peningkatan kebutuhan air minum akibat pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan aspek lainnya di DIY menyebabkan kebutuhan air baku untuk air minum diproyeksikan sebesar 6.998 L/det hingga tahun 2030. Cakupan pelayanan air minum D.I. Yogyakarta pada tahun 2012 sudah mencapai 72,78% dengan proporsi 75,98% di perkotaan dan 70,58% di perdesaan. Di sisi lain pertumbuhan penduduk perkotaan akan semakin meningkat pada lima tahun mendatang, yang berdampak pada semakin besarnya tingkat kebutuhan pelayanan air minum dan keterbatasan ketersediaan air baku untuk air minum. Oleh karena itu perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan.

Beberapa langkah strategis sudah dipersiapkan Pemerintah Provinsi dalam rangka memenuhi kebutuhan cakupan dan peningkatan kualitas air minum. Kewenangan Pemerintah Provinsi tertuang dalam rencana spam regional untuk melayani kawasan perkotaan, kawasan strategis provinsi dan kawasan industry antara lain :

1. SPAM Regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY); Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (Kartamantul), kapasitas 700 L/DT
2. SPAM Regional Kapet Kulonprogo (bandara; pelabuhan; pasir besi) – Kawasan Industry Pajangan, Kabupaten Bantul, kapasitas 1.400 l/dt
3. SPAM *Regional System Banyusoco/Sungaioyo*, pelayanan wilayah tenggara Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul bagian barat, kapasitas 100 l/dt
4. SPAM regional system sungai bawah tanah Gunung Kidul; pelayanan wilayah selatan Gunungkidul, Bantul utara, dan Sleman selatan, kapasitas 300 l/dt

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam keputusan untuk berinvestasi. Selain faktor-faktor ekonomi, faktor non ekonomi seperti kondisi politik, stabilitas keamanan dan penegakan hukum menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menarik minat investasi. Dalam bagian ini akan dijelaskan perkembangan situasi kewanmanan dan aspek lain yang berpengaruh terhadap iklim investasi di DIY.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Kriminalitas merupakan salah satu indikator yang menggambarkan rasa aman bagi masyarakat. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas usaha ekonomi produktif. Tindak kejahatan yang dilaporkan dalam kurun lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2012-2014, jumlah kejahatan yang dilaporkan kembali meningkat pada tahun 2017. Meskipun jumlah kejahatan yang berhasil diselesaikan mengalami peningkatan, dilihat dari rasio antara kejahatan yang dilaporkan dengan yang diselesaikan capaian 2015 tidak jauh berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa laju kejahatan yang terjadi belum diimbangi dengan jumlah penyelesaian kasus kejahatan.

Tabel 2.121 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	725	629	332	347	453
Bantul	887	580	744	858	955
Gunungkidul	310	408	344	303	362
Sleman	2012	2009	2001	1843	2259
Yogyakarta	2436	1893	1911	1883	1947
Mapolda DIY		1194	1181	1054	1219
D.I Yogyakarta	6370	6713	6513	6288	7195

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2015 (BPS, 2016) dan Statistik Politik dan Keamanan DIY 2012 (BPS, 2013)

Tabel 2.122 Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	570	475	175	161	215
Bantul	441	314	416	486	587
Gunungkidul	188	241	233	171	204
Sleman	950	820	648	771	950
Yogyakarta	833	547	644	936	848
Mapolda DIY		857	664	538	696
D.I Yogyakarta	2368	3254	2780	3063	3500

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2015(BPS, 2016) dan Statistisik Politik dan Kemanan DIY 2012 (BPS,2013)

Tabel 2.123 Persentase Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	78,62	75,52	52,71	46,40	47,46
Bantul	49,72	54,14	55,91	56,64	61,47
Gunungkidul	60,65	59,07	67,73	56,44	56,35
Sleman	47,22	40,82	32,38	41,83	42,05
Yogyakarta	34,20	28,90	33,70	49,71	43,55
Mapolda DIY		71,78	56,22	51,04	57,10
D.I Yogyakarta	37,17	48,47	42,68	48,71	48,64

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2015(BPS, 2016) dan Statistisik Politik dan Kemanan DIY 2012 (BPS,2013)

Indikator lain yang menunjukkan kriminalitas di DIY masih perlu menjadi perhatian adalah resiko penduduk terkena tindak kejahatan. Pada tahun 2015 jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 196 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari seluruh wilayah di DIY, penduduk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Sementara itu, catatan lain yang perlu diperhatikan adalah DIY masuk dalam 10 tertinggi dalam tingkat resiko terkena kejahatan (Statistik Kriminal BPS RI 2016). Seiring mudahnya pemberitaan tersebar melalui sarana informasi, peningkatan keamanan lingkungan perlu ditingkatkan agar citra DIY tidak terganggu oleh kejadian kejahatan yang terjadi.

Tabel 2.124 Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk di DIY

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	186	161	74	86	111
Bantul	97	70	68	89	97
Gunungkidul	43	41	47	43	51
Sleman	56	56	56	249	295
Yogyakarta	111	86	96	470	483

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
D.I Yogyakarta	175	184	187	173	196

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2015(BPS, 2016) dan Statistik Politik dan Keamanan DIY 2012 (BPS,2013)

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah unjuk rasa atau demonstrasi yang berjalan dengan damai dapat menjadi indikator stabilitas keamanan wilayah. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di DIY relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar lain di Indonesia. Penanganan aksi unjuk rasa di DIY (dalam kasus di Kota Yogyakarta) memiliki dampak positif terhadap stabilitas wilayah, yaitu tetap terselenggaranya aktivitas berbagai macam aspek kehidupan masyarakat. Dalam kurun 2011-2015 hanya terdapat 4 (1,4%) unjuk rasa anarkis dari 283 unjuk rasa yang tercatat sampai dengan tahun 2015. Dari data yang ada unjuk rasa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar berlangsung damai.

Tabel 2.125 Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Unjuk Rasa
2011	267
2012	318
2013	244
2014	283
2015	204

Sumber: Sumber: Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah, DIY dalam Aplikasi Dataku, 2016

2.4.3.3 Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Pemerintah Daerah dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang mendukung kemudahan dan kepastian usaha. Regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mencakup regulasi terkait kelembagaan perijinan terpadu satu pintu dan terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Peraturan Gubernur 36/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada prinsipnya memberikan jaminan layanan kepada pelaku usaha bahwa kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap

terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Sementara itu, Perda 4/2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan menarik minat investasi dengan memberikan insentif pajak atau retribusi daerah serta pemberian fasilitas kemudahan lainnya. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pajak daerah. Sementara bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa penyediaan informasi lahan atau lokasi, percepatan pemberian perizinan, pemberian fasilitasi promosi investasi, dan fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal.

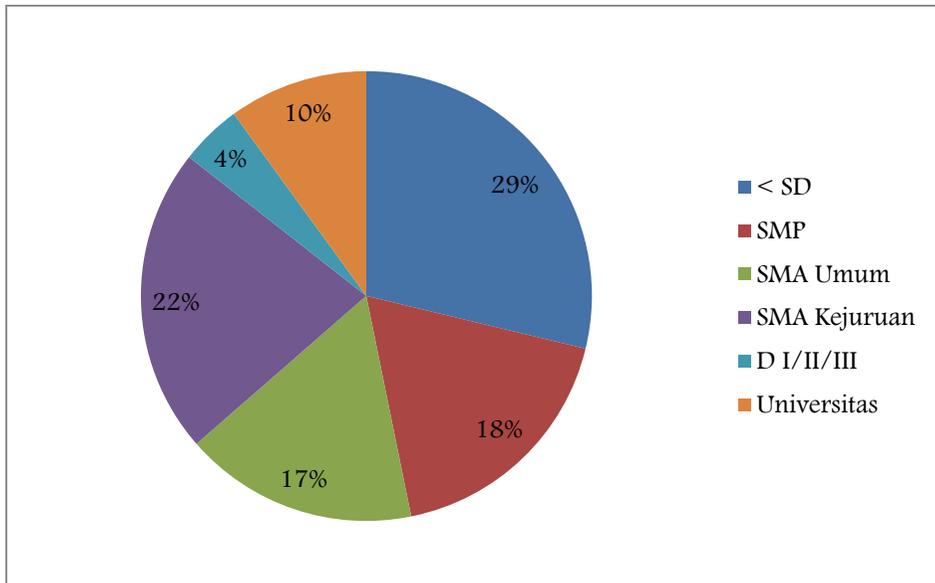
2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti : motivasi kerja, keahlian/ keterampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku.

Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Perkembangan angkatan kerja di DIY berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut :



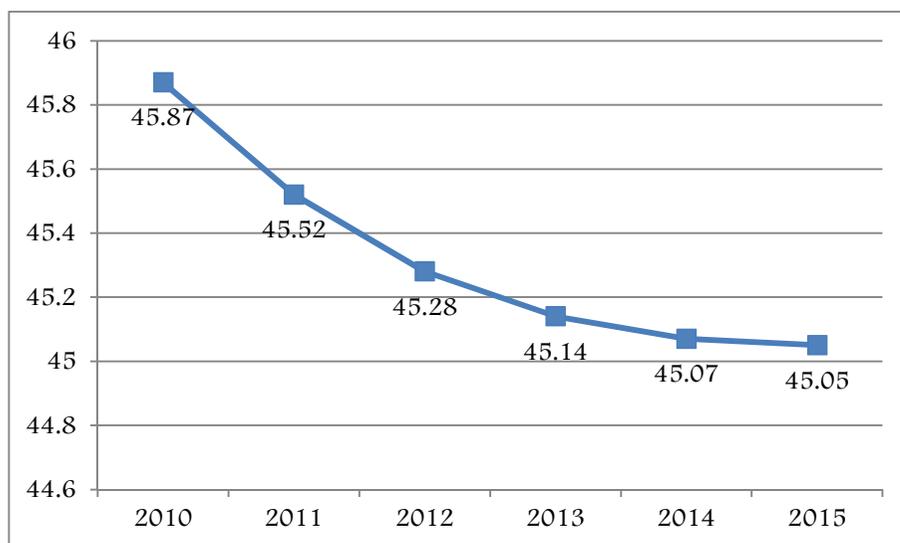
Sumber : Sakernas Februari 2016, BPS DIY, 2016

Gambar 2.92 Presentase Angkatan Kerja DIY Berdasarkan Pendidikan, Februari 2016

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa struktur angkatan kerja di DIY didominasi oleh lulusan SMTA dan tidak tamat SD. Sedangkan lulusan DI/DII/DIII dan universitas baru mencapai sekitar 15,82% di tahun 2014. Sehingga program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti pelatihan kerja dan kewirausahaan mutlak diperlukan agar angkatan kerja di DIY mampu bersaing di dunia kerja.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.



Sumber : Analisis Statistik DIY, 2016

Gambar 2.93 Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Non Produktif Terhadap Penduduk Usia Produktif, Tahun 2010-2015

Pada tahun 2014, angka Rasio Ketergantungan DIY sebesar 45,05 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 orang penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan DIY tergolong tinggi hal ini terkait dengan semakin tingginya capaian angka harapan hidup dan peningkatan *Total Fertility Rate* (TFR) di DIY. Peningkatan jumlah penduduk yang belum dan tidak produktif di DIY memerlukan intervensi pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana

pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian diarahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya. Berikut dapat dilihat hasil capaian target pembangunan (Indikator Kinerja Utama) Gubernur dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016.

Tabel 2.126 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 dan PK Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017	
				Target 2016	Capaian 2016	Tingkat Capaian (%)	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	Persen	68,58	69,06	100,70	70	70
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.	Persen	94,65	94,69	100,64	95	95
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.	Persen	11,6	9,10	-	12	12
4	Daya Saing Pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Persen	20	20,17	100,85	40	40
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	Tahun	73,96	74,75	101,07	74,18	74,18
6	Pendapatan masyarakat meningkat. (ADHK)	Pendapatan perkapita pertahun.	Juta	8,2	23,56	-	8,5	8,5
7	Ketimpangan Antar Wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Wilayah.	Indeks William son	0,4455	0,4688	95,03	0,4445	0,4445
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	Indeks Gini	0,2888	0,425	67,76	0,2878	0,2878
9	Kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah wisatawan	Orang	4.071.753	4.194.261	103,01	4.561.646	4,561,6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017	
				Target 2016	Capaian 2016	Tingkat Capaian (%)	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan wisatawan mancanegara meningkat.	nusantara.						46
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	345.503	355.313	102,84	272,162	-
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara.	Hari	2.45	1,90	77,55	2.60	2.60
		Lama tinggal wisatawan mancanegara.	Hari	2.45	2,00	81,63	2.69	2.69
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai (Kementerian PAN)	A	A	100	A	A
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.	Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan system transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.	Persen	40,57	40,62	100,07	42,57	42,57
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Persen	12,58	12,58	100,00	15,72	15,72
15	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	Persen	64,5	69,81	108,23	64,75	64,75

Ket: * : Data sementara

Tabel 2.127 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiat -an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG- GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+ 9)*	11	12
1	WAJIB											
1	1	Pendidikan										
	5	Program Pendidikan Anak Usia Dini*)	Persen	88	99,21	86	86	100	88	88	100	Disdikpora
	6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persen	86,56	NA	85,75	84,92	99,03	86,56	86,56	100	Disdikpora

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	7	Program Pendidikan Menengah*)	Persen	80,63	99,93	80,17	80,17	100	80,63	80,63	100	Disdikpora
	8	Program Pendidikan Non Formal dan Informal*)	orang	10000	8000	9000	9000	100	10000	10000	100	Disdikpora
	9	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Persen	72,11	99,77	71,66	80,99	113,01	72,11	72,11	100	Disdikpora
	11	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persen	75,17	NA	74,94	84,62	112,91	75,17	75,17	100	Disdikpora

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1 2	Program Pendidikan Tinggi	Persen	59	67.02	58	58	100	59	59	100	Disdikpora
	1 3	Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka*)	Persen	60	100	58,5	58.5	100	60	60	100	Disdikpora
	1 4	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD	peserta didik	1977	NA	1942	2074	106.79	1977	1977	100	Disdikpora

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
15	Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya*)	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Persen	40	27,78	20	-	-	40	40	100	Disdikpora
16	Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengimplemen tasikan model unggulan mutu pendidikan	Persen	40	27,78	20	20	100	40	40	100	Disdikpora
17	Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	Persen	45	48,82	40	40	100	45	45	100	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12		
1	2		Kesehatan										
	5	Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu	Persen	99	NA	98	99,77	101,81	99	99,77	100,78	Dinas Kesehatan
	6	Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan	Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan	Persen	71,9	-	70,4	72,19	102,54	71,9	71,9	100	Dinas Kesehatan
	7	Program Pelatihan Kesehatan dan Peningkatan Mutu Diklat Kesehatan	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	Persen	87	84,77	84	75	89,29	87	87	100	Dinas Kesehatan

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	8	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persen	72,80	-	63	73,73	117,03	72,80	72,80	100	Dinas Kesehatan
	9	Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Persen	100	-	100	97,66	97,66	100	100	100	Dinas Kesehatan
	10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*)	Persen	40	-	39	40,77	104,54	40	40,2	100,5	Dinas Kesehatan
	11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat*)	Persen	6,5	-	6,8	8,97	68,09	6,5	6,5	100	Dinas Kesehatan

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1 2	Program Pencegahan dan pengendalian Masyarakat ³)	Persen	73,44	69,55	65,68	81,62	124,27	73,44	73,44	100	Dinas Kesehatan
	1 3	Program Pembinaan Lansia	Persen	80	-	74,38	85,95	115,56	80	80	100	Dinas Kesehatan
	1 4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persen	89,74	-	82,05	100	121,88	89,74	100	111,433	Dinas Kesehatan

RKPD Tahun 2018

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	15	Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita	Persen	100	99,64	100	99,18	99,18	100	100	100	Dinas Kesehatan
	16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapeljamkesos	Persen	94	-	91	98,5	108,24	94	98,5	104,78	Dinas Kesehatan
	17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Ghrasia	Persen	9,13	8,64	8,8	-	-	9,13	9,13	100	RSJ Ghrasia

RKPD Tahun 2018

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	18	Program Pembiayaan Kesehatan	Persen	86,30	-	79,45	82,67	104,05	86,30	86,30	100	Dinas Kesehatan
	19	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Persen	82	-	81	85	104,94	82	85	103,66	Dinas Kesehatan
	20	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Persen	-	-	85	85	100	-	-	-	Dinas Kesehatan
1	3	Pekerjaan Umum										

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	5	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persen	74.8	73.24	74.2	74,2	100	74.8	74.8	100	Dinas PUPESDM
	6	Program Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan dan Jembatan,										
	7	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPESDM
	8	Program Penyediaan Tanah untuk Infrastruktur	Persen	63,75	32,85	54,04	50,04	92,6	63,75	63,75	100	Dinas PUPESDM

RKPD Tahun 2018

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persen	82,5	79,5	81	81,08	100,09	82,5	82,5	100	Dinas PUPESDM
	10	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	l/det	2100	1200	1600	1652,64	103,29	2100	2100	100	Dinas PUPESDM
	12	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Jiwa	600000	-	500000	712.648	142,52	600000	600000	100	Dinas PUPESDM
	13	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	SR	21000	-	20000	22495	112,48	21000	21000	100	Dinas PUPESDM

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	14	Program Pengelolaan Persampahan	Persen	70	-	65	35,61	54,78	70	70	100	Dinas PUPESDM
	15	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persen	73	-	69	79	114,49	73	73	100	Dinas PUPESDM

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	16	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persen	59	-	55	56,51	102,75	59	59	100	Dinas PUPESDM
	17	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan Desa Potensi	Persen	58	11,5	58	67	115,52	58	58	100	Dinas PUPESDM
	18	Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persen	57,9	-	51,9	58,82	113,33	57,9	57,9	100	Dinas PUPESDM

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=(5+7+9)^*$	11	12
	19	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persen	88	-	86	88	102,33	88	88	100	Dinas PUPESDM
	20	Program Pengendalian Banjir	titik	120	-	100	52,85	52,85	120	120	100	Dinas PUPESDM
	21	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Persen	100	-	93,75	-	-	100	100	100	Dinas PUPESDM
	22	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persen	87,5	-	85	-	-	87,5	87,5	100	Dinas PUPESDM

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	2 3	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Persen	85	-	82,5	-	-	85	85	100	Dinas PUPESDM
1	4	Perumahan										
	1	Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Persen	51	40	46	49	106,52	51	51	100	DINAS PUPESDM

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	2	Program pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persen	64	54	59	89,72	152,07	64	64	140,18	DINAS PUPESDM
	3	Program Pengembangan Perumahan	Persen	6,75	7	7	6,9	102,22	6,75	6,75	100	DINAS PUPESDM
1	5	Penataan Ruang										
	1	Program Perencanaan Tata Ruang	kawasan strategis	19	16	18	-	-	19	19	100	DINAS PTR
	2	Program Pemanfaatan Ruang	Persen	90	NA	80	-	-	90	90	100	DINAS PTR

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
		(nama indikator baru)											
	3	Program Pengendalian Pemanfaatan ruang	Tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di DIY (indikator baru)	Persen	86	NA	71	-	-	86	86	100	DINAS PTR
1	6	Perencanaan Pembangunan											
	5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	Persen	6,97	-	9,38	-	-	6,97	6,97	100	BAPPEDA
	6	Program	Persentase	Persen	2.62	5.63	3.52	-	-	2.62	2.62	100	BAPPEDA

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Perencanaan Pembangunan pemerintahan	kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan										
7	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	Persen	1.09	2.35	1.47	-	-	1.09	1.09	100	BAPPEDA

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	Persen	3.05	6.57	4.11	-	-	3.05	3.05	100	BAPPEDA
9	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	Persen	1.31	2.35	1.76	-	-	1.31	1.31	100	BAPPEDA

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	10	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persen	79.41	NA	77	-	-	79.41	79.41	100	BAPPEDA
1	7	Perhubungan										
	5	Program Peningkatan manajemen dan Rekayasa Lalulintas	Persen	42	25,2	33,6	33,6	100	42	42	100	DISHUB
	6	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persen	87	NA	85	85	100	87	87	100	DISHUB

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	7	Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal	Persen	60	NA	50	50	50	60	60	100	DISHUB
	8	Program Peningkatan Pelayanan angkutan	orang	10.145	-	9.750	9.268	95,06	10.145	10.145	100	DISHUB
	9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	82,5	44,17	65,83	65,3	100	82,5	82,5	100	DISHUB

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	10	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	50	NA	45	45	100	50	50	100	DISHUB
	11	Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	DISHUB
	12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	100	NA	100	100	100	100	100	100	DISHUB
	13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persen	100	NA	100	100	100	100	100	100	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
1	8		Lingkungan Hidup										
	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan kualitas air	Persen	18.69	NA	14.95	14,95	100	18.69	18.69	100	BLH
	6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH	Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup	jenis	11	NA	10	10	100	11	11	100	BLH
	7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Peningkatan kualitas udara	Persen	11.26	NA	9,01	9,01	100	11.26	11.26	100	BLH

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=(5+7+9)^*$	11	12
	8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kelompok	60	NA	50	50	100	60	60	100	BLH
	9	Program Pengelolaan RTH	Persen	58.33	NA	46.47	46,67	100	58.33	58.33	100	BLH
	10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Ha	45	NA	36	96	266,67	45	96	213,33	BLH
1	9	Pertanahan										

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1	Program Perbaikan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Tata Pemerintahan
	2	Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan	Persen	35	NA	30	-	-	35	35	100	Biro Tata Pemerintahan
	3	Program Peningkatan tertib administrasi pertanahan	Bidang	13.035	10535	11.035	12479	113,08	13.035	13.035	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil										

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1	Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persen	97	96	96,5	97,17	100,69	97	97	100	Biro Tata Pemerintahan
1	1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	rasio	0,45	-	0,46	0,48	95,65	0,45	0,45	100	BPPM
	6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Anak	0,35	-	0,36	0,47	69,44	0,35	0,35	100	BPPM

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*)	Persen	36,5	-	36,3	37,26	102,64	36,5	36,5	100	BPPM
	8	Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Persen	96,99	-	96,74	96,57	99,82	96,99	96,99	100	BPPM
	9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen	100	75.28	87.64	87,76	100,14	75.28	75.28	100	BPPM

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
	10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPM
	11	Program Pendidikan politik bagi Perempuan	Persen	11,5	-	11	13,31	121	11,5	11,5	100	BPPM
1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
	1	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*)	Persen	80,224	-	80,222	85,25	106,27	80,224	80,224	100	BPPM

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	2	Program Kesehatan reproduksi remaja	Persen	0,500	-	0,505	0,24	152,47	0,500	0,500	100	BPPM
	3	Program Peningkatan kesejahteraan keluarga	Persen	43	-	43,4	43,45	100,12	43	43	100	BPPM
	4	Program Pengembangan Bina Keluarga	Persen	24,27	-	23,63	23,79	100,68	24,27	24,27	100	BPPM
	5	Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPM

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	6	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	BPPM
1	13	Sosial										
	5	Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial *)	Persen	4,53	16,84	3,87	4,98	128,68	4,53	4,53	100	Dinas Sosial
	6	Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia terlantar	Persen	2,51	3,89	2,24	3,31	147,77	2,51	2,51	100	Dinas Sosial

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		terlantar										
	7	Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Persen	20,18	45,16	19,73	19,6	99,34	20,18	20,18	100	Dinas Sosial
	8	Program Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Korban tindak Kekerasan, Pekerja Migran bermasalah Sosial psikologis, dan korban Trafficking	Persen	3,99	1,61	3,70	1,83	49,46	3,99	3,99	100	Dinas Sosial

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	9	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	Persen	1,30	18,95	1,20	2,58	215	1,30	1,30	100	Dinas Sosial
	10	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya)	Persen	6,56	110,56	4,68	5,73	122,44	6,56	6,56	100	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1 1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS lainnya*)	Persen	4,24	2,46	3,2	3,2	100	4,24	4,24	100	Dinas Sosial
	1 2	Program Pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS*)	Persen	30,56	-	30,29	30,29	100	30,56	30,56	100	Dinas Sosial
	1 3	Program Pembinaan Pelestarian Nilai-NilaiKepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial *)	Persen	70	55,02	63,02	64,56	102,44	70	70	100	Dinas Sosial

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	14	Program Pembinaan Panti Sosial/jompo	Persen	1,33	1,3	1,31	-	-	1,33	1,33	100	Dinas Sosial
	15	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
14		Ketenagakerjaan										

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat'	%	27	7,85	26	31,74	122,07	27	27	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Peningkatan Kesempatan kerja	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	%	21,18	-	20,98	19,4	92,46	21,18	21,18	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 sesuai dengan standar/peraturan	%	30,91	-	30,60	36,65	119,77	30,91	30,91	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
4	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase lembaga yang terstandarisasi	%	53	-	52	75,9	145,96	53	53	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	84	-	75	100	133,33	84	84	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	%	30,91	-	30,60	36,65	119,77	30,91	30,91	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
15	Koperasi dan Usaha kecil Menengah											
	1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UKM	unit usaha	248.191	-	238.645	238.619	99,99	248,191	248,191	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	koperasi	2543	-	2445	2427	99,26	2543	2543	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah Wirusaha UMKM Baru	UMKM	280	-	230	427	185,65	280	280	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
16	Penanaman Modal											

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1	Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. (000)	14002769000	-	12274836000	12077661000	98,39	14002769000	14002769000	100	BKPM
	2	Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi	ijin	369	-	362	417	115,19	369	369	100	BKPM
	17	Kebudayaan										
	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	%	28	-	25	-	-	28	28	100	Dinas kebudayaan
	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	54	-	50,29	52	103,40	54	54	100	Dinas kebudayaan

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		yang dilestarikan										
	3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	%	30	-	20	20	100	30	30	100	Dinas kebudayaan
	4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	35	-	20	20	100	35	35	100	Dinas kebudayaan
	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	%	70	-	55	55	100	70	70	100	Dinas kebudayaan
18		Kepemudaan dan Olahraga										

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1	Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda	%									Dinas Pendidikan dan Olahraga
	2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	sentra	15	NA	14	-	-	15	15	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda	kelompok	405	NA	385	-	-	405	405	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
	4	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	orang	2400	NA	2300	2100	91,30	2400	2400	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga	%	66.67	NA	63.13	-	-	66.67	66.67	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
6	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	medali	30	NA	28	-	-	30	30	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
7	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/ pemberdayaan pemuda" (Indikator Baru)	Persen	100	NA	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	%	100		NA	NA	NA	100	100	100	Badan Kesbanglinmas
			%	100	NA	100	-	-	100	100	100	Badan Kesbanglinmas
	2	Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	angka	0.15	NA	0.17	0,2	117,65	0.15	0.15	100	Badan Kesbanglinmas
	3	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan	%	25	NA	25	32,83	131,32	25	25	100	Badan Kesbanglinmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal										
	4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	86.4	86.05	85.2	-	-	86.4	86.4	100	Bakesbanglinmas
	5	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	%	25	NA	20			25	25	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	kasus	6	6.25	7	8	85,71	6	6	100	Badan Kesbanglinmas
20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,										

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	%	90	87,5	87	87,09	100,1	90	90	100	Biro Organisasi
1 3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	90	85	90	90	100	90	90	100	Biro Organisasi

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiat -an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG- GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+ 9)*	11	12
	2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Umum Humas dan Protokol
	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	%	5	0.53	5	0,18	196,40	5	5	100	Inspektorat

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	%	90	NA	80	100	125	90	90	111,11	Inspektorat
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kelancaran, ketertiban dan keamanan Pelayanan Keprotokolan (UHP)	%	100	97,76	100	-	-	100	100	100	Biro Umum Humas dan Protokol
5	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	%	100	62,75	97,5	94,21	96,62	100	100	100	Sekretariat DPRD

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	%	100	133,88	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
		Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	%	100	133.88	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
	9	Program Pencegahan Dini Bencana	desa	70	-	55	55	100	70	70	100	BPBD
	10	Program Penanggulangan Korban Bencana	%	75	NA	23	23	100	75	75	100	BPBD

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Program Pemulihan Pasca bencana	Persentase pemulihan wilayah rawan bencana	%	10	NA	9	9	100	10	10	100	BPBD
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah	%	46.25	53.11	49.18	48,93	99,49	46.25	46.25	100	DPPKA
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DPPKA
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	%	54.46	NA	54.03	57,06	105,61	54.46	57,06	104,77	DPPKA

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1 2	Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro	%	19,36	-	18,57	18,88	101,67	19,36	19,36	100	DPPKA
	2 7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kab./Kota	%	100	-	100	100	100	100	100	100	DPPKA
		Program Pendidikan	%	70	NA	55	55	100	70	70	100	Badan Diklat

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Kedinasan	n Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat										
15	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Kelancaran Pindah/Purna Tugas PNS	%	100	-	100	-	-	100	100	100	BKD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda	Persentase pemenuhan kompetensi pegawai	%	71	28.45	70	-	-	71	71	100	BKD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	%	86,92	-	87,15	-	-	86,92	86,92	100	BKD

RKPD Tahun 2018

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	16	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	%	75	190	70	166,66	238,09	75	75	100	BKPM
	17	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	%	75	-	70	-	-	75	75	100	Biro Tata Pemerintahan
	18	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	%	100	-	100	-	-	100	100	100	Biro Tata Pemerintahan
	19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	100	-	100	-	-	100	100	100	Biro Tata Pemerintahan

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Pemerintah Desa	dengan kesepakatan penyelesaian										
20	Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Gubernur/Wa gub	%	100	-	100	-	-	100	100	100	Biro Tata Pemerintahan
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan urusan kab/Kota dan provinsi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Tata Pemerintahan
22	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD terlayani tata kearsipan berbasis TI	%	100	100	100	-	-	100	100	100	Biro Umum, Humas dan Protokol

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	23	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	%	NA	100	100	-	-	NA	NA	NA	Biro Umum Humas dan Protokol
	24	Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum	%	100	96	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
	25	Program Pengawasan Produk Hukum	%	100	100	100	83,26*	83,26	100	100	100	Biro Hukum

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
26	Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	Jumlah rekrutimen peserta diklat melalui pola kemitraan per tahun	orang	520	200	640	640	100	520	520	100	Badan Diklat
28	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	95	NA	90	90	100	95	95	100	Biro Adm. Pemb.
29	Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga Keagamaan yang terlayani	%	100	NA	100	100	100	100	100	100	Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
21	Ketahanan Pangan											

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	1	Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan	desa	14	20	18	16	111,11	14	14	100	BKPP
	2	Program Peningkatan Ketersediaan & Cadangan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras)	Ton Setara beras	450	360	405	517,16	127,69	450	517,16	114,92	BKPP
	3	Program Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Presentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	90	100	85	86,76	102,07	90	90	100	BKPP
	4	Program Peningkatan Distribususi dan Akses Pangan	Presentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00	BKPP

RKPD Tahun 2018

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
5	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	%	100	74	87	87,22	100,25	100	100	100	BKPP
2 2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Desa yang telah membentuk badan usaha milik desa (Bumdes)	%	43,36	35,46	38,26	38,78	101,36	43,36	43,36	100	BPPM
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Lembaga pemberdayaan masyarakat aktif	%	31,57	29,73	30,37	94,47	311,06	31,57	31,57	100	BPPM
3	Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah	Persentase Desa yang memiliki profil	%	100	95	85	100	117,65	100	100	100	BPPM

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Desa											
4	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	%	37	78,08	36	92,93	258,14	37	37	37	BPPM
2 3	Statistik											
1	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	%	100	97	98	98,03	100,03	100	100	100	Bappeda
2 4	Kearsipan											
1	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DIY	SKPD	88,24	NA	73,53	80	108,8	88,24	88,24	100	BPAD

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	%	10	38,2	11,5	49,62	431,48	10	10	100	BPAD
	3	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	%	30	233,67	25	25,1	100,4	30	30	100	BPAD
2	5	Komunikasi dan Informatika										
	1	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	urusan/ bidang	14	10.46	13	13	100	14	14	100	Diskominfo
	2	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	%	100	80	90	90	100	100	100	100	Diskominfo

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	3	Program Fasilitasi Pos Telekomunikasi Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik	%	75	67.96	75	75	100	75	75	100	Diskominfo
	4	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Adpem
26		Perpustakaan										
	1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	%	76	-	75	75,6	100,8	76	76	100	BPAD
	2	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	270.18	90	100	111,11	100	100	100	BPAD

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	3	Program Pengembangan Budaya Baca	orang	934.722	NA	849747	812111	95,57	934.722	934.722	100	BPAD
2		Urusan Pilihan										
2	1	Pertanian										
	5	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	%	99	NA	98,55	99,95	101,43	99	100,05	101,06	Dinas Pertanian
	6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Komoditas	3	9	3	-	-	3	3	300	Dinas Pertanian
	7	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	ton	2.208.665	2.253.821	2.203.677	2.206.118	100,25	2.208.665	2.208.665	100	Dinas Pertanian

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	8	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	ton	394.800	323.373,08	390,900	391,020	100,01	394.800	394.800	100	Dinas Pertanian
	9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	AU	641.416	612.000	620,320	620,516	100,03	641.416	641.416	100	Dinas Pertanian
2	2	Kehutanan										
	5	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Ton	80.152	82.379,82	80,125	73,755,65	92,02	80.152	80.152	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	6	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	%	117	139,75	116	124,08	106,97	117	117	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	24.000	25.378,25	25,000	25354,8	98,58	24.000	24.000	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	8	Program Penataan Kawasan Hutan	Persen	27,85	29,94	27,77	30,45	109,65	27,85	30,45	109,33	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	9	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persen	7,37	5,29	6,48	6,08	93,83	7,37	7,37	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	10	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Persen	90	90	85	94	110,59	90	94	104,44	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persen	23,77	7,03	26,44	6,03	177,19	23,77	6,03		Dinas Kehutanan dan Perkebunan

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan-an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
3	Energi dan Sumber Daya Mineral											
1	Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	%	88,1		86,3	96,31	111,6	88,1	88,1	100	Dinas PUPESDM
2	Program Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	SBM (000 SBM)	130,1	117,95	123,59	123,59	100	130,1	130,1	100	Dinas PUPESDM
3	Program Pembinaan Pengawasan Pengendalian Pengelolaan Pendayagunaan Air Tanah	Rerata penurunan muka air tanah	%	< 20	-5	-20	- 20	100	< 20	< 20	100	Dinas PUPESDM

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi	%	15	2,25	12	0	0	15	15	100	Dinas PUPESDM
	5	Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar	%	80	NA	70	-	-	80	80	100	Dinas PUPESDM
	6	Pembinaan dan Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan	%	13	2,75	12	12	100	13	13	100	Dinas PUPESDM
4		Pariwisata										
	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	orang	22.198.333	18.435.445	19.302.898	19.753.145	102,33	22.198.333	22.198.333	100	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	Unit	93	88	91	92	101,1	93	93	100	Dinas Pariwisata
	3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Fokdarwis	Kelompok	96	86	91	91	100	96	96	100	Dinas Pariwisata
	4	Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah Desa Wisata	Desa	90	80	85	85	100	90	90	100	Dinas Pariwisata
	5	Kelautan dan Perikanan											
	1	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Ketersediaan Ikan Perkapita	kg/kap/thn	31,32	28,95	29,94	30,24	101	31,32	31,32	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	8.400	6.285.78	7.600	5001,2	65,80	8.400	8.400	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Dokumen	300	304	300	303	101	300	303	101	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Ton	88.500	72.000,27	79.000	76.875,6	97,31	88.500	88.500	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar	Ha	16	14	15	16	106,67	16	16	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
6	program peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	NTP sektor perikanan	rasio	106	122,34	105	104,29	99,32	106	106	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim	Orang	1890	NA	1710	1710	100	1890	1890	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	Rasio	0,17	1,42	0,14	1,42	1014,29	0,17	1,42	835,29	Dinas Kelautan dan Perikanan

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
6	Perdagangan											
1	Program Peningkatan Pengembangan Ekspr	Nilai Ekspor	Juta US\$	221,95	242	214,44	251,43	117,25	221,95	251,43	113,28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah SIUP	S IUP	48.787	46.607	46.910	48.517	103,42	48.787	48.787	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP	247.500	261.366	240.500	106.806	44,41	247.500	247.500	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Industri											

RKPD Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program /keg. RKPD Tahun berjalan (tahun 2017)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANG-GUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	1	Program Pengembangan IKM	IKM	82.292	88.637	82.087	90.906	110,74	82.292	90.906	110,47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Ribu Rp.	3.431.546.985	3.489.769.674	3.384.173.260	3.643.222.453	107,65	3.431.546.985	3.489.769.674	101,69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Program Pengembangan Industri Kreatif	IKM	34.157	38.489	34.082	40.162	117,84	34.157	40.162	117,58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	8	Ketransmigrasian										
	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	%	8	15,48	7,85	8,44	107,52	8	8	105,5	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

2.6 Permasalahan Pembangunan

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan yang selama ini menjadi kendala di DIY dan sebagai dasar pijakan dalam perencanaan ke depan meliputi :

2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Prioritas: Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, dengan sasaran:

1. Indeks Pembangunan Manusia Meningkat

- a. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga medis belum merata;
- b. Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis, belum diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana termasuk tenaga medis yang mencukupi;
- c. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
- d. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
- e. Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedik, bidan, ahli gizi dan ahli sanitasi;
- f. Sistem pengelolaan jaminan kesehatan sosial belum optimal;
- g. Peningkatan perhatian dan pelayanan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- h. Perlunya penguatan peran keluarga dan komunitas masyarakat untuk peningkatan kualitas SDM;
- i. Jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik guna peningkatan kapasitas SDM;
- j. Perlunya pemerataan pertumbuhan ekonomi di semua wilayah.

2. Layanan Pendidikan Meningkat

- a. Adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Kab/Kota ke Provinsi;
- b. Masih diperlukan pemerataan pendidikan di semua kabupaten/kota;

- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
 - d. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan dunia kerja belum optimal;
 - e. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal masih kurang;
 - f. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, masih sangat kurang;
 - g. Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
 - h. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
 - i. Pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum maksimal;
 - j. Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik untuk pengembangan riset/penelitian guna mendukung produktifitas dan daya saing daerah belum optimal;
 - k. Kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar *stakeholder* masih kurang;
 - l. Upaya untuk menuju DIY menjadi Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 belum menjadi arus utama pengampu kepentingan terkait.
2. Prioritas: Penguatan Kapasitas Ekonomi, dengan sasaran:
1. Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan
 - a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
 - b. Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan untuk lokasi proyek;
 - c. Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;
 - d. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
 - e. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan;

- f. Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal.
 - g. Daya saing produk UMKM belum kuat;
 - h. Penggunaan bahan baku lokal belum optimal;
 - i. Ketergantungan terhadap bahan baku/penolong impor masih tinggi;
 - j. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
 - k. Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
 - l. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
 - m. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;
 - n. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk lokal;
 - o. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.
 - p. Produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
 - q. Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
 - r. SDM dan kelembagaan usaha perikanan belum memadai;
 - s. Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai;
 - t. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal; Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
 - u. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
 - v. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
 - w. Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah;
 - x. Akses pemodal bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
2. Angka Kemiskinan Turun
- a. Tingkat kemiskinan DIY masih diatas rata-rata nasional;
 - b. Ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah;

- c. Perlunya manajemen terhadap pertumbuhan penduduk;
 - d. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
 - e. Akses permodalan dan peningkatan kapabilitas untuk masyarakat miskin yang produktif masih sangat terbatas;
 - f. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
 - g. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih belum optimal;
 - h. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
 - i. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
 - j. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
 - k. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
3. Angka Pengangguran Turun
- a. Perlunya penyiapan SDM di DIY guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bandar udara baru dan sektor pendukungnya;
 - b. Kurangnya daya tarik profesi petani/nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat;
 - c. Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor formal belum sebanding dengan laju pertumbuhan pencari kerja;
 - d. Belum optimalnya daya saing pencari kerja DIY dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
 - e. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi kebutuhan di pasar kerja. Kesenjangan ini membuat pencari kerja sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan;
 - f. Perluasan kesempatan kerja belum optimal;

- g. Minat penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan.

3. Penguatan Kapasitas Infrastruktur, dengan sasaran:

1. Layanan Infrastruktur Dasar Meningkatkan

- a. Perlunya penyiapan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional;
- b. Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
- c. Beberapa ruas jalan kondisinya mulai mengalami penurunan;
- d. Terjadinya kemacetan pada titik-titik simpangan yang merupakan akses utama masyarakat;
- e. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
- f. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal;
- g. Perlunya penyiapan terhadap konektivitas transportasi di lokasi bandara baru.
- h. Minimnya sumberdaya energi di wilayah DIY;
- i. Upaya untuk penyediaan energi terbarukan belum maksimal;
- j. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
- k. Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang layak;

2. Layanan Infrastruktur Pendukung Kawasan Budaya Meningkatkan

- a. Masih banyaknya infrastruktur kawasan budaya yang perlu dilakukan rehabilitasi;
- b. Masih banyak kawasan budaya yang minim infrastruktur pendukung;
- c. Perlunya regulasi untuk menjaga infrastruktur di kawasan budaya agar tetap lestari;
- d. Perlunya edukasi dan penguatan masyarakat yang bermukim di kawasan budaya guna menjaga kelestarian kawasan.

4. Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatkan
 - a. Peningkatan kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah;
 - b. Peningkatan komitmen antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat realisasi pembangunan daerah;
 - c. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
 - d. Implementasi yang lebih bermanfaat dari kerjasama dengan para pihak di luar negeri masih kurang;
 - e. Kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri belum optimal
 - f. Kapabilitas SDM Pemerintah dalam mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*e-Gov*) belum optimal;
 - g. Masih minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang layanan teknologi informasi dalam rangka implementasi DGS;
 - h. Masih belum optimalnya layanan unggulan DGS;
 - i. Perlu adanya standar pelayanan minimal terkait pengelolaan DGs;
 - j. Perlunya melakukan implementasi budaya kerja SATRIYA secara masif di lingkungan kerja instansi pemerintah;
 - k. Integrasi penanganan keluhan terhadap pelayanan publik masih belum optimal;
 - l. Inovasi pelayanan publik masih minim.
2. Opini Pemeriksaan BPK Bertahan
 - a. Peningkatan implementasi *Good & Clean Governance*;
 - b. Masih diperlukan penguatan kapasitas pengguna barang daerah dalam pengelolaan aset yang digunakannya;
 - c. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah di masing-masing pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran belum merata;

- d. Integrasi data perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan belum optimal;
 - e. Perlunya peningkatan kinerja pelaksanaan program/kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
5. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
- 1. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat
 - a. Pengaturan tata ruang dan wilayah belum optimal;
 - b. Penataan bangunan dan lingkungan pada area kawasan budaya masih belum optimal;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
 - d. Masih belum optimalnya perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat;
 - e. Belum optimalnya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten;
 - f. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan.
 - g. Penataan bangunan dan lingkungan pada area kawasan budaya masih belum optimal;
 - h. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
 - 2. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat;
 - a. Tingginya konversi/alih fungsi lahan pertanian/hutan menjadi lahan terbangun (area pemukiman, industri, dll.);
 - b. Perkembangan kawasan perkotaan Yogyakarta yang terus meningkat dan semakin berkurangnya kawasan terbuka hijau;
 - c. Belum optimalnya pengendalian terhadap penambangan dan pembangunan di kawasan lindung karst;
 - d. Peningkatan pencemaran dan peningkatan konflik pemanfaatan sumber daya air;
 - e. Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan hutan;
 - f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah;

- g. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah secara kewilayahan;
 - h. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca;
 - i. Semakin meningkatnya limbah cair, padat dan B3;
 - j. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - k. Masih lemahnya kelembagaan pengelola air irigasi;
 - l. Gerakan penghematan energi belum berjalan efektif;
 - m. Ancaman ketersediaan air baku karena tingginya tingkat konsumsi dan konversi lahan;
 - n. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, kekeringan dan potensi bahaya tsunami.
3. Ketimpangan Wilayah Turun;
- a. Kemampuan keuangan antar daerah yang tidak sama sehingga perlu kebijakan afirmatif;
 - b. Perlunya menjamin kelancaran mobilitas barang/jasa antar daerah;
 - c. Masih tingginya ketimpangan investasi antar kabupaten/kota;
 - d. Masih terdapat daerah dengan akses ke pusat pemerintahan/bisnis yang minim;
 - e. Sebaran infrastruktur pelayanan publik belum merata ke seluruh kawasan;
 - f. Akses pasar masih belum merata di semua wilayah;
 - g. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.
4. Ketimpangan Pendapatan Turun
- a. Penguatan kapasitas SDM sehingga memberikan kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik;
 - b. Pengelolaan pertumbuhan penduduk secara berkualitas;
 - c. Disparitas pembangunan pada beberapa wilayah masih tinggi;
 - d. Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di wilayah yang tertinggal;
 - e. Penguatan terhadap industri-industri berbasis kerakyatan/industri rumah tangga masih minim;

6. Pengembangan Pariwisata, dengan sasaran:
 1. Kunjungan Pada Destinasi Wisata Provinsi Meningkat;
 - a. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan;
 - b. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam menghadapi globalisasi;
 - c. Standarisasi kualitas pelayanan wisata belum maksimal;
 - d. Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata;
 - e. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
 - f. Pengembangan produk pariwisata cenderung stagnan karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
 - g. Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata;
 - h. Masih tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain;
 - i. Infrastruktur pendukung, seperti lahan parkir terutama pada objek pariwisata di perkotaan masih mengalami kendala;
 - j. Upaya untuk menuju DIY menjadi Pusat Pariwisata Terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 belum menjadi arus utama pengampu kepentingan terkait.
 2. Destinasi Wisata Budaya Meningkat.
 - a. Masih belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
 - b. Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset untuk menarik kunjungan wisata belum optimal;
 - c. Sarana dan prasarana di kawasan budaya belum memadai untuk mendukung pengembangan wisata;
 - d. Akses untuk mendukung destinasi wisata budaya belum optimal;
 - e. Perlunya penguatan kelembagaan pengelola kawasan budaya.
7. Pelestarian Nilai Budaya, dengan sasaran Pelestarian Budaya Jogja Meningkat.
 - a. Upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi belum berjalan optimal;
 - b. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;

- c. Belum optimalnya upaya penggalian, reaktualisasi, dan revitalisasi nilai-nilai budaya yang menjadi spirit dari *rennaisans* Yogyakarta;
 - d. Arus globalisasi dan budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan budaya lokal cenderung semakin meningkat;
 - e. Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) semakin terancam kelestariannya;
 - f. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
 - g. Sarana dan Prasarana serta manajemen pengelolaan aset budaya masih belum memadai;
 - h. Upaya untuk menuju DIY menjadi Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 belum menjadi arus utama pengampu kepentingan terkait.
8. Peningkatan Tata Nilai dan Etika, dengan sasaran Stabilitas Wilayah Meningkat.
- a. Masih terdapat potensi konflik ditengah masyarakat baik karena sentimen agama maupun persoalan lainnya;
 - b. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
 - c. Kapasitas dan kapabilitas aparaturnya penegak hukum pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
 - d. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tempat tinggal masing-masing;
 - e. Kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
 - f. Peningkatan ancaman penyalahgunaan narkoba;
 - g. Masih adanya ancaman terorisme dan organisasi yang memiliki kecenderungan merugikan masyarakat;
 - h. Penegakan supremasi hukum belum optimal;
 - i. Pemanfaatan teknologi dalam meminimalisir tindak kejahatan masih minim;
 - j. Penanggulangan kejahatan teknologi informasi masih lemah, termasuk di dalamnya ujaran kebencian dan provokasi melalui media sosial;

- k. Mulai lunturnya semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat;
- l. Adanya pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi terutama untuk anak dan remaja;
- m. Peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda (usia sekolah).

2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Pendidikan

- 1. Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan semakin berkurang setiap tahunnya karena memasuki masa pensiun sedangkan formasi pengangkatan baru sangat terbatas dan tidak dilaksanakan setiap tahun (moratorium PNS)
- 2. Banyaknya peserta didik yang masuk kategori miskin atau tidak mampu secara ekonomi;
- 3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- 4. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan dunia kerja belum optimal;
- 5. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal masih kurang;
- 6. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, masih sangat kurang;
- 7. Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
- 8. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- 9. Fasilitas, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik untuk pengembangan riset/penelitian guna mendukung produktifitas dan daya saing daerah belum optimal;
- 10. Kerjasama pengembangan pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan masih kurang;
- 11. Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar masih belum optimal.

12. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya atau ada kecenderungan terjadi kapitalisme pendidikan;
13. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi
14. Pendidikan cenderung mekanistik;
15. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY masih belum optimal;
16. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
17. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
18. Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
19. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
20. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;
21. Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
22. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
23. Penanganan secara terpadu bagi anak berkebutuhan khusus belum memadai;
24. Kembali maraknya kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar dan kejahatan lain yang melibatkan anak usia sekolah;

25. Adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Kab/Kota ke Provinsi.

B. Kesehatan

1. Peningkatan jumlah kasus kematian ibu. Sebagian besar kematian terjadi di rumah sakit dan penyebabnya paling dominan adalah perdarahan. Kematian juga dipengaruhi adanya keterlambatan penanganan dan pengambilan keputusan oleh keluarga saat mengalami gawat darurat;
2. Peningkatan kasus balita Kurang Energi Protein (KEP) selama 2 tahun terakhir;
3. Beban ganda penyakit seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup. Di satu sisi beban penyakit menular seperti HIV AIDS, TB paru, DBD dan diare masih perlu penanganan serius dan disisi lain penyakit tidak menular yang didominasi hipertensi, diabetes mellitus, kanker, asma, dan gangguan jiwa cukup tinggi;
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat DIY meskipun dari sisi target sudah tercapai namun masih ada beberapa komponen yang cakupannya masih rendah yaitu tidak merokok di dalam rumah, aktivitas fisik, serta mengkonsumsi buah dan sayur;
5. *Total coverage* dalam jaminan kesehatan untuk masyarakat DIY yang belum tercapai;
6. Masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa maupun eks penderita gangguan jiwa;
7. Belum semua keluarga mau menerima kondisi anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa dan kurangnya kapasitas keluarga dalam mendampingi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
8. Belum adanya rehabilitasi psikososial di masyarakat sehingga ODGJ pasca rawat inap tidak bisa kembali produktif dan mandiri karena belum ada yang mengintervensi pemulihan kemandirian dan produktivitas sehingga cenderung berdampak pada kekambuhan;
9. Meskipun angka Prevalensi TB di DIY sudah lebih baik dari angka nasional, tetapi jumlah penderita TB BTA (+) cenderung meningkat bahkan akhir – akhir ini terjadi peningkatan jumlah pasien TB kebal obat (*Multi Drug Resistance/MDR* dan *Extensively Drug Resistance/XDR*) dan TB HIV;

10. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan kunjungan neonatus pertama (KN-1) belum optimal;
11. Mutu layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan;
12. Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum masih perlu ditingkatkan;
13. Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional yang berlangsung cepat dan dinamis, belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenagatenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
14. Rasio kemampuan pelayanan kesehatan dan tenaga medis di wilayah perdesaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat belum merata;
15. Masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa maupun eks penderita gangguan jiwa sehingga penangannya tidak optimal;
16. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan menyongsong operasionalisasi bandara udara baru.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Hambatan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk pekerjaan yang disebabkan oleh kendala administrasi terutama bukti kepemilikan tanah yang mengakibatkan proses pemanfaatan lahan terkait terganggu.
2. Masih terdapatnya lokasi genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta;
3. Belum optimalnya layanan jasa konstruksi.
4. Beberapa ruas jalan kondisinya mulai mengalami penurunan;
5. Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
6. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
7. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan;
8. Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;

9. Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal;
10. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung mitigasi bencana belum optimal;
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah;
12. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
13. Masih tingginya disparitas antar wilayah membutuhkan percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah;
14. Kurang optimalnya perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan;
15. Upaya konservasi air tanah belum menjadi prioritas utama bagi semua pihak;
16. Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal;
17. Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air;
18. Upaya peningkatan penyediaan air baku belum sebanding dengan meningkatnya kebutuhan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perkotaan di DIY;
19. Kelembagaan pengelola irigasi dan pengairan belum berfungsi secara optimal;
20. Beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya kekeringan.
21. Perlunya pemeliharaan jaringan irigasi guna penyediaan air untuk peningkatan produktivitas lahan pertanian dan penyediaan air baku;
22. Gerakan penghematan energi belum berjalan efektif;
23. Ancaman ketersediaan air baku karena tingginya tingkat konsumsi dan konversi lahan;
24. Pengaturan tata ruang dan wilayah belum optimal;
25. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
26. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program

- pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai peruntukannya;
27. Pemerintah Kabupaten belum menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ).
 28. Belum ditetapkannya instrumen pengendalian salah satunya peraturan mengenai tata cara pemberian insentif disinsentif.
 29. Indikasi program dalam dokumen Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan penyusunan rencana pembangunan daerah.
 30. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain;
 31. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal, dan keberpihakan kepada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan.
- D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penyediaan pemukiman yang layak serta mencukupi dan terjangkau bagi setiap lapisan masyarakat;
 2. Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
 3. Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang layak termasuk penanganan RTLH.
 4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perumahan sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terkendali;
 5. Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan;
 6. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan di kawasan permukiman;
 7. Belum tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan budaya.
- E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1. Terjadinya gejolak sosial masyarakat dalam bentuk berbagai aksi unjuk rasa, diantaranya diakibatkan oleh adanya rencana pembangunan bandara di Kulon Progo.

2. Penyakit masyarakat sebagai fenomena sosial dalam bentuk prostitusi, minuman keras, gelandangan pengemis dan anak jalanan masih terus terjadi.
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
4. SDM Satpol PP DIY belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tidak seimbang dengan jumlah Perda yang harus dikawal.
5. Asset Pemda DIY yang tersebar di kabupaten/kota memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin.
6. Adanya aktivitas kelompok separatis dengan identitas Bintang Kejora yang selalu menyuarakan kemerdekaan Papua Barat. Dalam tahun 2016, minimal lima kali aksi unjuk rasa dilakukan diantaranya dalam rangka HUT West Papua, peringatan PEPERA 1969 maupun dalam rangka peringatan Trikora. Selain itu tidak jarang dilakukan rapat/konsolidasi tertutup di asrama, khususnya pada peringatan hari-hari khusus Organisasi Papua Merdeka
7. Indikasi adanya kelompok radikal kanan dan radikal kiri yang salah satunya ditandai pada awal tahun 2016 berupa pemulangan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal DIY sebanyak 421 jiwa. Ormas Gafatar disinyalir merupakan jelmaan kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia
8. Keberadaan Orang Asing:
 - a. Kunjungan jurnalis asing (minimal satu tim setiap bulan) yang seringkali tidak terpantau karena keterlambatan surat pemberitahuan dari Pemerintah;
 - b. Keberadaan *refugee* yang ditampung di Asrama Haji Yogyakarta (Jl. Lingkar Utara, Sinduadi, Mlati Sleman) berpotensi menimbulkan dampak ipoleksosbudhankam mengingat mayoritas berasal dari wilayah konflik di Timur Tengah dan Asia;
9. Masih terdapat potensi konflik di masyarakat yang berlatar belakang sentimen agama maupun sebab lainnya;
10. Perlunya untuk terus menjaga kerukunan antar warga masyarakat;

11. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tempat tinggal masing-masing;
12. Kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
13. Peningkatan ancaman penyalahgunaan narkoba;
14. Masih adanya ancaman terorisme dan organisasi yang memiliki kecenderungan merugikan masyarakat;
15. Penegakan hukum belum optimal;
16. Pemanfaatan teknologi dalam meminimalisir tindak kejahatan masih minim;
17. Penanggulangan kejahatan teknologi informasi masih lemah, termasuk di dalamnya ujaran kebencian dan provokasi melalui media sosial;
18. Mulai lunturnya semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat;
19. Adanya pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi terutama untuk anak dan remaja, termasuk fenomena klithih;
20. Peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda (usia sekolah).
21. Peningkatan kemampuan SAR/Linmas guna mendukung kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan gangguan;
22. Pengembangan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini masyarakat perlu ditingkatkan;
23. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, tsunami serta kekeringan menjadi tantangan di masa depan, sehingga usaha mitigasi dan penanggulangan bencana serta penyadaran masyarakat harus terus dilakukan.

F. Sosial

1. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang sejatinya merupakan hak semua orang masih kurang dan belum merata.;
2. Penurunan angka kemiskinan masih perlu terus diupayakan secara terpadu melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dengan mengedepankan program-program pemberdayaan;
3. Pola-pola Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial masih belum optimal;

4. Cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial masih belum optimal;
5. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sesuai amanat Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum berjalan seperti yang diharapkan;
6. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
7. Perlunya solusi yang komprehensif terhadap keberadaan gelandangan, pengemis dan orang terlantar.
8. Belum optimalnya penanganan sosial gelandangan dan pengemis dimana sebagian besar gelandangan dan pengemis berasal dari luar DIY dan banyak diantaranya adalah gelandangan dan pengemis psikotik (mengalami gangguan kejiwaan).
9. Masih banyaknya korban Penyalahgunaan Napza di DIY sedangkan berdasar Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, provinsi tidak lagi memiliki kewenangan dalam Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
10. Permasalahan sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) cenderung meningkat

G. Tenaga Kerja

1. Perlunya penyiapan SDM di DIY guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bandar udara baru dan sektor pendukungnya;
2. Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor formal belum sebanding dengan laju pertumbuhan pencari kerja;
3. Belum optimalnya daya saing pencari kerja DIY dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean(MEA);
4. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi kebutuhan di pasar kerja. Kesenjangan ini membuat pencari kerja sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan;
5. Standar Kompetensi tenaga kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, sehingga diperlukan penyesuaian sarana dan prasarana pendukung pelatihan berbasis kompetensi.

6. Perluasan kesempatan kerja belum optimal;
 7. Minat penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan.
- H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Partisipasi perempuan sebagai pengurus di organisasi politik sudah memenuhi target yang ditetapkan tetapi posisinya belum berada pada jabatan sebagai pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di legislatif.
 2. Sistem kaderisasi kepengurusan Organisasi Perempuan belum terlaksana dengan optimal.
 3. Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal;
 4. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dengan jenis kekerasan yang semakin beragam serta bersifat lintas daerah;
 5. Partisipasi perempuan sebagai pengurus di organisasi politik sudah memenuhi target yang ditetapkan tetapi posisinya belum berada pada jabatan sebagai pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di legislatif.
 6. Sistem kaderisasi kepengurusan Organisasi Perempuan belum terlaksana dengan optimal.
 7. Perlindungan anak dari paparan bahaya narkoba dan pornografi belum optimal;
 8. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
 9. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
 10. Jumlah kasus penyimpangan reproduksi remaja semakin meningkat
 11. Perlunya aktualisasi program keluarga berencana untuk mengatasi lonjakan jumlah penduduk dan berbagai dampak sosial yang disebabkan;

12. Perlunya penguatan peran keluarga dan komunitas masyarakat untuk peningkatan kualitas SDM;

I. Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan DIY sudah cukup tinggi, namun pola konsumsi rumah tangga masih kurang beragam dan cenderung tergantung pada sumber energi dari jenis bahan pangan tertentu, yaitu beras dan/atau tepung terigu.
2. Usaha/industri pangan berbasis sumberdaya lokal terus dikembangkan, namun perkembangannya berjalan relatif lambat dan belum tergarap sepenuhnya.
3. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan sudah dilaksanakan namun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang aman masih relatif rendah.
4. Upaya penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan telah dilakukan secara intensif dan melibatkan berbagai instansi dan para pihak terkait, namun sampai tahun 2016 ini masih terdapat 16 Desa Rawan Pangan di DIY.
5. Penyuluhan sebagai salah satu ujung tombak keberhasilan pembangunan ketahanan pangan telah mendapat prioritas tetapi masih terdapat kendala, antara lain masih beragamnya kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/ kota, jumlah tenaga penyuluh PNS/ASN yang terus berkurang setiap tahunnya karena alih tugas maupun pensiun, dan penempatan tenaga penyuluh yang belum sesuai dengan kelembagaan maupun kompetensinya.
6. Ketersediaa dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
7. Belum optimalnya pemantauan, distribusi, harga dan akses pangan masyarakat;
8. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
9. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah.

J. Pertanian

1. Belum optimalnya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten disebabkan basis data tanah kasultanan

dan kadipaten belum tersedia secara lengkap dan komprehensif sebagai acuan dan lokasi keberadaanya tersebar;

2. Masih banyaknya kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
3. Permohonan izin pelepasan tanah yang diakibatkan adanya tukar-menuka antara pemerinah desa dengan orang perorangan belum disertai pernyataan penguasaan masing-masing obyek tanah, sehingga proses lebih lanjut harus menunggu kelengkapan berkas tersebut;
4. Adanya permasalahan pemanfaatan tanah dan kejelasan status tanah kas desa.

K. Lingkungan Hidup

1. Jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan yang berdampak bagi kualitas udara;
2. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lerang tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung api Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama,
3. Keterbatasan blangko KTP-el di daerah menyebabkan sebagian penduduk belum dapat menerima fisik KTP-el.
4. Masih dijumpai instansi/lembaga penyelenggara layanan publik yang tidak mau menerima Surat Keterangan Pengganti KTP-el.
5. Petugas pelaksana adminduk di desa/kelurahan, kecamatan, dan dinas belum melaksanakan kebijakan prosedur baru sehingga menghambat penduduk untuk memperoleh dokumen secara cepat dan mudah.
6. Cakupan akta kelahiran anak di Sleman angkanya jauh di bawah target minimal nasional, walaupun secara agregat capaian DIY pada 2016 telah melampaui target nasional.
7. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun,
8. Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut,

9. Pencemaran air tanah meningkat menyebabkan tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi,
 10. Wilayah DIY rawan terhadap ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin rebut, banjir, tanah longsor, tsunami serta kekeringan;
 11. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan, serta sumberdaya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisian lahan,
 12. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri,
 13. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak,
 14. Peningkatan limbah cair, padat dan B3,
 15. Masih adanya sumber pencemar air sungai yang berasal dari limbah rumah tangga yang masuk ke aliran sungai,
 16. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan Perkotaan.
- L. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Masih banyak data ganda yang belum dibersihkan dari database SIAK yang mempengaruhi kualitas data kependudukan;
 2. Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman biometrik tidak menunjukkan perkembangan signifikan;
 3. Masih terdapat instansi atau lembaga swasta layanan publik belum melaksanakan tertib administrasi kependudukan
 4. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia,
 5. Terjadinya ketimpangan penyebaran penduduk karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota khususnya kelompok usia muda produktif, dan lebih terdidik sehingga menghadapi kekurangan tenaga kerja dan sumber daya potensial untuk pembangunan wilayah, bahkan beberapa wilayah pedesaan mengalami pertumbuhan berkurang (*depopulasi*),
 6. Pertambahan penduduk di kota juga diakibatkan oleh lulusan lembaga-lembaga pendidikan berasal dari luar daerah yang tidak ingin kembali kedaerahnya sesudah menamatkan pendidikannya,

7. Ketimpangan distribusi penduduk yang semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan social, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.

M. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Perlunya peningkatan kapabilitas pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakatnya setelah terbitnya UU 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Ada beberapa substansi pasal yang berbeda/tidak sinkron antara Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Ketidaksinkronan ini menimbulkan kesulitan bagi Daerah dalam Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa padahal Perbup ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes.
3. Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa diatur dengan PMK Nomor 93 /PMK.07/2015 yang menyebutkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan tiga (3) tahap dalam setahun sedangkan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 disebutkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan dua (2) tahap dalam setahun sehingga menyulitkan dalam penyaluran dan pelaporan dana desa.
4. Target pembentukan Desa Prima sudah terpenuhi tetapi upaya untuk meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi belum maksimal.
5. BUMDes sampai dengan tahun 2016 baru terbentuk 152 BUMdes dari 392 desa. BUMDes yang terbentuk belum optimal dalam melaksanakan program kerjanya karena BUMDes belum ada penyertaan modal dari Desa.
6. Pengisian profil Desa dalam webs prodeskel baru data dasar keluarga semetara untuk potensi desa belum dilakukan entry.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu lebih dioptimalkan;
8. Perlunya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan serta revitalisasi peran Posyandu dan PKK sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat desa.

N. Perhubungan

1. Sistem transportasi yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
2. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu, yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal;
3. Penyiapan infrastruktur transportasi pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
4. *Load factor* angkutan umum belum sesuai harapan disebabkan oleh minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang masih rendah;
5. Semakin banyaknya titik-titik kemacetan di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga.
6. Terjadinya kemacetan pada titik-titik simpangan yang merupakan akses utama masyarakat;
7. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
8. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal.
9. Jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan tidak tercapai karena *Time Table Operasional* Bus Trans Jogja sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalu lintas yang semakin padat dan kondisi bus banyak yang sudah masuk usia peremajaan sehingga sering mengalami kerusakan.
10. Dukungan jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan dari angkutan perkotaan reguler tidak tercapai karena rendahnya kualitas pelayanan bagi penumpang. Akar permasalahan rendahnya kualitas pelayanan angkutan perkotaan reguler ini adalah sistem pengelolaan yang tidak tepat dan berhentinya angkutan umum di sembarang tempat.

O. Komunikasi dan Informatika

1. Pengembangan infrastruktur penunjang pelaksanaan *e-government* belum sampai tingkat Kabupaten/Kota di DIY sehingga pengembangan *e-government* belum menyeluruh sampai tingkat desa

2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum dapat mengoptimalkan semua media informasi yang ada.
 3. Pelaksanaan Program *Digital Government System* (DGS) belum sesuai dengan harapan, yakni belum terintegrasinya Program DGS di setiap SKPD;
 4. Belum optimalnya layanan unggulan DGS;
 5. Perlunya edukasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara bijak;
 6. Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan dan sistem informasi yang ada.
- P. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1. Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
 2. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
 3. Kualitas kelembagaan dan SDM koperasi dan UMKM masih kurang;
 4. Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih kurang;
 5. Daya saing produk UMKM belum kuat,
 6. Penggunaan bahan baku lokal belum optimal dan tergantung bahan baku/penolong impor,
 7. Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan,
 8. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI),
 9. Kemampuan teknologi IKM masih kurang.
 10. Akses pasar masih rendah,
 11. Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung,
 12. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan dan perlindungan konsumen masih kurang,
 13. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor,
 14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri,
 15. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik;

16. Perlunya penguatan terhadap dampak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Q. Penanaman Modal

1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
2. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
3. Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan belum siap;
4. Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;
5. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
6. Masih tingginya ketimpangan investasi antara kabupaten/kota;
7. Masih ditemukannya kendala pelaporan realisasi penanaman modal oleh investor kepada pemerintah daerah.

R. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Terbatasnya sarana untuk kegiatan kepemudaan, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan;
2. Angka dan bentuk kenakalan remaja cenderung meningkat dan semakin mengkhawatirkan;
3. Perlunya apresiasi untuk kegiatan positif pemuda guna mengurangi angka kenakalan remaja;
4. Banyaknya potensi kepemudaan yang belum bisa ditangani secara optimal karena keterbatasan dana dan sumberdaya pelaksana.
5. Prestasi keolahragaan cenderung stagnan dan perlu ditingkatkan;
6. Perlunya peningkatan sikap sportivitas, disiplin dan semangat juang atlet yang masih belum memadai;
7. Masih minimnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif
8. Adanya atlet potensial DIY yang sering direkrut pihak/provinsi lain dengan diberi dukungan dana / fasilitas yang lebih menjanjikan.

S. Kebudayaan

1. Pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara optimal bahkan beberapa terancam keberadaannya;
2. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
3. Terjadinya pergeseran nilai dan bentuk berbagai kegiatan upacara adat dan tradisi yang cenderung berorientasi pada kemegahan visual tanpa dibarengi dengan pendalaman nilai yang ada dalam upacara adat dan tradisi (penonjolan pada aspek tontonan dari pada tuntunan).
4. Pelaku seni dan film belum terkoordinasi dengan baik dan belum memahami kegiatan seni dan film di Yogyakarta sebagai aset promosi atau perwujudan citra Yogyakarta yang berpotensi tinggi secara ekonomis.
5. Pemahaman, apresiasi, dan kebanggaan masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan warisan budaya masih rendah dan sering terjadinya benturan kepentingan antar pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya dan / atau warisan budaya.
6. Organisasi Pengelola Desa / Kelurahan Budaya belum mampu sebagai penggerak pengembangan berbagai potensi budaya di desa / Kelurahan dan menjadikannya unggul di bandingkan dengan desa / kelurahan budaya.
7. Citra museum di masyarakat masih kurang positif sehingga masyarakat enggan memanfaatkan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi.
8. Pengelolaan dan Pembinaan desa budaya sebagai beteng pertahanan nilai tradisional yang berpredikat maju masih jauh dari harapan;
9. Belum optimalnya upaya untuk melakukan penggalian, revitalisasi dan aktualisasi terhadap nilai budaya, adat dan tradisi sebagai *way of life* bagi masyarakat pada umumnya;

10. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;
11. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia;
12. Upaya regenerasi pelaku seni tradisi terkendala kurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisi.

T. Perpustakaan

1. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana penunjang keperpustakaan yang representatif guna mendukung keunggulan DIY sebagai kota Pendidikan;
2. Banyaknya arsip/pustaka bernilai tinggi yang perlu dikelola secara baik dan benar untuk memperkaya khasanah budaya dan sumber ilmu pengetahuan;
3. Pengelola Perpustakaan di Desa/Kelurahan selalu berganti setiap tahunnya, hal ini menjadikan Pengelola yang tahun sebelumnya sudah mengikuti Bimtek Perpustakaan tidak lagi mengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan tersebut.

U. Kelautan dan Perikanan

1. Permasalahan pokok pada produksi perikanan budidaya adalah terkendala harga pakan yang relatif mahal dan harganya cenderung selalu naik;
2. Terjadinya cuaca ekstrim dan gelombang pasang di laut Selatan DIY yang mengakibatkan kerusakan kapal, alat tangkap, abrasi pantai dan kerusakan fasilitas lainnya sehingga berdampak aktivitas melaut menjadi berkurang.
3. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto diproyeksikan dapat menampung 400 kapal, namun breakwater yang ada belum mampu menahan ombak dan sedimen dari laut yang mengakibatkan alur masuk pelabuhan mengalami pendangkalan.
4. Sebagian tambak udang (\pm 40 ha) mengalami perubahan fungsi lahan karena adanya pembangunan bandara;
5. Masih adanya tambak udang yang dibangun pada lokasi yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukannya antara lain: terlalu dekat dengan JJLS, di daerah sependan pantai, di Gumuk Pasir, kawasan konservasi;

6. Pelabuhan Tanjung Adikarta yang belum dapat operasional terkendala pengerukan;
7. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat;
8. Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
9. SDM dan kelembagaan usaha perikanan kurang memadai;
10. Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai;
11. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal;
12. Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan dan pengkayaan sumberdaya serta system ekologisnya secara berkerlanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

V. Pariwisata

1. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan;
2. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
3. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam menghadapi globalisasi;
4. Suasana kondusif masih sering terganggu oleh munculnya isu politik, keamanan dan kesehatan;
5. Kualitas pelayanan wisata belum standar;
6. Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata;
7. Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata;
8. Masih tingginya ketergantungan pada destinasi wisata di daerah lain;
9. Perlunya reaktualisasi wisata DIY guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya industrialisasi wisata yang tidak berpihak kepada pelaku-pelaku lokal.
10. *Branding* DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku kepentingan
11. Masih kurangnya moda transportasi penunjang destinasi wisata

W. Pertanian

1. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
2. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
3. Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan.
4. Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang besar di DIY, namun sampai saat ini permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, meliputi petani dan petugas masih menjadi kendala utama pembangunan pertanian di DIY. Sebagian besar petani di DIY berusia lanjut dengan pendidikan relatif rendah. Selain itu, jumlah petugas (penyuluh dan pengamat organisme pengganggu tumbuhan/POPT) juga semakin terbatas.
5. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang belum baik dan sebagian peternak belum menerapkan SOP menyebabkan peningkatan populasi ternak masih rendah, meskipun secara umum target peningkatan populasi ternak tercapai.
6. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang didapatkan masih belum optimal.
7. Skor NTP pertanian di luar subsektor perikanan secara rata-rata sudah berada di atas 100%, namun peningkatan produksi pangan, hortikultura dan peternakan tidak secara signifikan meningkatkan skor NTP disebabkan harga yang diterima petani masih lebih rendah dibandingkan harga yang harus dikeluarkan petani untuk kebutuhan sehari-hari.

X. Kehutanan

1. Perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal;
2. Perbaikan ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu diperbaiki;
3. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, social, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal;

4. Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal.
 5. Kapasitas giling pabrik minyak kayu putih saat ini belum optimal dikarenakan kurangnya pengkayaan populasi dan luas areal tanaman kayu putih produktif.
 6. Masih terjadi pelanggaran regulasi oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan hasil hutan, sehingga hal ini merupakan ancaman terhadap kelestarian hutan.
- Y. Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Minimnya sumberdaya energi di wilayah DIY;
 2. Upaya untuk penyediaan energi terbarukan belum maksimal;
 3. Dalam rangka pencapaian rasio elektrifikasi 100% masih diperlukan penyediaan jaringan listrik khususnya di daerah pelosok dan sambungan listrik rumah tangga khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu.
- Z. Perdagangan
1. Upaya penyediaan kawasan khusus industri di DIY belum cukup optimal;
 2. Perlunya peningkatan daya saing industri lokal dalam menghadapi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
 3. Pengembangan industri kreatif sebagai salah satu keunggulan DIY belum optimal;
 4. Perlunya peningkatan perlindungan konsumen terutama terkait semakin banyaknya produk dari negara lain yang masuk pasca diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
 5. Terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok yang berpengaruh pada inflasi disebabkan oleh peningkatan permintaan barang atau jasa pada saat tertentu yang belum diimbangi ketersediaan.
 6. Kebutuhan akses pasar atas produk IKM masih luas namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal.
 7. Pertumbuhan pusat-pusat perdagangan DIY yang menjual produk luar DIY memberikan dampak pada peningkatan barang beredar. Sementara pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal.
 8. Volume ekspor DIY cenderung meningkat, namun infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor belum memadai.

9. Adanya perubahan kebijakan berkaitan dengan kewenangan tera dan tera ulang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan tera dan tera ulang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

AA. Perindustrian

1. Aspek legalitas usaha merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan akses permodalan dan akses pasar, namun sampai saat ini masih ada IKM belum memiliki legalitas usaha.
2. Peningkatan jumlah unit usaha IKM diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, namun kualitas sumber daya manusia dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, dan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas jejaring pemasaran masih terbatas.
3. Terbukanya pasar bagi produk-produk IKM DIY belum diikuti dengan standarisasi dan sertifikasi produk.
4. Bahan baku industri belum bisa dipenuhi secara mandiri sehingga masih tergantung pasokan dari daerah

BB. Transmigrasi

1. Besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi dan jumlah pendaftar calon transmigrasi belum sebanding dengan kuota/ alokasi penempatan transmigrasi oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi;
2. Kerja sama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal. Kondisi daerah penempatan yang sudah disiapkan sering kali tidak sesuai dengan azas 2 C (*Clear and Clean*) dan 4 L (Layak huni, Layak berkembang, Layak lingkungan dan Layak usaha);
3. Perlunya jalinan kerjasama yang intensif serta efektif dengan Pemda lokasi transmigrasi untuk mengantisipasi semua permasalahan yang muncul di lapangan;
4. Kesiapan lokasi tujuan belum bisa terdeteksi di awal tahun anggaran, sehingga daerah asal tidak bisa melakukan persiapan penempatan secara maksimal.

CC. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

1. Peraturan Pelaksanaan Urusan pemerintahan Konkuren dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sampai saat ini belum ditetapkan. Padahal Peraturan Pemerintah tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan konkuren di DIY karena pembagian urusan dalam UU tersebut masih bersifat makro sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan urusan;
2. Tidak sinkronnya regulasi/kebijakan sektoral pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Kurangnya komitmen Pemerintah Pusat terhadap pengalihan P3D dari Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Pemerintah Pusat khususnya berkaitan dengan pendanaan urusan pemerintahan yang beralih ke pusat (Bidang Perhubungan, Bidang Pendidikan, Bidang ESDM, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang pengendalian Penduduk dan KB) seharusnya sudah dianggarkan dalam APBN mulai 1 Januari 2017 tetapi masih dibebankan pada APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.
4. Belum optimalnya implementasi *Good Governance*
5. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara umum belum menunjukkan konsistensi yang baik dan masih belum mempertimbangkan faktor risiko. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya temuan-temuan yang berulang dan sama terhadap aspek administratif serta temuan-temuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Government, e-Gov*) belum optimal;
7. Internalisasi Budaya Satrya Pemerintahan belum cukup efektif;
8. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
9. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
10. Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
11. Penegakan supremasi hukum masih lemah, sementara gangguan kamtibmas cenderung meningkat.

12. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
13. Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;
14. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.
15. Integrasi penanganan keluhan terhadap pelayanan publik masih belum optimal;
16. Inovasi pelayanan publik masih minim.
17. Layananan perizinan satu pintu belum optimal.

DD. Perencanaan Pembangunan

1. Perlunya perencanaan pembangunan yang terintegrasi, lintas sektor dan memiliki tolok ukur kinerja yang dapat memberikan kepastian keberhasilan pembangunan;
2. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan secara tepat dan efektif sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan
3. Perlunya pengendalian pembangunan yang lebih objektif dalam mendukung capaian kinerja pembangunan.
4. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dalam konteks pencapaian kinerja sasaran.
5. Beberapa data yang bersumber dari BPS, dirilis dalam waktu yang tidak bertepatan dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan pemanfaatan data BPS menjadi belum optimal.
6. Integrasi data dengan kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena belum tersedia meta data di kabupaten/kota.

EE. Administrasi Keuangan Daerah

1. Masih diperlukan penguatan kapasitas pengguna barang daerah dalam pengelolaan aset yang digunakannya;
2. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah di masing-masing pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran belum merata;
3. Integrasi data perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan belum optimal;

FF. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Adanya PNS yang pensiun namun tidak diimbangi dengan pengangkatan PNS baru (moratorium penerimaan CPNS) sehingga perlu penataan pegawai yang efisien dan efektif;
2. Penyesuaian penataan dan pembinaan PNS Pemda sesuai UU ASN;
3. Kapabilitas SDM Pemerintah dalam mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*e-Gov*) belum optimal;
4. Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi dalam penempatan sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder kediklatan di Pemda DIY.
6. Masih kurangnya jumlah tenaga pengajar / Widyaiswara.
7. Belum terpenuhinya syarat kompetensi penyelenggara, pengajar dan pengelola diklat (MoT, ToC, ToF dan ToT) dalam rangka pemenuhan penilaian akreditasi.
8. Perlunya melakukan implementasi budaya kerja SATRIYA secara masif di lingkungan kerja instansi pemerintah.

BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besaran PDRB tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi di suatu daerah; seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya; dalam melakukan kegiatan ekonomi. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proyeksi pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Tabel berikut menunjukkan perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha pada tahun 2013-2016.

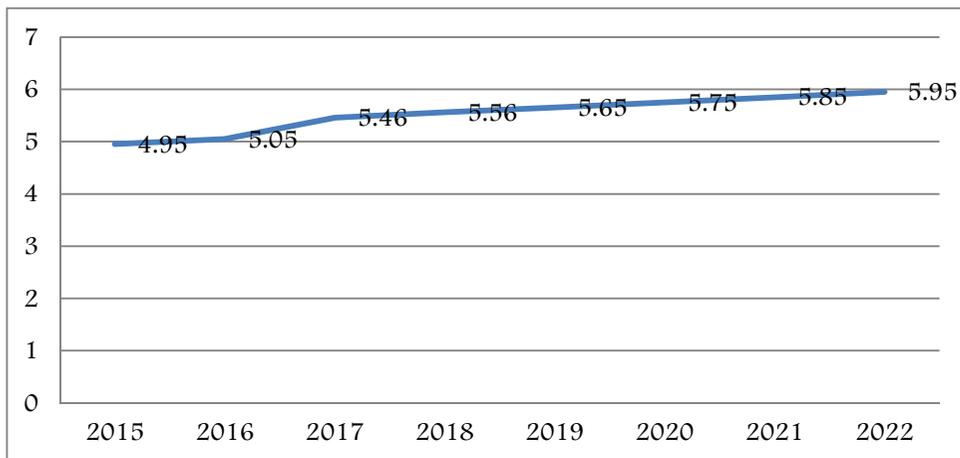
Tabel 3.1 Perkembangan Nilai PDRB DIY ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2013-2016 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2013	2104	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.670.026,2	7.508.980,3	7.667.602	7.779.801
B	Pertambangan dan Penggalian	461.013,8	470.734,6	471.322	473.299
C	Industri Pengolahan	10.084.213,3	10.469.636,9	10.693.036	11.234.804
D	Pengadaan Listrik, Gas	116.969,2	121.267,5	127.701	145.910
E	Pengadaan Air	79.739,9	82.855,4	85.260	87.268
F	Konstruksi	7.106.854,7	7.508.543,3	7.826.701	8.250.608
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.187.855,1	6.540.107,5	6.944.903	7.367.624
H	Transportasi dan Pergudangan	4.217.506,9	4.377.849,8	4.541.309	4.750.561

Kategori	Uraian	2013	2104	2015	2016
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.942.541,1	7.414.021,0	7.842.132	8.274.501
J	Informasi dan Komunikasi	7.969.970,4	8.458.713,2	8.891.145	9.630.639
K	Jasa Keuangan	2.610.919,1	2.826.933,5	3.060.733	3.213.222
L	Real Estate	5.322.003,8	5.735.457,1	6.082.489	6.395.209
M,N	Jasa Perusahaan	858.734,2	924.041,7	991.564	1.025.558
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.639.411,8	5.971.985,6	6.304.911	6.656.183
P	Jasa Pendidikan	6.430.385,5	6.938.845,3	7.444.277	7.672.850
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.916.373,7	2.062.978,6	2.210.406	2.310.356
R,S,T, U	Jasa lainnya	2.012.930,9	2.119.325,9	2.288.950	2.419.533
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	75.627.449,6	79.532.277,4	83.474.441	87.687.927

Sumber: Laporan Analisis PDRB, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2017

Grafik dibawah ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2016 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2017-2022. Pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2015-2022 menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini apabila dilihat dari sisi produksi didorong oleh peningkatan nilai tambah dari semua sektor.



Sumber: Bappeda DIY, 2016

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2011-2020 (%)

3.1.2 Struktur Sektor Ekonomi

3.1.2.1 Struktur Perekonomian DIY berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Struktur perekonomian DIY pada tahun 2015 yang diukur dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku memberikan gambaran bahwa perekonomian DIY tidak didominasi oleh satu lapangan usaha tertentu. Tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah industri pengolahan (13,05 persen); pertanian, kehutanan dan perikanan (10,70 persen); dan penyediaan akomodasi dan makan minum (10,24 persen). Sementara, tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah adalah pengadaan listrik dan gas (0,09 persen), pengadaan air (0,11 persen); serta pertambangan dan penggalian (0,57 persen).

Tabel 3.2 Distribusi Persentase PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2011-2015 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,94	11,19	11,13	10,52	10,70
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,64	0,60	0,58	0,58	0,57
3.	Industri Pengolahan	14,40	13,26	13,62	13,59	13,05
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09
5.	Pengadaan Air	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6.	Konstruksi	9,51	9,52	9,49	9,40	9,37
7.	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	8,14	8,30	8,17	8,27	8,23
8.	Pengangkutan dan Pergudangan	5,50	5,51	5,63	5,72	5,68
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,05	9,32	9,75	10,04	10,24
10.	Informasi dan Komunikasi	9,39	9,49	8,92	8,51	8,13
11.	Jasa Keuangan	3,38	3,49	3,73	3,88	3,97
12.	Real Estat	6,85	7,03	6,85	7,00	7,05
13.	Jasa Perusahaan	1,10	1,08	1,01	1,03	1,03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	7,32	7,68	7,89	8,07	8,23
15.	Jasa Pendidikan	8,48	8,24	8,03	8,19	8,48
16.	Jasa Kesehatan	2,45	2,50	2,47	2,45	2,52
17.	Jasa-jasa Lainnya	2,62	2,57	2,53	2,53	2,55
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS DIY, 2015

3.1.2.2 Struktur Perekonomian DIY berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Kinerja ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilihat dari nilai PDRB harga konstan tahun 2010 pada pada tahun 2011 hingga tahun 2015 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari

perkembangan nilai PDRB atas harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2011 nilai PDRB sebesar 68,049 triliun rupiah mengalami kenaikan menjadi 71,702 triliun rupiah pada tahun 2012 dan terus mengalami kenaikan hingga 83,461 triliun rupiah pada tahun 2015.

Tabel 3.3 Perkembangan Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,134,678.9	7,500,728.2	7,670,026.2	7,508,980.3	7,703,978.1
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6,241,690.4	6,588,236.9	6,741,414.9	6,539,528.2	6,703,079.0
	a. Tanaman Pangan	2,682,412.3	2,796,754.6	2,808,220.7	2,760,023.5	2,874,734.0
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	230,586.3	232,437.3	235,350.9	212,590.9	220,477.6
	c. Perkebunan Semusim	38,602.2	40,373.5	41,348.4	41,666.1	40,253.7
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,627,461.2	1,828,045.6	1,942,962.6	1,731,959.8	1,709,503.9
	e. Perkebunan Tahunan	155,231.3	158,001.3	166,790.4	167,480.0	160,968.8
	f. Peternakan	1,374,982.1	1,397,691.3	1,409,959.7	1,478,301.7	1,548,209.3
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	132,415.0	134,933.3	136,782.1	147,506.3	148,931.6
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	651,122.1	654,157.9	657,699.9	680,932.8	700,236.9
3 Perikanan	241,866.5	258,333.4	270,911.3	288,519.3	300,662.1	
B	Pertambangan dan Penggalian	436,328.7	443,626.9	461,013.8	470,734.6	471,323.2
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	436,328.7	443,626.9	461,013.8	470,734.6	471,323.2
C	Industri Pengolahan	9,711,791.7	9,435,888.0	10,084,213.3	10,469,636.9	10,652,525.1
	1 Industri Batubara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>dan Pengilangan Migas</i>					
2	<i>Industri Makanan dan Minuman</i>	4,995,562.6	4,701,531.3	5,141,145.2	5,550,764.0	5,724,930.3
3	<i>Pengolahan Tembakau</i>	568,517.4	567,358.2	571,755.5	456,644.9	412,954.8
4	<i>Industri Tekstil dan Pakaian Jadi</i>	891,754.1	896,425.4	982,801.6	1,059,015.3	1,122,114.4
5	<i>Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki</i>	252,031.5	263,351.8	279,763.8	279,526.2	300,273.3
6	<i>Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya</i>	182,528.6	184,474.5	193,358.3	190,504.2	186,322.4
7	<i>Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman</i>	240,487.4	234,555.6	238,009.9	248,636.7	253,685.7
8	<i>Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional</i>	114,308.1	117,627.1	117,513.9	125,873.3	135,404.1
9	<i>Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik</i>	295,008.4	311,558.1	310,988.6	292,300.2	265,704.0
10	<i>Industri Barang Galian bukan Logam</i>	325,560.6	322,467.1	353,713.2	359,128.1	335,701.7
11	<i>Industri Logam Dasar</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	<i>Industri Barang dari Logam, Komputer,</i>	754,828.3	734,753.7	769,924.8	788,641.2	777,412.5

RKPD Tahun 2018

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik					
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	371,725.1	377,954.7	375,320.8	403,331.4	430,750.2
	14 Industri Alat Angkutan	3,073.8	3,205.9	3,139.4	2,831.6	2,631.5
	15 Industri Furnitur	483,901.2	476,249.7	488,110.6	466,972.4	453,940.5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	232,504.7	244,375.0	258,667.7	245,467.5	250,699.7
D	Pengadaan Listrik, Gas	100,058.9	110,269.8	116,969.2	121,267.5	119,663.1
	1 Ketenagalistrikan	99,367.3	109,542.9	116,199.0	120,467.7	118,854.5
	2 Gas	691.7	727.0	770.2	799.8	808.7
E	Pengadaan Air	76,349.5	78,992.2	79,739.9	82,855.4	85,260.2
F	Konstruksi	6,483,267.4	6,772,475.9	7,106,854.7	7,508,543.3	7,826,700.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,410,096.5	5,878,431.7	6,187,855.1	6,540,107.5	6,944,902.7
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	845,696.8	926,345.2	983,772.5	1,058,936.0	1,091,042.1
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	4,564,399.7	4,952,086.6	5,204,082.6	5,481,171.5	5,853,860.6
H	Transportasi dan Pergudangan	3,795,544.7	3,975,070.5	4,217,506.9	4,377,849.8	4,541,309.5
	1 Angkutan Rel	50,532.4	51,558.8	50,999.1	60,546.0	65,371.0
	2 Angkutan Darat	2,604,724.2	2,647,243.4	2,761,816.0	2,810,248.9	2,902,683.0
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	437,198.4	515,711.0	597,096.7	631,120.0	650,042.7
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang	703,089.7	760,557.3	807,595.1	875,934.9	923,212.8

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Angkutan, Pos dan Kurir					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,066,531.9	6,480,399.2	6,942,541.1	7,414,021.0	7,842,132.3
	1 Penyediaan Akomodasi	1,063,072.9	1,188,626.5	1,289,746.6	1,353,394.3	1,450,425.0
	2 Penyediaan Makan Minum	5,003,459.0	5,291,772.7	5,652,794.5	6,060,626.6	6,391,707.2
J	Informasi dan Komunikasi	6,775,394.2	7,503,157.6	7,969,970.4	8,458,713.2	8,891,144.9
K	Jasa Keuangan	2,268,272.6	2,341,597.7	2,610,919.1	2,826,933.5	3,060,732.9
	1 Bank	1,608,303.6	1,652,024.1	1,898,021.7	2,086,228.9	2,273,369.4
	2 Asuransi dan Dana Fensiun	214,927.5	220,367.8	224,469.4	237,670.3	247,199.4
	3 Jasa Keuangan Lainnya	439,239.6	463,429.6	482,676.8	496,979.2	533,921.7
	4 Jasa Penunjang Keuangan	5,802.0	5,776.2	5,751.3	6,055.1	6,242.4
L	Real Estate	4,699,363.4	5,116,888.2	5,322,003.8	5,735,457.1	6,105,125.6
M,N	Jasa Perusahaan	769,963.3	831,517.1	858,734.2	924,041.7	991,563.8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,999,227.1	5,373,904.2	5,639,411.8	5,971,985.6	6,281,580.3
P	Jasa Pendidikan	5,841,702.3	6,148,737.3	6,430,385.5	6,938,845.3	7,444,276.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,640,479.0	1,791,076.0	1,916,373.7	2,062,978.6	2,210,405.6
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,840,824.2	1,919,688.6	2,012,930.9	2,119,325.9	2,288,950.1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	68,049,874.4	71,702,449.2	75,627,449.6	79,532,277.4	83,461,574.5

Sumber : BFS DIY, 2015

3.1.3 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Penggunaan PDRB DIY masih didominasi oleh pengeluaran rumah tangga yang masih berkisar di atas 60% bahkan di tahun 2014 dan 2015 nilainya sebesar 67,66% dengan nilai nominal PDRB atas dasar berlaku sebesar Rp68,68 triliun. Urutan kedua adalah pembentukan Modal Tetap Bruto dengan kisaran 27% sampai dengan 30% sampai tahun 2014 dan di tahun 2015 mencapai 30,15%.

Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB DIY Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2011-2015 (Persen)

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
Konsumsi Rumah Tangga	61.69	63.95	67.24	67.66	67.66

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
Konsumsi Pemerintah	15.47	15.51	16.05	16.53	16.71
Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.08	27.38	28.56	29.89	30.15
Perubahan Inventori	1.31	1.25	1.14	1.06	1.16
Ekspor Luar Negeri	3.78	4.23	4.97	5.89	6.17
Impor Luar Negeri	2.1	2.57	2.96	4.4	5
Net Ekspor Antar Daerah	(9.85)	(12.47)	(17.89)	(19.80)	(20.36)

Sumber: BPS DIY

Keterangan: * angka sementara, ** angka sangat sementara

Sementara itu ekspor neto antar daerah menunjukkan bahwa proporsi impor lebih tinggi dibandingkan ekspor ke daerah lain yang mengurangi pangsa pasar produksi lokal DIY. Hal ini seyogyanya diantisipasi dengan meningkatkan produk lokal DIY untuk mengurangi ketergantungan barang impor dari daerah lain terutama pada barang produk pertanian dan industri lainnya.

3.1.4 Inflasi

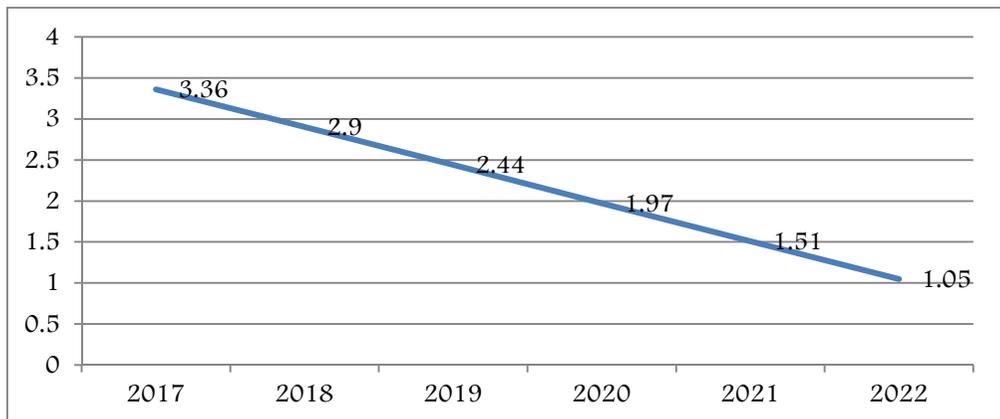
Tabel 3.5 Tingkat Inflasi di DIY, Tahun 2011-2016 (Persen)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tingkat Inflasi (%)	3,88	4,31	7,32	5,16	3,09	3,02

Sumber: Laporan Analisis Makro Ekonomi, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, Tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan tingkat inflasi di DIY pada tahun 2011-2016. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa laju inflasi DIY menunjukkan tren penurunan. Hal ini disebabkan karena tim pengendalian inflasi DIY sudah bekerja dengan cukup efektif dalam menekan tingkat inflasi. Sehingga tingkat inflasi di DIY cenderung terjaga pada level yang relatif rendah. Inflasi tertinggi di DIY terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,32 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 3,02 persen pada tahun 2016.

Proyeksi inflasi DIY mengalami penurunan dari 3.36 persen pada tahun 2017 menjadi 2,9 persen pada tahun 2018 dan pada akhir tahun 2022 menjadi 1,05 persen persen. Proyeksi Inflasi DIY tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.



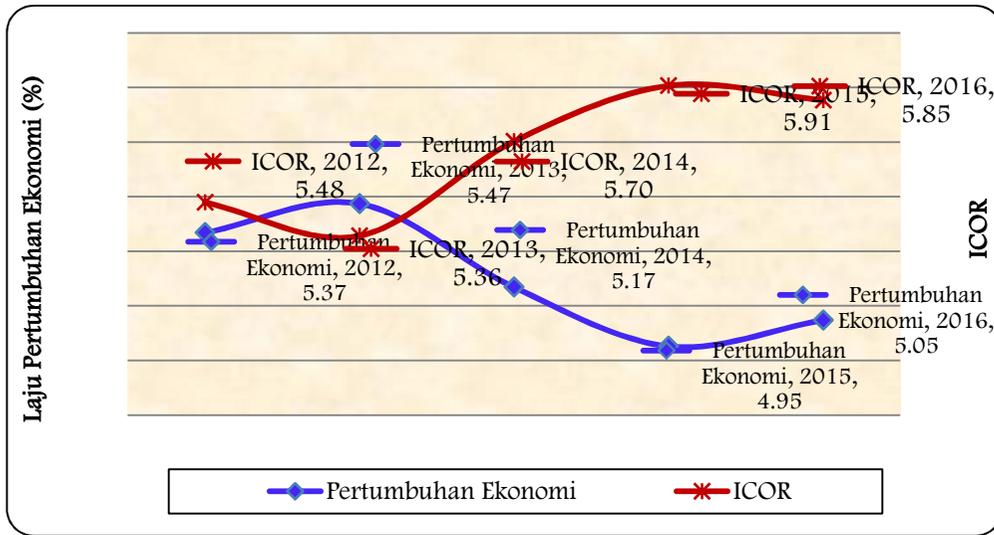
Gambar 3.2 Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2017-2022 (%)

Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan masyarakat naik dan kegiatan ekonomi akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan serta kegiatan di sektor moneter. Sedangkan jika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi Jumlah Uang Beredar (JUB) dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Namun jika tingkat bunga BI terlalu rendah, masyarakat cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya sehingga mendorong terjadinya inflasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini telah dijalankan dengan baik oleh BI.

Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Pengendalian harga bahan pokok khususnya dalam hal kelancaran ketersediaan dan distribusinya perlu diperhatikan, karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan menyebabkan terganggunya kestabilan harga sembilan bahan pokok di DIY.

3.1.5 ICOR

Pada tahun 2016 angka ICOR DIY turun dari 5,91 pada tahun 2015 menjadi 5,85 pada tahun 2016. Dari Gambar dibawah ini terlihat bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 angka ICOR DIY per tahun relatif tinggi yaitu di atas 5 (lima). Hal ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di DIY relatif kurang efisien. Pada tahun 2013, ICOR DIY cenderung mengecil dari 5,48 (2012) menjadi 5,36 (2013).



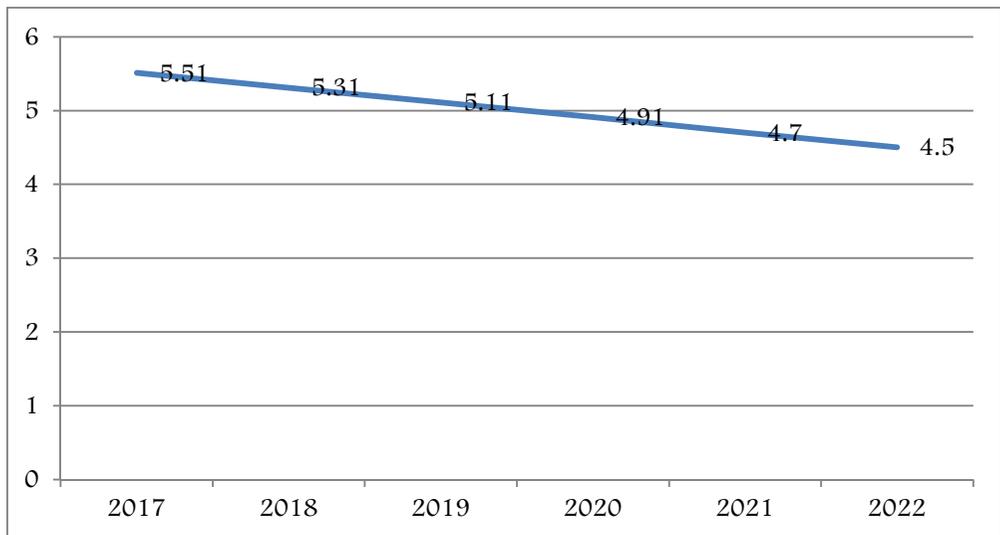
Sumber: Laporan Analisa ICOR 2012-2016, Bappeda DIY (2017).

Gambar 3.3 Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, Tahun 2012-2016

Pada tahun 2014 dan 2015 angka ICOR DIY cenderung meningkat, kemudian sedikit menurun pada tahun 2016 walaupun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2013. Hal ini bisa diartikan bahwa investasi yang dilakukan relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di DIY cenderung bersifat capital intensive. Pada tahun 2016, untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 (satu) unit diperlukan tambahan investasi sebesar 5,85 unit, sedangkan pada tahun 2013 hanya diperlukan tambahan investasi sebesar 5,36 unit. Secara umum, angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4.

Penurunan nilai ICOR DIY yang masih kecil disebabkan oleh investasi yang belum optimal seperti penataan kawasan yang masih didominasi di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, belum merata untuk seluruh Kabupaten di DI. Penyebab lainnya adalah infrastruktur yang masih kurang memadai di Kabupaten lain yang menyebabkan kurangnya efisiensi penggunaan investasi dalam menghasilkan output di DIY.

Proyeksi ICOR pada tahun 2017-2022 mengalami tren penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY. Pada tahun 2017 ICOR diproyeksikan sebesar 5,51 yang turun setiap tahun menjadi 4,5 di tahun 2022. Proyeksi ICOR DIY tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.4 Proyeksi ICOR DIY, Tahun 2017-2022 (juta rupiah)

Proyeksi trend penurunan ICOR tersebut dapat didukung dengan pemerataan investasi pada terhadap kabupaten lain, seperti tumbuhnya pusat-pusat perekonomian baru sebagai dampak pembangunan Bandara dan semakin berkembangnya Pariwisata di DIY.

3.1.6 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian DIY. Pembangunan bidang ketenagakerjaan meliputi upaya untuk memperbaiki penawaran tenaga kerja (*labor supply*) melalui peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat memenuhi spesifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Apabila kualifikasi pekerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, maka proses produksi akan dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga produktivitas pekerja meningkat. Peningkatan produktivitas pekerja ini akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam pandangan *mainstream economics*, permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan, yang terjadi akibat adanya permintaan akan output (barang dan jasa). Hal ini karena tenaga kerja merupakan faktor produksi (*input*), yang bersama-sama dengan faktor produksi lain, diperlukan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*). Besar kecilnya permintaan akan tenaga kerja (*input*) akan bergantung pada besar kecilnya permintaan akan barang dan jasa (*output*). Kebutuhan tenaga kerja ditunjukkan oleh perusahaan/lembaga yang

membutuhkan/menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu.

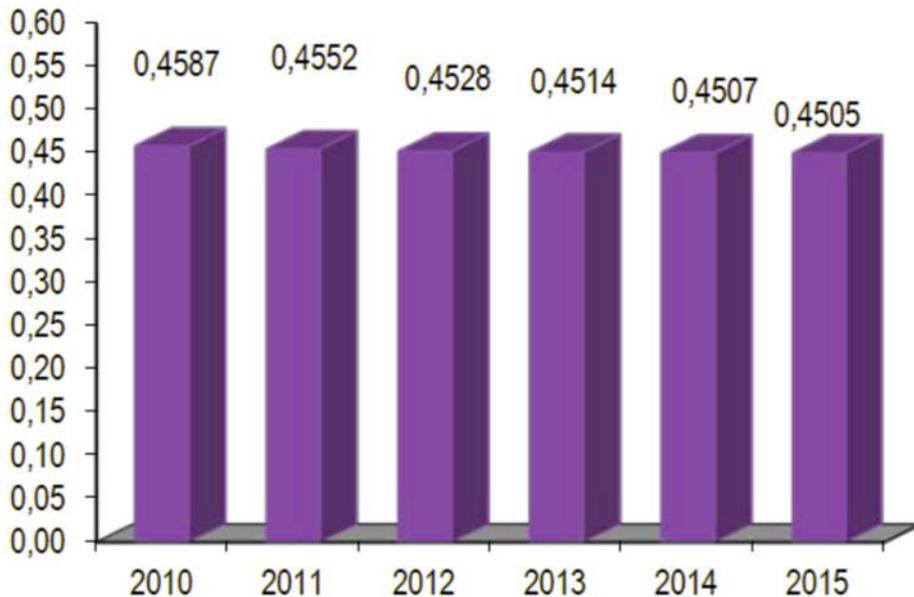
Secara makro, permintaan tenaga kerja tercermin dari kesempatan kerja yang terjadi. Satu aspek dalam kinerja ekonomi adalah sejauh mana suatu perekonomian menggunakan sumber daya dengan baik. Karena para pekerja suatu perekonomian adalah sumber daya utamanya, menjaga agar para pekerja tetap bekerja menjadi perhatian para pembuat kebijakan ekonomi. Istilah kesempatan kerja memiliki pengertian kesempatan yang tersedia sebagai akibat dari kegiatan ekonomi (memproduksi barang dan jasa). Pengertian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut (yang berarti kesempatan), kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja.

3.1.6.1 Angka Beban Tanggungan (*dependency ratio*)

Dependency Ratio (DR) merupakan salah satu alat ukur perekonomian suatu wilayah. Dengan kata lain *dependency ratio* dapat dijadikan suatu indikator pengukuran tingkat perekonomian suatu wilayah. Dalam hal ini, suatu *dependency ratio* akan mampu menunjukkan wilayah tersebut masuk sebagai kategori maju atau tidak. Hal ini karena *dependency ratio* merupakan pernyataan berupa perbandingan antara banyaknya penduduk usia produktif dengan penduduk usia yang non produktif. Dalam *Dependency Ratio* yang digolongkan sebagai usia yang produktif adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun, sedangkan usia yang tergolong sebagai penduduk non produktif adalah berkisar dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas, sehingga suatu wilayah yang memiliki usia yang lebih banyak tergolong sebagai usia produktif akan lebih cenderung menghasilkan suatu keadaan yang seimbang dari pendapat atau kondisi perekonomian di wilayah tersebut.

Makna dari *dependency ratio* di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah pada setiap 100 orang penduduk DIY yang produktif secara ekonomis (umur 15-64 tahun) harus menanggung sejumlah penduduk nonproduktif yaitu kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas. Selama periode lima tahun terakhir, yaitu 2011 sampai dengan 2015, angka beban tanggungan penduduk DIY belum mengalami perubahan yang nyata. Pada tahun 2015 angka DR sebesar 45,0 sedikit lebih rendah dibanding angka DR tahun 2011 yang sebesar 45,5. Penurunan angka DR yang hanya sekitar 0,5 poin tersebut mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir beban tanggungan penduduk usia produktif secara jumlah hanya berkurang sedikit. Kondisi ini dalam sudut pandang ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk karena bila rata-rata pendapatan penduduk usia produktif tidak naik atau kenaikannya hanya menyesuaikan inflasi harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-

hari maka bisa dikatakan tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi penduduk DIY.



Sumber: BPS DIY, 2016

Gambar 3.5 Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2010-2015

Angka ketergantungan DIY masuk dalam kelompok tinggi, karena lebih dari 41. Rasio beban tanggungan penduduk DIY yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif harus dibagikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum/tidak produktif. Pada tahun 2014 angka DR sebesar 45,07 turun menjadi 45,05 di tahun 2015, atau dalam setahun penurunan angka DR sekitar 0,02 poin. Meskipun penurunan angka DR tersebut relatif kecil namun bila dikalkulasi secara ekonomi anggaran pembangunan yang bisa lebih dioptimalkan cukup besar. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, usia produktif DIY tahun 2015 sebanyak 2.536.556 orang. Dengan demikian sejumlah penduduk usia produktif tersebut beban tanggungannya berkurang sebanyak 507 orang. Data rata-rata pengeluaran per kapita setahun penduduk DIY berdasarkan hasil Susenas Maret 2015 adalah sebesar Rp11.143.226, sehingga anggaran yang bisa dialihkan oleh karena berkurangnya angka DR tersebut sekitar 5,7 miliar rupiah. Suatu nilai yang cukup besar untuk dialokasikan baik untuk program pembangunan ekonomi maupun pembangunan sumber daya manusia. Namun realita permasalahannya memang tidak sesederhana itu saja karena jika dikaitkan

dengan ketenagakerjaan tidak semua angkatan kerja mempunyai kesempatan kerja atau tertampung di suatu lapangan pekerjaan.

3.1.6.2 Proyeksi Ketenagakerjaan

Secara eksisting kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, serta tingkat pengangguran terbuka telah diuraikan pada bab sebelumnya, sedangkan dalam kaitannya dengan substansi pada sub bab berikut lebih pada proyeksi kondisi ketenagakerjaan di DIY.

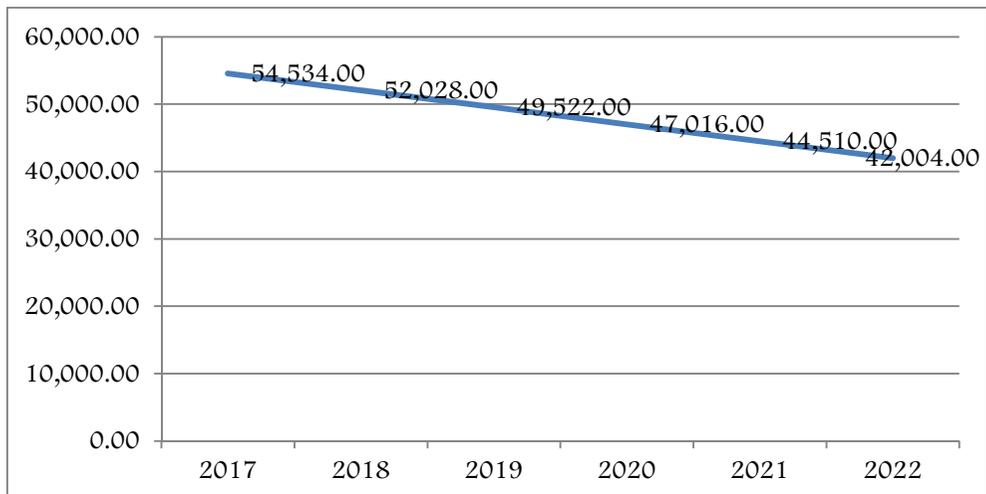
Proyeksi ketenagakerjaan DIY tahun 2017-2022 menunjukkan perkembangan yang lebih baik yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah orang yang bekerja dan diiringi dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka. Proyeksi jumlah orang bekerja DIY tahun 2017-2022 berdasarkan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Proyeksi Jumlah Penduduk Bekerja di DIY DIY, Tahun 2017-2022

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk Bekerja
2017	2.019.858
2018	2.043.324
2019	2.066.789
2020	2.090.255
2021	2.113.720
2022	2.137.186

Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2016

Proyeksi Jumlah penduduk bekerja meningkat dari 2.019.858 orang di tahun 2017 dan meningkat menjadi 2.137.186 orang di tahun 2022. Meningkatnya jumlah orang bekerja merupakan konsekuensi dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi DIY yang membutuhkan sumber daya manusia dalam meningkatkan produksi.



Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2016

Gambar 3.6 Proyeksi Jumlah Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2017-2022 (orang)

Seiring dengan proyeksi Jumlah penduduk bekerja yang meningkat, proyeksi jumlah pengangguran terbuka senantiasa mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proyeksi jumlah pengangguran terbuka turun dari 54.534 orang di tahun 2017 menjadi 42.004 orang di tahun 2022.

Tabel 3.7 Proyeksi Ketenagaan DIY Tahun 2017-2022

Tahun	2017	2018	2019
Bekerja	2.019.858	2.043.324	2.066.789
Pengangguran Terbuka	54.534	52.028	49.522
Jumlah Angkatan Kerja	2.074.392	2.095.352	2.116.311
Tahun	2020	2021	2022
Bekerja	2.090.255	2.113.720	2.137.186
Pengangguran Terbuka	47.016	44.510	42.004
Jumlah Angkatan Kerja	2.137.271	2.118.171	2.179.190

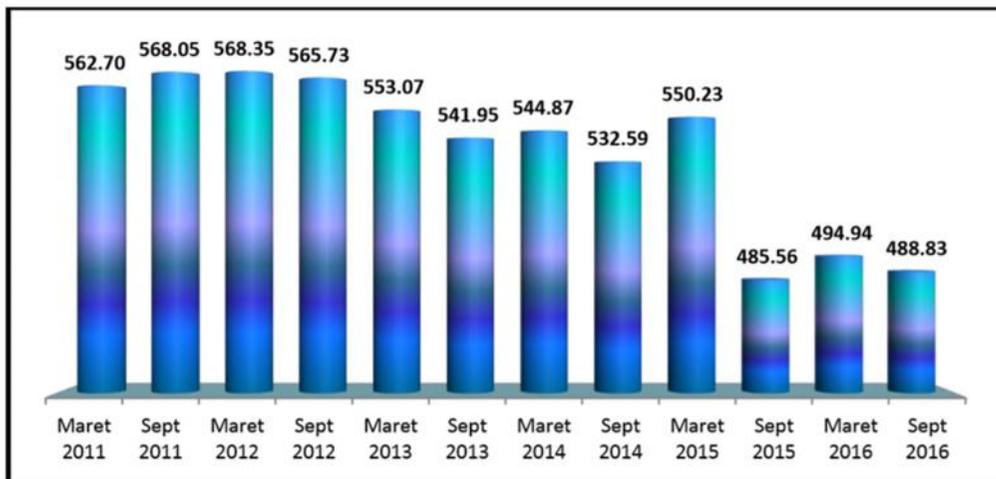
Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2016

Jumlah angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketenagakerjaan di DIY di antaranya adalah tingkat upah, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan elastisitas penyerapan tenaga kerja. Tersedianya jumlah penduduk yang besar pada usia kerja dengan tingkat pendidikan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta upah yang cukup dan didukung pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja DIY, sehingga akan dapat membantu menurunkan

tekanan permasalahan dari pengangguran di DIY. Proyeksi angkatan kerja dan bekerja tahun 2015 dan 2016 untuk DIY tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dan orang yang bekerja sama-sama mengalami kenaikan, tetapi pengangguran terbuka mengalami penurunan. Ini menggambarkan adanya optimisme yang kuat pada kualitas laju pertumbuhan ekonomi DIY, khususnya kemampuan dalam menyerap tenaga kerja.

3.1.7 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di DIY pada periode Maret 2011 – September 2016 berfluktuasi seperti ditunjukkan pada Gambar 3.8., meskipun ada kecenderungan menurun. Pada periode Maret 2011 – Maret 2012 terjadi kenaikan, tetapi dari September 2012 – September 2013 mengalami kenaikan dan kemudian berfluktuasi selama periode September 2013 sampai September 2016. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 tercatat 562,70 ribu orang dan pada September 2016 turun menjadi 488,83 ribu.



Sumber: BPS Provinsi DIY, Tahun 2017

Gambar 3.7 Jumlah Penduduk Miskin di DIY Maret 2011 – September 2016 (dalam ribuan orang)

Secara prosentase, tingkat kemiskinan di DIY pada periode Maret 2011 – September 2016 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2011 sebesar 16,08 persen, turun menjadi 13,10 persen pada September 2016. Perkembangan tingkat kemiskinan di DIY selengkapnya seperti terlihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Gambar 3.8 Persentase Penduduk Miskin di DIY Maret 2011 – September 2016

Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih kecil daripada di pedesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 11,68 persen mengalami penurunan 0,25 persen jika dibandingkan dengan keadaan September 2015 yang besarnya mencapai 11,93 persen. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2016 sebesar 16,27 persen, mengalami penurunan 0,65 persen jika dibandingkan dengan keadaan September 2015 yang mencapai 16,8 persen.

Tabel 3.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2015 – September 2016

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
September 2015	292.64	11.93
Maret 2016	297.71	11.79
September 2016	301.25	11.68
<u>Perdesaan</u>		
September 2015	192.91	15.62
Maret 2016	197.23	16.63
September 2016	187.58	16,27
<u>Kota+Desa</u>		
September 2015	485.56	13.16
Maret 2016	494.94	13.34
September 2016	488.83	13.10

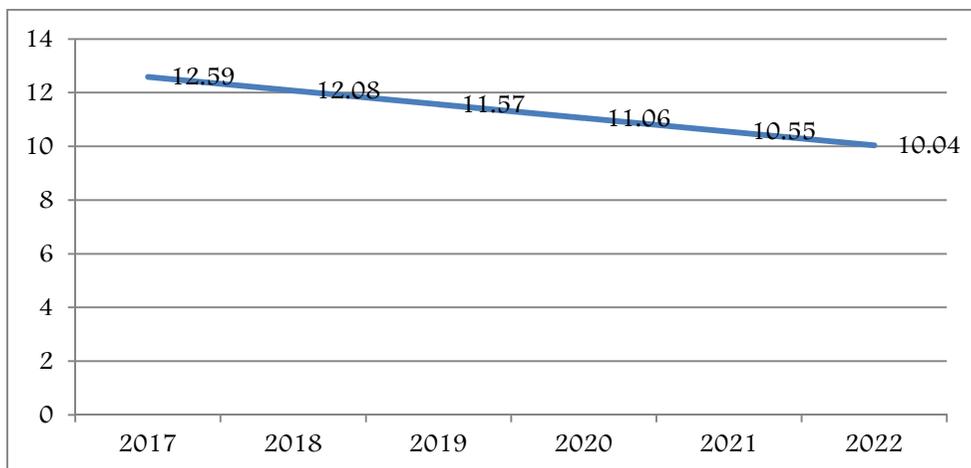
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Beberapa aspek kehidupan masyarakat yang diduga menyebabkan masih relatif tingginya kemiskinan di DIY adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah dikarenakan rendahnya tingkat produktifitas yang berupa ketiadaan usaha produktif baik meliputi antara lain keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal.

Sementara itu, faktor pendidikan yang selama ini dianggap sebagai salah satu faktor jamak yang mempengaruhi pola pikir masyarakat memicu menguatnya mata rantai kemiskinan seperti halnya kurang berlaku di DIY. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY justru tertinggi kedua se-Indonesia setelah Riau dan DKI Jakarta. Dengan demikian masalah kemiskinan di DIY bukan lagi mengenai rendahnya pendidikan atau hambatan cara pandang masyarakatnya melainkan masalah bagaimana meningkatkan kemandirian dan pendapatan penduduk DIY. Tingginya kemiskinan di DIY diduga kuat akibat dari lesatan pertumbuhan sektor perekonomian yang cenderung padat modal dan dikuasai investor tertentu sehingga terjadi ketidakmerataan pendapatan yang berakibat pada ketidakmerataan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Upaya

pemerataan kesempatan dan peluang produktif baik antar wilayah dan antar individu telah menjadi salah satu arah solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Lebih lanjut lagi, upaya pembangunan berbasis kewilayahan dapat menjadi strategi untuk pemerataan pembangunan agar hasil pembangunan dapat lebih memberikan kesejahteraan secara lebih merata kepada seluruh masyarakat DIY termasuk dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Proyeksi persentase penduduk miskin di DIY pada tahun 2017-2022 diperkirakan menurun setiap tahunnya meskipun penurunannya masih dibawah 2 persen per-tahun. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY diproyeksikan sebesar 12,59 persen dan terus menurun pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 10,04 persen. Proyeksi angka kemiskinan DIY tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

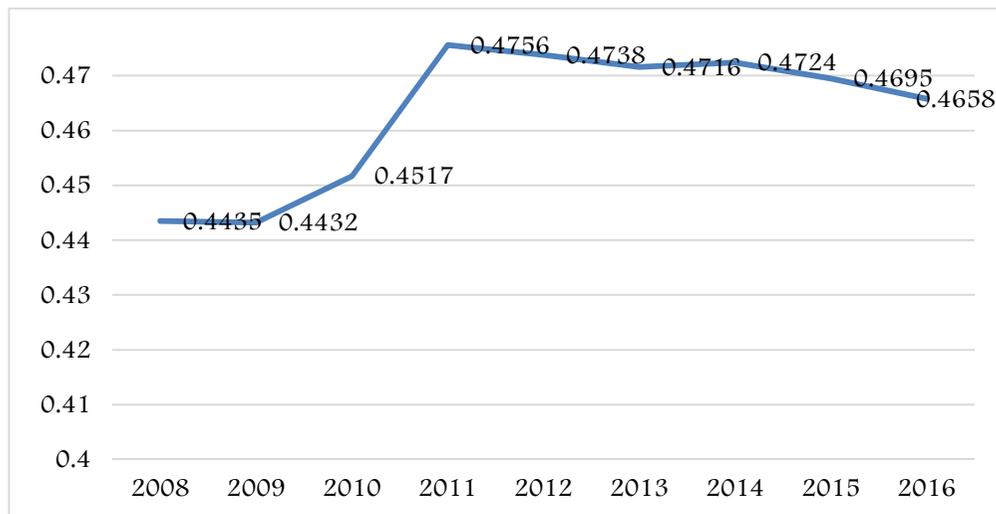


Sumber: Analisis Makro Ekonomi, Balai Statistik Daerah, Bappeda DIY, 2016

Gambar 3.9 Proyeksi Kemiskinan DIY Tahun 2017-2022 (%)

3.1.8 Ketimpangan Antar Wilayah

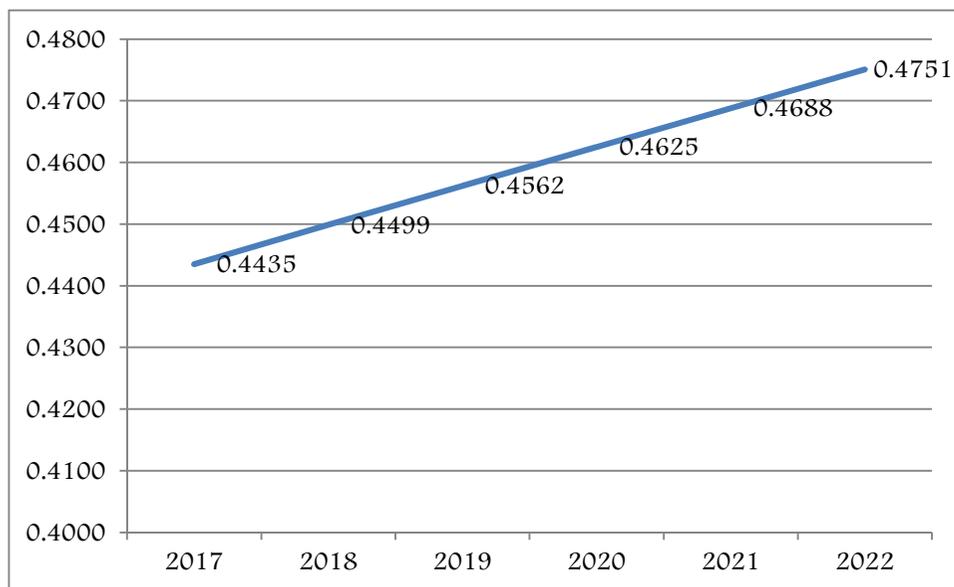
Indeks Williamson (IW) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesenjangan antar wilayah. Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Dari nilai IW DIY untuk tahun 2008-2016 mengalami fluktuasi, meskipun angka IW-nya masih di bawah 0,5. Pada tahun 2008, nilai IW adalah 0,4435 sedangkan nilainya pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,4658. Semakin meningkatnya nilai IW mengindikasikan bahwa di DIY kesenjangan antar wilayahnya semakin tinggi, dengan adanya kegiatan ekonomi yang semakin maju, meskipun kesenjangan tersebut masih tergolong rendah.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Gambar 3.10 Indeks Williamson DIY, Tahun 2008-2016

Proyeksi Indeks Williamson DIY pada tahun 2017-2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Indeks Williamson diproyeksikan sebesar 0,4435 dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun menjadi sebesar 0,4751 pada tahun 2022. Proyeksi Indeks Williamson DIY tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Bappeda DIY, 2017

Gambar 3.11 Proyeksi Indeks Williamson DIY, Tahun 2017-2022

Kenaikan proyeksi Indeks Williamson ini salah satunya diindikasikan dengan pertumbuhan di sektor dan sub-sektor perekonomian yang berkembang tidak dalam tingkatan yang setara. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan antar wilayah. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan naiknya Indeks Williamson diantaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang tidak sama sehingga PDRB perkapita di kabupaten/kota relatif belum setara. Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah ini juga terkait dengan kapasitas ekonomi atau PDRB yang cukup berbeda karena perbedaan topografi dan lahan produktif. Angka Partisipasi Kerja (APK) dimasing-masing wilayah juga turut mempengaruhi angka ketimpangan antar wilayah tersebut.

3.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Gini/Rasio Gini. Perhitungan Rasio Gini berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang disebut Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata atau mendekati pemerataan sempurna. Kategorisasi capaian nilai Rasio Gini dapat dibedakan menjadi tiga. Jika nilai Rasio kurang dari 0,3, masuk dalam kategori ketimpangan rendah, apabila nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi.

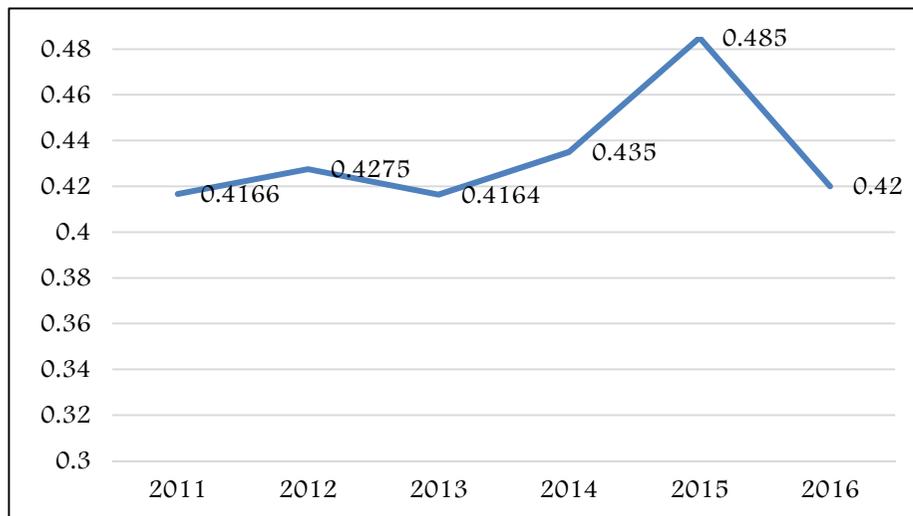
Selama periode 2011 sampai 2016, Indeks Gini DIY mengalami fluktuasi dan nilainya pada tahun 2016 sebesar 0,42 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang sebesar 0,485. Pertumbuhan ekonomi DIY cukup tinggi, akan tetapi pertumbuhan yang tinggi tersebut belum merata. Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul secara konsisten merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dibandingkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Hal inilah yang menciptakan ketimpangan daerah atau dengan kata lain adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi daerah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Indeks Gini DIY Tahun 2014-2016

Tahun \ Nilai	2014	2015	2016
Target	0,295	0,290	0,288
Realisasi	0,435	0,485	0,42*

Sumber : Bappeda DIY, 2016

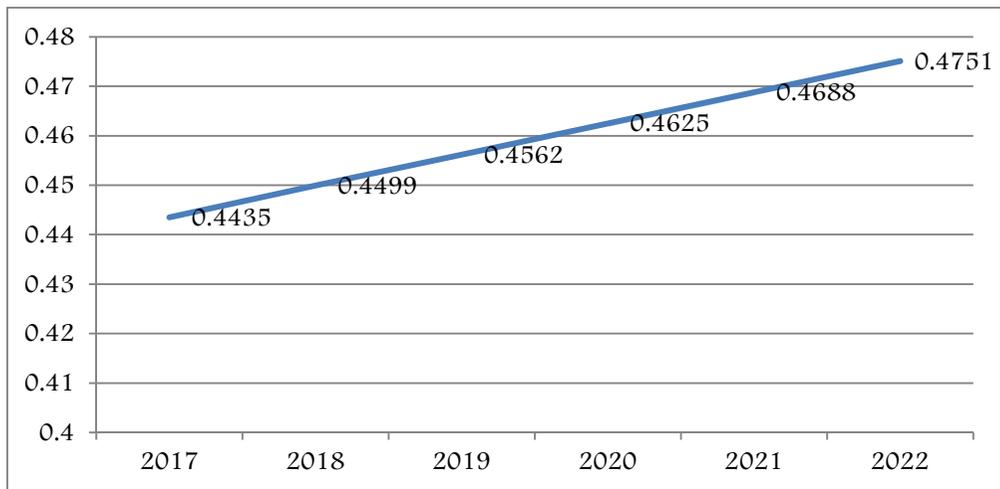
Ket: *Angka sementara



Sumber: BPS DIY, 2017

Gambar 3.12 Grafik Perkembangan Indeks Gini di DIY Tahun 2011-2016

Grafik di atas menunjukkan perkembangan nilai indeks gini DIY selama 2011 sampai dengan 2016. Indeks gini DIY selama 2011-2016 cenderung fluktuatif. Capaian indeks gini DIY selama 2011-2016 tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di DIY masuk dalam kategori sedang. Dengan melihat dari capaian historis selama periode 2011-2016, kemudian diprediksikan angka indeks gini untuk tahun-tahun berikutnya. Prediksi indeks gini disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : Bappeda DIY, 2016

Gambar 3.13 Proyeksi Indeks Gini di DIY Tahun 2017-2022

Nilai proyeksi Indeks Gini senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada periode 2017 sampai 2022. Pada tahun 2016 nilai proyeksi Indeks Gini adalah 0,4435 yang terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,4751 pada tahun 2022.

Dari angka proyeksi tersebut dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan di DIY diproyeksikan akan semakin meningkat, apabila tidak dilakukan intervensi pada aspek pemerataan pendapatan masyarakat. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai Indeks Gini diantaranya adalah pendapatan penduduk, pengeluaran penduduk, dan komposisi jumlah penduduk.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2016-2018

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2016 (N-2)	APBD Tahun 2017 (N-1)	Proyeksi Tahun 2018 (N)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN	3,921,068,617,127.00	4,988,379,317,714.63	5.769.045.089.211,93
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,553,180,369,527.00	1,657,147,882,128.63	1.708.588.753.364,93
1.1.1.	PAJAK DAERAH	1,377,156,182,800.00	1,437,942,970,424.00	1.503.975.049.534,30
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	36,998,728,297.00	38,797,469,715.00	35.392.260.340,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	57,398,373,585.00	59,711,579,867.44	75.639.486.244,44
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	81,627,084,845.00	120,695,862,122.19	93.581.957.246,19
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1,768,771,681,000.00	2,461,741,043,739.00	2,287,023,595,000.00
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	108,902,297,000.00	132,300,017,047.00	129,055,112,000.00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	940,835,434,000.00	1,380,356,647,692.00	1,312,215,989,000.00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	719,033,950,000.00	949,084,379,000.00	845,752,494,000.00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	599,116,566,600.00	869,490,391,847.00	1.773.432.740.847,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	10,956,017,600.00	14,827,192,847.00	14,827,192,847.00
1.3.2.	DANA DARURAT	0.00	0.00	0.00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0.00	0.00	0.00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	588,160,549,000.00	853,998,349,000.00	1,757,940,698,000.00
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0.00	664,850,000.00	664,850,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	3,921,068,617,127.00	4,988,379,317,714.63	5.769.045.089.211,93

RKPD Tahun 2018

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2016 (N-2)	APBD Tahun 2017 (N-1)	Proyeksi Tahun 2018 (N)
1	2	3	4	5
2.	BELANJA	4,189,992,196,186.80	5,200,386,011,001.43	6.038.445.827.754,33
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,070,916,316,654.80	2,779,012,765,965.93	1.993.623.873.030,33
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	632,402,208,576.00	1,316,547,064,995.93	1.339.008.934.110,44
2.1.2.	BELANJA BUNGA	0.00	0.00	-
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0.00	0.00	-
2.1.4.	BELANJA HIBAH	768,176,097,750.00	719,522,034,000.00	21.750.200.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	4,683,000,000.00	2,091,000,000.00	1.000.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KPD PROVINSI/ KAB/ KOTA DAN PEMDES	561,340,599,397.80	601,307,079,296.80	621.864.738.919,89
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROVINSI/ KAB/ KOTA DAN PEMDES	91,814,410,931.00	114,625,862,931.00	-
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	12,500,000,000.00	24,919,724,742.20	10.000.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2,119,075,879,532.00	2,421,373,245,035.50	4.044.821.954.724,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	150,710,364,228.00		
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,020,959,720,157.00		
2.2.3.	BELANJA MODAL	947,405,795,147.00		
	JUMLAH BELANJA	4,189,992,196,186.80	5,200,386,011,001.43	6.038.445.827.754,33
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(268,923,579,059.80)	(212,006,693,286.80)	(269.400.738.542,40)
3.	PEMBIAYAAN	268,923,579,059.80	212,006,693,286.80	269.400.738.542,40
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	405,923,579,059.80	216,006,693,286.80	325.400.738.542,40
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	405,923,579,059.80	216,006,693,286.80	325.400.738.542,40
3.1.2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0.00	0.00	-
3.1.3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0.00	0.00	-
3.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0.00	0.00	-
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0.00	0.00	-
3.1.6.	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0.00	0.00	-
3.1.7.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR	0.00	0.00	-
3.1.8.	PENERIMAAN DARI BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	0.00	0.00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	405,923,579,059.80	216,006,693,286.80	325.400.738.542,40
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	137,000,000,000.00	4,000,000,000.00	56.000.000.000,00
3.2.1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2016 (N-2)	APBD Tahun 2017 (N-1)	Proyeksi Tahun 2018 (N)
1	2	3	4	5
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	137,000,000,000.00	4,000,000,000.00	50.000.000.000,00
3.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0.00	0.00	0.00
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0.00	0.00	6.000.000.000,00
3.2.5.	PENYELESAIAN KEGIATAN D P A - L	0.00	0.00	0.00
3.2.6.	PEMBAYARAN KEWAJIBAN TAHUN LALU YANG BELUM TERSELESAIKAN	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	137,000,000,000.00	4,000,000,000.00	56.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	268,923,579,059.80	212,006,693,286.80	269.400.738.542,40
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00	0.00	0.00

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

- b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Retribusi yang dikenakan jasa umum
- 2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
- 3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan propinsi/kabupaten kota. Retribusi yang menjadi kewenangan propinsi yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
 Seperti dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-

sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 63%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2016 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
 - 2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
 - 3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyesuaian modal.
 - 4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling dan sistem *online* kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS *online* berbasis *accrual* pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah
 - 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak
 - 6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward* and *punishment*
 - 7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat
 - 8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
 - 9) Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak
- b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan dana perimbangan sebagai berikut:

- (a) Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota
- (b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi

yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi. Melalui penyusunan naskah *background study* RPJMD DIY Tahun 2017-2022 tersebut, maka arah kebijakan belanja juga perlu melihat sumber alokasi anggaran yang didekatkan dengan konsep, target, serta arah kebijakan pembangunan yang

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- 3) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan

wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- 4) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- 5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 7) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

- c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan

pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

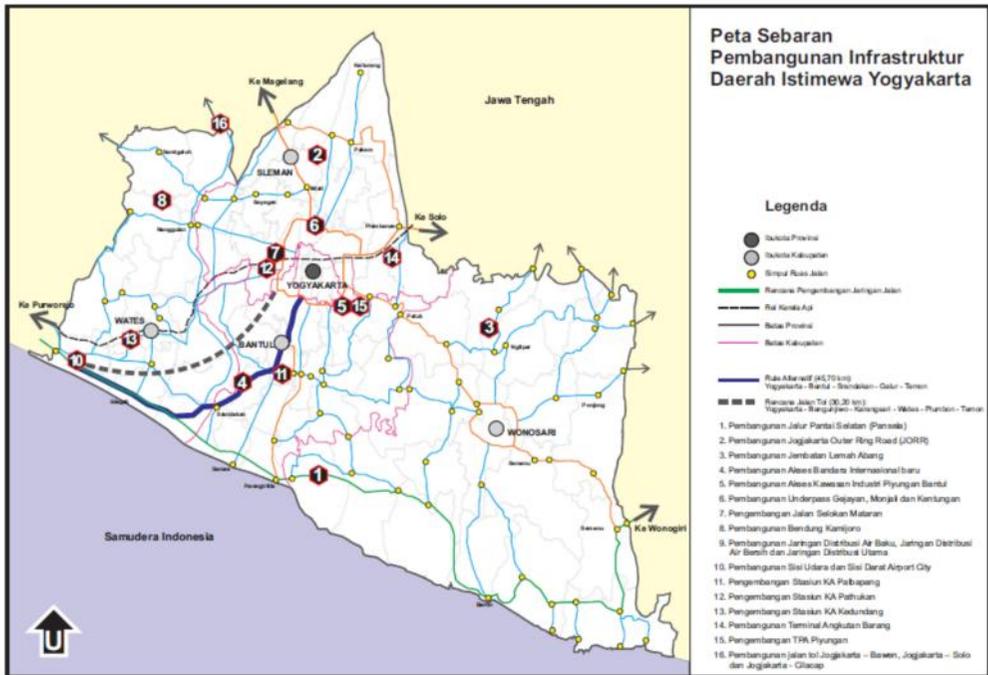
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

3.2.5 Strategi Keuangan Daerah

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, maka perlu diperhatikan fokus pembangunan yang mengarah pada aspek infrastruktur sebagai bagian fokus pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Hal tersebut menjadi penting mengingat terdapat beberapa mega proyek infrastruktur yang akan dibangun dan dikembangkan pada Tahun 2017-2022 sebagai keberlanjutan implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah pada Tahun 2012-2017, seperti Pembangunan Bandar Udara Kulonprogo, Tindaklanjut Pembangunan Tanjung Adikarto, Penyelesaian Jalur PANSELA, Pengembangan Transportasi Umum Massal (Kereta Api Pendukung Bandara termasuk dalam hal ini pembangunan *Mono Rail Transport*, Pengembangan *Bus Rapid Transit*), dan lain sebagainya.



Sumber: Dokumen Kajian Penyusunan Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi DIY, BSD Bappeda DIY

Gambar 3.14 Peta Sebaran Pembangunan Infrastruktur DIY

Terdapat 2 (dua) strategi dalam pembiayaan pembangunan, yaitu: (1) PPP Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Sementara itu proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (*Private Financing Initiatives*, PFI), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Namun pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM kita masih langka dalam mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (*Modern Project Financing*). Proyek skala besar membutuhkan *Equity Financing*, *Debt Financing* yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, *investment fund*, *bond*, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah. Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan

memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.

2. Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk *government support*. Skema KPS juga dapat digabung dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai prasarana dasar.
3. Investasi Swasta. Pihak swasta dapat terlibat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu dapat melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited, special purpose* ataupun melalui pemanfaatan hak kompensasi. Tentunya, proyek-proyek yang diminati oleh pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.
4. *Creative financing* sebagai pembiayaan alternatif adalah sebagai berikut:
 - a. *Infrastructure Bond* yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
 - b. Penugasan BUMN/BUMD yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
 - c. *Private Finance Initiative (PFI)– multi-year contract* 15 hingga 30 tahun;
 - d. *Performance-Based Annuity Scheme (PBAS)* atau *Availability Payment*;
 - e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing (ERP)*;
 - f. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*);
 - g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

Didalam skema pembiayaan infrastruktur memerlukan beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh SKPD pengampu. Kriteria pembiayaan infrastruktur yang disusun pada periode 2017-2022, meliputi:

1. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh pemerintah baik dari aspek operasi, pemeliharaan dan konstruksi yang diprioritaskan pada wilayah dengan ketimpangan infrastruktur cukup tinggi, perdesaan, dan perbatasan;
2. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan *sharing* swasta (operasi dan pemeliharaan) dan pemerintah (konstruksi) khususnya dalam pembiayaan *hybrid financing*;
3. Layak secara ekonomi dan finansial marginal dengan skema pembiayaan dominan dari swasta (operasi dan pemeliharaan) dan pemerintah yang dikerjasamakan/*sharing* pula dengan swasta lainnya dalam pelaksanaan konstruksi. Skema pembiayaan ini menggunakan skema *Public Private Partnership (PPP)* dengan dukungan pemerintah (VGF) atau *creative financing* lainnya, seperti PFI, PBAS, Bank Infrastruktur, Bank Tanah, dan lain sebagainya;
4. Layak secara ekonomi dan finansial dengan skema pembiayaan swasta-swasta (operasi dan pemeliharaan maupun konstruksi) yang dikerjasamakan melalui model *Public Private Partnership (PPP)* regular;
5. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh BUMN/BUMD (operasi dan pemeliharaan maupun konstruksi) dengan prioritas pengembangan dan pembangunan proyek pada wilayah dengan kondisi infrastruktur cukup baik atau pada wilayah perkotaan Yogyakarta. Skema operasional dan teknis pelaksanaan pembiayaan tersebut melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

BAB 4 TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

4.1 Tema Pembangunan Daerah

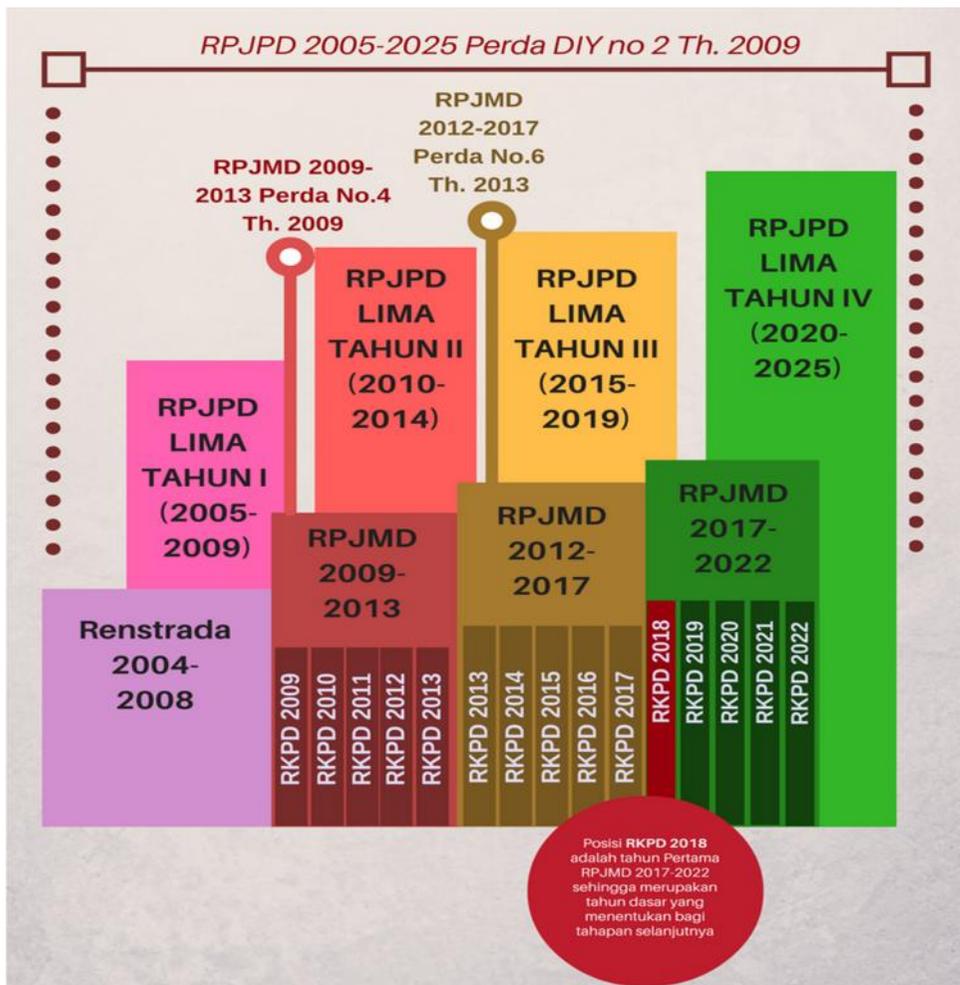
4.1.1 Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

Didalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan 3 (tiga) hal tersebut, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD DIY) Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 pada saat penyusunan dokumen RKPD 2018 berada dalam proses penyusunan dan tersedia dalam dokumen Background Study RPJMD DIY 2017-2022.

1. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) dan Lima Tahun IV (2020-2025) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah “*pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.*” Sedangkan tahapan Lima Tahun IV (2020-2025) memiliki penekanan untuk “*penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi*

kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.” RPJPD DIY Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode pertama dari RPJMD DIY 2017-2022 yang memasuki masa transisional pada tahun 2017. Dokumen RPJMD DIY 2017-2022 sendiri memiliki peran kritikal dan penting karena berada menjelang berakhirnya tahapan RPJPD DIY 2005-2025 yang hendak mewujudkan Visi Pembangunan berupa “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.



Gambar 4.1 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2018 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2017-2022

Didalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan tahapan pembangunan pertama yang menjadi tahun dasar dari periode RPJMD DIY 2017-2022, dimana tahun 2017 merupakan tahun transisi dimana masa jabatan Gubernur DIY berakhir dan dilanjutkan dengan periode berikutnya sesuai visi misi yang baru.

2. Internalisasi Paradigma *Renaissance* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 pada prinsipnya disusun dalam upayanya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu “*Jogja Tuladha Utama*.” Nilai-nilai dasar yang diangkat dalam rumusan visi tersebut ialah aspek nilai-nilai futuristik Daerah Istimewa Yogyakarta yang kompetitif dibandingkan Provinsi lain di Indonesia, mandat pelestarian nilai-nilai asli lama yang adiluhung dan nilai solutif sebagai rujukan nasional.¹

Visi *Jogja Tuladha Utama* merupakan upaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi acuan nasional dan menempatkan diri dalam kancan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain ingin memberi landasan, *Jogja Tuladha Utama* berupaya untuk mewujudkan paradigma *Renaissance* Daerah Istimewa Yogyakarta². Paradigma *Renaissance* tersebut diwujudkan dalam rangka mengejawantahkan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono* yang bermakna melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia.

RKPD Tahun 2018 berupaya mewujudkan *Renaissance* Daerah Istimewa Yogyakarta melalui internalisasi 9 strategi yaitu: pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan. Melalui internalisasi 9 strategi tersebut, paradigma *Renaissance* Daerah Istimewa Yogyakarta mencita-citakan peradaban baru kembali ke timur dalam kerangka arus balik perikehidupan *among tani dagang layar*, dimana basis visi kemaritiman dan jasa-jasa menjadi arus

1 Rancangan visi 2017-2022 yang menjadi dasar penyusunan RKPD 2018 adalah visi yang termuat di dalam *Background Study* RPJMD 2017-2022

2 *Renaissance* Yogyakarta mengacu pada konsep *aworing kawula-gusti* dan *golong-gilig*, serta diekspresikan dengan sikap *satria: sawiji, greget, sengguh ora-mingkuh*, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan. Lihat RKPD 2017; dan RPJMD DIY 2012-2017

utama.³ Arus balik dalam paradigma *among tani dagang layar* tidak menegasikan peran basis agraris yang sudah ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan terus memperkuat basis pertanian yang telah ada.

3. Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2018

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dikuatkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat enam nilai dasar budaya, meliputi *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Sangkan Paraning Dumadi*, *Manunggaling Kawula Gusti*, Tahta Untuk Rakyat, *Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*, *Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. 4 Nilai-nilai budaya dasar tersebut tidak lepas dari paradigma *Renaissance* Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya semangat keistimewaan dalam kerangka pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus dapat menjadi roh sekaligus menjiwai paradigma pembangunan masa kini khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Tahun 2018, utamanya dalam melaksanakan kewenangan Urusan Keistimewaan yang terdiri dari (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; (5) tata ruang. Urusan Keistimewaan tersebut beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 yakni: (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan

3 Dari 'Among-Tani ke Dagang Layar' ialah paradigma DIY dalam mengikuti tren pergeseran peradaban ke Timur, Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya yang unggul juga dengan strategi budaya: membalik paradigma 'among tani' menjadi dagang layar' dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, Konsekuensinya Laut Selatan menjadi halaman depan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menguatkan basis perekonomian di Pantai Selatan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan penumbuhan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan serta industri kelautan perikanan dan pariwisata maritim yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan yang menjadi pilihan strategis.

Selengkapnya _____. (2014). *Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru*. Catatan Dialog Budaya dan Gelar Seni "YogyaSemesta" Seri-53 dalam *YogyaSemesta: Konektivitas Poros Maritim Dunia dengan Jalur Sutra*. Buletin Seni dan Budaya, Kumpulan Edisi Tahun 2014 Seri 53-72 Tahun 2012-2017. Yogyakarta: Pemerintah Daerah DIY-BPD DIY-DewanPendidikan DIY-Dewan Kebudayaan DIY.

4 Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta enam nilai dasar budaya tersebut telah didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif (penjelas bagi entitas budaya yang telah terjadi kemarin dan saat ini) dan sekaligus sebagai nilai rujukan preskriptif (menjadi dasar perbuatan karya budaya ke depan sekaligus sebagai nilai yang akan dituju dalam pengembangan budaya Yogyakarta dimasa depan). Selengkapnya lihat RPJMD DIY 2012-2017.

mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Sehingga, aras keistimewaan merupakan bagian inklusif dari perencanaan pembangunan yang selaras dalam tema RKPD Tahun 2018.

4. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2018 dengan Tema RKPD Tahun 2018

Tematik pembangunan dibangun berdasarkan pendekatan *Snowballing* melalui *focus group discussion* pada penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tematik yang disusun dalam memberikan fokus perencanaan pembangunan multidimensi yang menjadi kerangka dasar dalam perumusan tema pembangunan Tahun 2018. Adapun tematik yang diangkat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018, meliputi :

- a. Tematik Ketimpangan Wilayah;
- b. Tematik Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan;
- c. Tematik Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA); dan
- d. Tematik Pembiayaan Pembangunan.

Tematik pembangunan tersebut diambil berdasarkan isu pembangunan di DIY. Berikut latar belakang pemilihan tema tersebut:

a. Tematik Ketimpangan Kewilayahan

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan yang tinggi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan tidaklah mencerminkan pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan antara wilayah harus selalu diupayakan. Demikian halnya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dihadapkan pada ketimpangan wilayah, yang ditunjukkan oleh Kabupaten Sleman dan Yogyakarta, yang hanya berluas sekitar 19 persen dari luas wilayah DIY tetapi menguasai sekitar 60 persen dari total PDRB DIY.

Faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antar daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi. Konsentrasi kegiatan ekonomi di DIY yaitu wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman, tidak mengherankan jika PDRB perkapita ke dua wilayah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan tiga

kabupaten yang lain. Faktor lain penyebab ketimpangan adalah alokasi investasi yang belum merata baik PMA maupun PMDN.

Ketimpangan antar wilayah pada periode 2011-2015 di DIY menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu ditandai dengan penurunan indeks Williamson dari 47,56 persen pada tahun 2011 menjadi 46,95 persen pada tahun 2015. Namun demikian, angka tersebut masih dipandang tinggi. Oleh karenanya diperlukan upaya pemerataan pembangunan dengan program-program afirmatif untuk kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo serta meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Meskipun upaya akselerasi pembangunan di kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul telah dilakukan, namun data menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih berada di bawah rata-rata DIY. Pertumbuhan ekonomi DIY masih disumbang oleh Sleman dan Yogyakarta. Pertumbuhan yang cukup pesat di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta ini terutama didorong oleh sektor-sektor tersier seperti perdagangan, konstruksi dan jasa-jasa.

Sebagai daerah penyangga utama perkembangan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, porsi distribusinya mencapai sepertiga dari total PDRB DIY. Sleman masih memiliki potensi terus berkembang lebih cepat. Sementara itu Kota Yogyakarta perkembangannya sudah mengarah ke titik jenuh, pangsa distribusinya di bawah Sleman yaitu sekitar 26 persen. Bantul sebagai penyangga lapis kedua perkembangan perkotaan pangsa distribusinya bergerak lebih meningkat dibanding kabupaten/kota lain meskipun masih di bawah 20 persen. Sementara dua kabupaten lainnya, Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 persen dari luas wilayah DIY, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 21 persen. Letak geografis kedua kabupaten ini terpisah dari pusat Kota Yogyakarta, sehingga perkembangan ekonominya tidak dapat langsung mengandalkan rembesan mekarnya perkotaan. Dua kabupaten ini perlu terobosan investasi besar untuk mengembangkan potensi ekonominya terutama peningkatan akses melalui pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah.

Oleh karena itu agar ketimpangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak semakin melebar dan pertumbuhan ekonomi semakin merata isu Ketimpangan Wilayah ini dimunculkan dalam Tematik Musrenbang Tahun 2017 sehingga dapat diperoleh sinergi antar sektor dan Kabupaten Kota dalam rangka upaya penurunan

ketimpangan antar wilayah melalui program dan kegiatan yang dapat menumbuhkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

b. Tematik Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2016 sebesar 13,10% berada pada peringkat 13 tertinggi angka kemiskinan nasional dan masih berada di atas rata-rata nasional. Potret tingkat kemiskinan DIY menempatkan Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul dengan jumlah Penduduk Miskin tertinggi di DIY, sehingga diperlukan intervensi khusus terhadap Kabupaten-kabupaten tersebut agar jumlah Penduduk Miskin menurun sebagaimana target tingkat kemiskinan DIY tahun 2018 dalam RPJMN sebesar 10,9%.

Sesuai dengan Arahan Gubernur terhadap Pembangunan Tahun 2018 maka Penurunan Kemiskinan dibarengi pula dengan Penurunan Ketimpangan Pendapatan dan Penurunan Ketimpangan Wilayah. Ketimpangan Pendapatan yang digambarkan melalui Indeks Gini pada tahun 2017 sebesar 0,425, hal ini menggambarkan pembangunan di DIY baru dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat berpenghasilan tinggi dan tidak merata di seluruh kelas masyarakat DIY.

Upaya penurunan kemiskinan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal dimana penurunan kemiskinan setiap tahunnya masih berada dibawah 1 %. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanggulangan kemiskinan dalam implementasinya masih terjadi hambatan dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya:

- Validasi data
- Kebanyakan program/kegiatan yang kurang efektif
- Kurangnya sinergi dan implementasi program/kegiatan
- Eksekusi program yang terlambat
- Pendampingan program yang belum optimal

Berdasarkan hal tersebut maka tematik penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dipilih dalam musrenbang tahun 2017 agar dapat diperoleh strategi penurunan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan pendekatan kewilayahan sehingga dihasilkan program dan

kegiatan yang melibatkan antar sektor dan kabupaten kota dalam upaya penurunan kemiskinan.

c. Tematik Pembangunan Bandara NYIA

Sehubungan dengan telah terlaksananya “Babat Alas Nawung Krida” dalam rangka mengawali Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport pada hari Jum’at 27 Januari 2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta jajarannya, Pemda DIY telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pasca Pembangunan Bandara yang dipimpin Gubernur DIY.

Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport di Desa Jankaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY dibangun di atas lahan seluas 587 hektar yang dibangun 2 tahap. Tahap 1 pembangunan bandara tersebut meliputi terminal dengan luas 130 ribu meter persegi, runway sepanjang 3.250 meter dengan lebar 60 meter, apron berkapasitas 35 pesawat, dengan estimasi mampu menampung 15 juta penumpang per tahunnya. Bandara tersebut nantinya diharapkan dapat mengatasi kekurangan di Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta, meningkatkan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, serta memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan dalam hal ini Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya.

Pembangunan bandara baru di Temon tersebut perlu direspon dalam perencanaan pembangunan DIY tahun 2018.

d. Tematik Pembiayaan Pembangunan

Perubahan paradigma pembangunan dari money follow function menjadi money follow program membuat banyak kebijakan anggaran perlu dirubah. Salah satunya adalah focus pendanaan pada program-program besar yang mengungkit dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan nasional yang menetapkan pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,02 menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi DIY. Kondisi pertumbuhan ekonomi DIY saat ini adalah sebesar 5,05% pada tahun 2016 .

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut tidak dapat lagi dilakukan dengan model-model pembiayaan lama yang konvensional. Dalam hal ini harus dilakukan terobosan pembiayaan pembangunan dengan salah satunya dengan peningkatan peran serta swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui mekanisme PPP, CSR atau yang lain.

Sinergi antara pemerintah dan swasta perlu dilakukan sejak tahap awal yaitu perencanaan. Untuk itu tematik pembiayaan pembangunan ini dipilih dalam rangka menggali skema-skema pembiayaan pembangunan yang bersal dari pihak swasta.

Selanjutnya tematik tersebut akan menjadi bagian integral perencanaan yang akan mewarnai konsep perencanaan Tahun 2018, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan.

5. Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2018

Internalisasi pembangunan kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (*regional and urban planning*), serta dimensi administratif yang lebih cenderung melihat dimensi pembangunan pada wilayah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendekatan kewilayahan yang bersifat multidimensi dalam mengelola pembangunan berbasis kewilayahan berkaitan dengan peningkatan kerjasama dalam pembangunan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :

- a. Pendekatan sektor strategis untuk ditangani dengan beberapa prioritas sektor, meliputi :
 - Prioritas 1 : Keuangan, Persewaan dan Jasa Perus.;
 - Prioritas 2 : Jasa-jasa;
 - Prioritas 3 : Konstruksi;
 - Prioritas 4 : Perdagangan Hotel dan restoran;
 - Prioritas 5 : Pengangkutan dan Komunikasi.
 - Prioritas 6 : Listrik, Gas, dan Air Bersih;
 - Prioritas 7 : Pertanian.
- b. Pendekatan *backward and forward linkage* sebagai bagian dari kerangka pembangunan lintas sektor yang dalam arti membangun sektor strategis dan unggul dan strategis yang memberikan implikasi (*multiplier effect*) pada pembangunan sektor lain.
- c. Pendekatan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten/kota sebagai mitra provinsi yang lebih fokus pada beberapa aspek, meliputi :

- Penanggulangan Kemiskinan;
 - Pengembangan Investasi Infrastruktur;
 - Pengendalian Konversi Lahan Terbangun;
 - Reformasi Birokrasi;
 - Pengembangan Industri Kreatif.
- d. Pendekatan prioritas kewilayahan yang lebih fokus pada memberikan skala prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota melalui pertimbangan variabel tertentu, meliputi :
- Nilai Inflasi;
 - Angka Kemiskinan;
 - Nilai ICOR;
 - Ketimpangan Regional.

Aspek kewilayahan dalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2018, sehingga aspek tersebut sinergis.

Sehingga didalam perumusan tema pembangunan 2018 dapat mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025, tema indikatif pada dokumen *Background Study* RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 sebagai pilihan tema indikatif.⁵ Pilihan tema pembangunan yang ada perlu memperhatikan pula dasar filosofi keistimewaan, *renaissance*, fokus tematik, serta fokus prioritas kewilayahan sehingga dapat membangun sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai kata kunci dari tema pembangunan Tahun 2018 sekurangnya harus memuat 4 fokus tematik dan berbagai aspek yang diinternalisasi dan dibangun didalam proses perencanaan yang telah dilakukan pada Tahun 2016-2017, sehingga tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah, sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”

⁵ Dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 hingga saat penyelesaian dokumen ini masih dalam proses penyusunan dan telah tersedia dokumen *Background Study* RPJMD DIY 2017-2022.

Tema diatas mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia merupakan modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan. Kompetensi SDM yang berdaya saing tinggi dapat menggerakkan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas untuk menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Strategi peningkatan kualitas SDM dilaksanakan dengan meningkatkan pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan non formal yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya yang handal dan siap memasuki kompetisi global. Pembangunan SDM tersebut harus memiliki orientasi pada hasil karya berkualitas tinggi.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah DIY melalui pengembangan sektor-sektor unggul khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata DIY sebagai sektor strategis yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor jasa sebagai salah satu sektor basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi isu penting sebagai upaya peningkatan kualitas hidup warga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan mengarusutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut perlu ada peran kolektif dari semua lini tata kelola pemerintahan baik sektor publik pemerintah/ pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat madani yang partisipatif.

3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan akses dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,

baik pada infrastruktur layanan dasar maupun infrastruktur untuk mendukung perekonomian.

4. Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah di DIY diupayakan dengan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan Penataan Ruang yang berbasis keunikan budaya, alam, humanis, dan berwawasan global. Pembangunan wilayah yang menghormati sosiokultural masyarakat diharapkan dapat lebih memanusiakan warga, pemeratakan akses atas kesejahteraan lahir batin berupa penyediaan sarana prasarana dasar, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibilitas, peningkatan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal wilayah yang bertujuan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, penurunan inflasi, dan ketimpangan pendapatan.

Pembangunan wilayah juga harus menghormati kelestarian alam dimana keberlanjutan akan membawa manfaat investasi lingkungan hidup bagi anak-cucu di masa yang akan datang. Pembangunan wilayah ialah untuk manusia dan memanusiakan warga sehingga seharusnya humanis serta membebaskan masyarakat dari diskriminasi (Ras, Suku, Agama, kondisi Fisik (Disabilitas, dll)). Pembangunan wilayah harus berorientasi global, karena masa depan yang akan dituju DIY ialah lokus global untuk wilayah yang membuka peluang kerjasama antar negara yang saling menguntungkan.

5. Berkeadilan

Pembangunan berkeadilan ini juga memperhatikan semangat *Renaissance* Daerah Istimewa Yogyakarta dimana pembangunan kawasan Pantai Selatan/ Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian muka dari Daerah Istimewa ini, untuk mengurangi ketimpangan wilayah utara selatan, dan meningkatkan konektivitas. Pendekatan ini sesuai dengan semangat *Renaissance* untuk putar kemudi “*Among Tani Dagang Layar.*”

4.1.2 RKPD Tahun 2018 Sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dimana visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 adalah : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong. Lebih lanjut untuk mencapai visi pembangunan nasional disusun pula misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan (2015-2019). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan pada wilayah provinsi yang dalam hal ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, Daerah Istimewa Yogyakarta menginternalisasikan tema pembangunan berikut sasaran prioritas pembangunan dengan sasaran pembangunan nasional, serta agenda pembangunan nasional maupun agenda pembangunan bidang sektoral.

Didalam konteks keselarasan antara Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan visi dan misi jangka menengah nasional Tahun 2015-2019. Tema RKPD DIY Tahun 2018 dalam *“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”* sejalan dengan visi dan misi jangka menengah nasional 2015-2019. Visi dan misi nasional sudah memiliki interkoneksi yang jelas, sedangkan hubungan tema tahunan didalam RKPD DIY Tahun 2018

dengan misi jangka menengah nasional dapat dijelaskan bahwa mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan sejalan dengan usaha untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan usaha mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional yang interpretasinya diwujudkan melalui :

1. Peningkatan sumberdaya manusia sejalan dengan upaya dengan usaha mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur sejalan dengan usaha untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
3. Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan yang sejalan dengan misi nasional untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

4.1.3 Penyeragaman Tema Pembangunan RKPD DIY Tahun 2018 dengan RKP Tahun 2018

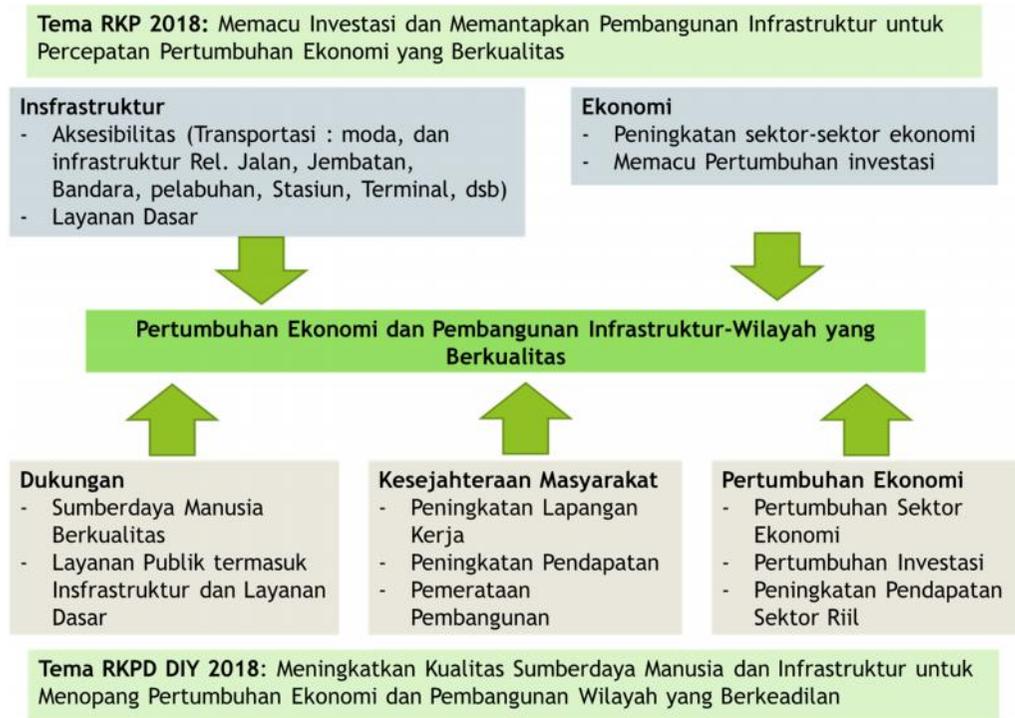
Tema Pembangunan RKPD DIY 2018 berupaya selaras dan mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (RKP 2018). Tema RKP 2018 ialah “*Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.*” Tema pembangunan tersebut menyuratkan pengarusutamaan investasi sebagai pendorong pembangunan dengan mempertahankan/menjaga iklim investasi yang positif diantaranya dengan mempermudah persyaratan investasi dan memprioritaskan investasi untuk manufaktur, jasa, dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang mantap sekurangnya ditempuh melalui prioritas perumahan dan permukiman; infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, serta pembangunan wilayah. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengakslerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah mencanangkan target pertumbuhan ekonomi nasional 6,1% yang diimbangi dengan inflasi rata-rata 3,5%, dan nilai tukar rata-rata USD/IDR 13.600. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditempuh dengan mempertahankan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga >5%, menjaga inflasi serendah mungkin dengan pengendalian harga pangan bergejolak, mengutamakan investasi, serta mendorong peran swasta untuk berinvestasi bersama Pemerintah/ Pemerintah Daerah

dengan format Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terutama dalam pembangunan Infrastruktur sesuai dengan Perpres 38 tahun 2015. Sinergi tema antara RKPD DIY 2018 dan RKP 2018 dapat digambarkan sebagai berikut,



Gambar 4.2 Tema RKP 2018 – Tema RKPD DIY 2018, dan Tema RKPD Kabupaten Kota Sebagai Upaya Penyelarasan.

Tema RKPD DIY 2018 merupakan sub tema dari tema RKP 2018 dengan tautan kata kunci “Pertumbuhan Ekonomi” dan “Pembangunan Infrastruktur-Pembangunan Wilayah.” Selanjutnya skema sinkronisasi Tema RKPD DIY dengan Tema RKP Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.3 Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKP Tahun 2018

4.1.4 Penyelarasan Tema Pembangunan RKPD Kab/Kota Tahun 2018 dengan RKPD DIY Tahun 2018

Sejalan dengan upaya mewujudkan sinkronisasi pembangunan daerah dari aspek kewilayahan, perencanaan pembangunan di DIY diharapkan memiliki hubungan sinergis antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, salah satunya adalah dengan melakukan sinergitas Tema Pembangunan DIY dengan Tema Pembangunan Kabupaten Kota dimana Tema Pembangunan Kabupaten/Kota sebagai Sub Tema dari Tema Pembangunan Provinsi.

4.1.4.1 Sinkronisasi Tema Provinsi dan Sub Tema Kota Yogyakarta Tahun 2018

Sub Tema Kota Yogyakarta pada tahun 2018 adalah Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat “Segoro Amarto” yang dalam hal ini sejalan dengan Tema Provinsi dalam mendukung Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Wilayah yang berkeadilan. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas sejalan

dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur yang ada. Tujuan Kota Yogyakarta yang mandiri dan sejahtera merupakan dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di DIY.

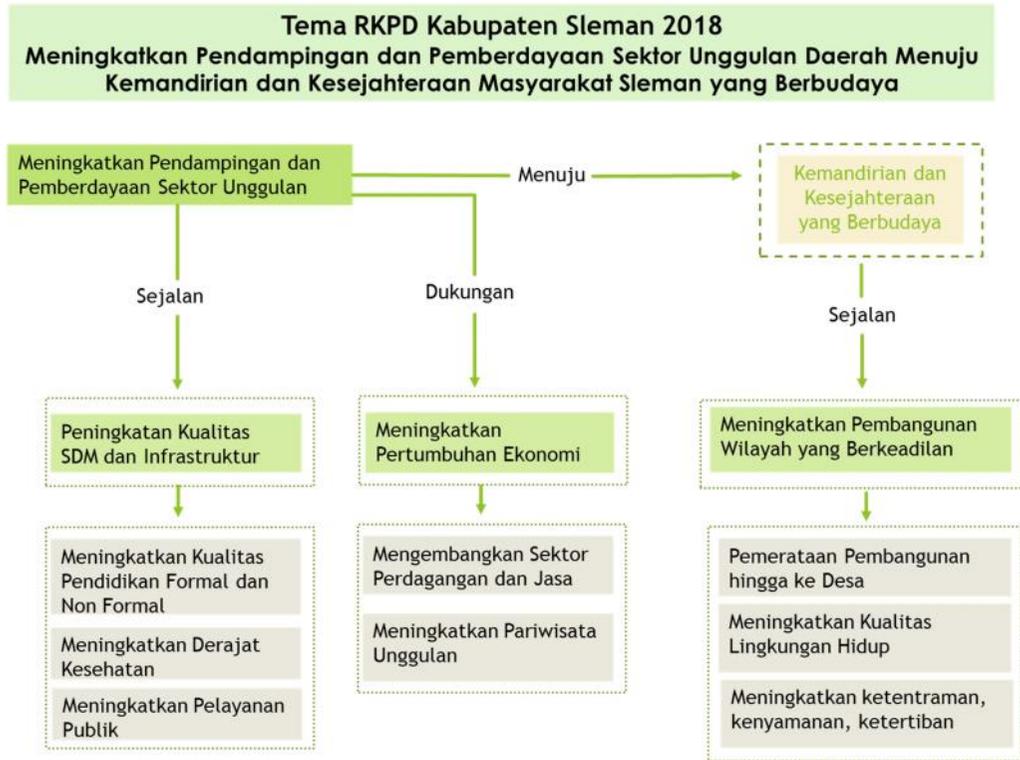


Gambar 4.4 Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018

4.1.4.2 Sinkronisasi Tema Provinsi dan Sub Tema Kabupaten Sleman Tahun 2018

Pada Tahun 2018 Kabupaten Sleman mengangkat Tema Pembangunan “Meningkatkan Pendampingan dan Pemberdayaan Sektor Unggulan Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Sleman yang Berbudaya”, dimana Kabupaten Sleman akan lebih fokus pada Sektor Unggulan Daerah yaitu dengan memberdayakan sektor ekonomi lokal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sleman yang dilaksanakan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Tujuan masyarakat Slema yang mandiri dan sejahtera dilaksanakan dengan meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, penurunan kemiskinan, penanganan permasalahan sosial dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya.

Tema Pembangunan Sleman tersebut sejalan dengan Tema Pembangunan Provinsi dan memberikan dukungan terhadap pencapaian tema pembangunan provinsi.



Gambar 4.5 Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018

4.1.4.3 Sinkronisasi Tema Provinsi dan Sub Tema Kabupaten Bantul Tahun 2018

Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur Dan Investasi Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Bantul Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera. Dari tema tersebut maka Pembangunan Kabupaten Bantul pada Tahun 2018 akan difokuskan pada Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan melalui Pembangunan Infrastruktur sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Bantul. Pembangunan Kawasan Industri Baru dan

Peningkatan Destinasi Pariwisata yang dapat berdaya saing merupakan strategi yang diambil dalam menjawab isu-isu pembangunan yang ada.

Tema Pembangunan Bantul tersebut sejalan dan selaras dengan Tema Pembangunan DIY dimana aspek-aspek yang ada memberi dukungan terhadap tema pembangunan DIY.



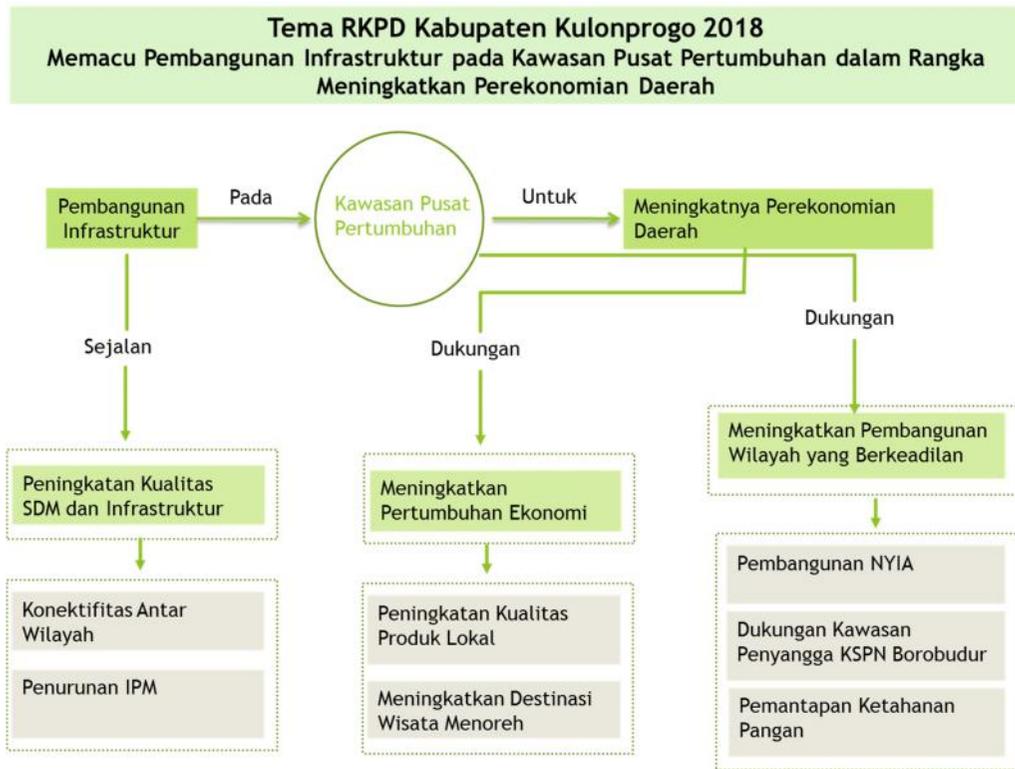
Gambar 4.6 Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2018

4.1.4.4 Sinkronisasi Tema Provinsi dan Sub Tema Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 mengambil Tema Pembangunan “Memacu Pembangunan Infrastruktur pada Kawasan Pusat Pertumbuhan dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah”. Tema Kabupaten Kulon Progo tersebut merupakan respon terhadap pembangunan New Yogyakarta International Airport yang berada di

Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan Infrastruktur pada kawasan Pusat Pertumbuhan sebagai dampak dibangunnya Bandara NYIA dan ditetapkannya Borobudur sebagai KSPN. Pembangunan Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Kulon Progo.

Tema Kabupaten Kulon Progo tersebut menitikberatkan pada Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi seperti halnya Tema Pembangunan Provinsi dan Nasional.



Gambar 4.7 Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

4.1.4.5 Sinkronisasi Tema Provinsi dan Sub Tema Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 adalah: “Meningkatkan Pengembangan Industri Pariwisata sebagai Basis Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kemandirian didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berintegritas”, Pengembangan Pariwisata Gunungkidul sebagai penopang utama

Perekonomian dilakukan melalui pengembangan infrastruktur dan pengembangan SDM pelaku wisata.

Pengembangan SDM dan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tema pembangunan provinsi dimana pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul akan menurunkan ketimpangan wilayah yang ada di DIY.



Gambar 4.8 Sinkronisasi Tema RKPD DIY Tahun 2018 dengan Tema RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.2.1 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan DIY

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan Tahun 2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian integral dengan prioritas pembangunan Tahun 2018 yang dalam hal ini memiliki

interkoneksi dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Prioritas pembangunan nasional Tahun 2018 disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam menjabarkan Nawacita tersebut pada tahun 2018, Pemerintah memiliki 10 Rancangan Prioritas nasional sebagai berikut:

Tabel 4.1 Prioritas Nasional dan Prioritas RKP Tahun 2018

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
1.	Pendidikan	a. Pendidikan Vokasi b. Peningkatan Kualitas Guru
2.	Kesehatan	c. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak d. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit e. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3.	Perumahan dan Permukiman	f. Penyediaan Perumahan Layak g. Air Bersih dan Sanitasi
4.	Pengembangan Dunia Usaha	h. Pengembangan 3 Kawasan

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
		Pariwisata (dari 10) i. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) j. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) k. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja l. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
5.	Ketahanan Energi	m. EBT dan Konservasi Energi n. Pemenuhan Kebutuhan Energi
6.	Ketahanan pangan	o. Peningkatan Produksi pangan p. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
7.	Penanggulangan Kemiskinan	q. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran r. Pemenuhan Kebutuhan Dasar s. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
8.	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	t. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) u. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9.	Pembangunan Wilayah	v. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal w. Pembangunan Perdesaan x. <i>Reforma Agraria</i> y. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) z. Percepatan Pembangunan Papua
10.	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	aa. penguatan Pertahanan bb. Kepastian Hukum

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
		cc. Stabilitas Politik dan Keamanan dd. Reformasi Birokrasi

Selain 10 Rancangan Prioritas Nasional tersebut terdapat *highlight* pada isu Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim, dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik yang perlu diperhatikan bersama.

Adapun Prioritas DIY yang diindikasikan dalam Background Study RPJMD DIY 2017-2022 dapat dideskripsikan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia lebih mengedepankan upaya meningkatkan angka harapan lama sekolah, umur harapan hidup dan pendapatan *domestic bruto* per kapita yang ukurannya dapat dilihat dari meningkatnya indeks pembangunan manusia. Aspek tersebut mengedepankan upaya mewujudkan *quality of life*.

2. Penguatan Kapasitas Ekonomi

Penguatan kapasitas ekonomi lebih diartikan upaya memberikan peran kesejahteraan kepada masyarakat yang hasil akhirnya lebih pada aspek ekonomi, yaitu pendapatan. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menjadi penekanan dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan hal tersebut, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan angka pengangguran.

3. Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

Aspek ini lebih mengedepankan upaya membangun sinergi antar wilayah, membangun rantai distribusi antar wilayah dalam kerangka membangun keterkaitan antara wilayah pusat dan sub pusat, serta membagi wilayah-wilayah hinterland, serta menjaga keterpaduan antar ruang dan lingkungan. Dalam hal ini stabilitas antara wilayah juga dilihat dari aspek meningkatnya kualitas lingkungan di DIY.

4. Penguatan Kapasitas Infrastruktur;

Penguatan kapasitas infrastruktur lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang secara khusus mengarah pada layanan infrastruktur dasar. Dalam hal ini terkait dengan upaya mewujudkan layanan aksesibilitas, air minum, limbah dan sanitasi, listrik, serta hunian.

5. Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan diarahkan pada upaya mewujudkan kinerja pemerintah secara lebih akuntabel, serta mengarah pada upaya mewujudkan profesionalisme birokrasi. Hal ini tercermin

dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dan mewujudkan opini pemeriksaan BPK secara lebih optimal.

6. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menjadi penekanan di DIY sekaligus menjadi bagian dari visi pembangunan jangka panjang di DIY Tahun 2005-2025. Pengembangan pariwisata di DIY diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, serta meningkatkan pendapatan sektor pariwisata.

7. Pelestarian Nilai Budaya;

Pelestarian nilai budaya menjadi bagian penting didalam melindungi, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan Jawa, khususnya DIY yang menjadi salah satu pusat budaya yang muncul semenjak zaman mataram. Pelestarian nilai budaya di DIY dilandasi oleh semangat *renaissance* yang didasari oleh mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Budaya di DIY juga sangat dipengaruhi aspek tata nilai dan etika yang mengedepankan perwujudan stabilitas pembangunan wilayah di DIY.

8. Peningkatan Tata Nilai dan Etika

Peningkatan tata nilai dan etika lebih pada upaya memberikan pemahaman mendasar tentang pentingnya nilai dan budaya pada masyarakat yang dibangun untuk mewujudkan stabilitas di DIY, serta keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Hal ini ke depan dapat didukung dari aspek pendidikan maupun aspek pengembangan konteks demokrasi, serta budaya masyarakat yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan.

Lebih lanjut aspek pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas SDM
 - a. Indeks Pembangunan Manusia Meningkatkan
 - b. Layanan Pendidikan Meningkatkan
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi
 - a. Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan
 - b. Angka Kemiskinan Menurun
 - c. Angka Pengangguran Menurun

3. Penguatan Kapasitas Infrastruktur
 - a. Layanan Infrastruktur Dasar Meningkatkan
 - b. Layanan Infrastruktur Pendukung Kawasan Budaya Meningkatkan
4. Penguatan Kapasitas Tatakelola Pemerintahan
 - a. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatkan
 - b. Opini Pemeriksaan BPK Bertahan
5. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
 - a. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan
 - b. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan
 - c. Ketimpangan Wilayah Turun
 - d. Ketimpangan Pendapatan Turun
6. Pengembangan Pariwisata
 - a. Kunjungan pada Destinasi Wisata Meningkatkan
 - b. Destinasi Wisata Budaya Meningkatkan
7. Pelestarian Nilai Budaya
 - a. Pelestarian Budaya Jogja Meningkatkan
8. Peningkatan Tata Nilai dan Etika
 - e. Stabilitas Wilayah Meningkatkan

Aspek pendekatan Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017-2022 tersebut disinkronkan dengan Nawa Cita Prioritas Pembangunan Nasional kemudian dijabarkan ke dalam Prioritas Pembangunan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Interkoneksi Nawa Cita dengan Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2018

No	Nawa Cita	Pendekatan Prioritas
(1)	(2)	(3)
1	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Sosial dan Budaya
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Peningkatan Kualitas SDM
3	Melakukan revolusi karakter bangsa.	

No	Nawa Cita	Pendekatan Prioritas
(1)	(2)	(3)
4	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	Pengembangan Ekonomi
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	
6	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa desa dalam kerangka negara kesatuan.	Pembangunan Wilayah Infrastruktur
7	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Ketahanan Energi dan Pangan
8	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	Reformasi Birokrasi
9	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	

Tabel 4.3 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2018

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas DIY
1.	Pendidikan	1.	Peningkatan Kualitas SDM
2.	Kesehatan		
3.	Pengembangan Dunia Usaha	2.	Pengembangan Ekonomi
4.	Ketahanan Energi	3.	Ketahanan Energi dan Pangan
5.	Ketahanan pangan		
6.	Penanggulangan Kemiskinan	4.	Sosial Budaya
7.	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	5.	Infrastruktur
8.	Perumahan dan Permukiman		
9.	Pembangunan Wilayah	6.	Pembangunan Wilayah

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas DIY
10.	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	7.	Reformasi Birokrasi

4.2.2 Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional dan DIY

Lebih lanjut prioritas pembangunan Tahun 2018 yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 diterjemahkan kemudian didalam sasaran pokok pembangunan. Dalam hal ini sasaran pokok tersebut juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Sasaran Makro, meliputi : pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro melalui pembangunan manusia dan masyarakat, serta ekonomi makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi : kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan (melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi : kedaulatan pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energy, maritim dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai Negara maritim, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan), pariwisata dan manufaktur (pariwisata dan industri manufaktur), ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan);
4. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan, meliputi menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja);

5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, meliputi : pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional (peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, pembangunan kawasan perkotaan), pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan;
6. Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan keamanan.

Sasaran pokok pembangunan nasional tersebut tentunya menjadi arah dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana RKPD Tahun 2018 disusun dalam kerangka membangun ketercapaian terhadap target sasaran pokok nasional.

4.3 Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Terkait dengan prioritas pembangunan kewilayahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan suatu identifikasi permasalahan dan isu-isu terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan berbagai kajian dan penelitian, beberapa permasalahan dan isu-isu penting pembangunan di DIY yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- a. Tingginya tekanan penduduk terhadap lahan, terutama lahan pertanian. Masalah ini terus meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk dan konversi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang terus meningkat. Konversi lahan pertanian banyak terjadi di pinggiran Kota Yogyakarta terutama di wilayah Kabupaten Sleman. Konversi lahan pertanian tersebut mengakibatkan produksi pertanian mengalami penurunan dan mengancam ketahanan pangan di wilayah DIY.
- b. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lereng tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung Api Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbunan air tanah di wilayah tangkapan air utama. Penurunan imbunan ari tanah juga disebabkan oleh tingginya lahan terbangun akibat berkembangnya berbagai fungsi kawasan di wilayah resapan air.
- c. Adanya peningkatan volume lalu lintas sebagai dampak berkembangnya aktivitas perekonomian dan mobilitas penduduk mengakibatkan meningkatnya pencemaran udara. Pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya polutan udara, seperti CO, NO₂, HC dan partikulat lainnya. Terjadinya peningkatan polutan udara juga disebabkan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta kondisi emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum di DIY, terutama di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, menjadi penyebab memburuknya kualitas udara di ruas-ruas jalan utama, terutama pada saat jam sibuk. Konsentrasi polutan udara terjadi pada titik-titik kemacetan dan pusat-pusat aktivitas penduduk.
- d. Pada saat ini di wilayah DIY, khususnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sangat marak dengan berkembangnya pendirian hotel berbintang, mal, dan apartemen. Berkembangnya hotel, mal, dan apartemen tersebut jika tidak terkendali dikhawatirkan akan

menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan. Potensi gangguan lingkungan tersebut antara lain menyangkut semakin menurunnya air tanah dan potensi kemacetan yang akan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hotel, mal, ataupun apartemen.

- e. Berkembangnya lahan terbangun, seperti lahan permukiman, hotel, mal, dan apartemen, juga berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan. Dengan berkurangnya lahan terbuka hijau akan mengurangi kemampuan lingkungan untuk mereduksi pencemaran udara dan sekaligus mengurangi resapan air. Peningkatan lahan terbangun juga akan meningkatkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sehingga berpotensi semakin meningkatnya aliran permukaan yang akan mengakibatkan genangan dan banjir.
- f. Sebagian wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di wilayah DIY telah banyak mengalami tekanan penduduk yang mengakibatkan adanya alih fungsi lahan dan pencemaran sungai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian wilayah DAS mengalami degradasi lingkungan yang ditandai oleh tingginya sedimentasi dan fluktuasi debit air pada musim penghujan dan musim kemarau cukup tinggi.
- g. Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan karst tersebut.
- h. Wilayah DIY sebagian kawasan permukimannya dilewati sungai. Di wilayah sekitar sungai tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk permukiman dan sebagian telah melanggar sempadan sungai. Permukiman di sekitar sungai, terutama di wilayah Kota Yogyakarta, terus mengalami pemadatan sehingga memunculkan kawasan kumuh (*slum areas*). Berkembangnya kawasan kumuh di sekitar sungai menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan permukiman.

Dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, diperlukan beberapa arahan kebijakan sebagai dasar dalam pembangunan kewilayahan sebagai berikut :

- a. Dengan melihat imbalan antara biokapasitas dengan jejak ekologi dihasilkan adanya defisit sumber daya lahan sebesar 0,085 hektar global per kapita. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di DIY jumlah penduduk yang ada sudah melebihi daya dukungnya (*over population*). Untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang ada diperlukan tambahan sumber daya dari luar daerah (*import*). Alternatif lain adalah dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk atau melalui upaya meningkatkan produktivitas serta

reorientasi dan pengaturan penggunaan lahan. Instrumen kunci dalam upaya reorientasi dan pengaturan penggunaan lahan adalah dengan mengembangkan rencana tata ruang wilayah yang lebih mendasarkan pada aspek daya dukung lingkungan/wilayah. Pola ruang RTRW DIY perlu lebih diarahkan pada keseimbangan pengaturan pola ruang sesuai dengan kemampuan dan fungsi kawasan sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya dukung sumber daya lahan. Upaya pengaturan pola ruang tersebut diharapkan juga mampu meningkatkan biokapasitas wilayah dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan.

- b. Dengan memperhatikan tingkat konsumsi yang ada, wilayah DIY masih mengalami defisit lahan pertanian, hutan, dan *fishing grounds*. Luasan lahan pertanian yang ada saat ini hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan penduduk. Untuk memenuhi kekuarangan luasan lahan pertanian tersebut tidak memungkinkan lagi dilakukan dengan ekstensifikasi karena keterbatasan luasan dan di sebagian wilayah kemampuan lahannya kurang mendukung. Cara yang perlu dan mungkin dilakukan adalah dengan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas sehingga total produksi pertanian dapat ditingkatkan. Untuk mengatasi luasan hutan yang masih kurang dapat dilakukan dengan perluasan hutan terutama pada lahan-lahan kritis. Di bidang perikanan yang masih kurang, pengembangan kawasan budi daya perikanan perlu lebih ditingkatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Secara keseluruhan DIY masih surplus sumber daya air. Meskipun demikian, terdapat beberapa bagian wilayah terutama di Kabupaten Gunungkidul yang kekurangan air sehingga berdampak pada kesehatan dan produktivitas penduduk. Untuk itu perlu dilakukan konservasi sumber daya air. Setiap kabupaten/kota perlu menetapkan perda konservasi sumber daya air sebagai bentuk pengendalian terhadap berbagai kegiatan yang dapat menurunkan daya dukung sumber daya air. Khusus untuk Kabupaten Gunungkidul perlu diupayakan pemanfaatan potensi sungai bawah tanah yang cukup berlimpah dengan memanfaatkan teknologi yang tepat.
- d. Dalam upaya pengendalian dampak pencemaran udara perlu dilakukan beberapa upaya yaitu penambahan luasan kawasan hijau khususnya di wilayah perkotaan, selain itu perlu dikembangkan Program Kampung Hijau untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga mampu mendukung kampung yang berkelanjutan.

- e. Daya dukung pangan di wilayah DIY menunjukkan angka yang belum mencapai swasembada pangan. Kebutuhan pangan penduduk untuk hidup layak tidak dapat terpenuhi hanya dari produksi lokal karena produksi yang tersedia hanya mampu memenuhi kebutuhan sebagian penduduk. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan upaya intensifikasi dan penggunaan teknologi tepat guna.
- f. Dalam upaya mencapai keberlanjutan pembangunan pariwisata di DIY diperlukan empat pilar utama, yaitu *pro-environment*, *pro-poor*, *pro-women*, dan *pro-livelihood opportunities*. Empat pilar tersebut merupakan perwujudan dari tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

4.3.1 Konektivitas Pembangunan Antar Wilayah

Dalam kaitannya dengan pembangunan kewilayahan di DIY, wilayah-wilayah di DIY pada prinsipnya memiliki karakteristik pengembangan yang berbeda-beda. Secara khusus untuk wilayah *hinterland* atau yang disebut dengan istilah lain, yaitu: kota satelit. Pada dasarnya dari kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu kota kecil yang berada disekitar kota besar, yang memiliki kesamaan dalam pola kinerja tetapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Di wilayah *hinterland* tetap ada kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan atau fasilitas-fasilitas lain tetapi dalam skala kecil, tidak kompleks pada kota besar atau pusat kota.

Secara ekonomi wilayah *hinterland* bisa menjalankan perekonomian secara mandiri, walaupun ada beberapa barang dan jasa yang dalam pendistribusiannya masih tergantung pada kota besar, tetapi secara garis besar kawasan *hinterland* atau kota satelit dapat memenuhi fasilitas-fasilitas kota yang pada akhirnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya atau penduduk sub-urban. Dengan kata lain, menurut Yunus (2005, h.285) dapat diungkapkan bahwa wilayah *hinterland* juga berfungsi sebagai penerima tenaga kerja karena didalamnya yang telah berkembang fungsi-fungsi sosio ekonomi kota, namun juga berperan sebagai pemasok komoditas ketempat lain.

Berkaitan dengan hal tersebut wilayah DIY memiliki kondisi yang menarik, dimana Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan yang saat ini pertumbuhan dan perkembangannya bergerak alamiah, menyebar ke wilayah-wilayah diluar Kota Yogyakarta, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang dalam perkembangannya wilayah dengan karakteristik hampir sama dengan Kota Yogyakarta tersebut disebut sebagai Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Perkembangan fungsi-fungsi wilayah sesuai dengan fungsi *hinterland* disekitar Kawasan Perkotaan Yogyakarta seperti Kawasan

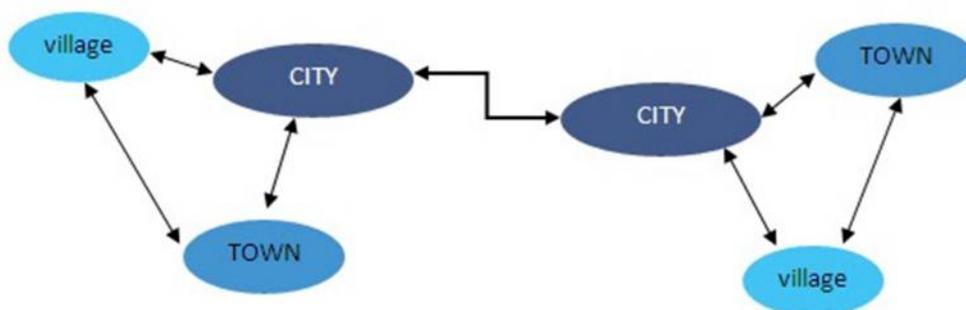
Perkotaan Wates, Bantul, Wonosari, dan Sleman pada prinsipnya menjadi bagian penting memberikan dukungan perkembangan wilayah di DIY, khususnya sebagai titik pusat distribusi barang dan komoditas untuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Hal ini memberikan makna bahwa daya dukung *hinterland* terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di DIY dapat terbentuk.

Pengembangan infrastruktur wilayah dari dan menuju *hinterland* memberikan peran penting peningkatan pemasaran komoditas baik industri kreatif, pertanian, perikanan, hasil hutan, dan lain sebagainya. Sebaliknya untuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta tentunya harus memberikan peran penting pula dalam mendukung *hinterland* baik dalam pengembangan pelayanan pendidikan maupun penyediaan barang dan komoditas dari wilayah lain untuk mendukung kawasan-kawasan *hinterland* sebagai bagian dari sub pusat pertumbuhan DIY.

Pertimbangan arah kebijakan kewilayahan tersebut memberikan peran penting dalam peningkatan daya beli masyarakat karena dengan pola manajemen distribusi barang dan komoditas yang baik, serta pola pengaturan harga pasar oleh pemerintah akan meningkatkan pendapatan baik petani, nelayan, pedagang, maupun unsur masyarakat lainnya, sedangkan dari aspek pemenuhan komoditas terpenuhi dengan baik dan masyarakat memiliki daya beli yang baik terhadap barang/komoditas yang dijual di pasar. Lebih lanjut dengan pola membuat rantai distribusi komoditas beredar dan memenuhi kebutuhan penduduk terutama masyarakat lokal DIY akan berimplikasi pula pada pemenuhan penyediaan lapangan pekerjaan masyarakat.

Pola manajemen demikian akan memberikan peran barang/komoditas lokal beredar secara khusus di wilayah DIY yang akan meminimalisir jumlah komoditas yang masuk di wilayah DIY, serta memberikan nilai manfaat yang lebih tinggi terhadap masyarakat lokal yang akan berdampak secara *multiplier* terhadap penurunan angka kemiskinan.

Dukungan pembangunan infrastruktur akan memberikan pengaruh pada peningkatan akses, serta distribusi dan pemasaran komoditas lokal di DIY, serta memberikan pengaruh pula terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota di DIY. Infrastruktur pada wilayah *hinterland* dikembangkan untuk memberikan dukungan konektivitas dengan pusat pertumbuhan yang dalam hal ini adalah Kawasan Perkotaan Yogyakarta.



Sumber:

Gambar 4.9 Konektivitas Pusat dan Sub Pusat Pertumbuhan.

Pengembangan pola kerjasama antar wilayah tentunya menjadi bagian penting dalam mendukung suksesti pengembangan manajemen distribusi tersebut, serta memberikan peran penting dalam mendukung pengembangan wilayah di DIY. Identifikasi sektor-sektor unggulan dan strategis di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota di DIY secara lebih spesifik sangat diperlukan. Lebih lanjut identifikasi terhadap arus barang dan komoditas, serta pola-pola perkembangan wilayah di Kabupaten/Kota menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi arah pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota serta menjadi bahan dalam perumusan arah kebijakan strategis masing-masing Kabupaten/Kota.

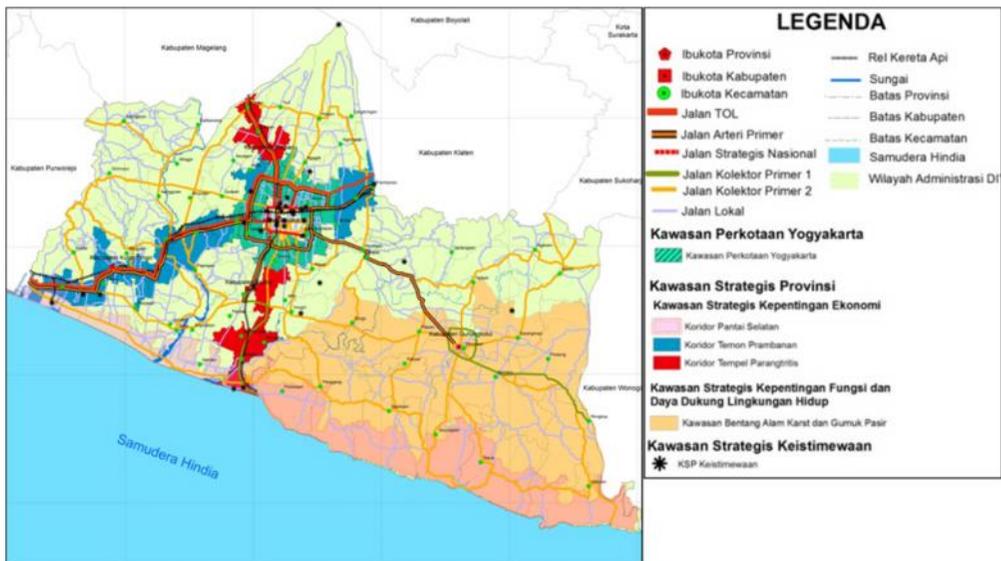
Wilayah Kabupaten Gunungkidul saat ini menjadi bagian penting dalam pengendalian kawasan dengan fungsi ekologis dengan mengubah *mindset* pengendalian lingkungan hidup melalui pengembangan pariwisata daerah yang memanfaatkan alam baik goa, pantai, serta peninggalan sejarah megalitikum. Kabupaten Bantul sebagai bagian dari pengembangan aktivitas wisata yang memanfaatkan potensi alam berupa pantai dan mengembangkan industry kreatif yang menjadikan Kabupaten Bantul sebagai trigger pengembangan aktivitas pariwisata khususnya dalam seni dan budaya. Sejalan dengan hal tersebut akan berbeda dengan wilayah Kabupaten Kulonprogo yang akan meningkatkan fungsi wilayahnya sebagai wilayah yang maju dan modern melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur bandara dan pelabuhan tanjung adikarto dengan harapan ke depan memberikan peran besar dalam menarik *demand* pengguna jasa transportasi udara, serta pengembangan system distribusi barang dan komoditas melalui pelabuhan dan bandara. Lain halnya dengan Kabupaten Sleman yang cenderung dapat memberikan dukung dari aspek ekologis berkaitan dengan penyediaan cadangan air karena Sleman merupakan wilayah resapan air atau daerah tangkapan air.

4.3.2 Pembangunan Koridor Ekonomi Strategis

Pengembangan koridor ekonomi strategis dilakukan pada beberapa lokasi koridor, meliputi Koridor Pantai Selatan, Koridor Temon-Prambanan, Koridor Tempel-Parangtritis. Beberapa koridor ekonomi tersebut tentunya dikembangkan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di DIY, serta mengoptimalkan fungsi ruang yang mendukung peningkatan nilai ekonomi kawasan.

Lebih lanjut berkaitan dengan pengembangan koridor ekonomi di DIY dilakukan pula beberapa pengembangan koridor kawasan bentang alam karst dan gumpuk pasir disekitar wilayah Kabupaten Gunungkidul, sebagian Bantul dan Kulonprogo. Kawasan tersebut tentunya memiliki fungsi lindung yang memerlukan upaya konservasi pada beberapa lokasi yang sudah mengalami degradasi lingkungan.

Pengembangan lebih lanjut pada koridor ekonomi strategis adalah penetapan kawasan pusaka yang mendukung keistimewaan di DIY yang menjadi fokus pembangunan keistimewaan di DIY. Peran DIY dalam mendukung Koridor Ekonomi khususnya Temon-Prambanan fokus pada perencanaan sarana dan prasarana angkutan jalan rel, yaitu melakukan kajian trase Utara-Selatan dan Timur-Barat, serta Lokasi Stasiun Kereta Api pada koridor-koridor tersebut. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

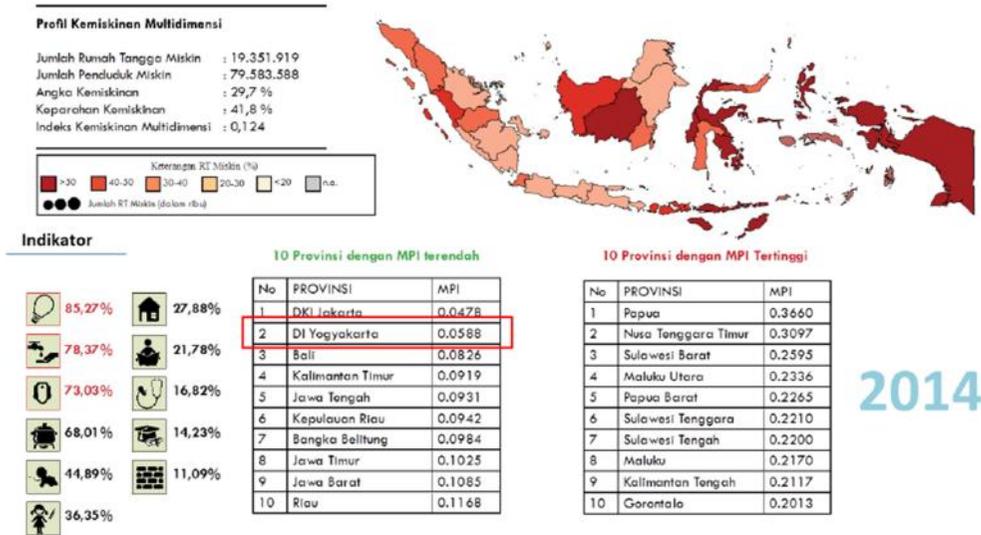


Sumber:

Gambar 4.10 Peta Pengembangan Koridor Ekonomi Strategis.

4.3.3 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi permasalahan yang sampai saat ini membutuhkan perhatian serius. Hal ini terkait dengan masalah pendapatan yang diterima masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat, sanitasi dan lingkungan, penataan ruang, ketenagakerjaan, sosial, serta aspek-aspek yang memberikan permasalahan degradasi lingkungan khususnya pada kawasan DIY. Sampai dengan Tahun 2016 lokus penanggulangan kemiskinan adaah 15 kecamatan miskin dengan kondisi dimana Kabupaten Gunungkidul sampai dengan memiliki potensi kemiskinan paling dominan. Sampai dengan Tahun 2016 untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemiskinan menjadi bagian penting untuk dilakukan intervensi dalam pengurangan angka kemiskinannya. Lebih lanjut peran lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan.



Sumber:

Gambar 4.11 Nilai Skor dan Indeks MPI Tahun 2014.

Berdasarkan catatan Tahun 2014 didapat kondisi bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada posisi ke-2 setelah Pemda DKI dengan nilai Multidimension Poverty Index (MPI) 0,0588. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta < 20%. Sejalan dengan hal tersebut, kemiskinan multidimensi diukur dari beberapa variabel, meliputi :

Pendidikan :

- Keberlangsungan pendidikan (yang menyelesaikan SMA/SMK)
- Melek Huruf (yang mampu baca)
- Akses layanan pendidikan (anak usia sekolah yang tidak mendapat akses)

Kesehatan :

- Proses persalinan (yang tdk ditolong dokter /paramedis)
- Asupan gizi baita (tidak memenuhi kebutuhan minimum karbohidrat)
- Sanitasi (tidak memiliki sanitasi sendiri)
- Air bersih (sumber air yang layak/terlindung)

Standar Hidup :

- Sumber penerangan (non PLN dan sumber penerangan lainnya)
- Bahan bakar untuk memasak (tidak menggunakan listrik atau gas)
- Atap, lantai dan dinding (atap selain : sirap, genteng, seng, lantai selain : keramik, semen, Dinding selain tembok/kayu)
- Kepemilikan rumah (menyewa, kontrak, numpang)

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002 : 3). Dimensi Kemiskinan : Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, Kemiskinan sosial, Kemiskinan konsekwensial. Penurunan angka kemiskinan di DIY dilakukan dengan integrasi lintas sektor, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban, peningkatan kapasitas, peningkatan akses, serta pengembangan system proteksi. Dalam kaitannya dengan usaha penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya dengan pengembangan daya saing wilayah melalui pengembangan produk/komoditas lokal wilayah, peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, bantuan rumah layak huni, pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan, pelatihan ketrampilan, bantuan permodalan, serta peningkatan kesempatan kerja.

4.3.4 Penurunan Ketimpangan Wilayah

Penurunan ketimpangan wilayah di DIY menjadi permasalahan yang bersifat multidimensi. Seperti halnya masalah kemiskinan, ketimpangan wilayah bersifat unik, mengingat tidak semua wilayah dengan penyediaan infrastruktur dan sarana maupun prasarana rendah merupakan wilayah yang timpang hanya karena pertimbangan secara umum melalui perhitungan *index Williamson*. Hal ini memberikan makna bahwa aspek ketimpangan tentunya harus memperhatikan rasio penyediaan infrastruktur terhadap kebutuhan, bukan hanya

memperhatikan bahwa sebuah wilayah mengalami ketimpangan karena kawasan didalamnya mengalami pertumbuhan yang tidak seimbang karena satu kawasan tertentu berkembang potensi perdagangan dan jasa cukup tinggi, sedangkan kawasan lain hanya berkembang potensi pertanian dan perkebunan.

Makna ketimpangan dalam kaitannya dengan aspek pengembangan wilayah tentunya harus memperhatikan terlebih dahulu fungsi sebuah wilayah. Tidak hanya sebatas melihat seberapa besar pelayanan yang tersedia pada masing-masing wilayah. Dalam hal ini apabila diperhatikan, wilayah DIY memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda tiap wilayah kabupaten/kotanya (melihat dari aspek administratif). Wilayah Kabupaten Bantul, dan Sleman dikembangkan aktivitas pertanian yang cukup baik yang pada prinsipnya memiliki fungsi sebagai wilayah *hinterland* yang mendukung wilayah pusat kota, dalam hal ini adalah Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Kepadatan penduduk cukup tinggi memberikan nuansa bahwa Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan, sedangkan wilayah diluar kawasan perkotaan merupakan *hinterland* dan sebagian sebagai penyangga. Kabupaten Sleman selain dikembangkan sebagai pertanian juga memiliki fungsi ekologis, yaitu kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, serta wilayah sekitar merapi yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Hal ini memberikan makna bahwa sebagian wilayah Kabupaten Sleman adalah wilayah lindung yang memberikan dukung terhadap wilayah-wilayah dibawahnya termasuk berkaitan dengan dukungan penyediaan air dari mata air merapi, serta fungsi merapi menjaga keberlangsungan ekologi. Lebih lanjut Bantul menjadi salah satu wilayah yang memberikan peran penting dalam pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, demikian pula Kabupaten Sleman yang memberikan peran penting mendukung pangan pada wilayah perkotaan Yogyakarta.

Lebih lanjut wilayah Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul memiliki karakteristik unik sebagai wilayah yang lebih jauh dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul memiliki fungsi pengembangan ekologis karst. Kabupaten Gunungkidul tidak dapat dikembangkan seperti Kota Yogyakarta, mengingat kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki termasuk sumber air bawah tanah yang cukup besar maupun keberadaan kawasan karst yang menjaga keberlangsungan fungsi ekologi kawasan sekitarnya.

Uraian tersebut diatas memberikan penjelasan bahwa wilayah Pusat dan Sub Pusat harus dibedakan karakteristiknya, khususnya dalam upaya melihat disparitas wilayah yang tidak hanya secara umum melainkan secara khusus dengan melihat kebutuhan sarana dan prasarana dasar. Hal tersebut memberikan implikasi pula pada perumusan proses perencanaan kewilayahan termasuk dalam hal ini adalah penataan ruang.



Sumber:

Gambar 4.12 Dasar Pemikiran Penurunan Ketimpangan Wilayah

4.3.5 Kestabilan Daya Dukung Lingkungan

Hamemayu Hayuning Bawono merupakan filosofi sekaligus konsep yang banyak menghiasi wawasan kosmologi kehidupan masyarakat Jawa. *Hamemayu Hayuning Bawono* relevan dengan upaya untuk memberi makna bahwa kehidupan sejatinya adalah memuliakan kehidupan termasuk memuliakan bumi dan alam semesta. Konsep ini selaras dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan dan kelestarian lingkungan hidup dijaga dengan semangat memuliakan bumi demi anak cucu sebagai penghuni berikutnya.

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan, aspek

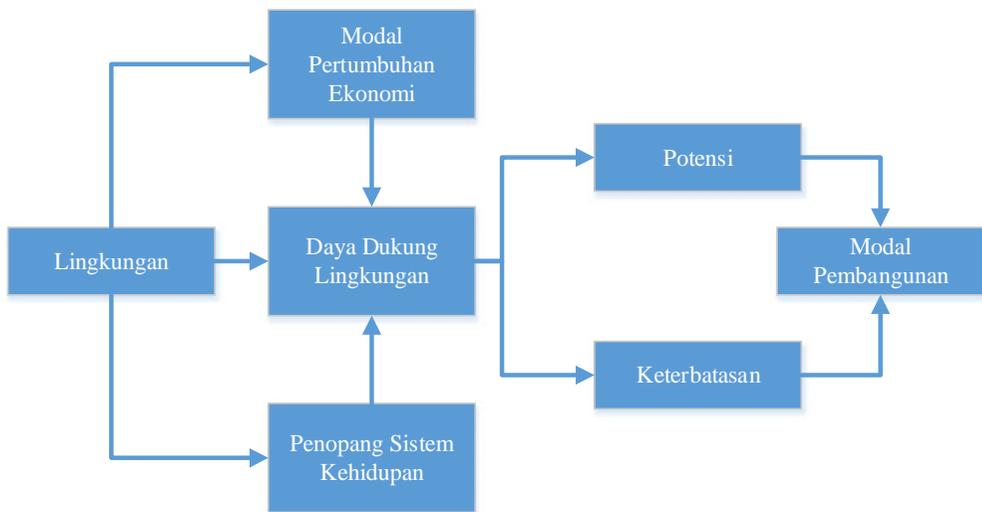
lingkungan merupakan hal yang “istimewa” karena menyangkut bagian penting dalam pembangunan. Kondisi lingkungan merupakan faktor penentu sekaligus faktor pembatas dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai faktor penentu, aspek lingkungan dapat merupakan sumber daya yang mampu mendukung pembangunan. Berbagai sumber daya yang tersedia dari kondisi lingkungan tertentu dapat dimanfaatkan untuk menunjang berbagai aktivitas pembangunan. Dengan demikian, kondisi lingkungan pada suatu wilayah dengan berbagai sumber daya di dalamnya dapat sebagai modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*).

Potensi sumber daya alam di suatu wilayah yang dimanfaatkan melalui berbagai macam kegiatan sektoral dapat memberikan kontribusi yang nyata pada perekonomian wilayah. Sumbangan pendapatan sektor kegiatan yang berbasis pada sumber daya alam di berbagai daerah berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mampu memicu perkembangan ekonomi wilayah. Dengan demikian, daya dukung sumber daya alam dapat menentukan perkembangan ekonomi wilayah. Meskipun demikian, daya dukung sumber daya alam pada suatu daerah dapat pula hanya sekedar potensi dan belum mampu menggerakkan ekonomi wilayah karena belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal.

Daya dukung sumber daya alam pada suatu wilayah berkaitan dengan perkembangan kegiatan sektoral. Kegiatan sektor tertentu akan berkembang sesuai dengan intensitas pemanfaatan dan potensi sumber daya alamnya. Berkembangnya sektor kegiatan yang secara intensif memanfaatkan potensi sumber daya alam akan menjadikan sektor tersebut sebagai sektor unggulan. Besarnya daya dukung sumber daya alam pada suatu wilayah terkait dengan berkembangnya sektor-sektor unggulan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, aspek lingkungan juga sangat menentukan berkembangnya suatu sistem kehidupan. Aspek lingkungan mempunyai kaitan yang erat dengan berkembangnya ekosistem tertentu. Berkembangnya sistem kehidupan ditentukan oleh dukungan ekosistem. Dengan demikian, kondisi lingkungan merupakan penopang sistem kehidupan (*life support system*).

Sesuai dengan fungsi lingkungan sebagai modal pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang sistem kehidupan, tentunya mencerminkan adanya kemampuan suatu lingkungan dalam mendukung dan memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Kemampuan tersebut merupakan daya dukung dari suatu lingkungan tertentu yang ada dalam suatu wilayah. Daya dukung lingkungan memberikan gambaran tentang adanya potensi yang dapat dimanfaatkan.

Meskipun demikian, daya dukung juga mencerminkan adanya keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Secara diagramatis, fungsi dan keistimewaan lingkungan dalam pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber:

Gambar 4.13 Dukungan Lingkungan dalam Pembangunan

Setiap wilayah mempunyai kapasitas yang berbeda dalam perkembangannya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Salah satu potensi sumber daya wilayah tersebut adalah menyangkut sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat di suatu wilayah, baik berupa sumber daya lahan maupun sumber daya lainnya, dalam manifestasi pemanfaatannya meliputi berbagai bentuk, seperti untuk peruntukan kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Bentuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut sangat kompleks dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan wilayah. Potensi sumber daya alam di suatu wilayah yang dimanfaatkan melalui berbagai macam kegiatan sektoral dapat memberikan kontribusi yang nyata pada perekonomian wilayah. Sumbangan pendapatan sektor kegiatan yang berbasis pada sumber daya alam di berbagai daerah mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mampu memicu perkembangan wilayah. Dengan demikian, daya dukung sumber daya alam menentukan terhadap perkembangan ekonomi wilayah.

Daya dukung suatu wilayah berkaitan erat dengan kondisi dan kemampuan ekosistem. Kondisi ekosistem suatu wilayah menentukan terhadap ketersediaan sumber daya lingkungan. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya lingkungan tersebut berpengaruh terhadap variasi aktivitas ekonomi suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya lingkungan oleh

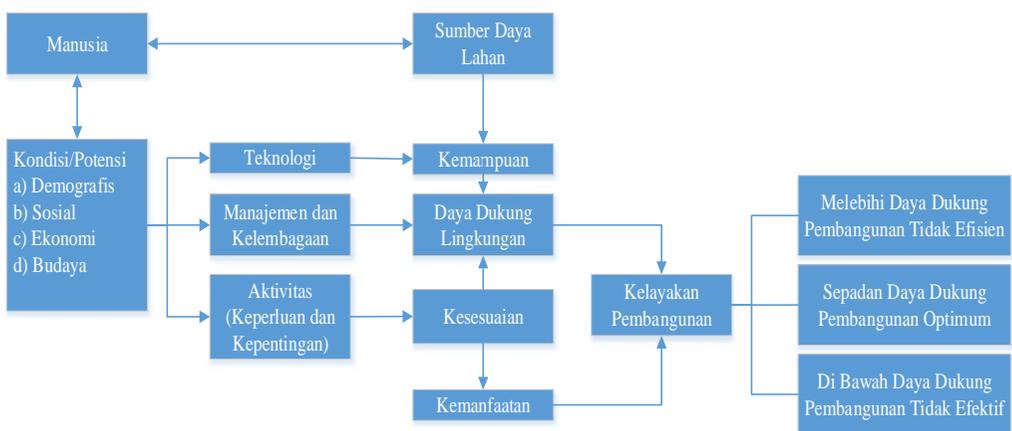
berbagai aktivitas ekonomi pada gilirannya akan memengaruhi kapasitas menghasilkan barang produksi yang tentunya berpengaruh terhadap daya dukung wilayah. Meskipun demikian, di samping dipengaruhi oleh kapasitas ekosistem, daya dukung wilayah juga dipengaruhi oleh perubahan struktur produksi dan konsumsi, serta pemanfaatan teknologi.

Selain penopang pembangunan, aspek lingkungan pada suatu wilayah juga merupakan faktor pembatas pembangunan. Setiap wilayah mempunyai kondisi lingkungan dan sumber daya yang terbatas dalam mendukung kehidupan penduduk dalam segala aktivitasnya. Dengan demikian, suatu wilayah mempunyai daya dukung tertentu dalam menampung perkembangan yang terjadi. Namun di sisi lain, perkembangan di suatu wilayah akan terus meningkat, baik akibat pengaruh faktor eksternal maupun faktor internal wilayah. Perkembangan tersebut akan sangat berpotensi melebihi daya dukung lingkungannya sehingga berpeluang terjadinya degradasi lingkungan dan sumber daya (*negative impacts of development*) yang akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi degradasi lingkungan dan sumber daya, sangat diperlukan upaya mengarahkan perkembangan suatu wilayah agar sesuai dengan daya dukung wilayahnya.

Agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud, dibutuhkan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial yang harus berjalan harmonis. Sebuah sistem ekonomi berkelanjutan harus mampu memproduksi dan menyediakan basis berkelanjutan untuk mencegah adanya ketidakseimbangan, baik di sektor pertanian maupun industri. Sementara itu, sistem ekologi berkesinambungan harus mampu mempertahankan stabilitas sumber daya dan mencegah eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup, sedangkan sistem sosial berkelanjutan akan meningkatkan keadilan dalam hal distribusi dan kesempatan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam implementasinya, pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk kemaslahatan manusia dalam batas daya dukung yang mampu disediakan sumber daya tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilihat kelayakan pembangunan sebagai dasar evaluasi. Kajian kelayakan pembangunan perlu didasarkan atas daya dukung dan kemanfaatannya. Imbangan tingkat pemanfaatan sumber daya (lahan) dan daya dukung dapat dijadikan ukuran kelayakan setiap program dan perencanaan pembangunan. Sumber daya dimanfaatkan secara layak apabila daya dukung dimanfaatkan sepenuhnya (optimum). Apabila daya dukung yang tersedia tidak dimanfaatkan secara penuh, maka pembangunan tidak efektif. Sebaliknya, apabila pemanfaatan sumber daya melampaui daya dukungnya, maka pembangunan menjadi tidak efektif dan cenderung akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan sehingga akan berpengaruh pada

keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, penilaian daya dukung suatu wilayah menjadi sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan wilayah. Proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang tidak bijaksana akan membawa penurunan daya dukung wilayah dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun demikian, daya dukung suatu wilayah dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan manajemen serta penguatan kelembagaan. Keberlanjutan pembangunan sangat ditentukan oleh proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang mampu memanfaatkan dan menjaga daya dukung wilayah. Uraian tersebut dapat disajikan dalam diagram seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber:

Gambar 4.14 Hubungan Kemampuan Sumber Daya Lahan, Daya Dukung, Kesesuaian, Kemanfaatan dan Kelayakan Pembangunan

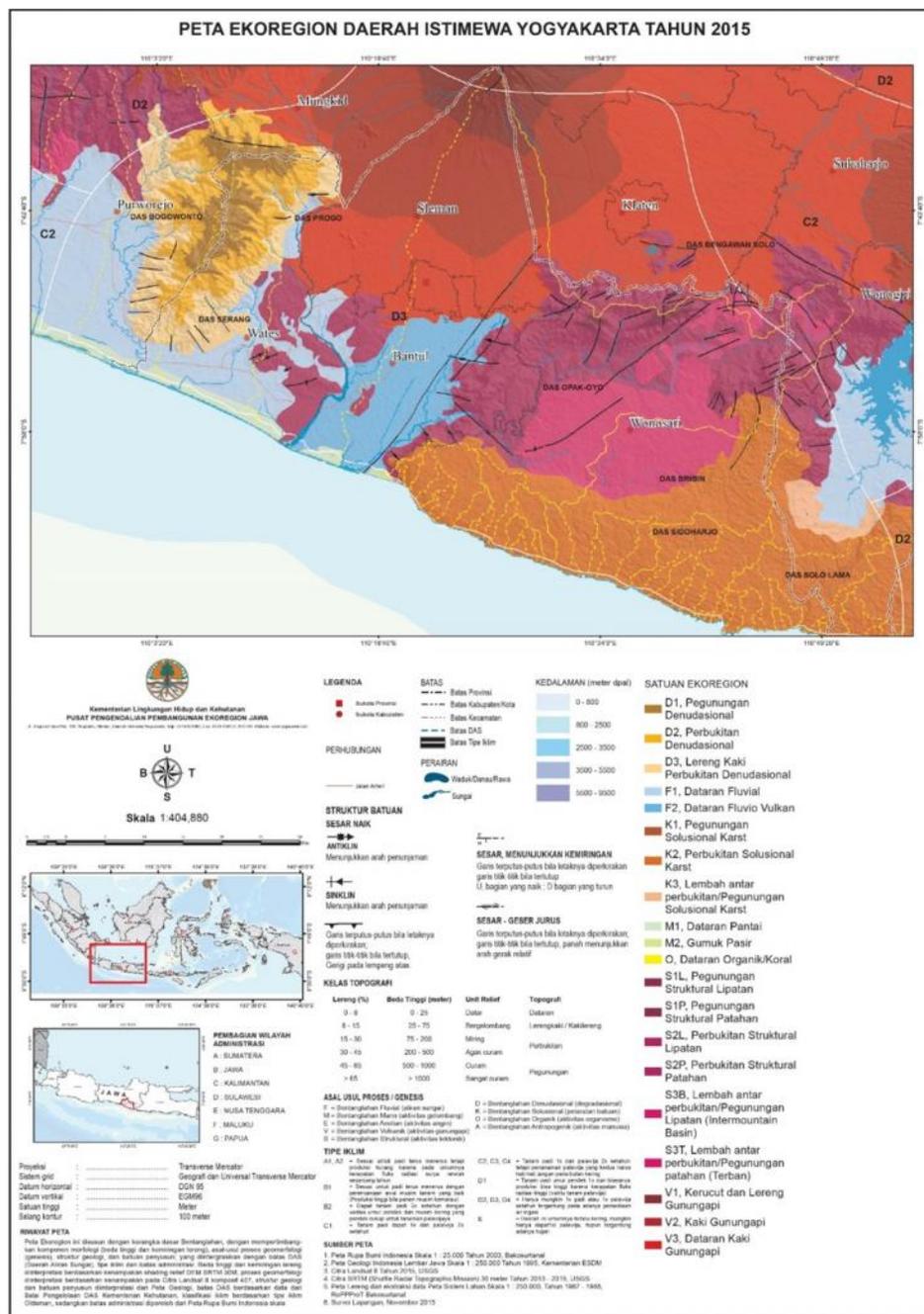
Secara fisik, wilayah DIY mempunyai karakteristik yang beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi fisiografi yang bervariasi. Fisiografi Gunung Merapi terdiri dari Lereng Merapi Atas, Lereng Merapi Tengah, dan Lereng Merapi Bawah yang terletak di bagian utara membentang hingga bagian selatan dengan susunan material dari endapan aktivitas Gunung Api Merapi. Pada wilayah Lereng Merapi Atas yang mempunyai kemiringan lereng yang tinggi sebagian merupakan kawasan hutan lindung dan daerah resapan air. Sementara itu, wilayah Lereng Merapi Tengah banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman, tetapi bersifat terbatas karena faktor kemiringan lereng dan sebagian masih merupakan daerah resapan air.

Kondisi yang berbeda terlihat pada wilayah Lereng Merapi Bawah yang topografinya relatif lebih datar. Pada wilayah ini terdapat kawasan perkotaan Yogyakarta yang meliputi wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Dominasi lahan terbangun dan berkembangnya berbagai kegiatan menjadi ciri utama kawasan perkotaan Yogyakarta. Pada bagian selatan terdapat dataran aluvial yang mempunyai topografi datar-hampir datar sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian. Satuan fisiografi lain yang terdapat di bagian barat wilayah DIY berupa Perbukitan Menoreh atau Pegunungan Kulon Progo. Satuan fisiografi ini batas bagian timurnya adalah Lambah Progo dan bagian selatan dibatasi oleh dataran aluvial pantai. Wilayah ini mempunyai lereng curam-sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Daerah yang berada pada kawasan Pegunungan Kulon Progo ini umumnya digunakan sebagai kebun campuran, sawah, tegalan, dan permukiman. Di bagian sebelah timur Perbukitan Menoreh terdapat Dataran Progo yang merupakan dataran fluvial yang mempunyai karakteristik lahan yang subur dan sangat cocok untuk pengembangan kawasan pertanian lahan basah. Kawasan pertanian juga cocok dikembangkan di wilayah Dataran Aluvial Pantai. Penyebaran satuan dataran aluvial ini memanjang dari barat ke timur yang meliputi Kecamatan Panjatan, Temon, Wates, Galur, dan sebagian daerah Lendah. Daerah dataran aluvial ini relatif landai sehingga sebagian besar digunakan sebagai lahan persawahan dan permukiman penduduk. Di antara Dataran Progo dan Dataran Aluvial Pantai terdapat satuan fisiografi Perbukitan Sentolo. Formasi Sentolo terdiri atas batugamping, batupasir napalan, konglomerat, napa tufan dengan sisipan tuf gelasan pada bagian bawahnya dengan ketebalan 350 meter. Perbukitan Sentolo ini memiliki ketinggian berkisar 50-150 meter di atas permukaan laut dengan besar rerata kelerengan 15%. Dengan kondisi tersebut, penggunaan lahan tegalan mendominasi di wilayah Perbukitan Sentolo. Pada bagian selatan DIY terdapat pula satuan fisiografi Gumuk Pasir Pantai yang membentang dari wilayah Kabupaten Kulon Progo ke arah timur (Kabupaten Bantul) dan berbatasan dengan satuan fisiografi Gunung Sewu. Keberadaan Gumuk Pasir di pantai selatan tidak lepas dari pengaruh aktivitas Gunung Merapi, Sungai Opak, dan Sungai Progo. Partikel pasir yang membentuk gumuk pasir berasal dari material vulkanis Gunung Merapi yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan Sungai Progo. Keberadaan gumuk pasir merupakan fenomena yang unik sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan.

Sementara itu di bagian tenggara terdapat satuan fisiografi Dataran Tinggi Gunungkidul. Bagian utara satuan fisiografi ini dibatasi oleh Perbukitan Batur Agung dengan garis terjal dan memanjang. Bagian tengah merupakan Ledok Wonosari dengan topografi datar bergelombang dan pada bagian selatan merupakan perbukitan karst yang disebut Gunung Sewu. Satuan fisiografi ini merupakan bentang alam yang terbentuk dari

hasil proses solusional (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup sangat jarang. Lereng perbukitan karst tersebut curam dan sebagian merupakan lahan kritis.

Gambaran variasi kondisi fisiografi tersebut mencerminkan pula keragaman potensi sumber daya alam. Keberagaman potensi sumber daya alam di DIY tentunya akan sangat menentukan terhadap kapasitas wilayah sehingga berpengaruh pula terhadap variasi daya dukung wilayah. Secara spasial, variasi kondisi lingkungan fisik sebaran satuan ekoregion di wilayah DIY dapat dilihat pada gambar berikut.



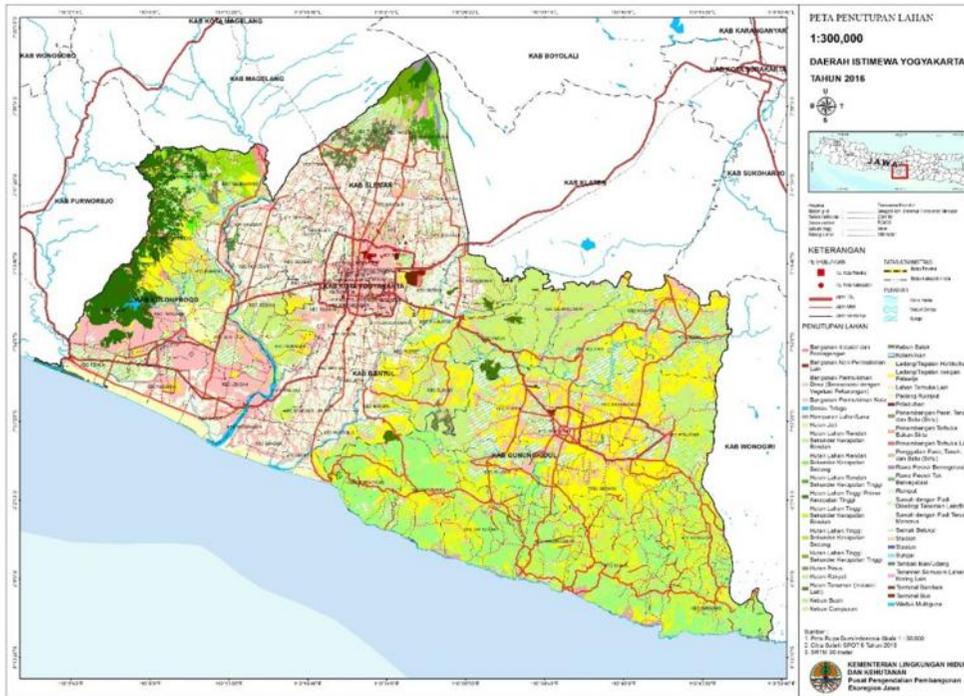
Sumber:

Gambar 4.15 Peta Ekoregion DIY

Wilayah DIY telah mengalami perkembangan pada berbagai aspek. Salah satu wujud perkembangan tersebut tercermin dari penggunaan lahannya. Penggunaan lahan di DIY menunjukkan adanya variasi. Variasi penggunaan lahan tersebut merupakan dampak dari berkembangnya berbagai kegiatan dan keragaman kondisi lingkungan fisik. Kondisi penggunaan lahan yang ada juga mencerminkan kapasitas suatu wilayah. Setiap bentuk penggunaan lahan mempunyai kemampuan mendukung fungsi dan memenuhi kebutuhan tertentu. Penggunaan lahan merupakan perwujudan aspek kemampuan ekologi dalam menyediakan sumber daya sesuai dengan potensi dan keterbatasan yang ada. Dengan demikian, penggunaan lahan pada suatu wilayah juga menggambarkan daya dukung wilayah yang bersangkutan.

Penggunaan lahan secara umum merupakan turunan penutup lahan yang sudah didefinisikan fungsinya. Distribusi penutup lahan dapat dilihat pada Peta Penutup Lahan DIY seperti yang tersaji pada gambar dibawah. Penggunaan lahan di Wilayah DIY secara umum menunjukkan adanya keragaman. Luasan yang cukup dominan terlihat pada bentuk penggunaan lahan untuk pertanian yang berupa lahan sawah beririgasi, sawah tadah hujan, dan tegalan. Sawah tadah hujan banyak ditemui di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo terutama pada wilayah dataran aluvial, sedangkan sawah tadah hujan banyak terdapat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang didominasi satuan fisiografi perbukitan karst. Keberadaan lahan pertanian terutama sawah sangat memberikan dukungan bagi pemenuhan kebutuhan pangan penduduk DIY.

Selain lahan pertanian, bentuk penggunaan lahan yang cukup dominan adalah lahan untuk permukiman. Lahan permukiman di wilayah DIY terutama terdapat di wilayah perkotaan dan di sekitar koridor jalan utama. Pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama di wilayah pinggiran kota, menyebabkan kebutuhan lahan untuk permukiman juga tinggi dan terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan kebutuhan permukiman yang tinggi terutama terjadi di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul sebagai dampak urbanisasi spasial dari kawasan perkotaan Yogyakarta. Lahan permukiman yang cukup luas dan terus mengalami perkembangan akan berdampak pada semakin menurunnya biokapasitas (daya dukung sumber daya lahan). Terlebih lagi jika dikaitkan dengan keberadaan lahan pertanian yang terus mengalami konversi oleh lahan permukiman semakin menurunkan kemampuan wilayah dalam penyediaan pangan. Dampak lain dari perkembangan lahan permukiman adalah semakin menurunnya ketersediaan air akibat semakin luasnya lahan terbangun terutama di daerah resapan air.



Sumber:

Gambar 4.16 Peta Penutup Lahan DIY Tahun 2016

Penggunaan lahan yang berupa hutan di wilayah DIY luasannya semakin terbatas. Lahan hutan yang masih tersisa hanya terdapat di wilayah Kabupaten Sleman bagian utara (lereng Gunung Merapi) dan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Luasan hutan yang sudah sangat terbatas tersebut sangat berpengaruh terhadap biokapasitas dan kemampuan menyerap CO₂ serta kemampuan meresap air sehingga berakibat terhadap daya dukung bioekologi, daya dukung udara, dan daya dukung sumber daya air.

Daya dukung wilayah dan keberlanjutan pembangunan dibatasi oleh adanya bahaya alami akibat keragaman kondisi lingkungan fisik. Sebagian wilayah DIY mempunyai bahaya alami yang cukup beragam. Wilayah yang mempunyai bahaya alami tersebut antara lain pada daerah gunung api aktif, yaitu pada kerucut Gunung Api Merapi yang ditandai adanya akumulasi langsung dari material hasil aktivitas gunung api secara periodik. Selain itu, aktivitas Gunung Api Merapi juga berdampak pada bahaya alami sekunder berupa banjir lahan di sepanjang sungai utama sebagai media aliran lahar yang melintasi lereng kaki gunung api hingga dataran gunung api, seperti di sepanjang Sungai Code dan Sungai Opak.

Wilayah DIY juga mempunyai daerah bahaya longsor lahan dan erosi linier, yaitu pada sebagian besar perbukitan jalur Batur Agung dan Pegunungan Kulon Progo. Sementara itu berkaitan dengan bahaya erosi, wilayah pegunungan kapur (Gunung Sewu) di zona selatan merupakan daerah bahaya erosi berat, sedangkan pada daerah perbukitan monoklinal pada Formasi Sentolo terdapat daerah bahaya erosi sedang. Wilayah DIY juga terdapat daerah rawan banjir, yaitu di sepanjang dataran rendah bagian selatan dari Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Bahaya alami lain yang cukup berdampak dan sering terjadi adalah bencana gempa bumi. Wilayah yang paling berpotensi mengalami dampak akibat gempa bumi adalah Kabupaten Bantul. Bahaya alami juga terdapat di wilayah pesisir akibat adanya tsunami. Adanya berbagai bahaya alami tersebut tentu saja akan sangat membatasi kapasitas dan daya dukung wilayah serta akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan di wilayah DIY.

Tabel 4.4 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW DIY Tahun 2009-2029

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
										Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2010	2011	2012	2013	2014			2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI												
<i>Perwujudan Sistem Perkotaan Provinsi</i>												
A. Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kota-kotadi Provinsi D.I. Yogyakarta												
1. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) sebagai PKN (Herarki/Pusat pelayanan Nasional)	Peta system perkotaan Prov. DIY						APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem. Kab, Dep. PU, Depdagri				
- Perencanaan, Legislasi, Sosialisasi KPY		3 Paket	■	■						■	■	■
- Dokumen, Legislasi, Sosialisasi Peraturan Zonasi KPY		3 Paket	■	■	■							
- Perencanaan, Legislasi, Sosialisasi Kawasan Cagar Budaya & Pariwisata		21 Paket	■	■	■	■						
- Pemantapan & Pengembangan KPY						■						
2. Revitalisasi dan Pengembangan Ibu Kota Kabupaten sebagai PKW (Herarkhi II/Pusat Pelayanan Regional)												
- PKW Bantul		1 Paket	■	■	■	■			■	■	■	■
- PKW Sleman		1 Paket	■	■	■	■			■	■	■	■
- PKWp (promosi) Wates		1 Paket	■	■	■	■			■	■	■	■
- PKWp (promosi)		1 Paket	■	■	■	■			■	■	■	■

RKPD Tahun 2018

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II 2015 - 2019	Tahap III 2020 - 2024	Tahap IV 2025 - 2029
Wonosari												
B. Mendorong Pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan wilayah												
1. Mendorong Pengembangan Ibu Kota Kecamatan sebagai PKL (Herarkhi III/Pusat-pusat pelayanan)	Peta Sistem perkotaan Prov. DIY						APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem. Kab, Dep. PU, Depdagri				
2. Mendorong Pengembangan Ibu Kota Kecamatan (Herarki IV/ pusat-pusat pertumbuhan)												
<i>Perwujudan Sistem Transportasi Provinsi</i>												
A. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan												
1. Pemantapan jaringan jalan arteri primer	Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY	168,81 km					APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem Kab, Dep. PU, Pem.Prov				
2. Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan kolektor primer		690,25 km										
3. Pembangunan jalan bebas hambatan (TOL)		104 km										
4. Pengembangan jaringan jalan pantai selatan Jawa (Pansela)		117,599 km										
B. Perwujudan Sistem Jaringan Jalur Kereta Api												
1. Pemantapan Jaringan Jalur KA yang sudah ada (timur barat)	Peta sistem jaringan prasarana						APBD, APBN, Investasi	Pem Kab, Dep. PU, Pem.Prov				

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029							
2. Pengembangan Jaringan Jalur KA Yogyakarta- Borobudur (utara)	wilayah Prov DIY	47 km						swasta dan/ atau kerjasama pendanaan				
3. Pengembangan Jaringan Jalur KA Yogyakarta-Parangtritis (selatan)		15 km										
C. Perwujudan Bandar Udara												
1. Pengembangan Bandara Adisutjipto menjadi Bandara pusat penyebaran sekunder	Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY	1 Paket						APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem Kab, Dep. PU, Pem.Prov			
2. Pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan		1 Paket										
3. Persiapan Pengembangan Bandara Baru		1 Paket										
D. Perwujudan Pelabuhan Laut												
1. Pengembangan Pelabuhan Sadeng Kabupaten Gunungkidul menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai	Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY	1 Paket						APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephub, Depbudpar			
2. Pengembangan Pelabuhan Glagah Kabupaten Kulonprogo menjadi Pelabuhan Perikanan		1 Paket										
E. Perwujudan Terminal dan Stasiun												
1. Pemantapan Terminal tipe A Kota Yogyakarta	Peta sistem jaringan	1 Paket						APBD, APBN,	Pem. Prov, Pem Kab,			

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029							
2. Pemantapan Terminal Kabupaten Gunungkidul menjadi terminal tipe A	prasarana wilayah Prov DIY	1 Paket						Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dep. PU, Dephub			
3. Pengembangan Terminal Kabupaten Kulonprogo menjadi terminal tipe A		1 Paket										
4. Pengembangan Terminal Terminal Kabupaten Bantul menjadi terminal tipe B		1 Paket										
5. Pengembangan Terminal Kabupaten Sleman menjadi terminal tipe B		1 Paket										
6. Pengembangan Terminal Angkutan Barang		1 Paket										
<i>Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya</i>												
A. Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi												
1. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Sumber Air*)	Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY	1 Paket						APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Deptan			
2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi *)		1 Paket										
3. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai *)		1 Paket										
4. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku*)		1 Paket										

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2015 - 2019			2020 - 2024				2025 - 2029		
B. Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi												
1. Pembangunan dan pengelolaan air tanah berwawasan konservasi								APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dep. ESDM			
C. Program Pengembangan Jaringan Energi *)												
1. Pengembangan jaringan Listrik	Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY							APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dep. ESDM			
2. Pengembangan Energi Terbarukan												
3. Pengembangan Bahan Bakar												
D. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi *)												
1. Kerjasama Informasi dengan Massmedia	Peta system jaringan prasarana wilayah Prov DIY							APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Depkominf o			
2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Mediamassa												
PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI												
<i>Perwujudan Kawasan Lindung Nasional dan Provinsi</i>												
A. Pengukuhan kawasan lindung	Kawasan lindung	4 Paket						APBD, APBN, , investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Kementrian kehutanan , Dishutbun			
B. Rehabilitasi dan konservasi lahan kawasan lindung	Kawasan lindung							APBD, APBN,	Pem prov, Kementria			

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029							
								investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	n kehutanan, Dishutbun			
1. Pemantapan Fungsi Lindung Bawahan	Kawasan Lindung Bawahan	5 Paket						APBD, APBN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Kementrian kehutanan, Dishutbun			
2. Pemantapan Fungsi Lindung Setempat	Kawasan Lindung Setempat	4 Paket						APBD, APBN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Kementrian kehutanan, Dishutbun			
C. Pengendalian kawasan lindung	Kawasan lindung	3 Paket						APBD, APBN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Kementrian kehutanan, Dishutbun			
D. Pengembangan partisipasi masyarakat	Kawasan lindung	2 Paket						APBD, APBN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Kementrian kehutanan, Dishutbun			
E. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kawasan lindung	3 Paket						APBD, APBN,	Pem prov, Kementrian			

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II	Tahap III	Tahap IV
										2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029
								investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	n kehutanan , Dishutbun			
F. Pengembangan pola insentif dan disinsentif	Kawasan lindung	3 Paket						APBD, APBN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Pem Kab.			
G. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi												
1. Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)	Kawasan TNGM	4 paket						APBD, APBN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Pem Kab, Kementerian an kehutanan , Dishutbun			
2. Suaka Margasatwa (SM)	kawasan SM	4 paket						APBD, APBN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Kementerian an kehutanan , Dishutbun			
3. Taman Hutan Raya (Tahura)	kawasan Tahura	4 paket						APBD, APBN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Pem Kab Kementerian an kehutanan , Dishutbun			
4. Taman Wisata Alam (TWA)	Kawasan TWA	4 paket						APBD, APBN, investasi swasta,	Pem prov, Kementerian an kehutanan			

RKPD Tahun 2018

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II 2015 - 2019	Tahap III 2020 - 2024	Tahap IV 2025 - 2029
								dan/atau kerjasama pendanaan	, Dishutbun			
5. Terumbu Karang	Wedi Ombo	4 paket						APBD, APBN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Pem Kab. Kementerian Kehutanan, Dishutbun			
6. Taman Wisata Candi Prambanan dan Ratu Boko	Prambanan	2 Paket						APBD, APBN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Pem prov, Pem Kab. Depbudpar, Disbud			
7. Kawasan Cagar Budaya												
<i>Perwujudan Kawasan Budidaya</i>												
1. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Pertanian												
a. Pemantapan Pengelolaan KPH	Peta Kawasan Budidaya Prov DIY	1 Paket						APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephut, Dishutbun, Dinas			
b. Pengembangan DEM Plot pertanian organik dan pertanian terpadu		1 Paket										

RKPD Tahun 2018

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2015 - 2019			2020 - 2024				2025 - 2029		
								Pertanian, Deptan				
2. Pengembangandan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi												
a. Program pembinaan dan penertiban Industri Hasil Hutan	Kawasan hutan produksi	3 Paket						Pem prov, Kementerian kehutanan, Dishutbun				
b. Program pemantapan kawasan hutan dan pengembangan perusahaan hutan	Kawasan hutan produksi	6 Paket						Pem prov, Kementerian kehutanan, Dishutbun				
c. Program pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan	Kawasan hutan produksi	8 Paket						Pem prov, Kementerian kehutanan, Dishutbun				
d. Program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Kawasan hutan produksi	4 Paket						Pem prov, Pem kab, Kementerian kehutanan, Dishutbun				
e. Program penguatan keamanan dan perlindungan hutan	Kawasan hutan produksi	8 Paket						Pem prov, Pem kab, Kementerian kehutanan, Dishutbun				
3. Pengelolaan Kawasan												

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan			
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
			2015 - 2019			2020 - 2024				2025 - 2029			
Peruntukan Pertambangan													
a. Pengelolaan ,pembinaan dan pengawasan pertambangan		31 Paket							Pem. Prov, Kementrian ESDM				
4. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan pariwisata													
a. Pengembangan kualitas dan kuantitas ODTW DIY sebagai destinasi utama di Indonesia.	Peta Kawasan Budidaya Prov DIY	1 Paket						APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dep.pariwisata				
b. Pengembangan kualitas dan kuantitas ODTW DIY sebagai destinasi unggulan di Indonesia.													
c. Pengembangan kualitas dan kuantitas ODTW DIY sebagai destinasi terkemuka di Asia Tenggara													
d. Pemantapan/mempertahankan kuantitas ODTW DIY sebagai destinasi terkemuka di Asia Tenggara													
e. Pengembangan Kawasan Depok Kab. Bantul sebagai Wisata Pantai dan Kuliner Ikan			Peta Kawasan Budidaya Prov DIY	1 Paket								APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama	Pem Kab, DPUP-ESDM, Deplautkan, Dislautkan

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II 2015 - 2019	Tahap III 2020 - 2024	Tahap IV 2025 - 2029
								pendanaan	, Depbudpar , Dispar			
f. Pengembangan Fasilitas Museum		1 Paket							Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephutbu n, Depbudpar Disbud			
g. Pengembangan Desa/ Kantong Budaya		1 Paket										
5. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Permukiman												
1. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta								APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Depdagri, Depardag			
2. Revitalisasi dan Pengembangan Kota Bantul, Sleman, Wates, Wonosari (Ibu Kota Kabupaten, Herarkhi II)												
3. Revitalisasi dan Pengembangan Kota (Ibu Kota Kecamatan, herarkhi III)												
4. Revitalisasi dan Pengembangan Kota (Ibu Kota Kecamatan, herarkhi IV)												
6. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri												
Pengembangan Kawasan Industri Sentolo, Piyungan dan sentra industri	Peta Kawasan Budidaya Prov DIY	3 Paket						APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau	Pem Kab, Dep PU, DPUP- ESDM, Depperind			

RKPD Tahun 2018

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II 2015 - 2019	Tahap III 2020 - 2024	Tahap IV 2025 - 2029
								kerjasama pendanaan	agkop, Disperinda gkop, Balai Kulit			
7. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi												
	Peta Kawasan Budaya Prov DIY							APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Depdiknas			
8. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil												
a. Penghijauan Kawasan Pesisir	Peta Kawasan Budaya Prov DIY							APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephutbu n, Depkanla			
<i>Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi</i>												
A. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Pertahanan Keamanan												
1. Rehabilitasi								APBD,	Pem. Prov,			

RKPD Tahun 2018

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II 2015 - 2019	Tahap III 2020 - 2024	Tahap IV 2025 - 2029
/Revitalisasi kawasan								APBN	Pem Kab, Dep. PU, Dephankam			
2. Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan												
B. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi												
1. Rehabilitasi /Revitalisasi kawasan	Peta Kawasan Strategis Prov DIY							APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephub			
2. Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan												
C. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Sosial Budaya												
1. Rehabilitasi /Revitalisasi kawasan	Peta Kawasan Strategis Prov DIY							APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Depbudpar			
2. Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan												
D. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Ilmu Pengetahuan												
1. Pengembangan/Peningkatan	Peta							APBD,	Pem Prov,			

Nama Program	Lokasi	Besaran	Periode Pelaksanaan Tahap I					Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan		
			2010	2011	2012	2013	2014			Tahap II	Tahap III	Tahap IV
										2015 - 2019	2020 - 2024	2025 - 2029
katan kualitas kawasan	Kawasan Strategis Prov DIY							APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem Kab, Dep PU, Dephub, KLH, BLH			
E. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Lindung dan Budaya												
1. Rehabilitasi /Revitalisasi kawasan	Peta Kawasan Strategis Prov DIY							APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephutbun, Deptamben,			
2. Pengembangan/Peningkatan katan kualitas kawasan												
F. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut												
1. Pengembangan/Peningkatan katan kualitas kawasan (Sadeng, Baron, Karang Wuni, Glagah)	Peta Kawasan Strategis Prov DIY	3 Paket						APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephub, Deplautkan			

Sumber : RTRW DIY Tahun 2009-2029 (Perda DIY 2/2010)

4.3.6 Tindak Lanjut Pembangunan *New Yogyakarta International Airport*, Kulon Progo



Sumber: @starjogja, 2017

Gambar 4.17 Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur DIY, dan Menteri terkait melaksanakan “Babat Alas Nawung Krida” yang mengawali Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (2017)

Babak awal Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Temon, Kulon Progo dimulai pada tahun 2017 dengan upacara “*Babat Alas Nawung Krida*” pada hari Jum’at 27 Januari 2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta jajarannya. Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY dibangun di atas lahan seluas 587 hektar yang dibangun 2 tahap. Tahap 1 pembangunan bandara tersebut meliputi terminal dengan luas 130 ribu meter persegi, *runway* sepanjang 3.250 meter dengan lebar 60 meter, apron berkapasitas 35 pesawat, dengan estimasi mampu menampung 15 juta penumpang per tahunnya.

Bandara tersebut nantinya diharapkan dapat mengatasi kekurangan di Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta, meningkatkan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, serta memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan dalam hal ini Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya. Pembangunan Bandara tersebut merupakan upaya dalam mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya masuk sebagai salah satu dari 10 prioritas nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Infrastruktur Pendukung untuk merespon Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* sebagai *Airport City-Aerotropolis*. Infrastruktur pendukung tersebut antara lain :

- a. Jaringan Kereta Api (dari Prambanan-Tugu ke Bandara Baru beserta reaktivasi stasiun-stasiun kereta; reaktivasi stasiun kereta api Yogyakarta ke Borobudur),
- b. Transit antar moda (TOD).
- c. Jalur jalan lintas selatan (JJLS; termasuk Jembatan Kretek 2 dan Jembatan Kelok 18 yang perlu direspon lebih lanjut).
- d. *Jogja Outer Ringroad* (JORR).
- e. SPAM Regional (4 area)
- f. Penyediaan Jaringan Listrik (Rencana Penambahan Gardu Listrik, 150-20kv)

Selain itu, respon Pembangunan Bandara Baru sebagai Kawasan Prioritas dapat mendukung Pengembangan Destinasi Wisata untuk:

- a. Kawasan Menoreh
- b. Kawasan Samas Parangtritis
- c. Kawasan Perkotaan Yogyakarta
- d. Kawasan Prambanan-Candi Ijo
- e. Kawasan Nglanggeran
- f. Pantai Selatan Gunungkidul
- g. Kawasan Bandara dan Sekitarnya
- h. TOD Kedundang-Sentolo-Pathukan-Kalasan

Kawasan Peruntukan Industri yang dapat ditunjang dengan keberadaan Bandara Baru *New Yogyakarta International Airport* antara lain:

- a. Kawasan Peruntukan Industri Temon
- b. Kawasan Peruntukan Industri Sentolo
- c. Kawasan Industri Sentolo
- d. Kawasan Peruntukan Industri Sedayu

- e. Kawasan Peruntukan Industri Pajangan
- f. Kawasan Industri Piyungan

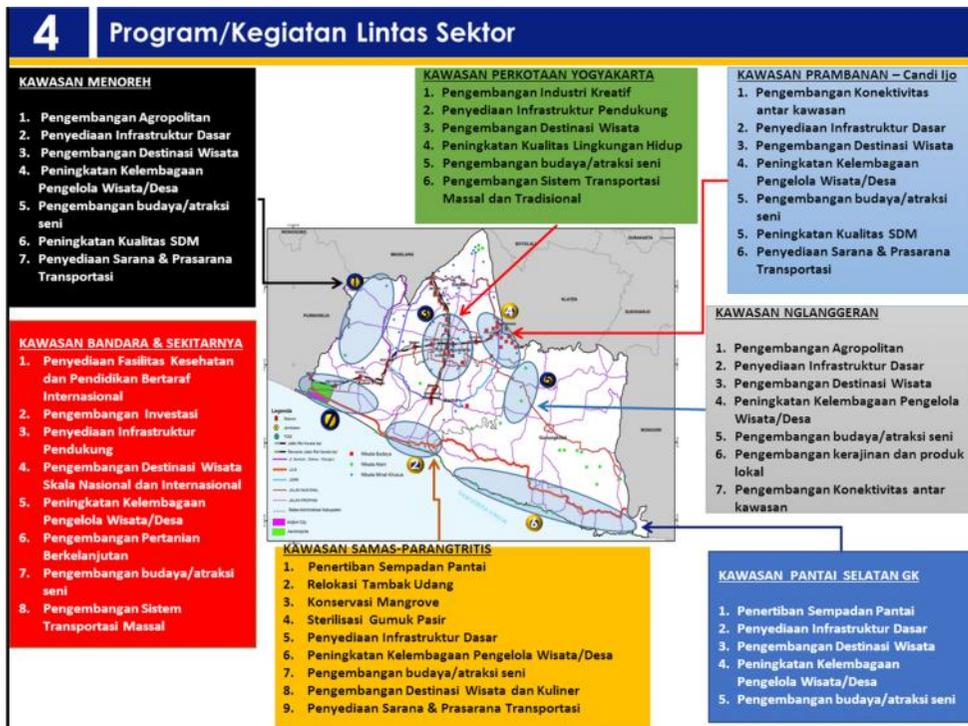
Respon tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk program/ kegiatan lintas sektor berbasis kawasan yang dilaksanakan secara kolektif oleh seluruh SKPD Pemda DIY dengan membentuk jejaring bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, Sektor Swasta, dan Masyarakat Sipil.

Program/ Kegiatan lintas sektor berbasis kawasan dalam rapat koordinasi ini masih bersifat makro sehingga perlu direspon dengan serius oleh seluruh SKPD. Terlebih lagi, tahun 2018 adalah tahun yang penting bagi Pemda DIY dalam rangka penyusunan RKPD 2018. RKPD 2018 adalah dokumen perencanaan pada tahun pertama dari RPJMD 2017-2022 sehingga perlu merespon hal-hal yang afirmatif terhadap desain makro program/kegiatan lintas sektor tersebut secara serius. Diharapkan desain program/kegiatan lintas sektor tersebut komprehensif, detail, operasional dan membuka diri bagi masukan dari berbagai pihak (akademisi, asosiasi perusahaan (ASITA, Kadin), dan stakeholder terkait) serta kerangka pendanaan yang berasal dari investasi.

Investasi di DIY tidak hanya berfokus pada investasi belanja modal dari APBD tetapi harus membuka diri dengan investasi swasta dengan skema *Public Private Partnership* atau Kerjasama Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana arahan dari Presiden terkait Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018 sebagai Tahun Investasi untuk infrastruktur, .

Pemda DIY dan seluruh jajarannya perlu merespon dan menyikapi agenda penting Pasca Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* dengan kemauan untuk bekerja lebih keras, tidak hanya “*mekaten mawon sampun saged*” (begini saja sudah cukup), bersikap kompetitif memberikan pelayanan terbaik, berwawasan global, menggunakan standar kerja dan produk kelas internasional, terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk memperkaya sudut pandang terhadap permasalahan publik, serta memperbaiki pola manajemen dan koordinasi.

Program/ kegiatan integratif lintas sektor yang memungkinkan untuk diinisiasi pada tahun 2018 dapat berbasis kawasan sebagaimana tergambar sebagai berikut,



Gambar 4.18 Program/ Kegiatan Lintas Sektor Merespon Pembangunan Bandara Baru *New Yogyakarta International Airport*

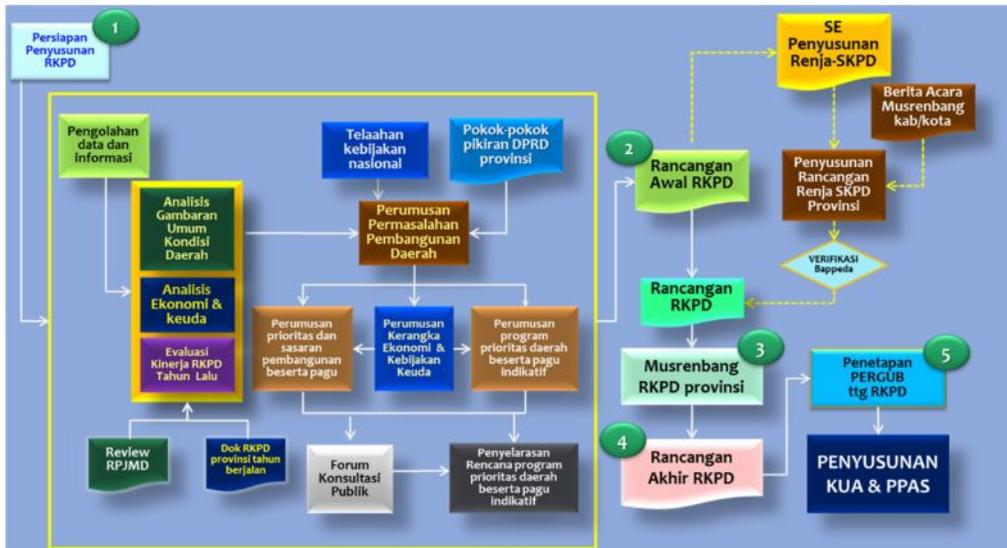
4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pasal 5 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Lebih lanjut didalam pasal 5 ayat (3) juga dijabarkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2018 merupakan masa transisi dari RPJMD 2012-2017 dan RPJMD 2017-2018 sehingga penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan RKP yang dalam

prosesnya memperhatikan salah satunya adalah pokok-pokok pikiran DPRD DIY. Pokok-pokok pikiran DPRD DIY tersebut disusun sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 107 ayat (1) bahwa perumusan rancangan awal RKPD untuk provinsi mencakup (pada huruf f) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut didalam kerangka penyusunan Rancangan Awal RKPD menjadi bahan pertimbangan perumusan permasalahan pembangunan daerah.

Pertimbangan lebih lanjut dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2018 Pokok-pokok Pikiran DPRD yang berisi sejumlah rekomendasi kebijakan arahan strategis pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Gubernur, karena dapat berpengaruh terhadap mekanisme penyusunan dokumen-dokumen turunan berikutnya. Pokok-pokok Pikiran DPRD tidak akan memiliki fungsi yang baik dan optimal apabila penyampaiannya kepada gubernur terlambat walaupun penyusunan materinya dapat dilakukan dengan baik dan benar.



Gambar 4.19 Skema Perencanaan Pembangunan Menurut Permendagri 54 Tahun 2010

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi acuan dalam penyusunan draf Rancangan Awal RKPD.

4.4.1 Tujuan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dari sudut pandang DPRD dapat disampaikan bahwa tujuan dari pokok-pokok pikiran DPRD DIY dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018 adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun dokumen awal draf RKPD 2018;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2018;
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran tahun 2018;
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan melalui akomodir dalam fungsi representasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara komprehensif;

4.4.2 Permasalahan Pembangunan DIY dari Sudut Pandang DPRD

Menurut pandangan DPRD DIY dalam mewujudkan pembangunan setiap tahunnya untuk menuju visi jangka panjang di DI. Yogyakarta tentu saja menyimpan sejumlah persoalan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan relasi sosial kemasyarakatan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah angka kemiskinan yang terus berkurang dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, pemerataan pembangunan mencapai keseimbangan bagi kawasan-kawasan tertinggal. Lebih lanjut terdapat beberapa pandangan DPRD terhadap permasalahan pembangunan Tahun 2018, meliputi :

1. Pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan (Bidang Pemerintahan, Ketertiban, Ketentraman umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pertanahan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal, Statistik, Persandian, Perpustakaan, Kearsipan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pelaksanaan Otonomi Khusus, Penanganan

Bencana) mempunyai ruang lingkup yang luas dan membutuhkan beberapa penanganan khusus terhadap Bidang Urusan Pemerintahan. Isu mengenai *good governance* atau tata pemerintahan yang baik terus menjadi persoalan utama. Di DI. Yogyakarta, penguatan agenda tata pemerintahan yang baik dengan mendorong pembangunan struktur pemerintahan disertai penegakan nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta menjadi agenda penting yang terus di dorong. Perbaikan struktur pemerintahan

Tahun 2018 adalah tahun pertama masa jabatan Gubernur DI. Yogyakarta periode 2017-2022. Pengisian jabatan gubernur DI. Yogyakarta termasuk salah satu urusan keistimewaan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI. Yogyakarta yang di lakukan dengan system penetapan. Diharapkan dengan keistimewaan tersebut kondisi wilayah DI. Yogyakarta memiliki stabilitas politik yang dapat mendukung bagi perekonomian, khususnya terhadap masuknya arus investasi di DIY.

Pengaturan keistimewaan D.I. Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Kewenangan D.I. Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah D.I. Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang di tetapkan berdasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan keistimewaan D.I. Yogyakarta itu adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur D.I. Yogyakarta, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Undang-undang mengamatkan bahwa untuk penjabaran lebih lanjut kewenangan keistimewaan tersebut dibentuk Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Yogyakarta.

Hal yang juga perlu di tegaskan kembali dalam dokumen pokok-pokok pikiran DPRD ini adalah masalah Dana Otonomi Khusus atau sering di sebut Dana Keistimewaan (danais) yang jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat. Selama ini kemanfaatan danais terus mendapatkan perhatian DPRD di sebabkan serapan program dan kegiatan belum maksimal.

Kritik muncul dari pengelolaan program dan kegiatan dana Keistimewaan Yogyakarta adalah program dan kegiatan masih bersifat pada infrastruktur budaya yang dikembangkan, bukan pada substansi atau nilai-nilai pengembangan kebudayaan itu sendiri. Kritik lain yang muncul

adalah mengenai sejumlah arah dan orientasi implementasi program dan kegiatan dalam pengelolaan dana Keistimewaan Yogyakarta. berbagai stakeholders terus mendorong upaya-upaya program dan kegiatan yang bersumber pada Keistimewaan Yogyakarta untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya mengatasi berbagai kemiskinan melalui isu-isu pengembangan program kebudayaan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Sedangkan dari aspek perencanaan DPRD tetap berupaya untuk dapat terlibat mengingat selama ini danais menjadi bagian tak terpisahkan dari APBD DIY setiap tahunnya.

Terkait dengan lima urusan keistimewaan, sampai dengan tahun 2016 baru ada dua kewenangan yang sudah dibentuk Perdas Yogyakarta. Perdas tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, serta perdas kelembagaan. Perdas kebudayaan masih dalam tahapan proses pembahasan oleh DPRD D.I. Yogyakarta. Dua perdas lainnya, pertanahan mulai dibahas di akhir tahun 2016. Dan perdas tata ruang dibahas di tahun 2017. Tahapan selanjutnya pada tahun 2018 adalah tahapan sosialisasi di masyarakat dan tahapan implementasi. Terhadap perdas pertanahan dan perdas tata ruang perlu dilakukan sosialisasi yang luas ke masyarakat agar pelaksanaannya sesuai output yang diharapkan.

Khusus di bidang kebijakan pertanahan, DI. Yogyakarta perlu menata kembali kebijakan pertanahan. Kebijakan pertanahan yang menyangkut kasultanan Yogyakarta dan kadipaten Paku Alaman menjadi isu yang mencuat. Keputusan penting tidak hanya pada arah kebijakan daerah mengenai status tanah kasultanan dan kadipaten, akan tetapi menyangkut persoalan penataannya dan bangunan informasi yang luas dengan sistem informasi akurat untuk diketahui secara umum oleh seluruh lapisan masyarakat DI. Yogyakarta. Ketegasan pemerintah daerah DI. Yogyakarta untuk membangun sistem pengelolaan pertanahan menjadi penting karena menyangkut kepentingan pemerintah, kepentingan umum, dan kebijakan daerah menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah DI. Yogyakarta.

Isu yang lain dalam bidang pemerintahan adalah mendorong pemerataan pembangunan DI. Yogyakarta dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, penyelesaian kasus-kasus sosial masyarakat, konflik sosial, hingga ketertiban masyarakat dengan sejumlah permasalahannya seperti pencegahan isu SARA dan kekerasan anak muda. Sejumlah program lainnya adalah penguatan aparatur pemerintah daerah, penguatan bidang informasi, hingga sosialisasi kebijakan perlu diperkuat kembali. Pengamanan dokumen pemerintah dengan memperkuat pola-pola persandian, akurasi data-data melalui penguatan statistik daerah, hingga pada memperkuat minat baca masyarakat melalui pembangunan berbagai perpustakaan di desa-desa merupakan investasi penguatan dan

pemberdayaan pemerintah dan masyarakat. Sejumlah agenda-agenda penting tersebut harus menjadi agenda kebijakan pembangunan DI. Yogyakarta tahun 2018.

2. Ekonomi dan Keuangan

Persoalan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi satu masalah tersendiri ketika gagasan pembangunan menjadikan program-program tersebut tidak terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Menjadikan program pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial menjadi penting karena mempunyai aspek-aspek peningkatan kesejahteraan secara langsung dan menjadikan perubahan profil ekonomi masyarakat. Sesuai dengan persoalan yang muncul dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah beberapa sektor yang dominan menjadi mata pencaharian hidup masyarakat. Beberapa sektor tersebut seperti pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengembangan ekonomi usaha kecil dan beberapa persoalan pengembangan ekonomi lainnya.

Di Yogyakarta, angka pengangguran cukup tinggi seperti ditunjukkan data sebelumnya yang didominasi oleh lulusan SLTA. Oleh karena itu, kebutuhan penguatan program dalam bidang ekonomi perlu ditingkatkan untuk penyerapan tenaga kerja secara simultan. Tentu saja bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan sektor UKM lainnya menjadi prioritas pengembangan dalam APBD 2018.

DPRD melihat relevansi kebutuhan pengembangan ekonomi tersebut masih signifikan, khususnya sektor-sektor yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang mempunyai fungsi lain perlindungan terhadap Sumber Daya Alam. Arah kebijakan bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial bisa dilakukan dengan cara membangun sumber daya manusia agar lebih berpengetahuan, terampil dan mampu. Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018.

Perubahan skema kebijakan dalam meningkatkan modal ekonomi masyarakat dalam bentuk bantuan hibah sosial maupun melalui skema program dan kegiatan lainnya perlu mendapatkan perhatian mengingat kebutuhan untuk mempertahankan status kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin tetap menjadi prioritas utama. Sisi lain yang harus diperhatikan adalah mengurangi angka kemiskinan dan mempertahankan status non miskin dalam berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan.

Pada sektor pendapatan daerah, DI. Yogyakarta sangat mengandalkan sektor pariwisata. Konteks ini sesuai dengan visi pembangunan DI. Yogyakarta, dimana DI. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata yang diandalkan di kawasan Asia Tenggara. Data terakhir

menunjukkan bahwa jumlah pengunjung wisata di D.I. Yogyakarta sudah mencapai target yang dicanangkan. Meskipun demikian, dalam pencapaian target yang dicanangkan masih belum seimbang. Persoalan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara belum signifikan dengan target rata-rata wisatawan tinggal di Yogyakarta.

Pengembangan fasilitas infrastruktur pendukung wisatawan memang cukup berlebih jika ditinjau dari sisi jumlah ketersediaan hotel sebagai tempat tinggal wisatawan. Pemerintah DI. Yogyakarta perlu mengkaji ulang kembali pertumbuhan hotel di Yogyakarta agar tidak menimbulkan monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bisnis pariwisata. Ketersediaan hotel sebagai tempat tinggal wisatawan berbanding terbalik dengan aksesibilitas infrastruktur, khususnya persoalan jalan raya sebagai akses kunjungan sering mengalami kemacetan. Bahkan kasus kemacetan tersebut menjadi makin meningkat dari tahun ke tahun.

Pengembangan wisata dengan arah tujuan destinasi wisata pedesaan atau pengembangan wisata desa mengalami kemajuan pesat atas dasar partisipasi warga desa. Beberapa tahun teralhir, layanan wisata pedesaan cukup meningkat dengan bertambahnya obyek wisata desa. Dukungan pemerintah daerah DI. Yogyakarta masih belum optimal terhadap pengembangan destinasi wisata desa. Pemerintah daerah DI. Yogyakarta perlu masih miskin inovasi dan program wisata desa membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah daerah. Misalnya, pengembangan homestay maupun fasilitas wisata lainnya.

Pemerintah daerah perlu mendorong proses pengembangan destinasi wisata di D.I. Yogyakarta dengan bertepatan wisata berbasis kearifan lokal Yogyakarta. Pengembangan wisata dengan tema lain perlu juga dikembangkan, seperti wisata sejarah, pendidikan dan lainnya.

3. Pembangunan

Pembangunan di D.I. Yogyakarta cukup maju dengan ditandai pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dengan angka IPM 77,59 yang dicapai pada tahun 2015. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya memberikan sumbangan pada pengurangan angka kemiskinan pada penduduk D.I. Yogyakarta yang berjumlah 3.514.762 pada tahun 2012. Kondisi kenaikan IPM pada angka 76.75 pada tahun 2012 tersebut ternyata tidak linier dengan angka kemiskinan. Meskipun turun, angka kemiskinan tetap tingi di atas ratarata angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 adalah 535,180 dengan pendapatan minimum rata-rata Rp 303,843/bulan. Dengan angka kemiskinan tinggi, pemerintah daerah D.I. Yogyakarta seharusnya melakukan banyak evaluasi mengenai capaian-capaian pembangunan dalam tiap tahun atau pembangunan jangka pendek. Sedangkan dalam jangka menengah, maka perlu diperhentikan mengenai pencapaian visi pembangunan jangka menengah yang perlu mendapatkan koreksi lebih lanjut. Harapan masyarakat kedepan, dengan bergulirnya berbagai

program-program pembangunan, maka secara logis terjadi peningkatan IPM dan berujung pada pengurangan Tahun Kota Desa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2012 Maret 2013 September 2013 0,58 0,50 0,52 1,10 0,63 0,34 Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2017. Oleh karena itu, harapan yang bisa dilakukan adalah melakukan koreksi atas pencapaian visi-misi pembangunan, khususnya jangka menengah yang memprioritaskan pada program-program yang lebih *pro poor*, *pro growth* dan *pro job* tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal Yogyakarta.

Kemajuan pembangunan di DI. Yogyakarta cukup pesat, khususnya infrastruktur perkotaan yang menjadi kebutuhan. Persoalan infrastruktur tentu saja mencuat dengan perubahan konsep “*Among Tani, Dagang Layar*” yang dikembangkan dan menempatkan kawasan Selatan menjadi halaman depan Yogyakarta. Dengan berubahnya konsep pembangunan tersebut, maka titik berat tentu saja dilakukan pengembangan kawasan Selatan dengan fokus pembangunan infrastruktur dalam skema Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah dengan desain baru. Fokus pembangunan tersebut tidak hanya pada titik fokus pada sentra kawasan “*ADIKARTA*” sebagai kawasan utama, akan tetapi menyangkut area terdampak sekitarnya. Konsep “*AERO CITY*” tidak hanya pada daerah utama, akan tetapi juga mengembangkan kawasan terjauh sebagai bentuk pemerataan pembangunan infrastruktur.

Persoalan pembangunan di Yogyakarta tidak hanya fokus pada isu pembangunan kawasan selatan-selatan. Persoalan disparitas ekonomi, sosial dan infrastruktur pembangunan kawasan pedesaan menjadi fokus utama isu pembangunan antar kawasan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur bagi kawasan-kawasan pertumbuhan lambat. Pemerintah harus memberikan porsi seimbang dalam pembangunan infrastruktur, bahkan lebih kepada kelompok rentan yang bisa setiap saat terjerumus dalam kelompok miskin.

Infrastruktur yang diperhatikan lainnya adalah pengembangan jalan dengan persoalan kepadatan lalu lintas. Di D.I. Yogyakarta, jumlah panjang dan lebar jalan cenderung lamban bertambah dibandingkan dengan jumlah penambahan kendaraan bermotor. Kepadatan lalu lintas menjadi isu utama yang harus di respon untuk memperlancar aktivitas masyarakat maupun memperlancar laju ekonomi masyarakat.

Isu lainnya adalah mengenai peran pemerintah daerah D.I. Yogyakarta dalam mendorong kebijakan bantuan infrastruktur kepada pemerintah Kabupaten, kota dan desa. Perkembangan bantuan infrastruktur perlu di respon mengingat desa sudah mempunyai ADD yang memadai dari pemerintah pusat untuk program desa membangun. Secara lebih rinci, Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta perlu merumuskan

pembantuan infrastruktur untuk kawasan pedesaan dalam bentuk lainnya dengan isu menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan.

4. Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan dan kesehatan penting untuk mendukung capaian visi DIY 2025 yakni “Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi pusat pendidikan, budaya dan tujuan wisata dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera”. Untuk menjadi DI. Yogyakarta yang maju, berkarakter, berbudaya, mandiri dan sejahtera hanya bisa di raih melalui pendidikan dan kesehatan yang berhasil.

Target di tahun 2018 pelaksanaan pendidikan wajib belajar bisa terpenuhi 12 tahun. Kebijakan pendidikan harus diperkuat dengan tidak adanya anak putus sekolah. Artinya angka lama pendidikan rata-rata 9,6 tahun harus naik sebesar 12 tahun atau tidak ada anak-anak pelajar di DI. Yogyakarta putus sekolah. Untuk itu program pemberian beasiswa bagi siswa keluarga miskin dan kurang mampu perlu di tingkatkan.

Demikian pula dalam urusan kesehatan komitmen untuk mewujudkan seluruh warga DIY memiliki jaminan kesehatan juga perlu di tegaskan kembali. Berdasar pokok-pokok pikiran DPRD sebelumnya (2015-2017) DPRD telah menyampaikan aspirasi agar program jaminan kesehatan bagi seluruh warga DIY (*total coverage*) dapat di wujudkan di tahun 2017. Namun sampai dengan akhir 2016 nampaknya target tersebut masih belum dapat di capai dengan berbagai alasan dan kendala.

Beberapa kendala yang ada seperti belum tersedianya data kependudukan yang valid untuk menghindari tumpang tindih kepesertaan masih dalam penyelesaian. Selain itu masih ada kendala belum di lakukannya integrasi berbagai program jaminan kesehatan yang ada baik milik kabupaten maupun jamkesos yang ada di provinsi juga masih menjadi catatan DPRD. Jamkesos yang di kelola DIY memiliki peran penting untuk membantu masyarakat yang kategori kurang mampu, namun belum memiliki jaminan kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai di nikmati rakyat telah dirasakan manfaatnya. Program JKN di kelola operasionalnya oleh BPJS dan telah berlaku secara nasional. Namun dalam evaluasi pelaksanaan JKN oleh BPJS ditemukan masih banyak kendala dilapangan. Prosedur kepesertaan yang rumit dan berat karena harus satu keluarga bagi peserta mandiri, juga di temukan pelayanan yang masih kurang.

Bidang kesejahteraan rakyat juga melihat beberapa persoalan di sektor ketenagakerjaan. Persoalan ketersediaan lapangan kerja masih menjadi masalah utama, dimana jumlah angka pengangguran terus meningkat sepanjang tahun. Dominasi angka pengangguran oleh lulusan setingkat SLTA dan SMK terus naik dan mendominasi. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), jumlah penduduk yang bekerja di DIY tahun 2015 sebanyak 1.891.218 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.971.463 orang. Angka pengangguran di DI. Yogyakarta

pada tahun 2015 naik sebesar 12.827 orang dibanding tahun sebelumnya. Angka pengangguran mengalami kenaikan yang didominasi oleh angkatan kerja baru dengan lulusan setingkat SLTA sejumlah 43.557 orang dan lulusan diploma dan sarjana sebanyak 15.933 orang. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4.07 % pada tahun 2015. Sedangkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) DI. Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 64.80.

Angka pengangguran yang didominasi oleh lulusan SLTA menunjukkan bahwa pemerintah daerah DI. Yogyakarta masih perlu fokus pada model pendidikan keterampilan khusus bagi lulusan SLTA. Pendalaman program keterampilan dan fasilitas training hendaknya ditingkatkan sebagai kesiapan angkatan kerja baru.

Pemerintah daerah DI. Yogyakarta perlu membangun skema investasi untuk meningkatkan serapan kerja, khususnya skema investasi padat karya.

4.4.3 Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Berkaitan dengan pemahaman DPRD DIY terhadap permasalahan pembangunan Tahun 2018 terdapat beberapa usulan pokok-pokok pikiran pada RKPD Tahun 2018, meliputi

1. Dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, DPRD menyarankan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di bidang pendapatan daerah dengan: Pencermatan semua potensi sumber Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kelompok Lain-Lain Pendapatan Yang sah, Intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan Daerah, dan Menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Kebijakan pengolaam belanja daerah, DPRD menyarankan agar belanja daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan nyata dan bersinegris dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah.
3. Pada Bidang Pemerintahan, agar memprioritaskan pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib, sebagai berikut:
 - a. Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - b. Tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar adalah: pertanahan; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; komunikasi dan

informatika; penanaman modal; statistik; persandian, perpustakaan; dan kearsipan.

- c. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
 - d. Pelaksanaan Otonomi Khusus
4. Pada Bidang Ekonomi, perlu adanya mengembangkan ekonomi produktif, terutama dengan pengembangan usaha kecil dengan memberikan kemudahan akses perijinan dan permodalan usaha
 5. Dibidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kekuatan cadangan pangan, penguatan produksi non beras, pemanfaatan lahan non produktif, dan pengolahan produksi pasca panen
 6. Dibidang pariwisata, aksesibilitas wisatawan terhadap lokasi wisata harus lebih ditingkatkan, sehingga tidak timbul kemacetan diberbagai tempat.
 7. Pada Bidang Pembangunan, Infrastruktur Pekerjaan Umum harus berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu kawasan, sehingga harus disediakan infrastruktur yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ekonomi yang merata dan sejahtera.
 8. Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dilakukan dengan peningkatan kecerdasan, keterampilan dan karakter warga DIY yang dibarengi dengan kondisi jasmani dan rohani yang sehat.
 9. Dibidang pendidikan, DPRD terus mendorong untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun dalam rangka meningkatkan angka melek huruf masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menekan angka siswa putus sekolah.
 10. Dibidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong untuk meningkatkan kualitas calon tenaga terampil, dengan cara pemberian sarana dan prasarana yang memadahi, serta dengan melakukan pelatihan-pelatihan di tempat kerja secara langsung.
 11. Dibidang kesehatan, DPRD terus mendorong adanya program jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi semua warga DIY dan kemudahan akses terhadap penyediaan dan penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut.

Berkaitan dengan skema pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan DPRD dalam kerangka mendukung perencanaan pembangunan Tahun 2018 ke depan, beberapa hal tersebut diatas ditelaah lebih lanjut sebagai masukan perencanaan pembangunan Tahun 2018.

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Upaya pencapaian tema pembangunan tahun 2018 dilaksanakan melalui skema tematik pembangunan yang di dukung lintas Sektor, lintas Perangkat Daerah dan lintas Kabupaten/ Kota. Skema upaya Pencapaian Tema Pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5.1 Skema Pencapaian Tema Pembangunan melalui Tematik Pembangunan Tahun 2018

5.1.1 Kebijakan Mengatasi Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang diukur melalui Indeks Williamson, dimana suatu daerah dikatakan memiliki ketimpangan yang rendah jika nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35. Ketimpangan dengan taraf sedang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson antara 0,35 hingga 0,5. Sedangkan daerah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan

antar wilayah yang tinggi. Trend Indeks Williamson DIY selama ini berada pada kisaran 0,4 yang mengindikasikan ketimpangan DIY pada kondisi sedang. Namun kondisi tersebut harus diturunkan agar ketimpangan antar wilayah tidak semakin melebar.

Faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah di DIY adalah kapasitas transformasi ekonomi yang dimiliki suatu daerah yang terdiri dari komponen Tingkat Pendidikan, Jumlah UMKM, dan Rasio Non Primer terhadap Primer.⁶

Ketimpangan antar wilayah disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu dipecahkan melalui beberapa alternatif solusi. Misalnya perbedaan kondisi demografis dan sumber daya alam yang ada pada masing-masing wilayah, salah satu alternative solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menggali potensi sesuai kearifan lokal masing-masing daerah yang dapat memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lain. Skema kebijakan dalam penurunan ketimpangan wilayah dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Faktor Penyebab

- Perbedaan kandungan sumber daya alam
- Perbedaan kondisi demografis
- Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
- Konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu
- Alokasi dana pembangunan antar wilayah tidak tepat
- Investasi yang padat modal
- Pertambahan penduduk yang tinggi
- Ketidak merataan pembangunan antar daerah
- Bencana alam

Alternatif Solusi



Gambar 5.2 Skema Kebijakan Penurunan Ketimpangan Wilayah Tahun 2018

⁶ Berdasarkan analisis RWD Pramono dan Nariswati Nastity (KBK Perencanaan Wilayah-PWK UGM) yang disampaikan pada Forum Tematik Ketimpangan Wilayah Musrenbang Tahun 2017.

Kebijakan penurunan ketimpangan wilayah tersebut akan dijadikan acuan dalam merumuskan program kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan ketimpangan antar wilayah di DIY.

5.1.2 Kebijakan Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Tingkat Kemiskinan di DIY yang masih berada di atas rata-rata nasional yaitu pada angka 13.10 persen di tahun 2016 menjadi isu pembangunan yang harus segera ditangani. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun pada kisaran 2 persen. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut harus dibarengi pula dengan penurunan ketimpangan pendapatan dikarenakan salah satu faktor penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan adalah terbatasnya penduduk miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan dimana peningkatan produksi pada perekonomian di dalam negeri bersifat padat modal dan skill labour, akibatnya kesempatan penduduk miskin yang tidak memiliki kapasitas modal dan unskill labour di dalam memperoleh penghasilan yang layak terbatas.

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara memenuhi kriteria suatu penduduk berada di atas garis kemiskinan yaitu melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendekatan daya beli. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan peningkatan kecukupan kebutuhan dasar penduduk miskin, dan peningkatan sinergi antar lembaga. Peningkatan daya beli masyarakat dilakukan dengan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapabilitas penduduk miskin untuk memampukan dirinya sendiri, dan peningkatan akses penduduk miskin pada lembaga ekonomi dan keuangan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penurunan kemiskinan belum dapat optimal dikarenakan masih adanya kekurang tepatan sasaran, koordinasi antar program yang belum selaras, pemenuhan kebutuhan layanan dasar yang belum efektif, dan belum optimalnya sinergi penanganan kemiskinan lintas sektor. DIY memiliki 15 Kecamatan Prioritas Penurunan Kemiskinan yang tersebar di 3 Kabupaten, dan untuk tahun 2018 ini akan lebih difokuskan di 3 kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu: Kokap, Gedangsari, dan Saptosari.

Arah kebijakan penurunan kemiskinan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

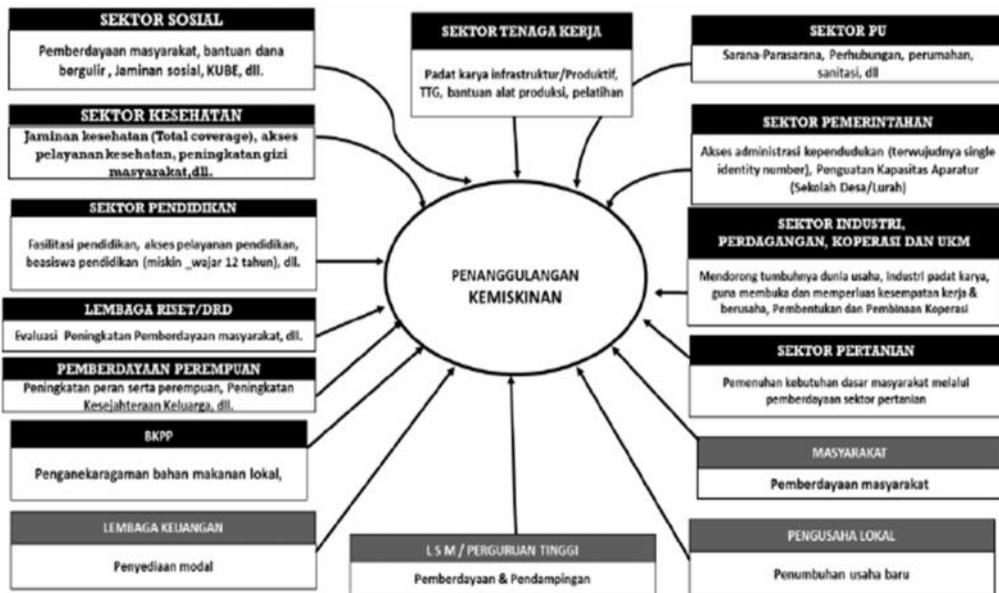
1. Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
2. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.
3. Meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM dan koperasi.

4. Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan.
5. Inovasi regulasi kebijakan yang mampu menyentuh akar permasalahan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut dapat dirumuskan fokus prioritas penurunan kemiskinan, yaitu:

1. Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif
2. Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan
3. Peningkatan ketersediaan akses dan aset penghidupan bagi penduduk miskin serta penguatan kapasitas/keterampilan penduduk miskin dan rentan
4. Peningkatan peran UMKM dan koperasi dalam penanggulangan kemiskinan

Fokus prioritas tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan lokasi-lokasi prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara lintas sektor.



Gambar 5.3 Skema Penanggulangan Kemiskinan Lintas Sektor

5.1.3 Kebijakan Mengantisipasi Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)

Bandara Baru Yogyakarta yang terletak di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yang telah diresmikan pembangunannya oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada bulan Januari 2017 dan direncanakan dapat dioperasikan pada tahun 2019. Target waktu pengoperasian Bandara yang cukup singkat maka di Tahun 2018 perlu dipersiapkan Infrastruktur

penunjang utama. Pembangunan Bandara baru ini juga harus ditangkap sebagai peluang untuk dapat meningkatkan aktifitas perekonomian. Beberapa peluang yang harus ditangkap tersebut terkait dengan manfaat yang akan diperoleh ketika Bandara baru dibangun, yaitu:

1. Mengakselerasi terwujudnya Visi DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2025;
2. Membuka transaksi perdagangan, wisata, dan investasi menuju peradaban baru abad ke 21;
3. Meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan;
4. Membuka lapangan usaha dan lapangan kerja baru;
5. Mempercepat lalu lintas penumpang, barang, dan jasa;
6. Meningkatkan pendapatan daerah.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan bandara baru tersebut, perlu dipersiapkan pengembangan kawasan pendukung bandara dengan menjadikan kota wates sebagai pusat pelayanan kawasan wilayah dimana jarak bandara dengan kota wates lebih dekat daripada jarak bandara dengan kota Yogyakarta. Selanjutnya adalah membangun infrastruktur transportasi dengan standar kualitas dan layanan yang tinggi yang dapat menghubungkan bandara dengan destinasi yang ada di seluruh DIY.

Sesuai dengan arahan Gubernur, kebijakan yang diambil pada Tahun 2018 adalah mempersiapkan infrastruktur penunjang utama bandara, yaitu:

1. Pembangunan Akses Kereta Api yang dapat menghubungkan Bandara dengan jalur kereta api yang sudah ada;
2. Pembangunan Gardu Induk Listrik baru dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik Bandara;
3. Pengembangan simpul-simpul transportasi (Pembukaan/ pengembangan stasiun, pembuatan Transit Oriented Development, dan Pengembangan Terminal/ Angkutan Barang.)

Infrastruktur tersebut tidak hanya digarap oleh Pemda DIY tapi juga melibatkan Instansi Pemerintah lain seperti PT. KAI, PT. PLN, Kemen PU Pera, dan juga sektor swasta.



Gambar 5.4 Skema Prioritas Persiapan Bandara Baru NYIA Tahun 2018

5.1.4 Kebijakan Pembiayaan Pembangunan

Kebijakan Pembiayaan Pembangunan diambil dalam rangka mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang mungkin dilaksanakan dalam rangka mempercepat pembangunan di DIY. Postur APBD DIY selama ini menunjukkan kinerja fluktuatif. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang sebagian besar disumbang oleh pajak dari tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 diperkirakan akan mengalami penurunan, sehingga kemampuan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah juga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru atau dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber yang sudah ada.

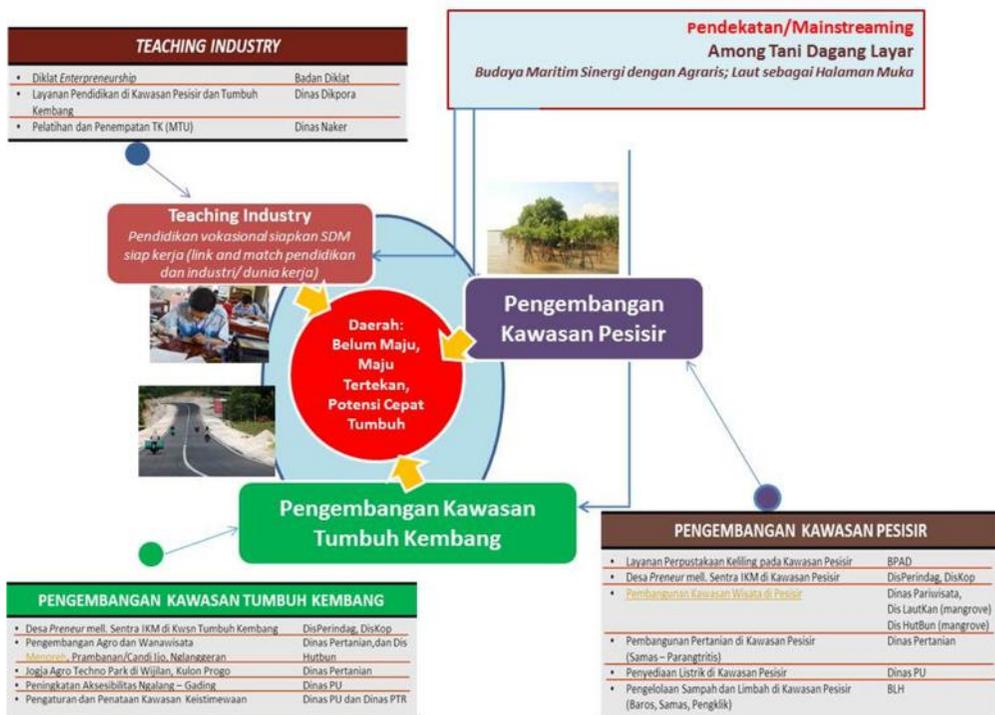
Untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat maka perlu meningkatkan pembiayaan untuk mendorong belanja modal yang dapat memberikan timbal balik bagi peningkatan pendapatan daerah. Selama ini sumber pembiayaan terbesar berasal dari SiLPA, namun semakin tahun jumlahnya semakin menurun sehingga perlu digali sumber-sumber pembiayaan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Belanja untuk peningkatan pertumbuhan dapat dibiayai dengan; optimalisasi SiLPA,

penggunaan dana cadangan, pinjaman perbankan, penerbitan obligasi daerah, pemberdayaan BUMD, kerjasama dengan BUMN, Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Mendorong Program Private Public Patnership (PPP), dan Membentuk Regional Investor Relation Unit (RIRU).

5.1.5 Kebijakan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial

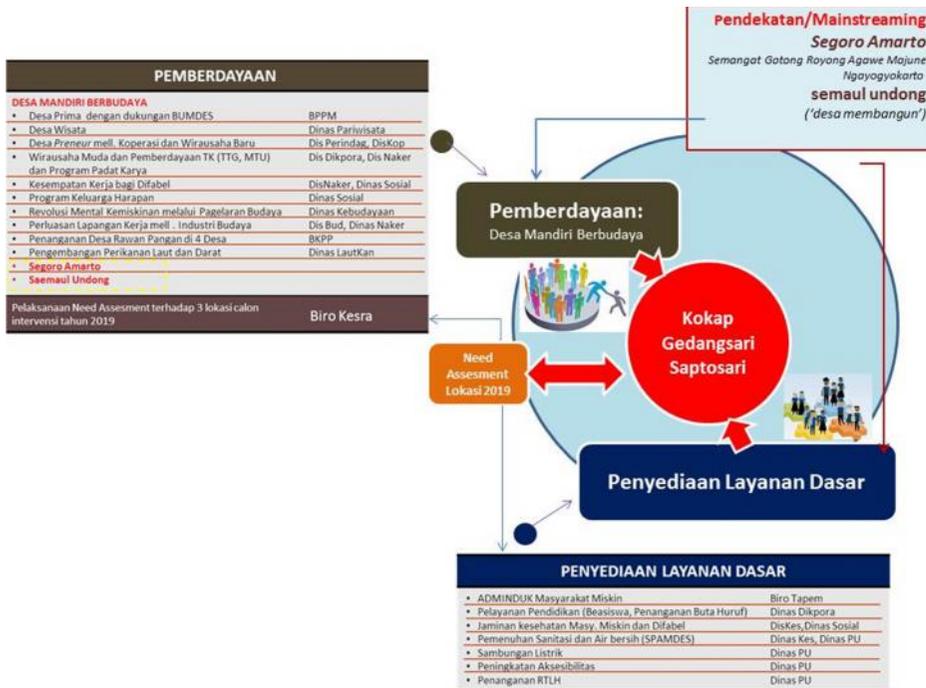
Arah kebijakan pembangunan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial disusun dengan berdasarkan pada sasaran pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2018, yaitu penurunan ketimpangan wilayah, penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pembangunan bandara NYIA, dan pembiayaan pembangunan.

Pendekatan pembangunan DIY “Among Tani Dagang Layar” yang mempunyai arti budaya maritim sinergi dengan agraris; laut sebagai halaman muka adalah untuk mendukung program pemerintah pusat. Upaya pemerintah yang dapat dilakukan meliputi pengembangan kawasan pesisir, pengembangan kawasan tumbuh kembang, serta *teaching industry* pada daerah belum maju, maju tertekan dan daerah potensi cepat tumbuh.



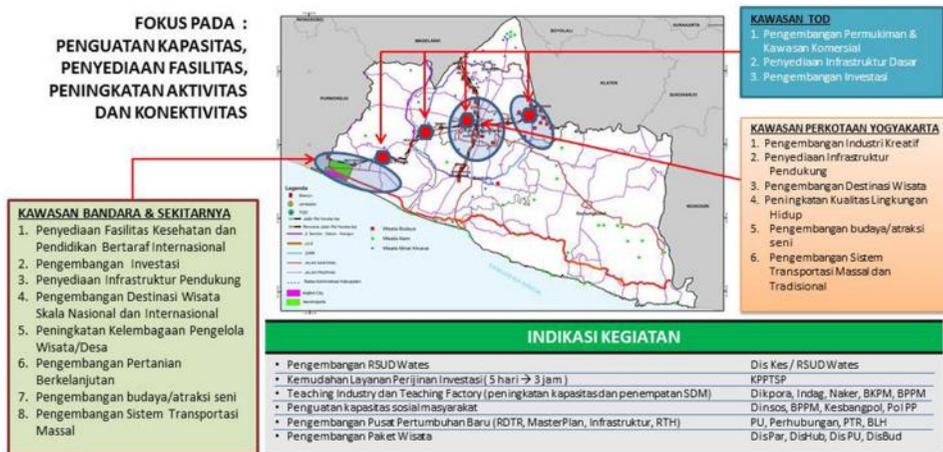
Gambar 5.5 Skema Pendekatan Pembangunan DIY “Among Tani Dagang Layar”

Di dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat, pemberdayaan merupakan hal pokok penting untuk keberhasilan pembangunan. Pemerintah dalam hal ini menggunakan pendekatan “Segoro Amarto” (Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta); dan *Saemaul Undong* (Desa membangun) dengan menciptakan desa mandiri berbudaya. Pendekatan ini yang melibatkan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat dengan prinsip kemandirian, kepedulian social, gotong royong, dan kedisiplinan. Daerah yang menjadi prioritas pemberdayaan desa mandiri berbudaya meliputi Kokap, Gedangsari, dan Saptosari. Pemerintah melakukan upaya pembangunan tersebut dengan penyediaan layanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi wewenang masing-masing SKPD terkait.



Gambar 5.6 Skema Pendekatan “Segoro Amarto”

Dalam mendukung adanya bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), Pemerintah DIY melakukan upaya pembangunan dengan fokus pembangunan pada penguatan kapasitas, penyediaan fasilitas, peningkatan aktivitas dan konektivitas yang terkonsentrasi dalam 3 lokasi pembangunan yaitu; kawasan TOD, kawasan perkotaan Yogyakarta, dan kawasan bandara dan sekitarnya. Pembiayaan pembangunan terkait NYIA juga didukung dengan APBD kabupaten/kota di DIY.



Gambar 5.7 Alokasi Pembangunan Guna Mendukung NYIA

Pembangunan DIY dalam pembiayaan tematik kemiskinan, persentase target APBD Sleman lebih banyak dibanding APBD lainnya. Begitu pula dengan tematik ketimpangan wilayah APBD Sleman persentasenya masih cukup banyak dibanding APBD lain. Dana APBD dari kabupaten/kota ada yang menjadi satu dengan induk program yang sama dengan program pemerintah provinsi, sedangkan APBD selain itu diampu langsung oleh SKPD kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kemiskinan

Prov DIY :
168.061,21 (23,17%)

- BKPP 250
- Dinas Kelautan dan Perikanan 1017,5
- Dinas Perindag 1690
- Dinas Koperasi 880
- Dinas Pertanian 3260
- Dinas Sosial 2264
- Dinas Kesehatan 1036
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 32774,71
- Dinas PUP ESDM 116979
- Disnakertrans 7910

Kab Kulon Progo :
42.188,6344 (5,82%)

- BKPP 98,3
- Dinas Kelautan dan Perikanan 931,39
- Disperindag 937
- Dinsos 1250
- Dinkes 1125
- Disdikpora 1496
- Dinas PUP ESDM 15373,38
- Disnakertrans 504
- Dinas Pertanian Kulon Progo 1452
- Dinas PU Kulon Progo 12945
- Disnakertrans Kulon Progo 6077

APBN
114.530,979 (15,79%)

Kota Yogyakarta :
97.015,5159
(13,37%)

- BKPP 810,9
- Dinas Kelautan dan Perikanan 150
- Disperindag 1723
- Dinas Koperasi 187,275
- Dinsos 150
- Dinkes 480
- Dinas PU ESDM 5685
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 30781
- Disperindag Kota Yogyakarta 4079
- Dinkes Kota Yogyakarta 17585
- Dinas Pendidikan Kota 34905
- Dinas PU Kota 480

Kab Gunung Kidul :

- 13.958 (2,07%)
- BKPP 100
 - Dinas Kelautan dan Perikanan 1461,41
 - Disperindag 230
 - Dinas Koperasi 125
 - Dinsos 100
 - Disdikpora 324,874
 - Dinas PUP ESDM 520
 - Disnakertrans 482,45

- Dinas Sosial Gunungkidul 644
- Dinas Kesehatan Gunung Kidul 589
- Dinas Pendidikan Gunung Kidul 9381
- Disnakertrans Gunung Kidul 1083

Kab Bantul:

80.630,80450 (11,11%)

- BKPP 981,7
- Dinas Kelautan dan Perikanan 1415,11
- Disperindag 800
- Dinas Koperasi 178,856
- Dinsos 440
- Dinkes 6665,75
- Dinas PUP ESDM 34411,925
- Disnakertrans 12369,046
- Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul 794
- Dinas Sosial bantul 4053
- Dinas Kesehatan Bantul 18521

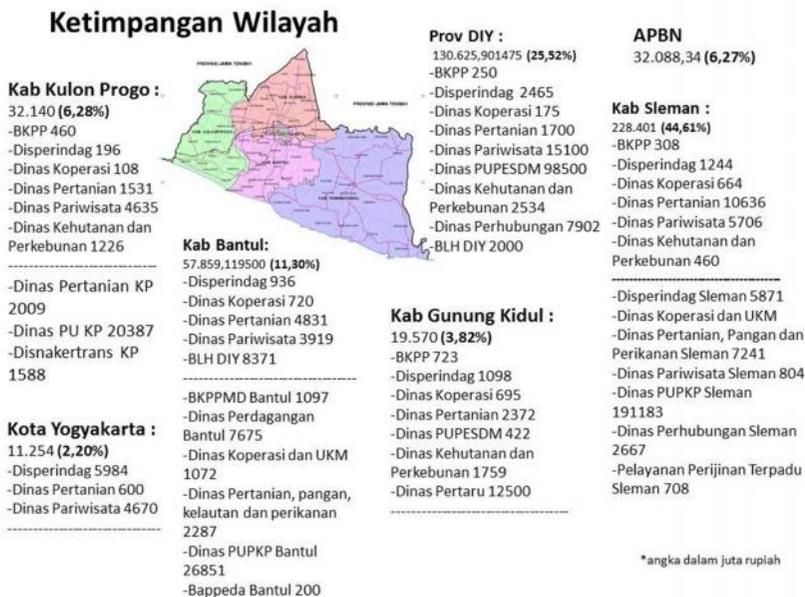


Kab Sleman :
207.968.973.000

- (28,67%)
- BKPP 1579
 - Dinas Kelautan dan Perikanan 2087,83
 - Disperindag 286
 - Dinsos 421,458
 - Disdikpora 25000
 - Dinas PUP ESDM 34394
 - Disnakertrans 4326,4535

- Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman 1391
- Dinas Sosial Sleman 36411
- Dinas Kesehatan Sleman 29916
- Dinas Pendidikan Sleman 41861
- Dinas PUPKP Sleman 28244
- Disnakertrans Sleman 79
- Dinas P3AP2KB Sleman 752
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sleman 446
- Dinas Dukupil Sleman 773

Gambar 5.8 Pembagian Pembiayaan APBN-APBD Tematik Kemiskinan



Gambar 5.9 Pembagian Pembiayaan APBN-APBD Tematik Ketimpangan Wilayah



Gambar 5.10 Pembagian Pembiayaan APBN-APBD Tematik Dukungan NYIA

5.2 Rencana Program dan Kegiatan

5.2.1 Rencana Program/Kegiatan Non Keistimewaan

Kebijakan belanja langsung Tahun 2018 diarahkan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah tersebut. Adapun program prioritas pembangunan. Rencana program dan kegiatan pembangunan Tahun 2018 yang diusulkan didalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.1 Prioritas, Sasaran, Program, dan Jumlah Anggaran Non Keistimewaan

No	Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran
1	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 733,496,000.00
2	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 2,436,713,500.00
3	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 4,749,470,500.00
4	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MASYARAKAT	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Rp 150,473,000.00
5	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN SUMBERDAYA MANUSIA	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Rp 539,010,500.00
6	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Rp 98,000,000.00
7	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Rp 150,978,900.00
8	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	Biro Administrasi Pembangunan	Rp 300,000,000.00

RKPD Tahun 2018

9	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Rp 2,852,837,000.00
10	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan	Rp 2,064,676,900.00
11	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Rp 71,747,706,400.00
12	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Rp 832,895,600.00
13	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES	Dinas Kesehatan	Rp 3,500,000,000.00
14	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES	Dinas Kesehatan	Rp 4,000,000,000.00
15	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 879,681,884,000.00
16	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 24,824,121,500.00
17	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 17,891,489,500.00
18	1.Peningkatan Kualitas SDM	PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 31,253,837,000.00
19	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 4,024,768,000.00
20	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 7,000,000,000.00
21	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 7,041,560,000.00
22	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 51,724,280,000.00
23	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH BANTUL	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 1,574,450,000.00
24	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH SLEMAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 1,698,738,000.00
25	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KULON PROGO	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 1,255,023,000.00
26	1.Peningkatan Kualitas	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan	Rp 1,698,747,000.00

RKPD Tahun 2018

	SDM	GUNUNGKIDUL	Olahraga	
27	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 1,420,972,000.00
28	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Inspektorat	Rp 5,506,522,000.00
29	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS GRHASIA	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	Rp 20,740,920,000.00
30	1.Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS RESPIRA	Rumah Sakit Paru Respira	Rp 12,740,666,000.00
31	2.Pengembangan Ekonomi	PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp 1,368,175,000.00
32	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM KEANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp 250,000,000.00
33	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Rp 2,997,371,000.00
34	2.Pengembangan Ekonomi	KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Rp 900,000,000.00
35	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Rp 448,886,000.00
36	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Rp 7,508,966,500.00
37	2.Pengembangan Ekonomi	PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH	Biro Administrasi Pembangunan	Rp 200,000,000.00
38	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Rp 350,000,000.00
39	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Rp 1,300,000,000.00
40	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 280,000,000.00
41	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 5,453,670,000.00
42	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 2,605,490,000.00
43	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 1,250,000,000.00

RKPD Tahun 2018

44	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 150,000,000.00
45	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 2,650,000,000.00
46	2.Pengembangan Ekonomi	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 360,700,000.00
47	2.Pengembangan Ekonomi	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 886,800,000.00
48	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESOS	Dinas Kesehatan	Rp 56,498,988,000.00
49	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp 1,055,000,000.00
50	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGUATAN SDM DAN KELEMBAGAAN KOPERASI	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp 550,000,000.00
51	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp 200,000,000.00
52	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN KOPERASI DAN UKM	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp 250,000,000.00
53	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Rp 2,850,000,000.00
54	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Rp 400,000,000.00
55	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Rp 820,000,000.00
56	2.Pengembangan Ekonomi	PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 120,900,650,000.00
57	2.Pengembangan Ekonomi	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 15,878,450,000.00
58	2.Pengembangan Ekonomi	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 23,611,550,000.00
59	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 1,000,000,000.00
60	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 900,000,000.00
61	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 1,100,000,000.00

RKPD Tahun 2018

62	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI AGRO, TEKSTIL, KIMIA, DAN ANEKA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 2,975,000,000.00
63	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 550,000,000.00
64	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA, DAN TELEMATIKA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 300,000,000.00
65	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Dinas Pertanian	Rp 50,853,760,800.00
66	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	Dinas Pertanian	Rp 2,885,902,200.00
67	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN	Dinas Pertanian	Rp 450,000,000.00
68	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	Dinas Pertanian	Rp 3,776,455,000.00
69	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN	Dinas Pertanian	Rp 1,421,000,000.00
70	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN	Dinas Pertanian	Rp 450,000,000.00
71	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	Dinas Pertanian	Rp 200,000,000.00
72	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	Dinas Pertanian	Rp 265,000,000.00
73	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Rp 4,219,893,525.00
74	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Rp 4,197,314,500.00
75	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial	Rp 1,632,960,177.00
76	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Dinas Sosial	Rp 839,369,269.00
77	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK	Dinas Sosial	Rp 723,062,111.00
78	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Dinas Sosial	Rp 757,875,081.00
79	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL	Dinas Sosial	Rp 1,155,777,106.00
80	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA	Dinas Sosial	Rp 633,860,662.00

RKPD Tahun 2018

		TERLANTAR		
81	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN	Dinas Sosial	Rp 3,506,059,500.00
82	2.Pengembangan Ekonomi	PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Rp 1,298,454,000.00
83	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Rp 4,358,791,800.00
84	2.Pengembangan Ekonomi	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Rp 661,004,800.00
85	2.Pengembangan Ekonomi	PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Rp 505,848,000.00
86	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Rp 6,050,000,000.00
87	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Rp 738,000,000.00
88	2.Pengembangan Ekonomi	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp 2,725,000,000.00
89	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 2,854,819,520.00
90	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 8,932,277,500.00
91	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 1,321,600,000.00
92	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN PERLINDUNGAN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 2,336,241,100.00
93	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 350,000,000.00
94	3.Ketahanan Energi dan Pangan	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 24,420,975,000.00
95	4.Sosial Budaya	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN	Badan Pemberdayaan	Rp 920,631,000.00

RKPD Tahun 2018

		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Perempuan dan Masyarakat.	
96	4.Sosial Budaya	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Rp 1,430,583,000.00
97	4.Sosial Budaya	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Rp 250,210,000.00
98	4.Sosial Budaya	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Rp 251,486,000.00
99	4.Sosial Budaya	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH PEREKONOMIAN	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Rp 200,000,000.00
100	4.Sosial Budaya	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA DAERAH	Kantor Perwakilan Daerah	Rp 900,000,000.00
101	5.Infrastruktur	PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 53,353,632,000.00
102	5.Infrastruktur	PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI, AIR TANAH, GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 30,080,370,000.00
103	5.Infrastruktur	PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 72,100,000,000.00
104	5.Infrastruktur	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI, GEOLOGI, AIR TANAH DAN PERTAMBANGAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 3,898,000,000.00
105	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENINGKATAN IKLIM INVESTASI	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Rp 877,843,000.00
106	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PROMOSI INVESTASI	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Rp 750,000,000.00
107	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Rp 100,000,000.00
108	6.Pembangunan Wilayah	PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Badan Lingkungan Hidup	Rp 1,979,332,000.00
109	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Badan Lingkungan Hidup	Rp 2,350,000,000.00
110	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Badan Lingkungan Hidup	Rp 1,870,668,000.00
111	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENINGKATAN TUTUPAN HUTAN DAN VEGETASI	Badan Lingkungan Hidup	Rp 725,000,000.00
112	6.Pembangunan Wilayah	PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH	Biro Administrasi Pembangunan	Rp 205,907,000.00
113	6.Pembangunan Wilayah	PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	Biro Administrasi Pembangunan	Rp 200,000,000.00

RKPD Tahun 2018

		BERKELANJUTAN		
114	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Rp 18,000,000,000.00
115	6.Pembangunan Wilayah	PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 4,207,097,000.00
116	6.Pembangunan Wilayah	PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan	Rp 3,221,444,075.00
117	6.Pembangunan Wilayah	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Dinas Perhubungan	Rp 132,949,011,350.00
118	6.Pembangunan Wilayah	PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	Dinas Perhubungan	Rp 1,124,500,000.00
119	6.Pembangunan Wilayah	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan	Rp 1,673,816,000.00
120	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 200,000,000.00
121	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 400,000,000.00
122	6.Pembangunan Wilayah	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 1,530,000,000.00
123	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Asisten Keistimewaan	Rp 215,220,000.00
124	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Asisten Keistimewaan	Rp 51,100,000.00
125	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Asisten Keistimewaan	Rp 40,800,000.00
126	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 2,275,534,040.00
127	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 1,058,145,400.00
128	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 217,500,750.00
129	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 2,587,265,000.00

RKPD Tahun 2018

130	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 5,622,266,210.00
131	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 1,957,652,100.00
132	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 125,000,000.00
133	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 2,246,937,500.00
134	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Rp 733,127,000.00
135	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Rp 117,000,000.00
136	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Rp 128,000,000.00
137	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 1,053,650,000.00
138	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 783,000,000.00
139	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 314,350,000.00
140	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 957,683,000.00
141	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 1,622,000,000.00
142	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp 820,818,050.00
143	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp 214,228,750.00
144	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Rp 86,313,200.00
145	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Lingkungan Hidup	Rp 1,148,130,000.00
146	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Badan Lingkungan Hidup	Rp 620,000,000.00

RKPD Tahun 2018

147	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Lingkungan Hidup	Rp 205,000,000.00
148	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Rp 1,206,060,000.00
149	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Rp 764,547,000.00
150	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Rp 141,263,000.00
151	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 1,624,089,980.00
152	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 484,800,000.00
153	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 113,524,000.00
154	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 2,020,702,250.00
155	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 2,878,131,750.00
156	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 310,958,000.00
157	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 6,860,000,000.00
158	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 2,779,352,000.00
159	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 198,000,000.00
160	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 945,000,000.00
161	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2,118,913,500.00
162	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 931,092,350.00

RKPD Tahun 2018

163	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 568,689,425.00
164	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2,927,406,000.00
165	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,261,753,500.00
166	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 825,964,000.00
167	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,643,452,500.00
168	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1,405,493,725.00
169	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 938,105,000.00
170	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2,196,608,000.00
171	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 5,486,642,600.00
172	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 40,318,096,600.00
173	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 103,831,000.00
174	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 607,262,300.00
175	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 987,354,000.00
176	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 1,148,285,500.00
177	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Rp 222,849,500.00
178	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Rp 166,634,000.00
179	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Rp 59,499,600.00

RKPD Tahun 2018

180	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Biro Administrasi Pembangunan	Rp 543,000,000.00
181	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Biro Administrasi Pembangunan	Rp 230,000,000.00
182	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Biro Administrasi Pembangunan	Rp 128,000,000.00
183	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Biro Administrasi Pembangunan	Rp 2,724,890,000.00
184	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Rp 248,669,000.00
185	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Rp 96,670,000.00
186	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Rp 37,500,000.00
187	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Biro Hukum	Rp 564,480,000.00
188	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Biro Hukum	Rp 405,934,000.00
189	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Biro Hukum	Rp 57,054,000.00
190	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Biro Hukum	Rp 1,150,000,000.00
191	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM	Biro Hukum	Rp 650,000,000.00
192	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM	Biro Hukum	Rp 600,000,000.00
193	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM	Biro Hukum	Rp 2,072,532,000.00
194	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Biro Organisasi	Rp 704,436,000.00
195	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Biro Organisasi	Rp 142,735,000.00
196	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Biro Organisasi	Rp 125,095,000.00

RKPD Tahun 2018

197	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Biro Organisasi	Rp 1,294,216,000.00
198	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI	Biro Organisasi	Rp 1,233,518,000.00
199	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Biro Tata Pemerintahan	Rp 724,335,000.00
200	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Biro Tata Pemerintahan	Rp 416,241,500.00
201	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Biro Tata Pemerintahan	Rp 114,625,000.00
202	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Biro Tata Pemerintahan	Rp 920,000,000.00
203	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	Biro Tata Pemerintahan	Rp 1,330,977,900.00
204	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN, DESA /KELURAHAN	Biro Tata Pemerintahan	Rp 872,000,000.00
205	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBINAAN WILAYAH	Biro Tata Pemerintahan	Rp 567,514,600.00
206	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Biro Umum dan Protokol	Rp 5,279,929,000.00
207	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Biro Umum dan Protokol	Rp 2,745,663,000.00
208	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Biro Umum dan Protokol	Rp 72,860,000.00
209	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	Biro Umum dan Protokol	Rp 2,856,550,500.00
210	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	Biro Umum dan Protokol	Rp 483,159,500.00
211	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN	Biro Umum dan Protokol	Rp 2,575,000,000.00
212	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Kebudayaan	Rp 3,457,576,000.00
213	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Kebudayaan	Rp 245,710,000.00
214	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Kebudayaan	Rp 134,890,000.00

RKPD Tahun 2018

215	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 2,116,174,000.00
216	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 1,571,408,900.00
217	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 210,350,000.00
218	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 3,414,847,000.00
219	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 790,000,000.00
220	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 330,000,000.00
221	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Kesehatan	Rp 1,882,346,000.00
222	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Kesehatan	Rp 848,198,000.00
223	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Dinas Kesehatan	Rp 31,092,000.00
224	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Kesehatan	Rp 439,098,100.00
225	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 1,778,818,529.00
226	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 646,764,050.00
227	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 225,222,750.00
228	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 2,949,921,671.00
229	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 1,286,000,000.00
230	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 13,150,000,000.00

RKPD Tahun 2018

231	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 1,686,688,000.00
232	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp 1,144,000,000.00
233	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp 2,150,000,000.00
234	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp 100,000,000.00
235	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Pariwisata	Rp 992,590,000.00
236	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Pariwisata	Rp 482,000,000.00
237	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Pariwisata	Rp 115,000,000.00
238	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 9,185,787,000.00
239	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 3,540,470,000.00
240	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Rp 661,000,000.00
241	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 9,034,360,000.00
242	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 18,864,975,000.00
243	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 342,000,000.00
244	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGANGGARAN BELANJA DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 3,301,283,000.00
245	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 2,119,050,000.00
246	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 812,000,000.00
247	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 1,417,657,000.00

RKPD Tahun 2018

248	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 3,135,563,000.00
249	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KOTA YOGYAKARTA	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 1,793,200,000.00
250	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB BANTUL	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 2,104,038,000.00
251	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB KULON PROGO	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 1,190,994,000.00
252	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB GUNUNGKIDUL	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 1,173,918,000.00
253	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB SLEMAN	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 2,462,642,000.00
254	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 4,497,000,000.00
255	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 11,992,280,000.00
256	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 9,679,677,000.00
257	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Rp 2,070,119,000.00
258	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Perhubungan	Rp 5,183,204,625.00
259	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Perhubungan	Rp 1,312,671,950.00
260	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Perhubungan	Rp 359,300,000.00
261	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 1,809,285,000.00
262	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 497,600,000.00
263	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 240,000,000.00

RKPD Tahun 2018

264	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 1,350,000,000.00
265	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 1,750,000,000.00
266	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 335,000,000.00
267	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Pertanian	Rp 2,510,000,000.00
268	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Pertanian	Rp 1,017,000,000.00
269	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Pertanian	Rp 195,000,000.00
270	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Sosial	Rp 14,639,106,319.00
271	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Sosial	Rp 1,758,626,800.00
272	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Dinas Sosial	Rp 16,067,000.00
273	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Sosial	Rp 133,477,950.00
274	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Rp 2,967,882,700.00
275	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Rp 1,197,595,700.00
276	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Rp 119,915,500.00
277	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Rp 587,876,500.00
278	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Inspektorat	Rp 1,508,131,000.00
279	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Inspektorat	Rp 1,047,295,000.00
280	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Inspektorat	Rp 91,505,000.00

RKPD Tahun 2018

281	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Inspektorat	Rp 38,435,000.00
282	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp 880,300,000.00
283	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp 570,000,000.00
284	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Rp 76,400,000.00
285	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kantor Perwakilan Daerah	Rp 1,870,569,000.00
286	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kantor Perwakilan Daerah	Rp 481,985,000.00
287	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Kantor Perwakilan Daerah	Rp 130,025,000.00
288	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS LAYANAN KANTOR PERWAKILAN DAERAH	Kantor Perwakilan Daerah	Rp 526,832,000.00
289	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 1,377,350,800.00
290	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 925,819,000.00
291	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 459,740,250.00
292	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 1,667,216,000.00
293	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 3,235,127,000.00
294	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 724,986,950.00
295	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Sekretariat Daerah	Rp 1,078,973,000.00
296	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Sekretariat Daerah	Rp 41,000,000.00

RKPD Tahun 2018

297	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	Sekretariat Daerah	Rp 2,158,550,000.00
298	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Sekretariat DPRD	Rp 4,005,684,000.00
299	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sekretariat DPRD	Rp 2,652,250,000.00
300	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Sekretariat DPRD	Rp 280,240,000.00
301	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD	Rp 34,370,361,500.00
302	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH	Sekretariat DPRD	Rp 7,802,699,000.00
303	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	Sekretariat DPRD	Rp 3,867,600,000.00
304	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Sekretariat DPRD	Rp 10,452,842,500.00
305	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Sekretariat Parampara Praja	Rp 180,951,000.00
306	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sekretariat Parampara Praja	Rp 91,450,000.00
307	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Sekretariat Parampara Praja	Rp 33,187,000.00
Total				Rp 2,286,147,759,000.00

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga									Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.01	PENDIDIKAN											
1.01.1.01.01.00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											
1.01.1.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 11.992.280.000,00	Rp. 10.941.050.000,00		
1.01.1.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Penggandaan	954.000 lembar	Dukungan 63,85% terhadap pencapaiannya terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.050.331.400,00	Rp. 7.868.530.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Alat Tulis Kantor	50 jenis						
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	19 unit						
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	23 unit						
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit						
					Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
					Kebersihan gedung kantorKebersihan gedung kantor	3 unit gedung						
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis						
					Langganan surat kabar harian , Nasional dan Lokal,	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
					Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan							
					Pemilahan arsip keuangan in aktif	7000 berkas							
					Pengiriman dokumen sebanyak	110 dokumen							
					Penjilidan	524 buku							
					Penyediaan Peralatan rumah tangga	15 jenis							
					Penyediaan peralatan rumah tangga	15 jenis							
					Penyusutan arsip	5000 berkas							
					Sewa Tanah SMAN/SMKN	36 SMAN/SMKN							
					Surat keluar	29690 lembar							
					Surat masuk	16605 lembar							
1.01.1.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pengelola keuangan	207 orang	Dukungan 27,05% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.010.068.600,00	Rp. 3.072.520.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jasa Keamanan Kantor, Jasa Pelayanan Perkantoran 7 instansi	1 tahun							
					Pengelola administrasi Kepegawaian	11 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penjaga malam PTT /SLB N 1 Bantul SK Gub	1 orang						
1.01.1.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah 9 instansi	1 tahun	Dukungan 9,09% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 931.880.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 9.679.677.000,00	Rp. 0,00		
1.01.1.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pembangunan balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul	1 unit	Dukungan 72,20 % terhadap pencapaian peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.838.361.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan operasional untuk 5 cabang dinas	5 unit	Dukungan 17,39% terhadap pencapaian peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.785.696.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Mebeleur sesuai RKBMD	2 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Peralatan sesuai RKBMD	3 jenis						
					Perlengkapan sesuai RKBMD	6 jenis						
1.01.1.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda.Pada 3 unit (Komplek ghraha wanabhaktiyasa, Youth Centre dan Pondok Pemuda Ambarbinangun)	3 unit gedung pemuda	Dukungan 72,20 % terhadap pencapaian peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.055.400.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Gedung kantor sesuai RKBMD	7 gedung						
					Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga Pada 3 unit (Komplek Mandalala Krida, GOR Amongrogo dan Gelanggang Pemuda Sorowajan)	3 unit gedung olahraga						
1.01.1.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas operasional roda 2	100 % (ssuai RKPBMMD)	Dukungan 2,43 % terhadap pencapaian peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 386.920.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas operasional roda 4	100 % (sesuai RKPBMMD)						
					Kendaraan dinas operasional roda 6	100 % (sesuai RKPBMMD)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.1.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan sesuai RKPMBD	100%	Dukungan 3,92 % terhadap pencapaian peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 613.300.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 2.070.119.000,00	Rp. 50.000.000,00		
1.01.1.01.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	100%	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas Dikpora DIY	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Dinas Dikpora DIY	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan aset	151 orang	penyusunan draft ROPK Th 2018, Renja 2019, RKA 2019, DPA 2019, Kalender Pendidikan 2017/2018,	100%	Rp. 1.915.719.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Peningkatan kapasitas pengelola SMKN dan SMAN dalam menyusun RKA APBD	254 orang						
					Peningkatan kapasitas pengelola SMKN dan SMAN serta Balai Dikmen dalam pengelolaan keuangan	327 orang						
					Peningkatan kapasitas penyusunan SMA dan SMK dalam penyusunan ROPK dan Standar Belanja	60 orang						
					Peningkatan kapasitas sekolah negeri dan swasta menyusun RAPBS	382 orang						
					Peningkatan kapasitas SMAN, SMAN dan BALAI Dikmen dalam pengelolaan gaji	66 orang						
					Penyusunan dan Penataan Anggaran berbasis aplikasi	127 orang						
1.01.1.01.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100 %	Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas Dikpora DIY	100%	Rp. 89.400.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.15	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH								Rp. 879.681.884.000,00	Rp. 228.681.370.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.1.01.01.00.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	BOS dan BOSDA	3 jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK, SLB)	Dukungan 15% terhadap pencapaian jumlah Angka Putus Sekolah	100%	Rp. 635.413.900.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.15.002	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	beasiswa bakat prestasi	2000 siswa	Dukungan 45% terhadap pencapaian jumlah Angka Putus Sekolah	100%	Rp. 33.320.488.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Kartu Cerdas Jenjang Sekolah Menengah	20.000 orang						
1.01.1.01.01.00.15.003	Pelayanan Pendidikan SMA	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	operasional pendidikan Sekolah Menengah Negeri 69 SMA N	69 sekolah	Dukungan 20% terhadap pencapaian jumlah Angka Putus Sekolah	100%	Rp. 79.986.800.000,00	Rp. 84.061.200.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.15.004	Pelayanan Pendidikan SMK	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Operasional Sekolah Negeri pada 49 SMKN	49 SMKN	Dukungan 20% terhadap pencapaian jumlah Angka Putus Sekolah	100%	Rp. 111.936.800.000,00	Rp. 122.883.100.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.15.006	Pembinaan Siswa SMA	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY dan luar DIY	Lomba Cerdas Cermat SMA	1 bidang	Dukungan 50% terhadap pencapaian jumlah medali emas pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan menengah	100%	Rp. 6.682.330.300,00	Rp. 7.757.470.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga					Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Gladi PIR	4 bidang, proposal yang lolos seleksi di tingkat nasional naik 25%						
					OPSI	Peringkat 1 nasional						
					Penerbitan Jurnal Karya Ilmiah	terbit 2 edisi						
					Penerbitan Majalah BIAS	terbit 2 edisi						
					Pengembangan Minat Bakat Istimewa SM	1200 Siswa						
					Seleksi dan Pengiriman Lomba Cerdas Cermat UUD 1945	1 bidang dan masuk 10 besar nasional						
					Seleksi dan Pengiriman Lomba Debat Bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)	2 bidang, 2 medali						
					Seleksi dan Pengiriman Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)	6 cabang, masuk peringkat 7 besar nasional						
					Seleksi dan Pengiriman Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN)	9 bidang, masuk 5 besar nasional						
					Seleksian Pengiriman Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN)	7 bidang, masuk peringkat 10 besar						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.1.01.01.00.15.007	Pembinaan Siswa SMK	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY dan luar DIY	Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMK	4 Kejuaraan	Dukungan 50% terhadap pencapaian jumlah medali emas pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan menengah	100%	Rp. 9.089.935.700,00	Rp. 9.763.750.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Pengembangan Kewirausahaan dan Kreativitas Siswa (Klinik Sains)	Terpilihnya 50 karya ilmiah siswa yang terbaik dan dibuat jurnal						
					Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa (PPMBI) siswa SMK	600 Siswa						
1.01.1.01.01.00.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Jetis Pajangan	Pembangunan Pagar belakang dan talud SMAN 1 Pajangan	50 meter	Dukungan 40% terhadap pencapaian Jumlah sekolah menengah dengan akreditasi A	100%	Rp. 454.280.000,00	Rp. 1.418.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.15.010	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Koordinasi MKPS, MKKS, MGMP, Kurikulum kabupaten Kota	1 jenjang pendidikan (SMA)	Dukungan 30% terhadap pencapaian Jumlah sekolah menengah dengan akreditasi A	100%	Rp. 943.560.000,00	Rp. 943.560.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.1.01.01.00.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Koordinasi MKPS, MKKS, MGMP, Kurikulum kabupaten Kota	1 jenjang pendidikan (SMK)	Dukungan 30% terhadap pencapaian Jumlah sekolah menengah dengan akreditasi A	100%	Rp. 1.853.790.000,00	Rp. 1.853.790.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.16	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS								Rp. 24.824.121.500,00	Rp. 14.814.480.000,00		
1.01.1.01.01.00.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Sentolo	Layanan terapi , Assesmen dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis	70 siswa	Dukungan 20 % terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	Rp. 1.573.140.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.16.002	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY dan Luar DIY	Seleksi Pembinaan dan Pengiriman Lomba tingkat nasional	12 kejuaraan	Dukungan 100% terhadap pencapaian Jumlah medali emas pada kompetisi nasional dan Internasional	100%	Rp. 1.808.549.500,00	Rp. 2.068.150.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.16.003	Bantuan Operasional Sekolah SLB	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Penyaluran Beasiswa Magang	156 Siswa	Dukungan 30% terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	Rp. 9.445.465.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Bantuan Operasional Sekolah	3.719 Siswa SLB Swasta						
					Pemberian Makanan Tambahan bagi SLB (PMTAS)	1.257 Siswa SLB Negeri						
					Penyaluran Beasiswa Inklusi	3.038 Siswa Sekolah SPPI						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.1.01.01.00.16.004	Pelayanan Pendidikan SLBN	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Gondomanan Mergangsan Pakem Pengasih Playen Sewon Umbulharjo Wonosari	Penyediaan biaya operasional	9 SLB Negeri	Dukungan 40% terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	Rp. 10.208.790.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.16.005	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pembinaan Keberbakatan bagi anak SD, SMP, dan berkebutuhan khusus	720 siswa	Dukungan 10% terhadap pencapaian Jumlah SLB dengan akreditasi A	100%	Rp. 1.788.177.000,00	Rp. 2.746.330.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN								Rp. 17.891.489.500,00	Rp. 24.804.500.000,00		
1.01.1.01.01.00.17.001	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba Dikdas	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY dan Luar DIY	Penyelenggaraan dan pengiriman FLS2N SD dan SMP tk Nasional	2 kejuaraan	Dukungan 80% terhadap pencapaian Jumlah medali emas jenjang Dikdas dan PNFI pada kompetisi nasional dan internasional	100%	Rp. 3.292.955.000,00	Rp. 4.065.650.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Penyelenggaraan dan pengiriman Lomba Sekolah Sehat tk Nasional	1 kejuaraan						
					Penyelenggaraan dan pengiriman LPSN SMP tk Nasional	1 kejuaraan						
					Penyelenggaraan dan pengiriman O2SN SD dan SMP tk Nasional	2 kejuaraan						
					Penyelenggaraan dan pengiriman OSN SD dan SMP tk Nasional	2 kejuaraan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga									Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penyelenggaraan Lomba Dokter Kecil tk Nasional	1 kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.17.002	Pengiriman Lomba PNFI Tingkat Nasional	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY dan LUar DIY	Pembinaan dan pengiriman lomba GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi	mempertahankan juara umum	Dukungan sebesar 20% terhadap pencapaian Jumlah medali emas jenjang Dikdas dan PNFI pada kompetisi nasional dan internasional	50%	Rp. 831.730.000,00	Rp. 1.197.780.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.17.003	Pengembangan Model PAUD	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Banguntapan Kraton	Pelayanan PAUD Percontohan	3 lembaga	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan mutu	15%	Rp. 391.190.000,00	Rp. 391.190.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.17.004	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	pengelolaan sistem informasi pendidikan	4 sistem pendataan pendidikan	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan mutu pendidikan	80 %	Rp. 2.025.594.500,00	Rp. 2.967.470.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					PPDB Online SMAN dan SMKN	118 sekolah						
1.01.1.01.01.00.17.005	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Akreditasi oleh asesor BAP S/M (Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah)	200 sekolah/madrasah	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan mutu	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 4.110.690.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.17.006	Penyelenggaraan Ujian	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Penyelenggaraan evaluasi pendidikan semua jenjang pendidikan	3 jenjang pendidikan	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan mutu pendidikan	80 %	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 2.257.020.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.1.01.01.00.17.007	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	hibah lembaga bidang kependidikan	5 lembaga	Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan mutu pendidikan	20 %	Rp. 406.850.000,00	Rp. 408.050.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.17.008	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	penghargaan prestasi olahraga dan pendidikan	4 even	Dukungan terhadap capaian mutu pendidikan	50%	Rp. 2.957.571.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.17.009	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	pembiayaan beasiswa perguruan tinggi	520 mahasiswa	Dukungan terhadap capaian mutu pendidikan	80 %	Rp. 1.622.185.000,00	Rp. 4.231.360.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.17.010	Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY dan luar DIY	gladhi kawruh	16 kali	dukungan terhadap capaian peningkatan mutu pendidikan	75%	Rp. 3.613.414.000,00	Rp. 1.675.290.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar DIY mampu menampilkan kesenian khas dalam DSP se Jawa Bali dan Lampung 1 kontingen	1 kegiatan						
1.01.1.01.01.00.18	PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								Rp. 31.253.837.000,00	Rp. 40.382.250.000,00		
1.01.1.01.01.00.18.001	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SLB	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pelayanan Pendidikan PTK SLB	373 orang	Dukungan terhadap pencapaian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	15%	Rp. 747.707.000,00	Rp. 1.827.100.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pembinaan dan Pengembangan Identifikasi dan Assesmen Pendidikan Inklusif	120 Guru Sekolah Reguler						
					Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Vokasional SLB	130 Guru						
1.01.1.01.01.00.18.002	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMA	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pelayanan PTK SMA	752 orang	Dukungan terhadap pencapaian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	15%	Rp. 266.160.000,00	Rp. 266.160.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.18.003	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMK	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pelayanan PTK SMK	Dokumen TPG,Tamsil, dan Insentif	Dukungan terhadap pencapaian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	15%	Rp. 202.580.000,00	Rp. 202.580.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Peningkatan Uji Kompetensi Teknis guru produktif	90 orang guru produktif calon asesor						
1.01.1.01.01.00.18.004	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Olimpiade Guru Nasional (OGN)	1 kali	Dukungan terhadap pencapaian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	55%	Rp. 30.037.390.000,00	Rp. 38.086.410.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Pemilihan calon kepala sekolah	1 kali						
					Penilaian angka kredit	1 kali						
					Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	100 %						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 %						
					Seleksi dan peningkatan kapasitas Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	1 kali						
					Seleksi, penguatan calon Penilai Angka Kredit	1 kali						
1.01.1.01.01.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)								Rp. 4.024.768.000,00	Rp. 6.004.660.000,00		
1.01.1.01.01.00.20.001	Produksi Media Pembelajaran	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Produksi bahan media pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus berdasarkan jenis ketunaan	5 jenis ketunaan	Dukungan terhadap layanan pendidikan berbasis TIK	50 %	Rp. 1.343.578.000,00	Rp. 3.078.830.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Produksi bahan siar untuk jogja belajar tube dan jogja belajar radio	3 jenis bahan ajar						
1.01.1.01.01.00.20.002	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pemeliharaan IDC dan BTS	65 BTS	Dukungan terhadap layanan pendidikan berbasis TIK	50 %	Rp. 2.681.190.000,00	Rp. 2.925.830.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan gebyar anugerah kihajar dari 2 medali emas menjadi 3 medali emas	3 medali emas						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile learning service dan institusional.	25 sekolah						
1.01.1.01.01.00.21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK								Rp. 7.000.000.000,00	Rp. 15.636.000.000,00		
1.01.1.01.01.00.21.001	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pelayanan Pendidikan Pada BLUD	1 tahun	Dukungan terhadap pendidikan teknik yang terstandart	100 %	Rp. 7.000.000.000,00	Rp. 15.636.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.22	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN								Rp. 7.041.560.000,00	Rp. 8.264.980.000,00		
1.01.1.01.01.00.22.001	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor tk Nasional	5 perwakilan DIY	Dukungan terhadap pembinaan kepemudaan	25 %	Rp. 545.045.000,00	Rp. 612.040.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Seleksi dan pengiriman Kapal Pemuda Nusantara	6 orang peserta						
					Seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara	6 orgn peserta						
1.01.1.01.01.00.22.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rehabilitasi Gedung Graha Bhaktiyasa dan Youth Centre	2 unit	Dukungan sebesar 25 % terhadap pembinaan kepemudaan	100 %	Rp. 851.530.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.22.003	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pembinaan generasi muda dalam jambore pemuda, LBB/tonti dan kader anti NAPZA	782 orang	Dukungan terhadap pembinaan kepemudaan	25 %	Rp. 4.198.760.000,00	Rp. 4.228.240.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Penguatan Kelembagaan KNPI dan kwarda	2 organisasi kepemudaan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Seleksi dan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka	40 peserta putera dan 40 peserta puteri;						
1.01.1.01.01.00.22.004	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Gedang sari Saptosari	Pelatihan Keterampilan Pemuda DIY	60 orang (20 kelompok)	Dukungan terhadap pembinaan kepemudaan	25 %	Rp. 1.446.225.000,00	Rp. 2.624.700.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Pelatihan Agrobisnis	30 Orang						
					Sentra pemberdayaan pemuda	3 Lokasi						
1.01.1.01.01.00.23	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA								Rp. 51.724.280.000,00	Rp. 104.548.900.000,00		
1.01.1.01.01.00.23.001	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Penyelesaian Pembangunan Mushola GOR Amonggoro dan mandala krida	2 unit sarana olahraga	Dukungan terhadap pembinaan keolahragaan	50 %	Rp. 35.361.540.000,00	Rp. 86.548.900.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.23.002	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pembinaan Atlet Berbakat	550 orang	Dukungan terhadap pembinaan keolahragaan	50 %	Rp. 16.362.740.000,00	Rp. 18.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Pembinaan dan pengiriman kontingen pada POPWIL 2018	9 cabor						
					Penguatan Kelembagaan NPC dan KONI	2 organisasi						
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	7 kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.24	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH BANTUL								Rp. 1.574.450.000,00	Rp. 1.600.000.000,00		
1.01.1.01.01.00.24.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Seleksi lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan	Dukungan terhadap layanan pendidikan menengah	25 %	Rp. 1.574.450.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga									Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	8 Kejuaraan						
					Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.25	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH SLEMAN								Rp. 1.698.738.000,00	Rp. 1.700.000.000,00		
1.01.1.01.01.00.25.005	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Seleksi lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan	Dukungan terhadap layanan pendidikan menengah	25 %	Rp. 1.698.738.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	8 Kejuaraan						
					Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.26	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KULON PROGO								Rp. 1.255.023.000,00	Rp. 1.300.000.000,00		
1.01.1.01.01.00.26.003	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Seleksi lomba PTK tingkat Kabupaten	3 Kejuaraan	Dukungan terhadap layanan pendidikan menengah	25 %	Rp. 1.255.023.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	8 Kejuaraan						
					Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.27	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH GUNUNGKIDUL								Rp. 1.698.747.000,00	Rp. 1.700.000.000,00		
1.01.1.01.01.00.27.004	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Seleksi lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan	Dukungan terhadap layanan pendidikan menengah	25 %	Rp. 1.698.747.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga									Jumlah Pagu : Rp. 1.054.831.946.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	8 Kejuaraan						
					Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan						
1.01.1.01.01.00.28	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA								Rp. 1.420.972.000,00	Rp. 1.500.000.000,00		
1.01.1.01.01.00.28.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Seleksi lomba PTK tingkat Kabupaten	3 Kejuaraan	Dukungan terhadap layanan pendidikan menengah	25 %	Rp. 1.420.972.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Seleksi Lomba SMA tingkat Kabupaten	8 Kejuaraan						
					Seleksi Lomba SMK tingkat Kabupaten	4 Kejuaraan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.02	KESEHATAN											
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan											
1.02.1.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.882.346.000,00	Rp. 2.100.000.000,00		
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1 kali Logistik coldroom	Administrasi perkantoran yang sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 64,27% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.227.368.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					1 paket pengiriman							
					1 tahun pengelolaan kearsipan							
					1 tahun Pulsa aduan masyarakat							
					104000 lembar penggandaan							
					11 jenis Cetak							
					12 bulan Jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan (Induk) dan instalasi farmasi							
					12 bulan Retribusi sampah							
					12 bulan Tanaman dalam pot (sewa)							
					12 bulan Telepon, air, listrik, dan fax							
					13 jenis alat listrik kantor							
					2 kali Jasa KIR roda 4							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					23 unit tabung pemadam kebakaran							
					24 jenis alat kebersihan							
					3 buah Bendera							
					3 jenis Benda pos							
					3 jenis Surat kabar (langganan)							
					5 jenis Pemeliharaan alat-alat kantor							
					90 jenis Alat Tulis Kantor							
					Pajak tahunan 26 unit roda 4 (STNK)							
					Pajak tahunan 45 unit roda 2 (STNK)							
					PBB BMPK untuk 1 tahun							
1.02.1.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	12 bulan Jasa keamanan kantor	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 21,05% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 389.778.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					12 bulan Kinerja pengadministrasi kepegawaian							
					12 bulan kinerja pengelola keuangan							
					12 bulan kinerja PTT							
					BPJS kesehatan PTT							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.1.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 14,67% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 265.200.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
1.02.1.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 848.198.000,00	Rp. 815.000.000,00		
1.02.1.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1 buah Pompa air dan kelengkapannya	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 1,14% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 189.478.000,00	Rp. 10.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					1 paket panggung/stand upacara/senam							
					Sarpras farmasi	1 paket						
1.02.1.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1 paket pemeliharaan bangunan gedung kantor tempat kerja	Terpelihara rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 9,49% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	26 unit Kendaraan dinas roda 4 terpelihara	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 73,80% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 508.080.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					45 unit kendaraan dinas roda 2 terpelihara							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.1.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	3 unit alat kantor terpelihara	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 12,06% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 75.640.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					4 jenis Perlengkapan kantor terpelihara							
					5 jenis Mebeulair terpelihara							
1.02.1.02.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								Rp. 31.092.000,00	Rp. 70.000.000,00		
1.02.1.02.01.00.05.001	Pengembangan I S O	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1 dokumen surveilans audit	Kualitas manajemen pelayanan sesuai standar mutu 100%	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur sebesar 29,49%	100%	Rp. 31.092.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					1 kali kajian manajemen							
					2 rekomendasi laporan audit internal							
					2 rekomendasi laporan survey kepuasan masyarakat							
1.02.1.02.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 439.098.100,00	Rp. 84.000.001,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.1.02.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1 dokumen laporan keuangan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 3,77% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 6.708.000,00	Rp. 16.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	200 Materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY dan informasi pendukung 100%	Dukungan 89,38% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 369.142.600,00	Rp. 1,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA							
					Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022							
					Pengembangan aplikasi/software pendukung kinerja Dinas Kesehatan DIY							
					Survey kesehatan							
1.02.1.02.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 11 program 23 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,32% terhadap penatausahaan keuangan dna pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 34.400.000,00	Rp. 38.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.1.02.01.00.06.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peningkatan pemahaman tentang jabatan fungsional sebanyak 174 ob	Kelancaran jenjang karir jabatan fungsional 100%	Dukungan peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 29,49%	100%	Rp. 28.847.500,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					1 dokumen angka kredit jabatan fungsional							
					1 Kesepakatan penilaian angka kredit							
1.02.1.02.01.00.15	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT								Rp. 2.852.837.000,00	Rp. 1.750.000.001,00		
1.02.1.02.01.00.15.001	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Program 01-06	Jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas gizi yang memenuhi standar	52 faskes	Persentase ibu hamil risti yang tidak mengalami komplikasi	-	Rp. 1.028.444.500,00	Rp. 1,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Jumlah ibu hamil yang didampingi oleh tenaga terlatih	1000 bumil	Persentase Bumil Kurang Energi Kronis (KEK)	18,35%				
					Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan PWS KIA lengkap & tepat waktu	5 kabupaten/kota						
					Jumlah petugas gizi yang memiliki kompetensi dasar	27 faskes						
					Jumlah petugas kesehatan yang mendapat bimtek pendampingan bumil	80 petugas kesehatan						
					Jumlah sarana penunjang pendampingan bumil	28.000 eksemplar buku KIA						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Persentase kualitas surveilans gizi di kab/kota	20%						
1.02.1.02.01.00.15.002	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Desa yang melaksanakan kampanye GERMAS dengan menggunakan media promosi kesehatan	65 desa	Jumlah desa yang mengimplementasikan 5 pilar STBM	40	Rp. 1.824.392.500,00	Rp. 1.750.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	40 desa	Jumlah Desa dan kelurahan melaksanakan kampanye Germas	65				
					Jumlah Hotel dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	132 sarana	Jumlah TTU memenuhi syarat kesehatan	88				
					Jumlah Kabupaten/Kota dilakukan pembinaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	5 kab/kota						
					Jumlah Pasar dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	29 sarana						
					Jumlah Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	24 sarana						
					Jumlah Rumah Sakit dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	15 sarana						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Jumlah SD, SMP, SLTA yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	569 saran						
					Kab/Kota yang mendapat fasilitasi kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan	1 kab						
					Kabupaten/kota yang melaksanakan kampanye Germas	5 kab/kota						
1.02.1.02.01.00.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT								Rp. 2.064.676.900,00	Rp. 1.020.000.000,00		
1.02.1.02.01.00.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	80%	Persentase cakupan imunisasi anak di bawah 1 tahun mendapat imunisasi dasar lengkap di wilayah penolakan	-	Rp. 327.434.900,00	Rp. 420.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Anak baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	76,5%	Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	-				
					jumlah wilayah penolakan imunisasi mendapat pendampingan	2 wilayah						
					Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) kurang dari 24 jam	100%						
1.02.1.02.01.00.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan	DIY	Juml Klinik yang melaksanakan strategi DOT	25%	API (Annual Parasite Incidence)	<1 permil	Rp. 1.737.242.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Derajat Kualitas SDM		Jumlah DPS yang melaksanakan strategi DOTS	20%	Jumlah kabupaten /kota melaksanakan pengendalian nyamuk ae.wolbachia	1				
					Jumlah Fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	14 rumah sakit	Persentase cakupan penemuan TB	32%				
					Jumlah fasyankes yang melaksanakan strategi DOTS dibagi semua fasyankes dikali 100%	92%	Persentase DM diketemukan	7,5%				
					Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	5 kabupaten/kota	Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pnemoni lebih dari 60%	20%				
					Jumlah kader dilatih pengendalian DBD dengan nyamuk ae. wolbachia		Persentase Kanker diketemukan	-				
					Jumlah puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko kesehatan jiwa	7,5%	Persentase kasus DBD mendapat tata laksana sesuai standar	-				
					Jumlah Puskesmas yang melakukan pendampingan pengobatan dan perawatan penderita kanker	25 puskesmas	Persentase kasus jiwa diketemukan	7,5%				
					Jumlah Puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko hipertensi pada usia > 15 th	7,5%	Persentase Penderita HIV yang menerima pengobatan ARV	64%				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Jumlah puskesmas yang melakukan skrining DM pada usia > 15 th	25 puskesmas	Persentase PJPD ditemukan	7,5%				
					Monitoring & Evaluasi pengendalian DBD							
					Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pnunomia	66,5%						
					Persentase kasus kematian DBD di fasyankes dilakukan audit klinis	< 1 per 100.000 penduduk						
1.02.1.02.01.00.17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN								Rp. 71.747.706.400,00	Rp. 1.300.000.001,00		
1.02.1.02.01.00.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah fasilitas kesehatan yg mendapatkan pembinaan kesehatan tradisional	10 Faskes	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan FKTL dan pelayanan kesehatan lainnya yang melaksanakan standar pelayanan	-	Rp. 71.527.959.600,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Jumlah faskes yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	20 Faskes						
					Jumlah Puskemas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	55 Puskesmas						
					Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan haji	100%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan pelayanan	20 RS						
1.02.1.02.01.00.17.005	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	0	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan FKTL dan pelayanan kesehatan lainnya yang menerapkan standar mutu	-	Rp. 219.746.800,00	Rp. 1,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Jumlah Laboratorium kesehatan daerah yang mendapatkan pembinaan mutu	0						
					Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	100 puskesmas						
					Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan mutu	20 RS						
1.02.1.02.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN								Rp. 832.895.600,00	Rp. 2,00		
1.02.1.02.01.00.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standard tenaga dan sarana	25 sarana	Jumlah FKTL sesuai standar tenaga, sarana dan jaminan kesehatan	-	Rp. 399.660.000,00	Rp. 1,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Jumlah FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	25 rumah sakit	Jumlah FKTP sesuai standar tenaga dan sarana	-				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Jumlah FKTP yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standard tenaga dan sarana	171 sarana						
					Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Sistem informasi tenaga dan sarana kesehatan secara terintegrasi	3 kabupaten/kota						
1.02.1.02.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	35 Faskes	Meningkatnya Mutu pelayanan kefarmasian FKTP dan FKTL	-	Rp. 433.235.600,00	Rp. 1,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Jumlah obat dan perbekkes buffer stok	1 paket						
					Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian yang mendapatkan pembinaan	25 sarana						
					Presentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Keamanan Makanan							
1.02.1.02.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES								Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 1,00		
1.02.1.02.01.00.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah pelatihan untuk mendukung pengembangan layanan	2 paket	Jumlah pengembangan layanan di Balai Laboratorium Kesehatan	2 (Kalibrasi SMS gateway)	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan									Jumlah Pagu : Rp. 144.697.838.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Jumlah pemenuhan alat dan gedung untuk mendukung pengembangan layanan	3 jenis						
1.02.1.02.01.00.20	PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES								Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 1,00		
1.02.1.02.01.00.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah pelatihan yang dievaluasi	4 pelatihan	Persentase mantan linatih yang meningkat kompetensinya	-	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.00.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS								Rp. 56.498.988.000,00	Rp. 60.000.000.000,00		
1.02.1.02.01.00.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Cakupan Jamkes Penyangga	96%	Masyarakat DIY mendapatkan jaminan kesehatan	100%	Rp. 56.498.988.000,00	Rp. 60.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan Jamkes Preventif	4%						
					Cakupan Jamkes Rehabilitatif	5%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Rumah Sakit Jiwa Grhasia									Jumlah Pagu : Rp. 20.740.920.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.02	KESEHATAN											
1.02.1.02.02.00	Rumah Sakit Jiwa Grhasia											
1.02.1.02.02.00.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS GRHASIA								Rp. 20.740.920.000,00	Rp. 21.000.000.000,00		
1.02.1.02.02.00.22.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pelayanan Administrasi, Umum, dan Keuangan	Pelayanan Kesehatan Jiwa di RS Grhasia 100%	Pasien gangguan jiwa mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	Rp. 20.740.920.000,00	Rp. 21.000.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	Sedang Berjalan
					Pelayanan Farmasi, laboratorium, dan Radiologi							
					Pelayanan IGD, Rawat Jalan, Rehabilitasi Medik							
					Pelayanan Keperawatan Rawat Inap							
					Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan							
					Pelayanan Rawat Inap, Rehabilitasi Mental, Keswamas, dan Penanganan Korban NAPZA							
					Pengadaan Bahan Makanan Pasien							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Rumah Sakit Paru Respira									Jumlah Pagu : Rp. 12.740.666.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.02	KESEHATAN											
1.02.1.02.03.00	Rumah Sakit Paru Respira											
1.02.1.02.03.00.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS RESPIRA								Rp. 12.740.666.000,00	Rp. 15.000.000.000,00		
1.02.1.02.03.00.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	1 Paket Pengembangan SIM RS	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernafasan di RS Repira 100%	Pasien gangguan pernafasan dan paru mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	Rp. 12.740.666.000,00	Rp. 15.000.000.000,00	Rumah Sakit Paru Respira	Sedang Berjalan
					1 Paket Surveilant akreditasi							
					2 Jenis Bimtek pegawai							
					2 Paket Bahan kima dan bahan pakai habis							
					2 Paket Obat-obatan							
					3 Jenis Alat Kesehatan							
					3 Kegiatan Promosi kesehatan							
					8 Jenis Alat kesehatan							
					Logistik rumah sakit 12 Bulan							
					Pemeliharaan Rumah Tangga RS 12 Bulan							
					Pemeliharaan sarana dan prasarana RS 12 Bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											
1.03.1.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 9.185.787.000,00	Rp. 14.700.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat listrik	48 unit	Dukungan 100% pemenuhan kebutuhan jasa, peralatan danperlengkapan kantor terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Rp. 6.045.208.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					ATK	179 jenis						
					Barang cetakan	32 jenis						
					Belanja pengisian tabung gas	10 unit						
					Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	23 jenis						
					Jasa Kebersihan kantor	522724 m2						
					Jasa Komunikasi,Listrik,Air	1 tahun						
					Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	138 unit						
					Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	16 unit						
					Jasa surat menyurat	2500 surat						
					Penataan arsip	70000 arsip						
					penggandaan	358000 lembar						
					Solar operasional genset	1 tahun						
					Surat Kabar/Majalah	7 SKH						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM										Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.1.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Jasa Administrasi Keuangan	51 orang/12 bulan	Dukungan 100% pemenuhan jasa pengelola pelayanan perkantoran terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 2.508.579.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Jasa keamanan kantor	40 orang / 12 bulan						
					Jasa Pengelola Kepegawaian	6 orang / 12 bulan						
					Jasa Perencana Program	7 orang / 12 bulan						
					Jasa tenaga pendukung	48 orang / 11 bulan						
1.03.1.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Makanan dan Minuman rapat	11000 os	Dukungan 100% pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi/koordinasi dalam dani keluar daerah terhadap Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100 %	Rp. 632.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah	1 tahun						
1.03.1.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 3.540.470.000,00	Rp. 3.600.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8 gedung seluas 24.501 m2	Dukungan keberlanjutan fungsi dan kenyamanan gedung dan taman kantor terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp. 1.466.400.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	124 unit (roda dua : 85 unit, roda empat :25 unit, roda enam :10 unit, roda tiga : 3 unit, roda sepulu : 1 unit)	Dukungan fungsional kendaraan dinas/operasional SKPD terhadap ketersediaan sarana dan prasana aparatur yang berkualitas	100 %	Rp. 1.806.660.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1.03.1.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan alat-alat berat	6 jenis	Terjaganya fungsi peralatan/perlengkapan kantor	100%	Rp. 267.410.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Pemeliharaan alat-alat komunikasi	3 jenis								
					Pemeliharaan alat-alat kantor	12 jenis								
					Pemeliharaan perlengkapan bermesin	1 jenis								
					Pemeliharaan perlengkapan kantor	8 jenis								
1.03.1.03.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 661.000.000,00	Rp. 681.000.000,00				
1.03.1.03.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsep LKPJ dan LPPD Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2017	1 laporan	Dukungan informasi kinerja SKPD terhadap peningkatan kinerja SKPD	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Tersusunnya LAKIP TH 2017	1 laporan								
1.03.1.03.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Keuangan Audited	1 laporan	Dukungan informasi kinerja keuangan SKPD terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan SKPD 100%	100 %	Rp. 90.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Laporan Keuangan bulanan	12 laporan								
					Laporan Keuangan Semester	2 laporan								
					Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan								
					Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan								
1.03.1.03.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	DPA 2019	1 dokumen	Dukungan perencanaan program dan kegiatan SKPD terhadap peningkatan pembangunan urusan Pekerjaan Umum , Perumahan dan ESDM untuk 1 Tahunan	100 %	Rp. 530.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					DPA-P TH 2018	1 dokumen								
					Pekerjaan Jasa Konsultansi Sistem Informasi Berbasis Masyarakat	1 dokumen								
					Profil Rehab Jaringan	1 dokumen								
					Publikasi	1 dokumen								
					Renja SKPD TH 2019	1 dokumen								
					Renstra SKPD	1 dokumen								
					RKA TH 2019	1 dokumen								
					RKA-P TH 2018	1 dokumen								
					tenaga pendamping SKPD	6 bulan								
1.03.1.03.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 laporan	Dukungan informasi tingkat kinerja SKPD bulanan terhadap peningkatan pencapaian kinerja SKPD 100%	100 %	Rp. 26.000.000,00	Rp. 26.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
1.03.1.03.01.00.15	PENYELENGGARAAN JALAN								Rp. 120.900.650.000,00	Rp. 165.000.000.000,00				
1.03.1.03.01.00.15.001	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rehabilitasi Ruas Jalan Nanggulan - Tegalsari	3 km	Menambah 0,6 % kondisi mantap jaringan jalan provinsi	73,43 %	Rp. 28.200.000.000,00	Rp. 40.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Peningkatan Ruas jalan Tegalsari - Klepu	3 Km								
					Rehabilitasi Jembatan Dogongan	1 unit								
					Rehabilitasi Ruas Jalan Kawasan Bandara Adi Sutjipto	3 km								
1.03.1.03.01.00.15.002	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Inspeksi kondisi jembatan	1 dokumen	Mempertahankan kondisi mantap jaringan jalan provinsi sebesar 72,26 %	100 %	Rp. 27.800.650.000,00	Rp. 30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Inspeksi Kondisi Jalan	1 dokumen	Sertifikasi tanah pada jalan provinsi	36 Ruas						
					Sertifikasi tanah pada Jalan Provinsi	36 ruas	Tersedianya data inspeksi jalan dan jembatan	100 %						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
					Terpeliharanya 241 buah jembatan	5.748,80 m								
					Terpeliharanya 78 ruas jalan propinsi	720,77 km								
1.03.1.03.01.00.15.003	Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Pembangunan Bangunan Atas Jembatan Nguwot	90 m	Menambah kemantapan jembatan provinsi	1	Rp. 64.900.000.000,00	Rp. 95.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Pembangunan ruas jalan Ngalang - Gading	4,5 Km								
1.03.1.03.01.00.16	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE								Rp. 15.878.450.000,00	Rp. 18.550.000.000,00				
1.03.1.03.01.00.16.001	Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Karangmojo Ponjong Semin	Tersusunnya dokumen perencanaan : 1. DED Jaringan Irigasi D.I. Payaman; 2. DED Jaringan Irigasi D.I. Simo; 3. Penilaian Kondisi Jaringan Irigasi D.I. Kewenangan Pemda DIY.	Dukungan desain terwujudnya kondisi jaringan irigasi sebesar 77%;	Potensi dukungan perencanaan untuk peningkatan luasan DI yang terlayani air irigasi n+1	100%	Rp. 926.247.750,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
1.03.1.03.01.00.16.002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Terselenggaranya Operasional Sekretariat dan Kegiatan Sidang Dewan Sumber Daya Air DIY.	Dokumen Rekomendasi Kebijakan	Dukungan sebesar 7,66% berupa tersusunnya rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya air;	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
1.03.1.03.01.00.16.003	Peningkatan Jaringan Irigasi	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Berbah Galur Godean Jetis Karangmojo Kasihan Lendah Moyudan Panjatan Ponjong Sedayu Semin Srandakan	I. Terselenggaranya Peningkatan Jaringan Irigasi pada 10 Daerah Irigasi : 1. D.I. Pulodadi; 2. D.I. Semoyo; 3. D.I. Sekarsuli; 4. D.I. Sambeng; 5. D.I. Kuton; 6. D.I. Tirtorejo; 7. D.I. Klampok; 8. D.I. Kucir; 9. D.I. Dadapan; 10. D.I. Madugondo. Terselenggaranya Peningkatan Jaringan Irigasi Partisipatif pada 6 Daerah Irigasi : 1. D.I. Blawong; 2. D.I. Pijenan; 3. D.I. Simo; 4. D.I. Payaman; 5. D.I. Sapon; 6. D.I. Prangkok.	dukungan terhadap kenaikan prosentasi kondisi jaringan irigasi sebesar 1,15 %	Dukungan sebesar 100% untuk mempertahankan luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 78,15%	100%	Rp. 9.728.450.000,00	Rp. 13.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM										Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.1.03.01.00.16.004	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Banguntapan Godean Imogiri Moyudan	Tersusunnya dokumen perencanaan : 1. DED Embung Sidoluhur di Kecamatan Godean; 2. DED Embung di Kecamatan Moyudan; 3. DED Embung di Kecamatan Banguntapan; 4. DED Embung Srunggo di Kecamatan Imogiri; 5. Penilaian Kelayakan Potensi Sumber Air Baku;	Dukungan desain terhadap penambahan kapasitas air baku sebesar 50 lt/dtk;	Potensi dukungan perencanaan terhadap pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air dan drainase pada tahun n+1.	100%	Rp. 1.473.752.250,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.00.16.005	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Kasihani	1. Tersusunnya 1 dokumen review desain pengelolaan drainase di kecamatan kasihani, Bantul; 2. Terbangunnya saluran drainase di Kecamatan Kasihan, Bantul.	2 titik	Penurunan jumlah titik genangan banjir di wilayah perkotaan.	100%	Rp. 3.250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.00.17	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE								Rp. 23.611.550.000,00	Rp. 0,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
1.03.1.03.01.00.17.001	Pengelolaan Jaringan Irigasi	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	1).Operasi Jaringan Irigasi (41 D.I) 2). Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (41 D.I) 3). Dokumen PAI dan AKNPI (7 dokumen): - D.I. Semoyo, D.I. Kuton, D.I. Dadapan dan D.I. Sidoraharjo - D.I. Pulodadi dan D.I. Glendongan - D.I. Klampok dan D.I. Sekarsuli - D.I. Nologaten, D.I. Ngebruk dan D.I. Bangeran - D.I. Cokrobedog - D.I. Tumut, D.I. Mojo dan D.I. Sembuh - D.I. Pogong, D.I. Minggiran, D.I. Mendungan dan D.I. Mergangan 4). Koordinasi Tata Pengaturan SDA (150 Masyarakat P3A/GP3A/IP3A) 5). Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi (41 D.I) 6). Pengadaan Patok Hektometer & Papan Larangan 7). Operasional Komisi Irigasi DIY & Operasional Sekretariat	Mempertahankan fungsi jaringan irigasi primer/sekunder pada 13.987 Ha lahan pertanian basah untuk menambah luasan Daerah Irigasi yang terlayani/luasan total daerah Irigasi kewenangan Propinsi sebesar 1.5 %	Dukungan sebesar 100% untuk mempertahankan Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 82.5 %	100 %	Rp. 14.111.550.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
1.03.1.03.01.00.17.002	Pengelolaan Air Baku	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	1. Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi (64 Pos Hidrologi & Data Kualitas Air) 2. Pemeliharaan Embung/Telaga (21 embung) 3. Kampanye Pengelolaan SDA 4. Pengelolaan Data SDA 5. Pengadaan alat ukur	Mempertahankan suply air baku di DIY sebesar 168.000 m3	Dukungan mempertahankan air baku sebesar 48% dari total sebesar 1800 ltr/det	100 %	Rp. 9.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
1.03.1.03.01.00.18	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL								Rp. 24.420.975.000,00	Rp. 24.811.129.000,00				
1.03.1.03.01.00.18.001	Pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah Regional	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Perkotaan Yogyakarta	1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	10 Ha	Dukungan 100% untuk mempertahankan pengelolaan sampah ramah lingkungan sebesar 450 ton/hari	100%	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)						
					2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	1 unit								
					3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase	1, 2 Km								
					4. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	5 unit								
					5. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	2 unit								
					6. Operasi dan Pemeliharaan TPST	1 unit								
					7. Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA	35 orang								
					8. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA	1 tahun								
					9. Pengadaan Alat Fogging	1 unit								
1.03.1.03.01.00.18.002	Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum Regional	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Perkotaan Yogyakarta	1. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake	1 unit	Dukungan 100% untuk mempertahankan distribusi air curah 400 lt/dt	100%	Rp. 8.206.164.000,00	Rp. 8.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					2. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi	1 unit								
					3. Operasi dan Pemeliharaan IPA	2 unit								
					4. Operasi dan Pemeliharaan Reservoir	3 unit								
					5. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan	40 Km								
					6. Penyediaan Tenaga Bantu Operasi dan Pemeliharaan SPAM	50 unit								
					7. Pengadaan Alat Laboratorium Air Minum	10 unit								
					8. Operasi dan Pemeliharaan ME	15 unit								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)						
					9. Pengadaan alat bengkel dan Alat Komunikasi Radio VHF (HT)	10 unit dan 1 set								
1.03.1.03.01.00.18.003	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota)	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Sewon	1. Terpeliharanya peralatan IPAL	68 unit	Dukungan 100% pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air limbah Terpusat untuk Mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 21.000 SR	100%	Rp. 2.211.129.000,00	Rp. 2.211.129.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					2. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	(BOD Max 75 mg/ltr)								
					3. Pemantauan dan Pekngendalian kualitas Udara	NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm								
					4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	Coliform Max10.000 JPT/100ml								
					5. Pemantauan dan Pengendalian kualitas Unsur Dalam Sludge	bebas B3								
					6. Penyediaan Tenaga Bantu Operasional IPAL	14 orang								
					7. Pemeliharaan Jalan dan Drainase	1 tahun								
					8. Pengadaan Alat Laboratorium	1 unit								
1.03.1.03.01.00.18.004	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Perkotaan Yogyakarta	1. Updating Peta dan Profil Jaringan Air Limbah	(1 dokumen)	Dukungan 100% Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat untuk mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 21.000 SR	100%	Rp. 2.876.610.000,00	Rp. 2.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan air limbah	(234 km)								
					3. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	(bebas B3)								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM									Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	(Coliform Max 50 JPT/100 ml)						
					5. Pengadaan Alat Laboratorium	(2 unit)						
1.03.1.03.01.00.18.005	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Sewon	1. Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja	(PH 6-9)	Dukungan 100% Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat dan IPLT untuk mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 21.000 SR	100%	Rp. 1.127.072.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					2.Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	(BOD Max 75 mg/ltr)						
					3. Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	1 unit						
					4. Pengadaan Pompa Submersible	2 unit						
					5.Pengadaan Alat Laboratorium	1 unit						
1.03.1.03.01.00.19	PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI								Rp. 4.207.097.000,00	Rp. 5.045.550.000,00		
1.03.1.03.01.00.19.001	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	6.Pembangunan Wilayah	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Mampu Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Terlaksananya inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi	1 Laporan	Dukungan sebesar 38,5% terhadap pelayanan jasa pengujian dan pembinaan jasa konstruksi	100%	Rp. 1.620.000.000,00	Rp. 1.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi	120 Orang						
					Terlaksananya pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi	1 Laporan						
					Terlaksananya penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan	12 Laporan						
					Terlaksananya rapat koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi	120 Orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)						
					Tersedianya Peraga Multimedia Bidang Ke-PU-an sebagai materi layanan Klinik Konstruksi	1 Peraga								
					Terselenggaranya fasilitasi sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	300 Orang								
					Terselenggaranya forum sosialisasi/ pembinaan jasa konstruksi	80 Orang								
					Terselenggaranya pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	100 Orang								
					Terselenggaranya Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi Ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi	1 Laporan								
1.03.1.03.01.00.19.002	Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi	6.Pembangunan Wilayah	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Mampu Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Dipertahankannya jumlah parameter terakreditasi	34 parameter	Dukungan sebesar 61,50% terhadap program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	100%	Rp. 2.587.097.000,00	Rp. 3.295.550.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga pendukung laboratorium	8 orang								
					Terlaksananya pengujian kualitas mutu air dan kualitas bahan bangunan	800 LHU								
					Tersedianya alat-alat laboratorium yang terkalibrasi	42 alat								
					Tersedianya alat-alat laboratorium yang terpelihara	42 alat								
					Tersedianya alat-alat penunjang laboratorium sebagai sarana dan prasarana pengujian	1 paket								
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											
1.04.1.03.01.00.15	PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH								Rp. 53.353.632.000,00	Rp. 70.600.000.000,00		
1.04.1.03.01.00.15.001	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Terlaksananya penanganan Rumah Tidak layak Huni di Prawirodirjan dan Pandeyan (36 unit)	36 unit	Tertanganinya Rumah Tidak layak Huni di Prawirodirjan dan Pandeyan (36 unit)	100 %	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Terlaksananya verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak layak Huni di Gedangsari (699 unit)	699 unit	Terverifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni di Gedangsari	100 %				
					Terlaksananya verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak layak Huni di Kokap (442 unit)	442 unit	Terverifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni di Kokap	100 %				
					Terlaksananya Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni untuk usulan BSPS	5000 unit	Terverifikasinya 5000 unit rumah tidak layak huni sebagai usulan pelaksanaan BSPS	5000 unit				
1.04.1.03.01.00.15.002	Peningkatan Kualitas Perumahan/Permukiman Kumuh	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Penanganan PSU kawasan kumuh di Kabupaten Bantul (Kecamatan Sewon)	11,71 ha	Terlaksananya Verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni di Depok (116 Unit) dan Ngaglik (42 Unit)	100 %	Rp. 32.553.632.000,00	Rp. 50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Penanganan PSU Kawasan Kumuh di Kabupaten Sleman (Kecamatan Ngaglik dan Depok)	23,07 Ha	Terlaksananya Verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni di Wirobrajan dan Gondomanan (167 unit)	100 %				
					Penanganan PSU kawasan kumuh di Kota Yogyakarta (Kecamatan Wirobrajan)	10,17 Ha	Tertanganinya PSU kawasan kumuh di Kabupaten Bantul (Kecamatan Sewon)	100 %				
					Terlaksananya Verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni di Depok (116 Unit) dan Ngaglik (42 Unit)	158 unit	Tertanganinya PSU Kawasan Kumuh di Kabupaten Sleman (Kecamatan Ngaglik dan Depok)	100 %				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM									Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Terlaksananya Verifikasi dan tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni di Wirobrajan dan Gondomanan (167 unit)	167 unit	Tertanganinya PSU kawasan kumuh di Kota Yogyakarta (Kecamatan Wirobrajan)	100 %				
1.04.1.03.01.00.15.003	Perencanaan Perumahan di Kawasan Pertumbuhan Baru	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen	Terlaksananya monitoring dan evaluasi (monev) perumahan dan kawasan permukiman	100 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Tersusunnya dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) di kawasan TOD	2 dokumen	Tersedianya dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) di kawasan TOD	100 %				
1.04.1.03.01.00.16	PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN								Rp. 72.100.000.000,00	Rp. 0,00		
1.04.1.03.01.00.16.001	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Pengadaan Tanah untuk IPA dan INTAKE	15000 m2	Penambahan jumlah penduduk yang mendapat akses air minum melalui sistem perpipaan sebanyak 120.000 jiwa dari SPAM Regional Kartamantul dan 8.000 jiwa dari SPAMdes	100%	Rp. 59.100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Terbangunnya sebagian Jaringan Distribusi SPAM Regional Kartamantul menuju Kota Yogyakarta dan Kabupaten	Debit sebesar 400 l/dt						
					Tersedianya pipa dan accesories SPAMDES untuk forum PAMASKARTA DIY	Debit sebesar 10 l/dt						
					Tersusunnya 1 (satu) Dokumen AMDAL Kapet kamijoro	1 (satu) dokumen						
					Tersusunnya 1 (satu) Dokumen Analisa Data Air Minum dan Sanitasi di DIY	1 (satu) dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM										Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04.1.03.01.00.16.004	Penyelenggaraan PSU Permukiman	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Penanganan PSU permukiman pada 78 titik	78 titik	Dukungan PSU permukiman di 55 titik	100%	Rp. 11.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.04.1.03.01.00.16.005	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Rehabilitasi VIP Room dan bangunan Penunjang Bandara Adisucipto	460 m2	Dukungan 100% Rehabilitasi VIP Room Bandara Adisucipto	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2	Pilihan											
2.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
2.05.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											
2.05.1.03.01.00.15	PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI, AIR TANAH, GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN								Rp. 30.080.370.000,00	Rp. 23.500.000.000,00		
2.05.1.03.01.00.15.001	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Penyusunan DED Listrik Pedesaan di GK	1 paket	Dukungan terhadap peningkatan persentase penduduk berakses energi	100%	Rp. 18.075.370.000,00	Rp. 21.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Sumbangan SR KK miskin di Gedangsari dan Saptosari	1.182 SR						
					Sumbangan SR miskin di KP	42 SR						
					Terbangunnya jaringan listrik pedesaan di GK	12 dusun						
					Terbangunnya jaringan listrik pedesaan di hargowilis Kulonprogo	1 lokasi						
					Tersusunnya master plan penyediaan jaringan listrik di kawasan Pantai Selatan	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM										Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.05.1.03.01.00.15.002	Pengaturan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Audit Energi	1 dok	Dukungan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan energi	100%	Rp. 1.830.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Kelaikan dan Keselamatan Kerja Instalasi Tenaga Listrik pada Pasar Tradisional di DIY	1 dok						
					Pengaturan dan Pembinaan pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	1 lap						
					Penyusunan Draft Raperda RUED DIY	1 dok						
					Penyusunan Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Energi di DIY	1 dok						
					Review RUKD	1 dok						
2.05.1.03.01.00.15.003	Pendayagunaan Air Tanah dan Geologi	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	Cekungan Air Tanah di DIY	Identifikasi Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen	Dukungan pendayagunaan terhadap pengelolaan air tanah	100%	Rp. 4.710.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Identifikasi Daerah Sulit Air di Kabupaten Kulonprogo	1 dokumen						
					Identifikasi Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman dan Bantul	1 dokumen						
					Penyusunan SID Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam	1 dokumen						
					Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam di Daerah Sulit Air (Bantul)	4 unit						
					Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam di Daerah Sulit Air (Gunungkidul)	4 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2.05.1.03.01.00.15.004	Pengaturan dan Pengusahaan Air Tanah dan Geologi	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	DIY	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	1 laporan	Dukungan data dan informasi rerata muka air tanah di cekungan air tanah dari CAT di DIY dalam rangka pengelolaan air tanah	100%	Rp. 3.070.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Pembangunan sumur resapan air	160 unit								
					Pembuatan sumur pantau air tanah dalam	3 unit								
					Pengaturan dan Pembinaan pelaksanaan pengelolaan air tanah	1 laporan								
					Pengaturan Pelaksanaan dewatering sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah di CAT Yogyakarta - Sleman	1 Dokumen								
					Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya geologi	1 dokumen								
					Penyusunan Zona Perlindungan Sumber Air Tanah di CAT Yogyakarta - Sleman	1 dokumen								
					Perbaikan/Pemeliharaan awlr dan sumur pantau air tanah dalam	1 paket								
					Sistem informasi hidrogeologi	1 dokumen								
2.05.1.03.01.00.15.005	Pengaturan dan Pengusahaan Pertambangan	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	DIY	Evaluasi upaya peningkatan nilai tambah mineral bukan logam dan batuan	1 Dokumen	Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral	100%	Rp. 1.045.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Pedoman pemberian rekomendasi Penggunaan bahan peledak pada kegiatan usaha pertambangan di DIY	1 Dokumen								
					Pengadaan Alat Cetak Peta/Plotter peta (WIUP/IUP OP)	1 Paket								
					Pengaturan dan Pembinaan pelaksanaan Usaha Pertambangan	1 Laporan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
					Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Pengelolaan Mineral dan Batuan di DIY.	4 Laporan								
					Updating Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY	1 Dokumen								
2.05.1.03.01.00.15.006	Peningkatan Usaha Pertambangan	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	DIY	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan	1 Laporan	Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral	100%	Rp. 1.350.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Optimalisasi pusat data layanan pertambangan terintegrasi	1 Dokumen								
					Pemeliharaan pusat data layanan pertambangan terintegrasi	1 Paket								
					Penyusunan Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Pertambangan di DIY	1 Dokumen								
					Penyusunan laporan eksplorasi lanjut pada WPR Emas di Kecamatan Kokap melalui pemboran inti	1 Dokumen								
2.05.1.03.01.00.16	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI, GEOLOGI, AIR TANAH DAN PERTAMBANGAN								Rp. 3.898.000.000,00	Rp. 0,00				
2.05.1.03.01.00.16.001	Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	DIY	Operasional Pengawasan Inspektur Tambang	1 Laporan	Peningkatan ijin usaha pertambangan yang baik dan benar	100%	Rp. 1.400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		
					Pengawasan dan Pengendalian usaha pertambangan	4 Laporan								
2.05.1.03.01.00.16.002	Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah dan Geologi	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	Cekungan air tanah di DIY	Pengadaan alat pengawasan air tanah (flowmeter dan water level sounding)	4 set	Dukungan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan sesuai dengan ketentuan	100%	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Jumlah Pagu : Rp. 361.837.981.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah	4 laporan						
2.05.1.03.01.00.16.003	Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan	5.Infrastruktur	2.2.3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Mampu mengurangi Ketimpangan	DIY	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	4 Laporan	Peningkatan ijin ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan	100 %	Rp. 1.248.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
					Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit EBT	1 Laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.1.05.01.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											
1.03.1.05.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.350.000.000,00	Rp. 1.465.000.000,00		
1.03.1.05.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat tulis kantor	52 jenis	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kenyamanan pelayanan administrasi perkantoran Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (arsip dinamis) terpenuhi	45,16%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 465.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis						
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan	Roda 4 6 unit; Roda 2 6 unit						
					Kebersihan gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1600 m2						
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 jenis						
					Naskah Arsip Dinamis SKPD	Terpeliharanya naskah arsip dinamis SKPD						
					Pembayaran tagihan rekening air	12 bulan						
					Pembayaran tagihan rekening internet	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
					Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
					Pengiriman dokumen	680 dokumen						
					Peralatan rumah tangga	5 jenis						
					Surat kabar	3 jenis						
					Surat keluar	860 surat						
					Surat masuk	970 surat						
1.03.1.05.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Bukti pembayaran kepegawaian	1 org/12 bulan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kenyamanan dan keamanan kantor	25,81%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Bukti pembayaran pengelola barang/pengurus barang pengguna	15 org/12 bulan						
					Bukti pembayaran pengelola keuangan	21 org/12 bulan						
					Bukti pembayaran perencanaan program	2 org/12 bulan						
					Tersedianya jasa keamanan kantor	4 org/12 bulan						
1.03.1.05.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	-konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	29,03 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					-konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan						
					-makan dan minum sidang	1300 os						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang									Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.1.05.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 2.895.000.000,00		
1.03.1.05.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen perencanaan gedung kantor	1 DED	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Unit gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit						
1.03.1.05.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pengadaan dan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan perkantoran terpenuhi	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.05.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan pemeliharaan taman	1600 m2	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor dan taman/tanaman) terpenuhi	100%	Rp. 120.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.05.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit	Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (pemeliharaan kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 270.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	6 unit						
1.03.1.05.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan perkantoran	5 jenis	Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (pemeliharaan peralatan perlengkapan perkantoran) terpenuhi	100%	Rp. 80.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.1.05.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 335.000.000,00	Rp. 310.000.000,00		
1.03.1.05.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	- Bahan LKJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2017	1 Laporan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	8,82 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					- LKJIP SKPD Tahun 2017	Nilai LKJIP B						
1.03.1.05.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan keuangan Bulanan	12 bulan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	8,82 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Laporan keuangan semester	2 laporan						
					Laporan keuangan tahunan gabungan	1 laporan						
					Laporan keuangan triwulan	4 laporan						
1.03.1.05.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	- Renstra	1 Dokumen	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	73,53 %	Rp. 225.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					DPA 2019	1 Dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang										Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					DPA-P 2018	1 Dokumen						
					Renja	1 Dokumen						
					RKA	1 Dokumen						
					RKA-P	1 Dokumen						
					Sistem Informasi Dinas PTR	1 Aplikasi						
1.03.1.05.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	1 Dokumen Laporan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	8,82 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.05.01.00.06.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	34,39 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.05.01.00.20	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN								Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00		
1.03.1.05.01.00.20.001	Layanan administrasi Pertanahan	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Pelayanan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya pelayanan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya layanan administrasi pertanahan di DIY	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.05.01.00.21	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG								Rp. 400.000.000,00	Rp. 500.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang									Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.1.05.01.00.21.002	Pembinaan Penataan Ruang	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Pembinaan teknis penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten	Terlaksananya pembinaan teknis penyusunan RTR Kabupaten untuk fasilitasi percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten	Terselenggaranya pembinaan teknis penyusunan RTR ke Kabupaten/Kota	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang						
					Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Terlaksananya sosialisasi rencana tata ruang						
1.03.1.05.01.00.23	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG								Rp. 1.530.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00		
1.03.1.05.01.00.23.001	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Penyusunan dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis untuk mendorong perwujudan rencana tata ruang	Tersusunnya 1 dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis untuk mendorong perwujudan rencana tata ruang	Tersusunnya dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis untuk mendorong perwujudan rencana tata ruang	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.05.01.00.23.002	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Monitoring dan evaluasi rekomendasi pemanfaatan ruang.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi rekomendasi pemanfaatan ruang yang sudah dikeluarkan di DIY.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang di DIY	100%	Rp. 1.180.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Operasionalisasi PPNS Penataan Ruang;	Terlaksananya Operasionalisasi PPNS Penataan Ruang di DIY						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang									Jumlah Pagu : Rp. 5.565.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengawasan pemanfaatan ruang di DIY;	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang di DIY						
					Penyusunan instrumen pengendalian tentang insentif dan disinsentif;	Tersusunnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang						
					Perumusan rencana tindak lanjut (action plan) penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY;	Tersusunnya rencana tindak lanjut (action plan) penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 14.817.478.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.20	STATISTIK											
1.20.1.06.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
1.20.1.06.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH								Rp. 1.261.753.500,00	Rp. 1.500.000.000,00		
1.20.1.06.01.00.15.001	Pengelolaan Data Dan Statistik Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS 2019 sebanyak 50 eksemplar Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS 2019 sebanyak 50 eksemplar Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS 2019 sebanyak 50 eksemplar	Tersedianya 3 jenis data untuk mendukung perencanaan	Dukungan Persentase Kelengkapan Data Perencanaan Yang Tersedia sebesar 98%	100%	Rp. 411.753.500,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.06.01.00.15.002	Penyajian dan Informasi Data Statistik	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Penyelenggaraan Forum Data Update Aplikasi Jogjadataku Penyelenggaraan Simpul Jaringan Update Aplikasi Meta Data Spasial	Terwujudnya update Aplikasi Jogjadataku & Aplikasi Meta Data Spasial, dan terselenggaranya forum datadan simpul jaringan 100% tepat waktu	Dukungan terhadap pemenuhan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Rp. 850.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.04	PERENCANAAN											
4.04.1.06.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
4.04.1.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 2.118.913.500,00	Rp. 2.270.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 14.817.478.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.04.1.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : - Surat keluar - Surat Masuk - Pengiriman Dokumen - Benda Pos 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Pembayaran tagihan rekening Telepon 12 Bulan - Pembayaran Tagihan rekening listrik: 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : - Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY dan BSD 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor : - Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : - Barang Cetak - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 9. Bahan bacaan dan Perundang-undangan : - surat kabar : 6 Jenis - Buku Ilmu Pengetahuan Umum - Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi 10. Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: - Penataan Arsip - Penilaian dan Penyusutan arsip	100%	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 935.271.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan 12 bulan	100%	Dukungan 7,69% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 70.026.500,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyediaan Makanan dan minuman rapat 12 bulan 2. Pelaksanaan koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya 12 bulan	100%	Dukungan 7,69% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.113.616.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 931.092.350,00	Rp. 920.000.000,00		
4.04.1.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	erlaksananya pengadaan: LCD 2 buah, screen, rak besi,AC, kulkas, televisi radyo, komputer	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 37,50% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 177.282.350,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 14.817.478.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.04.1.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Gedung Kantor Terpelihara	1 unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi	100%	Rp. 280.000.000,00	Rp. 290.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional : 1. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 2. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	2 jenis	Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional) terpenuhi	100%	Rp. 345.870.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1. Jaringan Komputer & Internet (1 paket) 2. Generator Set (1 unit) 3. Komputer PC (50 unit) 4. Printer (25 unit) 5. Komputer Note Book (15 unit) 6. Mesin Tik Manual (15 unit) 7. LCD proyektor (6 unit) 8. Sound System (4 unit) 9. Faksimile (2 unit) 10. CCTV (1 unit) 11. AC Split (52 unit) 12. AC Floor Standing (4 unit) 13. Tabung Pemadam Kebakaran (6 bh) 14. Almari besi (15 bh) 15. Filling Cabinet 16 bh) 16. Meja Kursi Tamu (3 Set)	16 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	100%	Rp. 127.940.000,00	Rp. 130.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 568.689.425,00	Rp. 269.000.000,00		
4.04.1.06.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Laporan Kinerja BAPPEDA (1 dokumen)	Nilai LKJIP A	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 18.200.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan selama 12 bulan	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 37.400.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 14.817.478.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.04.1.06.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Rencana Kerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda sejumlah 8 dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 378.652.725,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Dokumen laporan movev BAPPEDA sejumlah 1 dokumen	Tersusunnya laporan movev BAPPEDA 100% tepat waktu	Dukung terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 17.501.700,00	Rp. 29.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.06.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu - Penilaian Angka Kredit - Penerbitan Journal	2 kali 1 kali	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 100%	100%	Rp. 116.935.000,00	Rp. 180.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								Rp. 2.927.406.000,00	Rp. 2.500.000.000,00		
4.04.1.06.01.00.15.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	1.Dokumen Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Konsultasi Publik 2.Dokumen Rancangan RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Musrenbang 3.Dokumen Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Pembahasan dengan Tim TAPD 4.Dokumen Penetapan RKPD DIY Tahun 2019 Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2019 5. Dokumen Rancangan Perubahan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2018 6. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2018 7. Dokumen Penetapan Perubahan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2018 Sejumlah 200 Eksemplar 8. Hasil Musrenbang Sejumlah 1 Dokumen 9. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan DIY Terhadap Prioritas, Sasaran, dan Target Pembangunan Regional (Jawa-Bali) Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen 10. Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 Sejumlah 1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Gubernur RKPD DIY Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2019, 100% Tepat Waktu	Dukungan Terhadap Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan sebesar	100%	Rp. 1.883.239.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 14.817.478.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.04.1.06.01.00.15.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2019 Sebagai Bahan Penghantaran di DPRD sejumlah 200 eks Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2019 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD sejumlah 250 eks Dokumen Penghantaran KUPA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Pembahasan di DPRD sejumlah 200 eks Dokumen Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD-Perubahan 2018 sejumlah 250 eks Dokumen Roadmap Tematik, sejumlah 50 Eksemplar	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS Tahun 2019 dan KUPA-PPAS Tahun 2018, 100% tepat waktu	Dukungan 18,58 % Terhadap Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan sebesar 98 %	100%	Rp. 366.222.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.15.003	Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD	1 dokumen	Dukungan 46,45% Terhadap Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan sebesar 98 %	100%	Rp. 677.945.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN								Rp. 825.964.000,00	Rp. 430.000.000,00		
4.04.1.06.01.00.16.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 2.Dokumen Hasil Movev Sektor pertanian dan kelautan (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018)	1 dokumen 1 dokumen	Dukungan 52,78% Terhadap Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Perekonomian Sebesar 95%	100%	Rp. 191.165.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.16.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sejumlah 2.Dokumen Hasil Movev Sektor Dunia Usaha(Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) Sejumlah 3. Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (n+2)	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Dukungan sebesar 42,22% terhadap Terwujudnya Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Perekonomian dan Isu Strategis Pembangunan 95%	100%	Rp. 596.719.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 14.817.478.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.04.1.06.01.00.16.003	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi	1 dokumen	Dukungan 52,78% Terhadap Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Perekonomian Sebesar 95%	100%	Rp. 38.080.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA								Rp. 1.643.452.500,00	Rp. 1.900.000.000,00		
4.04.1.06.01.00.17.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor SDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor SDM (Antara Pusat, DIY dan Kabupaten/Kota) Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid SDM Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan 41,25% terhadap Terwujudnya Persentase Keselarasan Target Sasaran Pembangunan Sosial Budaya dan Isu Strategis sebesar 95%	100%	Rp. 172.960.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.17.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Kesra Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 sejumlah 1 Dokumen Dokumen Hasil Monev Sektor Pengembangan Kesra Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018 sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid Kesra Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan sebesar 47,89 % terhadap Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 95 %	100%	Rp. 715.135.000,00	Rp. 850.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.17.003	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Budaya	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev SektorBudaya (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota) Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) Sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub bidang budaya Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan sebesar 8,25 % terhadap Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 95 %	100%	Rp. 104.149.500,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.17.004	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY sebagai bahan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 Dokumen Evaluasi RAD SDGs DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan untuk mencapai target RAD SDGs DIY Tahun 2019	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Subbid Kesra Sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan sebesar 47,89 % terhadap Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 95 %	100%	Rp. 651.208.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 14.817.478.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.04.1.06.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA								Rp. 1.405.493.725,00	Rp. 133.000.000,00		
4.04.1.06.01.00.18.001	Penataan Ruang Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan BKPRD DIY Dokumen rekomendasi kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang	2 dokumen 1 dokumen	Dukungan 27,66% terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana dan prasarana (RPJMD)	100%	Rp. 371.384.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.18.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan PTP dan ESDM	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 2.Dokumen Hasil Movev Sektor PTP ESDM (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) 3. Dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan sarana prasarana (n+2)	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Dukungan 60,53% terhadap terwujudnya Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras dan Isu Strategis Pembangunan Sebesar 95%	100%	Rp. 710.146.850,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.18.003	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA dan LH	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2018 2.Dokumen Hasil Movev Sektor sarpras (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018)	1 dokumen 1 dokumen	Dukungan sebesar 32.89 % % terhadap Terwujudnya Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras dan Isu Strategis Pembangunan 95 %	100%	Rp. 191.208.375,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.18.004	PEP RAD Gas Rumah Kaca	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 dokumen	Dukungan sebesar 32.89 % % terhadap terwujudnya Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras dan Isu Strategis Pembangunan 95 %	100%	Rp. 132.754.500,00	Rp. 13.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.1.06.01.00.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN								Rp. 938.105.000,00	Rp. 1.200.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah **Jumlah Pagu : Rp. 14.817.478.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)						
4.04.1.06.01.00.19.001	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	1 .Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sejumlah 1 Dokumen 2. Dokumen Hasil Monev Sektor Pemerintahan Umum (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPd dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPd dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) Sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev Sub Bidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan sebesar 50% terhadap Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	100%	Rp. 704.377.500,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan		
4.04.1.06.01.00.19.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun 2018 Sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Administrasi Publik (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPd dan KUA-PPAS) Tahun 2019 dan Perubahan (RKPd dan KUPA-PPAS) Tahun 2018) Sejumlah 1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang administrasi publik Sebagai Bahan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2019, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun 2018 100% Tepat Waktu	Dukungan sebesar 50% terhadap Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	100%	Rp. 233.727.500,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan		
4.04.1.06.01.00.20	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH								Rp. 2.196.608.000,00	Rp. 2.600.000.000,00				
4.04.1.06.01.00.20.001	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/2017 dan TW I-III/2018 (340 buku) 2. Buku panduan pelaksanaan APBD tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2019 (120 buku) 3. Laporan hasil evaluasi RPJMD DIY s.d. 2017 (80 buku), RKPd DIY (140 buku), Renstra SKPD DIY s.d. 2017 (70 buku), Renja SKPD DIY (140 buku), RPJMD Kab/Kota th.2017 (25 buku), RKPd Kab/Kota (25 buku) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan	1.Pelaksanaan pembangunan daerah tepat waktu sesuai target dan berkualitas 2. Panduan APBD digunakan SKPD untuk panduan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019 3. 6 dokumen hasil evaluasi tersusun tepat waktu, sebagai bahan perencanaan/pelaksanaan pemb	Dukungan 50% terhadap capaian kinerja fisik dan keuangan	100%	Rp. 1.574.030.800,00	Rp. 1.900.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan		
					4. Upgrade fitur dan menu pada e Monev APBN dan sistem E Monev APBD (2 aplikasi) 5. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018	4. 2 aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel 5. Hasil evaluasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan & perencanaan yang lebih baik								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					Jumlah Pagu : Rp. 14.817.478.000,00									
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)					(12)	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4.04.1.06.01.00.20.002	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2017 (150 eks) sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 2. Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2017 (150 eks) sesuai dengan Permenpan 53/2014 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2017 (60 eks) sesuai dengan Permenpan 53/2014 4. Laporan Penilaian Capaian Kinerja PA/KPA TW IV (2017) dan TW I-III (2018) (340 eks)	1. Penghantaran LKPJ oleh Gubernur tepat waktu. 2. Penghantaran LKj ke Pemerintah Pusat tepat waktu. 3. Penghantaran PK Gubernur ke Pemerintah Pusat tepat waktu. 4. Penilaian capaian kinerja PA/KPA terlaksana tepat waktu.	Dukungan 50% terhadap capaian kinerja fisik dan keuangan	100%	Rp. 622.577.200,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan		
					5. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota (100 eks) 6. Laporan Kinerja APBN TW IV (2017) dan TW I-III (2018) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks)	5. Tersampainya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4Kab/1Kota Tahun 2016 sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Kab/Kota. 6. Tersampainya laporan kinerja APBN								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan										Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.15	PERHUBUNGAN											
1.15.1.07.01.00	Dinas Perhubungan											
1.15.1.07.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 5.183.204.625,00	Rp. 5.235.904.972,00		
1.15.1.07.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 2.001.715.625,00	Rp. 2.193.674.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas: 35 jenis Trans: 53 jenis						
					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6 jenis						
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas: a) 12 cetakan b) 13 penggandaan dan penjilidan Trans: a) 23 cetakan b) 8 penggandaan						
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Induk : 12 bulan Trans : 12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan										Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas: 1) Kendaraan Roda 2 : 19 unit 2) kendaraan Roda 4 : 14 unit Trans: 1) Kendaraan Roda 2 : 1 unit 2) kendaraan Roda 4 : 4 unit						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Induk : 12 bulan Trans : 12 bulan						
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis						
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas: 14 jenis Trans: 13 jenis						
1.15.1.07.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	45 orang	Rp. 2.681.489.000,00	Rp. 3.042.230.972,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	Dinas : 23 orang/12 bulan Trans: 14 orang/12 bulan						
					Tenaga Kerja Pendukung	45 orang						
1.15.1.07.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Makan dan Minum Sidang	Dinas: 5.750 orang Trans: 2.500 orang						
1.15.1.07.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 1.312.671.950,00	Rp. 1.399.600.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan										Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.15.1.07.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat-Alat Studio (Soundsystem)	1 paket	Kebutuhan Prasarana Aparatur (Peralatan Gedung Kantor) Terpenuhi	100%	Rp. 158.489.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.15.1.07.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan Gedung kantor, ATCS, Gedung Arsip dan Guest House beserta lingkungannya	3.330 m2	Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Gedung Kantor Dinas) Terpenuhi	100%	Rp. 291.355.350,00	Rp. 450.490.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.15.1.07.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dinas:	1) Kendaraan Roda 2 : 20 unit 2) Kendaraan Roda 4 : 14 unit	Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Kendaraan Dinas/Operasional) Terpenuhi	100%	Rp. 681.928.000,00	Rp. 750.120.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Trans Jogja:	1) Kendaraan Roda 2 : 1 unit 2) kendaraan Roda 4 : 4 unit						
1.15.1.07.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan LAN	12 bulan	Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Perlengkapan Gedung Kantor) Terpenuhi	100%	Rp. 180.899.600,00	Rp. 198.990.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan										Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pemeliharaan Peralatan Kantor (8 Jenis)	Dinas : 1. Mesin Ketik Manual : 20 unit 2. Camera : 5 unit 3. Komputer (PC, monitor, printer, scanner) : 17 unit 4. Notebook : 14 unit 5. LCD : 3 unit 6. Telpon dan faximile : 15 unit 7. VHF Repeater : 1 unit 8. Radio Komunikasi VHF : 20 unit Trans : 1. K						
					Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (7 jenis)	Dinas : 1. Sound system, kipas angin, wireless : 5 unit 2. AC : 31 unit 3. Alat Pemadam kebakaran portable : 33 unit 4. Hydrant alat Pemadam kebakaran : 1 unit 5. Meja : 20 unit 6. Kursi : 30 unit Trans : 1. AC : 4 unit						
1.15.1.07.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 359.300.000,00	Rp. 362.837.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan										Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.15.1.07.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	LAKIP	1 dokumen	Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 17.500.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					LKJ	1 dokumen						
1.15.1.07.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Keuangan Bulanan	1 dokumen	Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100%	Rp. 42.000.000,00	Rp. 45.708.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Laporan Keuangan Semester	1 dokumen						
					Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen						
					Laporan Keuangan Triwulan	1 dokumen						
1.15.1.07.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	DPA 2019	1 dokumen	Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Program Kegiatan SKPD	100%	Rp. 278.300.000,00	Rp. 273.229.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					DPA-P 2018	1 dokumen						
					Rencana Kerja Dishub 2019	1 dokumen						
					Rencana Strategis Dishub 2018-2022	1 dokumen						
					ROPK Dishub Tahun 2018	1 dokumen						
Sistem Informasi (Pengembangan Sistem Informasi)	1 kegiatan											
1.15.1.07.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 dokumen	Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100%	Rp. 24.000.000,00	Rp. 26.400.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.15.1.07.01.00.15	PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI								Rp. 3.221.444.075,00	Rp. 10.708.733.001,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan										Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.15.1.07.01.00.15.001	Perencanaan Keselamatan Fasilitas Jalan	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Evaluasi Kinerja Keselamatan Jaringan Jalan Provinsi	1 dokumen	Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Keselamatan Jalan	100%	Rp. 512.944.500,00	Rp. 1,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Perencanaan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan	1 dokumen						
1.15.1.07.01.00.15.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Pemasangan APJ Tenaga Surya	24 unit	Fasilitas Keselamatan lalu lintas berfungsi baik	100%	Rp. 1.964.713.575,00	Rp. 10.055.371.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Pemeliharaan APILL	60 lokasi						
					Pemeliharaan Early Warning System	12 bulan						
					Pemeliharaan Penjagaan sentral pelayanan gangguan APILL	12 bulan						
					Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	200 buah						
					Pemeliharaan Warning Light	26 lokasi						
					Pengecatan Tiang APILL	56 lokasi						
					Perawatan LPJ	34 unit						
					Rehab Berat APILL	4 lokasi						
1.15.1.07.01.00.15.003	Pelaksanaan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu-Lintas	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Angkutan Lebaran	16 hari	Dukungan 11% terhadap menurunnya angka kecelakaan	100%	Rp. 743.786.000,00	Rp. 653.362.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Angkutan Liburan	15 hari						
					Angkutan Natal dan Tahun Baru	8 hari						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan										Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang	Pengendalian Disiplin LLAJ sebagai dukungan terhadap menurunnya potensi kecelakaan LL yang disebabkan oleh pelanggaran kendaraan bermotor wajib uji sebesar 100 kendaraan						
1.15.1.07.01.00.16	PENINGKATAN PELAYANAN ANGGUTAN								Rp. 132.949.011.350,00	Rp. 12.942.253.400,00		
1.15.1.07.01.00.16.001	Penyelenggaraan Angkutan Umum Buy The Service	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perkotaan Yogyakarta	Appraisal Bus Trans Jogja	1 dokumen	Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY sebesar 21.100 penumpang/hari	100%	Rp. 130.449.011.350,00	Rp. 12.317.253.400,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Konsultansi Perhitungan BOK	1 dokumen						
					Operasional Trans Jogja	17 jalur 167 armada						
					Outsourcing Jasa Petugas Olah Data Trans Jogja	12 bulan						
					Outsourcing Petugas Pengawas Pendapatan	12 bulan						
					Outsourcing Tenaga Kerja Halte Trans Jogja	12 bulan						
					Pelaksanaan Kebersihan Halte	112 lokasi						
					Pembangunan Halte Desain Baru	10 lokasi						
					Pemeliharaan Halte (112 lokasi)	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan										Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pemeliharaan SMTS Halte (112 unit) dan SMTS On Bus (115 unit)	12 bulan						
					Pengadaan CCTV	167 unit						
					Pengadaan Telepon	80 unit						
					Pengadaan Tiket Berlangganan Trans Jogja	10.000 unit						
1.15.1.07.01.00.16.002	Perencanaan dan Evaluasi Angkutan Umum/ Massal	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Business Plan Pengembangan Park and Ride Gamping	1 dokumen	Dukungan 100% pengaturan terhadap peningkatan kualitas layanan angkutan umum di DIY	100%	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 625.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Business Plan Pengembangan Terminal Jombor	1 dokumen						
					Business Plan Perkeretaapian DIY	1 dokumen						
					Evaluasi Tertib Perizinan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek	850 kendaraan						
					Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP dan Perbatasan	1 dokumen						
					Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi	1 dokumen						
					Laporan Evaluasi kinerja Angkutan Trans Jogja	1 dokumen						
					Review Perencanaan Angkutan Barang	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan										Jumlah Pagu : Rp. 145.823.948.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.15.1.07.01.00.17	PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS								Rp. 1.124.500.000,00	Rp. 0,00		
1.15.1.07.01.00.17.002	Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu-Lintas	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS TS	1 paket	Dukungan Penerapan Manajemen Lalu Lintas Berbasis Kawasan	100%	Rp. 1.124.500.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Pengadaan Sarana Manajemen Lalu Lintas pada Kawasan Prioritas	1. Road barrier : 20 buah 2. Traffic Cone : 20 buah						
					Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di Perkotaan	1 dokumen						
1.15.1.07.01.00.18	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI								Rp. 1.673.816.000,00	Rp. 1.924.927.000,00		
1.15.1.07.01.00.18.001	Penyelenggaraan Terminal Type B	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Mlati Wates Sinduadi Wates	Pengelolaan Terminal Tipe B 2 Terminal (Jombor dan Wates)	2 Terminal	Dukungan sebesar 100% untuk mempertahankan operasional terminal tipe B di DIY	100%	Rp. 1.673.816.000,00	Rp. 1.924.927.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup									Jumlah Pagu : Rp. 8.898.130.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.11	LINGKUNGAN HIDUP											
1.11.1.08.01.00	Badan Lingkungan Hidup											
1.11.1.08.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.148.130.000,00	Rp. 1.840.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup									Jumlah Pagu : Rp. 8.898.130.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.1.08.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	1. Terkelolanya surat masuk 1000 surat 2. Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat 3. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan 4. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 14 unit (roda empat 8 unit dan roda dua 6 unit) 5. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan 6. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 5 jenis/96.192 m2 7. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor 2 kali 8. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 21 jenis 9. Terlaksananya pengadaan barang cetakan 11 jenis 10. Terlaksananya penggandaan/foto copy 100.000 lembar 11. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 jenis 12. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 21 jenis 13. Terlaksananya penataan arsip 12 m2 14. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box	Kelancaran Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	Dukungan sebesar 60% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 567.987.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup									Jumlah Pagu : Rp. 8.898.130.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.1.08.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	1. Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD BLH DIY 12 bulan 2. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian SKPD BLH DIY 12 bulan 3. Tersedianya jasa keamanan kantor SKPD BLH DIY 12 bulan	Kelancaran Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Keamanan Kantor	Dukungan sebesar 15% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 280.143.000,00	Rp. 440.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	1. Tersedianya makan dan minum rapat 3.500 orang 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan	Kelancaran Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Program/ Kegiatan 2018	Dukungan sebesar 15% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 620.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00		
1.11.1.08.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 Jenis	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperlukan	Dukungan sebesar 10% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup									Jumlah Pagu : Rp. 8.898.130.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.1.08.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	Terpeliharanya Gedung Kantor 18 jenis	Kenyamanan Ruang Tempat Kerja bagi Pegawai	Dukungan sebesar 20% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	100%	Rp. 110.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	Perawatan kendaraan dinas operasional 14 unit (roda empat 8 unit dan roda dua 6 unit)	Kelancaran Mobilitas Pelaksanaan Tugas SKPD	Dukungan sebesar 20% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 30 jenis	Kelancaran Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dukungan sebesar 15% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup									Jumlah Pagu : Rp. 8.898.130.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.1.08.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 205.000.000,00	Rp. 265.000.000,00		
1.11.1.08.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	1. Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2017 1 laporan 2. LAKIP Th 2017 1 laporan	Ketersediaan Laporan Kinerja SKPD Tahun 2018	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	1. Laporan Keuangan Bulanan 12 laporan 2. Laporan Keuangan triwulan 4 laporan 3. Laporan Keuangan Semester 2 laporan 4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 1 laporan	Ketersediaan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2018	Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup									Jumlah Pagu : Rp. 8.898.130.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.1.08.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	1. Tersusunnya Renstra BLH 2018-2022 1 dokumen 2. Tersusunnya Renja BLH 2019 1 dokumen 3. Tersusunnya RKA Th 2019 dan DPA Th 2019 2 dokumen 4. Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPA-P Th 2019 2 dokumen 5. Tersusunnya ROPK 2018 1 dokumen	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Tahun 2019	Dukungan sebesar 23,7% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 12 dokumen	Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja dengan Program Kegiatan BLH sebesar 100%	Dukungan sebesar 52,13% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.15	PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP								Rp. 1.979.332.000,00	Rp. 2.450.000.000,00		
1.11.1.08.01.00.15.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	6.Pembangunan Wilayah	Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	1. Penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY : 1 laporan IKLH 2. Inventarisasi Gas Rumah Kaca : 1 data GRK 3. Penyusunan SLHD/IKPLHD : laporan dan data SLHD/IKPLHD 4. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan JJS : 1 dokumen	Tersedianya kajian dan data lingkungan	Dukungan terhadap penataan lingkungan hidup	100%	Rp. 929.332.000,00	Rp. 1.050.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup									Jumlah Pagu : Rp. 8.898.130.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.1.08.01.00.15.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	6.Pembangunan Wilayah	Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	1. Tindak lanjut pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk selama 12 bulan 2. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan 15 kegiatan/ usaha 3. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan 40 perusahaan 4. Terlaksananya pengkajian dokumen lingkungan selama 12 bulan 5. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan	Terlayannya proses ijin lingkungan dan pengawasannya	Dukungan terhadap penataan dan penegakan hukum lingkungan	100%	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 1.400.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN								Rp. 2.350.000.000,00	Rp. 2.550.000.000,00		
1.11.1.08.01.00.16.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	6.Pembangunan Wilayah	Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	1. Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air 2 Jenis (air sungai, air laut), dan koordinasi/pembinaan pengelolaan limbah B3 2. Pemantauan dan evaluasi Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) 3. Gerakan bersih sungai	Tersedianya data kualitas air sebanyak 2 jenis dan kualitas udara sebanyak 1 jenis	Dukungan terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	Rp. 850.000.000,00	Rp. 950.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.16.002	Pengendalian Perusakan Lingkungan	6.Pembangunan Wilayah	Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pesisir 2 kawasan	Terkelolanya pengelolaan sampah dan limbah sebanyak 2 kawasan di pesisir	Dukungan terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP								Rp. 1.870.668.000,00	Rp. 2.600.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup									Jumlah Pagu : Rp. 8.898.130.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.11.1.08.01.00.17.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	6.Pembangunan Wilayah	Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH sebanyak 4 penghargaan:Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, Adiwiyata, Proklam, Kalpataru : terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan di 5 kab/kota	Terseleksinya calon penerima penghargaan LH	Dukungan terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	Rp. 1.020.668.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.17.002	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	6.Pembangunan Wilayah	Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY	Mendukung tersedianya data kualitas lingkungan	Dukungan terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	Rp. 850.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.11.1.08.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN TUTUPAN HUTAN DAN VEGETASI								Rp. 725.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00		
1.11.1.08.01.00.18.002	Peningkatan tutupan vegetasi	6.Pembangunan Wilayah	Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	1. Penanaman pohon perindang di Jalan provinsi (2 Km) 2. Pemeliharaan Wanadesa dan Telagadesa (30 Wanadesa dan 4 Tlagadesa) 3. Koordinasi dan Monitoring data tutupan vegetasi	Penambahan tutupan vegetasi dan 5 kriteria (hutan pemerintah, hutan rakyat, perkebunan, RTH, dan Kebun campuran)	Dukungan terhadap target 30 % tutupan vegetasi dan Tersusunnya updating data tutupan vegetasi	100%	Rp. 725.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1.08.1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											
1.08.1.11.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.206.060.000,00	Rp. 1.305.000.000,00		
1.08.1.11.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Instruktur Senam Kesegaran Jasmani 1 Tahun	Administrasi perkantoran yang sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 49,08% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 621.190.000,00	Rp. 650.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid 5 jenis							
					17 Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					42 Jenis Alat Tulis Kantor							
					64.657 lembar Penggandaan							
					8 Jenis Barang Cetak							
					Bukti pembayaran pajak/STNK 8 Unit Kendaraan Roda 4							
					Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2							
					Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7 Jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kebersihan 2 Gedung (3.653 m2)							
					Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik 12 Bulan							
					Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD 1 Tahun							
					Penyediaan Jasa Surat Menyuirat 8500 surat masuk, 2.475 surat keluar,							
1.08.1.11.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja 11 orang pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 26,93% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 337.048.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Kinerja 2 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Kinerja 9 orang jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.08.1.11.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 23,99 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 247.822.000,00	Rp. 305.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.08.1.11.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 764.547.000,00	Rp. 977.000.000,00		
1.08.1.11.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Perengkapan dan peralatan ruang laktasi 1 paket	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 1,14% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 397.945.000,00	Rp. 580.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Perengkapan sesuai RKBMD: Perengkapan sesuai RKBMD: 3 jenis (Komputer, UPS, Printer)							
1.08.1.11.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Gedung kantor sesuai RKBMD: 1 gedung (RDU: 517 m2) ; 2 Jasa Pindahan	Terpelihara rumah dan gedung 100%	Dukungan 33,22% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 140.000.000,00	Rp. 155.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
1.08.1.11.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM 10 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 48,35% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 217.402.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM 9 unit							
1.08.1.11.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan Peralatan Kantor (27 Unit AC dan 2 Unit Pompa Air)	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 4,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 9.200.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.08.1.11.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 141.263.000,00	Rp. 260.000.000,00		
1.08.1.11.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKjIP : A	Dukungan 5,92% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 12.537.000,00	Rp. 16.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
1.08.1.11.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 10,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 27.455.000,00	Rp. 29.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
1.08.1.11.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022	Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY dan informasi pendukung 100%	Dukungan 89,38% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 92.995.000,00	Rp. 205.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen)							
					Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Dokumen draft ROPK, PK, Renja dan SBK (4 dokumen)							
					Pengelolaan Website selama 1 tahun							
1.08.1.11.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 5,20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.276.000,00	Rp. 10.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
1.08.1.11.01.00.15	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								Rp. 920.631.000,00	Rp. 1.450.000.000,00		
1.08.1.11.01.00.15.001	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan anak	4.Sosial Budaya	1.1.2.Meningkatkan Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat.	DIY	Penguatan kelembagaan perempuan dan fasilitasi peringatan hari besar perempuan untuk mendukung kesetaraan gender	55 organisasi	Kemandirian Organisasi perempuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan mendukung terhadap Pembinaan Organisasi Perempuan 55 Organisasi dari 386 menjadi 441 organisasi.	100%	Rp. 448.871.000,00	Rp. 650.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
1.08.1.11.01.00.15.002	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi	4.Sosial Budaya	1.1.2.Meningkatkan Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat.	Dlingo Gedang sari Imogiri Jetis Kokap Ngawen Nglipar Sapto sari Semin Sentolo	Pembinaan Desa Prima	70 desa prima	Pembinaan Desa Prima menuju kelompok usaha mandiri	100%	Rp. 471.760.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.									Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.08.1.11.01.00.16	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK								Rp. 1.430.583.000,00	Rp. 1.623.000.000,00		
1.08.1.11.01.00.16.001	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	4.Sosial Budaya	1.1.2.Meningkatkan Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat.	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	fasilitasi forum perlindungan korban kekerasan	1 forum	terfasilitasinya forum FPKK dan P2TPA (RDU)	100%	Rp. 774.055.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak Korban kekerasan dan integrasi P2TPA	1 lembaga						
1.08.1.11.01.00.16.002	Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak	4.Sosial Budaya	1.1.2.Meningkatkan Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat.	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Profil Pemenuhan Hak Anak	1 dokumen	Menunjang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan evaluasi serta pengambilan kebijakan	100%	Rp. 256.120.000,00	Rp. 323.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Update Data Gender dan Anak	1 dokumen						
					Update Data Perlindungan Perempuan dan Anak	1 dokumen						
1.08.1.11.01.00.16.003	Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak	4.Sosial Budaya	1.1.2.Meningkatkan Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat.	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Fasilitasi forum anak daerah	1 forum	Terfasilitasinya forum anak daerah	100%	Rp. 400.408.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
1.13.1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											
1.13.1.11.01.00.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								Rp. 2.997.371.000,00	Rp. 2.300.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.13.1.11.01.00.18.002	Penguatan lembaga Kemasyarakatan	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Evaluasi Desa/Kelurahan (Lomba Desa/Kelurahan)	1 kali	terfasilitasinya pelaksanaan TMMD	100%	Rp. 2.997.371.000,00	Rp. 2.300.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Fasilitasi TMMD	15 lokasi	Terfasilitasinya TP PKK DIY	100%				
					Pencanangan BBGRM & HKG PKK TK Provinsi	1 kali	Terselenggaranya BBGRM dan HKG PKK tk. Prov	100%				
					Penguatan TP PKK	1 organisasi						
1.13.1.11.01.00.19	KEBERDAYAAN MASYARAKAT								Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00		
1.13.1.11.01.00.19.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa/Kelurahan	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model Saemaul Undong (SU)	2 desa	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan mengedepankan semangat gotong-royong	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Pembinaan Kelompok Masyarakat desa melalui model Segara Amarta	6 kelurahan						
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
1.14.1.11.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											
1.14.1.11.01.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK								Rp. 250.210.000,00	Rp. 300.000.000,00		
1.14.1.11.01.00.17.002	Peningkatan kesehatan reproduksi	4.Sosial Budaya	1.1.2.Meningkatkan Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat.	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	FAasilitasi FPKRR	1 forum	Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	100%	Rp. 250.210.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										Jumlah Pagu : Rp. 8.862.151.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pendidikan kespro remaja	5 angkatan	Meningkatnya pengetahuan tentang pengendalian penduduk	100%				
					Sosialisasi program pengendalian penduduk	3 angkatan	terfasilitasinya forum kesehatan reproduksi remaja	100%				
1.14.1.11.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								Rp. 251.486.000,00	Rp. 300.000.000,00		
1.14.1.11.01.00.19.002	Peningkatan Ketahanan Keluarga	4.Sosial Budaya	1.1.2.Meningkatkan Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat.	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Fasilitasi Konsultasi Keluarga di tingkat desa/kecamatan	5 Desa	Adanya MOU pembekalan caten	100%	Rp. 251.486.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Sedang Berjalan
					Advokasi sistem pembekalan Caten Terpadu	1 MoU	Lembaga konseling keluarga aktif	100%				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial									Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.06	SOSIAL											
1.06.1.13.01.00	Dinas Sosial											
1.06.1.13.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 14.639.106.319,00	Rp. 16.900.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kir roda 2 dan 4 1 tahun	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 11.450.658.143,00	Rp. 13.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Pembayaran Pajak STNK roda 2, 3, dan 4 1 tahun							
					Pembayaran tagihan internet Dinas dan UPTD 12 bulan							
					Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan UPTD 12 bulan							
					Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan UPTD 12 bulan							
					Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan UPTD 12 bulan							
					Pengiriman/ Paket DInas dan UPTD 1 tahun							
					Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan UPTD 1 tahun							
					Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Dinas dan UPTD 1 tahun							
					Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan UPTD 1 tahun							
					Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan UPTD 1 tahun							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial									Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penyediaan logistik kantor dan logistik klien UPTD 1 tahun							
					Penyediaan Materai 3000 Dinas dan UPTD 1 tahun							
					Penyediaan Materai 6000 Dinas dan UPTD 1 tahun							
					Penyediaan Surat kabar lokal dan Majalah untuk Dinas dan UPTD 1 tahun							
1.06.1.13.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan UPTD 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.819.664.676,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Tertanganinya arsip tekstual Dinas dan UPTD 1 tahun							
					Tertib administrasi keuangan, barang dan kepegawaian Dinas dan UPTD 12 bulan							
1.06.1.13.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan UPTD 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 368.783.500,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas 1 tahun							
					Makanan dan Minuman rapat/ sidang/ tamu 1 tahun							
1.06.1.13.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 1.758.626.800,00	Rp. 2.350.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan Gedung Kantor pada dinas sosial dan 6 balai	Terpeliharanya bangunan gedung kantor 100%	Dukungan %terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 429.412.600,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial										Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.13.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Servis kendaraan, penggantian suku cadang dan BBM roda 2 dan roda 4 pada DINAS SOSIAL DAN 6 BALAI	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan % terhadap sarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 930.726.200,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.13.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan kantor dinas dan balai	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 398.488.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.13.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								Rp. 16.067.000,00	Rp. 20.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.05.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Pembinaan pekerja sosial dan penilaian angka kredit	Terlaksananya penilaian angka pekerja sosial sebanyak 100%	dukungan terhadap peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur (peksos) bertambah/ meningkat dan kenaikan pangkat serta penyesuaian jabatan menurut angka kredit	100%	Rp. 16.067.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.13.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 133.477.950,00	Rp. 132.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan domuken perencanaan	Nilai LKjIP : A	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 11.668.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.13.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.131.000,00	Rp. 17.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial									Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.13.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen draft RKA-DPA (2 dokumen)		Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja	100%	Rp. 91.693.950,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Dokumen draft RKAP-DPPA 2 dokumen							
					Dokumen draft ROPK, PK, Renja dan SBK (4 dokumen)							
					Pengelolaan Website selama 1 tahun							
					Pengembangan sistem informasi Panti BRSBKL	Rancangan dokumen perencanaan dan pengelolaan web						
1.06.1.13.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD 1 dokumen	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 13.985.000,00	Rp. 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.13.01.00.15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								Rp. 4.219.893.525,00	Rp. 8.500.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.15.001	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Asistensi keluarga penyandang disabilitas (50 orang)	Anak bermasalah sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penyandang Disabilitas mampu hidup normatif serta Anak bermasalah Sosial Dapat Dilayani, Dilindungi, Direhabilitasi, Direferal dan Reunifikasi	100%	Rp. 1.470.950.100,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Bimbingan Sosial Pelayanan dan perlindungan Anak Jalanan dan Referal Anak serta Bimbingan Sosial Anak jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial (20 anak)	penyandang disabilitas dan keluarga mempunyai keterampilan berusaha						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial									Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Family Gathering Penyandang Disabilitas (360 orang)							
					Komite Disabilitas	pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai undang-undang/perda/pergub disabilitas						
					Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang disabilitas eks ODGJ dan orang tua (30 orang)							
					Pengasramaan Murid SLB (50 anak)							
					Pengembangan Usaha Mandiri Penyandang Disabilitas (20 orang)							
					Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis LKSA (15 anak)							
					Perlindungan bagi anak disabilitas melalui LKS (10 anak)							
					Rekomendasi adopsi (20 anak)							
1.06.1.13.01.00.15.002	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Assesment dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan, pengemis, pemulung di camp assesment sebanyak 150 orang;		Gelandangan, pengemis, pemulung, ODHA, KTK dan Korban perdagangan Orang mendapatkan perlindungan sosial dan pemenuhan perlindungan dasar.	100%	Rp. 2.748.943.425,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Institusi penerima wajib lapor yang dimonev (5 lembaga)	Tuna Sosial mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan IPWL termonitoring dengan baik						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial									Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pemulangan PMKS ke daerah asal, rujukan ke Tim Reaksi Cepat kemensos atau panti sosial/ balai rehabilitasi sebanyak 100 orang							
					Terlindunginya Korban Tindak kekerasan dan Korban perdagangan orang (25 orang)							
1.06.1.13.01.00.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								Rp. 4.197.314.500,00	Rp. 5.800.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Bantuan penguatan kelembagaan lansia untuk 1 lembaga	lanjut usia terlantar terjamin kebutuhan dasarnya.	Kebijakan / Masukan kepada Gubernur untuk lanjut usia	100%	Rp. 1.281.416.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Bantuan permakanan lanjut usia terIntar untuk 50 orang							
					Fasilitasi lanjut usia melalui homecare untuk 600 orang							
					Pelayanan harian lanjut usia melalui taman wreda untuk 50 orang							
					Pemberian bantuan jaminan sosial lanjut usia untuk 500 orang							
					Peringatan HLUN dan bhakti sosial 2018							
					Rancangan Pergub Lanjut Usia							
1.06.1.13.01.00.16.002	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Fasilitasi perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar (25 org)	Korban Bencana tertangani	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100%	Rp. 560.135.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Memfasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan (1 tahun)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial									Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana Kekeringan (500 tanki)							
1.06.1.13.01.00.16.003	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Bantuan UEP PKH (tematik kemiskinan)	Penanganan Fakir miskin di 5 Kab/ Kota terkoordinasi dan tepat sasaran	Penanganan Fakir miskin di 5 Kab/ Kota terkoordinasi dan tepat sasaran	100%	Rp. 2.355.763.500,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Pendampingan dan Koordinasi Penyaluran bantuan pangan/ Rastra di 5 Kab/Kota							
					Pendampingan dan Koordinasi UEP PKH di 5 Kab/ Kota							
					UEP PKH melalui BKK							
1.06.1.13.01.00.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS								Rp. 1.632.960.177,00	Rp. 2.500.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.17.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas (165 org) serta jaminan sosial bagi warga disabilitas (20 Org) pada BRTPD	pelayanan perlindungan dan rehabilitasi medik / sosial serta pemberian keterampilan terhadap warga binaan balai sesuai standar	penyandang disabilitas dan warga disabilitas mendapatkan rehabilitasi medik/sosial, dan keterampilan	100%	Rp. 1.632.960.177,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.13.01.00.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL								Rp. 839.369.269,00	Rp. 1.000.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.18.001	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Perlindungan, rehabilitasi sosial dan keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (wanita yang berpotensi menjadi wanita tuna susila) sebanyak 60 orang di Balai PRSW	pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial serta pemberian keterampilan terhadap warga binaan balai sesuai standar	Perempuan rawan sosial ekonomi mendapatkan perlindungan, dan rehabilitasi sosial,dan keterampilan	100%	Rp. 839.369.269,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial									Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.13.01.00.19	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK								Rp. 723.062.111,00	Rp. 1.000.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.19.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Rehabilitasi mental, sosial dan pelatihan keterampilan bagi Gelandangan dan pengemis (50 Orang), dan perlindungan dan rehabilitasi mental, sosial bagi penderita eks psikotik (250 Orang) di Balai RSBKL	pelayanan perlindungan dan rahabilitasi mental sosial serta pemberian keterampilan terhadap warga binaan balai sesuai standar	Gelandangan, pengemis dan eks psikotik mendapatkan, dan rehabilitasi sosial,dan pendidikan/keterampilan	100%	Rp. 723.062.111,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.13.01.00.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL								Rp. 757.875.081,00	Rp. 1.000.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.20.001	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	pembinaan mental sosial dan pendidikan/keterampilan dan memberikan perlindungan dan rahabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (80 anak) di Balai PRSR	pelayanan perlindungan dan rahabilitasi sosial serta pemenuhan pendidikan/keterampilan terhadap warga binaan balai sesuai standar	anak remaja putus sekolah, Anak Berhadapan Hukum mendapatkan perlindungan, dan rehabilitasi sosial,dan pendidikan/keterampilan	100%	Rp. 757.875.081,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.13.01.00.21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL								Rp. 1.155.777.106,00	Rp. 1.500.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial									Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.1.13.01.00.21.001	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Perlindungan dan pengasuhan bagi anak balita terlantar (25 Anak), pembinaan dan perlindungan anak terlantar usia sekolah (80 Anak) dan Perlindungan, rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (35 Anak) di Balai RPSA	pelayanan perlindungan, pengasuhan, rehabilitasi mental sosial serta pendidikan terhadap warga binaan balai sesuai standar	Balita terlantar, anak terlantar dan anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosia	100%	Rp. 1.155.777.106,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.13.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR								Rp. 633.860.662,00	Rp. 1.500.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.22.001	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar (214 orang) di Balai PSTW	Perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar (214 orang) di Balai PSTW	Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan balai	100%	Rp. 633.860.662,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.13.01.00.23	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN								Rp. 3.506.059.500,00	Rp. 7.000.000.000,00		
1.06.1.13.01.00.23.001	Penguatan Partisipasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Bimbingan teknologi dasar pekerja sosial	PSKS berpartisipasi dalam pembangunan kesos	Meningkatnya penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	Rp. 1.610.235.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Dialog interaktif PUB dan UGB dengan sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat (50 org)							
					Kemah bakti karangtaruna (250 org)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial									Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penguatan potensi sumber kesejahteraan sosial IPSM, Pengurus Karang taruna, TKSK, WKSBM, forum orsos (tksk 78, wksbm 100, orosos 40, KT 90, IPSM 100)							
					Pertemuan NGO asing, mitra lokal dan pemerintah							
					Seleksi prestasi dan penghargaan prestasi PSKS							
					workshop CSR kesos DIY dengan stakeholder							
1.06.1.13.01.00.23.002	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Keluarga Pahlawanan (7 org)	Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/TMP, Monumen dan Tetenger serta kesejahteraan keluarga pahlawan	100%	Rp. 618.090.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Pemeliharaan TMP, Monumen dan Tetenger							
					Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Kesetiakwanan Sosial nasional	meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/ TMP, Monumen dan Tetenger						
1.06.1.13.01.00.23.003	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Dinas Sosial	Kampanye sosial penyandang disabilitas (450 org)	Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial optimal	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan PMKS serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	100%	Rp. 1.277.734.500,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Pengumpulan data PMKS dan PSKS pada 438 Desa							
					Penyuluhan melalui media peragaan (15 lok)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial									Jumlah Pagu : Rp. 34.213.450.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat (200 org)							
					Penyuluhan sosial melalui media cetak (16 paket)							
					Penyuluhan sosial melalui media elektronik (10 paket)							
					Penyuluhan Sosial Tingkat Desa (20 lokasi)							
					Sosialisasi Program penanganan PMKS (20 lok)							
					Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial (300 org)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.									Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.07	TENAGA KERJA											
1.07.1.14.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											
1.07.1.14.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 2.967.882.700,00	Rp. 3.125.261.528,00		
1.07.1.14.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat tulis kantor 50 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung keancaran tugas dan fungsi SKPD	52.23%	Rp. 1.653.859.000,00	Rp. 1.699.350.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Barang cetakan 38 jenis							
					Barang logistic kantor 4 jenis/62 buah							
					Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan 12 bulan							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2:47 unit							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4: 15 unit							
					Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6: 2 unit							
					Bukti pembayaran retribusi sampah 12 Bulan							
					Kebersihan gedung kantor 6 gedung							
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 44 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)
					Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid 2 jenis, 12 bulan								
					Pembayaran tagihan rekening telepon,listrik,air dan internet 12 bulan (1 dinas induk, 2 UPTD)								
					Pemilahan arsip keuangan in aktif 5600 berkas								
					Penggandaan 50000 lembar								
					Pengiriman dokumen 600 dokumen								
					Penjilidan 390 buku								
					Penyusutan arsip keuangan 4500 berkas								
					Peralatan rumah tangga 71 jenis, 841 buah								
					Surat Keluar 1200 lembar								
					Surat Masuk 800 lembar								
1.07.1.14.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja 28 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	"Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%"	Dukungan terhadap Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	37,72 %	Rp. 1.004.236.500,00	Rp. 1.068.573.328,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan	
					Kinerja 31 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					Kinerja 5 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku									
					Kinerja 7 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku									
1.07.1.14.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah terlaksana baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	15,05%	Rp. 309.787.200,00	Rp. 357.338.200,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan		
					Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun									
1.07.1.14.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 1.197.595.700,00	Rp. 1.292.015.000,00				
1.07.1.14.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan sesuai RKBMD 14 jenis	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%"	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	30.75%	Rp. 112.000.000,00	Rp. 112.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan		
					Perlengkapan sesuai RKBMD 19 jenis									
1.07.1.14.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor 13 jenis	Terpeliharanya rumah dan gedung 100%	Dukungan 23,11% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 285.740.700,00	Rp. 365.080.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan		
1.07.1.14.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sesuai RKBMD 47 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	12,48%	Rp. 594.825.000,00	Rp. 594.825.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.									Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sesuai RKPBM 16 unit							
					Kendaraan Dinas Operasional roda 6 sesuai RKPBM 2 unit							
1.07.1.14.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Mebeleur 10 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 25,03% terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 205.030.000,00	Rp. 220.110.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Peralatan kantor sesuai RKPBM 21 jenis							
					Perlengkapan sesuai RKPBM 22 jenis							
1.07.1.14.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								Rp. 119.915.500,00	Rp. 145.620.000,00		
1.07.1.14.01.00.05.001	Pengembangan I S O	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Iso 17025 Tahun 2005 1 sertifikat	Kualitas manajemen layanan sesuai standar mutu	Dukungan 87,79% terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Rp. 119.915.500,00	Rp. 145.620.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Surveillance ISO 9001:2015 2 sertifikat							
1.07.1.14.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 587.876.500,00	Rp. 728.677.500,00		
1.07.1.14.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintsh (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2018	Nilai LAKIP dari 78.57 menjadi 79.00	Dukungan 2.95% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 21.500.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.										Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.07.1.14.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program 29 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan 3.79% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 27.588.000,00	Rp. 27.588.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	"Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan ROPK 2018 "	Rancangan Renstra untuk lampiran keputusan Gubernur tentang Penetapan Renstra 2018-2022	Dukungan 81.37% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja	100%	Rp. 466.630.000,00	Rp. 592.530.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA 2019							
					Dokumen Perencanaan Renstra 2018-2022 dan Renja 2018							
1.07.1.14.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 11.89% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 61.400.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.06.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Penilaian angka kredit jabatan fungsional 1. Pengawas ketenagakerjaan 2 orang 2. Instruktur 38 orang 3. Litkayasa 2 orang"	Kelancaran jenjang karier jabatan fungsional	Dukungan 12,21% terhadap peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Rp. 22.158.500,00	Rp. 22.159.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.15	PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN								Rp. 1.298.454.000,00	Rp. 1.298.454.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.										Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.07.1.14.01.00.15.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Sertifikasi Uji Kompetensi	500 orang	Dukungan ...% terhadap Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	100%	Rp. 677.836.000,00	Rp. 677.836.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.15.002	Pemagangan Tenaga Kerja	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Meningkatnya kesiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang 40orang	Tenaga kerja mempunyai kemampuan praktek kerja diperusahaan (on the job training).	Dukungan 1,9% terhadap persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	100%	Rp. 555.284.000,00	Rp. 555.284.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja 50 orang							
1.07.1.14.01.00.15.003	Pembinaan Lembaga Pelatihan	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Lembaga pelatihan yang terstandarisasi	85 lembaga	Terstandarisasinya lembaga pelatihan 85 lembaga	100%	Rp. 65.334.000,00	Rp. 65.334.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.16	PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI								Rp. 4.358.791.800,00	Rp. 4.498.113.800,00		
1.07.1.14.01.00.16.001	Pengurangan Pengangguran Melalui Padat Karya Infrastruktur	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	terlaksananya kegiatan pembuatan/perbaikan sarana infrastruktur masyarakat melalui sistem padat karya	15 paket (@30 pekerja, 6 tukang batu, 2 kepala tukang)	terlaksananya kegiatan pembuatan/perbaikan sarana infrastruktur masyarakat melalui sistem padat karya 570 orang	100%	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.16.002	Penempatan Tenaga Kerja	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Penempatan tenaga kerja	1000 orang	Tercapainya penempatan kerja sebanyak 1000 orang	100%	Rp. 364.887.000,00	Rp. 364.887.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.16.003	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Informasi kesempatan kerja	3.000 lowongan	Dukungan ... % terhadap persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	100%	Rp. 361.225.000,00	Rp. 393.595.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.										Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.07.1.14.01.00.16.004	Pembentukan Kesempatan Kerja	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Pola Kemitraan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) sebanyak 50 orang	10 Kelompok	Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Pola Kemitraan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) sebanyak 50 orang	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.16.005	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pelatihan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas	6 paket @ 5 orang di kabupaten Bantul dan Gunungkidul	Terbentuknya wirausaha baru bagi penyandang disabilitasn sebanyak 30 orang	100%	Rp. 360.000.000,00	Rp. 360.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.16.006	Pembinaan Lembaga Penempatan	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pemantauan tentang aturan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI, pelaksanaan bursa kerja dan penempatan tenaga kerja	104 BKK dan 27 PPTKIS	Dukungan 36,65% terhadap Program Peningkatan Mutu Lembaga Ketenagakerjaan	100%	Rp. 98.117.500,00	Rp. 102.487.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.16.007	Penyelenggaraan Transmigrasi	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Penyelenggaraan Transmigrasi 40 KK/5 daerah	Tenaga kerja bekerja mandiri	Dukungan 25.47 % terhadap Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	100%	Rp. 1.174.562.300,00	Rp. 1.277.144.300,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.17	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL								Rp. 661.004.800,00	Rp. 657.004.800,00		
1.07.1.14.01.00.17.001	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pemantauan tentang pengupahan	200 perusahaan	Terlaksananya pemantauan pengupahan terhadap 200 perusahaan dan penetapan upah minimum sektor (Pergub)	100%	Rp. 334.545.000,00	Rp. 330.502.400,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Penetapan Upah Minimum Provinsi	Peraturan Gubernur						
1.07.1.14.01.00.17.002	Pembinaan Hubungan Industrial	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pemantauan tentang hubungan industrial	95 Perusahaan	Dukungan 49.99% terhadap Prosentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	100%	Rp. 326.459.800,00	Rp. 326.502.400,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.18	PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN								Rp. 505.848.000,00	Rp. 505.848.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.									Jumlah Pagu : Rp. 18.485.369.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.07.1.14.01.00.18.001	Pemeriksaan dan Pengawasan K3	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	650 perusahaan	Dukungan ...% terhadap persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang norma kerja dan K3	100%	Rp. 423.145.000,00	Rp. 436.270.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.18.002	Pembinaan Norma Kerja	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	650 perusahaan	Perusahaan melaksanakan norma kerja	100%	Rp. 82.703.000,00	Rp. 69.578.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.07.1.14.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								Rp. 6.050.000.000,00	Rp. 6.050.000.000,00		
1.07.1.14.01.00.19.001	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pelatihan institusional bagi pencari kerja	10 paket @ 20 orang	Dukungan ...% terhadap prosentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	100%	Rp. 6.050.000.000,00	Rp. 6.050.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Pelatihan MTU (Mobile Training Unit) bagi pencari kerja	40 paket @ 20 orang						
1.07.1.14.01.00.20	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA								Rp. 738.000.000,00	Rp. 800.000.000,00		
1.07.1.14.01.00.20.001	Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Hiperkes dan KK	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Pengangguran	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan Besar, Menengah dan UMKM	610 orang (Besar dan Menengah), 500 orang (UMKM)	Dukungan 2.95 % terhadap persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang horma kerja dan K3	100%	Rp. 738.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
					Laporan hasil Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan besar menengah dan UMKM	70 UMKM dan 45 perusahaan menengah, besar						
					Sertifikasi Hiperkes dan KK	420 peserta lulus						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah										Jumlah Pagu : Rp. 5.449.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH											
1.17.1.15.01.00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah											
1.17.1.15.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.144.000.000,00	Rp. 1.975.000.000,00		
1.17.1.15.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat Tulis Kantor 20 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
					Barang Cetak dan Penggandaan 7 Jenis							
					Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4 18 unit							
					Buku Perpustakaan 10 jenis "							
					Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan							
					Komponen Instalasi Listrik 10 jenis							
					Pembayaran Listrik 2951 Kwh 1 tahun							
					Pembayaran Telpon 3 sambungan 1 tahun							
					Pengelolaan arsip dinamis 3 jenis							
					Penggandaan dan jilid 50.000 lembar							
					Pengiriman dokumen 10 surat							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah										Jumlah Pagu : Rp. 5.449.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Peralatan Rumah Tangga 13 jenis							
					Retribusi Sampah 1 tahun							
					Sambungan Line Telpon baru 1 line							
					Surat Kabar 2 jenis							
					Surat Keluar 4000 surat							
					Surat Masuk 3000 surat							
1.17.1.15.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. bukti pembayaran jasa administrasi kepegawaian 2 orang/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 544.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
					2. bukti pembayaran jasa administrasi keuangan 10 orang/bulan							
					3. bukti pembayaran Jasa penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja 1 orang/bulan							
					4. Jasa keamanan kantor/tempat kerja 12 bulan							
					5. Jasa Tenaga Outsourcing 10 org 12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah										Jumlah Pagu : Rp. 5.449.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.17.1.15.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Makan dan Minuman Rapat 1440 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
					Perjalanan Dalam Daerah 12 bulan							
					Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan							
1.17.1.15.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 2.150.000.000,00	Rp. 200.000.000,00		
1.17.1.15.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Rehab Gedung Induk 1 unit	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar Saprpras 100%	Dukungan 33,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.15.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2) 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 33,33% terhadap saprpras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.15.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Peralatan gedung kantor terpelihara 5 jenis "	Terpelihara Peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap saprpras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah										Jumlah Pagu : Rp. 5.449.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					2. Perlengkapan gedung kantor terpelihara 6 jenis							
1.17.1.15.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 100.000.000,00	Rp. 200.000.000,00		
1.17.1.15.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKJIP : A	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.15.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 14 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 3%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.15.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku "	Dokumen perencanaan SKPD TA. 2019 dan perubahan TA. 2018	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah										Jumlah Pagu : Rp. 5.449.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.17.1.15.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 14 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
1.17.1.15.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM								Rp. 1.055.000.000,00	Rp. 1.055.000.000,00		
1.17.1.15.01.00.15.001	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Baru	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Program 01-06	Desa Preneur di Desa Kanigoro,Kepek (perak, kayu dan jahit)2 akt @20 Pelaku UMKM dan Desa Tegalrejo (produksi Bordir, batik, batu, mebel, makanan olahan dan bambu) 2 akt x 20 Pelaku usaha	4 akt @20 Pelaku UMKM	Peningkatan nilai omzet UKM tahun 2017 ke 2018 sebesar 4%	100%	Rp. 1.055.000.000,00	Rp. 1.055.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
					Kampung Preneur (5 Akt x 20 orang) di pringgokusuman, prawirodirjan, pandeyan, prenggan, gedongkiwo	(5 Akt x 20 orang)						
					Penumbuhan Wirausaha baru di Desa Muntuk, Kec. Dlingo 2 akt @ 20 orang.(Pelaku UMKM Produk Bambu)	2 akt @ 20 orang						
1.17.1.15.01.00.16	PROGRAM PENGUATAN SDM DAN KELEMBAGAAN KOPERASI								Rp. 550.000.000,00	Rp. 560.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah										Jumlah Pagu : Rp. 5.449.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.17.1.15.01.00.16.001	Pembinaan Perkoperasian	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	pelayanan dekopin 7 Bidang (Organisasi dan Keanggotaan; Pendidikan, Pelatihan, dan Kelembagaan; Advokasi dan Sosialisasi; Ketahanan Pangan Industri dan Perdagangan; Permodalan dan Jasa Keuangan; Kemaritiman; Pengkajian Strategis Pengembangan Koperasi)	7 bidang	Peningkatan nilai omzet koperasi produksi dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 2%	100%	Rp. 550.000.000,00	Rp. 560.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
					Pendampingan, pelatihan, dan promosi/pemasaran produk koperasi 8 koperasi	8 koperasi						
					Pengetahuan dan pemahaman bagi pelaku koperasi terkait koperasi baru meningkat sejumlah 30 koperasi (semula 70 menjadi 100 koperasi)	30 koperasi						
1.17.1.15.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN								Rp. 200.000.000,00	Rp. 4.200.000.000,00		
1.17.1.15.01.00.17.001	Pembinaan Manajemen Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Dinas Koperasi dan UMKM	Dana bergulir	40 koperasi	Peningkatan rasio omzet koperasi dan UKM terhadap jumlah pembiayaan (Rp) dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 2%	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 4.200.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
					Evaluasi dana bergulir	38 koperasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah										Jumlah Pagu : Rp. 5.449.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kemampuan usaha koperasi (penerima dana bergulir) meningkat sejumlah 40 koperasi. Semula 446 koperasi menjadi 486 koperasi	40 koperasi						
					Kontrak bisnis UKM dengan pemberi akses permodalan	4 kontrak bisnis						
1.17.1.15.01.00.18	PROGRAM PENGAWASAN KOPERASI DAN UKM								Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00		
1.17.1.15.01.00.18.001	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Dinas Koperasi dan UMKM	Advokasi kepatuhan koperasi (terakvokasinya 32 koperasi selama 8 bulan)	32 koperasi	Peningkatan persentase jumlah koperasi sehat dan UKM yang memiliki ijin formal dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 2%	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sedang Berjalan
					Jumlah koperasi pasif menurun 1 tahun sejumlah 10 koperasi	10 koperasi						
					Nilai Kesehatan KSP dan USP meningkat sejumlah 30 koperasi	30 koperasi						
					Penilaian koperasi berprestasi 15 koperasi	15 koperasi						
					Terlaksananya pemeringkatan koperasi	1 tahun						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.									Jumlah Pagu : Rp. 2.705.970.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.18	PENANAMAN MODAL											
1.18.1.16.01.00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											
1.18.1.16.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 733.127.000,00	Rp. 1.130.906.803,20		
1.18.1.16.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Alat Tulis Kantor 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 273.627.000,00	Rp. 334.490.640,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
					10. Surat masuk 2400 surat							
					11. Barang cetakan 5 jenis							
					12. bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/oprasional roda 2 tepat waktu roda 2(1 unit) dan roda 4 (5 unit)							
					13. kebersihan gedung kantor 12 bulan							
					14. Pembayaran tagihan rekening listrik 35.000 Kwh 12 bulan							
					15. perlengkapan/alat penanganan arsip jumlah arsip tekstual yang ditangani 15 macam/jenis							
					16. surat keluar 3900 surat							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.										Jumlah Pagu : Rp. 2.705.970.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					2. komponen instanlasi listrik penerangan bangunan kantor 17 jenis							
					3. Pembayaran tagihan rekening telepon 2 Sambungan 12 bulan							
					4. Pembayaran tagihan TV Kabel 1 sambungan 12 bulan							
					5. Penggandaan dokumen 140.000 lembar							
					6. Pengiriman dokumen 75 surat							
					7. penjilidan dokumen 100 buah							
					8. Peralatan rumah tangga 25 jenis							
					9. Surat Kabar 4 jenis							
1.18.1.16.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. bukti pembayaran Pengelola Keuangan dan Pengelola Kepegawaian 11 orang/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 185.000.000,00	Rp. 297.065.983,20	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
					2. Jasa keamanan kantor/tempat kerja 1 tahun							
1.18.1.16.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06			Dukungan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 274.500.000,00	Rp. 499.350.180,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
					1. Makan dan minum kecil tamu 200 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.										Jumlah Pagu : Rp. 2.705.970.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					2. makan dan minum rapat 2.500 orang							
					3. Perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan							
					4. Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan							
1.18.1.16.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 117.000.000,00	Rp. 125.169.300,00		
1.18.1.16.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 50% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 97.000.000,00	Rp. 98.521.800,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.18.1.16.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. mebeleur terpelihara 4 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 50% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 26.647.500,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
					2. peralatan gedung kantor terpelihara 4 jenis							
					3. perlengkapan gedung kantor terpelihara 2 jenis							
1.18.1.16.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 128.000.000,00	Rp. 238.415.616,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.										Jumlah Pagu : Rp. 2.705.970.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.18.1.16.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKjIP : A	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 15.300.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.18.1.16.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 36.965.616,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.18.1.16.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 172.941.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
					2. ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan TA.2018						
1.18.1.16.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 13.000.000,00	Rp. 13.209.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.18.1.16.01.00.17	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENINGKATAN IKLIM INVESTASI								Rp. 877.843.000,00	Rp. 817.843.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.									Jumlah Pagu : Rp. 2.705.970.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.18.1.16.01.00.17.001	Penyiapan Potensi Investasi	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Kajian Potensi Investasi di Kawasan NYIA	1 dokumen	Peningkatan nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) tahun 2017 ke 2018 sebesar 2%	100%	Rp. 277.843.000,00	Rp. 277.843.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.18.1.16.01.00.17.002	Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Forum Interkem	1 kali	Peningkatan nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) tahun 2017 ke 2018 sebesar 2%	100%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 540.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
					Joint Working Group	1 kali						
					Rapat Kerja Teknis Kerjasama Antar Daerah	4 kali						
1.18.1.16.01.00.18	PROGRAM PROMOSI INVESTASI								Rp. 750.000.000,00	Rp. 750.000.000,00		
1.18.1.16.01.00.18.001	Promosi Investasi	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Pameran dan promosi investasi	3 pameran dan 2 promosi (temu investor)	Peningkatan nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) tahun 2017 ke 2018 sebesar 2%	100%	Rp. 750.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.18.1.16.01.00.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI								Rp. 100.000.000,00	Rp. 108.000.000,00		
1.18.1.16.01.00.19.001	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan 100%	Peningkatan nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) tahun 2017 ke 2018 sebesar 2%	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 108.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu										Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.18	PENANAMAN MODAL											
1.18.1.16.02.00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu											
1.18.1.16.02.00.16	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN								Rp. 2.725.000.000,00	Rp. 3.645.000.000,00		
1.18.1.16.02.00.16.001	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	DIY	Jumlah Dokumen Izin dan Non izin yang diterbitkan	Semula 1.200 Ijin dan Non ijin (Tahun 2017) menjadi 5000 Ijin dan Non Ijin (Tahun 2018)	Dukungan sebesar 39% terhadap terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP)	100 %	Rp. 1.350.000.000,00	Rp. 1.750.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
					Maklumat Pelayanan	1 maklumat pelayanan						
1.18.1.16.02.00.16.002	Penyusunan Standar dan Prosedur Perizinan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	DIY	Dokumen Standar Pelayanan Perijinan	2 Dokumen	Dukungan sebesar 39 %terhadap Ketepatan, kecepatan dan kelancaran pelayanan ijin dan non ijin	100 %	Rp. 735.000.000,00	Rp. 1.245.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
					Jumlah data izin terdigitalisasi data dan terinformasi	5.000 ijin dan non ijin						
					Pelayanan Secara Elektronik (PSE)	5 Aplikasi perijinan usaha						
					Percepatan izin melalui APM dan KTM perijinan	2 unit APM dan 500 KTM						
1.18.1.16.02.00.16.003	Pengelolaan Pengaduan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	DIY	Aplikasi Pengaduan Online (Mobile Apps)	1 Aplikasi	Dukungan sebesar 39 %terhadap Ketepatan, kecepatan dan kelancaran pelayanan ijin dan non ijin	100 %	Rp. 640.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
					Dokumen Managemen Mutu dan kualitas pelayanan	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu										Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Indek Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen hasil survey						
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.16.02.00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu											
4.01.1.16.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 880.300.000,00	Rp. 820.000.000,00		
4.01.1.16.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	barang cetakan 25 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 59% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 510.300.000,00	Rp. 550.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
					Alat Tulis kantor 56 jenis							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 unit dan roda 4 sebanyak 3 unit							
					Buku bacaan 20 eksemplar							
					jasa Kebersihan kantor seluas 4676m							
					Komponen instalasi listrik dan penerangan 13 jenis							
					Majalah 3 eksemplar							
					paket pengiriman 6500 kali							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu										Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					pembayaran tagihan langganan internet selama 12 bulan							
					Pembayaran tagihan rekening listrik selama 12 bulan							
					Pembayaran tagihan rekening telepon 4 saluran 12 bulan							
					Penggandaan 150.000 lb							
					Peralatan rumah tangga/alat dan bahan kebersihan 12 jenis							
					Perlengkapan /alat penanganan arsip 11 jenis							
					Surat Kabar 3 jenis							
					Surat Keluar 10.000							
					Surat masuk 10.000							
4.01.1.16.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja 1 org Pengelola administrasi kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100 %	Dukungan 13% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 120.000.000,00	Rp. 0,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
					Kinerja 2 orang pengelola barang dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu										Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kinerja 3 orang keamanan dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
					Kinerja 9 org pengelola administrasi keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
4.01.1.16.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100 %	Dukungan 28,13 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 270.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
					makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.1.16.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 570.000.000,00	Rp. 462.000.000,00		
4.01.1.16.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	peralatan gedung kantor sebanyak 3 jenis	Dukungan sebesar 51 % terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur terpenuhi	Dukungan sebesar 51 % terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur terpenuhi	100 %	Rp. 395.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
					Mebeleuer sebanyak 4 jenis							
					perlengkapan gedung kantor sebanyak 3 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu										Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.16.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Gedung kantor sebanyak 3 unit	Terpeliharanya gedung kantor 100 %	Dukungan 9 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 72.000.000,00	Rp. 0,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
4.01.1.16.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas / operasional roda 4 sebanyak 3 unit,	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standart 100 %	Dukungan 10.2% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 80.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
					Kendaraan Dinas /operasional roda 2 sebanyak 4 unit							
4.01.1.16.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Mebeleuer sebanyak 5 jenis,	Terpeliharanya peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 3,27% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 23.000.000,00	Rp. 27.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
					peralatan gedung kantor sebanyak 4 jenis,							
					perlengkapan gedung kantor sebanyak 3 jenis							
4.01.1.16.02.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 76.400.000,00	Rp. 76.500.000,00		
4.01.1.16.02.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir bulan Februari 2018	Dukungan 7,92% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Dukungan 7,92% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 4.400.000,00	Rp. 7.500.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu										Jumlah Pagu : Rp. 4.251.700.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.16.02.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 7 %	Dukungan 21 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 13.500.000,00	Rp. 15.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
4.01.1.16.02.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan KP2TSP DIY	5 dokumen perencanaan SKPD tahun 2019 dan perubahan tahun 2018	Dukungan sebesar 62 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tuisi SKPD	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 42.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
					Dokumen Renstra sesuai RPJMD, Renja,							
4.01.1.16.02.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 93%	Dukungan sebesar 9.69% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tuisi SKPD	100 %	Rp. 8.500.000,00	Rp. 12.000.000,00	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan									Jumlah Pagu : Rp. 3.838.176.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.22	KEBUDAYAAN											
1.22.1.17.01.00	Dinas Kebudayaan											
1.22.1.17.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 3.457.576.000,00	Rp. 3.499.000.000,00		
1.22.1.17.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Alat Tulis Kantor 49 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 33,8% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.134.315.000,00	Rp. 1.140.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Barang cetakan 22 jenis							
					Belanja Telepon, air, listrik, internet 12 bulan							
					Bukti pembayaran pajak / STNK roda 4 : 13 (induk), 2 (UPT); roda 2 : 1 unit							
					Bukti pembayaran restribusi sampah 12 bulan							
					Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (termasuk Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 84 jenis							
					Langganan surat kabar harian 2 jens 12 bulan							
					Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet 12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan									Jumlah Pagu : Rp. 3.838.176.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10 buah							
					Peralatan rumah tangga 16 jenis							
1.22.1.17.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	1. Kinerja 20 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 59,5% terhadap pengembangan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.	100 %	Rp. 2.089.401.000,00	Rp. 2.090.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					2. Kinerja 3 orang pengelola Administrasi kepegawaian dan Perencana Tata usaha dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 1 tahun							
					3. Kinerja 35 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK 1 tahun							
					4. Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 1 tahun							
					5. Kinerja pengelola barang 4 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 1 tahun							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan									Jumlah Pagu : Rp. 3.838.176.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.22.1.17.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 6,7% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 233.860.000,00	Rp. 269.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.17.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 245.710.000,00	Rp. 606.200.000,00		
1.22.1.17.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Pemeliharaan Air Limbah/Kotor 15 unit	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 16,28% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD.	100 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Pemeliharaan air minum/bersih 5 unit							
1.22.1.17.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai kebutuhan RKPMD 17 unit	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 37,66 % terhadap pengembangan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 92.525.000,00	Rp. 446.200.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.17.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Perlengkapan kantor sesuai RKPMD 11 jenis Jaringan komunikasi AC	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 46,06% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 113.185.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.17.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 134.890.000,00	Rp. 167.200.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan									Jumlah Pagu : Rp. 3.838.176.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.22.1.17.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKJip) yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKJIP A	Dukungan 2,5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd	100 %	Rp. 3.329.000,00	Rp. 3.700.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.17.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Laporan keuangan selesai tepat waktu	1 dokumen	Dukungan 15,1 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd	100 %	Rp. 20.302.500,00	Rp. 24.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.17.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Dokumen Draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018 - 2022	1 Dokumen	Dukungan 69,6 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd	100 %	Rp. 93.914.500,00	Rp. 116.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1 Dokumen						
1.22.1.17.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100 %	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 11 kegiatan	Dukungan 12,9 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd	100 %	Rp. 17.344.000,00	Rp. 23.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										Jumlah Pagu : Rp. 4.730.683.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.1.19.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
1.05.1.19.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.053.650.000,00	Rp. 0,00		
1.05.1.19.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Alat Tulis Kantor. 12 bulan	100 %	Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	100 %	Rp. 398.650.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
					2. Bukti pembayaran pajak / STNK kendaraan roda 2 dan 4. 12 bulan							
					3. Kebersihan gedung kantor. 12 bulan							
					4. Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 12 bulan							
					5. Langganan surat kabar harian, majalah dan buku.12 bulan							
					6. Pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan internet. 12 bulan							
					7. Cetak dan Penggandaan.12 bulan							
					8. Pembelian Materai.12 bulan							
1.05.1.19.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Pengelola barang 2 orang.12 bulan	100 %	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima	100 %	Rp. 260.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
					2. Pengelola kearsipan dan perpustakaan 2 orang. 12 bulan							
					3. Penjaga keamanan 6 orang.12 bulan							
					4. Pengelola keuangan 9 orang.12 bulan							
					5. Pengelola kepegawaian 2 orang.12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										Jumlah Pagu : Rp. 4.730.683.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					6. Pegawai non PNS 2 orang.11 bulan							
					7. Lembur administrasi kepegawaian.10 bulan							
1.05.1.19.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah.12 bulan	100 %	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait	100 %	Rp. 395.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
					2. Makan minum rapat. 12 bulan							
					3. Makan minum harian lembur 10 bulan							
1.05.1.19.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 783.000.000,00	Rp. 0,00		
1.05.1.19.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Perbaikan tempat pembuangan sampah.	100 %	Terpeliharanya ruang dan gedung kantor	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
					2. Penggantian plafon gypsum ruang kerja.							
					3. Perbaikan kamar mandi .							
					4. Pembuatan galvalum ruang tunggu perijinan.							
					5. Perbaikan ruang rapat A.							
					6. Perbaikan/Pembuatan Pos Satpam.							
					7. Pembangunan Gedung Kantor (Hasil DED TA 2016)	1 unit gedung						
1.05.1.19.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Belanja Jasa service.12 bulan	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
					2. Belanja penggantian suku cadang.12 bulan							
					3. Belanja bahan bakar minyak / Gas dan pelumas 12 bulan							
1.05.1.19.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Pemeliharaan alat kantor.	100 %	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor.	100 %	Rp. 183.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
					Pemeliharaan Perlengkapan kantor.							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										Jumlah Pagu : Rp. 4.730.683.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.1.19.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 314.350.000,00	Rp. 0,00		
1.05.1.19.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD, e - SAKIP.	100 %	Mendukung capaian program.	100 %	Rp. 13.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.19.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Administrasi dan belanja Fungsional. 12 bl 2. Laporan realisasi semesteran dan prognosis. 1 laporan semesteran dan prognosis. 3.Laporan Keuangan Tahunan. 1 laporan tahunan	100 %	Terpantaunya realisasi anggaran untuk mendukung capaian program.	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.19.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Dokumen Perencanaan SKPD (ROPK, Renja, RKA, DPA) 2. Data Bakesbangpol DIY 3. Renstra Badan Kesbangpol 2017-2022	12 bulan	Mendukung capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 229.350.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.19.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Laporan monev bulanan (APBD dan DAIS) 2. Laporan Monev Triwulan (APBD dan DAIS) 3. Laporan Monev Semesteran (APBD dan DAIS) 4. Laporan Monev Tahunan	12 bulan	Mendukung capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	100 %	Rp. 42.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										Jumlah Pagu : Rp. 4.730.683.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.1.19.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL								Rp. 957.683.000,00	Rp. 0,00		
1.05.1.19.01.00.18.001	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Masyarakat	Laporan Pembekalan Pembauran Kebangsaan	1 Laporan	Dukungan terhadap Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
					Laporan tentang perkembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY per triwulan	4 Laporan (per triwulan)						
					Rekomendasi (Isu Strategis, Kebijakan, Strategi untuk peningkatan toleransi dan kondusifitas DIY) dari FKUB	3 Rekomendasi (per caturwulan)						
					Rekomendasi (Isu Strategis, Kebijakan, Strategi untuk mengelola keberagaman dan toleransi di DIY) dari FPK	3 Rekomendasi (per caturwulan)						
					Rekomendasi (Isu Strategis, Kebijakan, Strategi, Indikatif Program dan Kegiatan serta target) untuk Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial untuk Tahun 2019	1 Dokumen Rekomendasi						
1.05.1.19.01.00.18.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Seluruh Indonesia	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan.	12000 surat	Dukungan terhadap Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.19.01.00.18.004	Pembinaan Organisasi Masyarakat	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	Jumlah ormas/orsos/ornop potensial yang menjadi mitra dalam mewujudkan toleransi	2 ormas/orsos	Kemandirian Ormas di DIY	100%	Rp. 74.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
					Jumlah ormas/orsos/ornop yang mendapatkan sosialisasi tentang peraturan ormas	50 ormas/orsos						
1.05.1.19.01.00.18.005	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta	Laporan Fasilitasi Kominda	1 Laporan (1 tahun)	Dukungan terhadap Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	100 %	Rp. 259.683.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										Jumlah Pagu : Rp. 4.730.683.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Laporan Penanganan kasus intoleransi.	Laporan (dengan target dari 5 kasus di 2017 menjadi 4 kasus di 2018)						
					Pembinaan Korps Musik	35 Latihan anggota Korps musik						
1.05.1.19.01.00.18.006	Pengelolaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta	Laporan Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba 2018.	1 Laporan	Dukungan terhadap penurunan pravalensi penyalahgunaan narkoba di 2018 dari 60000 menjadi 58000	100 %	Rp. 124.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.19.01.00.19	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT								Rp. 1.622.000.000,00	Rp. 0,00		
1.05.1.19.01.00.19.002	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	bantuan keuangan kepada parpol	Jumlah kelompok sasaran peserta yang mendapatkan pelatihan/ forum diskusi pendidikan politik bagi masyarakat (partai politik, ormas/LSM,elemen perempuan, penyandang disabilitas, pemilih pemula, aparat pemerintahan)	6 kelompok	Dukungan terhadap peningkatan skor/nilai indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik dan Skor/Nilai Aspek Kebebasan Politik pada IDI	75 %	Rp. 1.622.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
					Jumlah parpol yang memperoleh bantuan keuangan dan melaksanakan pendidikan politik.	9 parpol						
					Laporan dan Rekomendasi Tindakanjuz Indeks Demokrasi Indonesia 2017	1 Laporan dan Rekomendasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja									Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.1.19.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja											
1.05.1.19.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.377.350.800,00	Rp. 1.850.000.000,00		
1.05.1.19.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Benda-benda Pos (Materai dan Prangko) 2 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Mendukung 25,29 % Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 360.379.800,00	Rp. 450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					10. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan							
					11. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon 12 bulan							
					12. Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu 33 unit							
					13. Bukti pembayaran KIR kendaraan 5 unit							
					14. Jasa Kebersihan Kantor 34.200 m2							
					15. Alat Tulis Kantor 52 jenis							
					2. Barang Cetak 12 jenis							
					3. Penggandaan 134.242 lbr							
					4. Surat Kabar/Majalah 48 eks							
					5. Buku Kepustakaan 4 macam							
					6. Alat Rumah Tangga 10 jenis							
					7. Tambah Daya Listrik 1 paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja									Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00					
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					8. Pembayaran tagihan internet 12 bulan									
					9. Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan									
1.05.1.19.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Bukti Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Perencana 17 orang, 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Mendukung 41,31 % pelayanan administrasi perkantoran	100	Rp. 665.771.000,00	Rp. 800.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
					2. Bukti Pembayaran Honorarium Non PNS 20 orang, 13 bulan									
					3. Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor 9 orang, 13 bulan									
1.05.1.19.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Makan dan Minum Sidang 5830 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Mendukung 33,39 % pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 351.200.000,00	Rp. 600.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
					2. Perjalanan Dinas dalam Daerah 12 bulan									
					3. Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan									
1.05.1.19.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 925.819.000,00	Rp. 637.400.000,00				
1.05.1.19.02.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Temon	Pembangunan Pos Pengamanan dan Pos SAR Linmas yang berada di kawasan Pantai Glagah, Kulon Progo yang ikut tergusur proyek pembangunan Bandara NYIA	1 unit	Terjaganya keamanan dan perlindungan masyarakat di kawasan Pantai Glagah dan sekitarnya	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
1.05.1.19.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Meubeler : 1 jenis	Tersedianya 100% peralatan dan perlengkapan kantor	Dukungan 3,6% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 81.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
					Peralatan gedung kantor : 2 jenis									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja									Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Perengkapan gedung kantor : 2 jenis							
1.05.1.19.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kendaraan roda 2 : 16 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 22,4% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 375.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					2. Kendaraan roda 4 : 10 unit							
					3. Kendaraan roda 6 : 2 unit							
1.05.1.19.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Perengkapan gedung kantor yang terpelihara : 3 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perengkapan sesuai kebutuhan 100%	Mendukung 2,47% peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 50.819.000,00	Rp. 55.900.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					2. Peralatan gedung kantor yang terpelihara : 17 jenis							
1.05.1.19.02.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 459.740.250,00	Rp. 612.400.000,00		
1.05.1.19.02.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai LKJIP SKPD	B	Mendukung 1,38 % peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 7.669.250,00	Rp. 8.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.19.02.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD	20%	Mendukung 1,82 % peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100%	Rp. 10.085.250,00	Rp. 11.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja									Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00					
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
1.05.1.19.02.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Dokumen Perencanaan SKPD (ROPK, Renja, RKA, DPA)	12 bulan	Mendukung 87,77 % peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	Rp. 417.265.650,00	Rp. 536.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
					2. Data Satpol PP DIY	1 dokumen								
					3. Dokumen Renstra Satpol PP Periode 2017-2022	1 Dokumen								
1.05.1.19.02.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan	80%	Mendukung 9,03% peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	Rp. 24.720.100,00	Rp. 56.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
1.05.1.19.02.00.20	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT								Rp. 1.667.216.000,00	Rp. 1.430.000.000,00				
1.05.1.19.02.00.20.001	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	1.Laporan koordinasi petugas dengan mitra kerja terkait dalam rangka Pengendalian Tibum tranmas Perbatasan Kabupaten Jateng dan Raker Pol PP Kabupaten/ Kota Wilayah DIY	3 Laporan	Dukungan 60% terhadap presentase wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 1.007.749.000,00	Rp. 600.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan		
					2. Laporan patroli daerah perbatasan dan operasi bersama daerah perbatasan	12 laporan bulanan (12 kali operasi bersama)								
					3. Laporan penyelenggaraan dan pemeliharaan tibumtranmas melalui Operasi Tibumtranmas	60 laporan (60 kali operasi)								
					4. Laporan Patroli Pengendalian Tibum tranmas dan Patroli Malam Hari dalam rangka antisipasi kenakalan remaja (klith) dan gangguan tibum	90 Laporan (90 kali patroli)								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja									Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					5. Laporan Mingguan Deteksi Dini gejala sosial masyarakat	52 laporan (52 minggu)						
					7. Anggota Satpol PP yang meningkatkan Kapasitasnya (Pengetahuan dan Skill) dalam Peningkatan Tibumtranmas	90 orang (1 Laporan Kegiatan)						
1.05.1.19.02.00.20.002	Pengamanan Aset Pemda DIY	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	Laporan Akhir Tahun Pengamanan Aset	1 Laporan	Dukungan sebesar 13% terhadap presentase rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 129.990.500,00	Rp. 300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Laporan Pengamanan aset Pemda DIY melalui Kegiatan Pemantauan dan Pengamanan Penertiban Aset Pemda DIY	144 laporan (12 kali setiap bulan selama 12 bulan patroli/penanganan pengamanan aset)						
1.05.1.19.02.00.20.003	Pengamanan dan Pengawasan Gubernur, Wagub, dan Tamu Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	Laporan Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah (Pengawasan ke Daerah Kabupaten dan Dalam Kota)	156 laporan (156 kali PAM Gub/Wagub & Tamu Daerah)	Dukungan sebesar 3% terhadap presentasi wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 79.498.000,00	Rp. 100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.19.02.00.20.004	Pengamanan Objek Vital Pemda DIY	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	1. Laporan Pengamanan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur	12 laporan bulanan (selama 365 hari pengamanan dalam setahun)	Dukungan sebesar ...% terhadap presentasi wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 224.998.500,00	Rp. 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					2. Laporan pengamanan kegiatan Pemda Pada Hari Besar dan Sosial Kemasyarakatan	12 laporan bulanan (dengan estimasi 41 kali event pengamanan)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja									Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.1.19.02.00.20.005	Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	1. Laporan operasi pelanggaran PEKAT di wilayah DIY	12 laporan bulanan (43 kali operasi)	Dukungan sebesar 21% terhadap persentase wilayah rawan gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 224.980.000,00	Rp. 430.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					2. Rekomendasi penanganan PEKAT	2 dokumen analisis dan rekomendasi						
1.05.1.19.02.00.21	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								Rp. 3.235.127.000,00	Rp. 4.417.000.000,00		
1.05.1.19.02.00.21.001	Pembinaan Potensi Jaga Warga dan Satlinmas	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	Anggota SATLINMAS di 5 kabupaten/kota mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan kamtibmas	70 orang Anggota SATLINMAS di 5 kabupaten/kota	Dukungan 4,2% terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat	100%	Rp. 170.127.000,00	Rp. 187.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Dokumen rencana aksi pembinaan sebagai acuan dalam membina potensi masyarakat dalam kamtibmas	1 dokumen (pedoman membina potensi masyarakat dalam kamtibmas)						
1.05.1.19.02.00.21.002	Pembinaan SAR Linmas	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Potensi Satlinmas Rescue siap siaga dalam pengamanan di obyek wisata	313 orang	Dukungan 95,8 % terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat	100%	Rp. 3.065.000.000,00	Rp. 4.230.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					2. Anggota Satlinmas Rescue terlatih dalam manajemen darurat	30 orang						
					3. Anggota Satlinmas Rescue terampil menangani laka di air	20 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja									Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					4. Anggota SATLINMAS yang meningkat kapasitas dan kompetensinya dalam memberikan perlindungan masyarakat serta pertolongan terhadap korban kecelakaan/musibah/bencana	80 orang						
1.05.1.19.02.00.22	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA								Rp. 724.986.950,00	Rp. 775.000.000,00		
1.05.1.19.02.00.22.001	Pengembangan dan Pendayagunaan PPNS	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	1. PPNS yang terlatih dalam penegakan Perda	28 PPNS	Dukungan 11% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100%	Rp. 224.987.700,00	Rp. 175.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					2. Rancangan Perda PPNS	1 NA dan 1 Draft Rancangan Perda						
					3. Laporan Pelaksanaan Tugas PPNS	12 laporan Bulanan						
1.05.1.19.02.00.22.002	Operasi Yustisi dan Non Yustisi bagi Pelanggar Perda/Perkada	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	1. Laporan Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan	17 laporan	Dukungan 25 % terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan perkada yang tertangani	100%	Rp. 499.999.250,00	Rp. 600.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					2. Laporan Operasi Non Yustisi	20 laporan						
					3. Laporan Operasi Yustisi	20 laporan						
					4. Laporan Operasi Di Perbatasan	2 laporan						
					5. Rekomendasi optimalisasi penegakan perda di daerah	1 rekomendasi						
					6. Data pelaksanaan penegakan hukum secara terpadu	1 dokumen data terpadu						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja									Jumlah Pagu : Rp. 8.390.240.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					7. Draft Rancangan Peraturan Gubernur tindaklanjut Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum	1 Draft Rapergub						
					7. Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda/Perkada	4 rekomendasi						
					8. Data Terpadu Pelanggaran Perda	1 paket data						
					8. Laporan Pembinaan Kelompok Rentan Pelanggar Perda dan Perkada	5 laporan						
					9. Laporan Pembinaan Kader Penegak Perda dan Perkada	10 Laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 3.278.523.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.03.00	Sekretariat Daerah											
4.01.1.20.03.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.078.973.000,00	Rp. 1.211.000.000,00		
4.01.1.20.03.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Karangan bunga 1 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 99,02% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 1.068.065.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
					Souvenir/cinderamata 8 jenis							
					Trophy 2 jenis							
4.01.1.20.03.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Kinerja 5 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedia pelayanan perkantoran yang prima	Dukungan 0,97% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 10.908.000,00	Rp. 11.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 41.000.000,00	Rp. 46.500.000,00		
4.01.1.20.03.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 3 program 6 kegiatan - Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 35,86% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.750.000,00	Rp. 6.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 3.278.523.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Renstra Sekda	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai dengan standar 100%	Dukungan 30,18% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 31.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
					ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018)							
4.01.1.20.03.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 6 kegiatan	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 3 program 6 kegiatan	Dukungan 33,96% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.250.000,00	Rp. 5.500.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.00.15	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN								Rp. 2.158.550.000,00	Rp. 2.400.000.000,00		
4.01.1.20.03.00.15.001	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Makanan dan minuman Gubernur dan Wakil Gubernur	Tersedia layanan kerumahtanggaan pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian kualitas pelayanan kerumahtanggaan pimpinan dan tamu yang memuaskan	100%	Rp. 2.158.550.000,00	Rp. 2.400.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
					Pakaian batik gubernur dan wakil gubernur = 8 stel							
					Pakaian dinas harian Gubernur dan Wakil Gubernur = 6 stel							
					Pakaian sipil lapangan Gubernur dan Wakil Gubernur = 4 stel							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 3.278.523.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan									Jumlah Pagu : Rp. 307.120.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.03.10	Asisten Keistimewaan											
4.01.1.20.03.10.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 215.220.000,00	Rp. 300.000.000,00		
4.01.1.20.03.10.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	ATK 40 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 19,06% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 41.020.000,00	Rp. 50.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Berjalan
					Barang cetakan 8 jenis							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2: 2 unit							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4: 2 unit							
					Penggandaan 25.000 lembar							
					Surat Kabar Harian: 3 SKH							
4.01.1.20.03.10.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 10,22% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 22.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Berjalan
					Kinerja 7 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan							
4.01.1.20.03.10.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 70,72% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 152.200.000,00	Rp. 225.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan									Jumlah Pagu : Rp. 307.120.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun							
					Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.1.20.03.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 51.100.000,00	Rp. 60.000.000,00		
4.01.1.20.03.10.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas/operasional roda 2: 2 unit	Terpelihara kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 82,68% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana	100%	Rp. 42.250.000,00	Rp. 45.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas/operasional roda 4: 2 unit							
4.01.1.20.03.10.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan kantor 4 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 17,32% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana	100%	Rp. 8.850.000,00	Rp. 15.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Berjalan
					Perlengkapan kantor 2 jenis							
4.01.1.20.03.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 40.800.000,00	Rp. 46.100.000,00		
4.01.1.20.03.10.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKjIP: B	Dukungan 8,33% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.400.000,00	Rp. 4.200.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Asisten Keistimewaan										Jumlah Pagu : Rp. 307.120.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.10.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 15 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 8,33% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.400.000,00	Rp. 3.400.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.10.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	ROPK, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD sesuai standar 100%	Dukungan 75,98% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program	100%	Rp. 31.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.10.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 15 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,35% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.500.000,00	Asisten Keistimewaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan									Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
1.12.1.20.03.01	Biro Tata Pemerintahan											
1.12.1.20.03.01.15	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								Rp. 920.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00		
1.12.1.20.03.01.15.001	Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal	500 akta	Dukungan terhadap Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar 100%	100%	Rp. 920.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/marginal	100 akta						
					Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal	100 akta						
					dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan(Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar)	80 dokumen						
					Integrasi datababase kependudukan provinsi dengan aplikasi SIMKAH Kementerian Agama	1 sistem						
					Kerja sama Insentif Anak di DIY	4 lembaga						
					Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	4 instansi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan									Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengembangan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan data kependudukan bagi desa	1 sistem						
					Profil Perkembangan Kependudukan	1 dokumen						
					Rapergub tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 draf						
					Rekomendasi penyelesaian permasalahan pencatatan sipil	1 rekomendasi						
					SOP Standar Pelayanan Adminduk	1 dokumen						
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.03.01	Biro Tata Pemerintahan											
4.01.1.20.03.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 724.335.000,00	Rp. 760.000.000,00		
4.01.1.20.03.01.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Adanya bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	8 unit	Terselenggaranya dukungan terhadap pelayanan administrasi perkantoran sebesar 10%	100%	Rp. 198.175.000,00	Rp. 130.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Adanya bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	5 unit						
					Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis						
					Barang Cetak	16 jenis						
					Jasa Surat Menyurat	3 jenis						
					Penggandaan	80000 lembar						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan										Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung						
					Penjilidan	100 buku						
					Tersedianya Alat Tulis Kantor	36 jenis						
					Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis						
					Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7 jenis						
4.01.1.20.03.01.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Adanya bukti pembayaran honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran sebesar 4,26%	100%	Rp. 26.160.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.01.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 65,07%	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan						
					Makanan dan minuman Rapat	12 bulan						
4.01.1.20.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 416.241.500,00	Rp. 499.000.000,00		
4.01.1.20.03.01.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan Gedung kantor 10 jenis	terpenuhinya sarana prasaran aparatur 100%	Dukungan terhadap Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 34,24%	100%	Rp. 263.026.500,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan										Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Perlengkapan gedung kantor 3 jenis	terpenuhinya sarana prasarana aparatur 100%						
4.01.1.20.03.01.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) sesuai RKPBMDB sebanyak 8 (delapan) unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 12,34%	100%	Rp. 105.040.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) sesuai RKPBMDB sebanyak 5 (lima) unit.	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%						
4.01.1.20.03.01.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMDB sebanyak 15 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan terhadap meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 6,54%	100%	Rp. 48.175.000,00	Rp. 49.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 114.625.000,00	Rp. 114.500.000,00		
4.01.1.20.03.01.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	70	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 5,45%	100%	Rp. 6.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan										Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.01.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Keuangan Tahun 2017	1 laporan	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 7,27%	100%	Rp. 8.000.000,00	Rp. 8.500.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 laporan						
					Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2018	1 laporan						
4.01.1.20.03.01.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019	1 dokumen	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 77,67%	100%	Rp. 91.625.000,00	Rp. 90.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2018	1 dokumen						
					Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019	1 dokumen						
					Rencana Kerja Tahun 2019	1 dokumen						
					Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2017-2022	1 dokumen						
					Terpeliharanya website Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan										Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.01.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Monev Tahun 2018	1 dokumen	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 8,74%	100%	Rp. 9.000.000,00	Rp. 9.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH								Rp. 1.330.977.900,00	Rp. 400.000.000,00		
4.01.1.20.03.01.22.003	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	1. Laporan Fasilitas Penerapan NSPK	1 Laporan, 6 Bidang Urusan	Dukungan terhadap Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah sebesar 100%	100%	Rp. 1.330.977.900,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					2. Kebijakan/ Rekomendasi Penyelesaian permasalahan sebagai dampak pengalihan P3D	1 dokumen						
					3.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2017	1 laporan						
					4. Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	5 naskah kesepakatan						
					5. Draf Rancangan Peraturan Daerah Urusan Keistimewaan	1 Draft Raperdais						
					6. Rekomendasi tindaklanjut perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	5 Rekomendasi						
					7. Rumusan Kebijakan hasil monev penyelenggaraan OTDA di DIY dan kab/kota	1 dokumen						
					8. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan										Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.01.23	PROGRAM PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN, DESA /KELURAHAN								Rp. 872.000.000,00	Rp. 800.000.000,00		
4.01.1.20.03.01.23.002	Pembinaan Aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan	1 laporan	Dukungan terhadap Pembinaan Perangkat Kecamatan, Desa /Kelurahan sebesar 100%	100%	Rp. 872.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 laporan						
					Pelatihan penyusunan APBDes bagi perangkat desa (pro poor)	200 orang						
					Penguatan kapasitas perangkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam penerapan/emanfaatan aplikasi Siskeudes	180 orang						
4.01.1.20.03.01.24	PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBINAAN WILAYAH								Rp. 567.514.600,00	Rp. 400.000.000,00		
4.01.1.20.03.01.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan Dan Toponomi	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perbatasan Kab/kota dan atau antar Provinsi	2 dokumen	Dukungan terhadap Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah 50%	100%	Rp. 317.514.600,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Pemeliharaan Papan Batas wilayah DIY- Jateng	10 buah						
					Pengukuran titik koordinat pilar batas secara Geodetik	30 titik						
					Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah administrasi Pemerintahan Kab/Kota DIY	100 buku						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan									Jumlah Pagu : Rp. 4.945.694.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penyusunan Data Base untuk pengelolaan tanda batas wilayah DIY-Jateng,	1 dokumen						
					Terlaksananya fasilitasi Raker Toponimi unsur buatan	1 laporan						
					Terlaksananya Raker Pembinaan Wilayah dan peningkatan kapasitas aparatur/masyarakat di desa wilayah perbatasan DIY-Jawa Tengah.	1 laporan						
4.01.1.20.03.01.24.003	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	DIY	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	1 Laporan	dukungan terhadap peningkatan Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					2. Laporan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Trantibun	1 Laporan						
					3. Usulan SK pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD DIY dan/atau DPRD Kab./Kota untuk mendukung kelancaran Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	3 SK						
					4. aparatur dan anggota parpol yang meningkat pemahamannya tentang Undang-undang Pemilu	60 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum									Jumlah Pagu : Rp. 5.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.03.02	Biro Hukum											
4.01.1.20.03.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 564.480.000,00	Rp. 554.420.000,00		
4.01.1.20.03.02.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Administrasi Persuratan	7.000 surat	Mendukung 35.27% terhadap Capaian Program Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 190.060.000,00	Rp. 180.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
					Arsip Dokumen Hukum	2 dokumen						
					ATK	51 jenis						
					Barang Cetak	13 jenis						
					Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan Roda 2 dan 4	7 unit						
					Cetak dan Penggandaan	13 jenis						
					Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jenis						
					Langganan Surat kabar dan majalah hukum	12 bulan						
					Penataan Arsip	12 bulan						
4.01.1.20.03.02.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Kinerja 2 Orang Pengelola Barang	1 tahun	Mendukung 5.22% terhadap Capaian Program Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 24.420.000,00	Rp. 24.420.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.02.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Mendukung 59.91% terhadap Capaian Program Administrasi Perkantoran	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
					Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
					Penyediaan ekstrafooding bagi 4 orang petugas pengelola dokumentasi hukum	1 tahun						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum									Jumlah Pagu : Rp. 5.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 405.934.000,00	Rp. 392.950.000,00		
4.01.1.20.03.02.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Komputer	10 unit	Mendukung terhadap capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%	Rp. 245.059.000,00	Rp. 230.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
					Kursi kerja	20 unit						
					Kursi rapat	13 unit						
					Kursi tunggu	2 unit						
					Meja kerja	2 unit						
					Meja rapat	6 unit						
					Notebook	7 unit						
					Printer Deskjet	10 unit						
					Printer Laserjet	1 unit						
4.01.1.20.03.02.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	8 unit	Mendukung % terhadap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp. 87.925.000,00	Rp. 90.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.02.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	AC	20 buah	Mendukung 12.17% terhadap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp. 72.950.000,00	Rp. 72.950.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
					Fumigasi	2 kali						
					Komputer	25 buah						
					Mebeleur	15 buah						
					Mesin Ketik	3 buah						
					Notebook	8 buah						
					Printer	20 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum										Jumlah Pagu : Rp. 5.500.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 57.054.000,00	Rp. 58.000.000,00		
4.01.1.20.03.02.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKjIP : B	Mendukung 5,04% terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.02.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi 5%	Mendukung 9,83% terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.02.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	DPA Tahun 2019	1 dokumen	Mendukung 79,72% terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Rp. 39.554.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
					Rencana Kerja Tahun 2018	1 dokumen						
					RKA Tahun 2019	1 dokumen						
					ROPK Tahun 2018	1 dokumen						
4.01.1.20.03.02.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Hukum	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Mendukung 5,41% terhadap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	100%	Rp. 5.500.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.02.16	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 1.350.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum									Jumlah Pagu : Rp. 5.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.02.16.001	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Biro Hukum	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur	150 rancangan keputusan gubernur	Mendukung % terhadap Capaian Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	8 rancangan peraturan daerah						
					Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur	60 rancangan peraturan gubernur						
4.01.1.20.03.02.16.002	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Biro Hukum	Dokumen kajian pembangunan hukum	5 kajian	Mendukung % terhadap Capaian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.02.17	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM								Rp. 650.000.000,00	Rp. 700.000.000,00		
4.01.1.20.03.02.17.001	Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Biro Hukum	Jumlah Hasil Konsultasi/ Fasilitasi / Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesesuaian	60 rancangan produk hukum	Mendukung % terhadap Capaian Program Pengawasan Produk Hukum	100%	Rp. 650.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
					Jumlah Hasil Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesesuaian	60 rancangan produk hukum						
4.01.1.20.03.02.18	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM								Rp. 600.000.000,00	Rp. 650.000.000,00		
4.01.1.20.03.02.18.001	Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Biro Hukum	Jumlah buku informasi peraturan perundang-undangan	2.800 buku	Mendukung 100% terhadap Capaian Program Dokumentasi Hukum	100%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
					Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	2.800 buku						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum									Jumlah Pagu : Rp. 5.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Jumlah produk hukum yang diunggah ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum						
					Koordinasi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1 kali						
					Legal Expo Bidang Hukum	1 Laporan						
4.01.1.20.03.02.19	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM								Rp. 2.072.532.000,00	Rp. 2.350.413.300,00		
4.01.1.20.03.02.19.001	Layanan Hukum Masyarakat	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Biro Hukum	Jumlah penyelesaian penanganan permalahan hukum non litigasi	1 kasus	Mendukung % terhadap Capaian Program Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Rp. 2.072.532.000,00	Rp. 2.350.413.300,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
					Jumlah penyelesaian penanganan permalahan hukum litigasi	2 kasus						
					Jumlah rekomendasi gubernur sebagai pelindung	10 rekomendasi						
					Jumlah rekomendasi perbaikan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik	100 rekomendasi						
					Monitoring dan evaluasi hubungan kerja Lembaga Ombudsman DIY	1 laporan						
					Perlindungan dan Pemajuan HAM	1 laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan									Jumlah Pagu : Rp. 9.345.298.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.03.03	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan											
4.01.1.20.03.03.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 671.735.500,00	Rp. 332.000.001,00		
4.01.1.20.03.03.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Surat Kabar 2 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 47.994.100,00	Rp. 52.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
					Alat Tulis Kantor 44 jenis							
					Barang Cetak 8 jenis							
					Barang Penggandaan 12700 lembar							
					Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu 2 unit							
					Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu 4 unit							
					Buku Referensi/Peraturan Perundangan 1 paket							
					Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan										Jumlah Pagu : Rp. 9.345.298.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Surat Keluar 5500 surat							
					Surat Masuk 2160 surat							
4.01.1.20.03.03.01.001	Penyusunan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Penyusunan Grand Design Kependudukan di DIY	Dokumen Kebijakan	.	100 %	Rp. 448.886.000,00	Rp. 1,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.03.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku		Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 28.045.400,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
					Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%						
4.01.1.20.03.03.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah : 12 bulan /1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 146.810.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
					Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah : 12 bulan /1 tahun							
					Makanan dan Minuman Sidang : 2500 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan										Jumlah Pagu : Rp. 9.345.298.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MASYARAKAT								Rp. 317.107.000,00	Rp. 609.210.000,00		
4.01.1.20.03.03.02.001	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	Laporan sektor dan rekomendasi sektor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Dokumen Kebijakan	Dukungan 50% pada Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	100 %	Rp. 150.473.000,00	Rp. 460.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
					Laporan sektor dan rekomendasi sektor Kesehatan							
					Laporan sektor dan rekomendasi sektor Pemberdayaan Masyarakat/Kemiskinan							
					Laporan sektor dan rekomendasi sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
					Laporan sektor dan rekomendasi sektor Sosial							
4.01.1.20.03.03.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pengadaan Peralatan Dapur : 1 jenis		Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 62.600.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : 3 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan									Jumlah Pagu : Rp. 9.345.298.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.03.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara : 2 unit		Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 82.934.000,00	Rp. 91.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara : 4 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%						
4.01.1.20.03.03.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara : 7 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 21.100.000,00	Rp. 23.210.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.03.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN SUMBERDAYA MANUSIA								Rp. 539.010.500,00	Rp. 525.000.000,00		
4.01.1.20.03.03.04.001	Penyusunan Kebijakan Sumberdaya Manusia	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Need Assessment dalam Rangka Penurunan Kemiskinan di 3 Lokasi	1 dokumen	Dukungan 50% pada Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	100 %	Rp. 539.010.500,00	Rp. 525.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA								Rp. 98.000.000,00	Rp. 300.000.000,00		
4.01.1.20.03.03.05.001	Penyusunan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Laporan sektor dan rekomendasi kebijakan sektor kebudayaan	Dokumen Kebijakan	Dukungan 50% pada Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	100 %	Rp. 98.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan									Jumlah Pagu : Rp. 9.345.298.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Laporan sektor dan rekomendasi kebijakan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga							
					Laporan sektor dan rekomendasi kebijakan sektor perpustakaan dan kearsipan							
					Laporan sektor dan rekomendasi kebijakan sektor tenaga kerja dan transmigrasi							
4.01.1.20.03.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 210.478.500,00	Rp. 215.000.000,00		
4.01.1.20.03.03.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) Paling lambat Februari 2018	Nilai LAKIP SKPD Skor A target 2017 : 75 menjadi Skor 76	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 2.904.800,00	Rp. 3.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.03.06.001	Penyusunan Kebijakan Penguatan Sistem Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Penyusunan Kebijakan Penguatan Sistem Pengembangan Sumberdaya Manusia	Dokumen Kebijakan	Dukungan 50% pada Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	100 %	Rp. 150.978.900,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.03.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 14 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 7.495.200,00	Rp. 8.200.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan									Jumlah Pagu : Rp. 9.345.298.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.03.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019	Dokumen Perencanaan	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 42.895.900,00	Rp. 47.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
					Dokumen Perencanaan Renja 2019							
					Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2018							
					Sosialisasi Pedoman e-Rastra dan e-musdes/muskel							
4.01.1.20.03.03.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 14 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 6.203.700,00	Rp. 6.800.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.03.36	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH								Rp. 7.508.966.500,00	Rp. 8.670.000.000,00		
4.01.1.20.03.03.36.001	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Pembinaan mental rohani yang optimal	Dukungan 50% persentase kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlayani	100 %	Rp. 3.859.685.000,00	Rp. 3.870.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
					Pengiriman 26 orang TPHD							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan									Jumlah Pagu : Rp. 9.345.298.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan Terhadap 5 Agama pada 18 hari keagamaan							
4.01.1.20.03.03.36.002	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Penyelenggaraan festival keagamaan dan pengiriman kontingen ke Tingkat Nasional MTQ	Pesparawi menjadi juara umum	Dukungan 50% persentase kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlayani	100 %	Rp. 3.649.281.500,00	Rp. 4.800.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
					Seleksi kontingen dan pengiriman ke Tingkat Nasional Pesparawi	MTQ dari perolehan 3 piala (tahun 2016) menjadi 5 piala						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam									Jumlah Pagu : Rp. 2.232.839.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.03.04	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											
4.01.1.20.03.04.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 248.669.000,00	Rp. 337.881.100,00		
4.01.1.20.03.04.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Surat Kabar 3 jenis 12 bulan	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 64.277.000,00	Rp. 76.489.600,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
					10. Majalah 2 jenis							
					11. Penggandaan 80.000 lembar							
					12. Pengiriman Dokumen 200 dokumen							
					13. Peralatan Kebersihan Kantor 16 jenis							
					2. Surat Keluar 650 surat							
					3. Surat Masuk 3.000 surat							
					4. Alat Tulis Kantor 22 jenis							
					5. Barang Cetak 2 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam									Jumlah Pagu : Rp. 2.232.839.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					6. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Yang Tepat Waktu 2 unit							
					7. Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat Yang Tepat Waktu 3 unit							
					8. Buku Peraturan Perundang-undangan 5 buku							
					9. Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 2 jenis							
4.01.1.20.03.04.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Bukti Pembayaran Honorarium penatausahaan Administrasi Keuangan Biro 11 org/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 64.392.000,00	Rp. 61.391.500,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
					2. Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Kepegawaian 1 org/bulan							
4.01.1.20.03.04.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 120.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
					2. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam									Jumlah Pagu : Rp. 2.232.839.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					3. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 12 bulan							
4.01.1.20.03.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 96.670.000,00	Rp. 99.670.000,00		
4.01.1.20.03.04.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara 2 unit	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	100%	Rp. 80.170.000,00	Rp. 83.170.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
					2. Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi 3 unit							
4.01.1.20.03.04.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara 11 jenis	Dukungan 33,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.500.000,00	Rp. 16.500.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.04.03	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH PEREKONOMIAN								Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00		
4.01.1.20.03.04.03.003	Penyusunan Kebijakan Green Economic	4.Sosial Budaya	1.1.2.Meningkatkan Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat.	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rekomendasi Penyusunan kebijakan green economic	Dokumen Rekomendasi kebijakan green economic 100%	Dukungan terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam									Jumlah Pagu : Rp. 2.232.839.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 37.500.000,00	Rp. 37.500.000,00		
4.01.1.20.03.04.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LAKjIP : A	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.04.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 4 program 14 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.04.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Renstra, ROPK, Renja, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017	Dokumen perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.04.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 4 program 14 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam									Jumlah Pagu : Rp. 2.232.839.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.04.34	PROGRAM KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH								Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00		
4.01.1.20.03.04.34.001	Pengendalian Inflasi Daerah	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	diy	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah 1 dokumen	rekomendasi pengendalian inflasi daerah berjalan lancar	dukungan terhadap pengendalian inflasi di diy	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.04.35	PROGRAM KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN								Rp. 1.300.000.000,00	Rp. 200.000.001,00		
4.01.1.20.03.04.35.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	diy	1. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah 1 dokumen	Dokumen Rekomendasi Pengembangan Ekonomi 100%	Dukungan sebesar 20% terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 1,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
					2. Rekomendasi Percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan 1 dokumen							
					3. Rekomendasi Akselerasi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan 1 dokumen							
4.01.1.20.03.04.35.002	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	Dokumen Rekomendasi Percepatan pembangunan wilayah tertinggal100%	Dukungan sebesar 20% terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan										Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.03.05	Biro Administrasi Pembangunan											
4.01.1.20.03.05.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 543.000.000,00	Rp. 587.300.000,00		
4.01.1.20.03.05.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	3.Terlaksananya Pengiriman Surat/Dokumen	32 dokumen	Dukungan sebesar 60% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
					6. Tersedianya Barang cetakan	15 jenis						
					8.Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis						
					1. Terlaksananya Pengiriman Surat Keluar	2.522 surat						
					10. Tersedianya Surat Kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan	3 jenis						
					11. Terkelolanya Arsip Dinamis	10.000 berkas						
					2. Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk	15.225 surat						
					4.Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas	7 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan									Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					5. Tersedianya Alat Tulis Kantor	19 jenis						
					7. Terlaksananya Fotokopi	105.00 lbr						
					9. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	15 jenis						
4.01.1.20.03.05.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terpenuhinya Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	12 bulan	Dukungan sebesar 15% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 33.000.000,00	Rp. 36.300.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.05.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Tersedianya makan dan minuman rapat	6.250 os	Dukungan sebesar 25 % terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 310.000.000,00	Rp. 331.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
					2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan						
4.01.1.20.03.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 230.000.000,00	Rp. 253.000.000,00		
4.01.1.20.03.05.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	Dukungan sebesar 40 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan										Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					2. Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	9 jenis						
4.01.1.20.03.05.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	Dukungan sebesar 20 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.05.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4 jenis	Dukungan sebesar 40% dalam pencapaiannya peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
					2. Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	6 jenis						
					3. Terpeliharanya Meubeleur	4 jenis						
4.01.1.20.03.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 128.000.000,00	Rp. 140.800.000,00		
4.01.1.20.03.05.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tersusunya Laporan Kinerja SKPD	nilai skor A	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.600.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan										Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.05.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tersedianya dokumen laporan keuangan 2018	1 dokumen	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 12.000.000,00	Rp. 13.200.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.05.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Tersusunnya Renstra Biro Adpem Th 2018-2022	1 dokumen	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 94.000.000,00	Rp. 103.400.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
					2. Tersusunnya Renja Biro Adpem Th 2019	1 dokumen						
					3. Tersusunnya RKA dan DPA 2019	1 dokumen						
					4. Tersusunnya RKA-P dan DPA-P 2019	1 dokumen						
					5. Tersusunnya ROPK 2018	1 dokumen						
					6. Pengembangan Sistem Informasi	1 aplikasi						
4.01.1.20.03.05.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro Administrasi Pembangunan	1 dokumen	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.000.000,00	Rp. 17.600.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan									Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.05.28	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								Rp. 2.724.890.000,00	Rp. 2.997.379.000,00		
4.01.1.20.03.05.28.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian	1. Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa	12 bulan	Dukungan sebesar 100% terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas (persentase aduan terhadap hasil pengadaan barang dan jasa sebesar 0%) serta mendukung tercapainya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	100%	Rp. 2.724.890.000,00	Rp. 2.997.379.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
					2. Terlaksananya Inventarisasi pengadaan barang/jasa	1 dokumen						
					3. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa	4 dokumen						
					4. Terlaksananya Bimtek Pengadaan Barang/Jasa	4 kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan									Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan										Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Perwakilan Daerah RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja								
4.01.1.20.03.05.30	PENGLOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH								Rp. 205.907.000,00	Rp. 226.497.700,00		
4.01.1.20.03.05.30.001	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Tersusunnya Kebijakan infrastruktur daerah	1 dokumen	Tercapainya rumusan kebijakan Bidang Infrastruktur Daerah	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.05.30.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis DIY	1 dokumen	Tersusunnya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis DIY	100%	Rp. 55.907.000,00	Rp. 61.497.700,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.05.31	PENGLOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN								Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00		
4.01.1.20.03.05.31.001	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Kebijakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Tersusunnya Kebijakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan										Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.05.31.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Laporan hasil Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Tersusunnya Laporan hasil Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.05.32	PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH								Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00		
4.01.1.20.03.05.32.001	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	DIY	Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	1 dokumen	Tersusunnya Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 137.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.05.32.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	DIY	Laporan Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 82.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
4.07.1.20.03.05	Biro Administrasi Pembangunan											
4.07.1.20.03.05.15	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH								Rp. 300.000.000,00	Rp. 330.000.000,00		
4.07.1.20.03.05.15.001	Perumusan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Bahan rumusan kebijakan penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Tersusunnya Bahan rumusan kebijakan penelitian dan pengembangan	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan									Jumlah Pagu : Rp. 4.531.797.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.07.1.20.03.05.15.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penelitian dan pengembangan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	DIY	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan	1 dokumen	terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Organisasi									Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.03.06	Biro Organisasi											
4.01.1.20.03.06.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 704.436.000,00	Rp. 714.800.000,00		
4.01.1.20.03.06.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Alat tulis kantor 56 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 12,08% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 84.196.000,00	Rp. 90.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
					Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 paket							
					Barang cetakan 13 jenis							
					Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19 jenis							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 : 2 unit							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4 : 4 unit							
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 jenis							
					Langganan surat kabar harian dan majalah 3 jenis, 12 bulan							
					Penggandaan 50.000 lembar							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Organisasi					Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengiriman dokumen 1 paket							
					Surat keluar 2.700 lembar							
					Surat masuk 2.500 lembar							
4.01.1.20.03.06.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 17,49% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 129.340.000,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
					Kinerja 1 orang tenaga honorer dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Kinerja 120 orang pengelola keuangan danais pada 8 KPA Urusan Kelembagaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.01.1.20.03.06.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 70,43% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 490.900.000,00	Rp. 499.800.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Organisasi									Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.1.20.03.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 142.735.000,00	Rp. 145.000.000,00		
4.01.1.20.03.06.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD 2 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 41,03% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 95.235.000,00	Rp. 96.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMMD 4 unit							
4.01.1.20.03.06.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	AC Split sesuai RKPBMMD 13 unit	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 12,31% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 47.500.000,00	Rp. 49.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
					Perlengkapan kantor sesuai RKPBMMD 8 jenis							
4.01.1.20.03.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 125.095.000,00	Rp. 135.800.000,00		
4.01.1.20.03.06.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Maret 2018	Nilai LKjIP : A (>80)	Dukungan 3,62% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.800.000,00	Rp. 4.800.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Organisasi									Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.06.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 20 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 3,62% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.06.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017	6 dokumen	Dukungan 80,61% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 99.395.000,00	Rp. 110.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
					Dokumen Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD 2017-2022	1 dokumen						
					Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Organisasi yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website Biro Organisasi secara kontinyu 100%						
4.01.1.20.03.06.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 8 program 20 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 3.70% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.900.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.06.20	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								Rp. 1.294.216.000,00	Rp. 2.150.000.000,00		
4.01.1.20.03.06.20.001	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kab/Kota	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Rekomendasi Gubernur tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 5 Kabupaten/Kota	1 rekomendasi	Dukungan terhadap kelembagaan perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	100%	Rp. 339.935.000,00	Rp. 450.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Organisasi									Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Rekomendasi pendayagunaan aparatur	3 Aspek (Kelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM aparatur)						
4.01.1.20.03.06.20.002	Perumusan Kebijakan ketatalaksanaan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Aplikasi E SHBJ/SB	1 aplikasi	Dukungan terhadap Perangkat Daerah dengan ketatalaksanaan yang sesuai dengan standar	100%	Rp. 954.281.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
					Dokumen LKJIP dan PK per OPD	42 dokumen						
					Laporan movev kebijakan ketatalaksanaan	1 Laporan						
					Rapergub Pedoman Papan Nama SKPD	1 Rapergub						
					Rapergub SHBJ	1 Rapergub						
					Rapergub Standar Belanja	1 Rapergub						
					Rapergub Nomenklatur SKPD	1 Rapergub						
					SOP Internal SKPD	42 SK Kepala SKPD						
4.01.1.20.03.06.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI								Rp. 1.233.518.000,00	Rp. 2.400.000.000,00		
4.01.1.20.03.06.21.001	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kinerja Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Dokumen Analisis Beban Kerja	1 dokumen	Dukungan terhadap peningkatan kualitas pengembangan kinerja aparatur	100%	Rp. 522.149.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
					Dokumen Analisis Jabatan	1 dokumen						
					Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Organisasi					Jumlah Pagu : Rp. 3.500.000.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.06.21.002	Rumusan Kebijakan Pelayanan Umum	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Hasil seleksi inovasi pelayanan publik	5 penyelenggara pelayanan	Dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	Rp. 711.369.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
					Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dibina	10 penyelenggara pelayanan						
					Rekomendasi hasil Monev Indeks Kepuasan Masyarakat	9 unsur penilaian						
					Rekomendasi Monev Kepatuhan Stadar Pelayanan	6 komponen Standar Pelayanan						
					Rekomendasi Monev Standar Pelayanan minimal	6 Bidang SPM						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol									Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.21	PERSANDIAN											
1.21.1.20.03.07	Biro Umum dan Protokol											
1.21.1.20.03.07.15	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN								Rp. 483.159.500,00	Rp. 725.000.000,00		
1.21.1.20.03.07.15.001	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Naskah Dinas	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Biro Umum dan Protokol	Fumigasi arsip 900 m3	Tersedia pengembangan sistem dan pengelolaan naskah dinas sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 59,96% terhadap pencapaian kualitas layanan informasi persuratan dan persandian	100%	Rp. 278.159.500,00	Rp. 425.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
					penggandaan 5000 lembar							
					ATK 5 jenis							
					Belanja Cetak 2 jenis							
					Penataan arisp inaktif 9000 berkas							
1.21.1.20.03.07.15.002	Penyelenggaraan Layanan Persandian dan Telekomunikasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Biro Umum dan Protokol	Koordinasi UTP se-DIY 40 org	Tersedia layanan persandian dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 40,04% terhadap pencapaian kualitas layanan persandian sesuai standar pelayanan	100%	Rp. 205.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
					Pegawai Non PNS 5 org							
					Pemeliharaan mesin fax 84 kali							
					Peringatan HUT Sandi 1 keg							
					Sterilisasi ruangan pimpinan 1 tahun							
					Alat listrik dan elektronik 11 jenis							
					Pakaian Kerja Lapangan 10 stel							
					Pemeliharaan alat-alat komunikasi 2 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol									Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.03.07	Biro Umum dan Protokol											
4.01.1.20.03.07.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 5.279.929.000,00	Rp. 5.730.000.000,00		
4.01.1.20.03.07.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Alat Tulis Kantor 161 jenis	Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	Dukungan 87,44% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 4.639.849.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 = 34 unit							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3 = 1 unit							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 = 44 unit							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6 = 2 unit							
					Cetak Kalender 4 jenis							
					Cetakan umum 39 jenis							
					Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah 246 kg							
					Kebersihan Kantor 16 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol									Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor 28 jenis							
					Pembayaran pajak ijin frekuensi 1 kali							
					Pembayaran tagihan rekening air 13 langganan, rekening telepon 81 sambungan, telepon 81 sambungan = 12 bulan							
					Pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar = 4 buah							
					Pemeliharaan Taman Kompleks Kepatihan 63.344 m2							
					Pengandaan 150.000 lembar							
					Surat kabar harian 3 SKH dan 1 majalah							
4.01.1.20.03.07.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 1,13% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 61.480.000,00	Rp. 80.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
					Kinerja 3 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Kinerja 3 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Materai 6000 dan materai 3000 tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol									Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.07.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 11,43% terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 578.600.000,00	Rp. 650.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
					Perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 tahun							
4.01.1.20.03.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 2.745.663.000,00	Rp. 3.400.000.000,00		
4.01.1.20.03.07.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Meubeler sesuai RKBMD 3 jenis	Tersedia peralatan, perlengkapan dan mebeulair sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 29,35%% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana	100%	Rp. 721.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
					Peralatan sesuai RKBMD 10 jenis							
					Perlengkapan sesuai RKBMD 14 jenis							
4.01.1.20.03.07.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Coblok 560 m2	Terpelihara rumah dan gedung 100%	Dukungan 12,36% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana	100%	Rp. 343.451.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
					Gedung bersejarah 4 unit luas 2.740,85 m2							
					Gedung kantor 10 unit luas 10.095,15 m2							
					Pagar Kepatihan 3.266 m2							
4.01.1.20.03.07.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Kelengkapan kendaraan tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 45,28% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana	100%	Rp. 1.265.342.000,00	Rp. 1.550.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas jabatan 4 unit							
					Kendaraan dinas/operasional roda 2 : 34 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol									Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kendaraan dinas/operasional roda 3 : 1 unit							
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 : 43 unit							
					Kendaraan dinas/operasional roda 6 : 2 unit							
					Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2 : 11 unit							
					Pengecatan kendaraan sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.1.20.03.07.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Meubeler 6 jenis	Terpelihara peralatan, perlengkapan dan meubeler sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 13,01% terhadap kelancaran peningkatan sarana dan prasarana	100%	Rp. 415.870.000,00	Rp. 450.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
					Pemeliharaan instalasi air limbah /kotor 53 m3							
					Pemeliharaan instalasi air minum/bersih 533 m'							
					Pemeliharaan instalasi jaringan listrik 1 tahun							
					Peralatan kantor 20 jenis							
					Perlengkapan kantor 9 jenis							
					Solar untuk operasional genset 1 tahun							
4.01.1.20.03.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 72.860.000,00	Rp. 92.500.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol									Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.03.07.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) yang capaiannya kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai Lkj IP : B	Dukungan 6,52% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.401.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.07.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan - Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 13,94% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 11.547.000,00	Rp. 12.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.07.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai dengan standar 100%	Dukungan 69,23% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 47.365.000,00	Rp. 65.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.07.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 18 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 10,31% terhadap penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.547.000,00	Rp. 9.500.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.1.20.03.07.15	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN								Rp. 2.856.550.500,00	Rp. 3.000.000.000,00		
4.01.1.20.03.07.15.001	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Makanan dan minuman tamu 5 jenis	Tersedia layanan kerumahtanggaan pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian kualitas layanan kerumahtanggaan pimpinann dan tamu sesuai dengan standar pelayanan 100%	100%	Rp. 2.856.550.500,00	Rp. 3.000.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol									Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengisian tabung Damkar 29 tabung							
					Sewa kendaraan 1 tahun							
					Sewa peralatan dan perlengkapan kantor 10 jenis							
					Alat-alat/perengkapan 24 jenis							
					Pegawai Non PNS 31 orang							
					Pemeliharaan bangunan 9 unit							
					Pemeliharaan meubeleur 7 jenis							
					Pemeliharaan perlengkapan kantor 4 jenis							
					Pengisian tabung gas 60 kali							
					Peningkatan motivasi aparatur 150 org							
					Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15 jenis							
					Sewa tanaman 600 buah							
4.01.1.20.03.07.26	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN								Rp. 2.575.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00		
4.01.1.20.03.07.26.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolanan Pimpinan dan Tamu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum dan Protokol	Entertainment 1 tahun	Tersedianya layanan keprotokolanan kepada pimpinan dan tamu sesuai dengan standar pelayanan 100%	Dukungan 43,28% terhadap pencapaian kualitas keprotokolanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan	100%	Rp. 2.575.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Biro Umum dan Protokol	Sedang Berjalan
					Guide/penerjemah 144 oh							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol									Jumlah Pagu : Rp. 14.013.162.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Laporan hasil Forum komunikasi asisten sekda se-Jawa 50 peserta							
					Laporan hasil Forum komunikasi staf ahli se-Jawa 50 peserta							
					Laporan hasil Sosialisasi keprotokolan 140 peserta							
					Makanan dan minuman rapat pimpinan 1.800 os							
					Medical Check up 4 org							
					Pakaian dinas dan atribut petugas keprotokolan 3 jenis							
					Pengamanan tertutup 115 keg							
					Pengawasan jalan raya 175 unit							
					Petugas dimas diajeng 60 pasang							
					Tunjangan Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur = 2 org							
					Tunjangan Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur = 2 org							
					Upacara Peringatan Hari Besar dan Upacara Lainnya							
					VIP room bandara 2850 org/tamu							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD										Jumlah Pagu : Rp. 63.431.677.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.02	SEKRETARIAT DPRD											
4.02.1.20.04.00	Sekretariat DPRD											
4.02.1.20.04.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 4.005.684.000,00	Rp. 0,00		
4.02.1.20.04.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat tulis kantor 29 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 61,78 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan	100%	Rp. 2.048.008.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Jumlah surat keluar 2500 surat,							
					Jumlah surat masuk 2000 surat,							
					Komponen peralatan listrik dan penerangan kantor 10 jenis,							
					Majalah 6 Jenis,							
					Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional : 59 unit							
					Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 12 bulan (300m3),							
					Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 12 Bulan (375 Kwh),							
					Pembayaran Rek. telepon 6 sat sambungan 12 bulan,							
					Pembayaran SMS Gateway 1 Nomor telephone 12 bulan,							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD										Jumlah Pagu : Rp. 63.431.677.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengiriman dokumen 12 PKT,							
					Retribusi sampah perkotaan 12 bulan,							
					Surat Kabar Harian 9 jenis,							
4.02.1.20.04.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku,	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 24,92 % terhadap kelancaran pelayanan perkantoran SKPD	100%	Rp. 1.357.676.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Kinerja 2 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku,							
					Kinerja 25 orang tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK,							
					Kinerja 5 orang tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK,							
					Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.							
4.02.1.20.04.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 12,40 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran SKPD	100%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun.							
4.02.1.20.04.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 2.652.250.000,00	Rp. 0,00		
4.02.1.20.04.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan Gedung Kantor 8 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 16,89% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 352.405.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD										Jumlah Pagu : Rp. 63.431.677.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Perengkapan Gedung Kantor 3 jenis							
4.02.1.20.04.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan gedung kantor : 4 unit	Terpeliharanya gedung kantor 100%	Dukungan 44,84 % terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 180.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.1.20.04.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM 10 unit.		Dukungan 16,89% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM 49 unit,	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%						
4.02.1.20.04.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan gedung kantor 16 jenis,	Terpeliharannya peralatan dan perlengkapan kantor 100%	Dukungan 6,44% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 416.450.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Perlengkapan gedung kantor 5 jenis.							
4.02.1.20.04.00.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan Roda 2 (3 Unit)		Dukungan 16,89% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 503.395.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Kendaraan Roda 4 (2 Unit)	Tersedianya kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan sebesar 100%						
4.02.1.20.04.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 280.240.000,00	Rp. 0,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD										Jumlah Pagu : Rp. 63.431.677.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.1.20.04.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LAKIP SKPD B (80%)	Dukungan 6,36% terhadap penatausahaan keuangan dari capaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 18.080.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.1.20.04.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 20%	Dukungan 22,62% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.1.20.04.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 dan 2018 (Dokumen Tahun 2018 dan dokumen perubahan 2017)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standart 100%	Dukungan 63,89% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 192.222.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Dokumen Renstra sesuai RPJMD DIY 2017-2022 (1 keputusan sekretaris dewan),							
4.02.1.20.04.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,12% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 19.938.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.1.20.04.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								Rp. 34.370.361.500,00	Rp. 0,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD										Jumlah Pagu : Rp. 63.431.677.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.1.20.04.00.15.001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Sekretariat DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (4 kali 55 orang)	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 100%	Dukungan 5.97 % terhadap capaian peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp. 3.797.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.1.20.04.00.15.002	Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Sekretariat DPRD	Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS 2019 (2 dokumen);	Terselenggarannya Fyngsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar 100%	Dukungan 3.95% terhadap capaian peningkatan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	Rp. 1.892.908.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS 2018 (2 dokumen);							
					Persetujuan bersama Raperda APBD 2019 (1 dokumen);							
					Persetujuan bersama Raperda Pertangg, Pelaksana APBD 2017 (1 dokumen).							
					Persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2018 (1 dokumen);							
4.02.1.20.04.00.15.003	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Sekretariat DPRD	Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat (660 lokasi);	Terselenggaranya reses, public hearing dan konsultasi publik sesuai standar 100 %	Dukungan 8,52 % terhadap capaian peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp. 4.546.908.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/unjuk rasa (22 Laporan);							
					Laporan sarasehan/coffe morning/openhouse (2 laporan).							
4.02.1.20.04.00.15.004	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Sekretariat DPRD	Laporan hasil kerja (1 laporan x 3 masa sidang)	Terselenggaranya tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY sesuai dengan standar 100%	Dukungan 55.5 % terhadap capaian peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	100	Rp. 22.637.042.500,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					1 keputusan DPRD tentang pokok - pokok pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY Tahun 2019;							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 63.431.677.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
					Jumlah produk hukum yang dibahas (18 keputusan hasil pansus/panja/AKD)									
					Laporan hasil delegasi DPRD (3 kali);									
					Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan (3 masa sidang x 4 komisi);									
					Laporan hasil konsultasi/koordinasi ke luar daerah (5 laporan);									
					Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi keluar daerah (5 laporan)									
					Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah (2 kali);									
					Laporan hasil kunjungan kerja (4 laporan);									
					Laporan hasil pendampingan mitra kerja (2 laporan);									
					Laporan komisi hasil pembahasan : RAPBD 2019; RAPBD P 2018; KUA-PPAS 2019; KUA-PPAS Perubahan 2018; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran (6 Laporan Terkait perencanaan pembangunan dan anggaran)									
					Pengawasan komisi dengan peninjauan dalam daerah (30 kali)									
					Rekomendasi atas Uji Kepatuhan dan Kelayakan KPID DIY Periode 2017-2020 (2 rekomendasi)									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD										Jumlah Pagu : Rp. 63.431.677.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Review jadwal kegiatan DPRD (12 Bulan);							
					RKT DPRD (1 keputusan);							
4.02.1.20.04.00.15.005	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Sekretariat DPRD	Pandangan umum fraksi (210 PU fraksi);	Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%	Dukungan 2,55 % terhadap capaian peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp. 1.496.503.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Pendapat akhir fraksi (210 PU fraksi);							
					Surat Rekomendasi fraksi (18 rekomendasi penunjukkan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya).							
4.02.1.20.04.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH								Rp. 7.802.699.000,00	Rp. 0,00		
4.02.1.20.04.00.16.001	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Sekretariat DPRD	Kajian/harmonisasi terhadap raperda (8 raperda);	Terselenggaranya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar 100%	Dukungan 11.22 % terhadap capaian peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp. 5.107.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Daftar Raperda Inisiatif (5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD);							
					Kajian/harmonisasi terhadap raperda (8 raperda);							
					Kepwan Propemperda/is Perubahan tahun 2018 dan Propemperda/is Murni Tahun 2019 (2 keputusan);							
					Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY (1 rekomendasi).							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD										Jumlah Pagu : Rp. 63.431.677.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.1.20.04.00.16.002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Program 01-06	Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, Dokumen Kajian Kebijakan DPRD (4 kajian)	Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100 %	Dukungan 1,97 % terhadap capaian peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Rp. 1.595.409.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.1.20.04.00.16.003	Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan	7.Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di DIY	Sekretariat DPRD	Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, Dokumen Kajian Kebijakan DPRD (4 kajian)	Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100 %	Dukungan 1,97 % terhadap capaian peningkatan kinerja Pengembangan Regulasi daerah	100%	Rp. 1.100.290.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.02.1.20.04.00.17	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN								Rp. 3.867.600.000,00	Rp. 0,00		
4.02.1.20.04.00.17.001	Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Dokumen audio visual DPRD (4 komisi); Dokumentasi 40 bahan acara sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan. Laporan hasil kerja DPRD (1 laporan); Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD (12 bulan); Penyebarluasan informasi produk hukum (8 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan);	Terselenggaranya pengembangan dokumentasi kegiatan persidangan DPRD, sosialisasi dan dokumentasi hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%	Dukungan 100% terhadap capaian kinerja Pelayanan Kerumahtanggaan	100%	Rp. 3.867.600.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD										Jumlah Pagu : Rp. 63.431.677.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Sosialisasi/publik hearing produk hukum DPRD (6 produk hukum dewan);							
4.02.1.20.04.00.18	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN								Rp. 10.452.842.500,00	Rp. 0,00		
4.02.1.20.04.00.18.001	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia 5 pertemuan,	Tersedianya layanan keprotokolan kepada tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dan terselenggaranya tugas pimpinan DPRD sesuai dengan standar pelayanan 100%	Dukungan 100% terhadap capaian peningkatan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	Rp. 6.428.200.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
					Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan,							
					Layanan rapat paripurna istimewa DPRD 7 penyelenggaraan,							
					Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD 1 tahun,							
					Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD 220 stel,							
					Pendampingan eksekutif ke luar negeri 11 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan							
					Penyelenggaraan FORKOMPIMDA DIY 5 kali,							
4.02.1.20.04.00.18.002	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya jejaring kemitraan dengan media massa	Penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD sesuai standar 100%	Dukungan 100% terhadap terpenuhinya informasi kinerja dan hasil kerja DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada Publik	100%	Rp. 4.024.642.500,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD									Jumlah Pagu : Rp. 63.431.677.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa (10 jenis sarana media)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset										Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.05	KEUANGAN											
4.05.1.20.05.00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											
4.05.1.20.05.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 9.034.360.000,00	Rp. 9.233.000.000,00		
4.05.1.20.05.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat tulis kantor: 71 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 59 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 5.883.787.000,00	Rp. 6.008.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Barang cetakan 15 jenis, pengadaan 959.720 lembar, jilid 770 buku							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4: 29 unit							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2: 26 unit							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6: 1 unit							
					Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
					Kebersihan 10 gedung kantor, 2 gudang							
					Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor: 14 jenis							
					Langganan 6 jenis surat kabar harian, 2 jenis majalah dan tabloid : 12 bulans							
					Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet: 12 bulan							
					Pemilahan arsip keuangan in aktif 5.000 berkas,, penyusutan arsip keuangan 2.539 berkas,							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset **Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)					(12)	(13)
					Pengiriman dokumen: 114 dokumen									
					Peralatan rumah tangga 6 jenis;113 buah									
					Surat keluar: 12.160 lembar									
					Surat masuk 7350 lembar									
4.05.1.20.05.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja 14 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedia pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 19 %terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.920.573.000,00	Rp. 1.925.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan		
					KInerja 20 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai SPK									
					Kinerja 64 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku									
					KInerja 8 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku									
4.05.1.20.05.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 12,48% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.230.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan		
					Makan dan minum rapat serta jamuan tamu tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun									
4.05.1.20.05.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 18.864.975.000,00	Rp. 10.337.000.000,00				
4.05.1.20.05.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Gedung KPPD Sleman 1 unit	terbangunnya gedung sesuai DED 100 %	Dukungan 45,95% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 9.224.228.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset										Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Rehab Gedung kantor KPPD Kota(1 unit kanopi cek fisik R2)							
					Rehab KPPD Gunungkidul(1 unit ruang rapat seluas 196 m2)							
4.05.1.20.05.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan sesuai RKBMD 12 jenis	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 38 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 6.420.822.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Perlengkapan sesuai RKBMD 12 jenis							
4.05.1.20.05.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	" Gedung kantor sesuai RKBMD 18 unit gedung: a. DPPKA 4 unit b. KPPD Kota 2 unit c. KPPD Bantul 3 unit d. KPPD Kulonprogo 3 Unit e. KPPD Gunungkidul 3 Unit"	Terpelihara bangunan rumah dan gedung 100%	Dukungan 5,27% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 1.027.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD 10 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 0,37% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 625.000.000,00	Rp. 685.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD 29 unit							
					Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD 1 unit							
4.05.1.20.05.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	AC Central sesuai RKBMD 40 unit	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 8,25% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.544.925.000,00	Rp. 1.625.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					AC Split sesuai RKBMD 14 unit							
					Jaringan sesuai RKBMD 12 bulan							
					Peralatan kantor sesuai RKBMD 4 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset										Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.05.1.20.05.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 342.000.000,00	Rp. 357.500.000,00		
4.05.1.20.05.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan kinerja instansi Pemerintah yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKJIP: A	Dukungan 2,31% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 9.000.000,00	Rp. 9.500.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 5,91% terhadap penatausahaan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 23.000.000,00	Rp. 23.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	Dokumen perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan 2018 (2 dokumen)	Dukungan 84,3% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 285.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Informasi SKPD DPPKA yang lengkap, akurat dan terkini	Pembaharuan data website DPPKA secara kontinyu 100%						
					Materi informasi sesuai dengan data profil DPPKA terkini	3 Materi informasi						
					Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	Rakepgub tentang Renstra SKPD 2018-2022						
4.05.1.20.05.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,94% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.15	PROGRAM PENGANGGARAN BELANJA DAERAH								Rp. 3.301.283.000,00	Rp. 4.054.483.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset										Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.05.1.20.05.00.15.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	DIY	Perda APBD 2019 ditetapkan paling lambat Desember 2018 yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, ASB, SHBJ) dan peraturan perundangan yang berlaku: 3200 buku	Perda APBD TA.2019 tepat waktu dan akurat (1 dokumen)	Dukungan 51,91% terhadap ketepatan dan keakuratan dalam penganggaran belanja daerah	100 %	Rp. 2.615.000.000,00	Rp. 3.850.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.15.002	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	DIY	Perda PAPBD TA.2018 ditetapkan paling lambat September 2018 yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS perubahan, ASB dan SHBJ) dan Permendagri 31/2016 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, sebanyak 3.500 buku	Perda PAPBD TA.2018 yang tepat waktu dan akurat (1 dokumen)	Dukungan 18,91% terhadap ketepatan dan keakuratan dalam penganggaran belanja daerah	100 %	Rp. 481.800.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.15.003	Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	DIY	DPA SKPD disyahkan 24 hari kerja setelah APBD TA.2019 ditetapkan sesuai dengan perda APBD TA.2019 sebanyak 348 buku	DPA PA/KPA yang tepat dan akurat (73 DPA)	dukungan 43,02% terhadap ketepatan dan keakuratan dalam penganggaran Belanja	100 %	Rp. 204.483.000,00	Rp. 204.483.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					DPPA SKPD disyahkan 24 hari kerja setelah PAPBD 2018 ditetapkan sesuai dengan Pera PAPBD Ta.2018 sebanyak 546 buku	DPPA PA/KPA yang tepat dan akurat (130 DPPA)						
					SPD PA/KPA diterbitkan 1 hari kerja sesuai dengan DPA SKPD Ta.2018 yang telah disyahkan sebanyak 620 dokumen	SPD PA/KPA yang tepat dan akurat (120 SPD)						
4.05.1.20.05.00.16	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH								Rp. 2.119.050.000,00	Rp. 2.220.000.000,00		
4.05.1.20.05.00.16.001	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Danurejan	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY Tahun 2018 2 laporan	2 dokumen laporan keuangan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY yang tepat dan akurat	Dukungan 49% terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	100%	Rp. 1.559.200.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Laporan keuangan pemda DIY DIY TA 2017 un audited selesai Maret 2018 sebanyak 100 buku	1 dokumen laporan keuangan Pemda DIY TA.2017 yang tepat dan akurat						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset **Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran SKPD selesai bulan Juli 2018 sebanyak 100 buku	1 dokumen laporan keuangan Pemda DIY TA.2017 yang tepat dan akurat						
					Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD TA.2017 ditetapkan paling lambat akhir Juli 2018 sesuai Perda PAPBD TA.2017 sebanyak 200 buku	1 dokumen laporan keuangan pemda DIY TA.2017 yang tepat dan akurat						
4.05.1.20.05.00.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Danurejan	Sistem dan prosedur kebijakan akutansi akrual	1 sistem aplikasi SIPKD yang sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Dukungan 21% terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	100%	Rp. 559.850.000,00	Rp. 1.120.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.17	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH								Rp. 812.000.000,00	Rp. 815.000.000,00		
4.05.1.20.05.00.17.001	Pengendalian Belanja Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Danurejan	Dokumen SP2D 120 PA dan KPA diterbitkan 2 hari setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan sah dan lengkap	1 dokumen SP2D 120 PA/KPA yang sah dan akurat	Dukungan 100% terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	100%	Rp. 812.000.000,00	Rp. 815.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Gaji yang dikeluarkan dan disampaikan sebelum tanggal 5 setiap bulannya	200 bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu memahami penatausahaan						
					Laporan IWP TA.2018 (Taspen, Taperum, BPJS Kesehatan) sesuai dengan SP2D	1 laporan IWP tepat dan akurat						
4.05.1.20.05.00.18	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								Rp. 1.417.657.000,00	Rp. 1.747.500.000,00		
4.05.1.20.05.00.18.001	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	DIY	Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD kab/Kota 2017 diterima secara lengkap: 5 eksemplar	Keputusan tentang hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota TA.2017 (5 Keppub)	Dukungan 35% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	Rp. 367.723.000,00	Rp. 425.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Hasil evaluasi paling lama 15 hari setelah Raperda APBD Kab/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2019 sebanyak 5 eksemplar	Keputusan tentang hasil evaluasi APBD Kab/Kota TA.2019 (5 Keppub)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset **Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
					Hasil evaluasi paling lama 15 hari setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2018 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2018 sebanyak 5 eksemplar	Keputusan tentang hasil evaluasi PAPBD Kab/Kota 2018 (5 Kegnub)							
4.05.1.20.05.00.18.002	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Danurejan	Keputusan gubernur tentang bendahara, PA dan KPA, KPA Dana dekonsentrasi/TP 2019 diterbitkan paling lambat akhir Desember 2018 dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dengan Pergub tentang Sisdur PKD	9 Kegnub tentang penetapan bendahara, PA/KPA , 22 Kegnub tentang KPD Dana Dekon/TP yang tepat dan akurat	Dukungan 28% terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 509.189.000,00	Rp. 495.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah (PMK dan Permendagri	2 Pergub tentang Sisdur PKD dan Pengelolaan Dana BOS							
					Regulasi PPK BLUD	1 Rapergub tentang Penghapusan piutang BLUD							
4.05.1.20.05.00.18.003	Pembinaan BUKP	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	DIY	Dana bergulir BUKP	Dana bergulir BUKP Rp4.000.000.000,-	Dukungan 48% terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 540.745.000,00	Rp. 827.500.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kegnub tentang laporan keuangan tahunan BUKP TA.2017 dan Pembagian Laba TA.2017	2 Kegnub							
					Keputusan Kepala DPPKA tentang RKAT berdasarkan SE Pedoman penyusunan RKAT 2019 selambat-lambatnya akhir Nopember 2018	1 Keputusan							
					Laporan rasio deviden terhadap penyertaan modal BUKP (dari sebesar Rp.3.440.000.000,- (17.98%) di tahun 2017 menjadi Rp.3.662.000.000,- (18.31%) ditahun 2018	1 laporan							
					Penurunan NPL dari 25% ditahun 2017	menjadi 22,50% (tahun 2018)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset										Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Rapat koordinasi BUKP	5 kali						
					Raperda kelembagaan BUKP	1 Raperda						
					Training peningkatan kapasitas manajemen BUKP	5 angkatan						
4.05.1.20.05.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH								Rp. 3.135.563.000,00	Rp. 4.119.000.000,00		
4.05.1.20.05.00.19.001	Perencanaan Pendapatan Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Danurejan	SKPD berpendapatan menyusun perubahan anggaran pendapatan TA.2018 dan anggaran pendapatan tahun 2019 tepat waktu dan tepat penghitungan	2 naskah rancangan anggaran pendapatan perubahan 2018 dan anggaran pendapatan 2019	Dukungan 3% terhadap peningkatan pendapatan daerah	100%	Rp. 142.847.000,00	Rp. 145.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Kab/kota se DIY	Intensifikasi melalui sosialisasi kepada wajib pajak pusat,, koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerimaan dana transfer dan regulasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer, koordinasi SKPD pengelola dana transfer tiap bukan	Dana perimbangan semula tahun 2017 Rp2.461.741.043.739,- menjadi tahun 2018 Rp2.287.023.595.000,-	Dukungan 97% terhadap peningkatan pendapatan daerah	meningkatnya pendapatan daerah semula Rp4.710.329.983.976,- menjadi Rp4.782.585.573.060,93 (100%)	Rp. 2.992.716.000,00	Rp. 3.974.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Koordinasi yang baik dengan dealer otomotif dan PT jasa Raharja	lain-lain PD yang syah semula Rp Rp.869.490.391.847,- menjadi Rp1.773.432.740.847,-,-						
					Regulasi dari pemerintah yang berkaitan dengan [pungutan pajak daerah ditetapkan Desember 2017, , sosialisasi pajak daerah, koordinasi yang baik dengan SKPD berpendapatan, razia kendaraan bermotor dilakukan secara rutin,pelayanan kesamsatan dan SKPD berpendapatan yang prima, penagihan piutang pajak yang maksimal, database kendaraan yang akurat dan terkini (up to date), koordinasi yang baik denga BUKP	PAD semula dari Rp1.657.147.882.- menjadi 1.650.069.935.213,93,-						
4.05.1.20.05.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KOTA YOGYAKARTA								Rp. 1.793.200.000,00	Rp. 1,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset **Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.05.1.20.05.00.20.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Kota Yogyakarta	Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kota Yogyakarta Tahun 2018 (2017: Rp.135.680.000.000,- menjadi Rp.146.534.400.000,-) BBNKB Tahun 2018 (2017:Rp80.250.000.000,- menjadi Rp81.084.600.000,-)	100 %	Dukungan 12, 34 % terhadap target kontribusi PAD terhadap pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	100 %	Rp. 1.478.200.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.20.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Kota Yogyakarta	Data perkiraan piutang pajak KBM Rp20.000.000,- (peningkatan pendapatan dari terbayarnya piutang pajak Rp.5.000.000,-)	100 %	Dukungan 12, 34 % terhadap target kontribusi PAD terhadap pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	100 %	Rp. 315.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Data perkiraan potensi pajak KBM status dimiliki 7000 WP (tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki Rp. 1.000.000.000,-)	100 %						
4.05.1.20.05.00.21	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB BANTUL								Rp. 2.104.038.000,00	Rp. 2,00		
4.05.1.20.05.00.21.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	DIY	Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kab Bantul Tahun 2018 (2017: Rp.135.680.000.000,- menjadi Rp.146.000.000.000,-) BBNKB 2018 (semula 2017: 83.000.000.000,- menjadi Rp83.000.800.000,-)	100 %	Dukungan 87 % terhadap target pendapatan KPPD Bantul	100 %	Rp. 1.821.848.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.21.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Kabupaten Bantul	Data status kepemilikan 2000 WP	100 %	Dukungan 87 % terhadap target pendapatan KPPD Bantul	100 %	Rp. 282.190.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Penagihan terhadap WP yang mempunyai KBM dengan status dimiliki - Rp14.000.000,	100 %						
4.05.1.20.05.00.22	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB KULON PROGO								Rp. 1.190.994.000,00	Rp. 2,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset										Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.05.1.20.05.00.22.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Kabupaten Kulon Progo	Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kab Kulon Progo Tahun 2018 (2017: Rp.44,726,489.000,- menjadi Rp.49.196.000.000,- BBNKB (2018 (semula 2017: Rp25.500.000.000,- menjadi Rp25.765.200,-)	100 %	Dukungan 78 % terhadap target pendapatan KPPD Kulon Progo	100 %	Rp. 977.950.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.22.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Kabupaten Kulon Progo	Data perkiraan potensi Pajak Air permukaan (PAP) Rp 93.000.000,-	100 %	Dukungan 31 % terhadap target pendapatan KPPD Kulon Progo	100 %	Rp. 213.044.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					laporan status kepemilikan kendaraan bermotor terkini	100 %						
					Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak KBM sebesar Rp 15.000.000,-,-	100 %						
					Tertagihnya potensi pajak KBVM berstatus dimiliki sebesar Rp 825.000.000,-	100 %						
4.05.1.20.05.00.23	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB GUNUNGKIDUL								Rp. 1.173.918.000,00	Rp. 210.000.001,00		
4.05.1.20.05.00.23.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kab Gunungkidul Tahun 2018 (2017: Rp.47.912.000.000 menjadi Rp.52.808.000.000,-), BBNKB tahun 2018 (semula 2017: 26.000.000.000,- menjadi Rp26.270.400.000,-)	100 %	Dukungan 87 % terhadap target pendapatan KPPD Gunungkidul	100 %	Rp. 992.693.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.23.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Data perkiraan potensi Pajak Air permukaan (PAP) Rp 111.000.000,-	100 %	Dukungan 23 % terhadap target pendapatan KPPD Gunungkidul	100 %	Rp. 181.225.000,00	Rp. 210.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Data perkiraan potensi pajak KBM status dimiliki 4.800 WP	100 %						
					Peningkatan pendapatan dari terbayarnya piutang pajak Rp48.000.000,-	100 %						
					Tertagih potensi pajak KBM status dimiliki Rp.1.680.000.000,-	100 %						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset										Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.05.1.20.05.00.24	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB SLEMAN								Rp. 2.462.642.000,00	Rp. 2.498.610.000,00		
4.05.1.20.05.00.24.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Kabupaten Sleman	Peningkatan pendapatan pajak daerah dari PKB Kab Sleman Tahun 2018 (2017: Rp.266.590.000.000,- menjadi Rp290.300.000.000,- BBNKB Tahun 2018 (semula 2017 Rp163.060.000.000,- menjadi Rp168.975.000.000,-)	100 %	Dukungan 54,14 % terhadap target kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	100 %	Rp. 1.956.841.000,00	Rp. 1.998.610.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.24.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	DIY	Data perkiraan potensi Pajak Air permukaan (PAP) Rp 91.832.400,- Data perkiraan potensi PKB Rp 4.000.000.000,- (Pendapatan dari potensi pajak sebesar Rp4.000.000.000,-) Data potensi WP yang belum mendaftar 25.000WP (1 Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor yang terkini)	100 % 100 % 100 %	Dukungan 12, 34 % terhadap target pendapatan daerah KPPD Sleman	100 %	Rp. 505.801.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.1.20.05.00.25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH								Rp. 4.497.000.000,00	Rp. 4.500.000.000,00		
4.05.1.20.05.00.25.001	Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	DIY	Keputusan Sekda tentang RKBMD 2019 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni sesuai permendagri 19/2016 dan standardisasi Sarpras Laporan BMD sesuai permendagri 19/2016, aplikasi aset daerah berbasis akrual, pejabat penatausahaan barang pengguna 41 SKPD, pengurus barang 74 PA/KPA yang kapabel Laporan Sensus Barang Milik Daerah 2018	Keputusan Sekda tentang RKBMD 2019 yang tepat dan akurat (1 keputusan) Laporan BMD sesuai peraturan perundang-undangan (2 Laporan) Laporan Sensus BMD sesuai peraturan perundang-undangan (1 laporan)	Dukungan 100% terhadap aset daerah yang dapat dioptimalkan	100 %	Rp. 4.497.000.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset										Jumlah Pagu : Rp. 52.248.680.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pemanfaatan aset daerah yang dapat optimal berdasarkan data BMD yang tidak digunakan oleh SKPD: 1 . penjualan BMD sesuai kepgub tentang persetujuan penjualan dan data aset yang dimiliki Pemda DIY dan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, 2. Data TGR	Peningkatan PAD dari penjualan dan optimalisasi semula Rp 5.686.754.850,00 menjadi Rp6.020.926.650 dan penyelesaian TPTGR Rp 10.000.000,00						
					Roadmap strategic assets management	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan									Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
4.06.1.20.06.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan											
4.06.1.20.06.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 2.020.702.250,00	Rp. 1.881.000.000,00		
4.06.1.20.06.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat tulis kantor	45 jenis	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.050.702.250,00	Rp. 1.075.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Barang Cetak	14 jenis						
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	6 unit						
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	6 unit						
					Kebersihan gedung asrama	4 gedung						
					Kebersihan gedung kantor	2 gedung						
					Kebersihan gedung menza	1 gedung						
					Kebersihan laboratorium	1 gedung						
					Kebersihan masjid	1 gedung						
					Kebersihan ruang kelas	10 gedung						
					Kebersihan rumah dinas	1 gedung						
					Kir Kendaraan roda empat	1 unit						
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23 jenis						
					Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid 3 jenis	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan									Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan tv langganan	12 bulan						
					Penggandaan	70.000 lembar						
					Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5 buah						
					Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 jenis						
					Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16 jenis						
4.06.1.20.06.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja 11 orang pegawai tidak tetap dalam 1 tahun	11 orang	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	100%	Rp. 730.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Kinerja 11 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun	11 orang						
					Kinerja 2 orang pengelola barang dalam 1 tahun	2 orang						
					Kinerja 2 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun	2 orang						
					Materai	1500 lembar						
4.06.1.20.06.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	100%	Rp. 240.000.000,00	Rp. 256.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	1 tahun						
4.06.1.20.06.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 2.878.131.750,00	Rp. 3.205.084.000,00		
4.06.1.20.06.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Almari Asrama	64 buah	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	100%	Rp. 1.052.900.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Ember	64 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan									Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Gayung	132 buah						
					Jaringan komputer	1 paket						
					Keranjang Sampah Kecil	104 buah						
					Keset	208 buah						
					Meja Asrama	128 buah						
					Pompa air	1 buah						
					Tong Sampah	12 buah						
					Tripod Kamera	1 buah						
4.06.1.20.06.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laundry spre, gordyn, taplak meja	43000 kg	Terpelihara rumah dan gedung 100%	100%	Rp. 1.622.649.750,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Pembangunan lanskap taman dan parkir	1 unit						
					Pemeliharaan jaringan pompa air	1 paket						
					Pemeliharaan sumur dalam	1 buah						
					Perawatan kebun lingkungan	15058 m2						
					Perawatan taman lingkungan asrama	28340 m2						
					Perbaikan atap	100 m2						
					Perbaikan kamar mandi/wc	12 buah						
					Perbaikan lantai	50 m2						
					Perbaikan pintu	12 buah						
					Perbaikan saluran pipa air ledeng	8 buah						
					Rehab kamar asrama	40 unit						
4.06.1.20.06.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (Kendaraan roda4/roda 2)	12 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	100%	Rp. 117.782.000,00	Rp. 120.284.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.1.20.06.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Mebeleur terpelihara	3 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	100%	Rp. 84.800.000,00	Rp. 84.800.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan										Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis						
					Perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis						
4.06.1.20.06.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 310.958.000,00	Rp. 468.000.000,00		
4.06.1.20.06.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKJIP : A	Tersusunnya laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.1.20.06.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 21 kegiatan	100%	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	100%	Rp. 18.206.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.1.20.06.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	1 dokumen	- Rancangan Kepgub tentang Renstra Tahun 2018-2022 - Dokumen perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan TA. 2018 - Update data dan pengelolaan website, SIM Diklat, aplikasi Elearning secara kontinyu 100%	100%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Pengembangan Data dan Pengelolaan Sistem Informasi Kediklatan	1 sim						
4.06.1.20.06.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 21 kegiatan	100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	100%	Rp. 26.000.000,00	Rp. 26.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan									Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.06.00.06.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Penilaian Angka Kredit	1 laporan	Dukungan 100% peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 99.752.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	13 orang						
4.06.1.20.06.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN								Rp. 6.860.000.000,00	Rp. 8.300.000.000,00		
4.06.1.20.06.00.20.001	Diklat Kepemimpinan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	80 orang	Dukungan terhadap Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	50%	Rp. 4.850.000.000,00	Rp. 6.300.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	280 orang						
4.06.1.20.06.00.20.002	Pelatihan Dasar CPNS	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Diklat Prajabatan Golongan II Reguler	200 orang	Dukungan terhadap Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	50%	Rp. 2.010.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Diklat Prajabatan Golongan III Reguler	30 orang						
4.06.1.20.06.00.21	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL								Rp. 2.779.352.000,00	Rp. 5.400.000.000,00		
4.06.1.20.06.00.21.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Diklat Akuntansi Berbasis Akrua	30 orang	Dukungan terhadap Presentase Peserta Diklat Yang Lulus Post Test	50%	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 2.800.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Diklat Bendahara Daerah	30 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan									Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Diklat Entrepreneurship Spirit (pengembangan bandara dan kawasan tumbuh strategis)	30 orang						
					Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	60 orang						
					Diklat Pengelolaan Aset	30 orang						
					Diklat Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis	30 orang						
					Diklat Perencanaan dan Penganggaran	60 orang						
					Diklat TOF Prajab	30 orang						
4.06.1.20.06.00.21.002	Diklat Fungsional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Diklat P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah)	30 orang	Dukungan terhadap Presentase Peserta Diklat Yang Lulus Post Test	50%	Rp. 1.629.352.000,00	Rp. 2.600.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Diklat Perancang Peraturan UU	30 orang						
					Diklat PPNS (Penyidik PNS)	30 orang						
4.06.1.20.06.00.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN								Rp. 198.000.000,00	Rp. 200.000.000,00		
4.06.1.20.06.00.22.001	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Berita Acara Kesepakatan/Ketidaksepakatan diklat kemitraan	10 berita acara	Kesepakatan pengiriman peserta diklat dari daerah lain	100%	Rp. 198.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Rekomendasi penyelenggaraan diklat Kab/Kota	1 rekomendasi						
4.06.1.20.06.00.23	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU								Rp. 945.000.000,00	Rp. 1.050.000.000,00		
4.06.1.20.06.00.23.002	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Kurikulum	5 diklat	Tersusunnya kurikulum diklat 100%	100%	Rp. 155.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.1.20.06.00.23.003	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas	Badan Pendidikan	Penerbitan buletin diklat	4 edisi	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan	100%	Rp. 195.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Pendidikan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan									Jumlah Pagu : Rp. 15.992.144.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tata Kelola Pemerintahan	dan Latihan	Terpeliharanya bahan Pustaka	12481 buku					dan Pelatihan	
4.06.1.20.06.00.23.004	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Dokumen akreditasi	3 dokumen	Terlaksananya pengelolaan mutu diklat	100%	Rp. 480.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
					Laporan audit eksternal SMM ISO 9001:2015	1 laporan						
					Laporan evaluasi pasca diklat	6 laporan						
					Sertifikat Akreditasi Diklat Teknis/Fungsional	1 sertifikat						
					Sertifikat Akreditasi Perpustakaan	1 sertifikat						
					Sertifikat SMM ISO 9001:2015	1 sertifikat						
4.06.1.20.06.00.23.005	Penelitian Kediklatan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Latihan	Laporan penelitian	3 laporan	Tersusunnya laporan penelitian kediklatan yang tepat dan akurat untuk 3 judul penelitian kediklatan	100%	Rp. 115.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat									Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.03	INSPEKTORAT											
4.03.1.20.07.00	Inspektorat											
4.03.1.20.07.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.508.131.000,00	Rp. 2.250.000.000,00		
4.03.1.20.07.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Alat tulis kantor	19 jenis	42,96% dukungan terhadap tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 647.845.130,00	Rp. 750.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Barang cetakan	7 jenis						
					Jasa kebersihan gedung kantor	12 bulan						
					Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	3 jenis						
					Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	5 unit						
					Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	15 unit						
					Paket pengiriman	12 bulan						
					Pembelian Meterai	360 lembar						
					Penggandaan dokumen dokumen	73.500 lembar						
					Pengiriman surat khusus/perangko	300 Surat						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat					Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 buah						
					Peralatam kebersihan dan bahan pembersih	3 jenis						
					Retribusi sampah kantor	12 bulan						
					Tagihan internet up to 2 MBps	12 bulan						
					Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3	12 bulan						
					Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif	12 bulan						
4.03.1.20.07.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	21,01% dukungan terhadap tercapainya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 407.292.870,00	Rp. 500.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%						
					Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat					Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kinerja 8 orang Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%						
					Kinerja 9 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%						
					Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%						
4.03.1.20.07.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	30,04% dukungan terhadap tercapainya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 452.993.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%						
4.03.1.20.07.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 1.047.295.000,00	Rp. 510.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat										Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.03.1.20.07.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	D E D gedung Kantor	Tersedia gedung tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan 100%	72,76% dukungan terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 762.000.000,00	Rp. 0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.1.20.07.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	5 unit	23,39% dukungan terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 244.995.000,00	Rp. 475.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	13 unit						
4.03.1.20.07.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 8 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	0,38% dukungan terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 40.300.000,00	Rp. 35.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 3 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat					Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.03.1.20.07.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								Rp. 91.505.000,00	Rp. 120.000.000,00		
4.03.1.20.07.00.05.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui bimtek 2 angkatan	55 orang	100% dukungan terhadap tercapainya meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 91.505.000,00	Rp. 120.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	6 orang						
4.03.1.20.07.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 38.435.000,00	Rp. 162.500.000,00		
4.03.1.20.07.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMP, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP A	2,39% dukungan terhadap tercapainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 919.000,00	Rp. 7.500.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat									Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.03.1.20.07.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 19 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	3,27% dukungan terhadap tercapainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.256.500,00	Rp. 15.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.1.20.07.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan SKPD	4 dokumen	26,19% dukungan terhadap tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.065.000,00	Rp. 75.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Dokumen Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022	1 dokumen						
4.03.1.20.07.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 19 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan 100%	0,54% dukungan terhadap tercapainya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.913.000,00	Rp. 15.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat									Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.03.1.20.07.00.06.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Daftar Penilaian Angka Kredit JFA	1 tahun	52,77% dukungan terhadap tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.281.500,00	Rp. 50.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.1.20.07.00.15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH								Rp. 5.506.522.000,00	Rp. 7.225.000.000,00		
4.03.1.20.07.00.15.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Inspektorat	Evaluasi LKJIP SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY	41 LHE	67,23% dukungan terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Rp. 3.702.245.750,00	Rp. 4.300.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD	41 Laporan						
					Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	144 LHP						
					Laporan Monev SPIP SKPD	41 Laporan						
					Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	41 Laporan						
					Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY	41 Laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat									Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Laporan Review Laporan Keuangan DIY	1 Laporan						
4.03.1.20.07.00.15.002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi di DIY dan Kab/Kota se-DIY	4 Laporan	12,99 % dukungan terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Rp. 715.176.500,00	Rp. 1.000.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan						
					Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY tahun 2017	1 Laporan						
					Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saber Pungli tepat waktu	1 laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat									Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja								
4.03.1.20.07.00.15.003	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Inspektorat	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2018	1 SK Gubernur	2,73% dukungan terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Rp. 150.187.500,00	Rp. 150.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.1.20.07.00.15.004	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2018 pada 5 kab/kota	5 Laporan EKPPD	3,94% dukungan terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Rp. 216.962.000,00	Rp. 400.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat				Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah					Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Inspektorat												Jumlah Pagu : Rp. 8.191.888.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja									
4.03.1.20.07.00.15.005	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Inspektorat	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP	4 kali	5,58% dukungan terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Rp. 307.080.500,00	Rp. 200.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.1.20.07.00.15.006	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Inspektorat	Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS	5.500 PNS Gol IV dan III	1,52% dukungan terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Rp. 83.508.500,00	Rp. 175.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
					Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	95%							
4.03.1.20.07.00.15.007	Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Inspektorat	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	15 LHP	6,02% dukungan terhadap tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Rp. 331.361.250,00	Rp. 1.000.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
4.06.1.20.08.00	Badan Kepegawaian Daerah											
4.06.1.20.08.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 2.275.534.040,00	Rp. 2.340.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Peralatan dan perlengkapan kantor 25 jenis, Peralatan rumah tangga 1 9 jenis, Bahan bacaan 2 surat kabar, Barang cetakan dan penggandaan, Jasa kebersihan kantor 1 tahun, Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan, Jasa surat menyurat 1 tahun, Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24 jenis, Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional roda dua 5 unit dan roda empat 7 unit, Alat Tulis kantor 93 jenis, Pengelolaan arsip dinamis 6 bidang, Fumigasi Arsip 3 ruang	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 65% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.544.461.040,00	Rp. 1.600.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Kinerja 14 orang pengelola keuangan, pengelola kepegawaian dan pengelola barang selama 1 tahun; Kinerja 9 orang tenaga keamanan kantor/gedung/tempat kerja selama 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 14% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 331.073.000,00	Rp. 335.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 20% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 405.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 1.058.145.400,00	Rp. 1.035.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Bendera dan umbul-umbul 26 buah; Mebeleur (Almari besi 2 buah, Filling kabinet 5 buah, Rak arsip 4 buah); Balai PKP (Almari arsip kaca 3 buah, Meja kursi tamu 1 buah, HT 2 buah, Stopwatch 6 buah, Koper besar 2 buah, Bantal guling 12 buah, Sprei dan sarung bantal 6 buah, Bed cover batik 6 buah, Taplak meja 24 buah, Serbet makan 12 buah); PC branded 5 unit, Notebook 5 unit, Printer 5 unit, Mesin fax 1 unit, Scanner 1 unit; Balai PKP (LCD Projector 1 unit dan kulkas 1 unit)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 58% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 208.474.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun; Pemeliharaan taman 1 tahun	Terpelihara rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 22% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 665.864.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (roda empat dan roda dua) selama 1 tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 17% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 159.195.000,00	Rp. 160.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Pemeliharaan mebeleur 1 tahun; Pemeliharaan perlengkapan kantor 1 tahun; Pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kenutuhan 100%	Dukungan 2% terhadap sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 24.612.400,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 217.500.750,00	Rp. 193.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	LKJ-IP Tahun 2017 1 laporan	Nilai LKJ-IP A	Dukungan 6% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Laporan keuangan bulanan 12 laporan; Laporan keuangan semesteran dan porgnosis 2 laporan ; Laporan keuangan tahunan 1 laporan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 16% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 36.668.750,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	DPA 2019 1 dokumen, DPPA 2018 1 dokumen	Dokumen perencanaan 2019 dan perubahan 2018	Dukungan 63% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 145.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Publikasi Website	Pembaharuan publikasi informasi BKD secara kontinyu 100%						
					Renja SKPD	1 dokumen						
					RKA	1 dokumen						
					RKT dan PK	2 dokumen						
					ROPK	1 dokumen						
4.06.1.20.08.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Laporan program dan kegiatan bulanan 12 laporan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 14% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.832.000,00	Rp. 26.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN								Rp. 2.587.265.000,00	Rp. 3.400.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Formasi dan proyeksi kebutuhan pegawai	2 dokumen	Dukungan 20% terhadap perencanaan, pengadaan pegawai dan pengelolaan data kepegawaian	100%	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.15.002	Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Arsip dokumen file perorangan	7500 arsip	Dukungan 10% terhadap perencanaan, pengadaan pegawai dan pengelolaan data kepegawaian	100%	Rp. 987.265.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Arsip dokumen kolektif	400 SK kolektif						
					Penyediaan backup data pegawai	Data terintegrasi, valid dan update 100%						
4.06.1.20.08.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI								Rp. 5.622.266.210,00	Rp. 5.890.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.16.001	Penegakan Disiplin Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Mesin presensi	30 unit mesin presensi	Dukungan 2% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan karir pegawai	100%	Rp. 632.272.300,00	Rp. 290.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Pemeliharaan mesin presensi	244 unit mesin presensi						
					Penurunan kasus pelanggaran hukum selama tahun 2018; Penetapan hukum pegawai; Laporan disiplin pegawai	1 Laporan (target 100%)						
4.06.1.20.08.00.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi kediklatan	Terkirimnya PNS dalam diklat dan mengikuti diklat 100% (350 orang)	Dukungan 10% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan karir pegawai	100%	Rp. 3.489.993.910,00	Rp. 5.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi pendidikan	Terpenuhinya standar pendidikan pegawai 100%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.16.003	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Penempatan SDM sesuai formasi	100%	Dukungan 20% terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengembangan karir pegawai	100%	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Pos jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	100%						
4.06.1.20.08.00.17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI								Rp. 1.957.652.100,00	Rp. 1.900.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Fasilitasi JKK/JKN	20 orang	Dukungan 50% terhadap pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai	100%	Rp. 1.492.652.100,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Lomba MTQ	4 cabang lomba						
					Lomba olah raga ASN Pemda DIY	5 cabang lomba						
					Penghargaan Satyalancana Karya Satya	600 orang						
					Peningkatan kinerja organisasi dan aparatur (hasil penilaian TPP)	4 kali						
4.06.1.20.08.00.17.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Kenaikan pangkat akurat dan tepat waktu	900 PNS	Dukungan 50% terhadap pembinaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai	100%	Rp. 465.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Pembekalan PNS calon pensiun	700 PNS						
					Pemensiunan pegawai akurat dan tepat waktu	700 PNS						
					Rakor Kenaikan Pangkat Terpadu	2 Periode						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 16.090.301.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.06.1.20.08.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH								Rp. 125.000.000,00	Rp. 130.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.18.001	Pengelolaan Sertifikasi Layanan Mutu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Layanan pelanggan meningkat melalui sertifikasi layanan mutu 1 laporan	Tercapainya peningkatan layanan aparatur 100%	Dukungan 100% terhadap peningkatan penatausahaan kepegawaian daerah	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.1.20.08.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI								Rp. 2.246.937.500,00	Rp. 2.500.000.000,00		
4.06.1.20.08.00.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Profil kompetensi luar dan dalam DIY	760 orang	Dukungan 50% terhadap pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai	100%	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Profil potensi luar dan dalam DIY	860 orang						
4.06.1.20.08.00.19.002	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Kesepalitan kerjasama pengukuran kompetensi 2 kesepakatan	Tercapainya kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi 100%	Dukungan 50% terhadap pengelolaan pengukuran kompetensi pegawai	100%	Rp. 446.937.500,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
					Meningkatnya kompetensi sumber daya assessor melalui diklat dan pelatihan	Tercapainya peningkatan kapasitas assessor 100%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 15.331.111.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.1.20.10.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah											
1.05.1.20.10.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.624.089.980,00	Rp. 2.020.000.000,00		
1.05.1.20.10.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Jasa berlangganan surat kabar selama 1 tahun.	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Pelayanan administrasi pelaksanaan lancar dengan Dukungan 60% terhadap terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Target Kinerja Program 2018	100%	Rp. 867.046.980,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Jasa TV berlangganan selama 1 tahun.							
					Pembayaran 1 rekening PDAM selama 1 tahun.							
					Pembayaran rekening 12 nomor telepon selama 1 tahun.							
					Pembayaran rekening listrik 4 gedung selama 1 tahun.							
					Pengisian tabung gas dan pendukung kebersihan selama 1 tahun.							
					Penyediaan ATK							
					Penyediaan barang cetak dan penggandaan							
					Penyediaan benda pos dan pengiriman paket/surat untuk 1 tahun.							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 15.331.111.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.1.20.10.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pengelolaan administrasi barang selama 1 tahun.	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 24 % terhadap terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Target Kinerja Program 2018	100%	Rp. 507.043.000,00	Rp. 340.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Pengelolaan administrasi kepegawaian selama 1 tahun.							
					Pengelolaan administrasi keuangan selama 1 tahun.							
					Pengelolaan arsip/tata usaha selama 1 tahun.							
					Penyediaan jasa keamanan selama 1 tahun.							
1.05.1.20.10.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Makan minum rapat	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 19,50% terhadap terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Target Kinerja Program Tahun 2018	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 380.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Terbayarnya biaya perjalanan dinas							
1.05.1.20.10.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 484.800.000,00	Rp. 800.000.000,00		
1.05.1.20.10.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1 unit atv,	Terpelihara kendaraan dinas/operasional sesuai standar Sarpras 100%	Terpelihara kendaraan dinas/operasional sesuai standar Sarpras	100%	Rp. 347.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					1 unit forklift,							
					1 unit mobil pembersih debu							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 15.331.111.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					12 unit kendaraan roda 4 bensin ,							
					18 unit kendaraan roda 2,							
					4 unit kendaraan roda 4 solar,							
					4 unit Motor tempel/ kapal,							
					9 unit kendaraan roda 6 solar,							
1.05.1.20.10.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat selama 1 tahun	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan Dukungan 12% terhadap terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur Perkantoran terhadap Target Kinerja Program Tahun 2018	100%	Rp. 137.800.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.20.10.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 113.524.000,00	Rp. 248.000.000,00		
1.05.1.20.10.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan kinerja instansi Pemerintah yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKj-IP A	Dukungan 5% terhadap pencapaian terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.372.000,00	Rp. 12.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 15.331.111.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.1.20.10.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan	Laporan Keuangan dengan deviasi 10%	Terpantaunya Realisasi Anggaran	100%	Rp. 19.230.000,00	Rp. 24.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Laporan keuangan bulanan 12 laporan;							
					Laporan keuangan semesteran dan prognosis 2 laporan;							
1.05.1.20.10.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen Rancangan Renstra SKPD	1 dokumen	Dukungan 70% terhadap pencapaian terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 73.870.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Dokumen RKA	1 dokumen						
					DPA	1 dokumen						
					DPPA	1 dokumen						
					RENJA	1 dokumen						
					ROPK	1 dokumen						
1.05.1.20.10.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 12% terhadap pencapaian terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.052.000,00	Rp. 12.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.20.10.00.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA								Rp. 2.854.819.520,00	Rp. 11.000.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 15.331.111.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.1.20.10.00.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	DIY	(1) Desa/kelurahan Tangguh Bencana (lokasi: Donotirto Kretek Bantul; Tirtosari kretek Bantul; Tuksono Sentolo KP; Salamrejo Sentolo KP; Garongan Panjatan KP; Bugel Panjatan KP; Girimulyo Panggang GK; Kenteng Ponjong GK; Beji Ngawen GK; Bunder Patuk GK)	10 destana	Dukungan untuk Penurunan indeks risiko bencana 60%	100%	Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					(2) Peringatan pekan PRB di DIY	1 kegiatan						
1.05.1.20.10.00.15.002	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	DIY	(1) Sekolah Siaga Bencana, lokasi: SMK N 1 Purwosari GK; SMPN 3 Panggang; SMK Kelautan KP; SMAN Temon; SMK Muh Prambanan; SMPN 4 Kalasan; SMK Muh 1 Bantul; SMK N 1 Pundong; SMP Gotong-royong Kota Yk; SMA Gotong-royong Kota Yk; dan 3 sekolah lanjutan dari SSB tahun 2017)	10 SSB	60% dukungan untuk Penurunan indeks risiko bencana	100%	Rp. 1.154.819.520,00	Rp. 7.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					(2) Peringatan hari kesiapsiagaan nasional di DIY	1 kegiatan						
1.05.1.20.10.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA								Rp. 8.932.277.500,00	Rp. 13.600.000.000,00		
1.05.1.20.10.00.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1) Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam penanganan darurat bencana. Relawan dan dan petugas kedaruratan mendapatkan dukungan logistik dalam menangani kejadian bencana di wilayah DIY.	(1) 500 orang mengikuti latihan dan gladi bencana. 1500 orang relawan dan petugas kedaruratan DIY.	Dukungan 40% Penanganan Kejadian di Lokasi Bencana.	100%	Rp. 1.777.287.500,00	Rp. 2.600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 15.331.111.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					(2) Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana 45 orang.	(2) 45 orang.						
					(3) Alat perlindungan Diri Urban SAR.	(3) 10 Set peralatan (Untuk pencarian dan penolongan kedaruratan karakteristik perkotaan)						
1.05.1.20.10.00.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1) Kesiapsiagaan dan reaksi cepat penanganan kedaruratan di DIY didukung dengan sistem reaksi cepat di Pusdalops PB DIY	Aplikasi Disaster Manajemen Information System terintegrasi 1 set, Sistem Komunikasi Kedaruratan terpadu 1 set	Dukungan 50 % Penanganan Kejadian di Lokasi Bencana	100%	Rp. 6.052.310.000,00	Rp. 8.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					(2) PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana.	(2) Honor 16 Operator, 4 Petugas Administrasi dan 4 supervisor, laporan harian, laporan bulanan dan buku Data Informasi Bencana DIY (DIBI)						
1.05.1.20.10.00.16.003	Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	DIY	(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana. Lokasi: 15 desa, yaitu: di Kecamatan Kokap, Kulonprogo (Desa Kalirejo, Hargomulyo, Hargorejo), Kecamatan Imogiri, Bantul (Desa Karangtengah, Selopamiro, Wukirharjo0, dan Kecamatan Patuk, Gunungkidul (Desa Semoyo, Pengkok, Beji, Bunder, Putat, Salam, Patuk, Nglanggeran, Terbah)	(1) 15 kelompok	Prosentase pemenuhan kebutuhan logistik (dalam kedaruratan) sesuai dengan Pedoman (Perka BNPB 7 th 2008) 23%	100%	Rp. 1.102.680.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 15.331.111.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					(2) Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana.	(2) 1 kelompok (BPBD Kab/kota dan SKPD DIY yg terkait dengan Kebencanaan)						
					(3) Tertatanya Administrasi Update Data Logistik dan Peralatan secara Periodik.	(3) 1 laporan update data						
					(4) Tersedianya bantuan Logistik dan Peralatan dalam rangka Penanggulangan Bencana.	(4) 1400 paket logistik.						
					(5) Tersedianya perlengkapan Penanggulangan Banjir dan longsor (brongjong)	(5) 500 brongjong						
					(6) Terpenuhinya Pengelolaan dan pendistribusian Logistik dan Peralatan	(6) 1 laporan data Sarpras PB						
1.05.1.20.10.00.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA								Rp. 1.321.600.000,00	Rp. 7.500.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 15.331.111.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.1.20.10.00.17.001	Pengelolaan Rehabilitasi Pasca Bencana	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Samigaluh Gerbosari	Bantuan Stimulan Perumahan Pasca Bencana rusak berat akibat bencana tanah longsor sebanyak 10 KK (penerima: "Ponijan Padukuhan Jeruk, Desa Gerbosari, Kec. Samigaluh"; "Sumitro Padukuhan Jeruk, Desa Gerbosari, Kec. Samigaluh"; "Wagimin Padukuhan Manggis, Desa Gerbosari, Kec. Samigaluh"; "Budi Kartono Padukuhan Manggis, Desa Gerbosari, Kec. Samigaluh"; "Mitro Harjono Padukuhan Jeruk, Desa Gerbosari, Kec. Samigaluh"; "Sarjinem Padukuhan Jeruk, Desa Gerbosari, Kec. Samigaluh"; "Sudiran Padukuhan Jeruk, Desa Gerbosari, Kec. Samigaluh"; "Harjowiyono Padukuhan Jeruk, Desa Gerbosari, Kec. Samigaluh"; "Supartinah Jeruk 12/06, Gerbosari, samigaluh")	100%	Dukungan 30,14 % pemulihan wilayah terdampak bencana	100%	Rp. 321.600.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.20.10.00.17.002	Pengelolaan Rekonstruksi Pasca Bencana	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	DIY	(1) Kajian penanggulangan bencana tanah longsor di DIY (lanjutan).	1 dokumen.	Dukungan 60% Pemulihan Pascabencana yang berprinsip Build back better and safer.	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					(2) Kajian Pengelolaan wisata minat khusus untuk Pemulihan Ekonomi pascabencana erupsi Merapi.	1 dokumen.						
					(3) Sosialisasi Rancang Bangun Bangunan tahan/aman bencana.	4 kabupaten dan 1 kota.						
					(4) Pelatihan DaLA bagi aparatur Pemerintah Kabupaten/kota dan Desa/Kelurahan.	4 kabupaten dan 1 kota.						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah						Jumlah Pagu : Rp. 15.331.111.000,00						
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					(5) Koordinasi dan sosialisasi Penyelesaian Permasalahan relokasi (Sudimoro, Pelem, Kejambon, Sengir dan Bokesan).	5 lokasi, 1 kabupaten.						
					(6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi pascabencana.	4 kabupaten dan 1 kota.						
					(7) Pelatihan Sistem Informasi Geografis tingkat Dasar untuk Aparatur di wilayah pascabencana.	4 kabupaten dan 1 kota.						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 3.909.411.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.18	PENANAMAN MODAL											
1.18.1.20.11.00	Kantor Perwakilan Daerah											
1.18.1.20.11.00.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA DAERAH								Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00		
1.18.1.20.11.00.15.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	4.Sosial Budaya	1.1.3. Melestarikan Dan Mengembangkan Kebudayaan DIY.	DKI Jakarta	Peningkatan pengunjung Pameran pada 2 event	semula (2017)19.000 org menjadi 19.500 org	Dukungan 94 % terhadap kualitas penyelenggaraan promosi potensi daerah dan Seni budaya daerah	100 %	Rp. 850.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
1.18.1.20.11.00.15.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	4.Sosial Budaya	1.1.3. Melestarikan Dan Mengembangkan Kebudayaan DIY.	Jabodetabek	Pengunjung Kirab dan Atraksi Budaya Rakyat Yogyakarta 1200 orang	Terpublikasinya Seni dan budaya Yogyakarta 100%	Dukungan 4 % terhadap kualitas promosi potensi daerah dan seni budaya daerah	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.11.00	Kantor Perwakilan Daerah											
4.01.1.20.11.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.870.569.000,00	Rp. 2.011.000.000,00		
4.01.1.20.11.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Arsip Dinamis SKPD 35.000 berkas	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 49 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung Kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 908.401.000,00	Rp. 980.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
					ATK 33 jenis							
					Barang cetakan 6 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 3.909.411.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)						
					Barang penggandaan 30.000 lembar									
					Bukti pembayaran air 2 sambungan									
					Bukti pembayaran internet 2 jaringan									
					Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh									
					Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu 11 unit									
					Bukti pembayaran telepon 5 saluran									
					Bukti pembayaran langganan televisi kabel 12 saluran									
					Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ; LB:5.227,5 m2									
					Kebersihan gedung mess Pedati LT: 1.200 m2 ; LB: 978 m2									
					Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ; LB: 1.087m2									
					Majalah 12 eks									
					Pengiriman 1 tahun									
					Pengisian tabung gas 30 kali									
					pengisian tabung pemadam kebakaran 12 tabung									
					Peralatan listrik 14 jenis									
					Surat kabar 720 eks									
					Surat keluar 500 lembar									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 3.909.411.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Surat masuk 350 lembar							
4.01.1.20.11.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100 %	Dukungan 28 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 522.168.000,00	Rp. 576.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
					Kinerja 1 orang penyusun program dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Kinerja 1 orang keamanan kantor dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					kinerja 2 orang pengelola barang dalam setahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
4.01.1.20.11.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100 %	Dukungan 24 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 440.000.000,00	Rp. 455.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
					makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 3.909.411.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.11.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 481.985.000,00	Rp. 605.000.000,00		
4.01.1.20.11.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 4 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 10 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
4.01.1.20.11.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	pemeliharaan Gedung sesuai RKBMD 3 unit ; Anjungan DIY di TMII LB:5.227,5 m2, gedung kantor di Menteng LB: 1.087m2, gedung di Pedati LB: 978 m2	Terpelihara gedung 100 %	Dukungan 15 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 75.600.000,00	Rp. 80.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
4.01.1.20.11.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan roda empat 7 unit	Tersedianya kendaraan dinas operasional sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 67 % terhadap sarana prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 323.900.000,00	Rp. 400.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
					Kendaraan roda dua 3 unit							
4.01.1.20.11.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 9 jenis	Terpeliharanya peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 7 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 32.485.000,00	Rp. 60.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
4.01.1.20.11.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 130.025.000,00	Rp. 15.900.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 3.909.411.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.11.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir bulan Februari 2018	Nilai LAKIP SKPD A	Dukungan 0.05% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 2.820.000,00	Rp. 6.500.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
4.01.1.20.11.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 3 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 5.200.000,00	Rp. 6.200.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
4.01.1.20.11.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Aplikasi Penginapan	1 Aplikasi	Dukungan 92 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 119.145.000,00	Rp. 0,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
					Dokumen Renstra, ROPK, Renja,	Dokumen yang digunakan dasar pelaksanaan kegiatan						
					Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	Dokumen perencanaan SKPD tahun 2019 dan Perubahan 2018						
4.01.1.20.11.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 95%	Dukungan 1,4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 2.860.000,00	Rp. 3.200.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 3.909.411.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.11.00.29	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS LAYANAN KANTOR PERWAKILAN DAERAH								Rp. 526.832.000,00	Rp. 540.500.000,00		
4.01.1.20.11.00.29.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penginapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Sarana prasarana penginapan 36 jenis	Terpenuhinya sarana dan prasarana penginapan sesuai kebutuhan 100 %	Dukungan 30 % terhadap fasilitas layanan Kaperda terhadap masyarakat DIY di Jakarta	100 %	Rp. 161.400.000,00	Rp. 155.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
4.01.1.20.11.00.29.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Kenaikan jumlah pendapatan penginapan	dari Rp 450.000.000(2017) menjadi Rp 475.000.000	Dukungan 41 % terhadap layanan Kaperda yang mendukung pelayanan	100 %	Rp. 215.432.000,00	Rp. 225.500.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
					Transportasi dan keprotokolan pimpinan dan tamu	Terlayannya transportasi dan keprotokolan pimpinan dan tamu 100 %						
4.01.1.20.11.00.29.003	Pelayanan Informasi dan Koordinasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DKI Jakarta	Rekomendasi Kerjasama dengan kantor perwakilan se Indonesia dan paguyuban masyarakat DIY	2 rekomendasi	Dukungan 37 % terhadap layanan kantor perwakilan daerah yang mendukung pelayanan	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Kantor Perwakilan Daerah	Sedang Berjalan
					Warga DIY yang berada di Jabodetabek	350 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja										Jumlah Pagu : Rp. 305.588.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.20.12.00	Sekretariat Parampara Praja											
4.01.1.20.12.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 180.951.000,00	Rp. 232.045.165,00		
4.01.1.20.12.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat tulis kantor 33 Jenis	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	Dukungan 22,75% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung tugas dan fungsi organisasi	100%	Rp. 45.634.000,00	Rp. 52.800.000,00	Sekretariat Parampara Praja	Sedang Berjalan
					Barang cetakan 15 jenis							
					Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/ operasional tepat waktu roda dua 2 kendaraan							
					Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/ operasional tepat waktu roda empat 4 kendaraan							
					Buku / Kepustakaan 25 buku							
					Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2 Jenis							
					Majalah 2 Jenis							
					Penggandaan 15.117 lembar							
					Peralatan rumah tangga 11 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja										Jumlah Pagu : Rp. 305.588.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Surat Kabar 3 Surat Kabar							
4.01.1.20.12.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja 1 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 28,44% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100%	Rp. 71.295.000,00	Rp. 66.000.000,00	Sekretariat Parampara Praja	Sedang Berjalan
					Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
					Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
					Kinerja 2 orang pegawai honorer/non pns/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
					Kinerja 5 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku							
4.01.1.20.12.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 48,80% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100%	Rp. 64.022.000,00	Rp. 113.245.165,00	Sekretariat Parampara Praja	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja										Jumlah Pagu : Rp. 305.588.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
4.01.1.20.12.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 91.450.000,00	Rp. 132.000.000,00		
4.01.1.20.12.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas / operasional roda dua 2 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 51,43% terhadap sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100%	Rp. 83.250.000,00	Rp. 99.000.000,00	Sekretariat Parampara Praja	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas / operasional roda empat 4 unit							
4.01.1.20.12.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan gedung kantor 14 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 17,14 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.200.000,00	Rp. 33.000.000,00	Sekretariat Parampara Praja	Sedang Berjalan
					Perlengkapan gedung kantor 5 jenis							
4.01.1.20.12.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 33.187.000,00	Rp. 43.900.000,00		
4.01.1.20.12.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Tercapainya nilai LKJIP B 75% - 85%	Dukungan 12,82 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.901.000,00	Rp. 6.000.000,00	Sekretariat Parampara Praja	Sedang Berjalan
4.01.1.20.12.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 12,82 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.048.000,00	Rp. 6.000.000,00	Sekretariat Parampara Praja	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja										Jumlah Pagu : Rp. 305.588.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.20.12.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen rancangan Renstra SKPD 2018-2022 1 dokumen	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 100%	Dukungan 51,28 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 2018	100%	Rp. 18.500.000,00	Rp. 22.000.000,00	Sekretariat Parampara Praja	Sedang Berjalan
					ROPK, Renja, Penjabaran Renstra Setda, RKA, DPA 1 Tahun							
4.01.1.20.12.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 99%	Dukungan 23,08 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.738.000,00	Rp. 9.900.000,00	Sekretariat Parampara Praja	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan									Jumlah Pagu : Rp. 2.739.535.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.09	PANGAN											
1.09.1.21.01.00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											
1.09.1.21.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 820.818.050,00	Rp. 1.010.205.500,00		
1.09.1.21.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat Tulis Kantor 28 Jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap terwujudnya kinerja administrasi perkantoran yang baik guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	Rp. 393.734.631,00	Rp. 590.383.500,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
					Barang cetakan 10 macam blangko cetakan							
					Barang penggandaan 30.000 lembar							
					Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 tepat waktu 18 unit							
					Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu 6 unit							
					Bukti pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah 12 kuitansi							
					Kebersihan gedung kantor seluas 62.169 M2							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan									Jumlah Pagu : Rp. 2.739.535.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis							
					Majalah 1 Jenis (12 bulan)							
					Pembayaran belanja internet 1 saluran 12 bulan							
					Pembayaran belanja listrik 5 KWH meter 12 bulan							
					Pembayaran belanja telepon 5 saluran 12 bulan							
					Pengiriman dokumen 500 surat							
					Surat Kabar 2 Jenis (12 bulan)							
					Surat Keluar 500 Surat							
					Surat Masuk 750 surat							
1.09.1.21.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Bukti Bayar Honorarium Pengelola Barang 2 Orang (12 Bulan)	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 33% terhadap terwujudnya kinerja administrasi perkantoran yang baik guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	Rp. 277.883.419,00	Rp. 239.822.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
					Bukti Bayar Honorarium Pengelola Kepegawaian 2 Orang (12 Bulan)							
					Bukti Bayar Honorarium Pengelola Keuangan 5 Orang (12 Bulan)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan									Jumlah Pagu : Rp. 2.739.535.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Bukti pembayaran honorarium pegawai kontrak/tidak tetap (operator komputer, pengelola database,petugas kearsipan dan sopir) 4 orang (12 bulan)							
					Bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan pegawai kontrak/tidak tetap 12 kuitansi							
					Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja 6 orang (12 bulan)							
1.09.1.21.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Koordinasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 33% terhadap terwujudnya kinerja administrasi perkantoran yang baik guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100%	Rp. 149.200.000,00	Rp. 180.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
					Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan							
					Makanan dan minuman sidang 3.312 orang							
1.09.1.21.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 214.228.750,00	Rp. 430.185.000,00		
1.09.1.21.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Gedung kantor dan prasarananya terpelihara 3 jenis	Terpelihara rumah dan gedung 100%	Dukungan 16,67 % terhadap tersedianya sarana prasarana aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan									Jumlah Pagu : Rp. 2.739.535.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.09.1.21.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara 18 Unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 16,67% terhadap tersedianya sarana prasarana aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100 %	Rp. 172.095.000,00	Rp. 270.185.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara 6 unit							
1.09.1.21.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Peralatan gedung kantor terpelihara 13 Jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 16,67% terhadap tersedianya sarana prasarana aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100 %	Rp. 22.133.750,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
					Perlengkapan gedung kantor terpelihara 9 Jenis							
1.09.1.21.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 86.313.200,00	Rp. 106.300.000,00		
1.09.1.21.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKjIP : B	Dukungan 25% terhadap terwujudnya pencapaian penata usaha keuangan dan kinerja program guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100 %	Rp. 4.958.000,00	Rp. 5.500.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan									Jumlah Pagu : Rp. 2.739.535.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.09.1.21.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 17 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya pencapaian penata usaha keuangan dan kinerja program guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100 %	Rp. 4.515.000,00	Rp. 5.500.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.09.1.21.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	ROPK, Renstra, Renja, RKA, DPA, sistem informasi dan database ketahanan pangan sesuai dengan aturan yang berlaku, Renstra SKPD	Dokumen perencanaan SKPD TA 2018 dan perubahan TA 2017 serta sistem informasi dan database ketahanan pangan tersedia 100% pangan tersedia 100%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya pencapaian penata usaha keuangan dan kinerja program guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100 %	Rp. 63.864.750,00	Rp. 72.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.09.1.21.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 17 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya pencapaian penata usaha keuangan dan kinerja program guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100% di tahun 2018	100 %	Rp. 12.975.450,00	Rp. 23.300.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.09.1.21.01.00.23	PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN								Rp. 1.368.175.000,00	Rp. 1.610.000.000,00		
1.09.1.21.01.00.23.001	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Banhi Demapan (desa lama/pengembangan) 2 kelompok	Pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan Desa Rawan pangan terlaksana 100 %	Menurunnya jumlah desa rawan pangan sebesar 2 desa dari tahun 2017 sebanyak 14 desa menjadi 12 desa pada tahun 2018	100 %	Rp. 383.100.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan									Jumlah Pagu : Rp. 2.739.535.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Gerakan optimalisasi desa sejumlah 11 desa							
					Operasional demapan 1 tahun							
					Operasional Dewan Ketahanan Pangan 1 tahun							
					Penghargaan demapan 1 kali							
					Peta SKPG dan FSVA 2 Dokumen							
1.09.1.21.01.00.23.002	Distribusi Pangan Masyarakat	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Informasi harga dan distribusi pangan serta informasi pasokan dan akses pangan 2 jenis data	Pelatihan dan pemberdayaan akses pangan terlaksana 100%	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan DIY sebesar 20 ton dari tahun 2017 sebesar 527 ton beras menjadi 547 ton beras pada tahun 2018	100 %	Rp. 248.300.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
					Pelatihan, fasilitasi dan pemberdayaan KRPL 17 kelompok	Pelatihan dan pemberdayaan akses pangan terlaksana 100%						
					Pendampingan LDPM dan LAPM 1 tahun							
1.09.1.21.01.00.23.004	Penyelenggaraan Jogja Benih	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Data dan informasi perbenihan dan layanan konsultasi 1 tahun	Lembaga Jogja Benih berjalan optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya 100%	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan DIY sebesar 20 ton dari tahun 2017 sebesar 527 ton beras menjadi 547 ton beras pada tahun 2018	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
					Forum perbenihan 1 kali							
					Program kerja perbenihan 1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan									Jumlah Pagu : Rp. 2.739.535.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.09.1.21.01.00.23.005	Penyediaan Cadangan Pangan	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Banhi pemanfaatan lahan bawah tegakan 2 kelompok	Raperda cadangan pangan,pengadaan cadangan pangan dan operasional (NBM, HBKN Puasa, Idul fitri, Natal/Tahun baru) berjalan optimal 100 %	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan DIY sebesar 20 ton dari tahun 2017 sebesar 527 ton beras menjadi 547 ton beras pada tahun 2018	100 %	Rp. 190.975.000,00	Rp. 265.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
					Cadangan Pangan Pemerintah 10 ton							
					Informasi cadangan pangan dan penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan sejumlah 4 laporan (NBM, HBKN Puasa, Idul fitri, Natal/Tahun baru)							
					Operasional lumbung pangan, cadangan pangan, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan 1 tahun							
					Penyusunan Raperda cadangan pangan							
1.09.1.21.01.00.23.006	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluh	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Honor THL-TB PP 172 orang, 2 bulan	Penyelenggaraan penyuluhan optimal dan penyuluh yang meningkatkan kapasitasnya sebesar 100% tepat sasaran	Meningkatnya kapasitas penyuluh sebesar 13% (131 penyuluh) pada tahun 2017 sebesar 87% (1.065 penyuluh) menjadi 100% (1.196 penyuluh) pada tahun 2018	100 %	Rp. 420.800.000,00	Rp. 495.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
					Koordinasi Penyuluhan 1 tahun							
					Programa penyuluhan 1 dokumen							
1.09.1.21.01.00.24	PROGRAM KEANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN								Rp. 250.000.000,00	Rp. 265.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan									Jumlah Pagu : Rp. 2.739.535.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.09.1.21.01.00.24.002	Penanganan Keamanan Pangan	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Keamanan Pangan terjamin 1 tahun	Keamanan Pangan terjamin 100 % selama 1 tahun	Dukungan 2,06% terhadap terwujudnya penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada tahun 2017 sebesar 85% (sampel aman 499, total sampel 586) menjadi 90% (sampel aman 799, total sampel 886) pada tahun 2018	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 190.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.09.1.21.01.00.24.003	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	2.Pengembangan Ekonomi	Menurunnya Kemiskinan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Kampanye penganeekaragaman pangan 2 kali	Terlaksananya kegiatan Gerakan BZSA sebesar 100 %	Meningkatnya keaneekaragaman, konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat pada tahun 2018	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
					Promosi penganeekaragaman pangan 1 kali							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika									Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1.16.1.25.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika											
1.16.1.25.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 1.778.818.529,00	Rp. 1.875.000.000,00		
1.16.1.25.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Alat Tulis Kantor	35 jenis	Terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran	51,67%	Rp. 801.177.529,00	Rp. 850.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					Bendera	1 jenis						
					Bukti pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bulan						
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis						
					Majalah	1 jenis						
					Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
					Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
					Penggandaan dan penjilidan	16 penggandaan						
					Pengiriman Dokumen	1 tahun						
					Penyediaan Barang cetakan	12 jenis						
					Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 jenis						
					Perijinan Kendaraan roda 2 (dua)	11 unit						
					Perijinan Kendaraan roda 4 (empat)	13 unit						
					Surat Kabar	6 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika										Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Surat keluar	2500 surat						
					Surat masuk	2500 surat						
1.16.1.25.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja	12 bulan	Terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran	24,53%	Rp. 380.319.000,00	Rp. 425.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					Bukti Pembayaran Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran	12 bulan						
1.16.1.25.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Makanan dan Minuman Sidang	5000 orang	Terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran	23,81%	Rp. 597.322.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka pelaksanaan kelancaran tugas dinas	12 bulan						
1.16.1.25.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 646.764.050,00	Rp. 1.200.000.001,00		
1.16.1.25.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Meja Meeting	2 paket	Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	14,27	Rp. 92.278.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					2. Kursi Rapat	40 buah						
1.16.1.25.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gedung Kantor Terpelihara	12 bulan	Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	Rp. 105.776.050,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika									Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.16.1.25.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kendaraan Roda 2 (dua)	11 unit	Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	43,68%	Rp. 384.185.000,00	Rp. 575.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					Kendaraan Roda 4 (empat)	13 unit						
1.16.1.25.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Air Conditioner	25 unit	Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	Rp. 64.525.000,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					2. Genset	1 paket						
					3. Camera	2 unit						
					4. Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner)	70 unit						
					5. LCD Projector	2 unit						
					6. Mesin Ketik Manual	5 unit						
					7. Notebook	12 unit						
					8. Peralatan listrik, telepon dan air	1 tahun						
					9. Pemeliharaan LAN	1 tahun						
1.16.1.25.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 225.222.750,00	Rp. 233.000.000,00		
1.16.1.25.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai LKJIP Dinas Kominfo DIY A=> 75 s/d 85	Nilai Lakip A	Terselenggaranya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,75	Rp. 6.201.750,00	Rp. 8.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika									Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.16.1.25.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD 10%	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Terselenggaranya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,53%	Rp. 23.706.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.25.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Ranjangan Renstra SKPD 2018-2022	1 Dokumen	Terselenggaranya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65,93 %	Rp. 148.480.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					ROPK, Renja, RKA, DPA	1 Tahun						
1.16.1.25.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja dengan Program	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Terselenggaranya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,79	Rp. 46.835.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.25.01.00.15	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								Rp. 2.949.921.671,00	Rp. 4,00		
1.16.1.25.01.00.15.001	Pembinaan Kelembagaan KPID	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Prosentase Capaian Kinerja KPID DIY	100%	Meningkatnya Kinerja KPID DIY dan Terwujudnya Aspirasi Masyarakat dalam Penyiaran Publik	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.25.01.00.15.002	Pembinaan Kelembagaan KIP	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Prosentase Capaian Kinerja KIP DIY	100%	Meningkatnya Kinerja KIP DIY dan Terwujudnya Aspirasi Masyarakat dalam Penyiaran Publik	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.25.01.00.15.003	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Sistem Pengaduan Layanan Publik	1 sistem	Terpenuhinya layanan pengaduan layanan publik	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika									Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.16.1.25.01.00.15.004	Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	PPID Pemda DIY (di SKPD) berkinerja baik	41 PPID (SKPD)	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan komunikasi dan layanan informasi publik	100%	Rp. 358.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					Sistem aplikasi koleksi otomatis informasi keluhan netisen dari medsos	1 sistem						
					Sistem Aplikasi otomatis reporting dan respon keluhan publik	1 sistem						
					Sistem Penyelenggaraan Layanan Publik	1 sistem						
1.16.1.25.01.00.15.005	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	1. LKS yang didampingi dan diberdayakan	70 LKS	Pengelolaan informasi publik	100%	Rp. 391.921.671,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					2. Pemberdayaan LKS dan KIM se DIY	1 laporan						
					3. Kajian opini publik	1 dokumen						
					4. Kelompok Pertunra yang aktif sebagai agen informasi	10 kelompok						
					5. Pengembangan aolikasi KIM	1 sistem						
1.16.1.25.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA								Rp. 1.286.000.000,00	Rp. 3.000.000.001,00		
1.16.1.25.01.00.16.001	Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Perkotaan Yogyakarta	Recovery Point Objective	20 jam	Meningkatnya Dukungan Terhadap Pengembangan Sistem Informasi DGS	100%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika									Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Sistem dan Aplikasi Pemda DIY ditempatkan di Datacenter Pemda DIY (75 aplikasi di data center dari 94 aplikasi Pemda yang terdaftar dan aktif saat ini)	80%	Pengadaan perangkat IDS, IPS, Firewall, Bandwidth Management, Monitoring Log, Environment Monitoring System, End Point Security	1 Paket				
					SLA (selama 1 tahun akumulasi data center mati maksimal 2 hari)	99,2%						
					Surveilance ISO 27001	1 ISO						
1.16.1.25.01.00.16.002	Pengembangan Jogja Satu Data	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan	Kontributor Portal Jogjapro (Diskominfo, Dispar, Disbud, Distan, BKD)	5 instansi	Terlaksananya pengembangan jogja satu data	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					Pengembangan SIE secara bertahap (simpeg, presensi, eSKP)	3 aplikasi						
					Pengguna email	210 akun						
					Studi Akademis pengembangan Jogja satu data	1 dokumen						
					Studi pengembangan aplikasi e-office	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika									Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika									Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja								
1.16.1.25.01.00.16.003	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nasional	Layanan LPSE	12 bulan	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Terhadap Penguatan Jaringan IT di Pemda DIY	100%	Rp. 186.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.25.01.00.16.004	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan	Literasi terkait Keamanan Informasi di Pemda DIY (karyawan Pemda DIY memahami informasi mana yang boleh disebarluaskan, kapan informasi boleh disebarluaskan dan siapa yang berhak menyebarkan)	20% karyawan	Terselenggaranya keamanan informasi dan komunikasi Pemda DIY	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					Pengadaan perangkat IDS, IPS, Firewall, Bandwidth Management,	7 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika										Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Monitoring Log, Environment Monitoring System, End Point Security (Mencegah dan mendeteksi serangan terhadap keamanan informasi yang ada di Data Center)							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika										Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwak Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja								
1.16.1.25.01.00.17	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI								Rp. 13.150.000.000,00	Rp. 2,00		
1.16.1.25.01.00.17.001	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Langganan Backup Bandwith Internet Untuk Pemda 12 Bulan - Volume bandwidth (121 titik + datacenter) - Untuk melayani data center pemda DIY dan 121 titik	- 900 Mbps - 121 titik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan internet Pemda DIY Secara Berkelanjutan	100%	Rp. 12.650.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					Langganan Bandwith Internet Untuk Pemda	12 Bulan						
					Legalisasi Sistem Operasi (Office) pada Perangkat Komputer Pemda DIY (legalitas seluruh sistem operasi di jaringan PC Pemda DIY dari Microsoft)	870 PC (100% tuntas)						
					Pemasangan jaringan baru SMA/SMK di DIY	114 Jaringan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika									Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pemeliharaan Jaringan Komputer Pemda DIY (Pemeliharaan Jaringan Internet Komplek Kepatihan, Pemeliharaan Jaringan Wireless Pemda DIY Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic Pemda DIY) - Jaringan FO - Jaringan wireless - Melayani PC Komputer	- 79 titik - 42 titik - 1700 PC Komputer						
					Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer untuk Pemda DIY	1 Paket						
1.16.1.25.01.00.17.003	Pengembangan dan Pengelolaan JITV	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Konten paket tayangan Pemda (sebulan 24 paket tayangan)	288 paket tayangan	Pengelolaan JITV	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
					Wilayah Cakupan	Pemda DIY, Pemkab, Pemkot di DIY						
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.1.25.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika											
4.01.1.25.01.00.27	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT								Rp. 1.686.688.000,00	Rp. 3,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika									Jumlah Pagu : Rp. 21.723.415.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.1.25.01.00.27.001	Pembinaan Kemitraan Kehumasan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kehumasan lokasi virtual (media massa, media elektronik, media sosial) yang bisa diakses dimana saja. Lokasi obyek yang dipublikasikan tergantung dari lokasi aktivitas pimpinan daerah	Jejaring yang terbentuk dengan Pemda dan stakeholder lainnya	1 jejaring	Terbangunnya jejaring Pemda dan stakeholder	100%	Rp. 221.838.000,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
4.01.1.25.01.00.27.002	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kehumasan lokasi virtual (media massa, media elektronik, media sosial) yang bisa diakses dimana saja Lokasi obyek yang dipublikasikan tergantung dari lokasi aktivitas Pimpinan Daerah	penyebarluasan informasi pemda melalui media massa koran TV Radio dll	- TV 12 kali tayang - radio 24 kali tayang - media cetak 12 kali tayang	Terpenuhinya informasi publik kepada masyarakat	100%	Rp. 814.850.000,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
4.01.1.25.01.00.27.003	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kehumasan, lokasi virtual (media massa, media elektronik, media sosial) yang bisa diakses dimana saja Lokasi obyek yang dipublikasikan tergantung dari lokasi aktivitas pimpinan daerah	Jejaring media dan pers yang terbentuk	1	Terpenuhinya pemenuhan jejaring dan mitra media pers pemda 100%	100%	Rp. 650.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wajib											
1.23	PERPUSTAKAAN											
1.23.1.26.01.00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											
1.23.1.26.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 5.486.642.600,00	Rp. 5.491.000.000,00		
1.23.1.26.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat tulis kantor 56 jenis	Adminstrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Adminstrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	100%	Rp. 3.126.858.850,00	Rp. 3.128.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Barang cetakan 16 jenis							
					Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2 : 8 unit							
					Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4 : 15 unit							
					Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6 : 1 unit							
					Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
					Kebersihan gedung kantor : 5 gedung/lokasi (GTP, TRM 1, TRM 29, RBM Sewon, Unit Malioboro)							
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 40 jenis							
					Langganan surat kabar harian dan majalah : 6 jenis 12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah					Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan							
					Penggandaan 60.000 lembar							
					Pengiriman dokumen 12 bulan							
					Peralatan rumah tangga 15 jenis							
					Peraturan perundang-undangan							
					Surat keluar 6.500 surat							
					Surat masuk 1.850 surat							
					Tertatanya arsip dinamis dan tersusutnya arsip yang sudah masuk masa retasi 1 daftar arsip inaktif BPAD, 1 kali penyusutan							
1.23.1.26.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kinerja 20 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Teredianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 32,39% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.822.620.250,00	Rp. 1.825.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kinerja 57 orang (PTT: 2 orang, TRM1: 5 orang, TRM 29: 9 orang, Malioboro: 6 orang, RBM: 5 orang, GTP:30 orang) tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Kinerja 6 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
					Kinerja 8 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku							
1.23.1.26.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun		Dukungan 11,82% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 537.163.500,00	Rp. 538.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun							
					Penyediaan ekstra fooding bagi PNS selama 1 tahun (75 orang)	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%						
1.23.1.26.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 40.318.096.600,00	Rp. 30.007.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.23.1.26.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pembangunan Depo/Gedung Arsip 1 unit	Terbangunnya gedung Depo Arsip sesuai standar sarpras 100%	Dukunga 100% terhadap persentase peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan	100 5	Rp. 37.012.000.000,00	Rp. 26.000.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.26.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pengadaan peralatan sesuai RKBMD 10 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 51,72% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 403.150.000,00	Rp. 405.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Pengadaan perlengkapan sesuai RKBMD 1 jenis							
1.23.1.26.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Gedung kantor sesuai RKBMD 5 lokasi (Unit Malioboro : 2.896 m2, Unit TRM 1 : 6.047 m2, Unit TRM 29 : 4.636 m2, Unit RBM : 2.137 m2, GTP : 9.000 m2)	Terpeliharanya rumah dan gedung 100%	Dukungan 27,98% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.814.108.600,00	Rp. 2.543.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.26.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKBMD 8 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 12,82% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 563.488.000,00	Rp. 533.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKBMD 15 unit							
					Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKBMD 1 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.23.1.26.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBM 11 jenis		Dukungan 7,48% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 525.350.000,00	Rp. 526.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBM 14 jenis							
					Pemeliharaan meubelair kantor sesuai RKPBM 5 jenis	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%						
1.23.1.26.01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								Rp. 103.831.000,00	Rp. 105.000.000,00		
1.23.1.26.01.00.05.001	Pengembangan I S O	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Sertifikasi ISO	Layanan perpustakaan bersertifikat ISO 100%	Dukungan 57,56% peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 103.831.000,00	Rp. 105.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.26.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 607.262.300,00	Rp. 856.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.23.1.26.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKJIP : A	Dukungan 1,16% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.26.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program dan 23 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 1,95% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 17.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.26.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Buletin Sangkakala	2 terbitan	Dukungan 93,02% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 411.499.400,00	Rp. 660.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Dokumen PK, RKT, RENSTRA, RENJA dan RKA/DPA	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD 2018-2022						
					Kerjasama bidang kearsipan dan perpustakaan	5 Dokumen MoU kerjasama kearsipan dan perpustakaan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.23.1.26.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program dan 23 kegiatan	Capaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 3,87% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 78.912.900,00	Rp. 79.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.26.01.00.06.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Penilaian angka kredit arsiparis 2 kali		Dukungan 42,44% peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 84.850.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Penilaian angka kredit pustakawan 2 kali							
					Rakor tim penilai pustakawan 1 kali							
					Workshop penyusunan PAK pustakawan 1 kali	Penilaian angka kredit pustakawan dan arsiparis 100%						
1.23.1.26.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								Rp. 733.496.000,00	Rp. 735.000.000,00		
1.23.1.26.01.00.15.001	Pembinaan Perpustakaan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Naskah Akademis	Perpustakaan terakreditasi dari 31 menjadi 41	Dukungan 1,07% terhadap persentase perpustakaan yang terakreditasi	100%	Rp. 346.097.500,00	Rp. 347.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Perpustakaan Terakreditasi							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.23.1.26.01.00.15.002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Godean dan Pakem. Industri Sentolo Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Koridor Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop dan Sadeng. Perkotaan Yogyakarta Sewon, kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan Tempel dan Parangtritis	Bedah Buku Pengembangan Potensi Wilayah	12 lokasi	Fasilitasi pengembangan minat baca dan budaya baca masyarakat	100 %	Rp. 387.398.500,00	Rp. 388.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.26.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI								Rp. 2.436.713.500,00	Rp. 2.821.000.000,00		
1.23.1.26.01.00.16.001	Pelestarian Bahan Pustaka	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kotak pelindung 1.200 (52%) buah dan perbaikan buku rusak 1.000 eks	Bahan pustaka lestari dan termanfaatkan	Dukungan bobot kegiatan 20% terhadap persentase jumlah anggota perpustakaan	100 %	Rp. 780.263.500,00	Rp. 1.157.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Perawatan dan penyampulan buku 286.750 dan 11.000 buku							
1.23.1.26.01.00.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Laporan pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman terdapat 35 penerbit yang menyerahkan terbitannya kepada perpustakaan DIY	Koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan	Dukungan 50% terhadap keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan jangka menengah	100 %	Rp. 1.656.450.000,00	Rp. 1.664.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
					Penerbitan data skunder perpustakaan: Abstraksi budaya timur 5 provinsi; Accesion List (daftar kebutuhan buku baru yang akan dibeli tahun 2018); bibliografi Daerah DIY 4 terbitan dan Katalog Induk Daerah DIY								
					Pengadaan bahan pustaka 500 judul buku, e-book 100 buku terdata dalam aset								
1.23.1.26.01.00.17	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN								Rp. 4.749.470.500,00	Rp. 5.042.000.000,00			
1.23.1.26.01.00.17.001	Layanan Perpustakaan	1.Peningkatan Kualitas SDM	1.1.1. Pemerataan Derajat Kualitas SDM	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah pengunjung web JLA (Jogja Library For All) dari 1.200.000 menjadi 1.300.000. Jumlah perpustakaan PT yang bisa melayani pinjam silang. Prosentase 5% (2/40) x 100% perputakaan yang dapat pinjam silang sesama anggota JLA	Pelayanan perpustakaan optimal	Dukungan bobot kegiatan 50% terhadap persentase peningkatan jumlah pengunjung atau pemustaka ke perpustakaan	100 %	Rp. 4.749.470.500,00	Rp. 5.042.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
					Layanan Perpustakaan Keliling di wilayah pesisir	3 titik							
					Peningkatan jumlah pemustaka COE (Center Of Excellent) dari 500 orang menjadi 1000 orang per bulan.								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Peningkatan pemustaka 138.000 dari 108.709 orang menjadi 246.709 Di perpustakaan Daerah							
1.24	KEARSIPAN											
1.24.1.26.01.00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											
1.24.1.26.01.00.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP								Rp. 987.354.000,00	Rp. 1.212.500.000,00		
1.24.1.26.01.00.18.001	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Arsip yang mempunyai keterkaitan dengan DIY kurun waktu sebelum 1950 atas 20 boks arsip di BI, ANRI		Dukungan 21% (4/19) terhadap jumlah arsip yang sudah dipreservasi	100 %	Rp. 160.105.000,00	Rp. 160.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Penelusuran arsip 20 Orsos dan Pelantikan Wakil Gubernur	Arsip DIY terselamatkan						
1.24.1.26.01.00.18.002	Pengelolaan Arsip Statis dan Naskah Sumber Arsip	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Layanan arsip statis 1.000 orang, Guide Arsip 1 buku, inventaris arsip 1 buku, standar Pelayanan 1 naskah, fumigasi 1.908 m3, naskah sumber arsip 1 buku, penghilangan asam 1.500 lembar, laminasi 1.500 lembar	Arsip lestari dan termanfaatkan	Dukungan 4,5% (2.000/44.546) jumlah arsip yang sudah diolah	100 %	Rp. 827.249.000,00	Rp. 1.052.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Pengolahan Arsip Statis BPAD DIY 4000 berkas, dari 46.546 berkas menjadi 50.546 berkas							
					Terdokumentasinya arsip tekstual 20.000 data dan arsip foto 400 data							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah					Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.24.1.26.01.00.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN								Rp. 1.148.285.500,00	Rp. 1.151.000.000,00		
1.24.1.26.01.00.19.001	Penilaian dan Penyusutan Arsip	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber	Jumlah arsip yang dinilai untuk disusutkan 7.000 berkas dari 936 boks/46.800 berkas		Dukungan 8,82% (3/34) persentase peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100%	Rp. 585.698.000,00	Rp. 587.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Pemindahan arsip inaktif dari SKPD ke LKD 3 SKPD dari 12 menjadi 15 SKPD							
					Pendataan/stock opname arsip dinamis 8.000 boks, 936 terdaftar dan 6.064 belum ada daftarnya	Terlaksananya pengelolaan penyusutan arsip sesuai ketentuan ANRI di SKPD DIY						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja								
1.24.1.26.01.00.19.002	Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang	Jumlah arsip dinamis yang dikelola yang diserahkan ke BPAD sebelum tahun 2010 dimana 307.100 berkas dari 6.064 boks terhadap 7.000 boks yang belum diolah		Dukungan 34,57% (28/81) terhadap persentase peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100 %	Rp. 562.587.500,00	Rp. 564.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Peningkatan jumlah OPD dan UPTD dan LKD Kab/Kota yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standart 28 OPD/UPTD dan 4 Kab/1 Kota serta 4 sekolah	Terlaksananya pengelolaan kearsipan dinamis sesuai kentuan ANRI di SKPD DIY						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah									Jumlah Pagu : Rp. 56.571.152.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayan Layanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Pampara Praja								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Pilihan											
2.03	PERTANIAN											
2.03.2.01.01.00	Dinas Pertanian											
2.03.2.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 2.510.000.000,00	Rp. 2.051.503.000,00		
2.03.2.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	administrasi PERKANTORAN yang tersedia sesuai kebutuhan 100%	dukungan sebesar 33.3 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 751.503.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					10. surat kabar (3 macam) dan majalah (2 macam)							
					11. surat keluar (3.000 buah), surat masuk (6.000 buah)							
					2. jasa pembayaran telepon, listrik dan internet selama 12 bulan							
					3. ATK 45 jenis							
					4. barang cetakan penggandaan dan penjilidan sebanyak 3 jenis							
					5. jasa KIR, stnk kendaraan roda 2 dan roda 4 selama 1 tahun							
					6. komponen instalasi listrik sebanyak 17 macam							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian										Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					7. Pengelolaan naskah dinas selama 1 tahun							
					8. peralatan rumah tangga perkantoran sebanyak 11 macam							
					9. retribusi sampah selama 1 tahun							
2.03.2.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian selama 1 tahun	tersedia pelayanan perkantoran yang prima 100%	dukungan 33.3 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 910.000.000,00	Rp. 950.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					2. jasa keamanan kantor selama 1 tahun							
2.03.2.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	makan minum keperluan rapat kantor selama 1 tahun	kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	dukungan 33.3 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					perjalanan dinas dalam dan luar kota dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun							
2.03.2.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 1.017.000.000,00	Rp. 1.062.455.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.03.2.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Rehabilitasi drainase unit Tambak	tersedianya sarana prasarana kantor 100%	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	Rp. 87.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan berkala gedung perkantoran 1 paket	terpelihara gedung dan kantor 100 %	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	Rp. 130.000.000,00	Rp. 262.455.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	pemeliharaan berkala kendaraan dinas selama 1 tahun	terpeliharanya dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	dukungan sebesar 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	Rp. 750.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	1. Pemeliharaan berkala peralatan (komputer, LCD, faximil, mesin tik, dll) 1 paket 2. Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran 1 paket	meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	dukungan sebesar 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi skpd	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 195.000.000,00	Rp. 374.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.03.2.01.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	NILAI LAKIP A	dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 32 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	RKT, Renja, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku, Renstra SKPD	Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 32 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.03.2.01.01.00.06.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional 1 tahun	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu terlaksana 100%	Meningkatnya kapasitas aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN								Rp. 50.853.760.800,00	Rp. 1.280.000.001,00		
2.03.2.01.01.00.15.001	Pengembangan Inkubator Bisnis	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Nanggulan	Inkubator Agribisnis di Wijilan, Nanggulan, Kulonprogo seluas 17 Ha	pembangunan imkubator agribisnis terbangun 100%	dukungan terhadap peningkatan kualitas SDM petani secara umum, dan peningkatan pendapatan petani	100%	Rp. 49.573.760.800,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.15.002	Budidaya Tanaman Pangan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	diy	1. Pengembangan dan Pembinaan Budidaya Garut (2 kelompok)	budidaya tanaman pangan berjalan sesuai target	DUKUNGAN TERHADAP peningkatan produksi tanaman pangan di DIY	100%	Rp. 730.000.000,00	Rp. 730.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					2. Pengembangan kacang hijau							
					3. pembangunan Jalan Usaha Tani 2 unit							
					4. pengembangan ubi kayu (2 kelompok)							
					5. Peredaran dan keamanan pupuk pestisida terjamin 5 kab/kota							
2.03.2.01.01.00.15.003	Pengelolaan Sumberdaya Air	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	diy	Pemberdayaan P3A 15 unit	sarana prasarana pengairan kelompok P3A tersedia sesuai target	dukungan terhadap peningkatan kualitas sarana prasarana pengairan kelompok P3A	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.03.2.01.01.00.15.004	Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	diy	1. PIP Tanaman Pangan (3 komoditas) 1 Paket	promosi dan pemasaran produk pertanian berjalan sesuai target	dukungan terhadap promosi dan pemasaran produk pertanian di DIY	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					2. Pasar Tani							
					3. PAMERAN PROMOSI							
2.03.2.01.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA								Rp. 2.885.902.200,00	Rp. 2.885.902.200,00		
2.03.2.01.01.00.16.001	Budidaya Tanaman Hortikultura	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	diy	1. Registrasi Kebun 350 pekebun	registrasi kebun, pemeliharaan dan pengelolaan tanaman hortikultura berjalan sesuai target	dukungan terhadap meningkatnya produksi tanaman hortikultura	100%	Rp. 2.885.902.200,00	Rp. 2.885.902.200,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					2. biaya pengelolaan untuk 4 kawasan embung (Kleco, Tonegoro, Girilangu, Nglanggeran)							
					3. pemeliharaan tanaman: durian 40 ha, jambu kristal 10 ha, kelengkeng 10 ha, krisan 2 green house							
					4. peggembangan kawasan surjan di sekitar bandara 20 ha							
					5. Pemanfaatan lahan pekarangan 20 kelompok							
2.03.2.01.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN								Rp. 450.000.000,00	Rp. 457.500.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.03.2.01.01.00.17.002	Budidaya Itik Turi	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Kretek Sanden	Pengembangan Itik Turi (330 ekor itik turi & stimulan pakan)	pengembangan itik turi di sanden dan kretek berjalan sesuai target 100%	dukungan terhadap pengembangan turi dari pendampingan produksi sampai dengan pasca panen	100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 82.500.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.17.003	Budidaya peternakan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Paliyan Patuk	kambing bligon 100 ekor, 10 kelompok	pengembangan populasi ternak berjalan sesuai target 100%	Dukungan sebesar 1,36% terhadap target peningkatan jumlah populasi ternak dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 862 AU (dari 641.416 AU menjadi 642.279 AU)	100%	Rp. 375.000.000,00	Rp. 375.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					Pengembangan kambing PE 50 ekor, 5 kelompok							
2.03.2.01.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN								Rp. 3.776.455.000,00	Rp. 3.876.455.000,00		
2.03.2.01.01.00.18.001	Pengembangan Pembibitan Ternak	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	1. Produksi bibit ternak sejumlah 50 ekor	Bibit ternak berkualitas tahun 2018 tersedia 100% tepat waktu dan tepat sasaran	Dukungan sebesar 1,36% terhadap target peningkatan jumlah populasi ternak dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 862 AU (dari 641.416 AU menjadi 642.279 AU)	100%	Rp. 2.900.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					2. Produksi semen beku sejumlah 28.000 dosis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.03.2.01.01.00.18.002	Pengawasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	1. hasil uji spesimen penyakit hewan sejumlah 5.00 sampel	keamanan ternak terjamin 100% tahun 2018	Dukungan sebesar 1,36% terhadap target peningkatan jumlah populasi ternak dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 862 AU (dari 641.416 AU menjadi 642.279 AU)	100%	Rp. 576.455.000,00	Rp. 576.455.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					2. Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) (Sewa Pos dan honor petugas PLLT 5 pos dan 16 petugas)							
2.03.2.01.01.00.18.003	Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	1. Sertifikat Akreditasi laboratorium sejumlah 1 paket	Kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan terjamin 100% selama satu tahun	Dukungan sebesar 1,36% terhadap target peningkatan jumlah populasi ternak dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 862 AU (dari 641.416 AU menjadi 642.279 AU)	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					2. Hasil Uji sampel produk asal hewan sejumlah 150 sampel							
2.03.2.01.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN								Rp. 1.421.000.000,00	Rp. 1.421.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.03.2.01.01.00.19.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	Benih sumber padi 66.600 Kg, jagung 5.000 Kg, kedelai 4.750 Kg, kacang tanah 700 Kg, kacang hijau 700 Kg	benih tanaman pangan tersedia sesuai standar selama tahun 2018	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 0.07 % (1.623 ton) (dari 2.208.665 ton menjadi 2,210,288 ton)	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.19.002	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	1. Benih cabe sebanyak 70 kg	benih tanaman hortikultura tersedia sesuai standar pada tahun 2018	Terwujudnya dukungan 0.25 % terhadap target peningkatan jumlah produksi hortikultura dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 0.30 % (105 ton) (dari 394.800 ton menjadi 394.905 ton)	100%	Rp. 521.000.000,00	Rp. 521.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					2. Benih Tomat 70 kg							
					3. Benih jamur edibel sebanyak 8.400 botol							
					4. Bibit tanaman buah sebanyak 5.050 batang							
					5. Bibit tanaman hias sebanyak 2.250 batang							
2.03.2.01.01.00.20	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN								Rp. 450.000.000,00	Rp. 550.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.03.2.01.01.00.20.001	Pembinaan SDM Peternakan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	Pengetahuan Teknis Peternakan Meningkat sebesar 15% melalui 3 Diklat	Diklat Teknis Peternakan terlaksana 100% tepat waktu	Dukungan sebesar 1,36% terhadap target peningkatan jumlah populasi ternak dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 862 AU (dari 641.416 AU menjadi 642.279 AU)	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.20.002	Pembinaan SDM Tanaman Pangan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	1. Pemanfaatan Laboratorium utk menunjang pelaksanaan diklat yang optimal 1 tahun 2. pengetahuan dan pemahaman teknis tanaman pangan meningkat sebesar 15% melalui 4 diklat	Diklat Teknis SDM Tanaman Pangan Terlaksana 100% tepat Waktu	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 0.07 % (1.623 ton) (dari 2.208.665 ton menjadi 2,210,288 ton)	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.20.003	Pembinaan SDM Hortikultura	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Teknis Hortikultura 15 % (4 Diklat)	diklat teknis tanaman hortikultura terlaksana 100%	Terwujudnya dukungan sebesar 50% terhadap target peningkatan jumlah produksi hortikultura dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 0.30 % (105 ton) (dari 394.800 ton menjadi 394.905 ton)	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.21	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH								Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.03.2.01.01.00.21.001	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pangan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	Sertifikat/surat kelulusan/ketidaklulusan calon benih padi dan palawija 75 unit	sertifikasi benih tanaman pangan tersedia sesuai standar selama tahun 2018	Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 0.07 % (1.623 ton) (dari 2.208.665 ton menjadi 2,210,288 ton)	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.21.002	Sertifikasi Perbenihan Hortikultura	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	1. Sertifikat benih hortikultura (20 unit)	sertifikasi benih tanaman hortikultura tersedia sesuai standar pada tahun 2018	Terwujudnya dukungan 0.25 % terhadap target peningkatan jumlah produksi hortikultura dari tahun 2017 ke 2018 (RPJMD) sebesar 0.30 % (105 ton) (dari 394.800 ton menjadi 394.905 ton)	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					2. Melaksanakan peredaran benih 1 tahun							
2.03.2.01.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN								Rp. 265.000.000,00	Rp. 350.000.000,00		
2.03.2.01.01.00.22.001	Pengendalian OPT Tanaman Pangan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	1. OPT tanaman pangan terkendali melalui 40 gerakan pengendalian	OPT tanaman Pangan terkendali 100 %	Terkendalnya serangan OPT tanaman pangan	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.03.2.01.01.00.22.002	Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pertanian	1. Agensi hayati / nabati sebanyak 6500 dos agens hayati	Opt Hortikultura terkendali 100 % pada tahun 2018	OPT tanaman Hortikultura terkendali pada tahun 2018	100%	Rp. 65.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
					2. OPT Hortikultura terkendali (Gerdal 20 kali)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian									Jumlah Pagu : Rp. 64.024.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					3. Fungsi Lab LPMT optimal selama 1 tahun							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan									Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Pilihan											
2.03	PERTANIAN											
2.03.2.02.01.00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan											
2.03.2.02.01.00.25	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN								Rp. 2.605.490.000,00	Rp. 3.020.000.000,00		
2.03.2.02.01.00.25.001	Pengelolaan Tanaman Perkebunan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	DIY	Budidaya tanaman perkebunan sesuai SOP 4 komoditas (Kopi, Kakao, Teh, Tembakau)	Peningkatan produksi perkebunan dalam 1 tahun	dukungan terhadap target peningkatan pendapatan petani perkebunan	100%	Rp. 1.323.250.000,00	Rp. 1.350.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
					Sarana prasarana perkebunan 3 komoditas (Kopi, Kakao, Teh)							
2.03.2.02.01.00.25.002	Pembinaan Kelembagaan, Penyuluhan dan Pengolahan Pasca Panen	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Gedang sari Kalibawang Pajangan Patuk Samigaluh	Peningkatan kapasitas lembaga petani perkebunan 5 komoditas (Kakao, Kopi, Teh, Tebu, Tembakau)	Nilai tambah hasil olahan perkebunan dan Kapasitas lembaga petani perkebunan meningkat 100%	dukungan terhadap target peningkatan pendapatan petani perkebunan	100%	Rp. 882.240.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
					Nilai tambah hasil olahan perkebunan meningkat 5 produk olahan (Kakao, Gula Kelapa, Teh, Kopi)							
2.03.2.02.01.00.25.003	Pengelolaan Tanaman tembakau (Cukai)	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Pleret Samigaluh	SLPHP tembakau 2 unit	produksi tembakau meningkat dalam 1 tahun	dukungan terhadap peningkatan pendapatan petani tembakau	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 470.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
					Bimtek pengolahan/pasca panen tembakau 2 unit							
					GAP tembakau 2 kelompok							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan									Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					hibah alat pengolah tembakau 2 kelompok							
					sarpras dan pendampingan (kultivator) 5 unit							
2.03.2.02.01.00.25.004	Pembinaan Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	DIY	bimtek penyuluhan 1 angkatan	peningkatan produksi tembakau meningkat dalam 1 tahun	dukungan terhadap peningkatan pendapatan petani tembakau	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
					pendampingan kelembagaan							
2.04	KEHUTANAN											
2.04.2.02.01.00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan											
2.04.2.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 2.116.174.000,00	Rp. 3.285.007.300,00		
2.04.2.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Administrasi Surat Keluar, Surat Masuk, dan Pengiriman Dokumen 12 bulan	Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100 %	dukungan sebesar 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.056.000.000,00	Rp. 1.992.840.300,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
					Alat Tulis Kantor 83 jenis							
					Bukti Pembayaran KIR/Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2,4, dan 6 yang Tepat Waktu 188 unit							
					Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 28 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan									Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Dinas Induk dan 4 UPTD 12 bulan							
					Pembayaran Tagihan Rekening Telepon, Rekening Air, Rekening Listrik, Biaya Internet, dan Biaya Hosting dan Update Web 12 bulan							
					Pembayaran tagihan Surat Kabar, Majalah, Pengadaan Buku Pengetahuan Umum 12 bulan							
					Penyediaan Barang Cetak, Penggandaan, dan Penjilidan Dokumen 12 bulan							
					Peralatan Rumah Tangga 24 jenis							
					Retribusi Sampah 12 bulan							
2.04.2.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Daerah, Penyiap Fasilitasi Pengembangan Kinerja Pegawai dan Pengelola Kepegawaian 45 orang	kelancaran adminstrasi perkantoran 100%	Dukungan 33,33 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 735.174.000,00	Rp. 892.167.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
					Honorarium PTT Sebagai Petugas Keamanan Kantor (9 orang) 12 bulan							
					Pembayaran Jasa Kemanan Kantor 12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan									Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pemeliharaan Arsip Dinas 12 bulan							
2.04.2.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Makanan dan Minuman Rapat-Rapat/ Koordinasi Dinas 12 bulan	Kelancaran Koordinasi dengan Pihak Terkait 100 %	dukungan 33,33 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 325.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
					Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait di Dalam dan di Luar Daerah 12 bulan							
2.04.2.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 1.571.408.900,00	Rp. 2.038.170.000,00		
2.04.2.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Service, Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6 sejumlah 188 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100%	Dukungan 70% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.438.170.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih 2 unit	Terpelihara Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 30% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 571.408.900,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi 1.000 meter							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan									Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.04.2.02.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 210.350.000,00	Rp. 426.000.000,00		
2.04.2.02.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017 1 dokumen	Nilai LKjIP : A	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 8 program 24 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Dokumen Renja 2018, RKA - DPA 2018, RKAP - DPPA 2017, ROPK, SPIP, Statistik Kehutanan dan Perkebunan 2016 1 tahun, Renstra SKPD	Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018, serta satu data pokok dan analisis data perikanan dan kelautan tersedia 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 240.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan									Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.04.2.02.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 8 program 24 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 49.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.06.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kehutanan dan Perkebunan 84 orang	pejabat fungsional meningkat kapasitasnya 100%	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur pada tahun 2018	100%	Rp. 75.350.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.15	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN PERLINDUNGAN								Rp. 2.336.241.100,00	Rp. 2.904.345.000,00		
2.04.2.02.01.00.15.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	bibit/benih tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan 325.000 batang	Bibit/benih tanaman kehutanan tersedia 100% tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran	Dukungan terhadap target penurunan luas lahan kritis pada tahun 2018	100%	Rp. 313.452.100,00	Rp. 634.345.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.15.002	Perlindungan Hutan	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	hutan negara	Perlindungan Hutan Terjamin 12 bulan	Hutan terlindungi 100%	Dukungan terhadap target penurunan kerusakan hutan pada tahun 2018	100%	Rp. 1.270.877.500,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.15.003	Pengamanan Hutan	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	hutan negara	Keamanan Hutan Terjamin 12 bulan	hutan aman 100%	Dukungan terhadap target penurunan kerusakan hutan pada tahun 2018	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
					Penyelenggaraan Operasional Penyuluhan Kehutanan 12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan									Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.04.2.02.01.00.15.004	Konservasi Sumberdaya Hutan	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	kawasan hutan negara	Pelayanan pendidikan, penelitian dan wisata alam 100% tepat sasaran selama 12 bulan	hutan konservasi terkelola 100%	Dukungan terhadap target penurunan kerusakan hutan pada tahun 2018	100%	Rp. 451.911.500,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
					Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Kawasan Konservasi Esensial (KKE) dan Tahura 2 dokumen							
2.04.2.02.01.00.15.005	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai / DAS	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	DIY	pengelolaan DAS prioritas selama 1 tahun	DAS prioritas terkelola 1 tahun	tata guna air lestari	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.16	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN								Rp. 280.000.000,00	Rp. 380.000.000,00		
2.04.2.02.01.00.16.001	Penataan Hutan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	hutan negara, hutan AB, hutan rakyat	Penataan kawasan hutan (tegakan kayu putih, tapal batas, hutan AB) 3 dokumen	hutan negara tertata 1 tahun	kawasan hutan tertata	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.16.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	4 kab	Pengawasan tata usaha kayu dan peredaran hasil hutan 1 tahun	penatausahaan produksi hasil hutan terkendali 100%	dukungan terhadap pengelolaan produksi hasil hutan tahun 2018	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.16.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	hutan rakyat, hutan desa	Pengelolaan hutan rakyat	hutan rakyat terkelola 100%	hutan rakyat terkelola 100%	100%	Rp. 80.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.04.2.02.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN								Rp. 5.453.670.000,00	Rp. 5.500.000.000,00		
2.04.2.02.01.00.17.001	Pengelolaan Sumber Daya Hutan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	hutan negara	Produk hasil hutan 2 komoditas	pengelolaan sumberdaya hutan 100%	dukungan terhadap peningkatan produksi hasil hutan	100%	Rp. 5.453.670.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan									Jumlah Pagu : Rp. 14.573.334.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Rehabilitasi Tegakan kawasan hutan lindung RPH Mangunan 60 Ha							
					Rencana Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan 6 dokumen							
					Tanaman Kayu Putih baru 300000 batang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata										Jumlah Pagu : Rp. 23.659.590.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Pilihan											
2.02	PARIWISATA											
2.02.2.04.01.00	Dinas Pariwisata											
2.02.2.04.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 992.590.000,00	Rp. 0,00		
2.02.2.04.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata	Alat tulis kantor 62 jenis	Dukungan 33,33% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Dukungan 33.33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 332.590.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
					barang cetakan 9 unit/buku							
					Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu (Roda dua : 6) (Roda empat :7)							
					Kebersihan gedung kantor							
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25 jenis							
					Majalah 1 jenis							
					Pembayaran tagihan rekening air 1 unit 12 bulan							
					Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh 12 bulan							
					Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan 12 bulan							
					Pengelolaan arsip dinamis SKPD							
					Penggandaan 100.000 lembar							
					Pengiriman Dokumen 15 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata										Jumlah Pagu : Rp. 23.659.590.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Penyusutan Arsip							
					Peralatan Rumah Tangga 28 jenis							
					Surat Kabar 4 jenis							
					Surat Keluar 27.500 surat							
					Surat Masuk 15.000 surat							
2.02.2.04.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata	1. Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan 9 orang/bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 33.33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 435.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
					2. Bukti pembayaran Honorarium pengelola kepegawaian 1 orang/bulan							
					3. Jasa Keamanan kantor / tempat kerja 12 bulan							
					4. Jasa petugas TIC 10 orang							
					5. Petugas website dinas 1 org							
2.02.2.04.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata	1. Makan dan Minum sidang 3.000 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 33.33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 225.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
					2. Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan							
					3. Kooordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan							
2.02.2.04.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 482.000.000,00	Rp. 0,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata										Jumlah Pagu : Rp. 23.659.590.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.02.2.04.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	relokasi dan perbaikan gedung kantor 1 paket	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar Sapras 100%	Dukungan 33,33% terhadap sapras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.04.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPBMMD 12 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 33,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 232.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.04.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata	1. Perlengkapan gedung kantor terpelihara 3 jenis 2. Peralatan gedung kantor terpelihara 8 jenis 3. Pemeliharaan mebeleur 2 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.04.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 115.000.000,00	Rp. 0,00		
2.02.2.04.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata	Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKJIP : A	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata										Jumlah Pagu : Rp. 23.659.590.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.02.2.04.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 7%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.04.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata	1. ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan TA.2018	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
					2. Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100%						
2.02.2.04.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.04.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA								Rp. 2.850.000.000,00	Rp. 0,00		
2.02.2.04.01.00.15.001	Promosi Pariwisata	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Seluruh daerah strategis yang didatangi wisatawan media sosial baik offline dan online	1.Pelayanan informasi pariwisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun dan TIC di Bali dan Malioboro)	Kualitas promosi pariwisata meningkat 2,5 %	Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2017 ke t5ahun 2018 sebesar 2,5%	100%	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
					2. Bahan promosi pariwisata 9 jenis							
					3. Famtrip 1 tahun							
					4. Jogja Travel Mart 1 kali							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata										Jumlah Pagu : Rp. 23.659.590.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					5. Promosi melalui 3 Media Cetak dan 1 Media Elektronik (Videotron)							
					6. Promosi Luar Negeri 1 kali (Jepang)							
					7. Iuran Eatof							
					8. Pameran dalam negeri 2 kali (jakarta dan bali)							
					9. Pengelolaan visitingjogja.com							
2.02.2.04.01.00.15.002	Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pariwisata	1. Dokumen Data Statistik Kepariwisataaan DIY sejumlah 1 dokumen	Dokumen Strategi Pemasaran Pariwisata, Review Rencana Induk Kepariwisataaan DIY, Informasi terkait jumlah dan jenis Belanja Wisatawan, Data Statistik Kepariwisataaan DIY sebagai bahan analisa pasar selesai 100%	Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 2,5%	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
					2. Dokumen Analisis Wisatawan 1 dokumen							
					3. Dokumen Raperda tentang Review RIPPARDA							
2.02.2.04.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA								Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00		
2.02.2.04.01.00.16.001	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pariwisata	1. Kemitraan Satu Hotel Satu Desa Wisata di Hargotirto Kokap Kulon Progo untuk produk gula semut	sertifikasi terlaksana 100%	Peningkatan Prosentase peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi dan jumlah pokdarwis yang naik kelas dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 2%	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata										Jumlah Pagu : Rp. 23.659.590.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					2. Sertifikasi Pelaku Wisata 200 orang							
2.02.2.04.01.00.17	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA								Rp. 820.000.000,00	Rp. 0,00		
2.02.2.04.01.00.17.001	Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Pariwisata			Peningkatan kontribusi tenaga kerja sektor pariwisata terhadap total tenaga kerja tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 2%	100%	Rp. 820.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
					1. Standarisasi usaha Jasa Pariwisata 4 jenis (MICE, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, pondok wisata/homestay)	Standarisasi dan peningkatan kualitas industri Pariwisata terlaksana 100%						
					2. Klasifikasi Usaha Jasa Pariwisata							
2.02.2.04.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA								Rp. 18.000.000.000,00	Rp. 0,00		
2.02.2.04.01.00.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Godean dan Pakem. Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Koridor Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop dan Sadeng. Perkotaan Yogyakarta Sewon, kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan	1. Pemb. Kawasan cinderamata mendukung wisata kerajinan bambu, Munthuk, Dlingo, Bantul (Bangunan 100 m2 ; Toilet Wisata 20 m2; parkir 1200 m2) 2. Pemb. Kawasan cinderamata mendukung wisata kerajinan Batik, tatah sungging Wukirsari, Imogiri, Bantul (Toilet Wisata 20 m2; Parkir 2000 m2)	Sarana prasarana DTW untuk meningkatkan Kualitas Layanan Jasa Pariwisata	Peningkatan LOS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 2%	100%	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata										Jumlah Pagu : Rp. 23.659.590.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)
				Tempel dan Parangtritis	1. Pembangunan akses wisata di kawasan Gunung Gentong (Perkerasan Jalan Akses 1,5 km; Gazebo 5 unit) 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Bukit Paralayang, Watugupit, Giricahyo, Gunungkidul (Panggung terbuka dan jalan setapak) seluas 1000 m2)								
					1. Pembangunan akses wisata Kebun Buah - Watu Mabur - Bukit Mojo/ Panguk panjang 2,75 km 2. Fasilitasi Wahana Wisata Tirta, Dusun Kebo Sungen, Dlingo, Bantul (perkerasan akses 1500 m2, fasilitas wisata tirta berupa safety vest, helm, dan ban)	Sarana prasarana DTW untuk meningkatkan Kualitas Layanan Jasa Pariwisata							
					1. Pembangunan akses wisata menuju obyek wisata Watu Tapak dan Camping Ground (Lokasi di sebelah timur Tebing Breksi/ Candi Ijo) panjang 1 km (spot sunrise) (Perkerasan akses jalan 1800 m2; Parkir 1500 m2) 2. Penataan Lansekap obyek wisata Watu Payung (Perkerasan Akses Jalan 1500 m2; Parkir 1000 m2)								
					1. Pembangunan Terminal wisata intermoda pendukung pengembangan wisata di kawasan Sendangsono - Suroloyo (Bangunan Kios 100 m2; toilet wisata 30 m2, parkir 2000 m2)								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata									Jumlah Pagu : Rp. 23.659.590.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					1. Penataan lansekap Telaga Jonge (Panggung, Jalan Setapak, Lampu) seluas 2000 m2; dan Gazebo sebanyak 5 unit 2. Pembangunan Kawasan Cinderamata Mendukung Taman Batu Geopark, Lansekap (Jalan Setapak, Spot Daya Tarik, Lampu) 2000 m2; Pagar 1000 m							
					1. Pengembangan Akses Kawasan Pantai Ngrehenan - Parangracuk Saptosari (akses Jalan 1 km) 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kawasan Gunung Batur - Wediombo (Panggung Terbuka, Jalan Setapak, Lampu)							
					1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kopi Suroloyo (Kios Kopi 105 m2 ; toilet wisata 20 m2, parkir 800 m2)							
					1. Pengembangan Wisata Alam Nglinggo - Tritis, Kabupaten Kulon Progo (Jalan Setapak 1300 m2; Camping Ground 1000 m2)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata										Jumlah Pagu : Rp. 23.659.590.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.02.2.04.01.00.18.003	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	6.Pembangunan Wilayah	2.2.1. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Godean dan Pakem. Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Koridor Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop dan Sadeng. Perkotaan Yogyakarta Sewon, kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan Tempel dan Parangtritis	Jogja Airshow, Festival Layang-Layang, Menoreh Night Festival, Festival Perahu Naga, Festival Budaya Tionghoa, Java Summer Camp, Pawai & Pameran Pembangunan, Atraksi wisata di DTW 15 lokasi, Sekaten	Atraksi wisata terlaksana 100%	Peningkatan LOS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 2%	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan										Jumlah Pagu : Rp. 10.182.347.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Pilihan											
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN											
2.01.2.05.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan											
2.01.2.05.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 3.414.847.000,00	Rp. 3.950.000.000,00		
2.01.2.05.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat listrik dan elektronik 12 bulan	Administrasi Perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100 %	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.722.479.610,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Alat Tulis Kantor: Dinas 55 jenis, BPTPB 50 jenis, PPP 31 jenis							
					Barang Cetakan : Dinas 15 jenis, BPTPB 12 jenis, PPP 13 jenis							
					Bukti Pembayaran KIR dan pajak/STNK kendaraan dinas /operasional : Dinas roda 4 sebanyak 15 unit dan roda 2 sebanyak 21 unit, BPTPB roda 4 sebanyak 5 unit, roda 3 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 11 unit, PPP roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit							
					Jasa Kebersihan gedung kantor (Dinas, BPTPB, PPP Sadeng dan Pelabuhan Tanjung Adikarto) 4 lokasi							
					Jilid : Dinas 120 eks, BPTPB 60 eks, PPP 70 eks							
					Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor : BPTPB 8 jenis, PPP 21 jenis							
					Majalah 12 bulan							
					Pembayaran jasa internet 12 bulan							
					Pembayaran retribusi sampah 12 bln							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan									Jumlah Pagu : Rp. 10.182.347.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pembayaran Tagihan air PDAM 12 bulan							
					Pembayaran Tagihan Listrik 12 bulan							
					Pembayaran Tagihan Telepon 12 bulan							
					Penggandaan : Dinas 90.000 lbr, BPTPB 40.500 lbr, PPP 6.000 lbr							
					Pengiriman dokumen 12 bln							
					Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19 jenis							
					Peralatan rumah tangga 23 jenis							
					Perangko meterai, benda pos 2 jenis							
					Surat Kabar 12 bln							
					Surat Keluar 2.290 bh							
					Surat Masuk 974 bh							
2.01.2.05.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Bukti iuran BPJS PTT 12 bln dan Non PNS 11 bln	kelancaran administrasi perkantoran 100%	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.492.367.390,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja 1 tahun							
					Bukti pembayaran honorarium non PNS (penjaga malam/kearsipan/tenaga pencatat produksi ikan/pengemudi) 11 bulan							
					Bukti pembayaran honorarium Non PNS PTT SK Gub 13 bln							
					Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang/kepegawaian : Dinas (14 org) 12 bln, BPTPB (12 org) 12 bln, PPP (13 org) 12 bln.							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan										Jumlah Pagu : Rp. 10.182.347.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.01.2.05.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan	Kelancaran Koordinasi dengan Pihak Terkait 100 %	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan							
					Makanan dan minuman rapat 6.500 os							
2.01.2.05.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								Rp. 790.000.000,00	Rp. 1.150.000.000,00		
2.01.2.05.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pengerasan jalan masuk Pelabuhan Tanjung Adikarto 1 paket	terbangunnya sarana prasarana sesuai standar 100%	Dukungan 40% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 230.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Rehab BAP Samas 1 unit							
2.01.2.05.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Kapal pengawas 1 unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar sarpras 100 %	Dukungan 30% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 630.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Kendaraan Roda 2 (1 tahun)							
					Kendaraan roda 3 (1 tahun)							
					Kendaraan roda empat (1tahun)							
2.01.2.05.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Mebelair terpelihara 2 jenis	Terpelihara Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 30% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Peralatan kantor terpelihara : Dinas 5 jenis, BPTPB 3 jenis, PPP 4 jenis							
					Perlengkapan kantor terpelihara : Dinas 2 jenis, BPTPB 1 jenis, PPP 2 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan										Jumlah Pagu : Rp. 10.182.347.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.01.2.05.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 330.000.000,00	Rp. 698.500.000,00		
2.01.2.05.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2018	Nilai LKJIP : A	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 13.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.05.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.05.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	data produksi perikanan dan kelautan 1 tahun	Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2019 dan Perubahan TA. 2018, serta satu data pokok dan analisis data perikanan dan kelautan tersedia 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 577.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Penyusunan perencanaan pengembangan kelautan dan perikanan (ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA) sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun							
2.01.2.05.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.05.01.00.10	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA								Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan										Jumlah Pagu : Rp. 10.182.347.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.01.2.05.01.00.10.001	Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Gedang sari Kokap Sapto sari	budidaya perikanan sesuai standar (CBIB, CPIB, HPI): 1. untuk mendukung pengentasan kemiskinan: 24 kelompok 2. untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya: 17 kelompok	peningkatan kapasitas kelompok dan produksi perikanan budidaya di kecamatan miskin 100%	dukungan terhadap target peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.05.01.00.15	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN								Rp. 150.000.000,00	Rp. 360.000.000,00		
2.01.2.05.01.00.15.001	Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Girisubo	Pelatihan Calon Operator Docking Kapal Perikanan 2 orang	Pelabuhan Sadeng beroperasi secara optimal 1 tahun	dukungan terhadap target peningkatan produksi perikanan tangkap	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 360.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.05.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA								Rp. 2.650.000.000,00	Rp. 2.850.000.000,00		
2.01.2.05.01.00.16.001	Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Ikan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	BPTPB	Rekomendasi hasil uji hama dan penyakit ikan sejumlah 350 sampel	Hama dan penyakit ikan terkendali dalam 1 tahun	dukungan terhadap target peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.05.01.00.16.002	Perbanyak Benih Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Benih Ikan dan Udang 30.000.000 ekor	Benih udang dan ikan tersedia 100%	dukungan terhadap target peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.550.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Calon Induk Ikan 9.000 kg							
					Udang dan Ikan Konsumsi 10.000 kg							
2.01.2.05.01.00.17	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								Rp. 350.000.000,00	Rp. 470.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan										Jumlah Pagu : Rp. 10.182.347.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.01.2.05.01.00.17.001	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	Temon	Pengelolaan ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan (Mangrove) dan penebaran benih ikan 302.000 ekor (Kepiting, Bandeng, Nila untuk 5 hektar) di Jangkaran, Congot.	Sumberdaya kelautan dan perikanan tersedia 100% sebagai bahan untuk rehabilitasi/konservasi	dukungan pencapaian target peningkatan jumlah lokasi yang ekosistemnya telah direhabilitasi/konservasi	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.05.01.00.17.002	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Laut	3.Ketahanan Energi dan Pangan	2.2.4. Terkelolanya Kualitas Lingkungan Hidup	DIY	perairan darat dan laut aman (1 tahun)	keamanan perairand arat dan laut terjamin	sumberdaya kelautan dan perikanan terjaga	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.05.01.00.18	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP								Rp. 360.700.000,00	Rp. 400.000.000,00		
2.01.2.05.01.00.18.001	Pengembangan Perikanan Tangkap	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Sapto sari	Pelatihan dan fasilitasi alat tangkap: 1. untuk mendukung pengentasan kemiskinan 2 kelompok 2. untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap 2 kelompok	Pelatihan terlaksana 100% tepat waktu dan tepat sasaran	dukungan terhadap target peningkatan produksi perikanan tangkap	100%	Rp. 360.700.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
2.01.2.05.01.00.19	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN								Rp. 886.800.000,00	Rp. 900.000.000,00		
2.01.2.05.01.00.19.001	Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Gedang sari Kokap Sapto sari	Pelatihan dan fasilitasi olahan ikan: 1. untuk mendukung pengentasan kemiskinan: (90 org dan 3 pkt) 2. untuk mendukung peningkatan produksi olahan ikan: 15 kelompok	Pelatihan olahan ikan terlaksana 100% dan tepat waktu	dukungan terhadap target peningkatan volume produk olahan hasil perikanan	100%	Rp. 886.800.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan										Jumlah Pagu : Rp. 9.371.885.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Pilihan											
2.06	PERDAGANGAN											
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan											
2.06.2.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN								Rp. 2.809.285.000,00	Rp. 2.804.885.000,00		
2.06.2.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Alat tulis kantor 68 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 33.33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.079.285.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
					Barang cetakan 18 jenis							
					Barang cetakan untuk pengelolaan arsip 2 jenis							
					Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 tepat waktu 22 unit							
					Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan							
					Honor arsiparis 1 tahun							
					Kebersihan gedung kantor induk 19660 m2							
					Komponen instalasi listrik/penerangan 22 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan										Jumlah Pagu : Rp. 9.371.885.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan							
					Penggunaan 181.328 lembar							
					Pengiriman dokumen 15 dokumen							
					Pengisian tabung pemadam kebakaran 15 tabung							
					Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20 jenis							
					Surat kabar 2 jenis							
					Surat Keluar 6450 surat							
					Surat Masuk 5400 surat							
2.06.2.06.01.00.01.001	Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	pameran	Pameran Inacraft, JIFFINA, IFEX	3 pameran	peningkatan nilai ekspor	4%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.074.885.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
					Pelayanan KADIN (3 Pokja : (1) Perdagangan, distribusi dan Logistik, (2) Hubungan Internasional, promosi dan Investasi dan (3) UMKM, Koperasi dan Usaha daerah)	1 tahun						
					Pelayanan SKA Otomasi IKM Ekspor	1 tahun						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan									Jumlah Pagu : Rp. 9.371.885.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.06.2.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang 7 orang 12 bulan	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 33,33% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 430.000.000,00	Rp. 430.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
					Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 4 orang 12 bulan							
					Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan 20 orang 12 bulan							
					Bukti pembayaran jasa keamanan kantor 12 bulan							
2.06.2.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Makan dan minum sidang 7.400 orang	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 33,33% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan							
					Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan							
2.06.2.06.01.00.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI								Rp. 1.597.600.000,00	Rp. 1.686.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan										Jumlah Pagu : Rp. 9.371.885.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.06.2.06.01.00.02.001	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	DIY	bantuan PKL dan Bimtek di 6 lokasi (terban, pringgokusuman, gedongkiwo, prenggan, pandeyan)	120 pedagang (6 klp @ 20 pedagang)	peningkatan omset usaha yang dibina	4%	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
					Bantuan PKL/pedagang dan Bimtek di 2 lokasi (Desa Dlingo dan Mangunan Kec. Dlingo)	40 pedagang						
					Pameran (Jakarta Fair, Kraton, Crafina, HUT Dekranas, Pameran Tetap)	5 pameran						
					Pelayanan Dekranasda yang optimal 1 Tahun	1 tahun						
2.06.2.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Relokasi CFSMI Perak	1 paket	Dukungan 33,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 197.600.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sesuai RKP BMD 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 33,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 256.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan										Jumlah Pagu : Rp. 9.371.885.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.06.2.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 33,33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
					Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9 jenis							
2.06.2.06.01.00.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN								Rp. 550.000.000,00	Rp. 550.000.000,00		
2.06.2.06.01.00.03.001	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	DIY	Operasi pasar	5 kali	Prosentase jumlah barang jasa yang sesuai dengna standard	100 %	Rp. 550.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
					Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	12 bulan						
					Pemantauan harga barang dan jasa	12 bulan						
					pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa	12 bulan						
					Pengawasan barang berbahaya	12 bulan						
					Pengembangan kemitraan produsen Bahan Pokok dg Toko Modern	5 kab/kota @ 1 Angkatan 30 IKM						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan										Jumlah Pagu : Rp. 9.371.885.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.06.2.06.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN								Rp. 240.000.000,00	Rp. 340.000.000,00		
2.06.2.06.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2018	Nilai LKJIP : A	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 20 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.06.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini	Pembaharuan data secara kontinyu 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
					ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2019 dan Perubahan TA.2018						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan										Jumlah Pagu : Rp. 9.371.885.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.06.2.06.01.00.06.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 20 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.07	PERINDUSTRIAN											
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan											
2.07.2.06.01.00.01	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI								Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00		
2.07.2.06.01.00.01.001	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Prototype Alat Tepat Guna 2. Pelayanan jasa bengkel alat produksi bagi Masyarakat meningkat 3. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan 4. Penerapan ATG Hasil Rekayasa	7 ATG 6 Unit Layanan 6 Unit Layanan 5 ATG	peningkatan nilai produksi	5 %	Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.07.2.06.01.00.02	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI AGRO, TEKSTIL, KIMIA, DAN ANEKA								Rp. 2.975.000.000,00	Rp. 3.095.000.000,00		
2.07.2.06.01.00.02.001	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Agro, Tekstil, Kimia, dan Aneka	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Gedung sari Gedongtengen Gondokusuman Kokap Kotagede Mantrijeron Nanggulan Ngawen Paliyan Panggang	Bimtek olahan pangan di 15 lokasi	15 lokasi @ 20 orang	peningkatan nilai produksi IKM Agro, Tekstil, Kimia dan Aneka	4 %	Rp. 2.875.000.000,00	Rp. 2.995.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pagu : Rp. 9.371.885.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
				Patuk Pundong Sapto sari Semin Umbulharjo Wonosari	Pelatihan IKM Anyaman Bambu di Hargowilis, Kokap, Kulon Progo	1 angk @ 20 org								
					Pelatihan IKM Produk Pakaian Jadi dan Tekstil di Salaran, Ngoro-oro, Patuk	2 angkatan @ 20 Orang								
					Pelatihan IKM Tenun di Kec Nanggulan, Kulon Progo	1 angkatan @ 20 orang								
					Pelatihan pengembangan Desain IKM Meubel Bambu di Dusun Muntuk Desa Mulusan Kec Paliyan Gunungkidul	1 angkatan @ 20 IKM								
					Pelatihan pengembangan Desain IKM Meubel Kayu (Padukuhan Srumbung, Desa Pengkok, Kec Patuk Kab Gunungkidul dan Dusun Bolang Desa Girikarto Kec. Panggang Kab Gunungkidul	2 angkatan @ 20 IKM								
					Pelatihan Produk herbal Biofarmaka di Klepu, Hargowilis dan Hargorejo, Kokap, Kulon Progo	3 kelompok								
					Pendampingan Sentra IKM & Jejaring Kemitraan IKM Gerabah di Pundong	20 orang								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan					Jumlah Pagu : Rp. 9.371.885.000,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Pendampingan Sentra IKM Tenun di Tancep kec. Ngawen Gunungkidul	2 angkatan @ 15 orang						
					Pengembangan WUB Anyaman Bambu di Hargomulyo (kokap) dan Mertelu (Gedangsari)	3 angkatan @ 20 orang						
					Pengembangan WUB Kerajinan Imitasi di Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul	1 angkatan 20 orang						
					Peningkatan Kemampuan Produksi Olahan Coklat di Bunder kec Patuk	2 angkatan @ 2 Kelompok						
					Peningkatan Kemasan Produk Gula Semut di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	1 Kelompok						
					Peningkatan Kualitas IKM Serat Alam di Selang, Wonosari, Gunungkidul	20 orang						
					Peningkatan Produksi Kerajinan Bambu (Sangkar Burung) di Rejosari, Semin, Gunungkidul	20 orang						
2.07.2.06.01.00.02.002	Pengelolaan dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Hak Kekayaan Intelektual	1 tahun	Hak Kekayaan Intelektual	1 tahun	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan										Jumlah Pagu : Rp. 9.371.885.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.07.2.06.01.00.03	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA, DAN TELEMATIKA								Rp. 300.000.000,00	Rp. 500.000.000,00		
2.07.2.06.01.00.03.001	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika	2.Pengembangan Ekonomi	2.1.1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Mantap.	Kasihani Wates	Pendampingan Industri Kreatif	1 kegiatan	peningkatan nilai produksi industri logam, mesin, elektronika dan telematika	1%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
					Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM logam di Bangunjiwo, Kasihan	20 orang						
					Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM Logam di Bendungan, Wates, Kulon Progo	20 orang						
					Temu bisnis IKM industri kreatif dengan perusahaan IT	1 kegiatan						

5.2.2 Rencana Program/Kegiatan Keistimewaan

Untuk program/kegiatan keistimewaan pada perencanaan pembangunan Tahun 2018 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 5.2 Prioritas, Sasaran, Program, dan Jumlah Anggaran Keistimewaan

No	Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran
1	4. Sosial Budaya	PROGRAM PENGUATAN DEMOKRASI BUDAYA	Dinas Kebudayaan	Rp 6,564,546,000.00
2	4. Sosial Budaya	PROGRAM PENGARUSTAMAAN NILAI-NILAI KEISTIMEWAAN	Dinas Kebudayaan	Rp 5,164,630,000.00
3	4. Sosial Budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETERLINDUNGAN WARGA	Dinas Kebudayaan	Rp 26,697,300,000.00
4	4. Sosial Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA	Dinas Kebudayaan	Rp 20,430,000,000.00
5	4. Sosial Budaya	PROGRAM PENGUATAN SEMANGAT KEJUANGAN DAN KEBANGSAAN	Dinas Kebudayaan	Rp 48,000,000,000.00
6	4. Sosial Budaya	PROGRAM PELINDUNGAN ADAT DAN TRADISI	Dinas Kebudayaan	Rp 950,000,000.00
7	4. Sosial Budaya	PROGRAM PELESTARIAN SENI BUDAYA DAERAH	Dinas Kebudayaan	Rp 134,977,450,000.00
8	4. Sosial Budaya	PROGRAM PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA JAWA	Dinas Kebudayaan	Rp 10,600,000,000.00
9	4. Sosial Budaya	PROGRAM SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan	Rp 104,328,666,000.00
10	4. Sosial Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN MUSEUM	Dinas Kebudayaan	Rp 15,200,000,000.00
11	4. Sosial Budaya	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan	Rp 81,238,594,000.00
12	4. Sosial Budaya	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN BUDAYA	Dinas Kebudayaan	Rp 1,150,000,000.00
13	4. Sosial Budaya	PROGRAM PENGUATAN PERAN KASULTANAN DAN KADIPATEN DALAM MENJAGA BUDAYA YOGYAKARTA	Dinas Kebudayaan	Rp 53,500,000,000.00

RKPD Tahun 2018

14	6. Pembangunan Wilayah	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 6,000,000,000.00
15	6. Pembangunan Wilayah	PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 44,910,000,000.00
16	6. Pembangunan Wilayah	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 1,181,084,512,000.00
17	6. Pembangunan Wilayah	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Rp 1,200,000,000.00
18	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	Sekretariat Daerah	Rp 4,760,000,000.00
19	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN	Sekretariat Daerah	Rp 860,000,000.00
20	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN	Sekretariat Daerah	Rp 1,650,000,000.00
21	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN	Sekretariat Daerah	Rp 3,100,000,000.00
22	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	Sekretariat Daerah	Rp 3,475,000,000.00
23	7.Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGUATAN PARAMPARA PRAJA	Sekretariat Daerah	Rp 2,100,000,000.00
Total				Rp 1,757,940,698,000.00

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.03	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)													
3.03.1.17.01.00	Dinas Kebudayaan													
3.03.1.17.01.00.15	PROGRAM PENGUATAN DEMOKRASI BUDAYA										Rp. 6.564.546.000,00	Rp. 6.564.546.000,00		
3.03.1.17.01.00.15.001	Sambung Rasa Keistimewaan	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Sekretariat Daerah			terlaksananya forum keistimewaan dengan stakeholder terkait	10 kali pertemuan untuk meningkatkan kualitas kinerja keistimewaan, 1 dokumen	Dukungan 13,7 % untuk penguatan demokrasi budaya	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.15.002	Pembangunan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Komunikasi dan Informatika			terbangunnya sistem informasi pengaduan masyarakat	satu sistem informasi pengaduan masyarakat berfungsi 100%	Terwujudnya pemerintah yang demokratis	13,7 %	Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.15.003	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			jumlah Rekomendasi DPRD DIY terhadap Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Keistimewaan	4 rekomendasi DPRD DIY yang memuat Urusan Kebudayaan, Urusan Kelembagaan, Urusan Tata Ruang, Urusan Pertanian	Dukungan 49,7 % untuk penguatan demokrasi budaya	100 %	Rp. 3.264.546.000,00	Rp. 3.264.546.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.15.004	Penyebar Luasan Tradisi Luhur Melalui Media Radio.	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah stakeholder yang mengikuti radio masuk pasar	150 orang yang hadir mengikuti radio masuk pasar	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis	6,1 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.15.005	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Rembug Desa / Kelurahan	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan rembug desa	10 Desa / Kelurahan yang melaksanakan rembug desa dimasing - masing Kabupaten / Kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Dukungan 22,9 % untuk penguatan demokrasi budaya	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.16	PROGRAM PENGARUSTAMAAN NILAI-NILAI KEISTIMEWAAN										Rp. 5.164.630.000,00	Rp. 5.604.630.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.17.01.00.16.001	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			Tersusunnya dokumen pelaksanaan pendidikan tata nilai luhur budaya	1 dokumen yang memuat penjabaran 18 tata nilai luhur budaya	Dukungan 1,9 % terhadap penanaman nilai-nilai keistimewaan di DIY	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.16.002	Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter Tata Nilai Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat			1. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan tata nilai berkarakter 2. Tersusunnya pedoman standar dan evaluasi pendidikan berbasis budaya 3. Tersedianya sarpras pendidikan berkarakter 4. Terlaksananya pendidikan kepramukaan	1. 200 orang siswa yang mendapatkan pendidikan tata nilai berkarakter 2. satu pedoman standar dan evaluasi pendidikan berbasis berbudaya 3. Ruang pertunjukan SMK 1 Kasihan Bantul, Masterplan Kompleks SMK Seni, dan 3 set gamelan yang berfungsi dengan baik	Dukungan 98,1 % untuk penanaman nilai-nilai keistimewaan	100 %	Rp. 5.064.630.000,00	Rp. 5.604.630.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETERLINDUNGAN WARGA										Rp. 26.697.300.000,00	Rp. 26.697.300.000,00		
3.03.1.17.01.00.17.001	Pembuatan Demplot Lumbung Mataraman	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Pelayanan Langsung ke Masyarakat			Tersedianya Demplot Lumbung Mataraman	Demplot Pertanian Tingkat Rumah Tangga pada 5 Lokasi @200m2 di 5 Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	Dukungan 1,40 % untuk memberdayakan masyarakat dan keterlindungan warga	100 %	Rp. 375.000.000,00	Rp. 375.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.17.002	Pengembangan Incubator Kreatifitas dan SDM Kebudayaan	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			Jumlah kelompok Inkubator kreatifitas yang dibentuk	terbentuknya 5 kelompok inkubator kreatifitas budaya di kab/kota	Dukungan 4,49 % terhadap pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga	100 %	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Jumlah SDM kreatifitas yang dibentuk	200 peserta yang mengikuti inkubator kreativitas budaya						
3.03.1.17.01.00.17.003	Pendampingan Desa Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah Pendamping Desa Budaya yang memiliki kompetensi seni budaya	100 desa @2 orang	Dukungan 14,98 % terhadap pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga	100 %	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.17.004	Pembangunan Balai Budaya di Desa Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah balai budaya yang dibangun	4 balai budaya terbangun di 4 kabupaten dapat berfungsi dengan baik	Dukungan 3,75 % terhadap pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD

Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.03.1.17.01.00.17.005	Pelaksanaan Upacara Adat di Desa Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah Desa Budaya yang terfasilitasi	56 Desa budaya terfasilitasi sebagai pusat pelestarian adat dan tradisi	Dukungan 8,39 % terhadap pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga	100 %	Rp. 2.240.000.000,00	Rp. 2.240.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
3.03.1.17.01.00.17.006	Pengembangan Rintisan Desa/ Kelurahan Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			jumlah kelurahan yang sudah dikembangkan menjadi rintisan kelurahan budaya	1. 2 rintisan kelurahan budaya di Kota Yogyakarta 2. 5 rintisan desa budaya di Kabupaten Bantul 3. 16 rintisan desa budaya di Kabupaten Kulon Progo 4. 32 rintisan desa budaya di Kabupaten Sleman 5. 14 rintisan desa budaya di Kabupaten Gunungkidul	Dukungan 56,26 terhadap pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga	100 %	Rp. 15.020.000.000,00	Rp. 15.020.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
3.03.1.17.01.00.17.007	Pembinaan Jagawarga	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			1. Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjakan fungsinya	1. 305 Desa /Kelurahan	Dukungan 10,72 terhadap pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga	100 %	Rp. 2.862.300.000,00	Rp. 2.862.300.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
							2. prosentase desa/kelurahan yang pranata sosialnya aktif dalam mewujudkan ketahanan budaya	2. 45%								
							3. review pergub nomor 9 tahun 2015 tentang jagawarga	3. 1 peraturan Gubernur								
3.03.1.17.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA										Rp. 20.430.000.000,00	Rp. 20.930.000.000,00				
3.03.1.17.01.00.18.001	Penyelenggaraan Atraksi Wisata Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Atraksi seni budaya di Obyek Wisata Kulon Progo	24 atraksi seni budaya	Dukungan 83,8 % terhadap pengembangan pariwisata budaya	100 %	Rp. 17.130.000.000,00	Rp. 17.630.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
							Heritage Trail/Jelajah Cagar Budaya Wates	600 peserta mengikuti Jelajah Cagar Budaya Wates								
							jumlah peserta atraksi wisata budaya di kawasan strategis	2000 peserta mengikuti atraksi wisata								
							Jumlah Peserta Festival Geopark	600 peserta mengikuti Festival Geopark								
							Jumlah Peserta Festival Gerobak Sapi	300 Gerobak Sapi mengikuti Festival Gerobak Sapi								
							Jumlah Peserta Festival Menoreh	600 peserta mengikuti Festival Menoreh								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah Peserta Festival Sumbu Filosofi	5.200 peserta mengikuti Festival Sumbu Filosofi						
							Jumlah Peserta Jogja International Batik Street Performance	2000 orang peserta lokal 100 orang peserta internasional						
							Jumlah Peserta Jogja International Heritage Walk	2000 peserta lokal, 300 peserta internasional mengikuti International Heritage Walk						
							Jumlah Peserta Royal Mataram Festival	10.000 peserta mengikuti Royal Mataram Festival						
3.03.1.17.01.00.18.002	Penyelenggaraan Festival Bahari	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			jumlah peserta (perahu motor tempel) yang mengikuti festival Bahari	100 perahu motor tempel sebagai peserta aktif festival Bahari	Dukungan 2,4 % dalam pengembangan pariwisata budaya	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.18.003	Penyelenggaraan Festival Desa/Kelurahan Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Terselenggaranya festival desa/ kel. Budaya	1000 orang di masing-masing Kabupaten / Kota yang mengapresiasi pelaksanaan festival desa / kelurahan Budaya	Dukungan 13,7 terhadap pengembangan pariwisata budaya	100 %	Rp. 2.800.000.000,00	Rp. 2.800.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.19	PROGRAM PENGUATAN SEMANGAT KEJUANGAN DAN KEBANGSAAN										Rp. 48.000.000.000,00	Rp. 48.000.000.000,00		
3.03.1.17.01.00.19.001	Penyelenggaraan Festival Selendang Sutra	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah IKPMD yang mengikuti festival selendang sutera	34 IKPMD aktif mengikuti festival selendang sutera	Dukungan 6,3 % terhadap penguatan semangat kebangsaan	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.19.002	Pembangunan Taman Raja-Raja	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kulon Progo DIY			1. Dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen DED Taman Raja-raja diselesaikan tepat waktu	Dukungan 83,3% terhadap penguatan semangat kebangsaan	100 %	Rp. 40.000.000.000,00	Rp. 40.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Persiapan lahan (appraisal dan pembelian lahan)	2. 40 Ha dapat digunakan sebagai taman raja-raja						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.17.01.00.19.003	Penyelenggaraan Pendidikan Kebangsaan	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			terselenggaranya pendidikan kebangsaan	500 .siswa yang mengikuti dan memahami nilai-nilai kebangsaan	Dukungan 2,1 % terhadap penguatan semangat kejuangan dan kebangsaan	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.19.004	Gerakan Nasional Cinta Tanah Air	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			1. Jumlah desa yang mengikuti lomba desa untuk memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan RI	1.10 desa yang berpartisipasi dalam memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan RI	Dukungan 2,1 % terhadap penguatan semangat kejuangan dan kebangsaan	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah sekolah yang mengikuti Lomba peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan RI	2.10 ..sekolah yang berpartisipasi dalam memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan RI						
3.03.1.17.01.00.19.005	Pembinaan Kesejarahan	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			1. publikasi dan dokumentasi sejarah lokal	1. media cetak dan media elektronik; 2 dokumen kajian (Keistimewaan DIY sejak 1755, Pemilu Pertama)	Dukungan 6,3 % terhadap penguatan semangat kejuangan dan kebangsaan	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. jejak tradisi sejarah	5 Peserta						
							3. lawatan sejarah	5 Peserta yang dikirim ke lawatan peserta tingkat nasional						
3.03.1.17.01.00.20	PROGRAM PELINDUNGAN ADAT DAN TRADISI										Rp. 950.000.000,00	Rp. 1.050.000.000,00		
3.03.1.17.01.00.20.001	Invendok Adat Tradisi Religius Spiritual	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Data hasil inventarisasi dan dokumentasi adat tradisi religius spiritual	satu dokumen berisi data adat tradisi religius spiritual	Dukungan 21,1 % terhadap perlindungan adat dan tradisi	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.20.002	Penyajian dan Penyebarluasan Adat Tradisi Religius Spiritual	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah adat tradisi religius spiritual yang disebarluaskan	adat tradisi spiritual dari 5 kab/kota yang disebarluaskan	Dukungan 78,9 % terhadap perlindungan adat dan tradisi	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.21	PROGRAM PELESTARIAN SENI BUDAYA DAERAH										Rp. 134.977.450.000,00	Rp. 136.220.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.17.01.00.21.001	Pelestarian Budaya Luhur di Masyarakat	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			4. Terlaksananya pelestarian nilai budaya luhur di Kabupaten Sleman melalui pelestarian 12 upacara adat dan tradisi	Dukungan 8,8 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 11.830.000.000,00	Rp. 11.900.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							5. Terlaksananya pelestarian nilai budaya luhur di Kabupaten Gunungkidul melalui pelestarian 20 upacara adat dan tradisi							
							1. Terlaksananya pelestarian nilai budaya luhur di tingkat DIY melalui: a. 5 seni tradisi luhur yang dilestarikan (wayang kulit Sasanahinggil/Pepadang, Sukrokasih, Pepadi, Wayang Wong Pancabudaya) b. Fasilitas kegiatan Dewan Kebudayaan selama 1 tahun							
							2. Terlaksananya pelestarian nilai budaya luhur di Kabupaten Bantul melalui: a. Pementasan wayang kulit sejumlah 20 kali dengan tingkat partisipasi penonton 300 orang b.upacara adat dan tradisi sejumlah 20 jenis							
							Terlaksananya pelestarian nilai budaya luhur	3. Terlaksananya pelestarian nilai budaya luhur di Kabupaten Kulon Progo melalui pelestarian 101 upacara adat						
3.03.1.17.01.00.21.002	Pelatihan Tari Klasik Bagi Masyarakat	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			Jumlah Peserta yang Lulus Mengikuti Pelatihan Tari Klasik	30 orang lulus pelatihan tari klasik	Dukungan 0,2 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.21.003	Pembinaan Kesenian Tradisional	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah kelompok baru Kesenian tradisional	5 kelompok baru terbentuk untuk melestarikan kesenian tradisional	Dukungan 5,9 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. 8.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Jumlah Penonton Kesenian tradisional	300 orang penonton mengapresiasi kesenian tradisional						
							Jumlah Pertunjukan Kesenian tradisional	200 kali pertunjukan seni tradisional						
							Jumlah Peserta Pelatihan Kesenian tradisional	50 orang peserta menguasai kesenian tradisional						
							Lomba-lomba kesenian tradisional	Lomba seni suara, langencarita, ketoprak, macapat (berjenjang Kab/Kot)						
							Pembentukan Kampung Jemparingan Mataraman	Terbentuknya 1 Kampung Jemparingan Mataraman di Kulon Progo						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD

Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.03.1.17.01.00.21.004	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Budaya Kuno Kabupaten / Kota	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa				2. Koleksi perpustakaan dan arsip di Kabupaten Gunungkidul berupa Penerbitan referensi muatan lokal sejumlah 500 eksemplar dan akuisisi arsip tokoh sejarah dan budaya sejumlah 5 arsip	Dukungan 1,1 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 1.425.000.000,00	Rp. 1.450.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
								3. Koleksi perpustakaan dan arsip di Kabupaten Sleman berupa penelusuran arsip kuno sejumlah 500 arsip, 1 dokumen hasil inventarisasi arsip kuno dan digitalisasi arsip kuno sejumlah 2000 lembar								
							Jumlah koleksi perpustakaan yang dikelola di Kab/kota	1. Koleksi perpustakaan dan arsip di Kabupaten Bantul sejumlah 2000 Koleksi dan digitalisasi arsip kuno sejumlah 300 koleksi								
3.03.1.17.01.00.21.005	Pembinaan dan Pelatihan Seni Budaya Yogyakarta	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Jakarta			Terlaksananya pembinaan dan pelatihan pelestari seni budaya tradisional Yogyakarta :	Pembinaan dan Pelatihan seni di Kaperda untuk meningkatkan kecintaan terhadap seni budaya melalui: 50 kali pelatihan Tari 35 kali pelatihan Karawitan 35 kali pelatihan Ketoprak	Dukungan 0,1 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 119.800.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
3.03.1.17.01.00.21.006	Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya Yogyakarta	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Jakarta			jumlah Pentas Seni dan Budaya daerah	Pentas seni dan budaya di Kaperda sebanyak 19 kali untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah	Dukungan 0,7 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 975.650.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
3.03.1.17.01.00.21.007	Invendok dan Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda.	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			1. Data inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya tak benda se-DIY	1. Hasil inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya tak benda: sejumlah 1 Dokumen	Dukungan 2,2% terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
							2. Warisan Budaya tak benda yang dinominasikan	2. 10 WBTB dinominasikan								
3.03.1.17.01.00.21.008	Pembinaan Perfilman Daerah	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah Film Yang Dibuat	9 film selesai dibuat (4 film dokumenter, 5 fiksi ; dengan tema dinamika kebudayaan di DIY)	Dukungan 3,3 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 4.400.000.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
							Jumlah film yang mendapat penghargaan	4 Nominasi dalam festival film								
							Jumlah Penonton Film hasil pelatihan perfilman	12000 penonton mengapresiasi film hasil pelatihan								
							jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Perfilman	50 peserta menguasai teknik pembuatan film yang baik								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD

Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.03.1.17.01.00.21.009	Pembinaan Seni Rupa	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba Seni Lukis 2. Jumlah Pengunjung di Pameran Seni lukis	Kabupaten Bantul: 1. 30 karya seni dari 500 peserta 2. 1000 orang Pengunjung Pameran	Dukungan 3,5% terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 4.725.000.000,00	Rp. 4.750.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
							1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba Seni Lukis 2. Jumlah Pengunjung di Pameran Seni lukis	Kabupaten Kulon Progo: 1. 30 karya seni 2. 1000 orang pengunjung pameran								
							1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba Seni Lukis 2. Jumlah Pengunjung di Pameran Seni lukis	Kabupaten Gunungkidul: 1. 30 karya seni rupa 2. 1000 orang pengunjung pameran								
							Dukungan penyelenggaraan pameran Art Jog	terselenggaranya satu kali pameran ART Jog								
							Jumlah kelompok /individu seniman seni rupa	5 kelompok baru								
							Jumlah Pameran Karya Seni rupa	30 karya seni rupa dari Kyoto dan 30 karya seni rupa dari DIY yang dipamerkan								
							Jumlah Peserta Pelatihan Seni rupa	30 orang peserta menguasai teknik seni rupa								
							Jumlah peserta Residensi yang terfasilitasi selama di Yogyakarta	6 orang mengikuti residensi terfasilitasi dengan baik								
							Terselenggarakannya lomba lukis DIY - Kyoto	300 pelajar tingkat SD/SMP/SMA yang mengikuti lomba lukis DIY-Kyoto								
3.03.1.17.01.00.21.010	Pelaksanaan Kemitraan Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY dan Luar negeri			Terselenggaranya Kemitraan Budaya antar Lembaga/sanggar/kelompok : 1. MSO Youth Music Camp 2. Dukungan lembaga seni 3. Seniman mengajar"	-Terlaksananya MSO Youth Music Camp 1 kali selama 1 minggu -15 lembaga seni mendapatkan dukungan - 3 Seniman mengajar	Dukungan 2,2 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
3.03.1.17.01.00.21.011	Penyelenggaraan Gelar Budaya Yogyakarta	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY				2. Festival seni budaya sebanyak 10 event di Kabupaten Bantul	Dukungan 16,2 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100%	Rp. 21.800.000.000,00	Rp. 21.800.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
								3. Festival seni budaya sebanyak 9 event di Kabupaten Kulon Progo								
								4. Festival seni budaya sebanyak 9 event di Kabupaten Gunungkidul								
								5. Festival seni budaya sebanyak 8 event di Kabupaten Sleman								
							Terlaksananya Festival Seni Budaya	1. Festival seni budaya sebanyak 10 kali di Kota Yogyakarta								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.17.01.00.21.012	Pembinaan Busana Adat dan Tata Rias Gaya Jogja	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			1. Jumlah peserta lomba busana	200 orang mengikuti lomba busana	Dukungan 0,4 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100%	Rp. 550.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah lomba rias adat Yogyakarta	Terlaksananya 2 Lomba rias adat Yogyakarta						
3.03.1.17.01.00.21.013	Peningkatan Teknologi Produksi Gamelan	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah jenis perangkat gamelan yang dikembangkan (moulding)	5 Jenis (kenong, gong, kempul, kethuk, gong suwukan) moulding perangkat gamelan dapat digunakan	Dukungan 1,5 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.21.014	Pengembangan Batik Khas Jogja	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Jumlah HAKI yang diajukan	2 Jenis Batik yang mendapatkan sertifikat paten (cipta dan merk kolektif)	Dukungan 0,7 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.21.015	Penyelenggaraan Pendidikan Membatik Bagi Siswa	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Terselenggaranya Pelatihan membatik untuk siswa	1. Kota Yogyakarta sejumlah 100 Siswa SD dan 50 Siswa SMP 2. Kabupaten Kulon Progo sejumlah 30 satuan pendidikan 3. Kabupaten Bantul sejumlah 5000 siswa 4. Kabupaten Gunungkidul sejumlah 18 sekolah 5. Kabupaten Sleman sejumlah 200 siswa	Dukungan 2,3 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 3.150.000.000,00	Rp. 3.150.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.21.016	Pembinaan Seni Tradisi untuk Siswa	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			1. Lomba seni siswa pendidikan Menengah	3 Perlombaan (lomba seni suara/mocopat,karawitan, membatik)	Dukungan 1,1 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100%	Rp. 1.430.000.000,00	Rp. 1.450.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Lomba seni siswa pendidikan Dasar	3 Perlombaan (lomba seni suara/mocopat,karawitan, membatik)						
3.03.1.17.01.00.21.017	Gerakan Seniman Masuk Sekolah	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tari klasik bagi Siswa	200 siswa/10 sekolah bisa menari klasik	Dukungan 0,4 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.21.018	Pembentukan Lab Seni Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kab Gunungkidul DIY			Jumlah Lab Seni Budaya yang dibangun	Terbangunnya 1 Lab seni sekolah di Gunungkidul dan dapat dipergunakan	Dukungan 0,6 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100%	Rp. 800.000.000,00	Rp. 850.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.17.01.00.21.019	Penyusunan Bahan Ajar Mulok	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			Jumlah Bahan Ajar Muatan Lokal	3 Bahan Ajar (Membatik, Karawitan, Gamelan) dapat dipergunakan	Dukungan 0,2 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100%	Rp. 220.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.21.020	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			1. Terselenggaranya program studi pendidikan	1). Operasional 3 Prodi (kriya kulit, karawitan dan tari) selama 1 tahun dapat berjalan dengan lancar	Dukungan 5,2 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100%	Rp. 7.052.000.000,00	Rp. 7.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. terlaksananya pembangunan tahap kedua gedung C	2). Terbangunnya 3 Unit kelas, perpustakaan, ruang Display dan gudang (432m2); 1 unit ruang pertunjukan (450m2) dan 1 ruang aula (144m2) pada gedung C						
3.03.1.17.01.00.21.021	Penyebarluasan Kesenian di Dalam Negeri	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY, Luar DIY			Jumlah kesenian yang disebarluaskan di dalam negeri	1. Penyebarluasan 10 macam kesenian (DIY) dan tutorial indonesia raya 2. Penyebarluasan 3 macam kesenian (Kota Yogyakarta) 3. Penyebarluasan 3 macam kesenian (Kabupaten Kulon Progo) 4. Penyebarluasan 3 macam kesenian (Kabupaten Gunungkidul) 5. Penyebarluasan	Dukungan 13,6 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100%	Rp. 18.300.000.000,00	Rp. 18.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.21.022	Diplomasi Budaya Dalam dan Luar Negeri	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Luar Negeri			Jumlah kesenian yang disebarluaskan luar negeri	4 macam kesenian yang disebarluaskan	Dukungan 3,7 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100%	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 5.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.21.023	Penyelenggaraan FKY	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			1. Jumlah Karya Seni Yang ditampilkan 2. Jumlah penonton	Terlaksananya Festival Kesenian Yogyakarta di: 1. Tingkat DIY meliputi: - 5 Jenis Karya Seni (Kriya, Rupa, Pertunjukan, Musik, Suara) - Meningkatkan dari 138.000 menjadi 150.000 pengunjung 2. Kota Yogyakarta meliputi 5 jenis karya seni (kriya, rupa, pertunju	Dukungan 7,4 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.21.024	Penyelenggaraan Jogja Internasionale Batik Binale	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Gebyar batik di Kabupaten/kota	1 kali di 4 kabupaten 1 kota terlaksana dengan baik	Dukungan 4,8 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 6.500.000.000,00	Rp. 6.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Jumlah kain batik kraton dan puro yang dikonservasi	20 jenis batik kraton/puro yang di konservasi						
							Jumlah peserta lomba desain batik Jogja pola internasional	100 orang mengikuti lomba desain batik jogja						
							Jumlah peserta pameran batik	160 orang/kelompok mengikuti pameran						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah Peserta Simposium	125 orang sebagai peserta aktif simposium						
							Jumlah Peserta workshop	125 orang sebagai peserta aktif workshop						
3.03.1.17.01.00.21.025	Penghargaan Bagi Pelestari Seni Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			2. pemberian penghargaan untuk 6 penerima pada 3 kategori (1 pelestari CB, 3 seniman/budayawan, 2 pelestari adat tradisi) di Kota Yogyakarta	Dukungan 1,7 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %		Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							3. pemberian penghargaan untuk 6 penerima pada 3 kategori (1 pelestari CB, 3 seniman/budayawan, 2 pelestari adat tradisi) di Kabupaten Bantul							
							4. pemberian penghargaan untuk 6 penerima pada 3 kategori (1 pelestari CB, 3 seniman/budayawan, 2 pelestari adat tradisi) di Kabupaten Kulon Progo							
							5. pemberian penghargaan untuk 6 penerima pada 3 kategori (1 pelestari CB, 3 seniman/budayawan, 2 pelestari adat tradisi) di Kabupaten Gunungkidul							
							6. Pemberian penghargaan untuk 6 penerima pada 3 kategori (1 pelestari CB, 3 seniman/budayawan, 2 pelestari adat tradisi) di Kabupaten Sleman							
						Jumlah penerima penghargaan	Terlaksananya pemberian penghargaan: 1. pemberian penghargaan untuk 15 penerima pada 3 kategori (5 pelestari CB, 5 seniman/budayawan, 5 pelestari adat tradisi) di tingkat DIY							
3.03.1.17.01.00.21.026	Pengelolaan Taman Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			1. Jumlah peserta yang memperoleh pelatihan/ bimbingan seni	1. 150 anak yang menguasai seni tari, musik, karawitan, dan seni rupa	Dukungan 8,6 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 11.600.000.000,00	Rp. 12.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Terselenggarakannya Pameran Seni Rupa bagi pemula	Terselenggaranya 1 kali Pameran seni rupa Nandur srawung untuk mengenalkan karya perupa pemula Terselenggaranya 1 kali Pameran seni rupa tarkam tarman						
							3. Terselenggarakannya Pentas seni di Taman Budaya	Pentas seni selama 11 bulan, meliputi: 1. Gelar Karya Maestro 2. Gelar Karawitan 3. Gelar Seni Sepanjang Tahun 4. Pasar Seni Tradisi (Pasar Kangen) 5. Karya Musik Orkestra 6. Parade Dagelan Mataraman 7. Musikalisasi Sastra 8. Pentas Teater						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. jumlah duta budaya yang mengikuti Temu Karya Taman Budaya di Surabaya	50 orang duta budaya yang mengikuti temu karya taman budaya						
							5. 4 Edisi Majalah dan Buku Seni Budaya yang terdistribusikan ke perpustakaan dan lembaga-lembaga seni di Indonesia	500 eks majalah dan 2000 eks buku seni budaya yang terdistribusi ke perpustakaan dan lembaga seni						
							6. Pendokumentasian dan Publikasi kegiatan Taman Budaya DIY selama 1 tahun	1. Dokumentasi 100 even 2. Publikasi media massa 11 bulan						
							7. Terpeiharanya Taman Budaya (DIY)	seluas 1400 m2 (societet-TBY)						
3.03.1.17.01.00.21.027	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			terfasilitasinya lembaga pelestari budaya	10 Lembaga pelestari budaya yang terfasilitasi	Dukungan 3,7 % terhadap pelestarian seni budaya daerah	100 %	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA JAWA										Rp. 10.600.000.000,00	Rp. 10.905.000.000,00		
3.03.1.17.01.00.22.001	Invendok Bahasa dan Sastra Jawa	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			Data hasil inventarisasi dan dokumentasi bahasa dan sastra jawa	1 dokumen berisi data karya sastra jawa	Dukungan 3,3 % terhadap perlindungan bahasa dan sastra Jawa	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 375.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.22.002	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah karya sastra yang ditampilkan	Karya sastra yang ditampilkan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra sejumlah: 1. 6 jenis (sesorah, mocopat, geguritan, parikan Jawa, Pranata Adicara, Busana Jawa) di Kabupaten Bantul 2. 6 jenis di Kabupaten Kulon Progo 3. 15 karya sastra yang	Dukungan 78,1 % terhadap perlindungan bahasa dan sastra	100 %	Rp. 8.280.000.000,00	Rp. 8.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							jumlah masyarakat yang menerima/ terekspose penyebarluasan bahasa dan sastra jawa (sebagai komunikan/ penerima pesan)	5000 Pembaca, 100 ribu Pendengar, 200 ribu Pemirsa menerima informasi tentang bahasa dan sastra jawa						
							Jumlah media yang menyajikan dan penyebarluaskan bahasa dan sastra jawa	1. 4 Media cetak (majalah, tabloid, buku, surat kbr) 2. 2 Media elektronik (radio & TV)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba Debat Bahasa Jawa Mahasiswa/Masyarakat	50 Orang mengikuti lomba debat bahasa jawa							
							Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba Pranata Adicara Bahasa Jawa	50 Orang mengikuti lomba pranata adicara jawa							
3.03.1.17.01.00.22.003	Penyelenggaraan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah guru yang mengikuti kompetensi Bahasa dan Sastra Jawa	250 guru Bahasa Jawa Dikdas dan Dikmen mengikuti kompetensi bahasa dan sastra jawa	Dukungan 14,8 % terhadap perlindungan bahasa dan sastra Jawa	100 %	Rp. 1.570.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							1. Lomba inovasi pembelajaran bahasa jawa menggunakan TI 2. Pembuatan aplikasi game pembelajaran budaya yogyakarta	1) 1 kejuaraan inovasi pembelajaran bahasa jawa 2) 1 aplikasi pembelajaran budaya Yogyakarta							
							Review dan cetak Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Jawa	3 bahan ajar Bahasa dan Sastra Jawa dapat digunakan							
							Terselenggaranya lomba pidato bahasa jawa siswa (berjenjang)	6 kali Lomba Pidato Bahasa Jawa Tingkat provinsi dan kab/kota							
3.03.1.17.01.00.22.004	BIMTEK Bahasa Jawa di Sekolah	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Terselenggaranya Pelatihan Guru PAUD	200 guru PAUD paham ttg penggunaan bahasa jawa	Dukungan 0,7 % terhadap perlindungan bahasa dan sastra Jawa	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							Tersusunnya Pedoman pelaksanaan penggunaann bahasa jawa di PAUD	1 Panduan penggunaan bahasa jawa di PUD yg dapat diimplementasikan							
3.03.1.17.01.00.22.005	Peningkatan Budaya Baca, Bahasa dan Sastra Jawa	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Terlaksananya perlombaan budaya baca dan bahasa jawa (alih aksara manuskrip jawa)	1. Tiga (3) jenis lomba (alih aksara manuskrip Jawa, Alih Bahasa manuskrip Jawa, Menulis cerkak (Cerita Cekak/ cerpen) 2. Bunga Rampai Hasil Lomba	Dukungan 3,1 % terhadap perlindungan bahasa dan sastra Jawa	100 %	Rp. 325.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.17.01.00.23	PROGRAM SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR KEBUDAYAAN										Rp. 104.328.666.000,00	Rp. 105.700.000.000,00			
3.03.1.17.01.00.23.001	Pengadaan Sarana Prasarana Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah desa budaya yg dibantu sarpras	10 set Gamelan Perunggu yg didistribusikan utk 10 Desa budaya	Dukungan 3,8 % terhadap peningkatan suprastruktur dan infrastruktur kebudayaan	100 %	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.17.01.00.23.002	Peningkatan Sarana Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Cakupan Perpustakaan sekolah menengah dengan referensi muatan lokal	4 perpustakaan sekolah mempunyai tambahan koleksi muatan lokal	Dukungan 7,7 % terhadap peningkatan suprastruktur dan infrastruktur kebudayaan	100 %	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. 8.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Gamelan perunggu untuk Taman Budaya Kulonprogo	1 set gamelan perunggu dapat digunakan						
							jumlah gamelan perunggu yang diadakan untuk kantor disbud Kabupaten Bantul	2 pangkon slendro pelog dapat digunakan						
							sarana prasarana kantor	25 jenis sarpras kantor yang menunjang kinerja						
							tersusunnya DED/Pembangunan Diorama Kearsipan pada Gedung Depo BPAD DIY	1 Dokumen DED Diorama Kearsipan						
							Tersusunnya Storyline pada Diorama Arsip Cakupan Perpustakaan sekolah menengah dengan referensi muatan lokal	1 dokumen Storyline sejak perjanjian Giyanti sampai keistimewaan 4 perpustakaan sekolah mempunyai tambahan koleksi muatan lokal						
3.03.1.17.01.00.23.003	Pembangunan Taman Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY				2. Terbangunnya Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo, meliputi: - Joglo seluas 350m2 - Pagar taman budaya - Tempat ibadah seluas 100m2	Dukungan 83,9 % terhadap peningkatan suprastruktur dan infrastruktur kebudayaan	100 %	Rp. 87.500.000.000,00	Rp. 88.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
								3. Terbangunnya Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul meliputi: - Concert Hall - Penataan Landscape						
							Terbangunnya Taman Budaya	1. Terbangunnya Taman Budaya Kabupaten Bantul, meliputi: - 1 dokumen review Taman Budaya Bantul - Concert Hall , pendopo dan ruang pameran						
3.03.1.17.01.00.23.004	Penyelenggaraan Infromasi Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			1. Tersedianya sarpras pendukung internet pada ruang publik pedesaan dan kelurahan	1. 438 desa/kelurahan terintegrasi pelayanan IT berbasis internet	Dukungan 4,6 % terhadap peningkatan suprastruktur dan infrastruktur kebudayaan	100 %	Rp. 4.828.666.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. wifi access point untuk publik di sepanjang malioboro	2. 10 Wifi access point						
							3. pemasangan CCTV dilokasi destinasi	3.9 titik CCTV						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD

Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.17.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN MUSEUM										Rp. 15.200.000.000,00	Rp. 15.650.000.000,00		
3.03.1.17.01.00.24.001	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Museum	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			Tersusunnya kebijakan tentang pengelolaan museum	1 Peraturan Gubernur ttg pengelolaan museum	Dukungan 0,7 % terhadap pengembangan museum	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.24.002	Revitalisasi Museum Sonobudoyo	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			1. Rehab Museum Sonobudoyo unit 1 (auditorium lantai 2 dan area Pendopo timur) 2. Penyusunan storyline bangunan baru dan lama 3. Penghapusan bangunan cagar budaya (ruang studi koleksi) 4. Revitalisasi jaringan listrik MSB Unit 1 5. Pemeliharaan Sistem Jaringan Informasi Database dan Keamanan "	1. Terehabnya auditorium lantai 2 dan area pendopo timur seluas 660 m2 2. 1 dokumen storyline untuk display koleksi 3. ruang studi koleksi seluas 240 m2 4. Tertatanya jaringan listrik di area MSB 1 5. Terpeliharanya sistem jaringan informasi database di a	Dukungan 47,4 % terhadap pengembangan museum	100 %	Rp. 7.200.000.000,00	Rp. 7.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							a. Terselenggaranya Pagelaran Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo	275 pementasan wang durasi singkat untuk meningkatkan apresiasi						
							b. Tersusunnya Bahan Promosi Museum Sonobudoyo	2 jenis bahan promosi untuk mengenalkan museum sonobudoyo						
							c. Terselenggaranya Pameran Temporer Museum Sonobudoyo	1 kali pameran temporer museum sonobudoyo						
							d. terselenggaranya Pameran Lokal Museum Sonobudoyo	4 kali pameran lokal museum sonobudoyo						
							e. Partisipasi dalam Pameran Nasional Museum	3 pameran yang dilaksanakan di 3 provinsi						
							f. Terselenggaranya Gelar Wisata Museum Sonobudoyo	2 event untuk lebih mengenalkan MSB ke masyarakat						
							g. tersedianya arca dan prasasti di eks gedung koni	3 arca dan 1 prasasti (arca dhuwara pala)						
							h. Alih aksara jawa ke latin dan alih bahasa jawa ke B. Indonesia dari koleksi naskah Museum Sonobudoyo	3000 halaman jadi alih aksara dan alih bahasa						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							i. Inventarisasi dan dokumentasi koleksi Museum Sonobudoyo yang memenuhi standard ICOM	7000 koleksi dari 63.000 koleksi museum sonobudoyo yang memenuhi standard ICOM							
							j. Tersedianya 2 Replika Koleksi Masterpiece	1.1 set koleksi perhiasan 2. 1 patung kayu penari bedaya							
							k. Jumlah Koleksi yang diselamatkan	Terselamatkannya koleksi Museum Sonobudoyo berupa: 50 arca, 100 ukir kayu, 50 textile, 60 wayang kulit dan 1 naskah kertas							
							l. Tersedianya alat dan sistem pengamanan	Pengamanan di Museum Sonobudoyo berupa: sensor, glass break, CCTV, alarm yang terkoneksi ke polisi							
3.03.1.17.01.00.24.003	Pembinaan Permuseuman	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah Museum yang telah dipersiapkan untuk diakreditasi	30 museum siap diakreditasi	Dukungan 52 % terhadap pengembangan museum	100 %	Rp. 7.900.000.000,00	Rp. 8.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							Dukungan Museum Swasta	40 museum yang terfasilitasi							
							Jumlah museum yang terakreditasi	10 museum lolos akreditasi							
							Jumlah pendamping Museum	tersedianya 40 edukator sebagai pendamping museum							
							Jumlah peserta Gerakan wajib Kunjung Museum	35.000 siswa mengikuti wajib kunjung museum							
							Jumlah Peserta yang dikirim Magang Konservator Koleksi Museum	3 orang mengikuti magang konservator koleksi museum							
							Terseleksinya 30 duta museum DIY	Terpilihnya juara 1, 2 dan 3 duta museum DIY							
							Terseleksinya peserta cerdas cermat permuseuman tingkat nasional dari DIY	1 tim yang mewakili di tingkat nasional dengan target 5 besar							
							Terselenggaranya Gebyar Museum Sejarah Pleret	400 peserta mengikuti Gebyar Museum Sejarah Pleret							
3.03.1.17.01.00.25	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA										Rp. 81.238.594.000,00	Rp. 82.800.000.000,00			
3.03.1.17.01.00.25.001	Pelindungan Cagar Budaya di DIY	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			1. 15 Cagar budaya dan warisan budaya yang diselamatkan 2. Pemeliharaan 8 Cagar Budaya (Kawasan Tugu Pal Putih & Panggung Krapyak, Jagang Vredeburg & Lokomotif Bima Kunting, Joglo Jagalan, Tegal Gendu, nDalem Gamelan, Situs Pleret) 3. Rehab Bangunan Caga	Dukungan 83,5 % terhadap pelestarian cagar budaya	20%		Rp. 67.838.594.000,00	Rp. 68.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD

Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
								Kota Yogyakarta 1. Terehabnya 2 bangunan cagar budaya (nDalem Notoprajan dan nDalem Notokusuman) 2. Fasilitasi kegiatan TACB selama 1 tahun Kabupaten Bantul: 1. Hasil Registrasi Nasional 2. Terpeliharanya bangunan cagar budaya							
								Kabupaten Kulon Progo: 1. Terlaksananya akuisisi 2 lahan di sekitar cagar budaya (Kliripan dan Jembatan Duwet) 2. Terpeliharanya cagar budaya Bulurejo, Girigondo, Kliripan dan Kiskendo 3. Hasil Registrasi Nasional sejumlah 1 dokumen 4. Fasilitasi kegiatan							
								Kabupaten Gunungkidul: 1. Penyusunan DED Candi Risan Semin sejumlah 1 dokumen 2. Terehabnya 3 cagar budaya Kabupaten Sleman: 1. Terehabnya 5 cagar budaya (kepanjen, SMP 1 Sleman, RS Pakem, Joglo Brayut dan Joglo Kelor)							
							jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang terlindungi	Kabupaten Bantul: 1. Hasil kajian karakter arsitektur 2. Terehabnya kawasan warisan budaya dan cagar budaya							
							jumlah kawasan cagar budaya yang terlindungi	kawasan cagar budaya yang diselamatkan dari kerusakan/kehancuran/kemusnahan: Kota Yogyakarta: 1. hasil kajian karakteristik bangunan di kawasan cagar budaya sejumlah 1 dokumen 2. tertatanya kawasan koridor Kraton-Parangtritis sesuai perencanaan sejumlah							
3.03.1.17.01.00.25.002	Pengkajian Cagar Budaya di DIY	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			1. Inventarisasi dan dokumentasi WBCB 2. Jumlah studi teknis WBCB 3. Dukungan pada TACB dan DP2WB	1. 1 Dokumen data wbcB 2. 1 Dokumen Laporan Hasil Penggalian CB dan WB	Dukungan 4,8 % terhadap pelestarian cagar budaya	100 %	Rp. 3.900.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.17.01.00.25.003	Nominasi City Of Philosophy	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Prosentase tahapan penetapan city of philosophy: penyampaian doziers ke UNESCO	80%Jogja sebagai City of Philosophy	Dukungan 1,8 % terhadap pelestarian cagar budaya	100%	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.17.01.00.25.004	Pengelolaan Sumbu Filosofi	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kawasan Sumbu Filosofi			Keamanan, Kebersihan, Ketertiban	sumbu filosofi (panggung krapyak-Tugu Pal Putih)	Dukungan 4,9 % terhadap pelestarian cagar budaya	100%	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.25.005	Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa			1. Pembentukan badan pengelola KCB	1. KCB Kotabaru	Dukungan 1,2 % terhadap pelestarian cagar budaya	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Penguatan badan pengelola KCB	2. KCB Kotagede						
3.03.1.17.01.00.25.006	Penyebarluasan Informasi Kawasan Cagar Budaya	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Jumlah KCB yang dipromosikan	6 KCB (Kotabaru, Kotagede, Imogiri, Kraton, Puro, Malioboro)	Dukungan 3,7 % terhadap pelestarian cagar budaya	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN BUDAYA										Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00		
3.03.1.17.01.00.26.001	Perencanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			Dokumen Perencanaan Urusan Kebudayaan	1 dokumen perencanaan urusan kebudayaan	Dukungan 56,5 % terhadap perencanaan dan pengendalian pelaksanaan keistimewaan budaya	100%	Rp. 650.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.26.002	Monitoring dan Evaluasi Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Dinas Kebudayaan			Dokumen monitoring dan evaluasi	1 dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Dujungan 43,5 terhadap perencanaan dan pengendalian pelaksanaan keistimewaan budaya	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.27	PROGRAM PENGUATAN PERAN KASULTANAN DAN KADIPATEN DALAM MENJAGA BUDAYA YOGYAKARTA										Rp. 53.500.000.000,00	Rp. 54.700.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.1.17.01.00.27.001	Penguatan Lembaga Kasultanan dan Kadipaten	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kraton Pakualaman			Hibah kraton dan puro	Fasilitasi kraton dan Puro selama 1 tahun	Dukungan 91,6 % untuk penguatan peran Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga budaya Yogyakarta	100%	Rp. 49.000.000.000,00	Rp. 50.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.27.002	Gelar Seni Klasik Catur Sagatra	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kraton dan Puro Pakualaman			Terselenggaranya Gelar Karya Seni Klasik Catur Sagatra	4 karya seni klasik (catur Sagatra)	Dukungan 1,9 % untuk penguatan peran Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga budaya Yogyakarta	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
3.03.1.17.01.00.27.003	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Kuno Kasultanan dan Kadipaten	Sosial dan Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	DIY			Cakupan arsip Kraton dan Puro Pakualaman Alih Tulisan dari huruf Jawa ke Latin	2500 lembar arsip yang dialih tuliskan dari huruf jawa ke latin	Dukungan 6,5% untuk penguatan peran Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga budaya Yogyakarta	100%	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 3.600.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							Cakupan arsip yang dialihkan Bahasa Jawa ke Indonesia dan dialih bahasa Belanda ke Indonesia	2500 lembar dan 500 lembar arsip yang dialih bahasakan						
							Cakupan data Alih Media dari tekstual ke Digital arsip Kraton dan Puro Pakualaman	40.500 data yang digitalisasi						
							Cakupan dokumen Arsip Kraton dan Puro Pakualaman yang dirawat dengan Penghilangan Asam dan Laminasi	Penghilangan Asam : 5000 lembar, Laminasi Arsip : 5.000 lembar yang dirawat sesuai standard						
							Cakupan Fumigasi Ruang Arsip dan Perpustakaan di Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	1169 m3 ruang arsip dan perpustakaan yang difumigasi						
							Cakupan Termitte Kontrol Ruang Arsip dan Perpustakaan di Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	301 m2 ruang arsip dan perpustakaan yang terawat						
							Dokumen sejarah lisan	5 Dokumen sejarah lisan						
							Jumlah Bahan Pustaka di Perpustakaan Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman yang dirawat	50.000 eksemplar bahan pustaka yang dirawat sesuai standard						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD

Jumlah Pagu : Rp. 508.801.186.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
													(6)	(7)		
							Terolahnya Arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	2000 berkas (80 boks/16 ml) arsip yang diolah sesuai strandard								
							tersusunya data Penelusuran dan akuisisi arsip kesejarahan/ kebudayaan terkait Yogyakarta di luar negeri (Inggris dan Belanda) serta di dalam negeri, arsip seni, budaya, Sastra.	Data/dokumen sejarah/budaya tentang Yogyakarta di Luar Negeri dan Dalam Negeri								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 15.945.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.02	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH (KEISTIMEWAAN)													
3.02.1.20.03.00	Sekretariat Daerah													
3.02.1.20.03.00.15	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH										Rp. 4.760.000.000,00	Rp. 5.400.000.000,00		
3.02.1.20.03.00.15.001	Implementasi Budaya Pemerintahan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi			Action Plan Implementasi Budaya Pemerintahan	110 rencana aksi	Dukungan 25,76% terhadap kelembagaan pemerintah daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	Rp. 1.225.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	1 dokumen laporan monitoring dan evaluasi terhadap 110 SKPD dan UPT						
							Pemahaman nilai-nilai Budaya Pemerintah	500 orang perwakilan OPD memahami nilai-nilai budaya pemerintahan						
							Pemenang Lomba Budaya Pemerintahan SATRIYA	6 SKPD sebagai agen perubahan berprestasi di lingkup Pemda DIY						
							Peraturan Bupati Bantul tentang Budaya Pemerintahan	1 Perbup Budaya Pemerintahan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD

Jumlah Pagu : Rp. 15.945.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
													(6)	(7)		
							Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Budaya Pemerintahan	1 Perbup Budaya Pemerintahan								
							Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Budaya Pemerintahan.	1 Perbup Budaya Pemerintahan								
							Peraturan Bupati Sleman tentang Budaya Pemerintahan.	1 Perbup Budaya Pemerintahan								
							Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Budaya Pemerintahan.	1 Perwal Budaya Pemerintahan								
							Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan di Kabupaten Bantul	130 peserta sosialisasi Perbup								
							Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul	130 peserta sosialisasi Perbup								
							Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo	130 peserta sosialisasi Perbup								
							Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan di Kabupaten Sleman	130 peserta sosialisasi Perbup								
							Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan di Kota Yogyakarta	130 peserta sosialisasi Perwal								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 15.945.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Tersedianya Pin SATRIYA	7.000 buah PIN SATRIYA terdistribusi pada ASN di SMA/SMK se DIY						
3.02.1.20.03.00.15.002	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	5 Kab/Kota			NA dan Raperda Kapanewon Kota Yogyakarta	1 NA & 1 Raperda	Dukungan 18,91% terhadap kelembagaan pemerintah daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							NA, Raperda Kapanewon, Raperda Kalurahan Kabupaten Bantul	1 NA dan 2 Raperda						
							NA, Raperda Kapanewon, Raperda Kalurahan Kabupaten Gunungkidul	1 NA dan 2 Raperda						
							NA, Raperda Kapanewon, Raperda Kalurahan Kabupaten Kulon Progo	1 NA dan 2 Raperda						
							NA, Raperda Kapanewon, Raperda Kalurahan Kabupaten Sleman	1 NA dan 2 Raperda						
							Raperbup Tugas Fungsi Kapanewon dan Raperbup Tugas Fungsi Kalurahan Kabupaten Gunungkidul	2 Raperbup						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD

Jumlah Pagu : Rp. 15.945.000.000,00

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Raperbup Tugas Fungsi Kapanewon dan Raperbup Tugas Fungsi Kalurahan Kabupaten Bantul	2 Raperbup						
							Raperbup Tugas Fungsi Kapanewon dan Raperbup Tugas Fungsi Kalurahan Kabupaten Kulon Progo	2 Raperbup						
							Raperbup Tugas Fungsi Kapanewon dan Raperbup Tugas Fungsi Kalurahan Kabupaten Sleman	2 Raperbup						
							Raperwal Tugas Fungsi Kapanewon Kota Yogyakarta	1 Raperwal						
3.02.1.20.03.00.15.003	Perumusan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Kelembagaan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi			Forum Komunikasi Asosiasi Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa	1 Laporan hasil rekomendasi Forum Komunikasi Asosiasi daerah otsus dan istimewa	Dukungan 46,95% terhadap kelembagaan pemerintah daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	Rp. 2.235.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Kajian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	1 Kajian Keistimewaan Urusan Kelembagaan						
							Rekomendasi Kebijakan Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan.	1 Laporan rekomendasi kebijakan urusan keistimewaan bidang kelembagaan						
							Review Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10 Rapergub Tusi Perangkat Daerah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 15.945.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Review Tugas dan Fungsi UPT	8 Rapergub Tusi UPT						
							Usulan kegiatan urusan kelembagaan tahun 2019	1 dokumen usulan kegiatan urusan kelembagaan dari seluruh SKPD pengampu urusan kelembagaan tahun 2019						
3.02.1.20.03.00.15.004	Pola Hubungan Kerja Antara Pemda DIY, Kapanewon dan Kalurahan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY			Rapergub Pola Hubungan Kerja Antara Pemda DIY, Kapanewon dan Kalurahan	1 Rapergub Pola Hubungan Kerja	Dukungan 2,75% terhadap kelembagaan pemerintahan daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.1.20.03.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN										Rp. 860.000.000,00	Rp. 680.000.000,00		
3.02.1.20.03.00.16.001	Pelatihan Abdi Dalem Kasultanan dan Kadipaten	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kraton Pakualaman			1. Bimtek manajemen perencanaan untuk abdi dalem Kasultanan dan Kadipaten	30 orang x 1 kali	Dukungan 25,75% terhadap kelembagaan pemerintahan daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2. Bimtek pengelolaan keuangan untuk abdi dalem Kasultanan dan Kadipaten	30 orang x 1 kali						
							3. Bimtek pengelolaan aset untuk abdi dalem Kasultanan dan Kadipaten	30 orang x 1 kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 15.945.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.1.20.03.00.16.002	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata			1. Tersusunnya pedoman penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	satu dokumen materi pedoman Diklat Keistimewaan	Dukungan 25,75% terhadap kelembagaan pemerintahan daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	Rp. 660.000.000,00	Rp. 680.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2. Jumlah peserta Diklat Keistimewaan	150 ASN yang memahami tentang keistimewaan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD

Jumlah Pagu : Rp. 15.945.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah PPKD RS Jiwa Grhasia										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 15.945.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja										
3.02.1.20.03.00.17	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN										Rp. 1.650.000.000,00	Rp. 1.680.000.000,00		
3.02.1.20.03.00.17.001	Penyusunan Kebijakan Urusan Kebudayaan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat Daerah			1 Dokumen kebijakan strategis urusan kebudayaan tahun 2020	Tersedianya rumusan kebijakan urusan kebudayaan 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	100%	Rp. 610.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							1 Laporan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan kebudayaan tahun 2018							
3.02.1.20.03.00.17.002	Penyusunan Kebijakan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat Daerah			2 Dokumen kebijakan strategis urusan pertanahan dan tata ruang tahun 2020	Tersedianya rumusan kebijakan urusan pertanahan dan tata ruang 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	100%	Rp. 515.000.000,00	Rp. 530.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2 Laporan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan pertanahan dan tata ruang tahun 2018							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 15.945.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.1.20.03.00.17.003	Penyusunan Kebijakan Urusan Kelembagaan dan Tata cara	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat Daerah			1 dokumen kajian pemberdayaan masyarakat desa	Tersedianya rumusan kebijakan urusan kelembagaan 100%	Dukungan 100% terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	100%	Rp. 525.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							1 Dokumen kebijakan strategis urusan kelembagaan tahun 2020							
							1 Laporan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan kelembagaan tahun 2018							
3.02.1.20.03.00.18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN										Rp. 3.100.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00		
3.02.1.20.03.00.18.001	Pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat Daerah			Alat-alat studio 2 jenis	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 100%	Dukungan 100% terhadap kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan dan pelengkapan gedung kantor)	100%	Rp. 3.100.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas roda dua 8 unit							
							Kendaraan dinas roda empat 8 unit							
							Komputer 5 jenis							
							Mebeler 2 jenis							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 15.945.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penghias ruangan rumah tangga 1 jenis							
							Peralatan dapur 2 jenis							
							Peralatan gedung kantor 2 jenis							
							Perlengkapan gedung kantor 4 jenis							
3.02.1.20.03.00.19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN										Rp. 3.475.000.000,00	Rp. 3.550.000.000,00		
3.02.1.20.03.00.19.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danurejan			Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2020	3 Dokumen Rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dukungan terhadap perencanaan dan pengendalian program keistimewaan	100%	Rp. 1.225.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.1.20.03.00.19.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danurejan			Hasil monev pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2018	3 Dokumen	Dukungan terhadap perencanaan dan pengendalian keistimewaan	100%	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 2.300.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.1.20.03.00.20	PROGRAM PENGUATAN PARAMPARA PRAJA										Rp. 2.100.000.000,00	Rp. 0,00		
3.02.1.20.03.00.20.001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat Parampara Praja			Dokumen Pertimbangan kepada Gubernur	1 Dokumen	Dukungan terhadap Capaian Peningkatan Kinerja Parampara Praja	100%	Rp. 2.100.000.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 44.910.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.04	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)													
3.04.1.05.01.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
3.04.1.05.01.00.15	PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN										Rp. 44.910.000.000,00	Rp. 0,00		
3.04.1.05.01.00.15.001	Sosialisasi Tata Cara Pengurusan Izin Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Penyebarluasan Informasi tentang aturan-aturan	438 Desa/ Kelurahan se DIY	Penyebarluasan Informasi tentang aturan-aturan	438 Desa/ Kelurahan se DIY	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.04.1.05.01.00.15.002	Penanganan Pengaduan Permasalahan Pertanahan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Jumlah pengaduan permasalahan pertanahan yang tertangani	50 pengaduan	Jumlah pengaduan permasalahan pertanahan yang tertangani	50 pengaduan	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.04.1.05.01.00.15.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pertanahan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pertanahan	1 dokumen laporan yang meliputi: - capaian kinerja fisik dan keuangan per triwulan - Inventarisasi Permasalahan Tanah desa. - Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Desa.	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pertanahan	1 dokumen laporan yang meliputi: - capaian kinerja fisik dan keuangan per triwulan - Inventarisasi Permasalahan Tanah desa. - Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Desa.	Rp. 1.350.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 44.910.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.04.1.05.01.00.15.004	Inventarisasi, Identifikasi dan Kepastian Hukum Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			- Jumlah bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang terinventarisasi dan teridentifikasi - Terdaftarkannya tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional	- 500 bidang data tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang terinventarisasi dan teridentifikasi - patok batas bidang tanah di 73 Desa. - tanda identitas kepemilikan tanah di 73 desa. - 1 dokumen berisi data hasil inventarisasi dan identifikasi tanah. - K	- Jumlah bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang terinventarisasi dan teridentifikasi - Terdaftarkannya tanah kasultanan dan tanah kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional	- 500 bidang data tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang terinventarisasi dan teridentifikasi - patok batas bidang tanah di 73 Desa. - tanda identitas kepemilikan tanah di 73 desa. - 1 dokumen berisi data hasil inventarisasi dan identifikasi tanah. - K	Rp. 32.100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.04.1.05.01.00.15.005	Delineasi Peta Desa	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			-Tersedianya Peta Batas Administrasi wilayah Desa se Kabupaten Gunungkidul - peta batas bidang tanah	Tersedianya Peta desa dan bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul	-Tersedianya Peta Batas Administrasi wilayah Desa se Kabupaten Gunungkidul - peta batas bidang tanah	Tersedianya Peta desa dan bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.04.1.05.01.00.15.006	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			- Penambahan basis data pertanahan terbaru dalam sistem informasi pertanahan - Tersusunnya basis data spasial pertanahan terbaru Kabupaten Kulon Progo	- Data base pertanahan sejumlah 1000 bidang - Data spasial pertanahan kab. Kulonprogo	- Penambahan basis data pertanahan terbaru dalam sistem informasi pertanahan - Tersusunnya basis data spasial pertanahan terbaru Kabupaten Kulon Progo	- Data base pertanahan sejumlah 1000 bidang - Data spasial pertanahan kab. Kulonprogo	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.04.1.05.01.00.15.007	Perawatan Dokumen Pertanahan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara.	Dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara di 73 Desa	Dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara.	Dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara di 73 Desa	Rp. 750.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 44.910.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.04.1.05.01.00.15.008	Pendokumentasian Sejarah Pertanahan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Dokumentasi sejarah pertanahan di DIY	1 dokumen bahan diseminasi sejarah pertanahan di DIY	Dokumentasi sejarah pertanahan di DIY	1 dokumen bahan diseminasi sejarah pertanahan di DIY	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.04.1.05.01.00.15.009	Penyelenggaraan Proses Penyusunan Perdes Pemanfaatan Tanah Desa	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Tersusunnya 392 Perdes Pemanfaatan Tanah Desa	Terlaksananya tertib pemanfaatan Tanah Desa	Tersusunnya 392 Perdes Pemanfaatan Tanah Desa	Terlaksananya tertib pemanfaatan Tanah Desa	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.04.1.05.01.00.15.010	Penanganan Permasalahan Tanah Desa	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Penyelesaian permasalahan tanah desa untuk memberikan kepastian hak atas tanah desa	Kepastian hak atas tanah desa di: - 6 desa di Kulon Progo - 8 desa di Sleman - 8 desa di Bantul - 8 desa di Gunungkidul	Penyelesaian permasalahan tanah desa untuk memberikan kepastian hak atas tanah desa	Kepastian hak atas tanah desa di: - 6 desa di Kulon Progo - 8 desa di Sleman - 8 desa di Bantul - 8 desa di Gunungkidul	Rp. 1.010.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.04.1.05.01.00.15.011	Penataan Administrasi Izin Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Jumlah rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten	1. 240 pertimbangan teknis tentang pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten: 2. 80 Izin Pemanfaatan Tanah Desa. 3. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kabupaten/ Kota: - 40 rekomendasi Kota Yogyakarta - 70 rekomendasi Kab Bantul (50 rekomendasi	Jumlah rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten	1. 240 pertimbangan teknis tentang pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten: 2. 80 Izin Pemanfaatan Tanah Desa. 3. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kabupaten/ Kota: - 40 rekomendasi Kota Yogyakarta - 70 rekomendasi Kab Bantul (50 rekomendasi	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.05	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)													
3.05.1.05.01.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
3.05.1.05.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG										Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 0,00		
3.05.1.05.01.00.15.001	Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Tersedianya 2 dokumen Raperda RTR KSP Strategis Ekonomi : 1. Kawasan Perkotaan Yogyakarta 2. Koridor Tempel - Parangtritis	Tersedianya 2 bahan untuk penetapan perda RTR KSP	- Tersedianya 2 bahan untuk penetapan perda RTR KSP - Tersedianya bahan untuk penyusunan Raperda RTR Kawasan Keistimewaan : 1. Kiskendo - Sermo - Wates, 1 dokumen 2. Koridor Selokan Mataram, 1 dokumen - Tersedianya bahan untuk acuan pengembangan di 2 k	36,67%	Rp. 2.200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Tersusunnya 2 dokumen Masterplan TOD : 1. Pathukan 2. Kalasan	Tersedianya bahan untuk acuan pengembangan di 2 kawasan simpul transportasi						
							Tersusunnya Materi Teknis dan Naskah Akademis Peraturan Zonasi Kawasan Keistimewaan : 1. Kiskendo - Sermo - Wates 2. Koridor Selokan Mataram	Tersedianya bahan untuk penyusunan Raperda RTR Kawasan Keistimewaan : 1. Kiskendo - Sermo - Wates, 1 dokumen 2. Koridor Selokan Mataram, 1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.05.01.00.15.002	Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Terbitnya rekomendasi 3 Raperda Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen untuk penetapan 3 Perda Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Terbitnya rekomendasi 3 Raperda Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen untuk penetapan 3 Perda Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.15.003	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Tersosialisasikannya dokumen tata ruang berupa : 1. Perdais Tata Ruang Keistimewaan 2. RTRW DIY	Disampaikannya dokumen Perdais Tata Ruang Keistimewaan dan RTRW DIY kepada SKPD di Pemda DIY; SKPD di Kab/Kota; Kecamatan dan LSM terkait Tata Ruang	Tersosialisasikannya dokumen tata ruang berupa : 1. Perdais Tata Ruang Keistimewaan 2. RTRW DIY	Disampaikannya dokumen Perdais Tata Ruang Keistimewaan dan RTRW DIY kepada SKPD di Pemda DIY; SKPD di Kab/Kota; Kecamatan dan LSM terkait Tata Ruang	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.15.004	Perencanaan Tata Ruang Kawasan Imogiri	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa Sewon, Kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan			Tersedianya : 1. RTBL Kawasan Giriloyo, 1 dokumen 2. RTBL Kawasan Banyusumurup, 1 dokumen	Tersedianya 1 acuan untuk penataan kawasan Imogiri	Tersedianya : 1. RTBL Kawasan Giriloyo, 1 dokumen 2. RTBL Kawasan Banyusumurup, 1 dokumen	Tersedianya 1 acuan untuk penataan kawasan Imogiri	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.15.005	Perencanaan Tata Ruang Kawasan Suroloyo Sendangsono	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan			Tersedianya 1 dokumen Materi Teknis, Naskah Akademis dan Raperda RDTR Kecamatan Kalibawang	Tersedianya 1 bahan untuk penetapan Perda RDTR Kecamatan Kalibawang	Tersedianya 1 dokumen Materi Teknis, Naskah Akademis dan Raperda RDTR Kecamatan Kalibawang	Tersedianya 1 bahan untuk penetapan Perda RDTR Kecamatan Kalibawang	Rp. 700.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Tersedianya : 1. RTBL Kebun Teh Nginggo, 1 dokumen 2. RTBL Kebun Teh Tritis, 1 dokumen	Tersedianya 1 acuan untuk penataan kawasan Suroloyo	Tersedianya : 1. RTBL Kebun Teh Nginggo, 1 dokumen 2. RTBL Kebun Teh Tritis, 1 dokumen	Tersedianya 1 acuan untuk penataan kawasan Suroloyo				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.05.01.00.15.006	Perencanaan Tata Ruang Kawasan Merapi	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Wilayah Gunung Merapi			Tersedianya 1 dokumen Masterplan Kawasan Lereng Merapi	Tersedianya 1 acuan penataan Kawasan Lereng Merapi	Tersedianya 1 dokumen Masterplan Kawasan Lereng Merapi	Tersedianya 1 acuan penataan Kawasan Lereng Merapi	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.15.007	Perencanaan Tata Ruang Kawasan Geo-Park	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Ekowisata Karst Kabupaten Gunungkidul Koridor Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop dan Sadeng.			Tersusunnya 1 dokumen Naskah Akademik RDTR Kecamatan Patuk	Tersusunnya 1 dokumen Naskah Akademik RDTR Kecamatan Patuk	Tersusunnya 1 dokumen Naskah Akademik RDTR Kecamatan Patuk	Tersusunnya 1 dokumen Naskah Akademik RDTR Kecamatan Patuk	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.15.008	Perencanaan Tata Ruang Kawasan Sokoliman	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidu			Tersedianya 1 dokumen Masterplan Komplek Situs Sokoliman	Tersedianya 1 acuan untuk penataan Komplek Situs Sokoliman	Tersedianya 1 dokumen Masterplan Komplek Situs Sokoliman	Tersedianya 1 acuan untuk penataan Komplek Situs Sokoliman	Rp. 600.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Tersedianya 1 dokumen Naskah Akademik RTR Kawasan Budaya Sokoliman	Tersedianya 1 bahan untuk penyusunan Raperda RTR Kawasan Budaya Sokoliman	Tersedianya 1 dokumen Naskah Akademik RTR Kawasan Budaya Sokoliman	Tersedianya 1 bahan untuk penyusunan Raperda RTR Kawasan Budaya Sokoliman				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.05.01.00.15.009	Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidu Pantai Selatan dan gelombang laut Kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Pantai Wedi Ombo Kabupaten Gunungkidul			Tersusunnya 1 dokumen Masterplan Kawasan Girisubo	Tersedianya 1 acuan penataan Kawasan Girisubo	Tersusunnya 1 dokumen Masterplan Kawasan Girisubo	Tersedianya 1 acuan penataan Kawasan Girisubo	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.15.010	Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pathok Negoro	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa			'1. Tersusunnya 1 dokumen Master Plan Penanda Keistimewaan Masjid Pathok Negoro 2. Tersusunnya 1 dokumen DED Penataan Masjid Pathok Negoro di Ploso Kuning	Tersedianya 1 acuan untuk penataan kawasan penanda keistimewaan masjid pathok negoro	'1. Tersusunnya 1 dokumen Master Plan Penanda Keistimewaan Masjid Pathok Negoro 2. Tersusunnya 1 dokumen DED Penataan Masjid Pathok Negoro di Ploso Kuning	Tersedianya 1 acuan untuk penataan kawasan penanda keistimewaan masjid pathok negoro	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG										Rp. 1.181.084.512.000,00	Rp. 0,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.05.01.00.16.001	Pemanfaatan Ruang Kawasan Pantai Selatan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngerenehan dan pantai Gesing Kabupaten Gunungkidu Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot Kabupaten Kulon Progo			1) Terbebaskannya lahan untuk JJLS pada ruas : a. Planjan - Tepus seluas 723.484 M2 b. Tepus - Jerukwudel seluas 890.350 M2 2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk JJLS pada ruas: a. Girijati - Legundi, 1 dokumen b. Legundi - Planjan, 1 dokumen	Tersedianya lahan untuk pembangunan JJLS 4 lajur a. Planjan - Tepus sepanjang 13,05 km b. Tepus - Jerukwudel seluas 890.350 M2 2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk JJLS pada ruas: a. Girijati - Legundi, 1 dokumen b. Legundi - Planjan, 1 dokumen	1) Terbebaskannya lahan untuk JJLS pada ruas : a. Planjan - Tepus seluas 723.484 M2 b. Tepus - Jerukwudel seluas 890.350 M2 2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk JJLS pada ruas: a. Girijati - Legundi, 1 dokumen b. Legundi - Planjan, 1 dokumen	Tersedianya lahan untuk pembangunan JJLS 4 lajur a. Planjan - Tepus sepanjang 13,05 km b. Tepus - Jerukwudel seluas 890.350 M2 2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk JJLS pada ruas: a. Girijati - Legundi, 1 dokumen b. Legundi - Planjan, 1 dokumen	Rp. 495.604.820.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Pengadaan Tanah Untuk Tempat Khusus Parkir di Eks Stiekers Jalan Parangtritis seluas 60.000 m2	Tersedianya lahan parkir untuk Satuan Ruang Parkir	Pengadaan Tanah Untuk Tempat Khusus Parkir di Eks Stiekers Jalan Parangtritis seluas 60.000 m2	Tersedianya lahan parkir untuk Satuan Ruang Parkir				
							Tersedianya sarana pendukung Destinasi Wisata: - tempat parkir 12000 m2, - jalan menuju tempat wisata 3,5 km, dan - toilet di tempat wisata 3 unit	Tertatanya kawasan Laguna Depok bagian Barat (Samas, Pengklik dan Baros) sebesar 100%	Tersedianya sarana pendukung Destinasi Wisata: - tempat parkir 12000 m2, - jalan menuju tempat wisata 3,5 km, dan - toilet di tempat wisata 3 unit	Tertatanya kawasan Laguna Depok bagian Barat (Samas, Pengklik dan Baros) sebesar 100%				
							Tersusunnya dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis Pantai Selatan	Tersedianya 1 dokumen Kesesuaian Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis	Tersusunnya dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis Pantai Selatan	Tersedianya 1 dokumen Kesesuaian Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.05.01.00.16.002	Pemanfaatan Ruang Kawasan Imogiri	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa Sewon, kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan			Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta - Barongan - Imogiri sepanjang 3,65 km	Ruas jalan Yogyakarta - Barongan - Imogiri dalam kondisi baik (100%)	Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta - Barongan - Imogiri sepanjang 3,65 km	Ruas jalan Yogyakarta - Barongan - Imogiri dalam kondisi baik (100%)	Rp. 18.250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.16.003	Pemanfaatan Ruang Kawasan Geopark	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Ekowisata Karst Kabupaten Gunungkidul Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa			1 Dokumen Grand Desain Konektivitas Kawasan Prambanan-Nglanggeran-Sambipitu	Tersedianya 1 acuan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan Prambanan-Nglanggeran-Sambipitu	1 Dokumen Grand Desain Konektivitas Kawasan Prambanan-Nglanggeran-Sambipitu	Tersedianya 1 acuan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan Prambanan-Nglanggeran-Sambipitu	Rp. 5.930.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Terbebaskannya lahan seluas 10.000 m2 untuk areal parkir di Geo Park GAP Nglanggeran	Tersedianya 1 lokasi lahan untuk penyediaan tempat khusus parkir GAP Nglanggeran	Terbebaskannya lahan seluas 10.000 m2 untuk areal parkir di Geo Park GAP Nglanggeran	Tersedianya 1 lokasi lahan untuk penyediaan tempat khusus parkir GAP Nglanggeran				
							Tersedianya sarana pendukung destinasi wisata Nglanggeran: '- Landsekap Amphitheater 4000 m2, - Arena wisata kuliner 60 m2, - Toilet 2 unit	'Tertata dan terbangunnya sarana pendukung Kawasan Nglanggeran sebesar 100%	Tersedianya sarana pendukung destinasi wisata Nglanggeran: '- Landsekap Amphitheater 4000 m2, - Arena wisata kuliner 60 m2, - Toilet 2 unit	'Tertata dan terbangunnya sarana pendukung Kawasan Nglanggeran sebesar 100%				
3.05.1.05.01.00.16.004	Pemanfaatan Ruang Kawasan Sumbu Filosofis	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-			Tersedianya 4 unit halte trans Jogja	pendukung layanan angkutan umum di 1 kawasan keistimewaan (sumbu filosofis)	Tersedianya 4 unit halte trans Jogja	pendukung layanan angkutan umum di 1 kawasan keistimewaan (sumbu filosofis)	Rp. 504.359.675.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD

Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				candi diKa Perkotaan Yogyakarta			1. Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara baik selama 12 bulan 2. Operasional dan pemeliharaan sarpras Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali selama 12 bulan 3. 1 dokumen Kesepakatan Bersama penataan PKL Sisi Barat Kawasan Malioboro antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PKL 4. 1 dokumen kesepakatan bersama penataan kendaraan tidak bermotor di kawasan Malioboro 5. 1 dokumen Kesepakatan Bersama Penataan Sisi Barat TKP Abu Bakar Ali antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PKL	1. Terpeliharanya sarana dan prasarana pada kawasan malioboro sepanjang 1,5 km 2. terpeliharanya TKP Abu Bakar Ali 1 lokasi 3. Rekayasa sosial kepada PKL di 1 Sisi Kawasan Malioboro (sisi Barat) 4. Rekayasa sosial kepada operator KTB di 1 sisi Kawasan Mal	1. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara baik selama 12 bulan 2. Operasional dan pemeliharaan sarpras Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali selama 12 bulan 3. 1 dokumen Kesepakatan Bersama penataan PKL	1. Terpeliharanya sarana dan prasarana pada kawasan malioboro sepanjang 1,5 km 2. terpeliharanya TKP Abu Bakar Ali 1 lokasi 3. Rekayasa sosial kepada PKL di 1 Sisi Kawasan Malioboro (sisi Barat) 4. Rekayasa sosial kepada operator KTB di 1 sisi Kawasan Mal				
							Ducting di ruas jalan Margo Utomo (segmen Tugu Pal Putih - Stasiun Tugu) sepanjang 1500 m	Tersedianya 1 sarana utilitas di bawah tanah di ruas jalan Margo Utomo (segmen Tugu Pal Putih - Stasiun Tugu)	Ducting di ruas jalan Margo Utomo (segmen Tugu Pal Putih - Stasiun Tugu) sepanjang 1500 m	Tersedianya 1 sarana utilitas di bawah tanah di ruas jalan Margo Utomo (segmen Tugu Pal Putih - Stasiun Tugu)				
							Terbangunnya 2 Tempat Khusus Parkir di : 1. sebelah selatan Ramai Mall 2. Pasar Sore	Tersedianya : 1. 72 satuan ruang parkir di sebelah selatan Ramai Mall 2. 272 satuan ruang parkir di Pasar Sore	Terbangunnya 2 Tempat Khusus Parkir di : 1. sebelah selatan Ramai Mall 2. Pasar Sore	Tersedianya : 1. 72 satuan ruang parkir di sebelah selatan Ramai Mall 2. 272 satuan ruang parkir di Pasar Sore				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Terbanggunya eks Bioskop Indra seluas 10.000 m2	Tertatanya PKL di 1 Kawasan Eks Pasar Sore	Terbanggunya eks Bioskop Indra seluas 10.000 m2	Tertatanya PKL di 1 Kawasan Eks Pasar Sore				
							Terbanggunya struktur dan basement Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Strategis seluas 42.000 m2	Terselesaikannya Pembangunan Tahap I Gedung Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Strategis sebanyak 7 lantai	Terbanggunya struktur dan basement Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Strategis seluas 42.000 m2	Terselesaikannya Pembangunan Tahap I Gedung Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Strategis sebanyak 7 lantai				
							Terbebaskannya tanah di Eks UPN Ketandan untuk Tempat Khusus Parkir seluas 4.280 m2	Tersedianya lahan parkir untuk potensi 1700 satuan ruang parkir di Ketandan	Terbebaskannya tanah di Eks UPN Ketandan untuk Tempat Khusus Parkir seluas 4.280 m2	Tersedianya lahan parkir untuk potensi 1700 satuan ruang parkir di Ketandan				
							Terlaksananya penataan sarana dan prasarana berupa : 1) re-manajemen sarana kelistrikan untuk 1 komplek Kepatihan 2) penyediaan tempat parkir, konblok, pergola 1000m2	Penataan Kompleks Kepatihan menghadap ke selatan selesai 100%	Terlaksananya penataan sarana dan prasarana berupa : 1) re-manajemen sarana kelistrikan untuk 1 komplek Kepatihan 2) penyediaan tempat parkir, konblok, pergola 1000m2	Penataan Kompleks Kepatihan menghadap ke selatan selesai 100%				
							Tersedianya : a. Becak baru : 70 unit b. Perbaikan andong : 100 unit	Moda Transportasi Tradisional yang melayani 1 Kawasan Keistimewaan Sumbu Filosofis	Tersedianya : a. Becak baru : 70 unit b. Perbaikan andong : 100 unit	Moda Transportasi Tradisional yang melayani 1 Kawasan Keistimewaan Sumbu Filosofis				
							Tersedianya sarana dan prasarana PKL Malioboro di sisi timur dan barat sepanjang 1,5 km pada kawasan malioboro sebanyak 1.030 pkl	Tertatanya PKL di sisi timur dan barat sepanjang 1,5 km pada kawasan malioboro	Tersedianya sarana dan prasarana PKL Malioboro di sisi timur dan barat sepanjang 1,5 km pada kawasan malioboro sebanyak 1.030 pkl	Tertatanya PKL di sisi timur dan barat sepanjang 1,5 km pada kawasan malioboro				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Semua SKPD												Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Tersedianya sarana pedestrian di sumbu filosofis seluas 19.753 m2	Tersedianya sarana pedestrian pada kawasan sumbu filosofis sepanjang 2,2 km : 1) Penataan pedestrian pada ruas jalan Margo Utomo dan Pangurakan sisi timur dan barat 2) Penataan pedestrian sisi barat pada ruas jalan Malioboro dan Margo Mulyo	Tersedianya sarana pedestrian di sumbu filosofis seluas 19.753 m2	Tersedianya sarana pedestrian pada kawasan sumbu filosofis sepanjang 2,2 km : 1) Penataan pedestrian pada ruas jalan Margo Utomo dan Pangurakan sisi timur dan barat 2) Penataan pedestrian sisi barat pada ruas jalan Malioboro dan Margo Mulyo				
3.05.1.05.01.00.16.005	Pemanfaatan Ruang Kawasan Prambanan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa			Terbangunnya Penanda Keistimewaan pada Akses Masuk DIY di Prambanan	Tersedianya penanda pada kawasan akses masuk DIY, 1 lokasi	Terbangunnya Penanda Keistimewaan pada Akses Masuk DIY di Prambanan	Tersedianya penanda pada kawasan akses masuk DIY, 1 lokasi	Rp. 2.600.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Tersusunnya dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis Prambanan	Tersedianya 1 dokumen Kesesuaian Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis	Tersusunnya dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis Prambanan	Tersedianya 1 dokumen Kesesuaian Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis				
3.05.1.05.01.00.16.006	Pemanfaatan Ruang Kawasan Suroloyo Sendangsono	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan			1. Tersedianya : - RPPJ - Cermin Tikungan, - LPJU , - Pagar Pengaman Jalan	Menurunnya angka kecelakaan sebesar 30% pada kawasan Suroloyo-Sendangsono	1. Tersedianya : - RPPJ - Cermin Tikungan, - LPJU , - Pagar Pengaman Jalan	Menurunnya angka kecelakaan sebesar 30% pada kawasan Suroloyo-Sendangsono	Rp. 9.026.400.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							2. Tersusunnya 1 dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Suroloyo - Sendangsono	Tersedianya 1 acuan dalam penyediaan sarpras lalu lintas kaawasan Suroloyo-Sendangsono	2. Tersusunnya 1 dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Suroloyo - Sendangsono	Tersedianya 1 acuan dalam penyediaan sarpras lalu lintas kaawasan Suroloyo-Sendangsono				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Terlaksananya Penataan di Kawasan Makro Tonogoro berupa : - Sirkulasi jalan, - Gapura, - Penunjuk arah, - Saluran drainase, - Lampu dan tiang listrik	Tertatanya Kawasan Tonogoro di Blok Makro 100%	Terlaksananya Penataan di Kawasan Makro Tonogoro berupa : - Sirkulasi jalan, - Gapura, - Penunjuk arah, - Saluran drainase, - Lampu dan tiang listrik	Tertatanya Kawasan Tonogoro di Blok Makro 100%				
							Terlaksananya penataan Kawasan Blok Embung Tonogoro / 1B berupa : Pendopo, Musholla, Gazebo, Toilet, Gapura, Lampu taman, Drainase, dan Penunjuk arah	Tertatanya Blok 1 B : Kawasan Embung Tonogoro	Terlaksananya penataan Kawasan Blok Embung Tonogoro / 1B berupa : Pendopo, Musholla, Gazebo, Toilet, Gapura, Lampu taman, Drainase, dan Penunjuk arah	Tertatanya Blok 1 B : Kawasan Embung Tonogoro				
							Terlaksananya penataan Kawasan Blok Perkebunan Durian Menoreh Kuning / 1A berupa : Jalan Produksi Agrowisata, Pedestrian, Pergola, Tempat sampah, Lampu, Tiang listrik, dan Penunjuk arah	Tertatanya Blok 1 A : Perkebunan Durian Menoreh Kuning 100%	Terlaksananya penataan Kawasan Blok Perkebunan Durian Menoreh Kuning / 1A berupa : Jalan Produksi Agrowisata, Pedestrian, Pergola, Tempat sampah, Lampu, Tiang listrik, dan Penunjuk arah	Tertatanya Blok 1 A : Perkebunan Durian Menoreh Kuning 100%				
3.05.1.05.01.00.16.007	Pemanfaatan Ruang Kawasan Goa Kiskendo-Sermo-Wates	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali Ruang	Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan			Tersedianya 1 dokumen kajian Pengembangan Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Perkotaan Wates	Tersedianya 1 acuan dalam penyediaan sarpras lalu lintas Perkotaan Wates	Tersedianya 1 dokumen kajian Pengembangan Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Perkotaan Wates	Tersedianya 1 acuan dalam penyediaan sarpras lalu lintas Perkotaan Wates	Rp. 213.617.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.16.008	Pemanfaatan Ruang Kawasan Imogiri	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali Ruang	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa			Tersedianya infrastruktur pendukung di zona penyangga Makam Raja-raja Imogiri berupa : Gapura, Landmark, RTH di eks Pasar Imogiri	Tertatanya zona penyangga Makam Raja-Raja Imogiri 100%	Tersedianya infrastruktur pendukung di zona penyangga Makam Raja-raja Imogiri berupa : Gapura, Landmark, RTH di eks Pasar Imogiri	Tertatanya zona penyangga Makam Raja-Raja Imogiri 100%	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD												Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.05.01.00.16.009	Pemanfaatan Ruang Kawasan Pleret	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Sewon, kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan			Tersedianya infrastruktur pendukung Kawasan Pleret berupa : Koridor antar situs, Lansekap taman titik nol, Gapura dan Miniatur Kerajaan	Tertatanya infrastruktur pendukung Kawasan Pleret 100%	Tersedianya infrastruktur pendukung Kawasan Pleret berupa : Koridor antar situs, Lansekap taman titik nol, Gapura dan Miniatur Kerajaan	Tertatanya infrastruktur pendukung Kawasan Pleret 100%	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.16.010	Pemanfaatan Ruang Kawasan Geo-Heritage	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Wilayah Gunung Merapi			1) Terbebaskannya lahan untuk Pembangunan Kawasan Lava Bantal seluas 5000 m2 2) Tersusunnya DED Kawasan Lava Bantal tahap II	1. Tersedianya lahan di 2 lokasi untuk Pembangunan Kawasan Lava Bantal seluas 5000 m2 2) Tersusunnya 1 acuan teknis Pembangunan Lava Bantal tahap 2	1) Terbebaskannya lahan untuk Pembangunan Kawasan Lava Bantal seluas 5000 m2 2) Tersusunnya DED Kawasan Lava Bantal tahap II	1. Tersedianya lahan di 2 lokasi untuk Pembangunan Kawasan Lava Bantal 2. Tersedianya 1 acuan teknis Pembangunan Lava Bantal tahap 2	Rp. 10.200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
3.05.1.05.01.00.16.011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Merapi	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Wilayah Gunung Merapi			1) Tersusunnya 1 dokumen DED Pasar Baru, Terminal dan Pusat Cinderamata di Kawasan Pakem 2) Terbebaskannya lahan pada ruas: - Blembem - Tanen sepanjang 1,5 km - Purworejo - Kaliurang sepanjang 2 km	Tersedianya 1 acuan teknis untuk pembangunan Pasar Baru, Terminal dan Pusat Cinderamata di Kawasan Pakem Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan pada 2 ruas	1) Tersusunnya 1 dokumen DED Pasar Baru, Terminal dan Pusat Cinderamata di Kawasan Pakem 2) Terbebaskannya lahan pada ruas: - Blembem - Tanen sepanjang 1,5 km - Purworejo - Kaliurang sepanjang 2 km	Tersedianya 1 acuan teknis untuk pembangunan Pasar Baru, Terminal dan Pusat Cinderamata di Kawasan Pakem Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan pada 2 ruas	Rp. 3.900.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Tersedianya:1 DED Kawasan Akses Masuk DIY di Tempel Tahap II	Terlaksananya 1 acuan penataan Kawasan Penanda Akses Masuk DIY di Tempel	Tersedianya:1 DED Kawasan Akses Masuk DIY di Tempel Tahap II	Terlaksananya 1 acuan penataan Kawasan Penanda Akses Masuk DIY di Tempel				
							Tersusunnya dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis Merapi	Tersedianya 1 dokumen Kesesuaian Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis	Tersusunnya dokumen Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis Merapi	Tersedianya 1 dokumen Kesesuaian Pelaksanaan Indikasi Program pada RTR Kawasan Strategis				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.1.05.01.00.16.012	Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Perkotaan Yogyakarta			Penataan Lalu Lintas di Kawasan Malioboro, Kotabaru, Pakualaman, Kraton, dan Kotagede	Penanganan ketertiban lalu lintas di 5 Kawasan Keistimewaan	Penataan Lalu Lintas di Kawasan Malioboro, Kotabaru, Pakualaman, Kraton, dan Kotagede	Penanganan ketertiban lalu lintas di 5 Kawasan Keistimewaan	Rp. 111.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Terbebaskannya lahan seluas 11.292 m2 dan bangunan 2.030 m2 di Jalan Pramuka dan Gambiran	Tersedianya lahan untuk pembangunan 1 kantor KPPD DIY	Tersedianya 1 Sistem Informasi Manajemen Jaringan Jalan di Wilayah DIY	Tersedianya 1 Instrumen dalam pelaksanaan Manajemen Jaringan Jalan di Wilayah DIY				
							Tersedianya 1 Sistem Informasi Manajemen Jaringan Jalan di Wilayah DIY	Tersedianya 1 Instrumen dalam pelaksanaan Manajemen Jaringan Jalan di Wilayah DIY	Tersedianya : a. APILL ATCS TS : 4 Paket; b. Deliniator TS : 400 unit; c. Rambu Lalu Lintas : 120 buah; d. Marka Jalan : 10.000 meter; e. APJ Tenaga Surya Antik : 30 unit; f. Warning Light TS : 8 Unit; g. RPPJ : 12 Buah; h. Traffic Voice : 10 unit; i. APJ	Penyediaan dan pemasangan sarana lalu lintas untuk mempertahankan v/c ratio < 0,75				
							Tersedianya : a. APILL ATCS TS : 4 Paket; b. Deliniator TS : 400 unit; c. Rambu Lalu Lintas : 120 buah; d. Marka Jalan : 10.000 meter; e. APJ Tenaga Surya Antik : 30 unit; f. Warning Light TS : 8 Unit; g. RPPJ : 12 Buah; h. Traffic Voice : 10 unit; i. APJ : 100 unit; j. Pelican Crossing : 6 unit; k. Cermin Tikung : 20 buah;	Penyediaan dan pemasangan sarana lalu lintas untuk mempertahankan v/c ratio < 0,75	Tersedianya : a. Sistem informasi database fasilitas perlengkapan jalan berbasis GIS : 1 Aplikasi	Tersedianya lahan untuk pembangunan 1 kantor KPPD DIY				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Semua SKPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.188.284.512.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Tersedianya : a. Sistem informasi database fasilitas perlengkapan jalan berbasis GIS : 1 Aplikasi b. Inventarisasi Fasilitas Perlengkapan Jalan : 1 dokumen	Tersedianya 1 Instrumen Pengelolaan dan Pengembangan fasilitas perlengkapan jalan berbasis GIS	Tersedianya : a. Sistem informasi database fasilitas perlengkapan jalan berbasis GIS : 1 Aplikasi	Tersedianya 1 Instrumen Pengelolaan dan Pengembangan fasilitas perlengkapan jalan berbasis GIS				
3.05.1.05.01.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG										Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 0,00		
3.05.1.05.01.00.17.001	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di DIY	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			1 laporan tindak lanjut rekomendasi pelanggaran pemanfaatan ruang	Menurunnya pelanggaran pemanfaatan ruang sebesar 0,25%	1 laporan tindak lanjut rekomendasi pemanfaatan ruang	Menurunnya pelanggaran pemanfaatan ruang sebesar 0,25%	Rp. 800.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Terlaksananya pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang selama 12 bulan	Terfasilitasinya permohonan Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 100 %	Terlaksananya pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang selama 12 bulan	Terfasilitasinya permohonan Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 100 %				
							Tersusunnya 1 dokumen Audit Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya 1 Dokumen Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang,	Tersusunnya 1 dokumen Audit Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya 1 Dokumen Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang,				
3.05.1.05.01.00.17.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Badan Pertanahan dan Tata Ruang			Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang 100%	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang 100%	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang 100%	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang 100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

BAB 6 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun pertama RPJMD 2018-2022 yang merupakan RPJMD periode keempat dari 5 tahapan RPJP. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2018 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2018 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

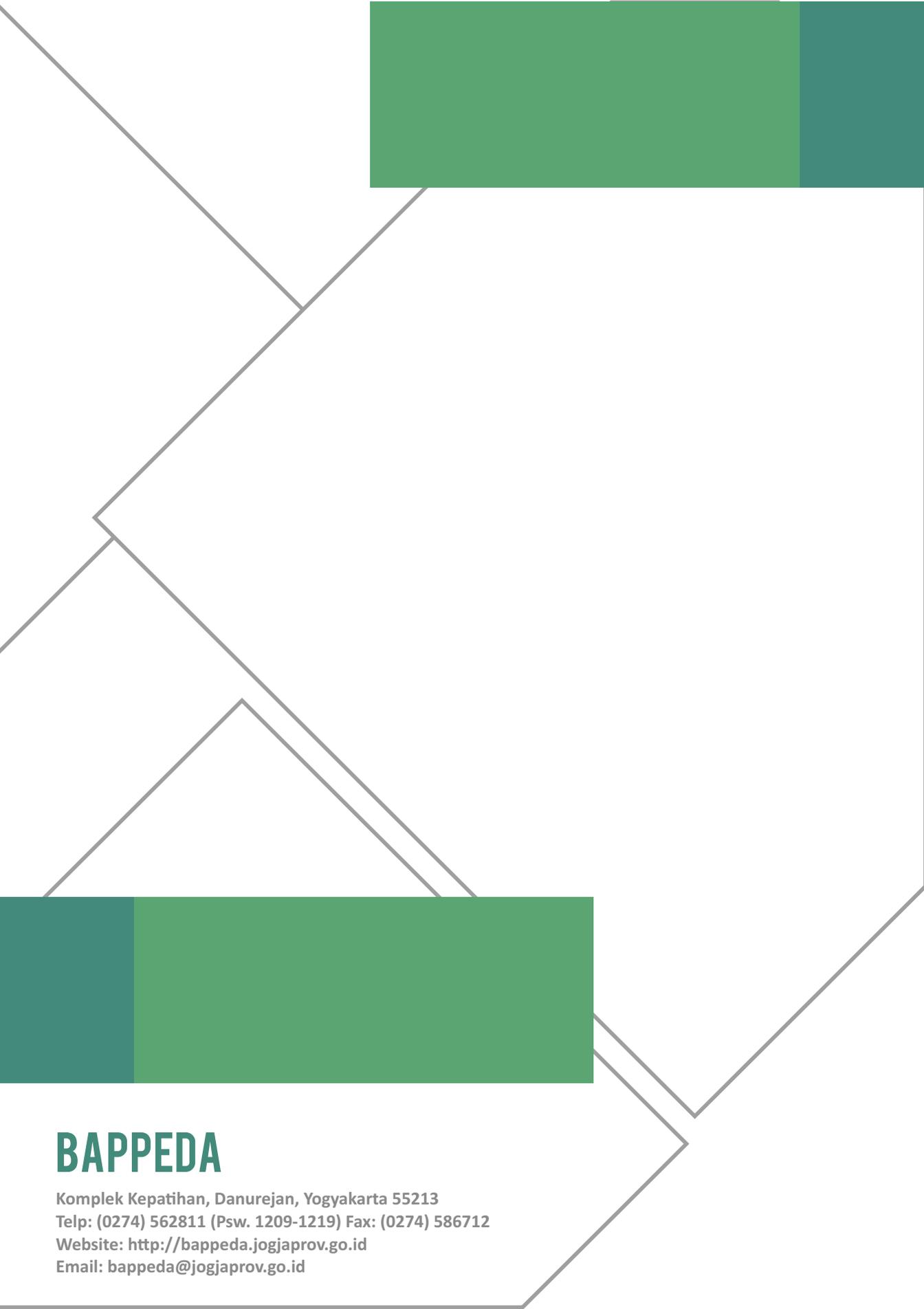
Yogyakarta, 31 Mei 2017

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

The page features a white background with several grey geometric lines forming a series of connected triangles and polygons. Two solid green rectangular blocks are positioned at the top right and bottom left corners. The word 'BAPPEDA' is printed in a bold, dark green, sans-serif font in the bottom left corner.

BAPPEDA

Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213
Telp: (0274) 562811 (Psw. 1209-1219) Fax: (0274) 586712
Website: <http://bappeda.jogjaprov.go.id>
Email: bappeda@jogjaprov.go.id